PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

RKPD KOTA MAGELANG 2020

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

2019

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa T ngah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informa i Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambanhan Lembaran Negara Nomor 6178)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323)
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII		PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN ..... **BAB I-1**
1.1. Latar Belakang ..... BAB I-1
1.1.1. Proses Penyusunan ..... BAB I-3
1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan ..... BAB I-6
1.2. Landasan Hukum ..... BAB I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... BAB I-9
1.3.1. RPJM Nasional ..... BAB I-10
1.3.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 ..... BAB I-10
1.3.3. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... BAB I-10
1.3.4. RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 ..... BAB I-15
1.3.5. RPJMD Kota Magelang ..... BAB I-15
1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral ..... BAB I-15
1.3.7. Renja – OPD ..... BAB I-15
1.4. Maksud dan Tujuan ..... BAB I-16
1.4.1. Maksud ..... BAB I-16
1.4.2. Tujuan ..... BAB I-16
1.5. Sistematika RKPD 2020 ..... BAB I-16

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..... **BAB II-1**
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... BAB II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... BAB II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB II-19
2.1.3. Aspek Layanan Umum ..... BAB II-42
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... BAB II-113
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ..... BAB II-131
2.2.1. Evaluasi Hasil Pencapaian Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2018 ..... BAB II-131
2.2.2. Evaluasi Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada periode tahun 2018 ..... BAB II-138
2.3. Integrasi TPB/ SDGs dalam RKPD Kota Magelang ..... BAB II-146

2.3.1. Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun ..... BAB II-147
2.3.2. Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ..... BAB II-150
2.3.3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia ..... BAB II-151
2.3.4. Tujuan 4: Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua ..... BAB II-154
2.3.5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak ..... BAB II-156
2.3.6. Tujuan 6: Memastikan kesediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua ..... BAB II-157
2.3.7. Tujuan 7: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg insklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yg layak untuk semua ..... BAB II-159
2.3.8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg insklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua ..... BAB II-160
2.3.9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi ..... BAB II-160
2.3.10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara ..... BAB II-161
2.3.11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan .. BAB II-162
2.3.12. Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ..... BAB II-163
2.3.13. Tujuan 13: mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya ..... BAB II-163
2.3.14. Tujuan 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level ..... BAB II-164
2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... BAB II-166
2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... BAB II-166
2.4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... BAB II-167
2.5. ISU STRATEGIS ..... BAB II-174

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 ..... BAB III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... BAB III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah ..... BAB III-1
3.1.2. Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang ..... BAB III-3
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..... BAB III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... BAB III-6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... BAB III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... BAB III-8

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... BAB III-14
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... BAB III-17

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... BAB IV-1
4.1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah ..... BAB IV-1
4.1.1. Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 ..... BAB IV-1
4.1.2. Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 ..... BAB IV-2
4.1.3. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 ..... BAB IV-6
4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ..... BAB IV-20
4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2020 ..... BAB IV-20
4.2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ..... BAB IV-21
4.3. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang ..... BAB IV-40
4.3.1. Sustainable Development Goals ..... BAB IV-40
4.3.2. Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) ..... BAB IV-40
4.4. Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang ..... BAB IV-43
4.4.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah ..... BAB IV-43
4.4.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah ..... BAB IV-46
4.5. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... BAB IV-59
4.6. Inovasi Pembangunan ..... BAB IV-59
4.6.1. Inovasi Perencanaan ..... BAB IV-59
4.6.2. Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan ..... BAB IV-60

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... BAB V-1
5.1. Kategorisasi Rencana Program Prioritas ..... BAB V-1
5.2. Program Prioritas I ..... BAB V-1
5.2.1. Program Prioritas Tema PembangunanTahun 2020 ..... BAB V-1
5.2.2. Akomodasi Hasil Musrenbang ..... BAB V-6
5.2.3. Program Prioritas Hasil FGD ..... BAB V-11
5.2.4. Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD ..... BAB V-32
5.2.5. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional ..... BAB V-34
5.3. Program Prioritas II ..... BAB V-36
5.4. Program Prioritas III ..... BAB V-36

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... BAB VI-1

BAB **7 PENUTUP ..... BAB VII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB I-6
Tabel 1.2 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB I-7
Tabel 1.3 Pendekatan Susbstansi RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB I-7
Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang ..... BAB II-3
Tabel 2.2 Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2014-semester 1 Tahun 2018 ..... BAB II-8
Tabel 2.3 Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2018 ..... BAB II-9
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2014- 2018 ..... BAB II-15
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 - 2018 ..... BAB II-15
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2014-2018 (dalam jiwa dan persen) ..... BAB II-6
Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang 2014- Tahun 2018 (dalam jiwa dan persen) ..... BAB II-17
Tabel 2.8 Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2014-Smt 1 2018 ..... BAB II-17
Tabel 2.9 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012-Semester 1 tahun 2018 ..... BAB II-18
Tabel 2.10 Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2014-Smt 1 2018 di Kota Magelang ..... BAB II-19
Tabel 2.11 PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha ..... BAB II-20
Tabel 2.12 PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran ..... BAB II-22
Tabel 2.13 Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016 ..... BAB II-23
Tabel 2.14 PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018 ..... BAB II-25
Tabel 2.15 Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2018 ..... BAB II-26
Tabel 2.16 Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2011-2018 ..... BAB II-27
Tabel 2.17 Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2017 dan Tahun 2018 ..... BAB II-35
Tabel 2.18 Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2010-2018 ..... BAB II-36
Tabel 2.19 Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2017 ..... BAB II-36
Tabel 2.20 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB II-38
Tabel 2.21 Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Magelang Tahun 2018 ..... BAB II-39
Tabel 2.22 Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah ..... BAB II-40
Tabel 2.23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018 ..... BAB II-42
Tabel 2.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018 ..... BAB II-46
Tabel 2.25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018 ..... BAB II-49
Tabel 2.26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018 ..... BAB II-51
Tabel 2.27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ..... BAB II-53

Tabel 2.28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 ..... BAB II-56
Tabel 2.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018 ..... BAB II-60
Tabel 2.30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 ..... BAB II-61
Tabel 2.31 Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan Tahun 2018 ..... BAB II-63
Tabel 2.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ..... BAB II-63
Tabel 2.33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2018 ..... BAB II-65
Tabel 2.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 ..... BAB II-67
Tabel 2.35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 ..... BAB II-68
Tabel 2.36 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ..... BAB II-70
Tabel 2.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ..... BAB II-71
Tabel 2.38 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 ..... BAB II-73
Tabel 2.39 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018 ..... BAB II-75
Tabel 2.40 Load Factor Angkutan Umum di Kota Magelang ..... BAB II-78
Tabel 2.41 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ..... BAB II-78
Tabel 2.42 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2018 BAB II-81
Tabel 2.43 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018..... BAB II-84
Tabel 2.44 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018 ..... BAB II-85
Tabel 2.45 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018 ..... BAB II-86
Tabel 2.46 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018 ..... BAB II-87
Tabel 2.47 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018 ..... BAB II-88
Tabel 2.48 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018 ..... BAB II-89
Tabel 2.49 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018 ..... BAB II-90
Tabel 2.50 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 ..... BAB II-92
Tabel 2.51 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018 ..... BAB II-93
Tabel 2.52 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2012-2018..... BAB II-94
Tabel 2.53 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 ..... BAB II-94
Tabel 2.54 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2018 ..... BAB II-96
Tabel 2.55 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 ..... BAB II-97
Tabel 2.56 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018 ..... BAB II-99
Tabel 2.57 Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018 ..... BAB II-100
Tabel 2.58 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain Tahun 2018 ..... BAB II-101

Tabel 2.59 Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan Tahun 2018 ..... BAB II-104
Tabel 2.60 Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2018 ..... BAB II-106
Tabel 2.61 Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010-2018 ..... BAB II-106
Tabel 2.62 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 ..... BAB II-107
Tabel 2.63 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 ..... BAB II-108
Tabel 2.64 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 ..... BAB II-110
Tabel 2.65 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2018 ..... BAB II-112
Tabel 2.66 Perbandingan Persentase Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan, dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2014 – 2017 ..... BAB II-114
Tabel 2.67 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017 ..... BAB II-115
Tabel 2.68 Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang ..... BAB II-117
Tabel 2.69 Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 ..... BAB II-118
Tabel 2.70 Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 ..... BAB II-122
Tabel 2.71 Jenis Fasilitas Penginapan di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-123
Tabel 2.72 Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2011 – Semester 1 2018 ..... BAB II-124
Tabel 2.73 Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017 ..... BAB II-126
Tabel 2.74 Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2014 – Semester 1 2018 ..... BAB II-127
Tabel 2.75 Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2012 – 2018 ..... BAB II-128
Tabel 2.76 Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2018 ..... BAB II-128
Tabel 2.77 Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2010 – 2018 ..... BAB II-128
Tabel 2.78 Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010 - 2017 ..... BAB II-129
Tabel 2.79 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2018 ..... BAB II-130
Tabel 2.80 Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Magelang Tahun 2015-2018 ..... BAB II-131
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2018 ..... BAB II-132
Tabel 2.82 Capaian Indikator KInerja Daerah pada Akhir Tahun 2018 ..... BAB II-139
Tabel 2.83 Target dan capaian indikator Tujuan 1 TPB Kota Magelang hingga tahun 2018 di Kota Magelang ..... BAB II-147
Tabel 2.84 Target dan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan BerkelanjutanTujuan 2 Tahun 2018 ..... BAB II-150
Tabel 2.85 Target dan Capaian Indikator Tujuan 3 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-151
Tabel 2.86 Target dan Capaian Indikator TPB Tujuan 4 Hingga Tahun 2018 Kota Magelang ..... BAB II-154

Tabel 2.87 Target dan Capaian Indikator Tujuan 5 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-156
Tabel 2.88 Capaian Target Tujuan 6 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-157
Tabel 2.89 Target dan Capaian Indikator Tujuan 7 TPB Kota Magelang Tahun 2018 ..... BAB II-160
Tabel 2.90 Target dan Capaian Indikator Tujuan 8 TPB di Kota Magelang HIngga Tahun 2018 ..... BAB II-160
Tabel 2.91 Target dan Capaian Indikator Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-161
Tabel 2.92 Target dan Capaian Indikator Tujuan 10 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-161
Tabel 2.93 Target dan Capaian Indikator Tujuan 11 TPB Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-162
Tabel 2.94 Target dan Capaian Indikator Tujuan 12 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018 ..... BAB II-163
Tabel 2.95 Target dan Capaian Indikator Tujuan 13 TPB di Kota Magelang HIngga Tahun 2018 ..... BAB II-164
Tabel 2.96 Target dan Capaian Indikator Tujuan 16 TPB Kota Magelang Tahun 2018 ..... BAB II-164
Tabel 2.97 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Magelang ..... BAB II-171
Tabel 3.1 Realisasi Ekonomi Makro Nasional 2016 & Asumsi RAPBN 2015-2018 ..... BAB III-1
Tabel 3.2 Realisasi 2018 dan Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2019 ..... BAB III-2
Tabel 3.3 Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2018 dan sasaran makro 20120 ..... BAB III-2
Tabel 3.4 Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018 ..... BAB III-3
Tabel 3.5 Prediksi PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2019 ..... BAB III-4
Tabel 3.6 Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2017 - 2020 ..... BAB III-7
Tabel 3.7 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-8
Tabel 3.8 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-9
Tabel 3.9 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-10
Tabel 3.10 Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-10
Tabel 3.11 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-10
Tabel 3.12 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-11
Tabel 3.13 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-11
Tabel 3.14 Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 ..... BAB III-12
Tabel 3.15 Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 ..... BAB III-12
Tabel 3.16 Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 ..... BAB III-12
Tabel 3.17 Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-13
Tabel 3.18 Kontribusi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018 ..... BAB III-13

Tabel 3.19 Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018 ..... BAB III-13
Tabel 3.20 Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018..... BAB III-14
Tabel 3.21 Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018 ..... BAB III-14
Tabel 3.22 Kontribusi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018..... BAB III-14
Tabel 3.23 Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018..... BAB III-16
Tabel 3.24 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018 ..... BAB III-16
Tabel 3.25 Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2017 - 2020..... BAB III-17
Tabel 3.26 Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2017-2020..... BAB III-18
Tabel 4.1 Penjelasan Visi ..... BAB IV-1
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Keempat (RKPD Kota Magelang tahun 2020)..... BAB IV-9
Tabel 4.3 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Keempat (RKPD Kota Magelang Tahun 2020) ..... BAB IV-16
Tabel 4.4 Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan RKPD Kota Magelang Tahun 2020..... BAB IV-21
Tabel 4.5 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Kota Magelang ..... BAB IV-29
Tabel 4.6 Keterkaitan Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang..... BAB IV-34
Tabel 4.7 Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang ..... BAB IV-34
Tabel 4.8 Keterkaitan antara Fokus Prioritas dengan Arah Kebijakan Tahun 2020 ..... BAB IV-36
Tabel 4.9 Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawab Isu Strategis..... BAB IV-38
Tabel 4.10 Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah ..... BAB IV-60
Tabel 4.11 Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020..... BAB IV-61
Tabel 5.1 Kategorisasi Program Prioritas ..... BAB V-1
Tabel 5.2 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2020..... BAB V-1
Tabel 5.3 Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020 ..... BAB V-6
Tabel 5.4 Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB V-11
Tabel 5.5 Program Penanggulangan Kemiskinan..... BAB V-11
Tabel 5.6 Program Kota Layak Anak ..... BAB V-16
Tabel 5.7 Program Manajemen Persampahan ..... BAB V-23
Tabel 5.8 Program Penguatan Implementasi MKSB ..... BAB V-24
Tabel 5.9 Penguatan Implementasi Smart City..... BAB V-26

Tabel 5.10 Program Prioritas SDGs..... BAB V-28
Tabel 5.11 Rekapitulasi Akomodasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... BAB V-32
Tabel 5.12 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional ..... BAB V-34
Tabel 5.13 Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020..... BAB V-37
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB VI-2
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama ..... BAB VI-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ..... BAB I-5
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya ..... BAB I-9
Gambar 1.3 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial ..... BAB I-10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Magelang ..... BAB II-2
Gambar 2.2 Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendari 64 Tahun 2017 ..... BAB II-4
Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Magelang ..... BAB II-5
Gambar 2.4 Gambar Pola Kelerengan Kota Magelang ..... BAB II-6
Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Kota Magelang ..... BAB II-10
Gambar 2.6 Peta Kawasan Strategis Kota Magelang..... BAB II-12
Gambar 2.7 Peta Tingkat Bahaya Bencana Tanah Longsor Kota Magelang ..... BAB II-13
Gambar 2.8 PDRB (dalam Triliun Rp) dan Indeks Perkembangan PDRB (dalam %) di Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2017 dan Prediksi Tahun 2018 ..... BAB II-20
Gambar 2.9 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhannya di Kota Magelang adhb, 2014-2017 ..... BAB II-21
Gambar 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)..... BAB II-23
Gambar 2.11 Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2017 ..... BAB II-24
Gambar 2.12 PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun Kota Magelang, 2014-2017 dan Prediksi 2018 ..... BAB II-25
Gambar 2.13 Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2013-2018 ..... BAB II-26
Gambar 2.14 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Magelang..... BAB II-28
Gambar 2.15 Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2010-2018..... BAB II-29
Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017..... BAB II-30
Gambar 2.17 Perkembangan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2014-2018..... BAB II-31
Gambar 2.18 Pengeluaran PMTB adhb(dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB (dalam %) di Kota Magelang, 2014-2017 ..... BAB II-32
Gambar 2.19 Pola Pertumbuhan Ekspor dan Impor di Kota Magelang, 2014-2017..... BAB II-33
Gambar 2.20 Tren Pertumbuhan IPM Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (2014-2017)..... BAB II-34
Gambar 2.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang..... BAB II-37
Gambar 2.22 Perkembangan penduduk menurut kelompok umur ..... BAB II-130
Gambar 4.1 Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2020 ..... BAB IV-20
Gambar 4.2 Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya ..... BAB IV-44
Gambar 4.3 Wilayah Kawasan Strategis Nasional Borobudur..... BAB IV-45
Gambar 4.4 Peta Rencana Pembagian BWK..... BAB IV-47

Gambar 4.5 Peta Kawasan Strategis Kota Magelang ..... BAB IV-48
Gambar 4.6 Peta Pola Ruang BWK I ..... BAB IV-49
Gambar 4.7 Pola Ruang BWK II ..... BAB IV-52
Gambar 4.8 Peta Pola Ruang BWK III ..... BAB IV-54
Gambar 4.9 Peta Pola Ruang BWK IV ..... BAB IV-56
Gambar 4.10 Peta Pola Ruang BWK V ..... BAB IV-57

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kota Magelang Tahun 2020 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam melandasi pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang tahun 2020, karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Magelang periode 2016-2021, yang akan mengakhiri masa pengabdiannya pada tanggal 16 Pebruari 2021. Sedangkan dari sudut pandang perencanaan, pada tahun 2020 prioritasi dalam perencanaan akan banyak diberikan untuk mengakomodasi akselerasi pencapaian target-target RPJMD 2016-2021. RKPD Kota Magelang yang proses penyusunannya dilakukan di tahun 2019 juga mempertimbangkan dinamika politik di tingkat nasional terutama hasil Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019, yang sesuai jadwal dari KPU penetapan presiden terpilih pada akhir Juni 2019 atau setelah RKPD 2020 ditetapkan. Visi-misi serta agenda prioritas presiden terpilih tentunya menjadi pertimbangan untuk diakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2020.

Tahun 2020 peran dan fungsi Magelang sebagai kota jasa sudah harus muncul, oleh karena itu fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk serta didukung citra dan penampilan fisik kota yang semakin indah dan menarik. Tema **promotif-ekspansif** bersama mitra akan menjadi landasan dalam meningkatkan promosi yang diarahkan pada tercapainya ekspansi produk unggulan daerah dan layanan publik. Ikon tahun 2020 yang dirancang adalah pelaksanaan rangkaian even yang dikemas dalam branding **Magelang Moncer Serius 2020**.

Sesuai amanat dari regulasi tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah. Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka dalam proses perencanaan RKPD 2020 mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip perumusan serta pendekatan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah, serta semakin meningkatnya capaian kinerja makro daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk mengakselerasi capaian kinerja makro daerah tentunya tidak hanya ditopang dari investasi pemerintah. Investasi dan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat juga akan didorong untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Magelang.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanan pembangunan yang baik akan mendorong

hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan dukungan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Merujuk pada regulasi teknis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi pijakan formal sebagai pijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Permendagri tersebut mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, yang didalamnya memuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, RPJMD dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan untuk periode waktu 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. RKPD Kota Magelang tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun tahun 2019 untuk dilaksanakan di tahun 2020. Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum

APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Magelang yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD.

1.1.1. Proses Penyusunan

RKPD Kota Magelang Tahun 2020 ini merupakan perencanaan yang disusun tahun 2019 dan melandasi pelaksanaan pembangunan tahun ke-empat RPJMD 2016-2021. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan dilaksanakan secara runtut dalam 6 (enam) tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

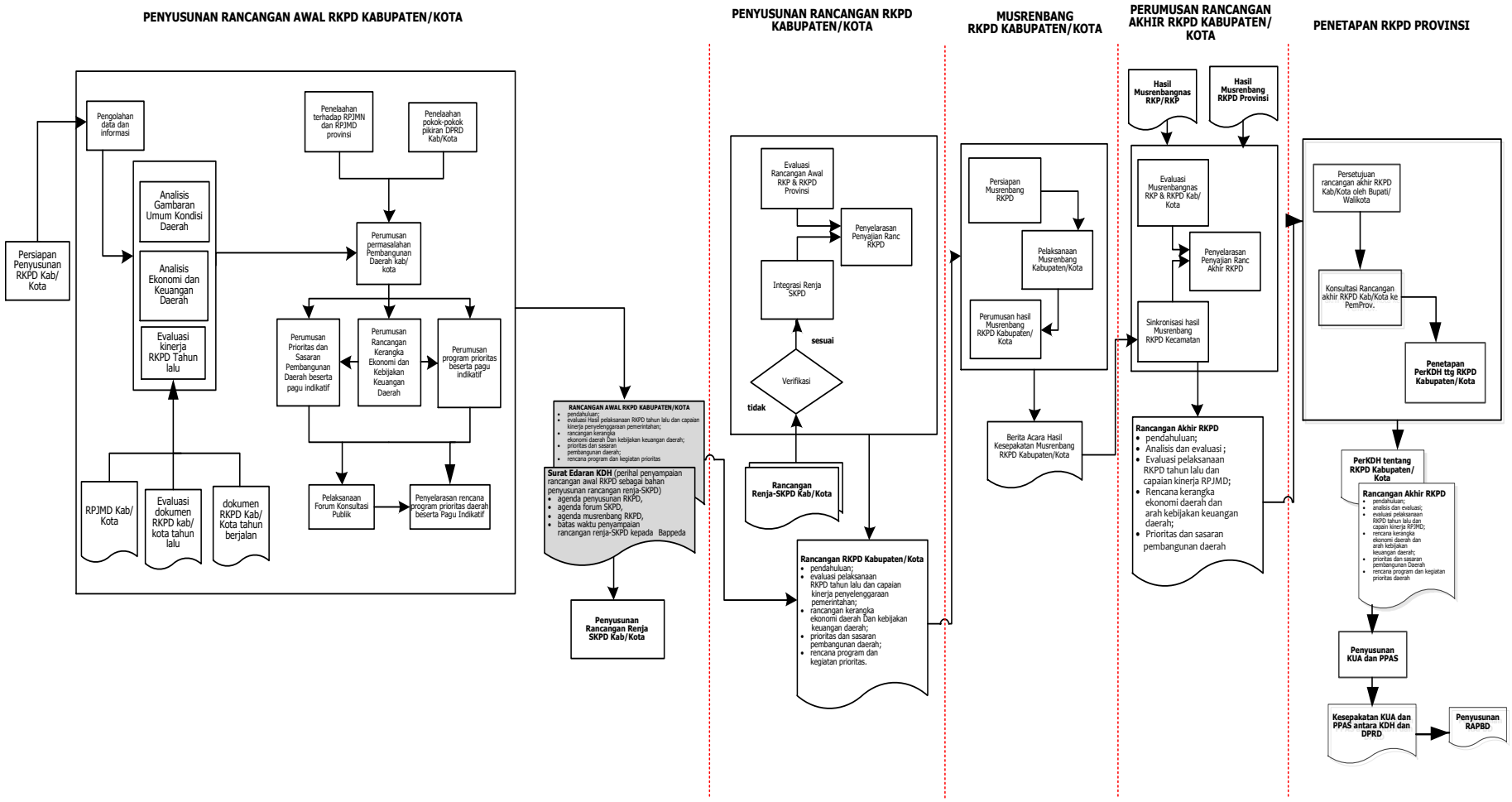
Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020, Tim penyusun terdiri dari personil lintas OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

Penyusunan RKPD 2020 diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD. Proses penyusunan ini sudah dimulai pada bulan Desember 2018 dengan menerapkan pendekatan perencanaan baik yang berorientasi pada proses maupun substansi.

Tahapan selanjutnya adalah perumusan Rancangan RKPD yang pada dasarnya memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan tema serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Elaborasi dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk diselaraskan dengan program-program prioritas yang dihasilkan dari penelaahan Rancangan Renja OPD. Proses teknokratis ditempuh melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi tim penyusun, pelaksanaan Forum OPD, pelaksanaan *Focus Group Discussion*, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta hasil konsultasi publik dan musrenbang kecamatan-kelurahan.

Tahapan pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan dengan mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD, serta terhadap hasil telaahan pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat oleh para anggota DPRD, menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk konfirmasi tentang indikator kinerjanya, serta untuk memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Dokumen rancangan RKPD ini menjadi bagian dari materi Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional dan hasil konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penyelarasan Akhir ini dikonsultasikan kepada TAPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2020 dilaksanakan sesuai regulasi dan disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya yaitu tahun 2018 (tahun n-1) yang selanjutnya akan menjadi Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Magelang. Oleh karenanya, maka menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah dan mengimplementasikannya secara efektif dan efisien.

Upaya untuk memastikan output hasil penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 berkualitas, taat regulasi dan operasional dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

Tabel 1.1
Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang 2020 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD.
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 serta RKP Tahun 2020.
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 dengan isu strategis.
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan.
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dengan pagu anggaran OPD.
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dengan program/kegiatan OPD.
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2020.
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2020
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2020 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota Magelang

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dilakukan dengan beberapa pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/top down* serta politik. Detail konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH *(BOTTOM- UP)*	1. Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.
	2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.
DARI ATAS *(TOP-DOWN)*	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2020.
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.
TEKNOKRATIK	5. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	6. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.
	7. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.
	8. Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD periode tahun 2018.
PARTISIPATIF	9. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
POLITIK	10. Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
	11. Mempertimbangan dan Pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.
	12. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kota Magelang Tahun 2020 memperhatikan hal sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pendekatan Susbstansi RKPD Kota Magelang Tahun 2020

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

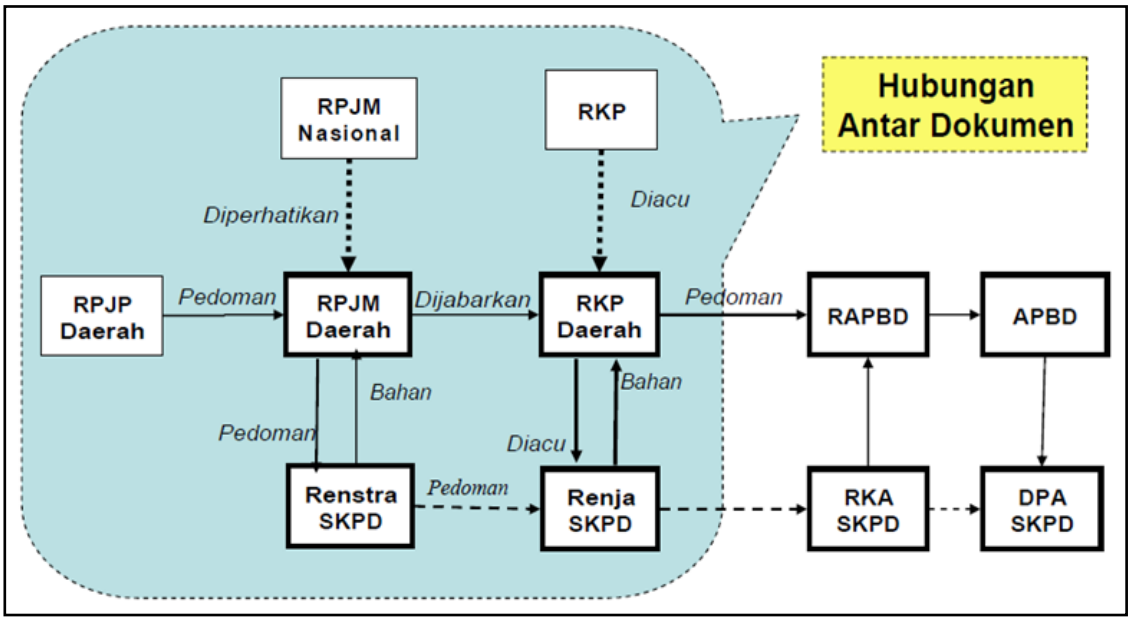
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 Tanggal 27 Desember 2018 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

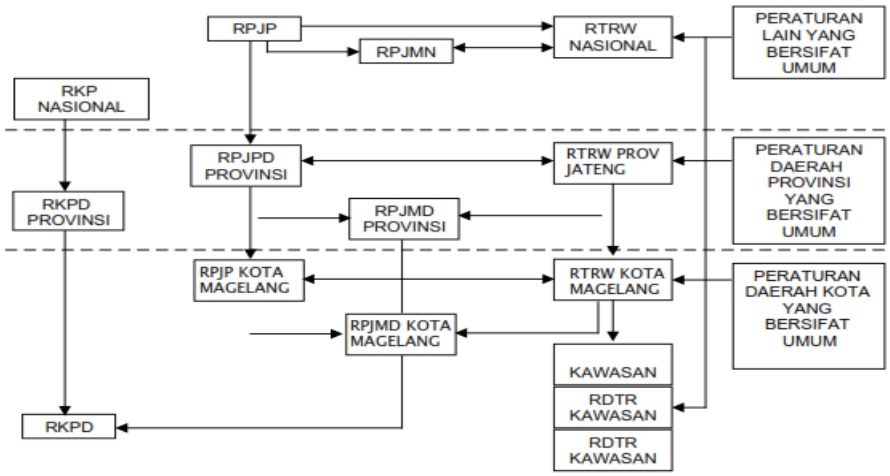
RKPD Kota Magelang Tahun 2020 yang disusun dengan mengusung **Tema Promotif-Ekspansif Bersama Mitra** merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Magelang 2016-2021, khususnya pada pelaksanaan tahun ke-4 dokumen rencana pembangunan jangka menengah tersebut. Sedangkan RPJMD Kota Magelang yang disusun tahun 2016 dalam proses penyusunannya berpedoman ada RPJPD 2005-2025 serta memperhatikan agenda nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019. Rancangan Awal RKPD 2020 yang menjadi awal proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Kota Magelang, sudah mengacu pada Rancangan Awal RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah maupun Rancangan Awal RKP 2020.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka didahului dengan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Skema hubungan antar dokumen bisa dilihat pada Gambar 1-2 di bawah.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
Sumber: UU No 25 Tahun 2004

Sebagai pengejawantahan dari pendekatan perencanaan secara substansi, maka pertimbangan aspek spasial menjadi utama, oleh karena itu sebagai acuan yang digunakan adalah dokumen penataan ruang daerah yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2013. Skema kedudukan RKPD terhadap RTRWK tertuang dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3
Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial
Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJM Nasional

Rujukan penting dalam RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 adalah kepada 3 (tiga) dokumen lampiran Perpres tersebut, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Agenda Pembangunan Nasional”, (ii) Buku II dengan judul: ”Agenda Pembangunan Bidang”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Agenda Pembangunan Wilayah”.

Sebagai penjabaran normatif perencanaan tahun ke empat RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dan mengacu pada agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, maka diharapkan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

1.3.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

RKPD Kota Magelang Tahun 2020 juga merujuk pada RKP Tahun 2020. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang kepada kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2020.

1.3.3. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen rujukan lain adalah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 Tanggal 27 Desember 2018 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020, diharapkan agar Perencanaan pembangunan daerah di setiap daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan daerah disusun dalam program/kegiatan berbasis kinerja dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, program/proyek nasional dan provinsi, inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur
2. Pengalokasian anggaran indikatif rencana program/kegiatan berbasiskan *money follow programme priority* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bersinergi dengan semua potensi yang ada
3. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis di antaranya kemiskinan, pengangguran, kualitas dan daya saing perekonomian daerah, daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, pangan dan energi, kesenjangan wilayah, dan tata kelola pemerintahan.
4. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan.
5. Penyelenggaraan Musrenbang agar dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, akuntabel, efisien, efektif dan cermat dalam menangkap aspirasi publik .

1.3.3.1. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's);
4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan berbasis kinerja (berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur), bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, serta inovatif dan kreatif dengan melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target sasaran, penyelesaian permasalahan dan isu-isu pembangunan;
5. Rencana program/kegiatan diprioritaskan pula untuk implementasi 10 (sepuluh) program unggulan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang meliputi:

1) Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidikan agama;
3) Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, Penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7) Pengembangan transportasi masal; revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

6. Pengalokasian anggaran indikatif rencana program/kegiatan berbasiskan *money follow programme priority* yang efektif, efisien dan akuntabel untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non pemerintah (di antaranya kerjasama/kemitraan/keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
8. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota agar meneruskan dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini pada unsur Pemerintahan di bawahnya (Kecamatan, Desa dan Kelurahan).

1.3.3.2. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.3.3.2.1. Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan.
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia.
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha.
4. Keberuntungan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.
5. Kedaulatan pangan dan energi.

6. Kesenjangan Wilayah.
7. Tata Kelola Pemerintahan**.**

1.3.3.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 ditujukan untuk **"Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia",** dengan prioritas meliputi :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada :
   a. Pengurangan Kemiskinan, melalui (a) upaya penyediaan *basic life access*; (b) penguatan *sustainable livelihood*, serta (c) optimalisasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah;
   b. Menurunkan angka pengangguran, dengan prioritas pada (a) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match;* (b) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum; (c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja di antaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fakus pada (a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas; (b) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan; (c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar da inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan kebrlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. **Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah,** fokus pada (a) peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*); (b) peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan); (c) peningkatan manajemen pemerintah yang bersih dan akuntabel; (d) perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya; (e) peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangu konflik bernuasa SARA; (f) peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

1.3.3.2.3. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sasaran makro pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi antara 5,4 – 5,8%
2. PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta
3. Inflasi pada angka 3,0 $\pm$ 1
4. Kemiskinan turun menjadi 9,81 %
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%
6. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72

7. Indeks Gini sebesar 0,34
8. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25
9. Indeks Williamson sebesar 0,59

1.3.3.2.4. Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan, pengembangan potensi dan meningkatkan daya saing wilayah, beberapa aspek yang harus menjadi perhatian adalah:

1) Integrasi dan sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2020.
2) Keterpaduan dan dukungan penanganan program/proyek strategis/prioritas nasional di Jawa Tengah.
3) Arah kebijakan pembangunan kewilayahan, dan untuk **Wilayah Purwomanggung**, arah pengembangannya adalah untuk "Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan", melalui Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas; Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen) dan fasilitasi pembanguan Bendungan Bener; pengelolaan kelestarian lingkungan (sampah); pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.
4) Sinegritas kabupaten/kota di Wilayah Purwomanggung dalam mencapai sasaran indikator makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, sebagai berikut :

No	Kab/Kota	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	KEMISKINAN (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Purworejo	5,80-6,20	9,84 – 10,84	3,6	73,17
2	Kabupaten Wonosobo	5,80-6,20	15,68 – 16,68	5,01	69,06
3	Kabupaten Magelang	5,30-5,70	10,75 – 11,75	2,30-2,40	69,34
4	Kabupaten Temanggung	5,30-5,70	10,62 – 11,62	2,97	69,54
5	**Kota Magelang**	**5,30-5,70**	**7,50 – 8,50**	**5,2-5**	**78,00**
	PROVINSI JAWA TENGAH	**5,40 – 5,8**	**9,81**	**4,33**	**72**

5) Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa antara lain diarahkan pada :
   a. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/Kota/desa, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
   b. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapauan keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
   c. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota/desa.
   d. Kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian, pariwisata dan kualitas SDM serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.

1.3.4. RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017, bahwa dalam pendekatan penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya adalah melalui pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap struktur dan pola ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Dengan demikian, maka pemanfaatan ruang konsisten dengan perencanaan tata ruang, tertib tata ruang, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, kesenjangan antar wilayah terkurangi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, namun sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan wilayah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen penataan ruang akan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

1.3.5. RPJMD Kota Magelang

Tema Tahun Perencanaan 2019 yang diimplementasikan di tahun 2020 merupakan tahun keempat RPJMD Kota Magelang adalah **Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra**. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya pewujudan kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindak lanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Guna mencapai kondisi tersebut, diasumsikan pada tahun 2018-2019 di Kota Magelang sudah tercapai kondisi:

a. terbangunnya sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi;
b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat;
c. kondusvfitas kota semakin baik karena internalisasi nilai religiusitas semakin berkembang.

Berdasarkan pada kondisi yang diasumsikan sudah tercipta tersebut, maka telah ditetapkan fokus prioritas tahun 2020. Fokus prioritas ditindaklanjuti dengan arah kebijakan, prioritas urusan serta program unggulan yang secara rinci akan dibahas di Bab IV.

1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Blueprint Universal Design, Pencapaian SDGS, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7. Renja – OPD

Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan di tingkat OPD, adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun Renja OPD, Rancangan awalnya dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dan forum perangkat daerah untuk memdapatkan saran dan pertimbangan. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda untuk menjaga sinergitas substansinya dengan RKPD. Bappeda akan menindak lanjuti dengan verifikasi Renja OPD untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja OPD dengan rancangan awal RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang merupakan perencanaan pembangunan perangkat daerah periode waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2020 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika RKPD 2020

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD 2020 yang memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RKPD, agar urgensitas dan kepentingan penyusunan serta sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2018 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD yang menguraikan tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2018 dengan memperhatikan substansi dokumen RPJMD 2016-2021 dan substansi dokumen RKPD tahun 2019, dan gambaran permasalahan pembangunan daerah yang disajikan menurut urusan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi dan prediksi capaian indikator makro, kondisi ekonomi tahun 2019, prediksi 2020, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab IV juga menyajikan persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai landasan dalam permusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019. Dibagian akhir disajikan inovasi yang dilakukan guna mendukung perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 diperlukan sinergitas yang kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

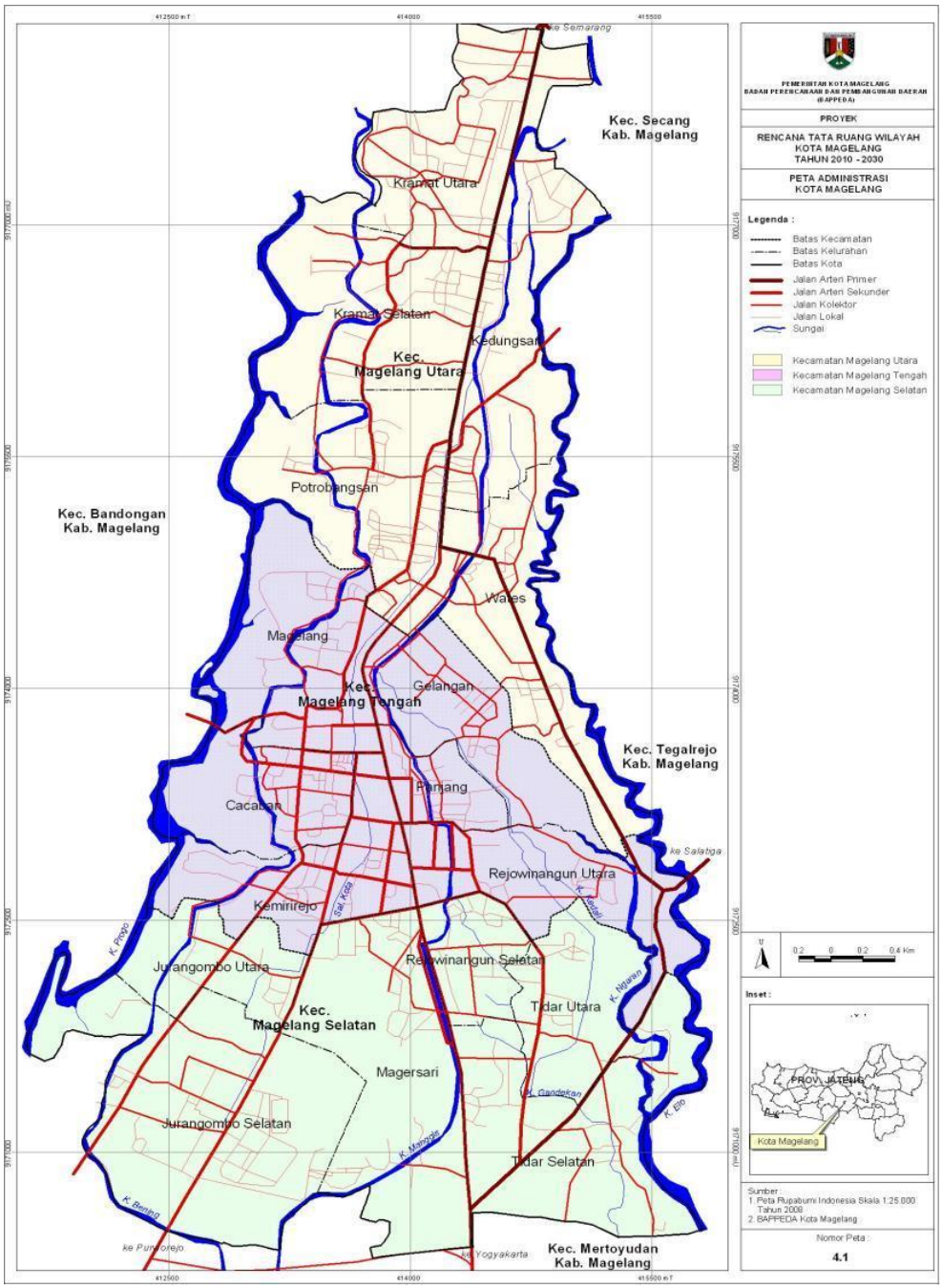
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan salah satu Kota terkecil di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan dengan rata-rata luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km². Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang mendapatkan perluasan wilayah terkait dengan penyesuaian batas wilayah Kota Magelang seluas 0.03 km2, sehingga total luasan wilayah Kota Magelang saat ini seluas 1.854 Ha (18,54 km2).

Sebagai Kota terkecil di Jawa Tengah yang hanya menempati areal sebesar 0,66% dari keseluruhan luas Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 Kelurahan, gambaran secara administrasi terlihat pada gambar di bawah :



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Magelang

Sumber : RTRW Kota Magelang 2011 – 2031

Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/ kelurahan di Kota Magelang Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

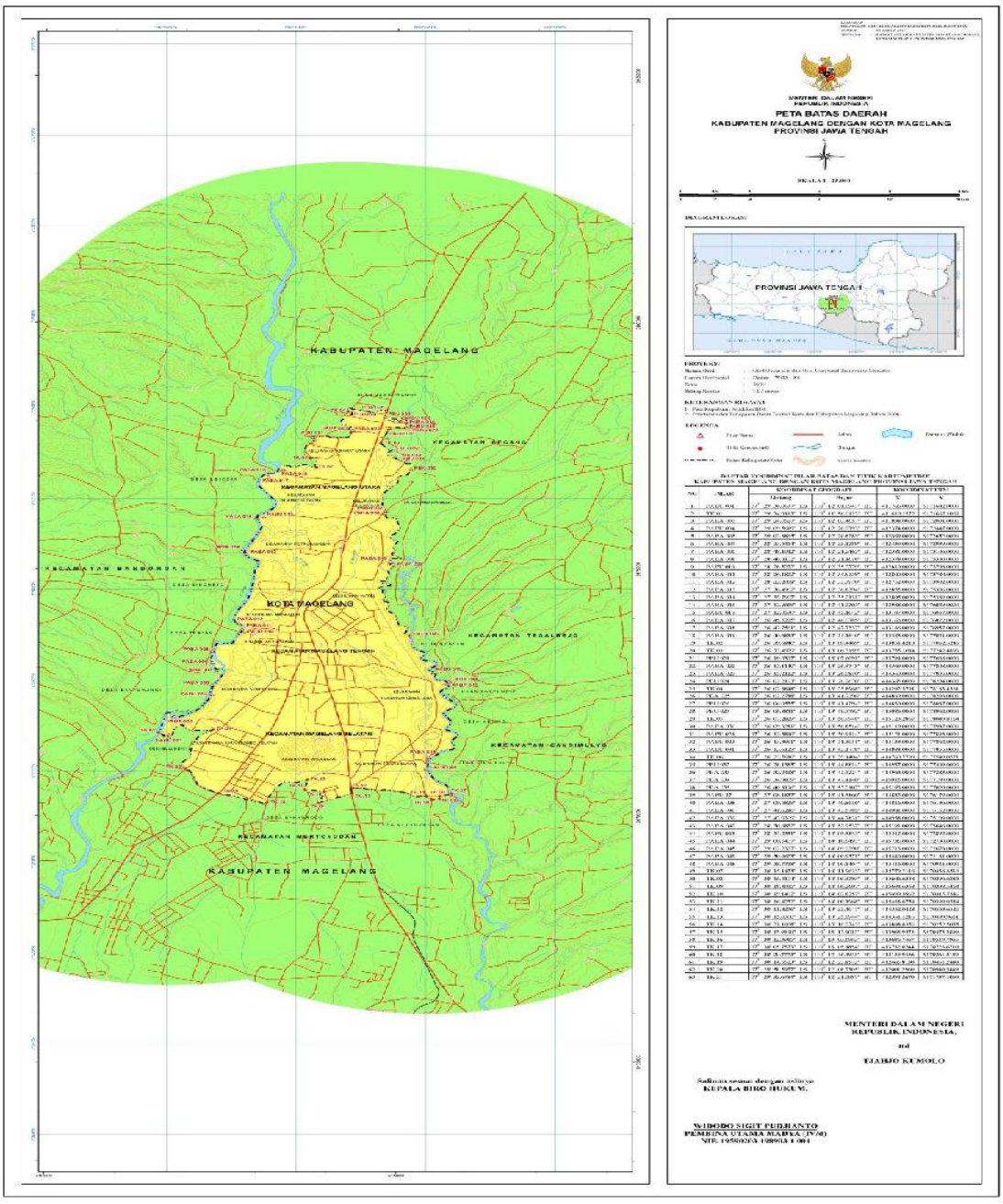
No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
01.	**KEC. MAGELANG SELATAN**	**713.15**	**38,47**
	1. Kel. Jurangombo Utara	65.66	3.54
	2. Kel. Jurangombo Selatan	212.07	11.44
	3. Kel. Magersari	156.49	8.44
	4. Kel. Tidar Utara	110.11	5.94
	5. Kel. Tidar Selatan	131.51	7,09
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	37.31	2,01
02.	**KEC. MAGELANG TENGAH**	**510.11**	**27.52**
	1. Kel. Magelang	123.67	6.67
	2. Kel. Kemirirejo	85.81	4,63
	3. Kel. Cacaban	85.75	4,63
	4. Kel. Rejowinangun Utara	90.50	4.88
	5. Kel. Panjang	35.52	1.92
	6. Kel. Gelangan	88.87	4,79
03.	**KEC. MAGELANG UTARA**	**630.37**	**34.01**
	1. Kel. Wates	118.0	6,37
	2. Kel. Potrobangsan	135.13	7,29
	3. Kel. Kedungsari	132.33	7.14
	4. Kel. Kramat Utara	99.78	5.38
	5. Kel. Kramat Selatan	145.14	7.38
	JUMLAH	**1853.64**	**100,00**

Sumber: Data Strategis Kota Magelang, 2018

Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta–Borobudur–Kopeng-Ketep Pass- dataran tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam kategori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwo-manggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Kawasan ini memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Dengan ditetapkannya Kota Magelang dalam kategori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) maka Kota Magelang harus mampu melayani beberapa Kabupaten dan Kota yang berada disekitarnya yang termasuk dalam PKW.

Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten

Magelang; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Adapun batas wilayah untuk Kota Magelang berdasarkan Permendagri nomor 64 Tahun 2017, sebagai berikut :



Gambar 2.2
Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendari 64 Tahun 2017

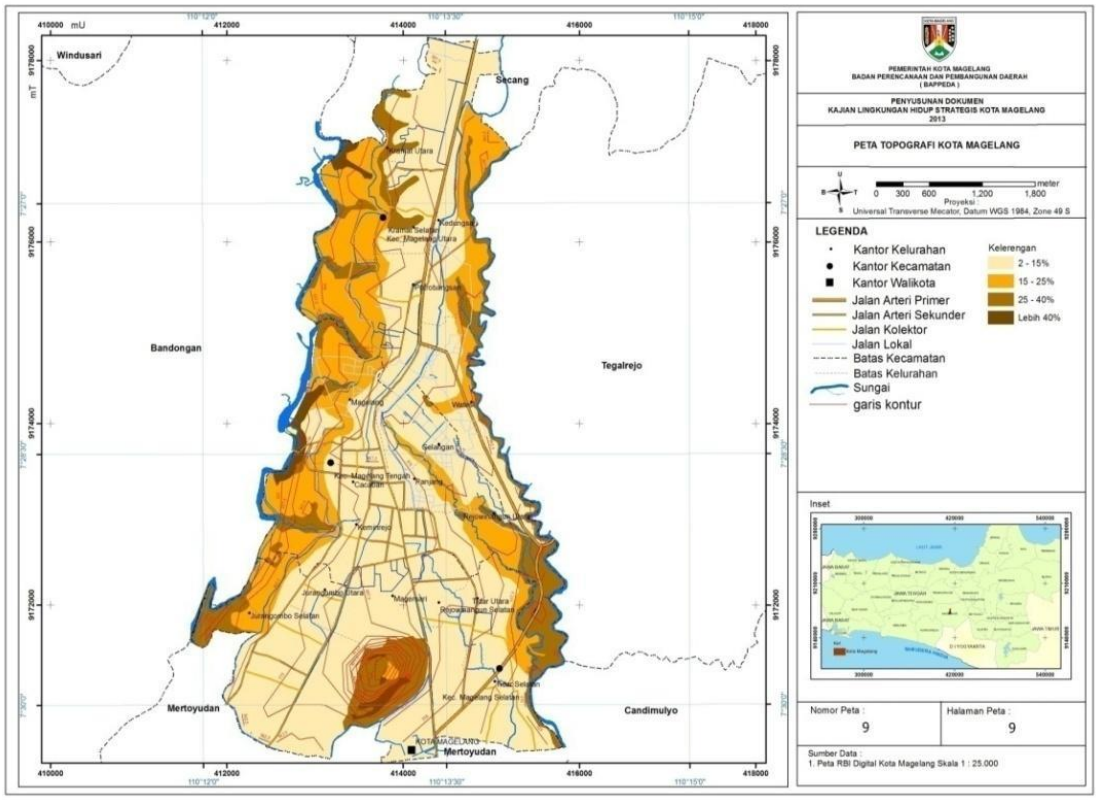
2.1.1.2. Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal

berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2–5%.

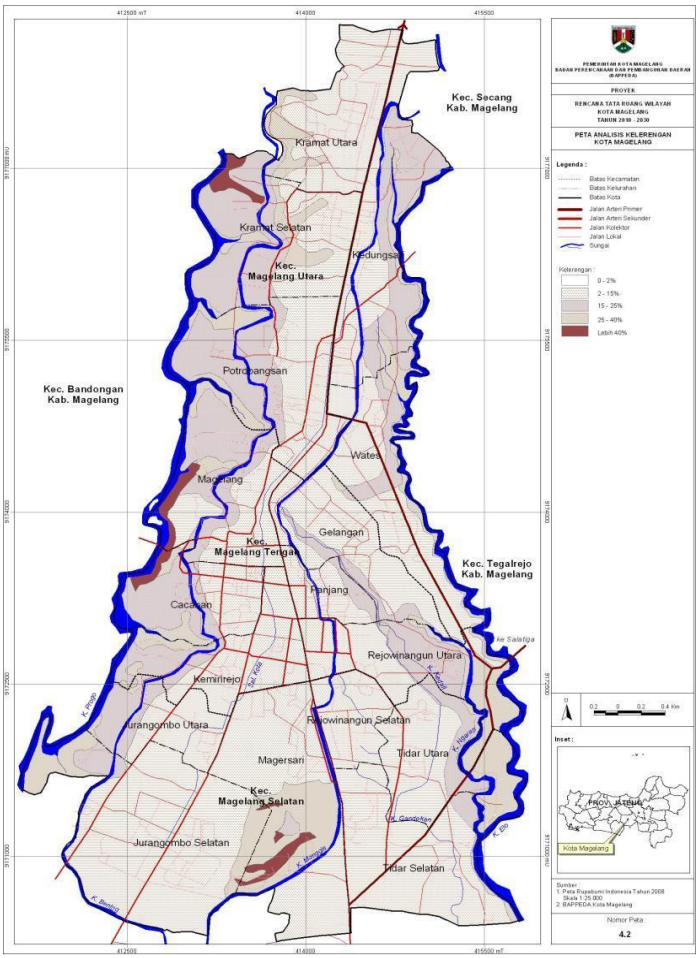


Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, berelief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl.



Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Magelang

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Namun dengan keterbatasan wilayah, maka dimungkinan arah pengembangan permukiman ke daerah daerah yang bertopografi dan berkontur tajam.



Gambar 2.4
Gambar Pola Kelerengan Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011 – 2031

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, batuan beku terobosan serta batuan endapan alluvial. Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kuarter yang mempunyai sifat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/ cm2 – 19 kg/ cm2. Ditinjau dari satuan morfologi, pedataran aluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah Barat yang juga merupakan batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang.

Kota Magelang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang. Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan saluran irigasi. Sedangkan potensi air tanahnya relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan lebih dari 20 meter.

Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada pembangunan yang dilakukan di daerah bantaran sungai dengan kemiringan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/ konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi serta tingkat kelerengan alam yang cukup curam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi.

2.1.1.4. Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan akuifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2016 sebesar 7.606.319 m3 . Apabila dibandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 7.434.942 m3 maka terjadi kenaikan kebutuhan dari penggunaan air PDAM di Kota Magelang. Sementara data tahun 2017 penggunaan air PDAM sebanyak 7.633.558 m3/ tahun.

Jumlah pemakaian air minum terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Apabila perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang. Namun hal ini perlu menjadi perhatian untuk ke depan mengingat semakin hari kebutuhan akan air bersih akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk padahal untuk memenuhi kebutuhan akan air Kota Magelang masih bergantung pada mata air yang berada di daerah lain.

2.1.1.5. Klimatologi

Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Data klimatologi pada tahun 2017 menurut Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2017 total rata – rata curah hujan sebanyak 238.76 mm sedangkan pada tahun 2016 total curah hujan sepanjang tahun sebanyak 257.85 mm. Data semester 1 tahun 2018 bahwa rata – rata curah hujan selama 6 bulan sebanyak 103.89 mm. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2014-semester 1 Tahun 2018

Bulan	2014	2015	2016	2017	Semester 1 2018
01. Januari	16.61	16.92	6.86	29.71	17.92
02. Februari	22.05	27.76	20.09	19.57	23.22
03. Maret	19.21	22.09	16.66	26.29	24.33
04. April	23.47	22.50	19.05	29.29	13.47
05. Mei	17.77	6.63	15.86	28.33	19.56
06. Juni	8.25	44.67	39.27	12.70	15.40
07. Juli	13.57	0.00	19.09	13.33	-
08. Agustus	5.40	0.00	25	-	-
09. September	2.33	0.00	28.89	32.00	-
10. Oktober	16.91	0.00	25.25	11.50	-
11. November	12.56	12.87	24.2	14.76	-
12. Desember	23.12	28.55	17.63	21.28	-
Jumlah	**170.59**	**181.99**	**257.85**	**238.76**	**103.89**
Rata-rata	**14.22**	**15.17**	**21.49**	**19.90**	**17.32**

Sumber: Data Strategis Kota Magelang,2008

Curah hujan dalam semester pertama tahun 2017, memiliki kecenderungan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata curah hujan dalam enam bulan pertama di tahun 2017 sebesar 23.55 mm/hari. Namun kondisi pada semester 2 tahun 2017 rata – rata curah hujan cenderung lebih kecil apabila dibandingkan pada semester pertama tahun 2017 walaupun pada bulan september sempat mengalami peningkatan rata – rata curah hujan yang relatif tinggi yaitu 32 mm/hari. Curah hujan tertinggi pada semester pertama 2017 biasanya terjadi pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Januari, Februari, Maret dan April, di mana hari hujannya sekitar 20an hari hujan. Sama halnya dengan kondisi pada semester 1 tahun 2018 kondisi curah hujan tertinggi ada di bulan januari, februari dan maret. Memasuki triwulan ke 2, curah hujan mulai menurun. Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Februari sebanyak 24 hari hujan dan 23 hari hujan. Tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu di sepanjang tahun membawa akibat seperti banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang, bencana yang disebabkan karena adanya pohon yang tumbang tumbang dan bencana longsor.

Kondisi Topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisi Kota Magelang yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga Ke depan hal ini menjadi perhatian serta menjadi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin timbul karena cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan seperti bencana longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit perlu di antisipasi sejak dini terutama pada daerah - daerah dengan kemiringan curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi lahan terbangun, dari luas lahan 1854 Ha, hampir 70 % nya merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata dan kawasan terbangun lainnya. Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman.

Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di Kota Magelang. Selengkapnya luasan penggunaan lahan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah:

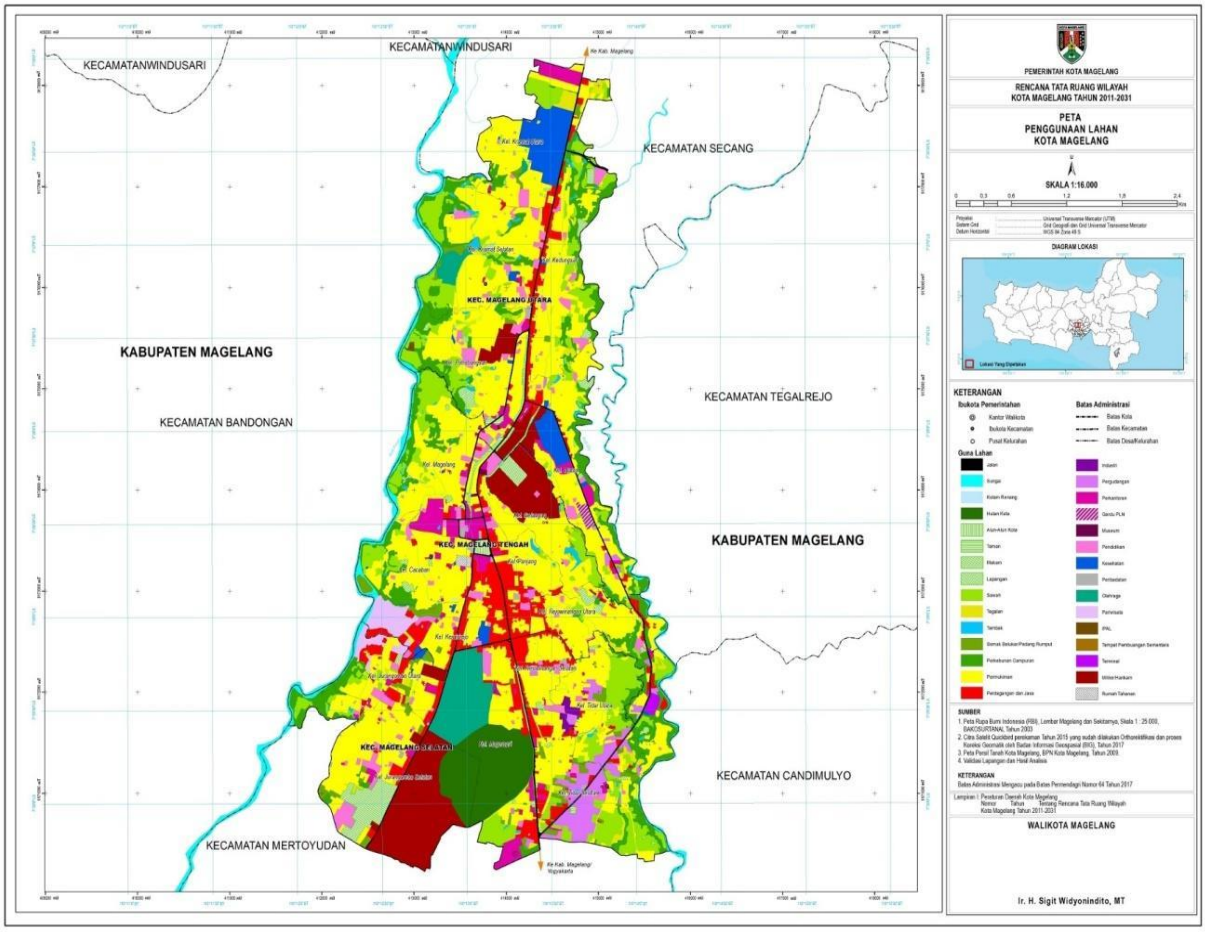
Tabel 2.3
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2018

PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Alun-Alun Kota	2,16	0,12
Gardu PLN	2,67	0,14
Hutan Kota	73,05	3,94
Industri	3,55	0,19
IPAL	0,61	0,03
JALAN	28,30	1,53
Kesehatan	47,72	2,57
Kolam Renang	0,18	0,01
Lapangan	9,42	0,51
Makam	34,61	1,87
Militer/Hankam	124,43	6,71
Museum	0,79	0,04
Olahraga	49,81	2,69
Pariwisata	19,64	1,06
Pendidikan	63,88	3,45
Perdagangan dan Jasa	124,89	6,74
Pergudangan	39,33	2,12
Peribadatan	9,86	0,53
Perkantoran	55,67	3,00
Perkebunan Campuran	155,11	8,37
Permukiman	728,43	39,30
Rumah Tahanan	1,70	0,09
Sawah	169,25	9,13
Semak Belukar/Padang Rumput	32,30	1,74
Sungai	25,26	1,36

PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Taman	12,32	0,66
Kolam	11,31	0,61
Tegalan	24,14	1,30
Tempat Pembuangan Sementara	0,31	0,02
Terminal	3,01	0,16
Total Luas	1853,71	100

Sumber : Survey Lapangan, 2015

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa luas penggunaan lahan Kota Magelang tertinggi adalah berupa permukiman dengan luas sebesar 728,43 Ha atau 39,30%. Kawasan permukiman tersebut menyebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran pada lapis pertama lahan pada koridor jaringan jalan kota. Untuk lahan terbangun lainnya seperti pendidikan, pariwisata, peribadatan, dan pergudangan menyatu dengan kawasan permukiman dan atau kawasan perdagangan dan jasa. Untuk lahan tidak terbangun di dominasi lahan sawah dengan luas 169,25 Ha atau 9,13 %. Lahan sawah sebagian besar berada pada bagian barat dan bagian selatan wilayah Kota Magelang, serta masih terkoneksi dengan jaringan irigasi. Lebih jelas sebaran penggunaan lahan Kota Magelang bisa dilihat pada gambar peta sebagai berikut:



Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kota Magelang

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Dalam pengembangan wilayah, perlu juga diperhatikan terkait kawasan-kawasan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang merupakan kawasan lindung. Rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya Kota Magelang menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 yaitu:

1. Kawasan lindung yang meliputi:
    a. kawasan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu kawasan resapan air yang terdapat di Gunung Tidar dan kawasan lain yang ditentukan lebih lanjut;
    b. kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan kawasan sekitar mata air;
    c. RTH;
    d. kawasan suaka alam, yang meliputi Gunung Tidar;
    e. kawasan lindung geologi;
    f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Lingkungan atau benda cagar budaya dan lingkungan bangunan cagar budaya; dan
    g. kawasan rawan bencana.
2. Kawasan budi daya meliputi:
    a. kawasan peruntukan perumahan;
    b. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
    c. kawasan peruntukan perkantoran;
    d. kawasan peruntukan industri;
    e. kawasan peruntukan pariwisata;
    f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
    g. ruang peruntukan evakuasi bencana;
    h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
    i. kawasan peruntukan lainnya, meliputi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertahanan dan keamanan, pertanian, pergudangan, dan olahraga.

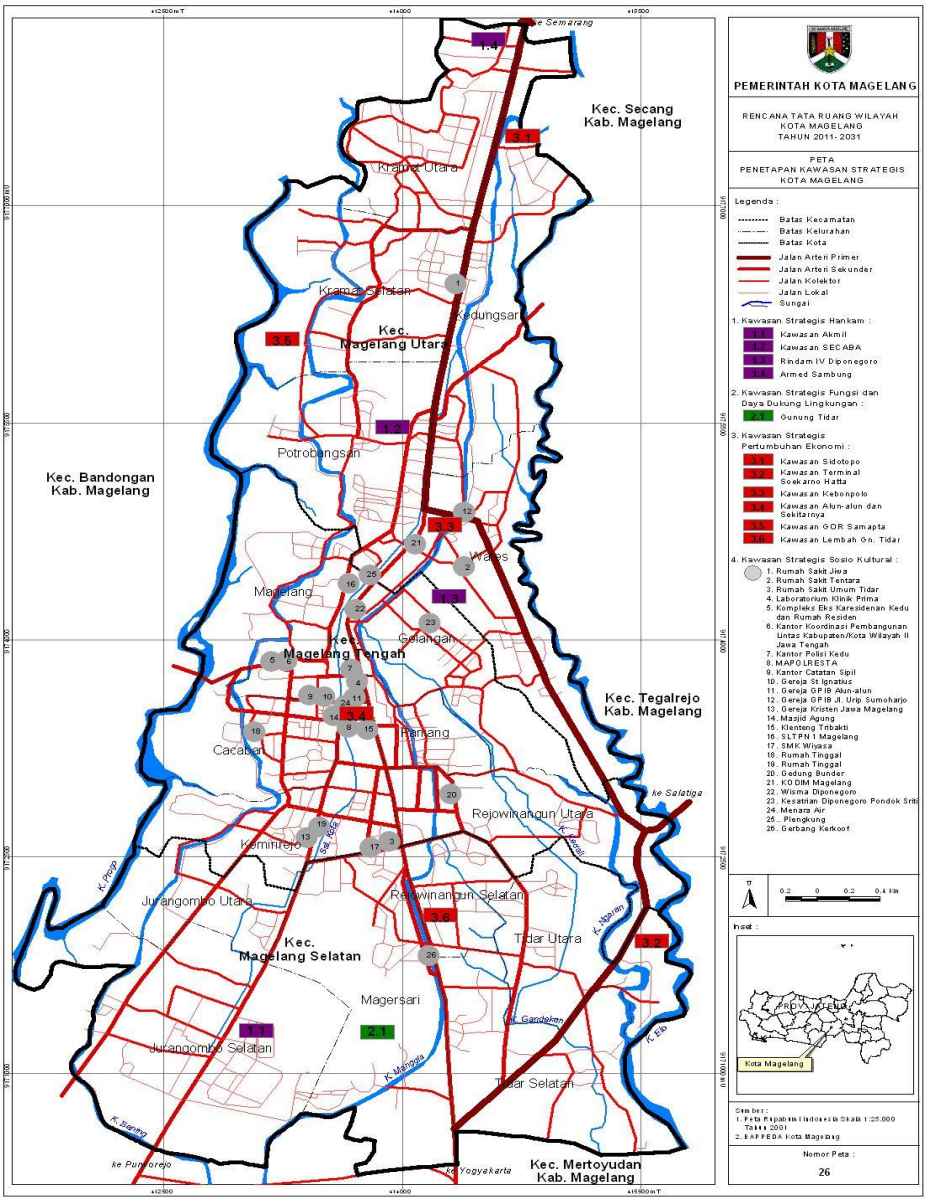
Selain itu, terdapat beberapa kawasan strategis Kota Magelang menjadi poin penting dalam potensi pengembangan wilayah Kota Magelang. Kawasan strategis tersebut yaitu:

a. kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung;
b. kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus kawasan pertahanan negara meliputi Kawasan Akademi Militer (AKMIL), Kawasan Sekolah Calon Bintara (SECABA), Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) dan

Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, dan Kawasan Batalyon Artileri Medan (Yon ARMED) 11;

c. kawasan strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Alun-alun, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, Kawasan Sidotopo, Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta, Kawasan Sukarno-Hatta, dan Kawasan Kebonpolo; dan

d. kawasan strategis Daerah dengan fungsi pelestarian warisan budaya berupa kawasan konservasi warisan budaya

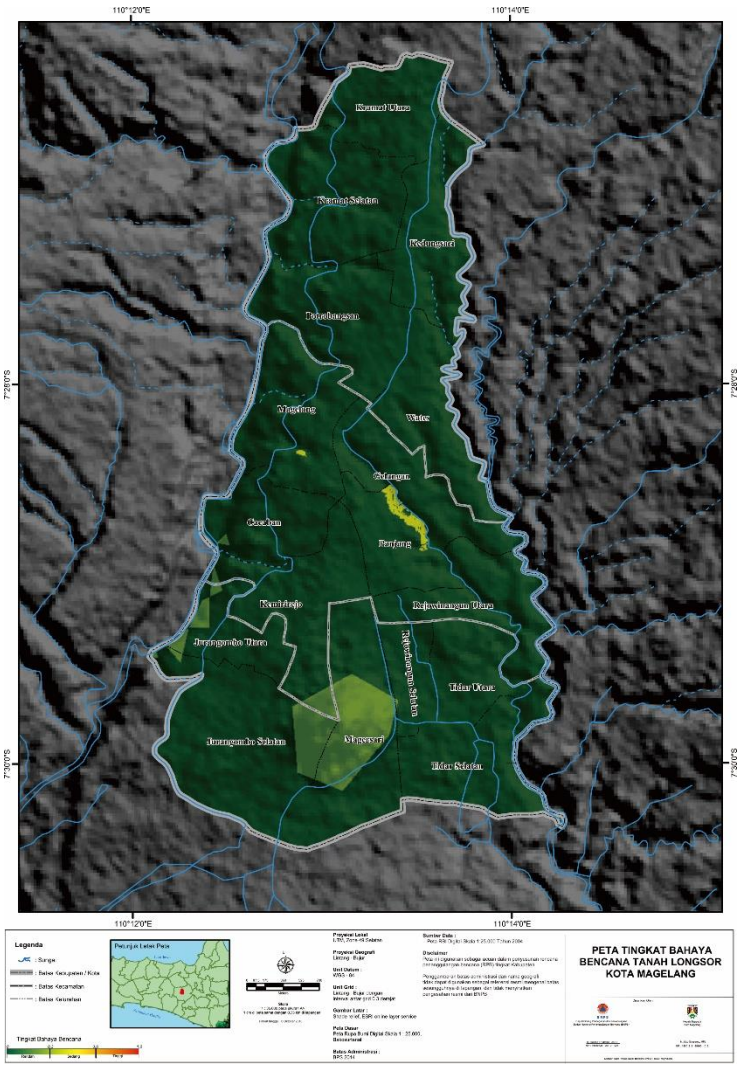


Gambar 2.6
Peta Kawasan Strategis Kota Magelang

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kemiringan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat

kelerengan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) . Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungaian, yaitu: a).*Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo* meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; b) *Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo* meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.



Gambar 2.7
Peta Tingkat Bahaya Bencana Tanah Longsor Kota Magelang
Sumber: Masterplan Penanggulangan Bencana,2018

Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase karena hujan dan drainase tersumbat. Alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah tinggal, ruko dan fasilitas umum berkontribusi terhadap meluapnya air hujan ketika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya daya tampung dan daya serap tanah tanah yang sudah tidak maksimal menyerap air hujan karena tertutup oleh bangunan. Penyebab kedua adalah banjir bandang atau banjir kiriman melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsan, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Selain Bencana longsor dan banjir, perlu juga diwaspadai terkait dengan bahaya kebakaran terutama pada pemukiman yang padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana Kebakaran yang terjadi sampai dengan tengah tahun 2017 sebanyak 3 kejadian dengan kerugian sebanyak 3 rumah dan korban meninggal sebanyak 2 .Adapun total kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00. Jumlah ini meningkat pada semester 2 tahun 2017. Total Bencana kebakaran pada tahun 2017 sebanyak 17 kejadian dengan kerugian sebanyak 10 rumah dan 7 bangunan lainnya dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1 orang dan korban luka – luka sebanyak 1 orang. Total kerugiannya sebesar Rp.2.253.000.000,00.

Sementara jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebanyak 22 lokasi. Dengan kerugian sebesar Rp. 355.000.000,00. Data pada semester 1 tahun 2018 terdapat 1 kejadian bencana kebakaran dengan korban 1 orang dan kerugian material sebesar Rp. 3.500.000,00. Bencana Kebakaran ini merupakan salah satu bencana yang identik terjadi di wilayah perkotaan yang rentan padat penduduk sehingga ke depan butuh perhatian khusus dari pemerintah agar nantinya bisa mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan meminimalisir adanya banyak korban dan kerugian material. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan limbah industri atau jasa yang meresap dalam air bawah tanah serta air permukaan (selokan, kolam dan pemukiman), pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas. Indikator penentu prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dilakukan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

2.1.1.9. Aspek Demografi

Salah satu permasalahan terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk karena distribusi penduduk yang tidak merata akan menyebabkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk pada suatu wilayah karena tiap parsial kewilayahan mengalami jumlah penduduk yang tidak merata dan berimbang jumlahnya. Wilayah dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki permasalahan yang cukup komplek seperti masalah pengangguran, kemiskinan, permasalah akan kebutuhan lahan, kebutuhan akan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan masalah – masalah sosial lainnya. Terkait dengan Kota Magelang yang dengan wilayah relatif sangat kecil, masalah distribusi penduduk tidak membawa masalah sosial yang relatif besar namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatikan terkait dengan pemerataan pembangunan di Kota Magelang.

Jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.992 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,53 km2, kepadatan penduduk pada tahun 2018 sebanyak 6.583 jiwa/km2. Jumlah penduduk pada tahun 2017 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.673 jiwa dengan wilayah Kota Magelang

seluas 18,53 km2, kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 6.566 jiwa/km2. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup. Hal ini menjasi tantangan bagi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana permukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak di atas lahan yang terbatas .

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2014- 2018

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km2)
2014	120.615	6.656
2015	120.952	6.675
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.566
2018	121.992	6.583

Sumber: BPS Kota magelang, 2018

Data kepadatan penduduk Kota Magelang menurut DispendukCapil Kota Magelang sebagaimana tabel di 2-5, menggambarkan jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Magelang tahun 2014 sampai dengan 2018. Untuk kepadatan penduduk tahun 2014-2016 diperhitungkan dengan luas 18.12 km^2, sedangkan kepadatan penduduk tahun 2017 dan 2018 diperhitungkan dengan luas wilayah 18.53 km^2, sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 - 2018

Kecamatn / Kelurahn	*2014*		*2015*		*2016*		*2017*		*2018*	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	4.302	7.482	4.337	7.478	7.198	3.185	4.287	7.391	4.241	6.426
Jurangombo Selatan	6.951	3.070	7.056	3.122	8.582	8.847	7.271	3.217	7.248	3.419
Magersari	8.780	6.376	8.816	6.388	4.328	7.462	8.699	4.859	8.645	5.542
Tidar Utara	8.493	8.756	8.540	8.804	5.837	4.596	8.533	8.796	8.478	7.707
Tidar Selatan	5.748	4.530	5.787	4.567	8.860	6.420	5.854	4.609	5.839	4.423
Rejowinangun Selatan	8.986	20.753	8.965	20.849	8.873	20.635	8.524	19.830	8.488	22.941
MAGELANG TENGAH										
Magelang	7.913	6.351	7.913	6.330	7.992	6.394	8.017	6.414	8.033	6.478
Kemirirejo	6.026	12.606	6.190	7.034	12.563	12.690	5.893	6.696	5.857	6.810
Cacaban	8.214	9.944	8.231	9.917	6.182	7.025	8.141	9.808	8.149	9.476

Kecamatn / Kelurahn	*2014*		*2015*		*2016*		*2017*		*2018*	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km2)
Rejowinangun Utara	12.518	12.606	12.514	12.640	8.214	9.896	12.536	12.663	12.303	13.520
Panjang	6.766	19.612	6.809	19.454	6.834	19.526	6.781	19..374	6.731	18.697
Gelangan	8.250	10.135	8.298	10.244	8.335	10.290	8.370	10.333	8.304	9.330
MAGELANG UTARA										
Wates	9.188	7.833	9.202	7.865	9.242	7.899	8.925	7.628	8.898	7.541
Potrobangsan	8.992	6.922	8.966	6.897	8.887	6.836	8.620	6.631	8.478	6.280
Kedungsari	7.475	1.334	7.533	5.664	7.605	5.718	7.506	5.644	7.448	5.642
Kramat Utara	4.860	5.625	4.955	5.763	4.966	5.774	4.843	5.631	4.815	4.864
Kramat Selatan	8.061	5.529	8.148	5.581	8.164	5.592	8.057	5.518	8.075	5.569
TOTAL	**131.523**	**149.464**	**132.260**	**148.597**	**132.662**	**148.785**	**130.857**	**125.668**	**130.030**	**144.665**

Sumber: Data Strategis Kota Magelang, 2018

Berdasarkan data BPS terkait proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka sex ratio Kota Magelang Tahun 2014-2018 (sebagaimana tabel 2-6) bisa dikatakan cukup seimbang. Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2014-2018 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	**Tahun**				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Laki-Laki	59.384	59.591	59.662	59.864	60.064
Perempuan	61.231	61.361	61.631	61.809	61.928
Jumlah Total	**120.615**	**120.952**	**121.293**	**121.673**	**121.992**
Sex Ratio	96,98	97,12	96.81	96.85	96.99
Laju Pertumbuhan (%)	0.38	0.28	0.28	0.31	0.26

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang 2014- Tahun 2018 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018 **
Laki-Laki	64.865	65.185	65.375	64.419	64.013
Perempuan	66.838	67.076	67.287	66.438	66.017
Jumlah Total	131.703	132.261	132.662	130.857	130.030
Laju Pertumbuhan (%)	**0.66**	**0.42**	**0.30**	**-1.36**	**-0.63**

***Sumber**: Data Strategis Kota Magelang, 2009-2018*

****data penduduk 2017** hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemutakhiran database Kependudukan tahun 2017*

*****(penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemutakhiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilih Pilkada)***

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk pada usia produktif 15 tahun sd 64 tahun adalah pada kelompok umur antara usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Hal ini merupakan modal apabila Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.8
Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2014-Smt 1 2018

Kelompok Umur	*Jumlah Penduduk*				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
0 – 4 tahun	8.154	7.968	7.893	7.797	7.836
5 - 9 tahun	9.528	9.529	9.395	9.296	9.253
10 - 14 tahun	10.234	10.061	10.062	10.016	9.920
15 - 19 tahun	10.221	10.365	10.305	10.121	10.204
20 - 24 tahun	10.076	10.170	10.333	10.167	10.059
25 -29 tahun	9.322	9.338	9.388	9.447	9.448
30 - 34 tahun	10.806	10.390	9.866	9.128	8.853
35 - 39 tahun	10.410	10.429	10.521	10.394	10.214
40 - 44 tahun	10.274	10.180	10.052	9.581	9.544
45 -49 tahun	10.158	10.115	10.251	10.092	9.824
50 - 54 tahun	9.082	9.241	9.377	9.134	9.168

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
55 - 59 tahun	7.746	7.978	8.133	8.217	8.264
60 - 64 tahun	5.618	6.000	6.302	6.494	6.523
65 -69 tahun	3.381	3.523	3.758	4.112	4.236
70 -74 tahun	2.897	2.880	2.911	2.537	2.512
75+	3.796	4.094	4.115	4.324	4.172

Sumber: Data Strategis Kota Magelang, 2009-2018

***data penduduk 2017** hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemutakhiran database Kependudukan tahun 2017*

***(penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemutakhiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilih Pilkada)*

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam ,seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang pada umumnya sebagaimana mata pencaharian penduduk di perkotaan, sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha.

Tabel 2.9
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012-Semester 1 tahun 2018

Mata Pencaharian	2014	2015	2016	2017*	Semester 1 tahun 2018**		
					Jumlah	%	+/-
Pertanian	217	215	195	179	189	0.18	10
Buruh Tani	61	66	73	69	67	0.065	(2)
Pengusaha	12.349	12.209	12.275	11.980	11.872	11.52	(108)
Buruh Industri	24.248	24.835	25.541	25.482	25.423	24.68	(59)
Buruh Bangunan	9.096	9.138	9.226	9.088	9.060	8.79	(28)
Pedagang	2.978	2.935	2.136	2.087	2.816	2.73	729
Angkutan	240	251	252	242	260	0.25	18
PNS/TNI/Polri	5.810	5.772	5.696	5.417	5.307	5.15	(110)
Guru/ Dosen	1.452	1.473	1.473	1.428	1.416	1.37	(12)
Pensiunan	3.608	3.601	3.570	3.465	3.420	3.32	(45)
Lain Lainnya	53.962	53.947	40.388	44.311	43.191	41.92	(1120)
JUMLAH	**114.021**	**114.442**	**100.825**	**103.748**	**103.021**	**100**	

Sumber: Data Strategis Kota Magelang, 2009-2018

***data penduduk 2017** hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemutakhiran database Kependudukan tahun 2017*

***(penurunan jumlah penduduk tahun 2018 dikarenakan adanya pemutakhiran data kependudukan Tahun 2018 berbarengan dengan data pemilih Pilkada)*

Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 25.423 jiwa (24.68%), Pengusaha 11.8720 jiwa (11.52%), Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 189 (0,18%) dan buruh tani 67 (0,065%).

Kondisi Kota Magelang relatif kondusif karena konflik antar umat beragama di Kota Magelang nyaris tidak pernah terjadi. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keanekaragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang diakui Pemerintah menjadi prioritas Pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi Modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius dalam periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2014-Smt 1 2018 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan				
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017*	Tahun 2018**
Islam	110.856	111.610	112.135	110.877	110.302
Kristen	12.711	12.616	12.566	12.276	12.118
Katolik	7.232	7.241	7.165	6.957	6.867
Hindu	149	150	143	124	123
Budha	639	620	628	601	597
Konghucu	8	7	8	8	9
Lainnya	17	17	17	22	14

Sumber : Data Strategis Kota Magelang, 2009-2018

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

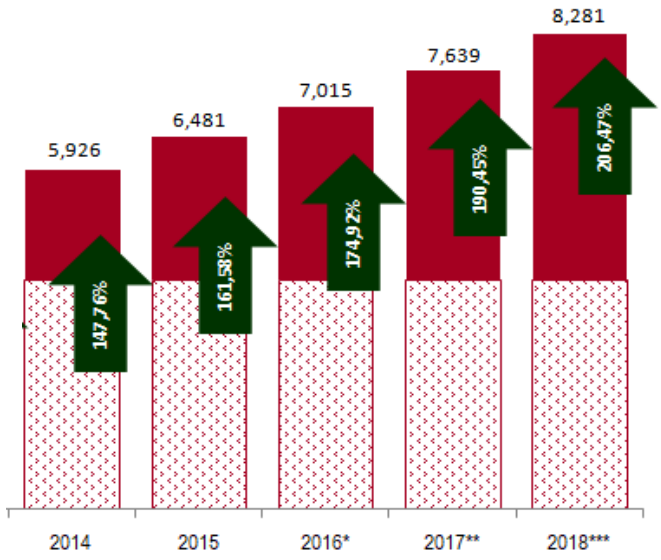
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2017 tumbuh 8,88% (atas dasar harga berlaku), lebih cepat dari tahun 2016 yang tumbuh 8,25%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2017

mencapai 7,639 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,9 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (14,47%), Pengadaan Listrik dan Gas (13,0%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (12,65%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2017. Meski tumbuh lambat namun beberapa lapangan usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.8
PDRB (dalam Triliun Rp) dan Indeks Perkembangan PDRB (dalam %) di Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2017 dan Prediksi Tahun 2018
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2018 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2018 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB diprediksi mencapai 8,281 triliun rupiah (deviasi 0,71%). Di tahun 2018 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang dengan prediksi seluruh lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif.

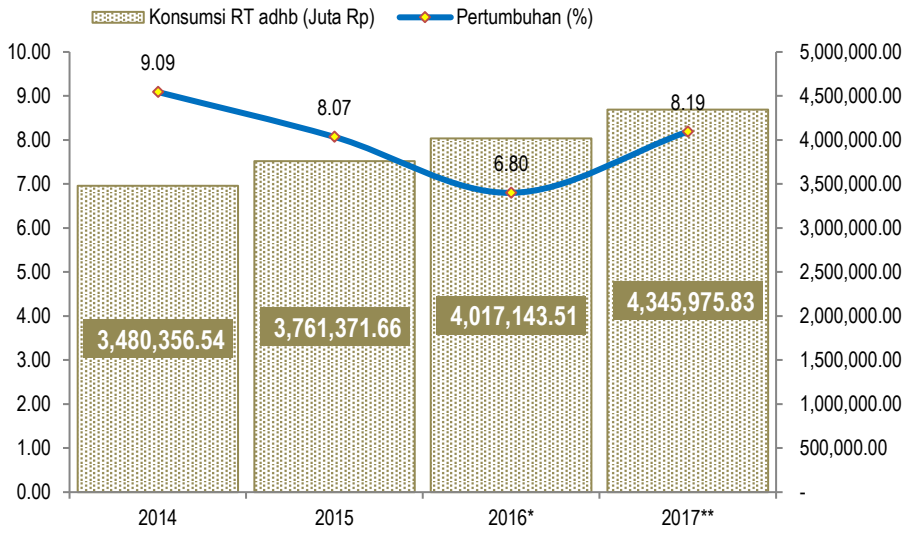
Tabel 2.11
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2016*	2017**	2018***
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.383,19	149.480,88
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.215.266,29	1.308.449,79
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	23.009,03	24.446,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.571,97	10.274,19

Lapangan Usaha	2016*	2017**	2018***
Konstruksi	1.163.178,22	1.253.077,36	1.348.125,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.098.483,10	1.182.961,31
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	531.675,42	588.818,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	464.170,03	517.523,73
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	382.437,14	417.950,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	398.625,19	442.577,97
Real Estate	224.952,98	241.977,59	264.152,22
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.548,28	30.963,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	890.831,67	966.765,32
Jasa Pendidikan	529.008,56	587.146,02	619.448,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	216.839,28	236.721,71
Jasa lainnya	140.360,73	155.562,97	172.324,25
PDRB	**7.015.380,09**	**7.638.607,53**	**8.280.985,32**

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)

Dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2017 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,346 triliun Rupiah atau sebesar 57,26% dari total PDRB. Di tahun 2017 pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif lebih cepat setelah di beberapa tahun sebelumnya memiliki tren melambat. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (30,67%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (29,30%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,79%). Di tahun 2018 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh mencapai 4,648 triliun Rupiah.



Gambar 2.9
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhannya di Kota Magelang adhb, 2014-2017
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Meski didominasi oleh konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhan pengeluaran PDRB tertinggi berasal dari perubahan inventori yang di tahun 2017 mencapai sebesar 44,71%. Konsumsi rumah tangga di tahun 2017 tumbuh 8,19% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 5,9% dan konsumsi pemerintah yang tumbuh melambat hanya mencapai 2,36% setelah di tahun 2016 mampu mencapai pertumbuhan sebesar 7,58%. Secara proporsi, besarnya kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB Kota Magelang di tahun 2018 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

Tabel 2.12
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran

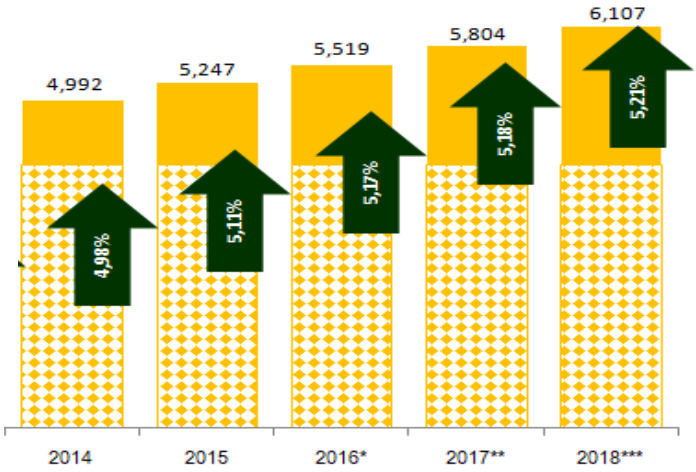
Pengeluaran	2016*	2017**	2018***
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4.345.975,83	4.648.356,17
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,900.37	95.207,58	104.694,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1.464.837,70	1.569.572,37
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3.788.753,27	4.115.028,44
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	221.660,20	246.668,86
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	4.175.622,06	4.462.369,06
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	6.453.449,11	6.865.703,72
PDRB	**7.015.380,09**	**7.638.607,53**	**8.280.985,32**

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)
*** Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,18% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,17%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,27%.

Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2017 mencapai 5,804 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,60%), Jasa Lainnya (8,83%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,25%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.



Gambar 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*
****Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,52%)*

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2018 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2018, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai angka 5,21% (deviasi 0,52%).

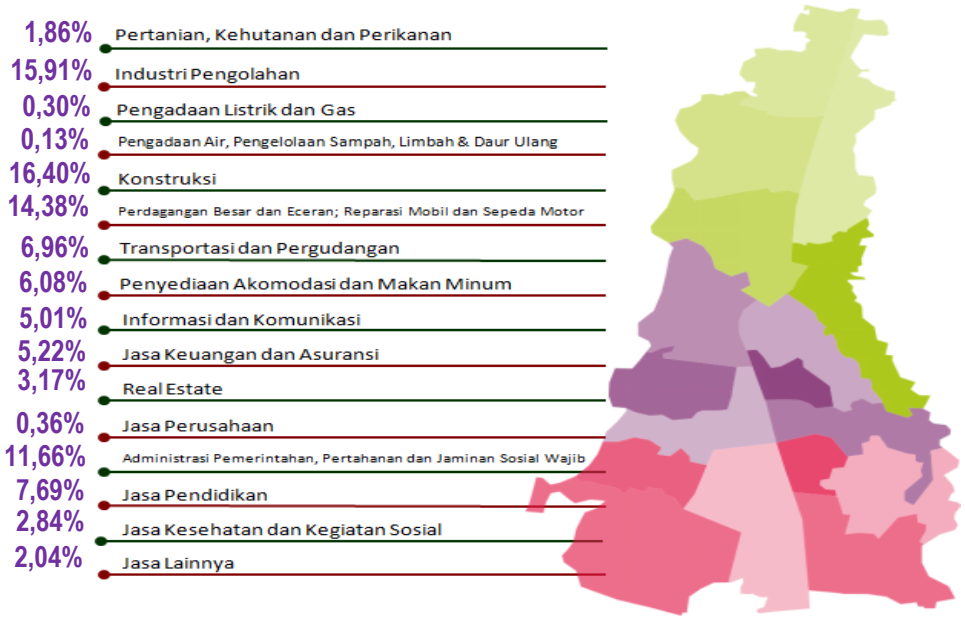
c. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Pada tahun 2017 peran masing-masing lapangan usaha masih sama seperti struktur di tahun 2016.

Tabel 2.13
Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang, 2017

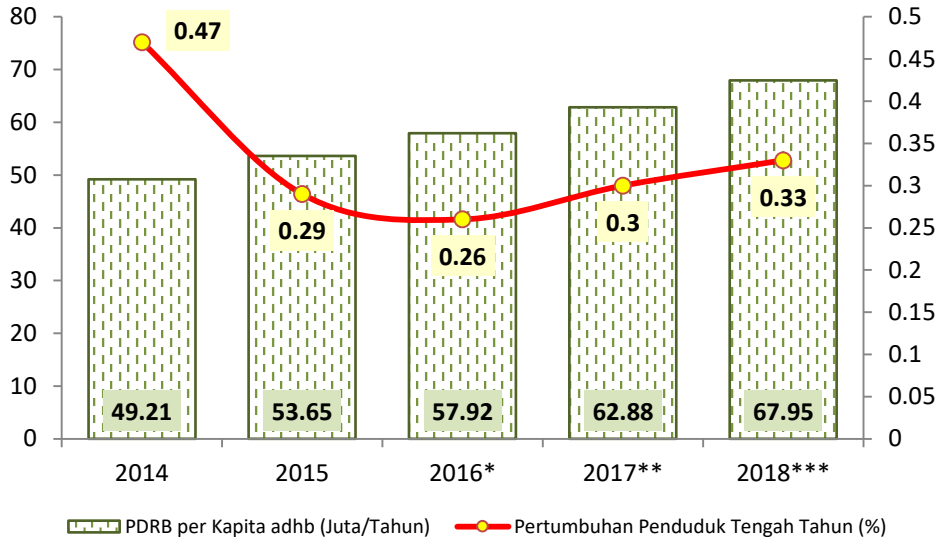


Gambar 2.11
Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2017
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

Ketergantungan aktivitas ekonomi Industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab meskipun lapangan usaha berkontribusi cukup signifikan, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2018 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2017 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

d. PDRB Per Kapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 5,24 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2018, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,21% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.872 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku)diprediksi mampu tumbuh 8,06%.



Gambar 2.12
PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun Kota Magelang, 2014-2017 dan Prediksi 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*
****Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)*

Tabel 2.14
PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

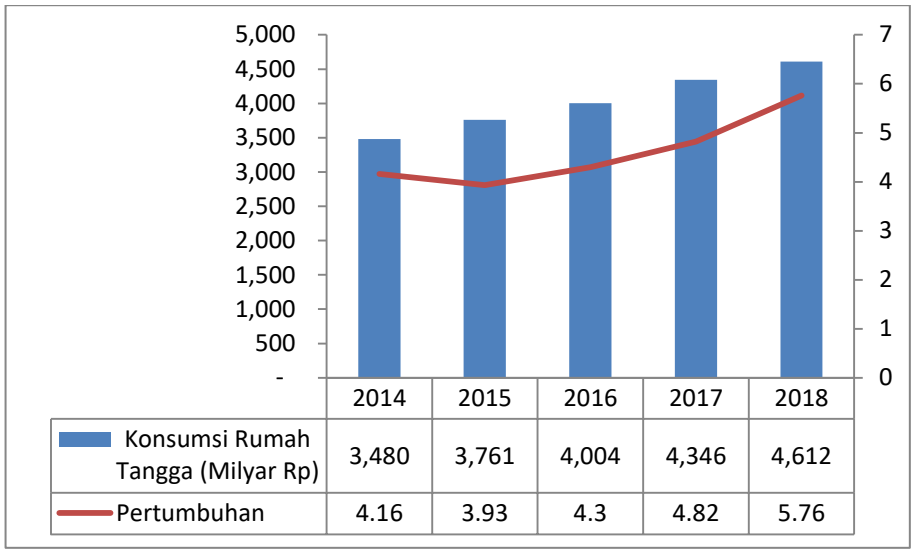
Uraian	2016	2017	2018
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.638.607,53**	8.280.985,32 ***
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.311,98**	6.106.575,37***
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00	121.872,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	121.293,00	121.673,00	121.992,00

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*
****Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi adhb ± 0,71%; deviasi adhk ± 0,52%)*

Mengingat indikator kesejahteraan dari ukuran PDRB per kapita memiliki beberapa kelemahan, maka dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya yaitu berupa indeks gini.

B. Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif dengan tren meningkat sejak tahun 2013. Pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,346 triliun Rupiah atau sebesar 56,89 persen dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (30,67%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (29,30%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,79%). Di tahun 2018 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 5,17 persen dengan nominal 4,612 triliun Rupiah.



Gambar 2.13
Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2013-2018
Sumber: BPS, 2017
** Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi*
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

C. Indeks Gini

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340.

Tabel 2.15
Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2018

Tahun	Kota Magelang	Jawa Tengah (Maret)	Nasional (Maret)
2014	0,360	0,376	0,406
2015	0,340	0,382	0,408
2016	0,328-0,34*	0,366	0,397
2017	0,328-0,34*	0,365	0,393
2018	0,328-0,34*	0,378	0,389

Sumber: BPS, 2019
** Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang*

D. Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan sebuah dilema pembangunan, dan dimanapun penduduk miskin akan selalu ada Pada daerah dengan pendapatan per kapita tinggi belum tentu tidak ada penduduk miskin. Hal ini yang menyadarkan bahwa ekonomi tidak hanya berbicara soal; pertumbuhan, melainkan juga pemerataan sehingga masalah kemiskinan dapat ditanggulangi. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah (kondisi sumber daya alam, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam) dan kemiskinan buatan (ketidakmampuan masyarakat mengakses sarana ekonomi dan fasilitas yang tersedia}. Terkait

kondisi tersebut yang dapat diperbuat oleh pengambil kebijakan adalah menekan bagaimana agar penduduk miskin karena buatan semakin turun/berkurang, walaupun sangat sulit untuk mencapai 0% karena masalah alamiah.

Ada berbagai batasan dan cara mendefinisikan penduduk miskin, namun dalam sebuah perencanaan kebijakan yang lebih penting adalah konsistensi data. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

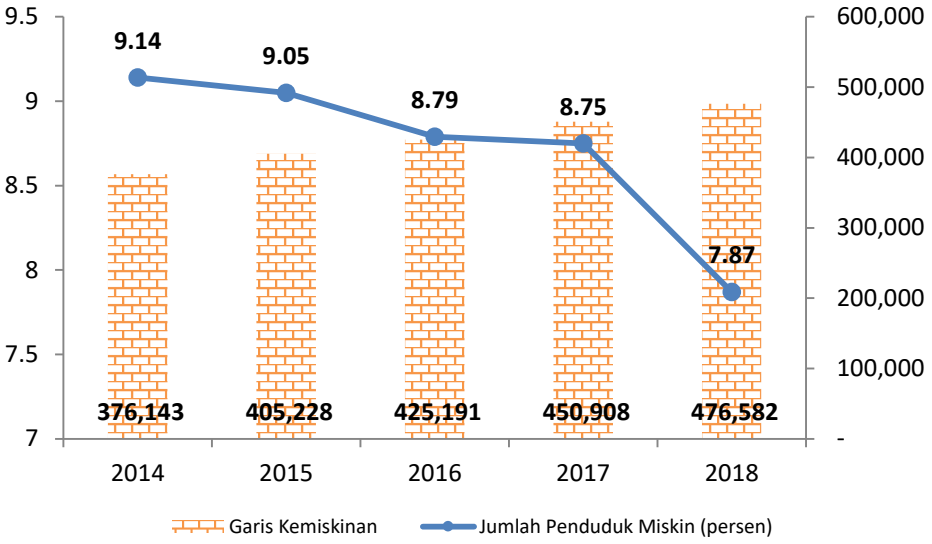
Tabel 2.16
Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2011-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.615	120.957	121.193	121.673	121.992
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	11.019	10.920	10.640	10.630	9.590
Jumlah Penduduk Miskin (persen)	9,14	9,05	8,79	8,75	7,87
P1	0,94	1,39	1,20	1.30	1,07
P2	0,20	0,31	0,23	0.32	0,21
Garis Kemiskinan	376.143	405.228	425.191	450.908	476.582

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2011-2018 terjadi peningkatan Garis Kemiskinan di Kota Magelang. Pada tahun 2018 Garis Kemiskinan di Kota Magelang meningkat sebesar 25.674 rupiah atau 5,39 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan Garis Kemiskinan tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

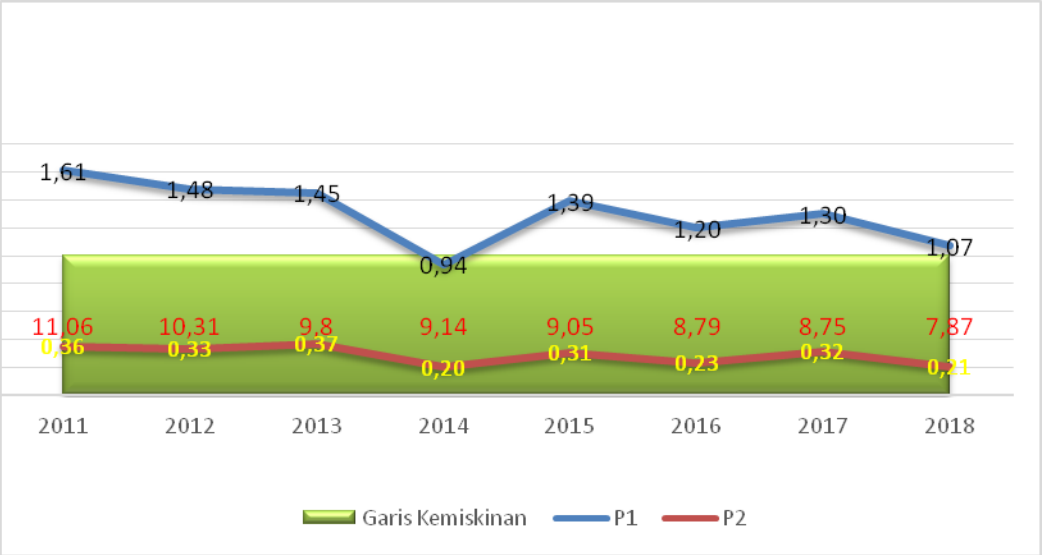
Tren penduduk miskin di Kota Magelang menurun dari periode tahun 2014-2018. Persentase penduduk miskin di Kota Magelang pada tahun 2018 sebesar 7,87 persen, menurun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 8,75 persen. Kenaikan Garis kemiskinan di Kota Magelang selama periode 2011 - 2018, berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin yang terus mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun pendapatan penduduk Kota Magelang meningkat lebih besar sehingga dapat menjaga daya belinya. Peningkatan pendapatan penduduk Kota Magelang yang lebih tinggi daripada perubahan harga ini menjadikan jumah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun



Gambar 2.14
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Magelang

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan wilayah dalam mengurangi tingkat kemiskinan (persentase dan jumlah penduduk miskin) namun ada dimensi lain yang secara bersamaan harus turut diselesaikan. Permasalahan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan tergambarkan dalam tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keragaman pendapatan antar penduduk miskin yang tergambarkan dalam tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding 2017 yaitu dari semula 1,30 menjadi 1,07 yang berarti bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati angka garis kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan di tahun 2018 ada peningkatan pendapatan penduduk miskin di Kota Magelang dibanding 2017.

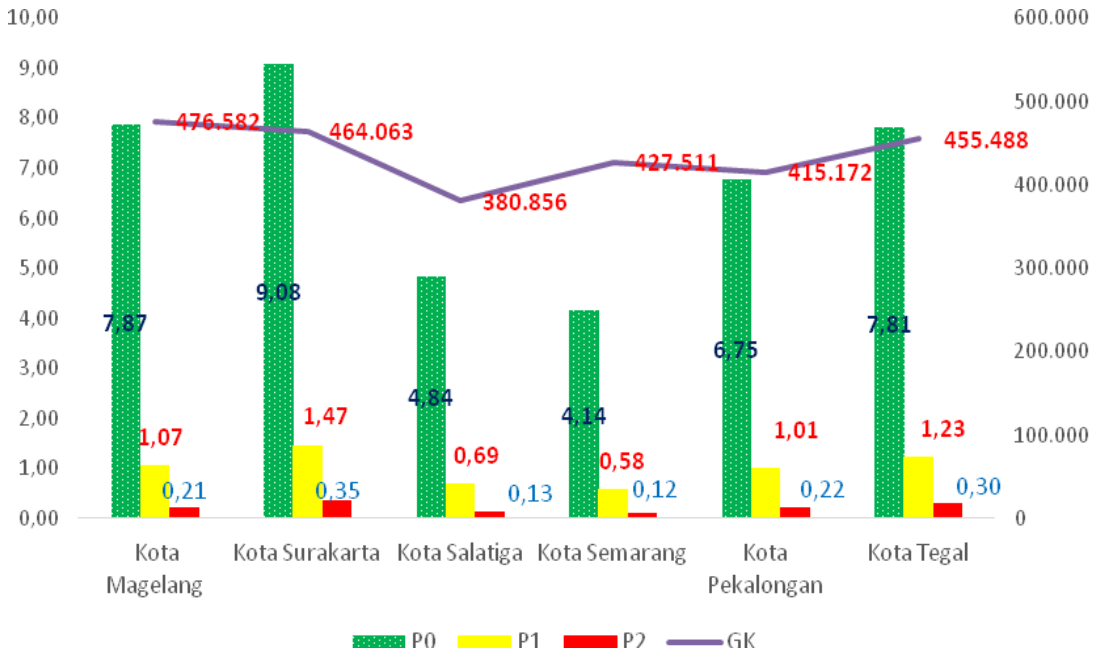
Seperti halnya tingkat kedalaman kemiskinan, perkembangan nilai tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kota Magelang selama periode 2015-2018 juga terlihat fluktuatif. Nilai tingkat keparahan kemiskinan Kota Magelang tahun 2018 sebesar 0,21 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,32. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2018 terlihat bahwa indeks semakin rendah yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.



Gambar 2.15
Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2010-2018
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Diantara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi, bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadikan persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2018 masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kota Salatiga, Pekalongan, Semarang dan Tegal. Demikian juga dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, untuk indek kedalaman kemiskinan Kota Magelang masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Surakarta. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Kota Magelang berada di peringkat 3 setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Meskipun Kota Magelang memiliki garis kemiskinan paling tinggi diantara 6 kota di Provinsi Jawa Tengah namun tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan Kota Magelang tidak berada dalam posisi paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meski biaya hidup untuk masyarakat miskin Kota Magelang lebih tinggi dari kota lainnya di Jawa Tengah, namun hasil pembangunan Kota Magelang dapat dinikmati masyarakat miskin, terbukti dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih rendah diantara beberapa wilayah kota Jawa Tengah lainnya.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017
Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

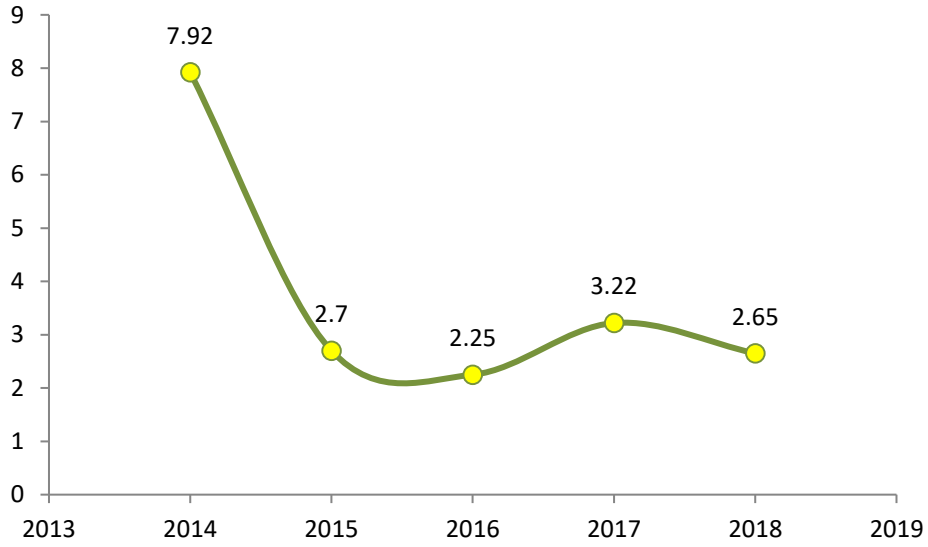
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan parsial dan sektoral. Sebaliknya harus dilakukan secara sistematik, terencana dan terintegrasi. Koordinasi lintas sektoral, sinkronisasi beragam program dan sinergi berbagai kegiatan perlu diwujudkan. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan yang telah dijalankan di Kota Magelang dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengingat lingkup persoalan lebih kecil dan operasionalisasi proses pemberdayaan dapat dilakukan berdasarkan kondisi lokal yang spesifik. Untuk itu dibutuhkan berbagai reorientasi kebijakan sehingga strategi tersebut dapat beroperasi

E. Inflasi

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2018 tidak ditemukan gejolak harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran dan laju inflasi kota Magelang dapat terkendali pada level rendah. Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48.

Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan,

rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Di tahun 2018 deflasi terjadi pada bulan April (0,05%), Agustus (0,21%) dan September (0,06%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,73%. Gambar berikut memperlihatkan laju inflasi Kota Magelang selama 5 tahun.

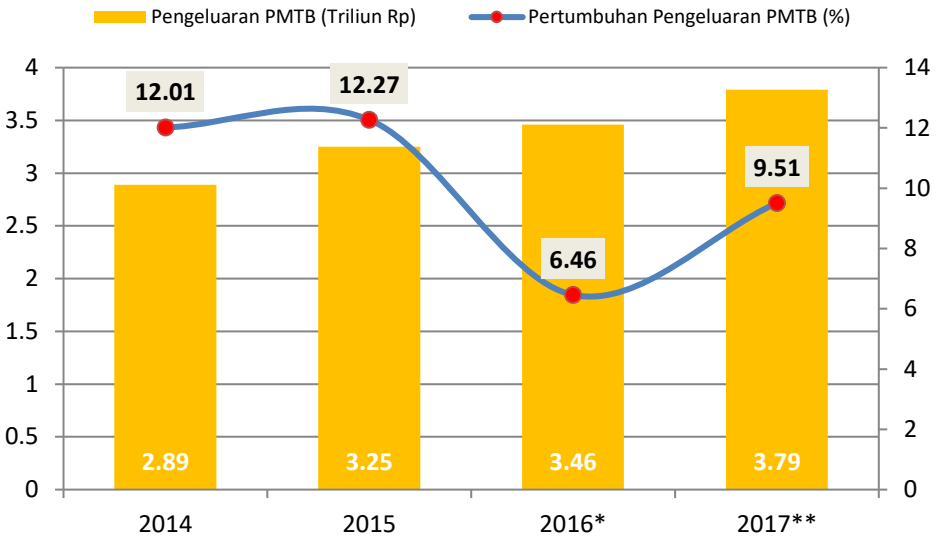


Gambar 2.17
Perkembangan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2014-2018
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019

F. Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah "pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas". BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal juga meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Sedangkan pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal, termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain.

Pada tahun 2017 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,789 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh 9,51%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 6,46%. Dominasi PMTB di tahun 2017 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,67%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,54% per tahun sepanjang tahun 2014-2017. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,98% per tahun selama periode 2014-2016. Namun demikian di tahun 2017 pengeluaran PDRB untuk PMTB non bangunan mampu tumbuh cepat mecapai 9,07% setelah di tahun sebelumnya hanya mampu tumbuh 4,30%.

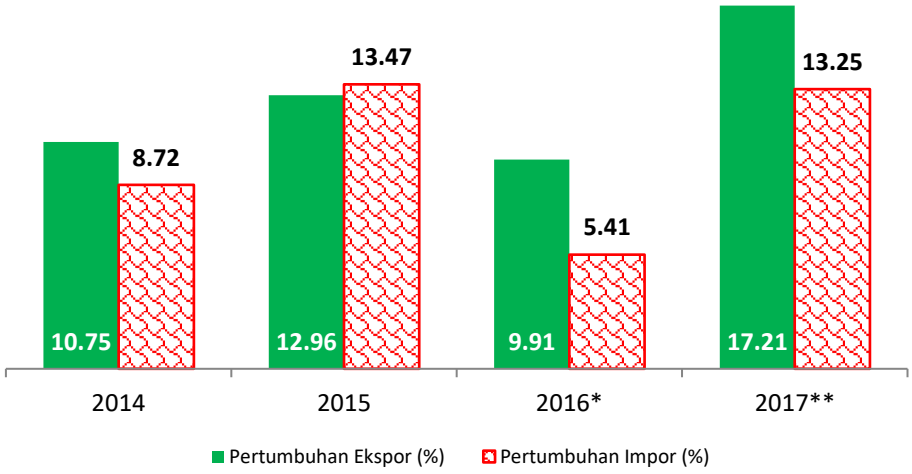


Gambar 2.18
Pengeluaran PMTB adhb(dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB (dalam %) di Kota Magelang, 2014-2017
Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
** Angka sementara ** Angka sangat sementara*

Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2017 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,15). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,670 triliun rupiah. Diprediksi investasi di Kota Magelang dari proksi PMTB akan terus tumbuh positif di tahun 2018 mencapai interval 4,082 triliun Rupiah sampai dengan 4,115 triliun Rupiah.

G. Ekspor Impor

Secara nominal besarnya ekspor dari sisi pengeluaran PDRB di Kota Magelang pada tahun 2017 mencapai 4,176 triliun Rupiah. Defisit neraca perdagangan masih terjadi dengan total pengeluaran PDRB untuk impor sebesar 6,453 triliun Rupiah. Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2017 yang mencapai 17,21%, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor (13,25%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah.



Gambar 2.19
Pola Pertumbuhan Ekspor dan Impor di Kota Magelang, 2014-2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
** Angka sementara ** Angka sangat sementara*

Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2018 diprediksi pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengeluaran impor, dengan nominal ekspor dalam rentang 4,381 triliun rupiah sampai dengan 4,462 triliun rupiah.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat kesejahteraan. Untuk mengetahui pertumbuhan tingkat kesejahteraan sosial yang sesungguhnya, membutuhkan berbagai indikator yang lengkap yang mampu menyuguhkan kebenaran yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Untuk itu, dalam bahasan ini akan dideskripsikan berbagai indikator kesejahteraan sosial sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Kota Magelang.

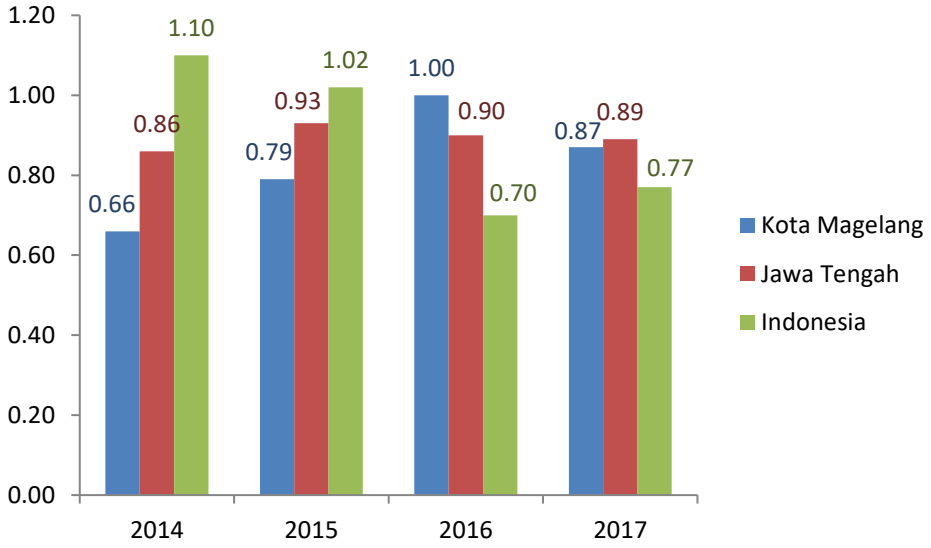
Analisis yang disajikan meliputi bagaimana posisi indikator kesejahteraan sosial Kota Magelang dibandingkan dengan wilayah hinterland, regional, maupun nasional. Indikator Kesejahteraan Sosial dalam bahasan ini diantaranya yaitu IPM, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, Dependency Ratio, Kemiskinan dan Pengangguran serta Ketimpangan Pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

A. Pembangunan Manusia

A.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM yang digagas oleh UNDP pada tahun 1990, dan disempurnakan metodenya pada tahun 2010, merupakan ukuran statistik untuk mengetahui capaian pembangunan manusia. Sebagai objek dan sekaligus subyek dari pembangunan, upaya untuk membangun kualitas hidup manusia tentunya menjadi penting untuk terus ditingkatkan. Angka IPM di Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar 77,84 tumbuh 0,87 persen atau bertambah 0,68 poin dibandingkan IPM tahun 2016 sekaligus menempatkan IPM Kota Magelang pada posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kota Semarang, Kota Salatiga,dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi.

Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2017 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (70,52) dan nasional (70,81). Selama periode 2011-2017 kemajuan pembangunan manusia tercepat Kota Magelang terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,00 persen sedangkan kemajuan pembangunan manusia paling lambat terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,39 persen, Dalam periode yang sama tercatat angka IPM Kota Magelang selalu di atas angka IPM Nasional maupun Provinsi, namun lebih lambat dalam kemajuan pembangunan manusia.



Gambar 2.20
Tren Pertumbuhan IPM Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (2014-2017)

Berdasarkan status pencapaiannya Kota Magelang berada pada kondisi IPM tinggi, namun tidak termasuk yang memiliki "Top Movers" atau daerah yang mengalami pertumbuhan IPM tinggi. Pertumbuhan IPM pada tahun 2017 didorong oleh peningkatan komponen pembentuknya sebagai berikut:

1. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan komponen IPM yang mengalami pertumbuhan paling tinggi. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 11,525 juta rupiah per tahun atau tumbuh 3,77% dari tahun sebelumnya.

2. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 1,74% namun masih pada kisaran 13-14 tahun (setara dengan jenjang pertama pada perguruan tinggi).
3. Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) terhitung tinggi mencapai rata-rata 76,66 tahun dengan AHH kaum perempuan yang lebih tinggi (78,5 tahun) dibandingkan dengan kaum laki-laki (74,52 tahun). Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik.

Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,2% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang.sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas. Dari sisi gender, pada tahun 2016 RLS di Kota Magelang masih sedikit diungguli oleh kaum laki-laki yang rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun, sementara kamu perempuan di Kota Magelang rata-rata memiliki lama studi sebesar 10 tahun. Di tahun 2017 diprediksi nilai IPM Kota Magelang mengalami laju yang cukup tinggi mencapai 77,8 melampaui target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan sebesar 76,9.

Tabel 2.17
Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2017 dan Tahun 2018

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017	76,66	13,79	10,30	11.525	77,84
2018*	76,80	14,29	10,29	11,742	78,35

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018
**) Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018*

A.2. Kesehatan

Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2018 ada 2 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.527, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 130,9. Angka ini lebih dari target tahun 2018 sebesar 120. Kondisi ini secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh rumusan penghitungan AKI yang dihitung per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kelahiran hidup di Kota Magelang hanya pada kisaran angka 1.500 sehingga apabila terjadi 2 kasus kematian saja angkanya akan menjadi tinggi.

Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2018 terdapat 20 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 13,1. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2018 sebesar 14 akan tetapi dengan adanya 20 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.

A.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin mendekati 100 maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. NIlai IPG tahun 2017 sebesar 96,26 semakin mendekati angka 100 yang mengindikasikan pembangunan berbasis gender di Kota Magelang sudah sangat bagus. Dan di prediksi di nilai penghitungan IPG di tahun 2018 akan semakin bagus, berkisar di angka 96,98.

Tabel 2.18
Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2010-2018

Tahun	IPG	IDG	IPM
2014	95,45	78,82	75,79
2015	95,81	75,83	76,39
2016	NA	NA	77.16
2017	96,26	76,28	77.84
2018*	96,98	77,83	78,35

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) menitik beratkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. IDG menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Nilai IDG semakin mendekati 100 mengindikasikan pemberdayaan gender yang semakin baik. Sementara nilai masing-masing komponen IDG menunjukkan persentase keterlibatan perempuan tersebut dalam kegiatan. IDG Kota Magelang 2017 sebesar 76,28 menunjukkan partisipasi perempuan di Kota Magelang sudah cukup bagus yaitu dukungan terbesar adalah keterbandingan partisipasi perempuan terhadap laki-laki secara profesional yaitu 51,78 persen, diikuti sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebanyak 41,83 persen dibandingkan laki-laki dan keterwakilan perempuan sebesar 20 persen.

Tabel 2.19
Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2017

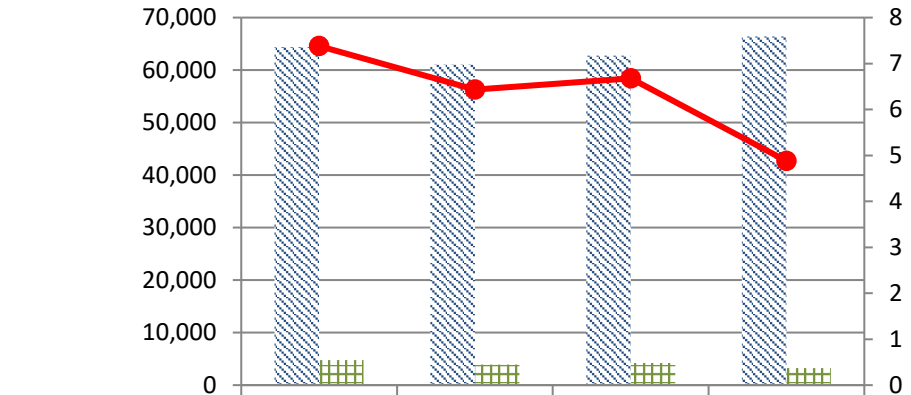
Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81
2016	NA	NA	NA
2017	20.00	51.78	41,83

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

B. Ketenagakerjaan

B.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian, penduduk merupakan faktor produksi penting dalam usaha memproduksi barang dan jasa. Berbeda dengan beberapa faktor produksi lainnya, tenaga kerja sangat peka terhadap perubahan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang pesat di suatu daerah, akan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja. Sebaliknya, keterlambatan pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu dapat menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja untuk keluar dari daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan memberi pengaruh yang positif terhadap masalah ketenagakerjaan. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif akan menyebabkan banyaknya pengangguran.



	2014	2015	2017	2018
Angkatan Kerja	64,382	61,060	62,775	66,389
Pengangguran	4,754	3,927	4,193	3,238
TPT	7.38	6.43	6.68	4.88

Gambar 2.21
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode 2010 – 2018 (minus tahun 2016 karena keterbatasan sampel Sakernas) angka TPT Kota Magelang menunjukkan tren yang menurun. TPT Kota Magelang pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017 dari 6,68 persen menjadi 4,88 persen. Penurunan TPT Kota Magelang disebabkan peningkatan jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2018, juga diikuti jumlah penduduk yang bekerja dari 58.582 orang pada tahun 2017 menjadi 63.151 orang pada tahun 2018. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 2.20
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2014-2018

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja	TPT	TPAK
	Bekerja	**Pengangguran Terbuka**	**(ribu orang)**	**(%)**	**(%)**
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	Na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32
2018	63,151	3,238	66,389	4,88	68,64

Sumber: BPS, 2018
Keterangan: * = Tidak ada publikasi

B.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Dari Gambar 2. di bawah dapat dilihat dalam periode 4 tahun terakhir (2015-2018) TPAK Kota Magelang menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan kondisi sosial ekonomi Kota Magelang relatif membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Kota Magelang. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

A. Seni Budaya

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2017 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan, kubro siswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Para pelaku kesenian budaya ini juga sering diminta ambil bagian dalam kegiatan FK-Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional), salah satu mitra Pemerintah Kota Magelang, dalam menyampaikan aneka pesan dari Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakat melalui jalur / media alternatif. Selain itu, ada pula event / acara

yang sudah terjadwal, seperti pertunjukan di kawasan Monumen Mantyasih. Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

B. Olah Raga

Prestasi Kota Magelang dalam bidang olahraga pada tahun 2018 di tingkat regional, yaitu: 4 peringkat di POPDA SD, 25 peringkat di POPDA SLTP, dan 21 peringkat di POPDA SLTA. Untuk tingkat nasional, ada 12 raihan peringkat dan Internasional 1 peringkat. Dukungan prasarana olahraga di Kota Magelang antara lain:

Tabel 2.21
Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Magelang Tahun 2018

No	Prasarana	KMU	KMT	KMS	Total
1	Lapangan Bola Voli	45	16	18	79
2	Lapangan Bola Basket	7	12	6	25
3	Lapangan Tenis	4	3	5	12
4	Lapangan Futsal	3	4	1	8
5	Stadion / Lapangan Sepak Bola				13
6	Lapangan Bulu Tangkis				51
7	Gedung Olahraga				9
8	Kolam Renang (Umum, fasilitas Hotel tidak termasuk)				3
9	Sasana Tinju / Beladiri				8
	TOTAL				**206**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2018

Keterbatasan prasarana olahraga menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kota Magelang. Dari total 206 fasilitas, 170 diantaranya (82,52%) kondisinya masih baik namun 36 lainnya (17,48%) kondisinya kurang baik.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu unggulan dari Kota Magelang, dengan keunggulan kompetitif dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga (terutama siswa sekolah) Kota Magelang telah mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional melalui berbagai prestasi yang berhasil diraih.

Prestasi juga diraih oleh warga Kota Magelang dari aneka kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang melalui kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2013 (kecuali tahun 2012), temuan KRENOVA Kota Magelang selalu mendapatkan penghargaan 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 perwakilan Kota Magelang berhasil meraih peringkat 15 dan juara 3 favorit pengunjung laman web Krenova Provinsi Jawa Tengah. Untuk Krenova tingkat Provinsi, pada tahun 2017 diikutsertakan temuan dengan nama Umbaran Lipat & Sepatu Tuna Netra; dan pada tahun 2018 mengikutsertakan temuan/ inovasi dengan nama Bantur Grill.

Sebagai upaya fasilitasi dan penggalian kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan, baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi, serta mendorong peran aktif mereka dalam mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan, maka mulai tahun 2010 Pemerintah Kota

Magelang melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan litbang daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2014	1. Persepsi Masyarakat terhadap *City Branding* Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. 2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan.
2015	1. Efektivitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.
2016	1. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Gunung Tidar sebagai Destinasi Wisata.

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2018

Prestasi lainnya yang diraih Pemerintah Kota Magelang dalam bidang IPTEK dan penerapannya adalah:

1. Pada tahun 2016 Kota Magelang berhasil menjadi nominator / finalis (3 besar) peraih penghargaan Budhipraja, serta meraih penghargaan Widigdapura. Untuk tahun 2017, Kota Magelang berhasil meraih peringkat 3 Budhipraja, dan tahun 2018 meraih peringkat 1 Budhipraja.

   Budhipraja adalah apresiasi pemerintah melalui Kemenristekdikti terhadap kabupaten / kota dalam mengimplementasikan teknologi yang diukur dalam 6 aspek, yaitu perencanaan dan inisiasi, SDM, infrastruktur, jaringan, dan hasil inovasi.

   Widigdapura adalah anugerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota atas dasar pembinaannya terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten / kota dalam mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga meningkatkan daya saing daerah.
2. Innovative Government Award (IGA) tahun 2017, peringkat 5 kategori Kota.
3. Innovative Government Award (IGA) tahun 2018, Top 10 Kota Sangat Inovatif.

Untuk peningkatan kualitas hidup warganya, pemerintah Kota Magelang mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tantangan dengan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kota Magelang menyediakan infrastruktur dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan SMART CITY yang diawali pada

Tahun 2015, Kota Magelang meraih predikat Smart City untuk kategori Smart Economy Kota Kecil, yang diselenggarakan oleh ITB & Kompas dalam kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI). Kemudian pada tahun

2016, Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan ITB mulai menyusun Roadmap Smart City, yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SmartCity di Kota Magelang. Pada Tahun 2017, pada kegiatan penilaian Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI), Kota Magelang kembali meraih predikat Kota Cerdas untuk kelompok kota kecil.

Model yang digunakan dalam Roadmap SmartCity adalah Garuda SmartCity Model (GSCM), dengan dimensi:

1. Smart Economy, kota ditopang perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya/potensi kota.
2. Smart Social, masyarakat memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah
3. Smart Environment, masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat, hemat dalam penggunaan energi pengelolaan energi

Ketiga dimensi tersebut, didukung oleh 3 (tiga) komponen yang mampu membangun Kota Cerdas, yaitu **layanan TIK, Tata Kelola, dan peran SDM yang baik**

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada tahun 2015, level kematangan Smart City Kota Magelang berada pada posisi Scattered dengan nilai 48,89. Sedangkan hasil pengukuran yang dilaksanakan melalui RKCI Tahun 2017, level kematangan pada posisi integrated dengan nilai 63,7. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan capaian target kinerja smart city dapat tercapai sebelum target waktunya, bahwa level kematangan integrated ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020, tetapi sudah dapat dicapai pada tahun 2017.

D. Agama

Sikap toleransi saling menghargai antar umat beragama di Kota Magelang merupakan salah satu kunci harmonisnya umat beragama di Kota Magelang. Rasa kebersamaan tanpa memandang status agama di Kota Magelang menjadi tolok ukur keberhasilan hidup bersama. Pada tahun 2017, penduduk Kota Magelang terdata beragama Islam sebanyak 84,73%, Kristen Protestan sebanyak 9,38%, Kristen Katolik sebanyak 5,32%, Hindu sebanyak 0,09%, Budha sebanyak 0,46%, dan Konghucu 0,02%.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang dapat dilihat dari jarak antara tempat ibadah berbagai agama yang tidak pernah ada perselisihan ataupun perbuatan yang saling merugikan. Menurut data tahun 2017, jumlah masjid sebanyak 160 buah, musholla sebanyak 217 buah, gereja Katolik sebanyak 2 buah, gereja Protestan sebanyak 26 buah, vihara ada 2 buah dan klenteng sebanyak 2 buah, serta rumah ibadah ada 4 buah. Suasana kondusif seperti ini tentu sejalan dengan dengan Visi Kota Magelang, yaitu “Terwujudnya Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas dilandasi masyarakat sejahtera dan religius”.

Pada tahun 2017, jemaah yang berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji berjumlah 119 orang yang terdiri dari 46 pria dan 73 wanita. Jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 160 orang.

2.1.3. ASPEK LAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 8 program 44 indikator yang terdistribusi dalam 8 sasaran, dengan capaian sampai dengan Semester II Tahun 2018 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	66,00%	95,46%	144.36%	●
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	53,00%	51,05%	96.32%	▶
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	99,61%	92,74%	93,10%	▶
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	120%	114%	101,54%	89,07%	▶
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84%	78,00%	77,70%	99.61%	▶
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100%	88,00%	94,74%	107.65%	●
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:132	1:136	1 : 132	103%	●
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 13-15	1:290	1:290	1 : 238	121.84%	●
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:17	100%	●
		Rasio guru SMPterhadap murid SMP	1:14	1:14	1:17	100%	●
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0.01	0.02	50%	▼
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0.13	0.10	40%	▼
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,002	0.0005	200%	●
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	150%	146.26%	97.50%	▶
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	165%	157%	144.31%	91,91%	▶
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	65%	100%	153,84%	●
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24 pelajar	42 pelajar	42 pelajar	100%	●
		Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	1	1	100%	●
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran	100%	85%	100%	117,64%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		di semua tingkatan					
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	87%	100%	114,94%	●
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	30%	60%	200%	●
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	96.99%	98.68%	101,74%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	15.00%	15.00%	100%	●
		Jumlah Juara FASI	-	4	-	-	-
		Jumlah Juara MTQ	2	1	-	-	-
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35.50%	75.27%	212%	●
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14.05%	52.65%	374%	●
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	85%	89.66%	105.48%	●
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	53.15%	45.52%	85.64%	▶
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95.10%	94.18%	99.03%	▶
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	67.67%	76.71%	113.35%	●
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	65%	68.97%	106%	●
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	65%	68.42%	105.26%	●
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	2.476	123.8%	●
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	85%	95%	112%	●
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	46	34		
		- Provinsi	34 pelajar	31 pelajar	22 pelajar	71%	▼
		- Nasional	18 pelajar	15 pelajar	12 pelajar	80%	▼
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97%	90%	100%	111%	●
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	100%	97%	100%	104%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	90%	45%	100%	222%	●
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	85%	35%	100%	286%	●
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	92.74%	60.68%	65.43%	▼
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan *spiritual teaching*	60%	45%	71.22%	158%	●

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 44 indikator urusan pendidikan mayoritas realisasinya sudah tercapai bahkan melampaui target tahun 2018. Indikator yang mampu memenuhi atau bahkan melebihi target capaian kinerja sebanyak 31 buah (70,45%), sedangkan 8 indikator (18,18%) akan tercapai dan sebanyak 5 indikator (11,36%) perlu upaya keras untuk mencapai. Indikator urusan pendidikan yang masih perlu upaya keras untuk mencapai dengan nilai realisasi ≤ 80% adalah:

1. Angka putus sekolah SD/MI dan Angka putus sekolah SMP/MTs

   Realisasi indikator ini masih belum memenuhi target disebabkan oleh faktor non teknis pada kasus-kasus putus sekolah yang terjadi. Faktor tersebut adalah kenakalan siswa dan pengaruh keharmonisan keluarga pada kondisi mental siswa. Sebanyak 3 siswa SD Putus Sekolah di antara dari 14.369 siswa SD di Kota Magelang dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang *broken home.* Hal ini juga menandakan belum optimalnya pembinaan terhadap siswa sehingga masih ditemukan siswa putus sekolah SD/MI maupun SMP/MTs.

2. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional

   Faktor penyebab belum tercapainya indikator ini adalah :

   a. Penetapan target indikator pada awal RPJMD masih mempertimbangkan capain prestasi pada jenjang SMA/SMK sehingga ketika pada tahun 2017 kewenangan pengelolaan SMA/SMK berpindah dari Pemerintah Kota menjadi Pemerintah Provinsi maka realisasi target indikator menjadi susah tercapai.
   b. Masih kurangnya bimbingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi pada Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS untuk menghadapi ketatnya kompetisi.

3. Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

   Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada Tahun 2018 yang mengandalkan fasilitasi anggaran BOSDA. Dari Jumlah Guru Pembina

PRAMUKA sebanyak 1.473 orang, yang sudah mengikuti kursus Mahir Dasar baru sejumlah 885 orang. Pelaksnaan kegiatan kursus mahir dasar untuk memenuhi kekurangan target tentunya sangat memberatkan BOSDA. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah belum optimal dan belum efektif

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, terdapat beberapa indikator yang capaian realisasinya jauh melebihi target hingga mencapai ≥200% yaitu:

1. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun

   Faktor pendorong tercapainya indikator persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 tahun hingga 200% adalah adanya pembinaan dan pendampingan secara konsisten oleh sekolah kepada siswa melalui guru Bimbingan Konseling.

2. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi *universal design*

   Realisasi indikator persentase sarana prasarana pendidikan memenuhi *universal design* mencapai 200% didorong oleh adanya perhatian Pemerintah Kota Magelang untuk mengembangkan kota inklusif yang salah satu komitmennya diwujudkan dengan penyusunan dokumen *Blueprint Universal Design* Kota Magelang pada tahun 2017. Dokumen ini menjadi pendorong bagi OPD, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang untuk mewujudkan sekolah inklusif yang secara fisik memenuhi *universal design.*

3. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

   Kinerja indikator ini sudah jauh melampaui target sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 presentase Guru PAUD di Kota Magelang yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 96,20%, tahun 2017 sebanyak 72,62% sedangkan tahun 2018 sebesar 75,27% dari target 35,5%. Kondisi ini menunjukkan manajemen data dalam penetapan target harus diperbaiki agar bisa lebih menggambarkan kondisi riil.

4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs

   Kinerja indikator ini sebesar 222% (target 45%, realisasi 100%) didorong oleh adanya perubahan kebijakan yang sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 pelaksanaan CBT SMP/MTs masih sebatas pada rintisan dan uji coba belum ditetapkan secara keseluruhan untuk semua sekolah kemudian pada tahun 2017 muncul kebijakan *resource sharing* yang memperbolehkan pelaksanaan CBT oelhs ekolah yang sarananya terbatas di sekolah lain. Kondisi ini menjadi pendorong dalam pencapaian pelaksanaan CBT pada level SMP/MTs.

5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi

   Realisasi indikator ini mencapai 286% didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dengan harga yang relatif terjangkau sehingga setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi.

Perlu mendapat perhatian bahwa meskipun kualifikasi pendidikan mayoritas guru PAUD, SD, dan SMP adalah sarjana ataupun D-IV namun jumlah untuk yang bersertifikat pendidik masih pada kisaran 50-77%. Selain itu juga terdapat masalah distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 2.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018.

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	1. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	●
		2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	1,80%	>100%	●
		3. Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	0,45%	>100%	●
		4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	0,15%	>100%	●
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	70%	100%	142,85%	●
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	97%	97.99%	101%	●
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	●
		2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	●
		3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0,31%	0,25%		●
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	86,1%	84,3%	85.21%	101%	●
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)	100	100	100	100	●
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100	100	100	100	●
		Angka Kesakitan DBD	<50	<50	39,99	≥100%	●
		Angka Prevalensi Kasus (*Case Notification Rate* = CNR) TB	<101	<104	151.50	≤100%	▼
		Angka Penemuan Kasus (*Case Detection Rate* = CDR) TB	90	90	59.29	65,88%	▼
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0,5%	0,02%	≥100%	●
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	82.50%	100%	121,2%	●
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	60%	100%	166,66%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	80	100%	125%	●
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100	100%	100%	●
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	80%	100%	125%	●
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	75	100%	133,33%	●
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	15%	100%	●
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	20%	43.75%	218,75%	●
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	58,82%	47.06%	80,006%	▶
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100%	117,64%	●
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	98.49%	102,59%	●
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	94.62%	105,13%	●
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	18%	100%	555,55%	●
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	75%	75.92%	101,22%	●
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	18%	100%	555,55%	●
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	87%	97.80%	112,41%	●
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	100%	105,26%	●
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	100%	108,69%	●
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	100%	100%	●
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	AA	A		▶

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 37 indikator yang telah mencapai target. Terdapat 2 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi yaitu indikator Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB dan Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

1) Angka Prevalensi Kasus TB dengan kinerja capaian 151, masih lebih tinggi dari target yaitu <104. Hal ini menunjukkan masih cukup tingginya penemuan kasus TB di masyarakat. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya TB yang sangat mudah menular dan tidak segera berobat meskipun sudah ada gejala TB.
2) Angka Penemuan Kasus TB dengan capaian 59.29%, masih jauh dari target sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena penghitungan pada Tahun 2018 sudah memilah antara penderita TB dari dalam Kota dan luar Kota Magelang. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat TB yang masih rendah dan adanya masyarakat yang berobat ke dokter mandiri, sehingga tidak ada laporan adanya kasus TB juga mempengaruhi indikator ini.

Dari indikator yang sudah melampaui target terdapat indikator yang melampaui target ≥200% yaitu:

1. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design

   Realisasi pencapaian target indikator ini berkinerja 218,75%. Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kota inklusif sesuai dokumen *Blue Print Universal* Design Kota Magelang Tahun 2017
2. Cakupan Puskesmas Ramah Anak

   Realisasi pencapaian target indikator berkinerja 555,55% didorong oleh komitmen Magelang sebagai Kota Layak Anak, di sektor kesehatan yang diwujudkan dengan penyediaan Puskesmas ramah anak.

Berdasarkan capaian kinerja indikator makro daerah dan program urusan kesehatan maka terdapat beberapa permasalahan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018 ada 2 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.527, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 130,9. Angka ini lebih dari target tahun 2018 sebesar 120. Untuk AKB juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2018 terdapat 20 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 13,1. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2018 sebesar 14 akan tetapi dengan adanya 20 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.

2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit karena persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri baru mencapai 47,06% (8 dari total 17 kelurahan).
3. Angka prevalensi kasus TB yang tinggi serta angka penemuan kasus TB yang rendah dikarenakan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
4. Belum sinkronnya data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani, khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta, karena belum terbangunnya integrasi data antar fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Belum tercapainya target 100% ODF (*Open Defecation Free*). Data dari BPS (2017) menunjukkan terdapat 1.164 KK yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Penataan Ruang. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dengan program-program serta indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018 dan Tabel 2.26.

Sub Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.25
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	1.342 meter	1.712 meter	128%	●
		2. Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	71,89%	66,34%	71%	107%	●
2.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	86%	87%	101%	●
		2. Jumlah siphon yang dibangun	10	7	8	114%	●
3.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	74%	50%	68%	▼
4.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	84%	81%	96%	●
5.	Program pengembangan	1. Persentase kawasan strategis					▼

No.	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
					Target 2018	Capaian 2018		
	wilayah strategis dan cepat tumbuh		yang terbangun	4 kawasan	4 kawasan	2 kawasan	50%	
6.	Program pengembangan wilayah perbatasan	1.	Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	●
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.	Persentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	95%	89%	94%	●
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	91%	93%	102%	●
		2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	88,5%	94%	106%	●
9.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1.	Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	●
		2.	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	100%	80%	43%	54%	▼
10.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1.	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	100%	400%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Kinerja urusan sub urusan pekerjaan umum relatif baik dengan capaian 11 indikator (78,57%) sebesar 100% atau lebih meskipun 3 indikator lainnya (21,43%) masih perlu upaya keras untuk dapat tercapai, yaitu:

1. Tersedianya update badan usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan. Mekanisme monitoring yang dilaksanakan untuk pendataan badan usaha belum efektif karena dari 192 badan usaha yang ada di Kota Magelang hanya 96 yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi, baik baru maupun perpanjangan, atau hanya 50% sedangkan target sebesar 74%.

2. Indikator persentase kawasan strategis yang terbangun dengan target 4 kawasan, hanya tercapai 2 kawasan strategis atau 50% dari target, dikarenakan akselerasi pembangunan sehingga 2 kawasan strategis yang lain sudah terbangun. Dua kawasan strategis yang menjadi obyek pembangunan pada tahun ini adalah:
    - Kawasan Gunung Tidar, berupa pembangunan monumen tanah air dan gardu pandang Gunung Tidar.
    - Kawasan Sport Center Sanden berupa pembangunan Kolam Renang (Tahap V) dan Lapangan Tenis Indoor serta penyempurnaan bangunan pengamanan di Stadion Moch. Soebroto.
3. Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas, dengan target 80% hanya tercapai 43% sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar 54%. Kondisi trotoar Kota Magelang, sebagai tolak ukur indikator ini, yang memenuhi standar aksesibilitas hanya 102.132 meter dari total panjang 237.830 meter. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi yaitu lebar trotoar, kondisi trotoar yang rusak di beberapa ruas jalan serta adanya hambatan bagi pejalan kaki di trotoar yang ditumbuhi pohon.

Meskipun hampir seluruh indikator kinerja program pada sub urusan pekerjaan umum tercapai sesuai target namun terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum semua pusat-pusat kegiatan baru pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur terhubung dengan jaringan jalan.
2. Saluran drainase kota masih tercampur dengan air limbah domestik.

Sub Urusan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan sub urusan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	50%	8.3%	16%	▼
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	●
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	16.67%	16.67%	▼
2	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	33 %	25%	24.14%	96.56%	●
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	10%	1%	0%	0%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	38%	32%	16.67%	52%	▼
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua		80%	42.94%	54%	▼

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator program yang dilaksanakan oleh sub urusan Penataan Ruang di tahun 2018, hanya ada 2 (dua) indikator yang mencapai target , dan ada 4 (empat) indikator yang perlu upaya keras. Indikator-indikator yang tidak dapat mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL). Hingga triwulan IV tahun 2018 Kota Magelang baru memiliki 1 dokumen tata ruang yaitu RTRW Kota Magelang, atau sekitar 8 % dari total 13 dokumen, sedang target di tahun 2018 sebanyak 6 dokumen yaitu 1 Perda RTRW dan 5 perda RDTRK atau sebesar 46,15%. Tahun 2018 revisi dokumen RTRW sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Nomor surat 650/0013221 tanggal 15 Agustus 2018. Hingga Triwulan IV Raperda Revisi RTRW sudah diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan substansi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:
   - Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan peraturan daerah tentang RDTRK, mulai dari penyusunan materi teknis, konsultasi publik, persetujuan DPRD, rekomendasi peta dari BIG, rekomendasi teknis dari BKPRD Provinsi, Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta penetapan DPRD Kota Magelang. Dari 5 (lima) Raperda RDTR yang diajukan persetujuan substansi ke provinsi sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan substansi.
   - Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
   - Belum adanya harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran pengajuan persetujuan substansi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
   - Dinamika peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan penetapan dokumen rencana tata ruang.

2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 16,67 % dari target yang ditetapkan di tahun 2018 sebesar 100%. Dari 6 dokumen peta yang direncanakan (terdiri dari 1 dokumen peta RTRW (1:25.000) dan 5 peta rencana rinci atau RDTRK baru (1 : 5.000)), baru 1 dokumen peta RTRW yang sudah tersedia dan diinformasikan ke masyarakat. Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Raperda tentang RDTRK yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang tahun 2019 ini.
3. Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1% karena realisasi hingga triwulan IV Tahun 2018 masih 0%. Rendahnya kinerja indikator ini dikarenakan belum ada peraturan mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik retribusinya melalui Perda Retribusi Pelayanan Tertentu. Rancangan Perda Reklame sudah tersusun di tahun 2017 tetapi hingga kini belum dapat ditetapkan karena menunggu revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.
4. Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga triwulan IV Tahun 2018 tercapai 16.67 % dari target 32.7 %. Jumlah teguran yang dilaksanakan di tahun 2018 sejumlah 28 teguran dari target 168 bangunan baru yang belum ber IMB. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber IMB dan menurunnya pelanggaran tata ruang sehingga jumlah surat teguran menurun.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik	100.000	98.54%	97.99%	99.44%	▶
2	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Cacaban	Pengurangan luas kawasan Kumuh	1.040	1.040	0.620	59.62%	▼
3	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Gelangan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	7.126	3.126	1.610	51.50%	▼
4	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Selatan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	1.400	1.400	0.300	21.43%	▼
5	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Utara	Pengurangan luas kawasan Kumuh	0.000	0.000	0.000	TUNTAS	●
6	Program Pembangunan Kawasan Permukiman	Pengurangan luas kawasan Kumuh	7.900	4.900	0.000	0.00%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
	Kelurahan Kedungsari						
7	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kemirirejo	Pengurangan luas kawasan Kumuh	1.850	1.850	0.000	0.00%	▼
8	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Selatan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	7.710	7.710	7.710	100.00%	●
9	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Utara	Pengurangan luas kawasan Kumuh	0.190	0.190	0.000	0.00%	▼
10	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magelang	Pengurangan luas kawasan Kumuh	4.092	2.390	2.390	100.00%	●
11	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magersari	Pengurangan luas kawasan Kumuh	5.280	1.880	4.220	224.47%	●
12	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Panjang	Pengurangan luas kawasan Kumuh	3.770	1.090	1.610	147.71%	●
13	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Potrobangsan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	4.110	2.830	3.830	135.34%	●
14	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Selatan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	2.810	1.070	1.470	137.38%	●
15	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Utara	Pengurangan luas kawasan Kumuh	10.895	4.895	6.104	124.70%	●
16	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Selatan	Pengurangan luas kawasan Kumuh	0.400	0.400	0.000	0.00%	▼
17	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Utara	Pengurangan luas kawasan Kumuh	4.460	3.000	0.340	11.33%	▼
18	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Wates	Pengurangan luas kawasan Kumuh	4.370	2.590	0.000	0.00%	▼
	REKAP PENANGANAN KAWASAN KUMUH TINGKAT KOTA	Pengurangan luas kawasan Kumuh (ha)	67.403	40.361	30.204	74.83%	▼
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1)Persentase Penduduk berakses air minum	100%	97.00%	93.78%	85.78%	►
		2) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90.00%	89.00%	93.34%	104.87%	●
		3) Tersedianya sistem air limbah skala kawasan	12%	9.00%	3.87%	43.03%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
20	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	5 unit	3 unit	4 unit	133%	●

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2019

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui 22 indikator. Terdapat 10 indikator (45,45%) yang tercapai sesuai/ melebihi target yang telah ditetapkan, 1 diantaranya sudah tuntas atau mencapai target akhir tahun RPJMD 2021. Selain itu, 2 indikator (9,09%) akan mencapai target, dan 10 indikator (45,45%) lainnya perlu ada upaya keras untuk mencapai target.

Agregat realisasi Program Pembangunan Infrastruktur, yang diukur dari rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik, mencapai 97.99% atau sebesar 1.816,801 Ha dari luas total kota 1.854 Ha. Masih tersisa penanganan infrastruktur pada kawasan kumuh sebesar 37,199 Ha yang menjadi tugas pemerintah daerah. Target *coverage* infrastruktur pada tahun 2018 sebesar 98.54% atau seluas 1826,958 Ha. Jika realisasi sebesar 97.99% atau sebesar 1.816,801 Ha. Maka realisasi kinerja pada Tahun 2019 sebesar 99.44%. Faktor pendorong penurunan luasan kawasan kumuh di Kota Magelang adalah:

1. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik OPD maupun lembaga donor, untuk menjalankan program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh secara terpadu
2. Kebijakan dan strategi untuk fokus penanganan pada *lokus* yang menjadi prioritas penanganan dan pencegahan kumuh.

Beberapa sub variabel kawasan kumuh dan infrastruktur permukiman yang harus menjadi prioritas untuk percepatan capaian target urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu:

1. Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran, berupa ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran (target sebesar 95,84%) dan ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebesar 49,76%.
2. Penyediaan sarana sanitasi komunal berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), kekurangan penanganan sebesar 67,75%.
3. Ketidakteraturan bangunan dengan target 52,20%. Faktor penghambat untuk penanganan masalah ini adalah keterbatasan dukungan pembiayaan karena biaya stimulan masih fokus untuk pengentasan rumah tidak layak huni, sehingga partisipasi masyarakat memerlukan pemicuan tersendiri pada saat perancangan kawasan secara tematik.

3. Kondisi drainase, dengan target 50,39%, terkait dengan desain saluran drainase yang sebagian besar desain tertutup tanpa dilengkapi bak kontrol, bukan pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.
4. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis sebesar 40,48%. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kawasan kumuh saja melainkan pada pengolahan sampah tingkat kota.

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 10 program dengan 46 indikator. Capaian kinerja masing-masing indikator pada tiap program terlihat pada Tabel 2.29 Target dan realisasi indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018.

Tabel 2.28
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	10	10	100%	●
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	6	6	100%	●
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	2	2	100%	●
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	●
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	37,5%	100%	266,66%	●
		Persentase ormas yang difasilitasi	9,84%	8,27%	9,27%	112,09%	●
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	72,65%	90,81%	▶
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	100%	●
		Perda pelarangan peredaran narkoba	0	1	0	NA	-
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	3	3	100%	●

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,47%	2,87%	195,24%	●
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	6%	6,47%	106,41%	●
		Rasio jumlah siskamling aktif	1,00	0,84	0.72	85,71%	▶
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47.5%	0%	36,94%	92,35%	▶
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71	5,88	8	136,05%	●
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	50%	50%	100%	●
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	50%	40%	80%	▼
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	11,76%	11,76%	100%	●
		- Pratama	5	2	2	100%	●
		- Madya	0	0	0	0	▼
		- Utama	0	0	0	0	▼
		Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	Ada	ada	100%	●
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	100%	●
		Tingkat partisipasi politik	-	67	76,1	113,55%	●
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	72,2%	76,67%	106,19%	●
		Database ormas yang akurat	77%	71%	70,97%	100,8%	●
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	35,19%	35,48%	100,82%	●
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari	3 kali/ hari	3 kali/ hari	100%	●
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	92%	100%	108,7%	●
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA	6,46	7,6	117,65%	●

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	11,67	24	200,66%	●
		Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	98%	95%	100%	105,26%	●
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	74,25	60,4	81,35%	▶
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	14,26%	32%	224,4%	●
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	12	6	50%	▼
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	92%	100%	108,7%	●
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	NA	1	1	100%	●
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-	1	-	0	▼
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	35%	41,38%	118,23%	●
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	NA	5%	12,22%	244,4%	●
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	60%	66,67%	111,12%	●
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	6	6	100%	●
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	7%	9,51%	135,86	●
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	2	-	-	100%	●
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	15%	-	0	▼
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	2	-	-	100%	●
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%	100%	-	-	-

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kesbangpol Kota Magelang, 2018.

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 > 80% target 2018)
- ▼ : Tidak tercapai (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 46 indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan, terdapat sebanyak 38 indikator (82,61%) telah tercapai 100% atau lebih dari target tahun 2018, 4 indikator (8,70%) tercapai lebih dari 80% dan 4 indikator lainnya tercapai kurang dari 80% sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapai target.

Indikator yang masih perlu upaya keras atau memperoleh capaian dibawah ≤ 80% antara lain :

1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana Tingkat Madya dan Utama. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan karena beberapa faktor yaitu:
   a. Belum ada kebijakan/ regulasi di tingkat pusat maupun provinsi yang dapat dijadikan rujukan daerah dalam penetapan standar sarana dan prasarana penanggulangan bencana, baik pada level pra bencana, pada saat bencana dan paska bencana.
   b. Belum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Magelang selaku pemangku fungsi utama koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Sejauh ini BPBD di Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio.

Terkait kelurahan tangguh bencana, dari hasil penilaian atas 17 kelurahan di Kota Magelang terdapat 2 kelurahan dengan kategori Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35), yaitu Kelurahan Wates dan Rejowinangun Utara, sedangkan untuk kategori Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50) dan Utama (skor 51-60) tidak ada.

2. Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh Linmas

Penyebab rendahnya capaian kinerja indikator ini adalah keterbatasan kapasitas anggota linmas, karena rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas.

3. Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan

Pembangunan pusat keagamaan di Kota Magelang mengalami kendala ketersediaan lahan.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan situasi kondusif di Kota Magelang dibuktikan dengan kinerja positif beberapa indikator yang melebihi 100%. Komunikasi dan koordinasi berbagai elemen dilaksanakan secara intensif untuk meminimalisir dampak negatif faktor eksternal dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, sehingga kegiatan-kegiatan seperti pelatihan anggota FKDM dalam deteksi dini dan sosialisasi mengenai P4GN terlaksana melampaui target. Namun harus menjadi perhatian bahwa persentase masyarakat dan pelajar yang memiliki pengetahuan mengenai P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika) masih sangat rendah, hanya 2,87% di kalangan masyarakat dan 6,47% di kalangan pelajar. Hal ini menjadikan masih adanya ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2.1.3.1.6. Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2018 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	96,78%	96,78%	▶
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00 %	30%	15.25%	50,83%	▼
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74 %	11%	13,44%	122,18%	●
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	●
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	4	4	100%	●
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	30%	100%	1003%	●
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	75%	68,75%	91,66%	▶
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	58%	76,92%	132,62%	●
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	20%	30.89%	154,45%	●

Sumber : Dinas Sosial Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 7 (tujuh) indikator (70%) yang sudah memenuhi target. Masing-masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih. Sedangkan 2 (dua) indikator (20%) akan tercapai yaitu indikator Cakupan Pendistribusian Proposal Hibah dan Bansos dan indikator Persentase Penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS, Pemulung dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Satu indikator (10%) yang kinerjanya masih perlu usaha keras (50,83%) yaitu Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial.

Pada tahun 2017 sebanyak 70 orang lanjut usia terlantar telah menerima jaminan sosial ASLUT berupa uang sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya yang berasal dari dana Provinsi dan diberikan selama 10 bulan setiap tahunnya. Program ini telah berakhir pada tahun 2018 dan diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2018 ada 459 lanjut usia terlantar di Kota Magelang sedangkan jumlah lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 70 orang, sehingga baru sebesar 15,25% lanjut usia terlantar yang mendapatkan jaminan sosial. Untuk pencapaian target pada indikator ini terkendala keterbatasan kapasitas APBD Kota Magelang. Program-program bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan yang ada masih mengandalkan program-program dari pemerintah pusat yang sifatnya terbatas, sehingga belum mencakup seluruh lanjut usia terlantar tidak potensial yang ada.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penanganan masalah sosial di Kota Magelang juga menghadapi permasalahan keterbatasan sarana sosial dan ketersediaan data kemiskinan yang valid dan mutakhir untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif, seperti misalnya kantor pelayanan maupun rumah singgah untuk penanganan PMKS. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dalam peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja pada tiap program dapat dilihat pada Tabel 2.30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase Wirausaha Baru	10%	6%	10%	166.67%	●
		2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	70.00%	68.9%	98,42%	►
		3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis	80%	0.00%	80.00%	800%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		kewirausahaan					
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.50%	5%	13.22%	264%	●
		2. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	65.00%	56.25%	87%	►
		3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.50%	5%	81.25%	1625%	●
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Coverage asuransi tenaga kerja	75%	70%	71.99%	102.84%	●
		2. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	100%	200%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2018

Keterangan

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥ 100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 8 (delapan) indikator kinerja urusan ketenagakerjaan, 7 (tujuh) diantaranya (87,5%) telah mencapai target tahun 2018, bahkan beberapa indikator mencapai kinerja >200% yaitu:

1. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP

   Indikator tenaga kerja tersertifikasi BNSP ditargetkan 5% di tahun 2018 namun realisasi kinerja mencapai 81.25%. Dari 48 orang yang mengikuti ujian kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk ada 39 peserta yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan jenis pelatihannya.

2. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi

   Sampai akhir tahun 2018 jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi BNSP sebanyak 39 orang dari 279 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi atau sebesar 13,22% sedangkan target yang ditetapkan hanya 5%.

   Meskipun kinerja untuk indikator ini positif namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan BNSP masih tergolong rendah (yaitu 13,22%).

Selain permasalahan tersebut masih ada indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Secara rinci pelatihan ketenagakerjaan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan.

Capaian untuk pelatihan berbasis kompetensi belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 56.25% dari target yang telah ditetapkan (65%). Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena keterbatasan kapasitas pada kelas pelatihan yang diminati pencari kerja dan belum semua pencari kerja memiliki orientasi untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Adapun jenis pelatihan yang telah diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Kota Magelang di Tahun 2018 beserta jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31
Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan Tahun 2018

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta		Jumlah Peminat	
A	**Diklat Berbasis Kompetensi**	**279**	**orang**	**496**	**orang**
1	Diklat menjahit bagi pencari kerja	52	orang	102	orang
2	Diklat bordir bagi pencari kerja	20	orang	25	orang
3	Diklat bahasa asing bagi pencari kerja	30	orang	54	orang
4	Diklat komputer	11	orang	15	Orang
5	Diklat tata boga bagi pencari kerja	20	orang	40	orang
6	Diklat tata rias bagi pencari kerja	52	orang	100	orang
7	Diklat Teknisi HP bagi pencari kerja	10	orang	13	orang
8	Diklat Montir Sepeda Motor bagi pencari kerja	20	orang	39	orang
9	Diklat Mekanik Junior bagi pencari kerja	32	orang	67	orang
10	Diklat Basic Office bagi pencari kerja	16	orang	20	orang
11	Diklat Juru Las bagi pencari kerja	16	orang	21	orang
B	**Pelatihan Kewirausahaan**	**20**	**orang**	**45**	**orang**
1	Pelatihan spa bagi pencari kerja	10	orang	11	orang
2	Pelatihan souvenir bagi pencari kerja	10	orang	34	orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2018

Di luar permasalahan sertifikasi tenaga kerja, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam penyelanggaraan urusan ketenagakerjaan yaitu belum terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja Negeri dan Swasta

2.1.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada Tabel 2.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018.

Tabel 2.32
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	47,37%	63,41%	133.86%	●
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,04%	0.05%	0.0112%	446,43%	●
		Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	15	20	48	240%%	●
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	4%	8,11%	202,75%	●
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	20%	5,07%	25,35%	▼
		Persentase partisipasi	35%	23%	11,38%	49,48%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		perempuan di lembaga swasta					
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	78,5%	60,97%	77,67%	▼

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2018.

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 15 indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan pada tahun 2018 terdapat 12 indikator (80%) tercapai di atas target yang ditetapkan di tahun 2018 namun masih ada 3 (tiga) indikator (20%) yang perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK). Dari 40.493 perempuan yang bekerja di Kota Magelang, sebanyak 2.055 bekerja di lembaga pemerintah dan 4.603 bekerja di sektor swasta. Rendahnya TPAK perempuan sejalan dengan situasi di tingkat nasional. Salah satu faktor penghambat bagi perempuan untuk bekerja adalah faktor internal seperti beban pengasuhan anak dan dukungan keluarga.

Beberapa indikator sudah tercapai dan melebihi target dengan kinerja ≥200% yaitu: Rasio KDRT, Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas. Pencapaian ini didorong oleh adanya Komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan Kota Layak Anak dan pembangunan responsif gender. Meskipun telah tercapai sesuai target namun masih terjadinya KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapat perhatian. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan dalam upaya mewujudkan kota layak anak yaitu terbatasnya infrastruktur ramah anak seperti misalnya ruang terbuka publik untuk aktivitas bermain anak dan kawasan tanpa rokok.

2.1.3.1.9. Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentasi unit usaha yang telah bersertivikasi NKV	4,24%	2,4%	2,42%	100,18%	●
2	Program Pemberdayaan	Prosentase Petani yang melaksanakan	52.94%	11,76%	11,76%	100,04%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
	Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan	GAP					
		Rasio petani terlatih	90%	85%	85,88%	101,04%	●
3	Program pencegahan dan penanggulangan	Prosentase hewan sehat	87%	83%	93,33%	112,44%	●
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	5	7	140%	●
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	3%	4,24%	141,18%	●
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	11	11	11	100%	●
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal	4,24%	2,42%	3,42%	141,32%	●
7	Program penerapan peningkatan teknologi pertanian dan perkebunan	Luas Lahan Pertanian Organik	1,14	0,98	1.00	102,04%	●
		Prosentase petani yang telah menerapkan teknologi pertanian	72%	51,70%	78,8%	152,46%	●
8	Program peningkatan penerapan teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Organik	15	6	6	100%	●
		Peternak ayam buras/broiler	5	2	2	100%	●
		Jumlah Pelaku Usaha peternak kelinci	5	2	2	100%	●
		Jumlah Pelaku Usaha Peternak Kambing/Domba	5	2	2	100%	●
		Rasio peternak terlatih	90%	85%	85	103,44%	●
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Daging Ruminansia	1.401.690	1.233.486	1.084.242	95,65%	▶
		Daging Unggas	5.660.315	5.366.516	6.504.134	102,16%	●
		Telur	500.000	440.000	71.038	16,14%	▼
		Susu	209.000	197.600	214.830	108,72%	●
10	Program Peningkatan Produksi	Padi	3.120.00	3.180.00	3.120.00	98,11%	▶
		Jagung	11	11	14	127,27%	●
		Ubi Kayu	13,5	13,5	16	118,52%	●

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Berdasarkan capaian kinerja pada matrik diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 progam dengan 22 indikator, capaian sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, indikator kinerja yang dapat tercapai/ terlampaui berjumlah 19 (sembilan belas) indikator (86,36%), belum tercapai 2 (dua) indikator (9,09%) dan 1 (satu) indikator (45,55%) yang perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu peningkatan produksi hasil peternakan telur. Salah satu kendala dalam upaya pencapaian target produksi telur di Kota Magelang adalah berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya produksi pangan, sedangkan pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk kegiatan pertanian belum optimal. Akibatnya, Magelang bergantung pada daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan aman.

2.1.3.1.10. Pertanahan

Indikator kinerja urusan pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada Tabel 2.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018.

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	45%	45%	100%	●
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	45%	45%	100%	●

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2018

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan Pertanahan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan, dapat tercapai 100%. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga perlu penyesuaian terhadap sistem

informasi geografis pertanahan. Selain permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Belum memadainya sumber daya manusia pemerintah dalam proses pengadaan lahan
2. Masih terdapat 20,1% aset tanah pemerintah Kota Magelang belum bersertifikat

2.1.3.1.11. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada Tabel 2.35

Tabel 2.35
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		IKLH (Indeks Kualitas) Lingkungan Hidup)	68,5	65	56,36	86,7%	▶
1.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	IKA (Indeks KualitasAir)	76,84	75,7	52	68,69%	▼
		Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100%	40%	40%	100%	●
2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IKU (Indeks Kualitas Udara)	79,1	70,5	84,914	120,4%	●
		Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100	100	100	100%	●
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam	ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	48,8	38,22	78,3%	▼
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	●
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	●
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7 ton	155,7 ton	287,7 ton	54,11%	▼
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	14 ton	5 ton	4,13 ton	82,6%	▶
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	100%	88%	87,63%	99,57%	▶
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
		a. Privat	10	10	19,1	191 %	●
		b. Publik	18,50	18,42	19,6	107 %	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥ 100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 13 (tiga belas) indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup terdapat 7 (tujuh) indikator (53,85%) yang tercapai yaitu IKU (Indeks Kualitas Udara), luas RTH kota (privat dan publik), prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, jumlah sumber daya alam yang terkonservasi, jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia, serta prosentase pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin.

Disisi lain terdapat 3 (tiga) indikator (23,08%) yang capaiannya kurang dari 100 % namun diprediksi dapat tercapai pada akhir tahun 2018 yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dengan capaian sebesar 86,7%, berkurangnya volume sampah dari sumbernya dengan capaian sebesar 82,6%, dan prosentase sampah perkotaan yang ditangani dengan capaian sebesar 99,57%. Tiga indikator lainnya memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target yaitu indikator IkA (Indeks Kualitas Air) dengan kinerja hanya 68,69%, ITH (Indek Tutupan Vegetasi) dengan kinerja 78,3% dan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA dengan kinerja 54,11%.

Terkait dengan persampahan, perlu diperhatikan minimnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya serta masih besarnya volume sampah yang dibuang ke TPSA. Kendala dalam pengurangan sampah dari sumbernya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik. Hal ini menjadi urgen untuk ditangani karena Kota Magelang masih bergantung pada daerah lain dalam penyediaan lahan untuk TPA.

Indikator IKLH merupakan komposit dari IKA dan ITH sehingga rendahnya capaian kinerja IKA dan ITH menyebabkan tidak tercapainya target IKLH. Angka IKLH Nasional pada tahun 2019 sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 adalah 68,5. Hasil perhitungan IKLH Kota Magelang Tahun 2018 masih belum mencapai dari target IKLH Nasional, sehingga perlu upaya untuk peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara dan peningkatan kualitas tutupan lahan. Beberapa penyebab nilai IKA yang belum mencapai target adalah:

1. Faktor alam yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan debit air sungai antara musim kemarau dan musim penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air rata-rata dari 6 (enam) titik sampel pada musim kemarau di Bulan April 2018, menunjukkan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil pengukuran pada musim penghujan di Bulan Oktober 2018
2. Perilaku sebagian masyarakat yang masih melakukan BAB di sungai. Data dari BPS (2017) menunjukkan terdapat 1.164 KK yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Hal ini mempengaruhi kualitas air sungai sehingga parameter Fecal Coli dan Total Coliform pada perhitungan IKA tidak dapat memenuhi baku mutu.
3. Masih ditemukan pembuangan limbah domestik *black water* dan *gray water* langsung ke sungai. Hal ini dapat menyebabkan tingginya nilai phospat pada perhitungan IKA.
4. Belum ada kerjasama regional dengan daerah sekitar dalam upaya menjaga kualitas air pada aliran sungai yang melintasi beberapa wilayah, seperti misalnya Kali Manggis dan Kali Bening yang melintasi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
5. Masih adanya resiko pencemaran lingkungan dari industri kecil yang belum dilengkapi IPAL.

2.1.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang baik, perlu adanya peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Intervensi program maupun kegiatan yang harus dilakukan sangat diperlukan guna mendongkrak capaian kinerja yang belum memenuhi target dan sebaliknya, capaian kinerja yang telah memenuhi target perlu dipertahankan. Capaian target kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.36 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.

Tabel 2.36
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Tahun 2018		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	96,18%	96,18%	▶
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	100%	76,47%	76,47%	▼
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	97,99%	111,35%	●
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	950	935	965	103,2%	●
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	50%	100%	200%	●
		Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi	100%	40%	90,91%	227,27%	●

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan untuk urusan ini, 5 indikator diantaranya (71,43%) telah mencapai target sedangkan 2 lainnya (28,57%) belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kepemilikan KTP elektronik dan KIA adalah:

1. Belum adanya sistem yang dapat mendeteksi dini perubahan status kependudukan masyarakat, meskipun sudah dilakukan upaya jemput bola dengan mendatangi warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan belum mengajukan pendaftaran KIA
2. Budaya tertib administrasi masyarakat masih relatif rendah. Saat dilakukan verifikasi ditemukan bahwa penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ada yang sudah berpindah tempat tinggal tapi

tidak melaporkan pindah domisili. Sedangkan untuk KIA, masih ada orang tua yang tidak mengajukan pendaftaran KIA untuk anaknya. Selain itu sebagian anak usia 16-17 tahun enggan membuat KIA karena mereka menganggap kegunaannya hanya sebentar sampai mereka mengajukan permohonan kepemilikan KTP

3. Sistem pendataan kependudukan dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga proses perbaikan data kependudukan membutuhkan waktu.

2.1.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Tahun 2018		
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	53%	35%	35,29%	100.82%	●
		Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	100%	●
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	●
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	11	11	100%	●
		LPM berprestasi					
		Tingkat Kota	64,71%	47,06%	68,98%	147,58%	●
		Tingkat Provinsi	peringkat 1	peringkat 1	Peringkat 2	-	▶
		Tingkat Nasional	peringkat 1	peringkat 1	-	-	▼
		Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR)	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	70,59%	35,29%	47,06%	133,35%	●
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	●
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100%	100%	40,94%	40,94%	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Tahun 2018		
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82,35%	61,18%	100%	163,45%	●
6	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	●

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2018.

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 13 indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat sebanyak 9 indikator memperoleh predikat telah tercapai atas target yang ditetapkan di tahun 2018, bahkan dari 10 indikator tersebut 7 indikator telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Adapun 1 indikator dengan predikat akan tercapai atau memperoleh nilai capaian > 80% adalah indikator LPM berprestasi di tingkat propinsi. Untuk target kinerja yang tidak bisa diukur adalah indikator LPM berprestasi tingkat Nasional, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 tidak ada lomba LPM berprestasi tingkat Nasional.

Indikator yang masih perlu upaya keras atau memperoleh capaian dibawah ≤ 80% adalah cakupan pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa dengan capaian kinerja sebesar 40,94%. Merujuk pada hal tersebut upaya percepatan pemenuhan indikator ini mutlak untuk diprioritaskan, mengingat LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dituntut untuk dapat berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga kedepan melalui upaya pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat para pengurus LPM dapat memiliki kapasitas dalam mendukung proses pembangunan. Sejauh ini jumlah anggota LPM di Kota Magelang tercatat sebanyak 425 orang, dari jumlah tersebut yang telah mengikuti pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) baik di tingkat provinsi maupun kota sebanyak 174 orang atau berkisar 40,94%, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan di tahun 2018 yaitu sebesar 100%.

Meskipun hanya satu indikator yang capaian kinerjanya sangat rendah namun masih ada beberapa permasalahan lain dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

1. Belum optimalnya pemanfaatan profil kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.
2. Belum optimalnya permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

2.1.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Tahun 2018		
1	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100%	●
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	2%	1,75%	114,29%	●
3	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	81,00%	78%	78,04 %	100,05%	●
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	81%	66%	66,05%	10,08%	●
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3%	1,99%	160,8%	●
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	3%	4%	4,09%	102,25%	●
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	78%	89,23%	114,4%	●
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	88%	88%	88.28%	100,32%	●
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	100%	176,47%	176,47%	●
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi	100%	30%	30%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian Tahun 2018		
		permintaan masyarakat					
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	●
		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	11%	11,27%	102,45%	●
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	60%	60,24%	100,4%	●
		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	12%	2,08%	576,92%	●
		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	3%	1,99%	125,63%	●
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	90%	90,6%	100,67%	●
		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	95%	96.83%	101,93%	●
		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	1,02%	294,12%	●
		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	1%	0,58%	172,41%	●
		Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase jumlah keluarga sejahtera	93%	89%	85,52%	104,07%	●

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2018.

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 26 indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, seluruhnya telah mencapai target. Meskipun capaian kinerja urusan ini sudah baik namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Masih ada kasus pernikahan dan kehamilan dibawah usia 20 tahun, yang sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar pernikahan
2. Perlunya optimalisasi partisipasi laki-laki dalam ber-KB khususnya bagi peserta dari keluarga miskin.

2.1.3.1.15. Perhubungan

Indikator kinerja urusan Perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pelayanan umum yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan	1	1	5	500%	●
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	50%	40%	80%	▶
		Jumlah Prasarana Utama dan Penunjang Operasional Terminal Angkutan Barang	5	3	2	66,7%	▼
		Jumlah Prasarana Standar Pelayanan Minimal Operasional Terminal Angkutan Barang	5	5	5	100%	●
		Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	2	1	50%	▼
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	66%	66,12%	100,3%	●
		Jumlah titik parkir yang terfasilitasi sarana prasarana parkir	183	121	121	100%	●
		Jumlah titik -titik parkir yang terkelola	183	183	183	100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	90%	90,9%	101%	●
		Jumlah Blok Parkir yang telah dievaluasi dan diawasi	10	10	10	100%	●
		Jumlah Blok Parkir yang dikelola	10	10	10	100%	●
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	18	21	116,7%	●
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	9,25%	8,00%	8,49%	106,1%	●
		Capaian indek keselamatan lalu lintas	9,25%	8,50%	8,49%	99,9%	▶
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	60%	44,44%	74.06%	▼
		Jumlah Simpang dengan pengendali APILL (alat pemberi isyarat Lalu Lintas) terintegrasi (ATCS)	18	10	8	80%	▶
		Jumlah Simpang dengan pengendali APILL (alat pemberi isyarat Lalu Lintas)	18	18	18	100%	●
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	7.986	7,021	88%	▶
		Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	7.986	7,021	88%	▶
		Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian	4%	4%	4%	100%	●
		Jumlah KBWU yang tidak melakukan Uji pada periode triwulan tersebut	0	147	147	100%	●
		Jumlah KBWU pada periode triwulan tersebut	0	3.694	3.602	97,5%	▶
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2.900.000	2.805.438	96,7%	▶
		Rasio ketersediaan angkutana umum terhadap jumlah penduduk	5%	5%	4,86%	97,2%	▶
		Jumlah ketersediaan seat penumpang angkutan umum	-	6.500	6.318	97,2%	▶
		Jumlah penduduk				100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
			-	129.995	129.998		
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	●

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja urusan perhubungan terdapat 15 (lima belas) indikator (55,56%) yang tercapai, 10 (sepuluh) indikator (37,04%) akan tercapai dan 2 (dua) indikator (7,40%) perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu jumlah prasarana utama dan penunjang operasional terminal angkutan barang dan jumlah sub terminal (terminal tipe C) yang tertata. Kinerja 2 (dua) indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Magelang sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola terminal angkutan barang. Kewenangan pengelolaan terminal angkutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Disamping masalah kewenangan, pembangunan terminal angkutan barang juga terkendala ketersediaan lahan.
b. Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2018 tidak dapat melaksanakan pembangunan Terminal Tipe C yang berlokasi di Jalan Kalimas Menowo dikarenakan kegagalan dalam pengadaan tanah.

Selain kedua indikator tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas belum semuanya terintegrasi dalam Area Traffic Control System (ATCS) dan pengelolaan parkir belum optimal, terutama pada blok parkir tepi jalan, karena keterbatasan lahan dan kurangnya penyediaan parkir pada bangunan fasilitas umum. Meskipun kinerja pengelolaan parkir sudah mencapai 100% namun belum menggambarkan kondisi optimal karena belum semua titik parkir terfasilitasi sarana prasarana parkir.

Selain permasalahan tersebut di atas, Kota Magelang juga mengalami masalah penurunan *load factor* (faktor muat penumpang) angkutan kota, kecuali pada angkutan umum jalur 2 dan 11. Penurunan *load factor* dapat berdampak pada penurunan penghasilan operator angkutan kota yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Di sisi lain hal ini menjadi sinyal menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum darat karena beberapa hal yaitu:

1. Semakin semaraknya angkutan umum non konvensional (transportasi *online*) yang memberikan kemudahan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2. Kualitas pelayanan angkutan kota, baik dari sisi awak angkutan maupun kelaikan kendaraan (usia kendaraan melebihi umur ekonomis), tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.40
Load Factor Angkutan Umum di Kota Magelang

JALUR	LOAD FACTOR (%)			
	2015	2016	2017	2018
1	43,28	43,12	42,63	34,23
2	18,93	18,95	18,93	20,37
3	23,36	23,36	23,36	21,01
4	18,59	18,70	18,70	18,91
5	35,83	33,64	33,64	29,14
6	32,23	29,80	29,80	24,52
7	26,88	26,88	26,88	21,91
8	26,31	25,82	25,82	21,07
9	26,89	26,46	26,46	23,77
10	23,73	23,73	23,73	20,97
11	17,11	17,46	17,46	23,45
12	23.85	24,26	24,38	22,70
Rata-Rata	26,42	26,02	25,98	23,50

2.1.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang pada tahun 2018, dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	80%	100%	125%	●
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi					

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
	Media Massa	oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:					
		Radio	60 kali siar / 5 agama & keperca-yaan (100%)	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	100%	●
		Media Cetak	12 kali / 5 agama & keperca-yaan (100%)	12 kali / 5 agama & keperca-yaan (100%)	6 kali/ 3 agama dan kepercayaan (100%)	50%	▼
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	123,53% (21)	123,53%	●
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	7	7	100%	●
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	0	1	6	600%	●
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	2	200%	●
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	2	4	200%	●
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	50%	63,75%	127,5%	●
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	70%	69%	98,57%	►
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	●
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	69%	69%	▼

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Keterangan:

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)

► : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sudah memenuhi atau bahkan melampaui target. Indikator yang mampu memenuhi atau bahkan melebihi target capaian kinerja sebanyak 10 buah (76,92%), sedangkan 1 indikator (7,69%) akan tercapai dan sebanyak 2 indikator (15,38%) perlu upaya keras untuk mencapai target dari total 13 indikator dalam penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika.

Indikator urusan komunikasi dan informatika yang masih perlu upaya keras untuk mencapai dengan nilai realisasi ≤ 80% adalah:

1. Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak.

   Faktor penyebab belum tercapainya indikator ini adalah keterbatasan frekuensi publikasi media cetak milik pemerintah daerah sebagai wahana publikasi (Majalah Dinamika), yang terbit hanya setiap triwulan, dan terbatasnya penulis materi artikel keagamaan yang akan dipublikasikan. Materi yang dipublikasikan sebatas untuk agama Islam, Katolik, Nasrani, sedangkan untuk agama lain belum ada narasumber yang mengirimkan artikel.
2. Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi

   Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah adanya kebijakan penerimaan ASN yang sangat tergantung pada pemerintah pusat sehingga kebutuhan SDM bidang teknologi informasi masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dari kebutuhan SDM bidang teknologi informasi di 29 OPD baru terpenuhi untuk 20 OPD dengan jumlah total 74 orang.
3. Cakupan data yang terpusat dan terkendali.

   Target indikator ini dapat tercapai ketika *command center* dan kelengkapannya dapat terbangun dan terintegrasi

   dengan baik. Beberapa komponen *command center* yang terdiri dari modul aplikasi, NOC/DC, dan WAN belum mencapai target 100% untuk NOC/DC dan WAN. NOC yang ada sudah terbangun tapi belum sesuai standar, sedangkan WAN masih dalam proses pemenuhan target. Cakupan WAN kota baru mencapai 60%, karena dari target pemasangan di 160 titik hingga tahun 2021, baru terpasang 102 titik.

   Perlu dipahami bahwa meskipun persentase perangkat daerah yang menerapkan *e-government* telah mencapai 100% namun upaya penyebarluasan informasi publik secara daring belum optimal, terutama dilihat dari pemutakhiran muatan informasi pada laman perangkat daerah yang seringkali terlambat.

Beberapa kinerja indikator pada penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika memiliki capaian ≥200% dari target yang ditetapkan, yaitu:

1. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin

   Realisasi indikator ini telah mencapai 6 dari target yang ditetapkan sejumlah 3. Kerjasama yang sudah terjalin adalah dengan beberapa badan dan lembaga pada beberapa urusan yaitu pendidikan dengan TK Pertiwi, keagamaan dengan Kemenag, pariwisata dengan PD. Kyai Langgeng, perbankan dengan PD. Bank Magelang, Pengadilan Negeri, dan kesehatan dengan RST. Faktor pendorong pencapaian kinerja ini adalah adanya komitmen bersama dalam keterbukaan infromasi publik di Kota Magelang yang membuka peluang kerjasama

antara stakeholder dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik selaku OPD pengampu urusan komunikasi dan informasi.

2. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa

   Capaian kinerja indikator ini mencapai 600% karena dari target 1 kebijakan, pada tahun 2018 terealisir kebijakan terkait LPPL, Website, Medsos, PPID, Data Go, dan Majalah. Hal ini didorong oleh adanya komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Upaya menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan inilah yang mendasari kontrol terhadap arus informasi media massa di Kota Magelang.

3. Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

   Indikator ini mencapai kinerja 200% dengan realisasi 2 kajian penelitian dari target 1 kajian yang ditetapkan. Penelitian bidang komunikasi dan informasi yang dimaskud adalah kajian microcell sebagai rekomendasi penempatan menara telekomunikasi. Pencapaian ini didorong oleh iklim usaha yang kondusif dan keterbukaan Kota Magelang atas investasi sehingga menarik investor menara telekomunikasi untuk masuk.

4. Interoperabilitas antar sistem informasi

   Pencapaian target indikator ini hingga 200% terdapat penambahan 2 sistem yang sudah di interoperabilitas, yaitu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dan sistem perijinan. Hal ini didorong oleh komitmen untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Cerdas yang salah satu indikatornya dilihat dari integrasi sistem informasi.

2.1.3.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Magelang hingga akhir Tahun 2018 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.42
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	4%	8.89%	222.26%	●
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	10%	15.17%	151.66%	●
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	100	617	617%	●
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	3%	36.72%	1.224%	●
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Prosentase koperasi aktif	94%	93%	93.24%	99.83%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
	Koperasi	Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	27%	27,46%	101.71%	●
		Jumlah koperasi	235	228	222	97.37%	▶
		Jumlah koperasi syariah	24	18	16	88.89%	▶

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah melalui empat program prioritas mayoritas telah memenuhi target hingga akhir tahun 2018. Sebanyak enam dari delapan indikator (75%) sudah melebihi target, sedangkan 2 indikator (25%) lainnya akan tercapai, dan tidak ada indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai. Beberapa kinerja indikator pada tabel di atas menunjukkan kinerja luar biasa karana mencapai ≥200% dari target yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM

1. Indikator ini berkinerja 222,26% dengan realisasi 8,89% dari target 4% di tahun 2018. Dari total UKM pada tahun 2018 sebanyak 6.940 usaha, terdapat 617 usaha (8,89%) yang mengalami peningkatan kualitas dilihat dari peningkatan omzet. Kondisi ini didorong oleh kualitas produk UKM yang mulai diterima dan diminati oleh pasar. Meskipun demikian peningkatan jumlah tersebut masih sangat kecil apabila dibandingkan total UKM yang ada sehingga daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah masih relatif rendah karena keterbatasan kompetensi dalam pengelolaan administrasi dan kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan tekhnologi.

2. Jumlah wirausaha baru (UMKM)

   Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 adalah 617 wirausahawan baru dari target 100 orang. Faktor ini didorong oleh adanya kesadaran dari tenaga kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja formal untuk mengembangkan usaha sendiri.

3. Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan

   Dari target 3% pada tahun 2018, capaian indikator ini mencapau 36,72%. Sebanyak 2775 UMKM dari total 7557 UMKM di Kota Magelang menerima akses permodalan. Kinerja ini didorong oleh adanya kebijakan kemudahan bagi UMKM untuk mendapat bantuan modal. Untuk UMKM bantuan modal dapat diberikan dengan melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2018 terdapat 219 koperasi yang terdiri dari :a). 161 koperasi konsumen dengan jumlah anggota 22.608 orang; b). 9 koperasi produsen, dengan jumlah anggota sebanyak 932 orang; c). 40 koperasi simpan pinjam dengan jumlah

anggota sebanyak 31.943 orang; d). 3 koperasi sekunder dan, e). 6 koperasi jasa dengan jumlah 482 orang. Total masyarakat yang menjadi anggota koperasi sebanyak 58.342 orang.

Total modal usaha Koperasi – koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun semester 1 tahun 2018 sebesar Rp.534.196.341.669,- . Modal usaha ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Modal usaha pada tahun 2017 sebeser 465.629.773.000, sementara volume usahanya sebesar Rp.443.492.700.500, nominal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.366.810.970.000,-. Sisa Hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.455.438.000,-. dan semester 1 tahun 2018 sebesar Rp. 11.163.560.000,-. Pada tahun 2016, modal usaha koperasi sebesar Rp.445.341.150.000,- dengan volume usaha sebesar Rp.302.729.304.000,-.

Kinerja koperasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan tren yang meningkat apabila di bandingkan dengan tahun 2016, namun perlu dicatat bahwa target peningkatan jumlah koperasi belum tercapai sesuai target. Hal ini menandakan rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Secara umum penyelengaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Magelang sudah berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Sehingga tantangan ke depan adalah untuk mempertahankan kinerja penyelenggaraan urusan koperasi agar tetap positif.

Sedangkan dalam upaya untuk mencapai indikator yang akan tercapai di tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Proses pengesahan badan hukum koperasi relatif lama karena diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Sebelum tanggal 8 april 2016 pengesahan badan hukum koperasi ditandatangani oleh Walikota, namun setelah tanggal tersebut pengesahan badan hukum koperasi diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM yang menyebabkan proses menjadi lebih lama (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi BAB IV pasal 12).
2. Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki sertifikat bidang perkoperasian. Penilaian kesehatan koperasi bisa dilakukan oleh ASN di bidang perkoperasian yang memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam (Pasal 7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesian Nomor 06 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang hanya mempunyai 2 orang ASN yang memenuhi kriteria sebagai penilai kesehatan koperasi, sehingga jumlah penilaian yang dilakukan masih terbatas.

2.1.3.1.18. Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.43
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	3	3	100%	●
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	5%	5.90%	118%	●
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	169.26%	1.128..40%	●
		Jumlah investor baru	200	168	942	560.71%	●

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Magelang, diketahui bahwa semua indikator (100%) telah mencapai target, bahkan diantaranya melebihi target. Beberapa kinerja indikator pada urusan ini bahkan mencapai kinerja luar biasa ≥200% dari target yang ditetapkan, yaitu indikator pertumbuhan nilai investasi PMDN (target 15% realisasi 169,22%) dan jumlah investor baru (target 2018 sebanyak 168 realisasi 1223). Keberhasilan kinerja dua indikator tersebut didorong oleh adanya regulasi OSS (*online single submission*) dan upaya Disperindag dalam melakukan pembinaan UKM Kota Magelang, sehingga nilai investasi PMDN meningkat dan merata pada skala usaha dari besar hingga kecil.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Magelang tahun 2018 sudah berjalan sesuai target. Meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yaitu:

1. Mempertahankan kinerja indikator dan perbaikan mekanisme monintoring dan evaluasi investasi di lapangan terutama dalam hal pelaporan investasi agar data yang didapatkan valid.
2. Perlu optimalisasi informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang dan perbaikan ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain).
3. Keterbatasan lahan yang menyebabkan hambatan dalam penyediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor.

2.1.3.1.19. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	6	7	116,67%	●
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional					
		- Peringkat di POPDA SD	3	6	4	-	▶
		- Peringkat di POPDA SMP	9	15	25	-	▼
		- Peringkat di POPDA SMA	16	20	21	-	▶
		- Peringkat di Dulongmas	NA	NA	0		
		- Peringkat di PORPROV	NA	20	0		
		Jumlah klub olah raga	183	183	183	100%	●
		Jumlah organisasi olah raga	36	35	37	105,71%	●
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91,18%	82%	88,24%	107,15%	●
		Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional					
		a. Propinsi	8	7	0	0%	▼
		b. Nasional	1	0	0	0%	▼
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	98,00%	95,00%	72,50%	76,31%	▼
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	0	0.00%	▼
		Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6,40%	6,27%	102,07%	●
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	4	35,29%	149,98%	●
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	71%	87,13	122,72%	●
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	75	0	-*	▼
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,47%	0,46%	31,29%	▼

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)
- ► : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga, terdapat 7 indikator yang telah mencapai target, 2 indikator akan tercapai ada dan 7 indikator perlu kerja keras untuk mencapai target. Ketujuh indikator tersebut terjadi karena adanya kendala sebagai berikut :

a. Peringkat di POPDA SMP. Pada tahun 2018, ditargetkan berada pada peringkat 15 namun hanya bisa mencapai peringkat 25. Kondisi ini perlu upaya lebih keras dari para pelatih dan atlet untuk mencapai target yang lebih baik dari tahun 2018. Beberapa kendala dalam pencapaian target indikator ini adalah:
   1. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.
   2. kurangnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.
   3. Kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi berakibat terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain.
   4. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.
b. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi. Jumlah (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang terdaftar sebanyak 40 OKP, namun yang masih aktif sebanyak 29 OKP. Hal ini menandakan belum optimalnya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan.
c. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi. Kendala dalam pencapaian target ini yaitu kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.

2.1.3.1.20. Statistik

Kinerja Urusan Statistik di Kota Magelang hingga tahun 2018 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.45
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95%	95%	97,82%	102,97%	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)
- ► : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Kinerja urusan statistik tahun 2018 di Kota Magelang sudah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini, dari target tahun 2018 sebesar 95% pemenuhan data statistik telah terpenuhi 97,82%. Kondisi ini telah melampaui target tahun 2018 dan target RPJMD yang juga sebesar 95% sehingga perlu dipertahankan capaiannya. Urusan statistik secara umum sudah terselenggara dengan baik. Namun perlu dipahami bahwa masih terdapat kendala keterbatasan kapasitas SDM pengelola data serta kesulitan dalam perolehan maupun penghitungan data-data penting secara akurat dan tepat waktu. Tantangan untuk mempertahankan kinerja ini ke depan adalah untuk menjaga konsistensi dan validitas data.

2.1.3.1.21. Persandian

Urusan persandian hanya diampu oleh Progam Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan tiga indikator kinerja. Target dan realisasi masing-masing indikato pada urusan persandian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	100%	100%	100%	●
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	90%	100%	111,11%	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Keterangan:

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)

▶ : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan persandian melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa sudah semuanya mencapai target. Ketersediaan SOP persandian sampai dengan tahun 2018 sudah terpenuhi. Sudah ada SOP persandian yang disusun dan dilaksanakan pada instansi yang menangani urusan persandian karena SOP persandian ini hanya diterapkan pada satu OPD dimana prosedur yang dilakukan merupakan prosedur yang bersifat rahasia. Indikator lainnya yaitu tingkat kapasitas SDM persandian sudah memenuhi target tahun 2018.Tenaga khusus/ ahli di bidang persandian saat ini berjumlah 1 orang yang merupakan fungsional sandiman.

Meskipun kinerja urusan persandian telah mencapai 100% pada setiap indikator namun perlu mendapat perhatian kondisi keterbatasan SDM persandian karena hanya ada 1 orang fungsional sandiman, sehingga perlu kaderisasi dengan melalui diklat untuk tenaga persandian yang lain maupun penambahan personil persandian.

2.1.3.1.22. Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.47
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	●
		Jumlah pengunjung museum	5.600	5,250	10,122	192,8%	●
		Jumlah koleksi museum	15	12	65	541,6%	●
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67%	15,32%	17.41%	113,6%	●
		Jumlah festival seni dan budaya.	14	12	12	100%	●
		Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100.00%	100%	●
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	225	224	99,55%	▶
		Misi kesenian 100%	50%	39%	100%	256,4%	●
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	2	1	1	100%	●
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	12	12	100%	●
		Cakupan kajian seni 50%	80%	76%	66.67%	87,72%	▶
		Cakupan fasilitas seni 30%	45%	37%	85.71%	231,6%	●
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80%	78%	87.50%	112,17%	●
		Cakupan tempat 100%	100%	100%	81.82%	81.82%	▶
		Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100%	●

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang , 2018

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja urusan Kebudayaan, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target dan memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih. Beberapa indikator menunjukan kinerja lebih dari 200% yaitu:

1. Jumlah koleksi museum, kinerja mencapai 541,6%, hal ini dikarenakan adanya penambahan koleksi berupa lukisan-lukisan di Museum Sudirman.
2. Misi kesenian 100%, tercapai 256,4% didorong oleh beragamnya misi kesenian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang.
3. Cakupan fasilitasi seni 30%, tercapai 231,6% didorong oleh banyaknya even kesenian yang melibatkan pelaku seni Kota Magelang. Even ini merupakan bentuk fasilitasi seni yang mejadi ukuran indikator tersebut.

Meskipun capaian kinerja tiap indikator pada urusan kebudayaan positif namun masih ada beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian yaitu:

1. Belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya karena belum ada Tim Pendaftar Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi.
2. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.

2.1.3.1.23. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.48
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	1. Persentase peningkatan judul buku	15,99%	5,6 %	5,66%	101,04%	●
		2. Persentase peningkatan jumlah buku	9,89%	6,26 %	6,30%	100.64%	●
		3. Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	66,35%	52,13 %	52,27%	100,27%	●
		4. Persentase perpustakaan aktif	28,44%	21,33 %	21,52%	100,90%	●
		5. Cakupan pelayanan melalui e-library	5 %	2%	6,25%	312,50%	●
		6. Peningkatan promosi layanan perpustakaan	25 %	12,5%	41,51%	332,08%	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target kinerja RPJM di tahun 2018, secara keseluruhan (100%) telah mencapai target. Kondisi ini perlu dipertahankan agar kinerja urusan perpustakaan ini tetap positif. Terdapat dua indikator yang memiliki capaian sangat tinggi dengan nilai capaian >200%, yaitu:

1. Cakupan Pelayanan e-library dengan capaian 312,50%
2. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan dengan capaian target sebesar 332,08%.

Keberhasilan pencapaian kedua indikator tersebut didorong oleh semakin masifnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat sehingga pelayanan perpustakaan mendapatkan imbas positif. Selain dalam hal layanan, pemanfaatan teknologi informasi juga digunakan untuk promosi layanan.

Secara umum penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Magelang sudah sesuai target yang ditetapkan namun masih terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian yaitu:

1. Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat
2. Belum semua perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah) melaksanakan pelayanan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
3. Masih minimnya serah simpan karya cetak dan karya rekam masyarakat.
4. Belum optimalnya imlementasi e-library karena meskipun cakupan layanannya sudah mencapai 6,25% tetapi masih peru dioptimalkan menyesuaikan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.3.1.24. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan Kota Magelang dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearipan	Persentase sarana prasarana arsip yang terpelihara	89%	50%	50%	100%	●
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Cakupan pelayanan akses arsip	82%	67%	91,94	137,22%	●
		2. Tingkat kompetensi SDM pengelola kearsipan	67%	39%	59,20%	151,79%	●
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku	100%	52%	44,83%	86,21%	▶

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		2. Persentase arsip dan risalah	85%	82%	**NA**	**NA**	
		3. Persentase penyelamatan arsip	73%	53%	53,33%	100,63%	●
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1. Persentase implementasi e-arsip	100%	52%	42,64%	83,92%	▶
		2. Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	30%	30%	100%	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Sebanyak lima indikator telah mencapai target, 2 indikator akan mencapai target dan 1 indikator mengalami kesulitan dalam penghitungannya karena belum jelasnya batasan kriteria risalah arsip yang dimaksud. Kinerja penyelenggaraan kerasipan di Kota Magelang sudah berjalan dengan baik. Tantangan untuk mengupayakan pencapaian target yang akan tercapai adalah digitalisasi arsip yang belum menjadi fokus program. Implementasi e-arsip hingga saat ini masih belum optimal serta kompetensi SDM pengelola arsip masih belum merata di masing-masing OPD.

2.1.3.1.25. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 5 (lima) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

NO	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018 sd TW IV		Kinerja RKPD Th. 2018	Status capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	0	0	2 %	200%	-
		Jumlah pengolah ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	3	3	100%	●
2.	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi hasil perikanan Produksi ikan	167.83 ton	162,4 ton	152,44 ton	93,86%	►
		Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CPIB	70%	50%	0%	0%	▼
		Persentase unit pembudidayaan ikan bersertifikasi CBIB	70%	40%	57,14%	142,85%	●
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Luas lahan perikanan organik	0.6	0.3	0,3	100%	●

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2019

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Tabel di atas menunjukkan bahwa 6 indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, 4 diantaranya (66,67%) telah tercapai sesuai target, 1 indikator (16,67%) optimis akan tercapai dan 1 indikator lainnya perlu upaya keras untuk dapat tercapai sesuai target yaitu Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CPIB karena kendala adanya proyek pelebaran untuk akses jalan TPS 3 R di Bojong yang berdampak terpangkasnya lahan Balai Benih Ikan sehingga berpengaruh pada pembenihan ikan yang tidak maksimal. Dengan demikian target diundur di tahun 2020 dan Dinas Pertanian dan Pangan meminta pengganti lahan yang terpangkas karena akses jalan TPS 3 R tersebut. Selain itu pengetahuan dan keterampilan pelaku budidaya ikan terkait CPIB/ CBIB masih terbatas sehingga diperlukan pelatihan yang lebih intensif.

Untuk produksi perikanan yang baru mencapai 152,44 ton pada tahun 2018 sangat rendah bila dibandingkan kebutuhan konsumsi ikan yang mencapai 2500 ton per tahun, meskipun masih lebih tinggi

dibandingkan target tahun 2018. Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang sebagai akibat dari keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan karena sebagian besar lahan dimanfaatkan sebagai perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan karakteristik Magelang sebagai kota jasa. Untuk itu perlu mengoptimalkan budidaya perikanan di lahan sempit.

2.1.3.1.26. Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui tiga program dengan tujuh indikator. Capaian kinerja pada masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2-51.

Tabel 2.51
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi Wisata Unggulan	7	4	4	100.00%	●
		Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	55,56%	80%	143,99%	●
2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	10	10	100%	●
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 HARI	2-4 HARI	1-2 HARI	50%	▼
		Persentase TIC yang representatif	100%	100%	0%	0%	▼
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1.138.140	1.080.528*	94,94%	►
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5.193	6.267*	120,08%	●

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2018
**angka November 2018*

Keterangan:

- ● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2018 ≥100%target 2018 atau ≥100%target RPJMD)
- ► : Akan tercapai(Realisasi tahun 2018>80%target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 indikator kinerja urusan Pariwisata, terdapat 4 indikator (57,14%) yang sudah mencapai target, 1 indikator (14,3%) akan mencapai target dan 2 indikator lainnya (28,57%) masih jauh dibawah target, yaitu Lama Kunjungan Wisatawan dan Persentase TIC (*Tourist Information Center)* yang representatif. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan TIC yang representatif antara lain keterbatasan lahan dan kapasitas anggaran daerah. Terkait lama kunjungan wisatawan, permasalahan yang berpengaruh terhadap capaian indikator tersebut adalah masíh rendahnya kualitas atraksi dan jasa industri pariwisata seperti kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi destinasi pariwisata. Masalah-masalah tersebut di atas pada akhirnya berpengaruh terhadap kontribusi sector pariwisata terhadap PAD Kota Magelang yang masih relatif kecil.

Tabel 2.52
Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2012-2018

Tahun	Sumber Pendapatan Daerah				Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi terhadap PAD
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Total pajak hotel, restoran, hiburan		
2014	2.027.782.556,-	1.797.050.823,-	1.329.451.348,-	**5.154.284.727,-**	**164.927.631.230,-**	**3.13%**
2015	2.441.943.652,-	2.104.103.322,-	1.459.002.821,-	**6.005.049.795,-**	**186.677.410.081,-**	**3.22%**
2016	2.879.263.958,-	2.431.241.151,-	1.634.690.181,-	**6.945.195.290,-**	**220.193.738.774,-**	**3.15%**
2017	3.304.979.480,-	3.388.469.448,-	1.884.212.564,-	**8.577.661.492,-**	**233.392.755.573,-**	**3.68%**
2018	3.808.132.675,-	4.317.038.777,-	3.131.630.218,-	**11.256.801.670,-**	249.873.268.826,-	**4.56%**

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2014- 2018, BPKAD Kota Magelang, 2018

2.1.3.1.27. Pertanian

Urusan Pertanian melibatkan 10 Program dengan 22 indikator. Capaian kinerja pada masing-masing indikator nampak pada Tabel 2. 53.

Tabel 2.53
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentasi unit usaha yang telah bersertivikasi NKV	4,24%	2,4%	2,42%	100,18%	●
2	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52.94%	11,76%	11,76%	100,04%	●
		Rasio petani terlatih	90%	85%	85,88%	101,04%	●
3	Program pencegahan dan penanggulangan	Prosentase hewan sehat	87%	83%	93,33%	112,44%	●
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	5	7	140%	●
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	3%	4,24%	141,18%	●
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	11	11	11	100%	●
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal	4,24%	2,42%	3,42%	141,32%	●
7	Program penerapan peningkatan teknologi pertanian dan perkebunan	Luas Lahan Pertanian Organik	1,14	0,98	1.00	102,04%	●
		Prosentase petani yang telah menerapkan teknologi	72%	51,70%	78,8%	152,46%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	Realisasi 2018		
		pertanian					
8	Program peningkatan penerapan teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan Organik	15	6	6	100%	●
		Peternak ayam buras/broiler	5	2	2	100%	●
		Jumlah Pelaku Usaha peternak kelinci	5	2	2	100%	●
		Jumlah Pelaku Usaha Peternak Kambing/Domba	5	2	2	100%	●
		Rasio peternak terlatih	90%	85%	85	103,44%	●
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Daging Ruminansia	1.401.690	1.233.486	1.084.242	95,65%	▶
		Daging Unggas	5.660.315	5.366.516	6.504.134	102,16%	●
		Telur	500.000	440.000	71.038	16,14%	▼
		Susu	209.000	197.600	214.830	108,72%	●
10	Program Peningkatan Produksi	Padi	3.120.00	3.180.00	3.120.00	98,11%	▶
		Jagung	11	11	14	127,27%	●
		Ubi Kayu	13,5	13,5	16	118,52%	●

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Kinerja urusan pertanian Kota Magelang relatif baik dilihat dari capaian 19 dari 22 indikator (86,36%) tercapai/ terlampaui sesuai target, 2 indikator (9,09%) optimis akan tercapai dan hanya 1 indikator (4,55%) yang perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu peningkatan produksi hasil peternakan telur. Salah satu faktor penghambat dalam upaya mencapai target produksi hasil telur yaitu keterbatasan lahan Kota Magelang sedangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) belum berkembang. Secara umum permasalahan urusan pertanian adalah rendahnya produksi pertanian dibandingkan kebutuhan konsumsi, belum optimalnya pengawasan terhadap produk pangan asal hewan karena masih ditemukan produk asal hewan yang tidak Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH), dan keterbatasan sumber daya manusia pengampu kesehatan hewan. Hingga saat ini hanya terdapat 3 (tiga) dokter hewan, 5 (lima) tenaga paramedis dan 3 (tiga) orang *groomer*.

2.1.3.1.28. Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.54
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	65,00%	65,04%	100,1%	●
		Jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU)		5.233	5.597	107%	●
		Jumlah KK/25		8.605	8.605	100%	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral sangat positif dilihat dari capaian 3 (tiga) indikator sebesar 100%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian yaitu:

1. Belum semua rumah tangga terlayani jasa layanan listrik negara. Rasio elektrifikasi hingga awal tahun 2019 sebesar 97,88% .
2. Energi Baru Terbarukan (EBT) belum dimanfaatkan secara luas untuk pemenuhan kebutuhan energi, karena besarnya biaya investasi. Baru beberapa fasilitas publik yang memanfaatkan EBT yaitu 140 titik PJU, 6 lampu lalu lintas, dan baru 1 OPD yang memanfaatkan solarcell.

2.1.3.1.29. Perdagangan

Aktivitas perdagangan di Kota Magelang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017, dengan dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, mampu menarik tenaga kerja yang bergerak pada sektor ini. Jumlah pedagang yang bekerja pada pasar tradisional tahun semester 1 tahun 2018 sejumlah 6.823 orang dengan rincian:

a) Pasar Kebonpolo sejumlah 403 pedagang;
b) Pasar Cacaban sejumlah 148 pedagang ;
c) Pasar Gotong Royong sejumlah 817 pedagang;
d) Pasar Rejowinangun sejumlah 3.525 pedagang dan

e) Pasar Sidomukti sejumlah 442 pedagang.

Jumlah pedagang pada tahun 2017 sebanyak 6.823 . Jumlah ini lebih banyak apabila di bandingkan dengan tahun 2016 yaitu sejumlah 5.299 pedagang.

Capaian membanggakan di raih Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017, dengan di raihnya pengharaan Anugerah Pancawara 2017 dari Kementrian Perdagangan. Penghargaan ini di raih oleh pasar Rejowinangun Magelang. Hasil penilaian tim juri menyatakan, Pasar Rejowinangun layak menjadi pemenang untuk Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe I dan II diraih Pasar Rejowinangun (Magelang) dengan inovasi 'Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Ruang Sosial Budaya'. Anugerah Pancawara 2017 merupakan penghargaan yang pertama kalinya diselenggarakan Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengapresiasi pasar tradisional di Indonesia yang dinilai sukses membuat inovasi bagi kemajuan pasar yang dikelolanya.

Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk terus melakukan revitalisasi beberapa sarana jasa perdagangan di Kota Magelang khususnya pasar–pasar tradisional yang ada di Kota Magelang dengan harapan pasar tradisional ini mempunyai daya saing tersendiri dengan memperhatikan kearifan lokal apabila di bandingkan dengan pasar modern mengingat pasar tradisional mampu menyerap ribuan masyarakat yang bergerak di sektor tersebut

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.55
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	10 %	59.63 %	596.25%	●
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	14	18	128.57%	●
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	23%	100 %	434.78%	●
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	7.14 %	71.43 %	▼

		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	10 %	10.44 %	104.39%	●
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	80 %	80 %	100%	●
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US$1.250.000	US$ 1.100.000	US$ 2.308.905.97	209.90%	●
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	4 %	13.96 %	349.08%	●
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera	3.100	2.800	4.267	152.39%	●
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	40 %	20 %	50%	▼

Kerangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari keenam program prioritas yang di dalamnya memuat 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Perdagangan, 8 (delapan) indikator telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan, 1 (satu) indikator capaian optimis akan tercapai 100% pada akhir periode RPJMD 2015-2021 dan 1 (satu) indikator lainnya perlu upaya lebih keras dalam mencapai target tersebut. Indikator yang perlu upaya keras tersebut adalah Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design. Indikator ini masih jauh dari target yang diharapkan dikarenakan lokasi pasar–pasar yang menjadi target untuk memenuhi universal design memiliki tipikal keterbatasan lahan yang sempit.

Selain itu, beberapa indikator yang telah mencapai target memiliki capaian kinerja yang melebihi 200%. Indikator tersebut diantaranya:

1. Cakupan PKL yang dibina. Indikator ini mencapai angka 596,25% didorong sudah mulai tertatanya PKL yang ada di Kota Magelang sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PKL yang ada.
2. Indikator Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar terjadi peningkatan yang sangat signifikan hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja petugas keamanan yang didukung dengan sarana prasarana yang ada.
3. Jumlah ekspor produk ke LN Indikator Jumlah ekspor produk ke LN terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada bulan Oktober dan November yang didukung oleh tiga pelaku ekportir yaitu kerajinan kerang, Kencana Sari (ke China) & Joyoboyo Plastik (Malaysia & Afrika).
4. Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah terbantu adanya Penyelenggaraan Magelang Fair. Namun demikian, pendataan yang mendalam belum dilakukan sehingga gambaran riil belum diperoleh secara menyeluruh. Pendataan yang lebih rinci perlu dilakukan terhadap pelaku – pelaku usaha di Kota Magelang.

Melihat kontribusi nilai ekspor yang disumbang hanya dari 3 (tiga) industri maka perlu diperhatikan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kerjasama perdagangan internasional belum berkembang luas karena terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan, khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor

2.1.3.1.30. Perindustrian

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	3,15 %	3.16 %	100.32%	●
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	12	12	100%	●
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu	4,30%	4,15 %	4,83%	116.41%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th.2018	Status Capaian
				Target 2018	capaian 2018		
		(GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)					
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.09%	5.48%	107.56%	●

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kinerja urusan perindustrian di Kota Magelang sudah baik. Dari 4 (empat) program prioritas yang di dalamnya memuat 4 (empat) indikator kinerja urusan secara keseluruhan indikator (100%) telah menunjukkan tercapainya target yang diharapkan. Meskipun demikian perlu diperhatikan beberapa hal terkait urusan perindustrian yaitu:

1. Belum efektifnya pelayanan perijinan bagi industri kecil
2. Lemahnya daya saing produk IKM Kota Magelang dalam menghadapi dampak globalisasi, terutama terkait inovasi dan diversifikasi produk dan promosi dan pemasaran. Meskipun kinerjanya mencapai 100% namun hal ini belum menggambarkan kondisi riil yang positif karena realisasi capaian untuk peningkatan daya saing IKM Formal (yang dihitung dari peningkatan omset) hanya 3,16% dan persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll) hanya 4,83%.

2.1.3.1.31. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi dilaksanakan melalui beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Persentase calon transmigrasi yang tertempatkan	100%	100 %	100%	100%	●
2	Program Transmigrasi Regional	2. Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100 %	100%	100%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Tabel pencapaian indikator di atas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2018 dari 2 (dua) target indikator kinerja telah tercapai semuanya (100%). Indikator persentase calon transmigrasi yang tertempatkan sudah terpenuhi 100% dimana dari 3 KK calon peserta transmigrasi telah diantarkan ke lokasi penempatan transmigrasi di Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sementara untuk indikator sosialisasi program trasnmigrasi juga telah terlaksana pada Tahun 2018 dengan jumlah peserta 300 orang dari 17 kelurahan di Kota Magelang.

Penyelengaraan urusan transmigrasi di Kota Magelang sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan tanpa permasalahan yang berarti. Tantangan ke depan adalah untuk mempertahankan kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi agar tetap positif serta menumbuhkan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

2.1.3.2. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.2.1. Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100 %	100%	100%	●
		2. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	60%	95,18%	158,63%	●
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	3. Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	0%	70%	700%	●
		4. Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	75 %	70%	93,3%	▶
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1. Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100 %	100%	100%	100%	●
4	Program Penataan Peraturan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL	3	1	4	>100%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
	Perundang-undangan						
		2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	0	0	100%	●
		3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1	1	0	100%	●
5	Program pengelolaan barang milik daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	65%	74,36%	114,4%	●
		2. Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		3. Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	75%	96,55%	128,73%	●
		4. Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	●
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1. Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	●
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	100%	100%	100%	●
9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	35%	56,29%	160.83%	●
		2. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	84,71%	107,14%	●
		3. Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	20%	10,34%	51,72%	▼
		4. Nilai hasil LKJip SKPD	B	BB	B	100%	●
		5. Persentase SKPD yang direview LKJiP	75%	45%	62,07%	137,93%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		6. Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	95%	85,24%	89,73%	▶
		7. Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	50%	50,00%	100%	●
		8. Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	95%	85,24%	89,73%	▶
		9. Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	95%	100%	105,26%	●
		10. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	70%	90,90%	129,86%	●
		11. persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	70%	93,24%	133,205	●
		12. Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan :

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 9 program dan 27 indikator dalam fungsi lain lain hampir semua indikator menunjukkan hasil positif. Sebanyak 24 indikator (88,89%) telah mencapai target, 2 indikator (7,41%) optimis akan tercapai dan 1 indikator (3,70%) perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu indikator persentase zona integritas yang terbentuk. Pembentukan zona integritas mengalami kendala kompleksitas permasalahan dan luasnya ruang lingkup perubahan sehingga membutuhkan banyak tahapan. SIPID di Kota Magelang hingga tahun 2018 sebagai sistem informasi yang menyajikan data peluang investasi masih belum optimal. Informasi yang dibuat dalam SIPID baru mencapai 70% dari total kriteria yang disajikan.

2.1.3.2.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis Akrual dimulai tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2011 - 2014 Pemerintah Kota Magelang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, oleh karena itu perbaikan laporan terutama masalah aset terus diprioritaskan.

Upaya perbaikan tersebut membuahkan hasil positif ketika Kota Magelang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dan secara kontinu dapat dipertahankan hingga tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, terutama pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung peningkatan PAD dilakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, peningkatan manajemen aset daerah dengan penerapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Target dan realisasi indikator urusan Keuangan hingga triwulan IV Tahun 2018 disajikan padaTabel 2.59

Tabel 2.59
Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan Tahun 2018

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
					Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	65%	75,24%	115,75%	●
		2	Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	75%	96,55%	128,74%	●
		4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	10,21%	19,18%	6,97%	36,34%	▼
		2	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	84%	100%	100%	●

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
					Target 2018	Capaian 2018		
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12%	12,56%	13,71%	109,16%	●
		2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	2,91%	3,63%	2,26%	62,26%	▼

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018 ≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 8 (delapan) indikator kinerja urusan keuangan, terdapat 6 (enam) indikator (75%) yang telah mencapai target sedangkan 2 (dua) indikator lainnya perlu upaya keras untuk mencapai target yaitu:

1. Rasio retribusi daerah terhadap PAD dengan kinerja capaian baru mencapai 2.26%. Hal ini karena adanya beberapa kendala antara lain sebagai berikut:
   a. Adanya penyesuaian dengan regulasi tingkat pusat yaitu dengan terbitnya Permendagri No.19 tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan maka Perda No.19 tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu harus disesuaikan dengan penghapusan penerimaan Retribusi Izin Gangguan.
   b. Ada beberapa pos penerimaan yang sebelumnya masuk ke rekening penerimaan Retribusi Daerah berpindah ke rekening Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada sub rincian penerimaan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa.
2. Persentase pertumbuhan PAD dengan capaian 6.97% dari target di tahun 2018 yaitu 19.18%. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :
   a. PAD sudah mendekati potensi yang ada sehingga akan menurunkan laju pertumbuhan PAD.
   b. Capaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terutama yang berasal dari BLUD RSU tidak naik secara signifikan yang disebabkan oleh penurunan jumlah pasien sebagai dampak dari pembangunan yang belum selesai dan juga adanya peraturan baru dari BPJS yang akan berobat tidak bisa langsung ke RSU Tidar yang bertipe B tetapi harus mendapat rujukan dari RS tipe C dan D terlebih dahulu.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren yang

cukup positif. Data dari BPKAD Kota Magelang sampai dengan tahun 2018 melaporkan bahwa perolehan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 249.873.268.826,- seperti ditampilkan pada Tabel 2.60

Tabel 2.60
Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2018

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan PAD
1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	164.906.266.142,-	**53.06 %**
2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015	186.667.410.081, -	**13.20 %**
3	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016	204.220.414.045, -	**9.40 %**
4	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	233.392.755.573 -	**14.28 %**
5	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	249.873.268.826,00	**7.06%**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2018 (*data diolah*)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang lebih rendah apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan di bawah target yang di tetapkan tahun 2018, yaitu sebesar 19.18%, disebabkan karena PAD sudah mendekati potensi optimal yang ada sehingga menurunkan laju pertumbuhan PAD. Selain itu capaian realisasi komponen Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari BLUD RSU tidak naik secara signifikan di sebabkan oleh penurunan jumlah pasien sebagai dampak dari pembangunan RSU yang belum selesai dan juga adanya kebijakan baru dari BPJS yang mensyaratkan bagi pengguna BPJS yang akan berobat harus melalui Faskes berjenjang.

Tabel 2.61
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010-2018

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	PERSENTASE (%) POTENSI TERHADAP REALISASI	PERSENTASE (%) TARGET TERHADAP REALISASI
2014	172.114.484.610	124.432.498.000	164.906.266.142	95.81%	132.53%
2015	207.682.651.625	152.806.995.000	186.677.410.081	89.89%	122.17%
2016	269.616.256.588	197.465.478.000	220.217.864.000	81.68%	111.52%
2017	297.261.794.010	218.085.185.000	233.392.755.573	78.51%	107.02%
2018	297.261.794.010	225.916.332.000	249.873.268.826	84.06%	110.60%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2014-2018, BPKAD Kota Magelang, 2018

Beberapa permasalahan lain terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya:

1. Sebagian Wajib Pajak belum memasukkan tarif pajak sebesar 10% untuk jasa usaha restoran dalam pembayaran pajak restoran oleh konsumen
2. Belum ada desk penerimaan dana transfer untuk menentukan/mengetahui besaran dana transfer yang sesuai dan seharusnya diterima oleh daerah
3. Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omset (*ability to pay* rendah)

2.1.3.2.3. Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan 11 (sebelas) indikator kinerja dan 7 (tujuh) program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.62
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	75	75,14%	100.18%	●
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	75	76	101,33%	●
		Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	40	44,44	111,1%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	78%	80%	102,56%	●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100	100	100	100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	3	3	100%	●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95	90	85,71	>95,23%	▶
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100	100	100	100%	●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 11 target yang diemban oleh urusan penunjang perencanaan keseluruhan target mampu dilalui dengan baik, hanya masih ada 1 indikator yang belum mencapai target, akan tetapi optimis pada akhir periode akan tercapai. Hal ini disebabkan ada 1 pendataan yang baru akan dilaksanakan tahun 2019 yaitu analisis indikator

ekonomi. Penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan sudah berjalan positif sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian pelaksanaan proses bisnis perencanaan masih mengalami kendala karena belum optimalnya pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD dan belum kuatnya basis data dalam perencanaan teknokratik.

2.1.3.2.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dilaksanakan dengan 6 (enam) program dengan 15 (lima belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.63
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi	59%	56%	55,63 %	99,34%	▶
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan BKD	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	46%	46%	54,55	118,58%	●
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	100%	2000%	●
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,08%	0,14%	57,14%	▼
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	98%	97%	97,83	100,86	●
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0,21%	0,28%	75,00%	▼
3	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	95%	125,56%	132,16%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	●
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	100%	100%	0	0	▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
	Pemerintah Daerah						
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	90%	85%	102,86%	121,01%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Karakter	97%	96%	121,88%	126,95%	●
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	79%	100%	126,58%	●
6	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	90%	93,67%	104,08%	●

Keterangan :

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target kinerja RPJM di tahun 2018, tidak seluruhnya dapat mencapai target. Dari 15 indikator yang mendukung 6 program, terdapat 11 indikator (73,33%) yang sudah tercapai/melampaui, 1 indikator (6,66%) akan tercapai, dan 3 (tiga) indikator (20%) perlu upaya keras untuk mencapai.

Indikator yang kinerjanya sangat baik (>200%) adalah persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN. Hal ini dapat terjadi karena komponen perhitungan mencakup jumlah penanganan hukuman yang dilaksanakan di OPD. Sedangkan indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai adalah:

1. Persentase ASN yang dijatuhi hukuman dengan capaian kinerja 57,14%

   Capaian ini disebabkan oleh karena jumlah ASN yang berproses untuk dijatuhi hukuman adalah 8 orang, tetapi kasus yang dapat diselesaikan hingga diterbitkan Surat Keputusan pemberian hukuman baru untuk 4 orang ASN.

2. Persentase pelanggaran disiplin ASN dengan capaian kinerja 75,00%

   Dari total ASN Kota Magelang tahun 2018 sebanyak 2885 terdapat 8 ASN yang dijatuhi pelanggaran disiplin ASN. Dalam mengupayakan pencapaian indikator tersebut diperlukan langkah-langkah peningkatan disiplin ASN. Namun upaya penegakan disiplin pegawai tersebut masih terkendala belum diterapkannya sistem *reward* dan *punishment* yang terintegrasi

3. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan dengan capaian 0%

Kinerja persentase ASN yang mengikuti Diklat Pra Jabatan, sama sekali tidak memiliki capaian karena pada tahun 2018 tidak terdapat CPNS yang difasilitasi untuk mengikuti diklat Pra Jabatan. Sehubungan dengan pelaksanaan rekruitment CPNS adalah mengikuti prosedur dan ketentuan dari pusat, maka pada tahun 2018 baru pada pentahapan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil sehingga tidak ada CPNS yang diikutkan dalam diklat prajabatan.

Selain permasalahan pada indikator-indikator tersebut di atas, perlu dicermati bahwa persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK baru mencapai 54,55%, yang menandakan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian dan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian.

2.1.3.2.5. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan alokasi anggaran untuk urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2018 adalah Rp 2.516.539.000 yang bersumber dari APBD Kota Magelang dengan serapan sebesar Rp 2.392.574.879. Program yang dilaksanakan berjumlah 9 (sembilan) program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi capaian tahun 2018 nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.64
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
1.	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1. Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	23%	14%	36%	257,14%	●
		2. Persentase krenova OPD yang berkualitas	12%	6%	8,57%	142,86%	●
2	Program Penelitian dan Pengkajian	1. Persentase hasil riset/kajian yang ditindaklanjuti	50%	35%	46,67%	133,33%	●
		2. Rasio Hasil Penelitian Mandiri	NA	0%	100%	100%	●
3	Program Pengembangan dan Penerapan Iptek	1. Cakupan Pengembangan IPTEK	20%	12%	14,45%	120,42%	●
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	1. Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	20%	12%	33,85%	282,05%	●
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	1. Cakupan publikasi hasil hasil penelitian	80%	60%	66,670 %	111,11%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
		2. Cakupan publikasi artikel ilmiah pada Open Journal System	8	0%	110%	100%	●
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	1. Cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi	15%	5%	5%	100%	●
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan INovasi	1. Persentase produk teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	10%	32%	320%	●
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	1. Cakupan Penguatan SIDA	75%	45%	53,33%	118,52%	●
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jaringan Penelitian dan Pengembangan	1. Cakupan peningkatan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	45%	57,86%	128,57%	●

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2018

Keterangan :

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Memperhatikan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan di tahun 2018 dapat tercapai sesuai/ melampaui target seperti misalnya indikator persentase krenova masyarakat yang berkualitas. Faktor pendorong capaian kinerja positif ini adalah adanya upaya jemput bola dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kreativitas dan inovasi. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam urusan penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat karena realisasi cakupan baru mencapai 5%.
2. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang maupun dengan kementrian terkait
3. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK) dilihat dari belum optimalnya cakupan peningkatan kapasitas Jarlitbangrap IPTEK
4. Belum optimalnya integrasi hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

2.1.3.2.6. Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan dilaksanakan melalui 4 program dengan 17 indikator kinerja. Target dan realisasi indikator urusan Pengawasan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2018

Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	35%	56,29%	160,83%	●
	2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	100%	80%	85,71%	107,14%	●
	3	Nilai hasil LKJiP SKPD	B	BB	B		●
	4	Persentase SKPD yang direview LKJiP	75%	45%	62,07%	137,94%	●
	5	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95%	95%	85,24%	89,73%	▶
	6	Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun	5%	50%	50%	100%	●
	7	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	95%	85,24%	89,73%	▶
	8	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal	100%	95%	100%	105,27%	●
Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	1	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	87%	65%	50%	76,93%	▼
	2	Persentase aparat SPIP aktif	80%	65%	55,17%	84,87%	▶
	3	Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	90%	80%	100%	125%	●
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 2	Level 3		●

Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018		Kinerja RKPD Th. 2018	Status Capaian
				Target 2018	Capaian 2018		
	2	Persentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	80%	65%	100%	153,85%	●
	3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	70%	100%	142,86%	●
Program Sinergitas Penerapan SPI pada PD	1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	55%	75%	96,56%	128,75%	●
	2	Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksan APIP	5%	50%	50%	100%	●
	3	Persentase implementasi SPIP	100%	78%	55,17%	70,73%	▼

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2018≥100% target 2018 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2018 >80% target 2018 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2018 ≤ 80% target 2018 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 17 indikator yang ada pada fungsi pengawasan, 14 indikator (82,36%) tercapai sesuai target, 1 indikator (5,88%) akan tercapai dan 2 indikator (11,76%) masih perlu upaya keras untuk tercapai sesuai target yaitu indikator cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya) dan persentase implementasi SPIP. Rendahnya cakupan pemeriksaan disebabkan keterbatasan sample rencana aksi dan monitoring evaluasi dari OPD dan keterbatasan kompetensi APIP. Melihat rendahnya implementasi SPIP menjadi bagian dari lemahnya manajemen pengawasan disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan *quality assurance*.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada bulan Desember 2018 Walikota Magelang menerima penghargaan predikat pertama daerah dengan Indeks Daya Saing Terbaik dalam "Penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tingkat Jawa tengah Tahun 2018", mengungguli Kota Semarang dan Kota Wonogiri. Capaian indeks daya saing ini di nilai dari beberapa sektor seperti sektor pendididkan, ekonomi, inovasi, infrastruktur dan sektor lainnya. Sebelumnya pada tahun 2016 hasil survey daya saing juga mengukuhkan Kota Magelang sebagai kota dengan daya saing tertinggi se Jawa Tengah dengan indeks 64.75. Keunggulan Kota Magelang tersebut didongkrak oleh tiga kategori yakni persepsi iklim usaha, kinerja pemerintah dan infrastruktur, dengan faktor utama aspek kelembagaan, lingkungan usaha, basis

di pasar tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, pasar keuangan, dan teknologi. Penghargaan ini juga sekaligus mengukuhkan Magelang sebagai salah satu kota yang dinyatakan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah (yang tercermin dalam PDRB).

Tabel 2.66
Perbandingan Persentase Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan, dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2014 – 2017

Tahun	Persentase Konsumsi Non Makanan	Persentase Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
2014	55.64	44.36	787.022
2015	54.38	45.62	880.508
2016	58.22	41.78	1.125.811
2017	55.46	44.54	1.067.340

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2017, BPS Kota Magelang 2018

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya, apabila lebih dari 50% menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik, apabila 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan kurang dari 20% menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyakarat Kota Magelang sejak tahun 2014 menunjukkan tren meningkat di atas 50% sehingga digolongkan dalam kondisi rumah tangga yang baik.. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara untuk rata – rata pengeluaran per kapita per bulan selama rentang tujuh tahun dapat di lihat bahwa rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 653.780,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.125.811,- di tahun 2016 dan capaian pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.067.340,-. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa rata – rata pengeluaran per kapita mengalami sedikit penurunan dan hal ini berpengaruh pada menurunnya % konsumsi non makanan dan meningkatnya % konsumsi makanan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastuktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

1. Prasarana Jalan dan Transportasi;
2. Ketaatan terhadap RTRW;
3. Jenis dan jumlah bank dan cabang;
4. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang;
5. Jumlah restoran;
6. Jenis dan jumlah penginapan/hotel;
7. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih;
8. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan

2.1.4.2.1. Prasarana Jalan dan Transportasi

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir 100% dalam kondisi baik dan terawat baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan dan jembatan di Kota Magelang sudah dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khusunya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasn ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street..

Capaian kinerja terkait dengan Kondisi jalan terkait panjang trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2018 tercapai.. Pada tahun 2016 trotoar yang dibangun adalah trotoar Jl. A. Yani, Trotoar Jl. Abimanyu, Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Trotoar Jl. Sudirman. Pekerjaan pada tahun 2018 untuk perbaikan/peningkatan kualitas trotoar di sepanjang jalan Pahlawan dan Jalan Diponegoro diharapkan mampun meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat utamanya bagi pejalan kaki.

Tabel 2.67
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan
Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Semester 1 Tahun 2018
Panjang jalan berdasarkan kelas						
a. **Jalan Nasional**	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
b. **Jalan Provinsi**	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
c. **Jalan Kabupaten / Kota**	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
Jenis Permukaan Jalan						
a. **Aspal**	84.306	84.306	116.352	118.92	118.92	118.92
b. **Kerikil**			-	-	-	-
c. **tanah**			-	-	-	-
d. **Tidak di rinci**	8.763	9.633	-	-	-	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi						
a. **Jalan baik**	33.81	38.35	59.64	70.08	70.08	70.08
b. **Jalan sedang**	29.71	29.17	33.37	38.98	36.94	36.94
c. **Jalan rusak**	26.54	23.45	21.56	9.15	11.19	11.19
d. **Jalan rusak berat**	3.00	2.97	1.78	0.7	0.7	0.7
Panjang jalan berdasarkan fungsi						
a. **Jalan arteri**	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
b. **Jalan kolektor**	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Semester 1 Tahun 2018
Status Jalan						
a. **Kabupaten/Kota**	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
b. **Nasional**	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
c. **Provinsi**	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan						
a. **Kelas I**	-	-	-	-	-	-
b. **Kelas II**	-	-	-	-	-	-
c. **Kelas III**	-	-	-	-	-	-
d. **Kelas IIIA**	-	-	-	-	-	-
e. **Kelas IIIB**	-	-	-	-	-	-
f. **Kelas IIIC**	84.306	84.306	116.35	118.92	118.92	118.92
g. **Tidak Dirinci**	8.763	9.633	-	-	-	-

Sumber : Kantor DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan DDA Kota Mgl Tahun 2013-2018
Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Indikator Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 95% dari target 93%, artinya dari total panjang jalan kota 118.915 meter terdapat 110.591 meter dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki tambahan ruas jalan perkotaan akibat penurunan status jalan provinsi, yaitu Jl. Tidar, Jl. Kyai Mojo, Jl. Mayjend. Sutoyo, Jl. Aloon – aloon Selatan dan Jl. Gatot Subroto, kelima ruas jalan tersebut kondisinya rusak sedang. Pada tahun 2017 Pemerintah membangun jalan baru sepanjang 1.192 meter, pada tahun 2017 jalan penghubung baru yang dibangun yaitu jalan penghubung Jalan Tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Sarwo Edhie Wibowo. Jalan penghubung antara Jalan Sarwo Edi Wibowo dan jalan Sudirman untuk mengurai kemacetan.

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transporatsi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penangananya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Pelayanan transportasi darat di Kota Magelang ditopang oleh keberadaan satu buah terminal induk, yaitu Terminal Tidar, dan dua buah sub terminal yang berlokasi di Jalan Ikhlas dan Kebonpolo. Terminal Tidar merupakan terminal antar kota dengan Kelas A di Kota Magelang, akan tetapi melihat kondisi saat ini masih diperlukan adanya sub terminal pada kawasan-kawasan perbatasan misalnya Sambung, perbatasan Sindas, Jl. Alibasa Sentot depan Diknas, untuk menampung angkutan dari luar Kota Magelang. Fungsi utama Terminal Tidar, sebagai terminal induk Kota Magelang adalah sebagai tempat transit angkutan umum; sebagai salah satu pembangkit kegiatan ekonomi dan sebagai salah satu cara dalam meratakan pembangunan perkotaan. Terminal tersebut melayani kendaraan angkutan umum Bis AKAP; Bis AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Type C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu

ada pembangunan terminal Type C sesuai standar. Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung, Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas. Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum bergfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khusunya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasn ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Selain angkutan kota, dikota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

2.1.4.2.2. Ketaatan Terhadap Perda RTRW

Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Untuk mengetahui ketaatan terhadap Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Magelang. Untuk selanjutnya hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.69

Tabel 2.69
Kesesuaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
1.	**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**	Tujuan penataan ruang di Kota Magelang sudah sesuai dengan karakteristik Kota Magelang
2.	**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**	
	2.2 Sistem jaringan prasarana	
	2.2.1 Sistem jaringan transportasi	
	a. Sistem jaringan transportasi darat	
	1 Jaringan jalan	Rencana pengembangan jaringan jalan sudah sesuai dengan karakteristik daerah karena dapat mendukung infrastruktur di Kota Magelang, mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan dapat meningkatkan perekonomian. Ada beberapa ruas jalan yang terjadi kemacetan yaitu persimpangan Canguk dan Persimpangan Trio sehingga perlu dikembangkan rekayasa lalu lintas serta pembangunan Fly Over.
	2 Jaringan jalur kereta api	Rencana pengembangan jalur kereta api di Kota Magelang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting rel saat ini sudah banyak terdapat bangunan. Jika reaktivasi menggunakan jalur eksisting akan tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi Kota Magelang
	2.2.2 Sistem jaringan sumber daya air	
	a. Jaringan air baku	Sebagianbesarsumber air baku Kota Magelangberasaldarimata air yang berasaldariKabupatenMagelang, hanyaada 1 sumbermata air Kota Magelang yang dimanfaatanyaitu Mata Air TukPecah. Untukpengembanganperluadapemanfaatansumber air bakudarimata air yang berasaldariwilayah Kota Magelang, sertapemanfaatan air bakudari air permukaanyaitusumber air permukaan Sungai Progodan Sunga Elodengandilakukan*treatment* air baku.

No.	Muatan RTRW Kota			Keterangan
	2.2.3	Infrastruktur perkotaan		
		a.	Penyediaan air minum kota	Pengembangan air minum yang dikelola oleh daerah melalui PDAMperluditingkatkankualitaslayanannyasertaharusmemenuhi SPM penyediaan air bersih. Pengembangan air minum yang dikelola oleh masyarakat berupa jaringan perpipaan yang berada di kawasan budidaya termasuk perpipaan mandiri berbasis masyarakat di kawasan permukiman
		b.	Pengelolaan air limbah kota	
			1 IPAL	Jaringan air limbah melalui IPAL dan IPLT sampai saat ini belum ada di Kota Magelang sehingga sistem yang terintegrasi tersebut belum dapat diterapkan. Strategipengembangan yang mungkin bias diterapkanyaitudengan system Layanan Lumpur TinjaTerjadwal (LLTT)
			2 Pembuangan air limbah rumah tangga	Limbah rumah tangga di Kota Magelang sampai saat ini masih secara setempat dan membutuhkan waktu bertahap untuk menjadi terpusat
			3 Pengolahan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kawasan budidaya yang menghasilkan limbah cair B3 masih banyak yang belum dilengkapi tempat pembuangan khusus
		c.	Persampahan	
			1 TPS	Kegiatan pendaurulangan sampah atau 3R di Kota Magelang masih belum maksimal sehingga belum dapat memberikan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi untuk masyarakat
			2 TPA	Volume sampah di TPA Banyuurip sampai saat ini sudah *overload*, ditambah dengan umur TPA Banyuurip yang seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang lagi sehingga membutuhkan TPA baru ataupun sistem lain untuk menangani permasalahan sampah
		d.	Drainase	Pemeliharaandanpengembanganjaringandrainaseuntukmengurangigenangan.
		e.	Jalur pejalan kaki	Pengembangan jalur pejalan kaki masihperluditata, terutamapadapusat-pusatkegiatan yang menimbulkanbangkitanpejalan kaki.
		f.	Jalur evakuasi bencana	Pengembangan jalur evakuasi bencana denganmempertimbangkankeberadaanGunungMerapi, walaupununtuk Kota Magelangmasihdiluar Radius 20 km.
3.	**RENCANA POLA RUANG**			

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
3.1	Kawasan Lindung	
3.1.1	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Kawasan yang memberikanperlindungankawasanbawahannyayaitukawasanresapan air di GunungTidar, sehinggaperluupayauntukmempertahankanfungsidankualitastutupanlahanserta plasma nutfah di GunungTidar. Membatasipemanfaatankawasanbudidaya di GunungTidar.
3.1.2	Kawasan perlindungan setempat	
	a. Sempadan sungai	Kawasansempadansungaiterdiridarikawasansempadansungaiprogodansungaielodenganlebarsepadan min 10 m daribibirsungai. Denganmelindungidaripelanggaranpemanfaatanruang. Ada beberapatitiklokasipelanggaranpemanfaatanruang di sepadansungaikhususny Sungai Elo, yang perludilakukanpenertiban.
3.1.3	RTH	Luas RTH publik sampai saat ini belum mencapai 362 Ha sehinggaperluadaupayapencapaian target.
3.1.4.	Kawasan suaka alam dan cagar budaya	
	a. Kawasan suaka alam	Kawasanperlindungansuakaalamberupakawasanperlindungan plasma nutfah yang berada di GunungTidardankawasan lain yang ditetapkanlebihlanjut
	b. Kawasan cagar budaya	Pengembangankawasancagarbudayaberupalingkunganataubendacagarbudaya (monumen, gapura, prasasti, makam, gua) danlingkunganbangunancagarbudaya (bangunantempatibadahbangunankawasankesehatan, bangunankawasanpertahanan, bangunansekolah, bangunanperkantoran, danbangunanrumahtinggal)
3.2	Kawasan Budidaya	
3.2.1.	Kawasan perumahan	Pengembangan kawasan perumahan di Kota Magelang diarahkan untuk tujuan khusus sebagai pemenuhan perumahan yang layak hunidanmanusiawiuntuksemualapisanmas-yarakat. Kawasankumuhharusditanganihinggatuntas, sehingga target 0 % kawasankumuhtercapai.
3.2.2.	Kawasan perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional dengan didukung penyediaan sarana prasaran seperti ruang parker yang memadai
3.2.3.	Kawasan perkantoran	Kawasan perkantoran sudah sesuai dengan karakteristik daerah
3.2.4.	Kawasan industri	Kota Magelang tidak memungkinkan untuk pengembangan kawasan industri, terutama industri besar karena tidak memiliki hamparan seluas 50 hektar. Kondisi eksisting saat ini hanya berupa

No.	Muatan RTRW Kota	Keterangan
		pergudangan yang lebih cenderung dalam kawasan perdagangan dan jasa. Selain itu dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang tidak diplot untuk kawasan industri besar
	3.2.5. Kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata sudah sesuai dengan karakteristik daerah, tinggalpengembangankawasanpenyanggapariwisata
	3.2.6. Kawasan RTNH	Kota Magelang memang membutuhkan RTNH, tetapi tidak dalam bentuk kawasan karena luas Kota Magelang yang tidak terlalu luas
	3.2.7. Kawasan ruang evakuasi bencana	Ruang evakuasi bencana sebaiknya dalam bentuk tempat, bukan dalam bentuk kawasan
	3.2.8. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal	Peruntukan ruang bagi sektor informal sebaiknya diakomodir dalam bentuk kegiatan, bukan kawasan
	3.2.9. Kawasan peruntukan lainnya	
	a. Kawasan pertanian	Luas LP2B di Kota Magelang telah ditetapkan seluas 120 hektar, tetapi sampai saat ini masih belum terpetakan lokasi-lokasi sawah irigasi yang ditetapkan sebagai LP2B. Di sisi lain banyak masyarakat yang menginginkan agar sawah yang mereka miliki dapat dialihfungsikan untuk permukiman karena lebih menguntungkan secara ekonomi
	b. Kawasan olahraga	Kawasan olahraga terdapat di Kawasan GOR Samapta. Perlupengembanganmenjadikawasansporcenter yang terpadu. Kebutuhanlahan yang sangatbesarperludilakukanpentahapandalampengadaantanahnya. Barutersedia 10 ha darikebutuhan 21 ha.
4.	**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**	
4.1	Bidang pertumbuhan ekonomi	PerlukonsistensidalampemanfaatandanpengembanganKawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi: ● kawasan GOR Samapta ● kawasan kebonpolo ● kawasan sukarno hatta ● kawasan taman kyai langgeng ● kawasan sentra perekonomian lembah tidar ● kawasan sekitar alun-alun ● kawasan sidotopo

Sumber : *DokumenPeninjauanKembaliPerda 4 Tahun 2012 ttg RTRW , Analisis*

Kemungkinan adanya simpangan terhadap Perda RTRW tersebut, Pemerintah Kota MagelangtelahmelakukanPeninjauan Kembali RTRW Kota Magelang yang telahdilaksanakanpadaTahun 2016, yang

merupakanpelaksanaandariPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang dimana rencana tata ruang dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Peninjauan kembali RTRW Kota Magelang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar rencana tata ruang memiliki fungsi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, denganhasilsebagaimanapada tabel berikut.

Tabel 2.70
Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian Peninjauan Kembali Perda No. 4 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

No.	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
1	Kualitas RTRW	2,29	30	68,70
2	Kesahihan RTRW	1,06	30	31,80
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	2,50	40	100,00
	Total	**5,85**	**100**	**200,50**
	Rata-Rata Nilai Penilaian Akhir PK RTRW	**1,95**		**66,83**

Sumber : *DokumenPeninjauanKembaliPerda 4 Tahun 2012 ttg RTRW*

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai akhir hasil peninjauan kembali Perda RTRW Kota Magelang adalah sebesar 66,83. Jika mengacu pada Permen ATR No. 6 Tahun 2017 bahwa Perda RTRW perlu dilakukan revisi apabila nilai akhirnya <85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 perlu dilakukan REVISI karena nilai akhir penilainnya sebesar 66,83 atau lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.4.2.3. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejateraan masyarakat. Dengan luas wilayah 18.53 km2, pada tahun 2017 Kota Magelang mempunyai 49 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah , 2 lembaga perbankan milik daerah , serta 22 bank swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang.

Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi : a). 36 Bank Umum (commercial Bank), terdiri 34 bank konvesional dan 2 bank syariah , b). 13 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank), yang merupakan jenis konvensional; dan 3). 3 Bank Syariah (Islamic Bank).

2.1.4.2.4. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Selain Lembaga Keuangan perbankan, jasa keuangan Non Bank yang terdapat di Kota Magelang pada tahun 2017 ,terdiri dari 17 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di 17 Kelurahan dan 15 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian. (sumber, Bagian Perekonomian, SIPD Kota Magelang 2017)

2.1.4.2.5. Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau amenitas yang utama. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang.

Tabel 2.71
Jenis Fasilitas Penginapan di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

No	Jenis	Jumlah
1	Hotel Bintang 5	1
2	Hotel Bintang 4	1
3	Hotel Bintang 3	3
4	Hotel Bintang 2	4
5	Hotel Melati	12
	Jumlah	21

2.1.4.2.6. Restoran dan Pusat Kuliner

Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Beberapa tahun ini Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2018 terdapat 20 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 964 PKL Kuliner di Kota Magelang (sumber Data Strategis Kota Magelang 2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang)

Kebijakan Pemerintah pusat yang bisa menjadi peluang bagi pengembangan Kota Magelang utamanya di sektor pariwisata adalah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Seiring dengan pengembangan kawasan strategis tersebut , apabila Pemerintah daerah bisa memanfaatkan peluang ini dengan menyiapkan segala infrastruktur pendukung dan meningkatkan daya tarik daerah maka Kota Magelang akan merasakan dampak dan keuntungan yang berupa multiplier effect dari kebijakan ini .

2.1.4.2.7. Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun semester 1 tahun 2018 sebanyak 26.751 dengan total pemakaian pada semester 1 tahun 2018 sebesar 3.860.357 liter/ tahun. Sementara apabila di bandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 26.252 dan tingkat penggunaan air bersih pada tahun 2017 sebesar 7.633.558 liter/ tahun. Data Strategis Kota Magelang 2017 menyebutkan bahwa pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan leding /perpipaan sebanyak 25.103 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.606.319 liter/ tahun. Total jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sebanyak 102.228 penduduk. Berdasarakan data strategis Kota Magelang Tahun 2018 Pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 24.505 pelanggan Jumlah ini sedikit meningkat apabila di bandingkan dengan tahun 2017 di mana jumlah pelanggan kelas 2 sebanyak 24.039 pelanggan..

Tabel 2.72
Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2011 – Semester 1 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Semester 1 2018
Jumlah Pelanggan Air Minum	23.396	23.785	24.289	24.652	25.103	26.252	26.751
Total Pemakaian Air (m^3)	7.202.615	7.507.332	7.405.096	7.434.942	7.606.319	7.633.558	3.860.357
Jumlah Rumah tangga	40.623	41.246	41.853	42.433	43.026	42.997	43.043
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	57.59%	57.67%	58.03%	58.10%	58.34%	61.06%	62.15%

Sumber : Data Strategis Kota Magelang, 2018

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menjadi Pelanggan PDAM sebesar 62.15%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan Penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti hydrant pada pusat pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan air bersih, maka diperlukan perhatian serius untuk menambah volume atau debit air guna antisipasi tahun-tahun mendatang. Sistem penyediaan/ pelayanan air bersih pada umumnya terdiri dari bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi air baku, instalasi produksi, jaringan transmisi, bak penampung (reservoir) dan jaringan distribusi. Demikian halnya sistem penyediaan air bersih di Kota Magelang, prasarana pendukung yang ada meliputi :

1. Bangunan pengambil air baku, berada di lokasi sumber air, yaitu masing-masing adalah Mata Air (MA) Kalimas I & II,MA Kanoman I & II, MA Wulung, MA Kalegen, dan MA Citrosono dengan kapasitas total sumber air sebesar ± 705,5 liter/detik.
2. Instalasi produksi merupakan bangunan penampungan, khusus untuk air bersih dari MA Kalegen dan MA Wulung, yaitu BPT Kaputran, BPT Keringan, BPT Tonoboyo dan BPT Bandongan, sementara air bersih dari mata air lainnya langsung didistribusikan. Total kapasitas produksi terpasang air bersih maksimal sebesar ± 425 liter / detik.
3. Reservoir merupakan bangunan penampungan terakhir sebelum air bersih didistribusikan yaitu Reservoir Bandongan (1.400 m3), Reservoir (menara) Alun-alun (1.750 m3), Reservoir Tidar (1.000 m3) dan Reservoir Akmil (500 m3). Total kapasitas seluruh reservoir tersebut adalah ± 4.650 m3.
4. Jaringan perpipaan, meliputi jaringan transmisi air baku atau jaringan transmisi primer (Ø 9''. 12'') jaringan transmisi sekunder (Ø 4''. 8''), jaringan distribusi primer (Ø 1''. 3''), jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (<Ø 1'').

2.1.4.2.8. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik

Hampir seluruh kebutuhan listrik penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan listrik yang telah mencakupi (coverage area) hampir di seluruh bagian wilayah Kota Magelang, khususnya kawasan permukiman. Kebutuhan listrik di Kota Magelang telah dipenuhi dengan baik oleh PLN. Kebutuhan ini juga dipermudah dengan keberadaan APJ (Asosiasi Pelayanan Jaringan) Listrik Magelang dengan skala pelayanan UPJ Tegalrejo, UPJ Kota Magelang, UPJ Purworejo, UPJ Temanggung. Pusat pelayanan listrik bagi kabupaten di sekitar Kota Magelang. Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang. Untuk pelayanan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, sumber energi listrik ditransmisikan melalui SUTET dari wilayah Kabupaten Semarang dan masuk ke gardu listrik PLN yang terdapat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Wates

Dalam bidang pelayanan listrik kepada masyarakat akan kebutuhan listrik pada semester 1 Tahun 2018 mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 27.486 pelanggan listrik dengan pemakaian pada semester 1 Tahun 2018 sebanyak 74.643.948 KwH. Pemakaian terbanyak dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 23.753 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 16.759.436 KwH. Sedangkan pemakaian listrik terendah oleh kelompok industri, yaitu sebanyak 162 pelanggan dengan pemakaian listrik selama semester 1 tahun 2018 sebesar 48.669.811 KwH.

Pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 26.543 dengan jumlah pemakaian listrik pada tahun 2017 sebesar 149.200.639 kwh. Pemakaian listrik oleh rumah tangga terbanyak menggunakan 900 watt sebanyak 13.914 KK, Rumah tangga yang menggunakan daya 450 watt sebayak 12.236 KK, yang menggunakan daya 1300 watt sebanyak 3.944 KK, sementara sisanya 2.252 KK menggunakan daya listrik 2200 watt dan > 2200 watt. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum. Pemakaian terbanyak dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 23.215 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 33.521.318 KwH. Sedangkan pemakaian listrik terendah oleh kelompok industri, yaitu sebanyak 114 pelanggan dengan pemakaian listrik selama tahun 2017 sebesar 97.303.386 KwH

2.1.4.2.9. Fasilitas Peribadatan

Salah satu sarana prasana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di bandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah. Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Data Go Kota Magelang menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang pada tabel ..

Tabel 2.73
Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017

Tempat Ibadah	2014	2015	2016	2017	2018
Masjid	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	210	217	217	217	217
Gereja Kristen	23	26	26	26	26
Gereja Katholik/Kapel	2	2	2	2	2
Wihara	2	2	2	2	2
Klenteng	2	2	2	2	2
Lainnya	-	4	4	4	4

Sumber : Kemenag Kota Magelang, 2018

Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 3.31 jumlah ini telah melebihi dari capaian yang di targetkan pada tahun 2018 sebesar 3%. Dengan luas wilayah yang relatif kecil maka keberadaan tempat ibadah yang ada di Kota Magelang sudah sangat memadai bagi masyarakat untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing. Selain data tersebut di atas, Kemenag Kota Magelang mencatat ada 6 rumah doa yang berdiri di Kota Magelang. Kemunculan rumah doa – rumah doa baru di Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah terutama terkait dengan pendataan dan perijinannya.

RPJMD juga mengamanahkan adanya tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag. Dari target 7% pada tahun 2018, tercapai 9.51%. Capaian pada tahun 2018 ini melebihi target yang canangkan pada tahun 2018. Kendala yang di hadapi terkait ketidaktercapaian indikator ini adalah belum adanya pedoman dari Dirjen Kemenag terkait standar tempat ibadah di luar agama Islam. Selain itu untuk standar tempat ibadah yang ditetapkan Kemenag terlalu tinggi atau belum menyesuaikan dengan kearifan lokal. Dari jumlah tempat ibadah di Kota Magelang yang telah memenuhi standar dari Kemenag (yang sudah di sesuaikan dengan kearifan lokal) sebanyak 41 tempat ibadah yang rinciannya terdiri dari : 21 tempat ibadah yang berupa masjid, 2 Gereja Katholik, 14 Gereja Kristen dan 2 Klenteng dan 2 vihara. Namun capaian ini masih pada tempat ibadah masjid/mushola mengingat Surat Edaran dari Kemenag Kota Magelang terkait standarisasi/ klasifikasi tempat ibadah, sementara ini dikhususkan terlebih dahulu untuk masjid / mushola se-Kota Magelang. Adapun rincian dari kedua puluh satu tempat ibadah tersebut meliputi 17 masjid tingkat Kelurahan, 3 masjid tingkat kecamatan dan 1 masjid tingkat Kota (Masjig Agung Kota Magelang) – (sumber bagian Kesra –Setda Kota Magelang)

Untuk mendukung Misi Religius, di tiap OPD mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat ibadah yang memadai. Adapun capaian dari tempat ibadah yang memadai di tiap OPD sebesar 56.82% yang artinya dari 29 OPD yang ada di Kota Magelang, sebanyak 17 OPD. Selain tempat ibadah yang ada di OPD, sekolah yang ada di Kota Magelang juga di amanatkan untuk menyediakan fasilitas ibadah untuk siswa – siswa. Hampir di semua sekolah menyedia fasilitas ibadah untuk siswa-siswanya. Data pada tahun 2018 terdapat 32 mushola dan 18 masjid yang tersebar di sekolah – sekolah yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk ruangan atau tempat yang di sediakan sekolah untuk fasilitas ibadah bagi siswa – siswa mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha, dengan data sebagaimana tabel tabel sebagai berikut :

Tabel 2.74
Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2014 – Semester 1 2018

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	5	14	16	10	2
	Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	3	1
	Unjuk rasa bidang ekonomi	3	2	4	2	-
	Unjuk rasa bidang lainnya	2	12	12	5	1
2	Kasus pertikaian antar warga	0	4	7	3	6
	Antar etnis	-	-	-	-	-
	Antar wilayah desa	-	1	1	1	3
	Antar agama	-	-	-	-	-
	Antar simpatisan partai	-	-	-	-	-
	Antar pelajar	-	-	2	2	3
	Rusuh masal/pengeroyokan	-	3	4	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Kasus sengketa pengusaha dan pekerja	-	-	-	5	-
5	Sarana prasarana keamanan					
	Jumlah aparat keamanan (polisi)	583	597	588	578	576
	Jumlah pos keamanan (polisi)	13	13	13	10	10
	Jumlah mobil kebakaran	5	5	5	5	5
	Aparat Pamong Praja	59	60	60	58	82
	Jumlh patroli petugas satpol PP Pemantauan dan Penyele-saian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	262	262	262	360	360
	Jumlh petugas perlindungan masy	782	832	832	832	778
	Jumlah pos Siskampling	262	262	262	262	264
6	Angka Kriminalitas	12.35	14.14	14.02	13.31	13.31
7	Jumlah Tindak Kriminal					
	Jumlah Kasus Narkoba	25	26	20	30	33
	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	0	0
	Jumlah kasus Seksual	0	1	0	1	1
	Jumlah Kasus Penganiayaan	3	15	18	12	6
	Jumlah Kasus Pencurian	20	23	56	69	56
	Jumlah Kasus Penipuan	1	15	20	10	14
	Jmlah Kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
	Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran, senpi, kenakalan remaja, pengeroyokan, pemerasan bawa sajam, pengrusakan KDRT, perlindungan anak dll)	na	na	na	18	25
	penggelapan	na	na	na	13	15
	perjudian	na	na	na	9	3

Sumber : SIPD Kota Magelang 2018 Bappeda Kota Magelang (Sumber data Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota) Polresta Magelang Kota ,2018

Terkait dengan Angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa tahun terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang sampai dengan Triwulan 4 tahun 2018 sebanyak 153 kasus. Gambaran angka kriminalitas di Kota Magelang disajikan tabel berikut.

Tabel 2.75
Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2012 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Magelang	149	171	170	162	153
Jumlah penduduk (*data Dispendukcapil*)	131.703	132.261	132.662	130.857	130.030
Jumlah penduduk (*data BPS*)	120.615	120.952	121.293	121.673	121.992
Angka kriminalitas	**11.31 / 12.35**	**12.93 / 14.14**	**12.81 / 14.02**	**12.37/ 13.31**	**11.77/ 12.54**

Sumber : Bappeda Kota Magelang, Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang 2015, data diolah

Data di bawah ini menunjukkan Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2018 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.76
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2018

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08
2016	170	120	70.59	9.89
2017	162	118	72.84	8.88
Triwulan 3 2018	153	115	75.16	8.88

Sumber : Polres Magelang Kota, 2011-2018

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

Terkait dengan jumlah kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terkahir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang dan Polres Magelang Kota sampai dengan tahun 2018 sebanyak 153 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 115 kasus sehingga rasio jumlah kriminalitas yang terselesaikan sebesar 75.16%

Tabel 2.77
Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2010 – 2018

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	**Jumlah Demo/ Unjuk Rasa**	**5**	**14**	**16**	**10**	**2**
a	Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	3	1
b	Unjuk rasa bidang ekonomi	3	2	4	2	
c	Unjuk rasa bidang lainnya	2	12	12	5	1

Sumber : Bappeda Kota Magelang, SIPD 2018

Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010 - 2017

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Naik/Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2014	26.376	84.903	9.334	42.06	0.23
2015	26.107	85.260	9.585	41.86	0.20
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	0.06
2017	25.650	85.851	10.171	41.72	0.09
2018	25.450	86.032	10.512	41.80	0.19

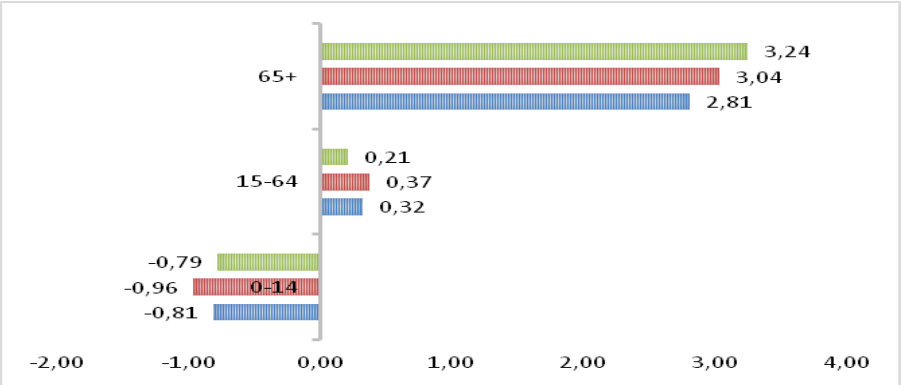
Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2018, data diolah

Berdasarkan data publish kependudukan dikeluarkan BPS pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduka sebanyak 121.673 jiwa lahu pertumbuhan penduduk mencapai 0.37%. Apabila data ini di kaitkan dengan bonus demografi yang sudah di nikmati penduduk Kota Magelang sejak tahun 2010, di mana rasio penduduk usia produktif rata – rata mencapai dua kali lipat di bandingkan penduduk kelompok usia non produktif sehingga hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Magelang yang cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun atau memperlihatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin kecil.

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang di katakana usia produktif namu tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, skitar 70an persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar

harus di imbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlaq yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.



Gambar 2.22
Perkembangan penduduk menurut kelompok umur

2.1.4.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari keahlian dan ketrampilan yang di miliki serta ilmu pengentahuan yang di miliki. Adapun hal ini bisa di asumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka di harapkan dia akan mempunyak kemampuan/ketrampilan dan keahlian yang tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga harapannya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang di tamatkan juga dapat dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun (wajar 9 tahun)

Tabel 2.79
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
1.	2014	131.703	12.053	915
2.	2015	132.261	12.105	915
3.	2016	132.662	12.162	917
4.	2017*	130.857	12.045	920
	Semester 1 2018*	130.030	12.102	930

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

***data penduduk 2017** hasil konsolidasi data pada tahun 2017 yang di lakukan DispendukCapil Kota Magelang melalui kegiatan pemuktahiran database Kependudukan tahun 2017*

Data Strategis Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat). data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan pendidikan yang di tamatkan di atas pendidikan SMA cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun cukup berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi demikian harus di pertahankan dan terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas sember daya manusia yang di miliki Kota Magelang. Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas

sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi.

Tabel 2.80
Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Magelang Tahun 2015-2018

Tahun	Tidak/belum Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2/S3
2015	1.937	17.212	13.950	34.733	424	10.334	11.967
2016	1.870	16.886	13.937	35.526	429	4.013	12.162
2017	1.794	16.270	13.633	35.334	428	3.956	12.045
Semester 1 2018	1.699	15.836	13.473	35.295	424	3.929	12.102

Data Strategis Kota Magelang 2010-2018. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. EVALUASI HASIL PENCAPAIAN SASARAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

Hasil Evaluasi pencapaian sasaran RPJMD sampai tahun berjalan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2018

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
1	**Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**										
	1	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	82,63%	97,00%	83,52%	86,10%
						2	Capaian SPM Kota Magelang	86,09%	70,00%	93,24%	133,20%
						3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	47,00%	52,00%	53,29%	102,48%
				2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WDP	WTP	100,00%
						2	Indeks EKPPD	3,215	3,10	3,20	103,34%
						3	Hasil implementasi SAKIP	55,78	56,00	60,05	107,23%
						4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	65,08%	55,00%	67,69%	123,06%
						a	KMU			64,48%	
						b	KMT			63,72%	
						c	KMS			74,86%	
						5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive	1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	48,28%	60,60%	62,07%	102,43%
				2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase PD menerapkan e-Gov	100,00%	90,00%	100,00%	111,11%
						2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	100,00%	70,00%	100,00%	142,86%

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
				3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	93,18%	93,00%		0,00%
						2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90,99%	70,00%	97,81%	139,73%
	3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1	Derajat Otonomi Fiskal	34,80%	29,82%	37,47%	125,65%
						2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	61,18%	69,67%	63,12%	90,60%
	4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00%	62,00%	62,00%	100,00%
						2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62%	65,52%	66,00%	100,73%
						3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	8,82%	3,96%	35,14%	887,25%
			Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	87,24%	47,00%	74,06%	157,57%
				2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional:				
							a. Regional	6	5	21	420,00%
							b. Nasional	-	2	-	0,00%
							c. International		-	-	0,00%
						2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional				
							a. Regional	125	10	37	370,00%
							b. Nasional	19	5	12	240,00%

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
							c. International	19	2	1	50,00%
2	**Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.**										
	1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indek Pembangunan Manusia	1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	9,14	10,46	10,29	98,37%
						2	Persentase sekolah berstandar nasional				
							a. SD	41,33%	45,66%	57,14%	125,14%
							b. SMP	72,73%	75,00%	78,26%	104,35%
						3	Angka Melek Huruf	98,57%	97,99%	98,77%	100,80%
						4	Persentase kunjungan perpustakaan	81,10%	74,25%	84,85%	114,28%
						5	Jumlah kunjungan perpustakaan	107.260	98.500	112.230	113,94%
				2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	97,00%	77,00%	100,00%	129,87%
						2	Angka Harapan Hidup	76,66	76,76	76,66	99,87%
						3	AKI/ 1.000 KH	192,43	120,00	130,98	109,15%
						4	AKB/ 1.000 KH	12,18	14,00	13,10	93,55%
						5	AKABA	1,924	0,150	0,151	99,34%
						6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,21	0,	0,24	129,17%
						7	Angka Kesakitan DBD	54,65	50,00	42,74	116,99%
						8	Angka Prevalensi Kasus TB	105,00	104,00	150,55	69,08%
						9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,03%	0,05%	0,02%	250%
						10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	95,96%	97,00%	97,99%	101,02%
				3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB		16,43%	17,11%	104,14%
				4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju	1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	50,00%	30,00%	50,00%	166,67%

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
					mendukung Kota Magelang modern	2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10,00%	20,00%	50,00%	250,00%
						3	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20,00%	20,00%	60,00%	300,00%
	2	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environtment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	46,47	75,70	52,00	68,69%
						2	Indeks Kualitas Udara	85,67	70,50	84,91	120,45%
						3	Indeks Tutupan Vegetasi	57,24	48,80	38,22	78,32%
						4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m3)	249,66	155,70	287,70	54,12%
				2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau				
							a. Privat	19,11%	10,00%	19,10%	191,00%
							b. Publik	19,60%	18,42%	19,62%	106,51%
				3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	4,92%	9,38%	39,28%	418,7%
						2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,88%	11,76%	11,76%	100,00%
				4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	24,00%	25,00%	24,14%	96,56%
3	**Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**										
	1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infreastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	82,62%	83,00%	85,34%	102,82%
				2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	100,00%	11,50%	80,00%	695,65%

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
						2	Tercapainya 100 - 0 -100				
							a. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	87,88%	97,30%	93,78%	96,38%
							b. Luas kawasan kumuh (Ha)	67,40	12,12	37,16	32,62%
							c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3,73%	2,00%	3,01%	66,45%
						3	Prosentase RTLH	65,76%	2,30%	11,61%	19,81%
				3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,78%	8,50%	8,49%	99,88%
	2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan investasi				
							a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0,19%	5,00%	5,90%	118,00%
							b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	16,85%	15,00%	169,26%	1128,40%
				2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75,00%	80,00%	80,00%	100,00%
						2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	30,84%	29,00%	37,10%	127,94%
				3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	13.637	12.882	13.820	107,28%
	3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Angka Kemiskinan	1	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65,00%	65,00%	65,00%	100,00%
				2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	9,61%	16,00%	5,07%	31,69%
	4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	101,48%
	5	Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1	Menurunnya kesenjangan gender	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,37%	20,00%	20,00%	100,00%
						2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	14,06%	23,00%	23,00%	100,00%
						3	Rasio KDRT	0,035%	0,055%	0,110%	200,00%
4	**Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang**										
	1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan	1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,00%	14,50%	17,41%	120,07%
						2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	35	10	35	350,00%

No	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Capaian	Target	Realisasi Kinerja 2018	
								2017	2018	Kinerja	Capaian
			dikembangkan								
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan				
							a. Nusantara (orang)	#######	1.138.140	1.309.326	115,04%
							b. Mancanegara (orang)	17.162	5.193	6.359	122,45%
5	**Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani**										
	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1,06%	3,00%	3,18%	106,01%
				2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13,31	12,64	12,54	100,79%
						2	Prosentase penurunan kasus narkoba	6,00%	3,00%	3,00%	100,00%
						3	Angka kriminalitas yang tertangani	9,70%	12,00%	9,43%	78,58%
						4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,22%	3,00%	3,31%	110,33%
						2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)		1	0	0,00%

2.2.2. EVALUASI HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA PERIODE TAHUN 2018

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Pada prinsipnya secara berjenjang pencapaian indikator kinerja dimulai dari eksekusi indikator output kegiatan, indikator kinerja outcome program, indikator kinerja intermediate outcome sasaran hingga indikator kinerja ultimate outcome. Evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah pada RPJMD untuk periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indikator KInerja Daerah pada Akhir Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,04% ± 0,25%	5,18%	5,05% ± 0,25%	5,21%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	63.394.588,17	58,920,000.00	68.656.817,64	NA	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,36% - 4,94%	3,9 %	3,15% - 4,73%	2,65%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,343 - 0,3569	0,328	0,3421 - 0,3523	0,340*	0,341 - 0,3489	0,3397 - 0,3461	0,338 - 0,3438	0,338 - 0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0804	0,0798	0,0725	NA	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**									
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	7,41% – 8,09%	8,75%	6,98% – 7,38%	7,87%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,9		77,26		77,61	78	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun	10 tahun	10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,45 Tahun	13,88 tahun	13,63 Tahun		13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
	c. Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,71 Tahun	76,66 Tahun	76,76 Tahun	76,66	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	11.083.570	11,384,000	11.281.140		11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,9	96,45	95,99		96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	79,2	79,3	79,35		86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6% - 5%	6,68 %	5,8% - 5%	4,8%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,244%	-1,36%	0,384%		0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
a	**Pendidikan**									
	1 Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun		10,46 Tahun	10,29%	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	2 Persentase sekolah berstandar nasional									
	- SD	30,66%	40,66%	98,66%	45,66%	57,14%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	70%	72,73%	75%	78,26%	80%	85%	90%	90%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	3 APM SD	96,51%	97,31%	82,84%	97,71%	92,74%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
	4 APK SD	108,15%	112%	126,70%	114%	101,54%	116%	118%	120%	120%
	5 APM SMP	74,62%	76%	74,96%	78%	77,70%	80%	82%	84%	84%
	6 APK SMP	81,92%	85%	94,19%	88%	94,74%	90%	96%	100%	100%
	7 Angka Melek Huruf	97%	97,67%	98,57%	97,99%		98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
	8 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)*	NA	20%	50%	30%	50%	40%	50%	60%	60%
b	**Kesehatan**									
	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	5 buah (15%)	100%	7 buah (54%)	100%	10 buah (77%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)
	2 Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	126	192,43	120	130	110	95	70	70
	3 Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	14,5	12,18	14	13,10	13,5	13	12,5	12,5
	4 Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,155	0,1920	0,15	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
	5 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,19	0,31	0,24	0,31	0,31	0,31	0,31
	7 Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	54,65	<50	42,74	<50	<50	<50	<50
	8 Angka Prevalensi TB	128.33	<105	156	<104	150,55	<103	<102	<101	<101
	9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	0,03%	<0,5%	0,02%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
	10 Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	97%	95,96%	97%	97,99%	98%	98%	98%	98%
	11 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)*	NA	10%	39,68%	20%	50%	30%	40%	50%	50%
c	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau									
	- Privat	10%	10%	19,10%	10%	19,10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	19,60%	18,42%	19,62%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24%	24%	25%	24,14%	26%	27%	33%	33%
d	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12%	100%	11,5%	80%	11%	10,5%	10%	10%
	2 Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	92,30%	87,88%	97,30%	93,78%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	3 Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	39,65 Ha	59,21%	12,12 Ha	37 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4 Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	3%	3,73%	2%	3,01%	0%	0%	0%	0%
	5 Prosentase RTLH	4,40%	2,90%	2,49%	2,30%	11,61%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	6,68%	6,71%	9,38%	7,27%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	5,80%	6,00%	11,76%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3,18%	3%	3%	3%	3%
	4 Angka kriminalitas	14,14%	13,14%	11,21%	12,64%	9,59%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	72,84%	12%	6,97%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	6%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	**Sosial**									
	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	15%	9,61%	16%	5,07%	17%	18%	19%	19%
	2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3,22%	3%	3,31%	3%	3%	3%	3%
	3 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan *(religious centre)*	NA	0	0	0	0	0	0	1	2
2	**Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**									
a	**Tenaga Kerja**									
	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	65%	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,060%	0,04%	0,055%	0,11%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	17%	6,37%	20%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	20%	14,05%	23%	23%	26%	30%	35%	35%
c	**Pangan**									
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.831 Ton	13.637 ton	12.882 Ton	13820	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	**Lingkungan Hidup**									
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	62	62,54	65	56,36	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,65	46,47	75,7	52	75,8	76,79	76,84	76,84

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	61,8	85,67	70,5	84,9	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,55	57,24	48,8	38,22	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	158,7	249,66	155,7	287,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	58,62%	58,62%	65,52%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	46%	87,24%	47%	74,06%	48%	49%	50%	50%
f	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	**Perhubungan**									
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8,25	8,40	8,5	8,49%	8,75	9	9,25	9,25
h	**Komunikasi dan Informatika**									
	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	60%	100%	70%	100%	80%	90%	100%	100%
i	**Penanaman Modal**									
	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0,19%	5%	5,9%	10%	10%	15%	15%
	2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16,85%	15%	169,96%	15%	15%	15%	15%
j	**Kepemudaan dan Olahraga**									
	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5 buah	6 buah	6	7 buah	449	7 buah	8 buah	8 buah	8 buah
	- Regional	4 buah	4 buah	4	5 buah	368	5 buah	6 buah	6 buah	6 buah
	- Nasional	1 buah	2 buah	2	2 buah	80	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	- international	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14 buah	17 buah	163	17 buah	447	17 buah	17 buah	20 buah	20 buah
	- Regional	8 buah	10 buah	125	10 buah	366	10 buah	10 buah	11 buah	11 buah
	- Nasional	4 buah	5 buah	19	5 buah	80	5 buah	5 buah	6 buah	6 buah
	- international	2 buah	2 buah	19	2 buah	1	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
k	**Statistik**									
	1 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	91%	70%	85,71%	80%	90%	100%	100%
l	**Kebudayaan**									
	1 Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	14%	14%	14,5%	NA	15%	15,5%	16%	16%
	2 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	14%	15%	14,5%	17,41%	15%	15,5%	16%	16%
	3 Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	5	35	10	35	15	20	25	25
m	**Perpustakaan**									
	1 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	72,52%	81,10%	74,25%	84,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
	2 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	96.200	107,261	98.500	112230	100.113	102.230	104.305	104.305
n	**Kearsipan**									
	1 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	48%	47%	52%	53,29%	65%	68%	72%	72%
3	**Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan**									
a	**Pariwisata**									
	1 Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,60%	7,93%	3,80%	NA	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
	2 Jumlah Wisatawan									
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.136.435	1.269.949	1.138.140	1.309.326	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.185	6.341	5.193	6.359	5.201	5.210	5.219	5.219
b	**Perdagangan**									
	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	16,15%	20,75%	16,43%		16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	2 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (*universal design)*	NA	20%	20%	20%	60%	40%	60%	60%	60%
	3 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**									

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
a	**Perencanaan**									
	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	90%	93,18%	93%	73,91%	95%	98%	100%	100%
	2 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	60%	60%	62%	62%	65%	68%	70%	70%
b	**Keuangan**									
	1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	26,34%	34,81%	30,33%	NA	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
	2 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	25,86%	25,82%	29,82%	37,47%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
	3 Rasio ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	73,66%	61,18%	69,67%	63,12%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**									
	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	97%	82,63%	97%	83,52%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	**Penelitian dan Pengembangan**									
	1 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	28%	30,84%	29%	37,10%	30%	31%	32%	32%
e	**Fungsi Lain**									
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	60%	86,09%	70%	93,24%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	3	3,215	3,1	3,2	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (54,00)	B(60,05)	CC (56,00)	B(60,05)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	45%	65,08%	55%	67,69%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	3,06%	8,82%	3,96%	35,14%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	48,48%	48,28%	60,60%	62,07%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	**APEK DAYA SAING DAERAH**									
	1 Indeks Reformasi Birorasi	50,26	57,00	68,22	57,51	NA	58,00	58,51	59,00	59,00

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	75 (B)	78,19 (B)	77 (B)	B	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
	3 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	82%	82,62%	83%	85,34	84%	85%	86%	86%
	4 Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (51,6 – 54,5)	Integrated (63,7)	Scattered (54,6 – 57,5)	Integrated (63,70)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
	5 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. INTEGRASI TPB/ SDGS DALAM RKPD KOTA MAGELANG

Terdapat 17 tujuan dalam TPB/ SDGs yang terbagi dalam pilar ekonomi, pilar pembangunan sosial, pilar lingkungan hidup dan pilar hukum dan tata kelola. TPB/SDGs dirumuskan di tingkat global pada akhir tahun 2015 dan secara kongkret ditindaklanjuti dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 233 indikator TPB/SDGs yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dari 233 indikator, terdapat 192 yang dimungkinkan sebagai indikator TPB/SDGs Jawa Tengah. Dari 192 indikator TPB/SDGs Jawa Tengah, 116 indikator sudah tercantum dan 76 indikator belum tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya).

Dari 17 tujuan tersebut, 14 tujuan telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Magelang sedangkan 3 tujuan lainnya tidak sesuai dengan karakteristik daerah sehingga tidak diadopsi yaitu:

1. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
2. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
3. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Pada Tujuan 1 (mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun) terdapat 21 indikator tingkat nasional yang diintegrasikan dalam RKPD Kota Magelang dan dijabarkan menjadi 25 indikator. Pada beberapa indikator, seperti misalnya Coverage asuransi tenaga kerja dan Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial, terdapat kekosongan data baseline tahun 2015 karena indikator-indikator tersebut adalah indikator baru yang belum ada pada indikator Millenium Development Goals (MDGs).

Integrasi Tujuan 2 (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan) diwakili oleh 6 indikator dalam RKPD, yang merupakan turunan dari 8 indikator nasional. Terkait dengan kerawanan pangan hingga saat ini belum pernah terjadi sehingga tidak dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Untuk memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua warga sesuai Tujuan 3, terdapat lebih dari 20 indikator yang ditetapkan yang terkait kesehatan ibu dan anak, penyakit degeneratif serta penyakit menular dan tidak menular.

Pendidikan yang inklusif dan merata dalam RKPD Kota Magelang ditunjukkan oleh indikator serta promosi kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua merupakan wujud integrasi indikator SDGs pada urusan pendidikan, yang diturunkan dari tingkat nasional dan provinsi. Integrasi Tujuan 5 SDGs (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak) ditunjukkan melalui penerapan kebijakan responsif gender dalam dokumen perencanaan pembangunan, partisipasi perempuan di lembaga perempuan dan swasta, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Integrasi Tujuan 6 SDGs (memastikan kesediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua) ditunjukkan melalui indikator terkait akses air bersih dan air minum dan ketersediaan sistem pengelolaan air limbah.

2.3.1. TUJUAN 1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target dan capaian indikator Tujuan 1 TPB Kota Magelang hingga tahun 2018 di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel II.83

Tabel 2.83
Target dan capaian indikator Tujuan 1 TPB Kota Magelang hingga tahun 2018 di Kota Magelang

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
TUJUAN : 1 (Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun)									
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	8,79%	7,41% – 8,09%	8,75	6,98% – 7,38%	7,87%
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	*Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	*Coverage asuransi tenaga kerja*		68%	70,32%	69%	71.86%	60%	71.99 %
Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	*Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial*		10%	5,71%	15%	19,53%	20%	30.89%
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Progr am Keluarga Harapan			2000		1941		2882
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	*Kelurahan UCI (Universal Child Imunization*)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus kawain	CPR/ Peserta KB Aktif	*Cakupan peserta KB aktif*	75%	76%	76%	77%	77%	78%	78.04%
Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	*Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)*	58.10%		58.34%		61.06%		62.15%
		Persentase Penduduk berakses air minum		87%	81%	92.30%	87.88%	97.00%	93.78%
Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	*Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai*		87%	88%	88%	65.19%	89.00%	93.34%
		Tersedianya sistem air limbah skala kawasan		7%	6%	8%	19.13%	9.00%	3.87%
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani	Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha		39,65 Ha		12,12 Ha	37,16 Ha

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	APM SD/SDLB/MI/Paket A	96,51%	96,91%	97,31%	97,31%	82,84%	97,71%	92,74%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	74,62%	75,00%	76,00%	74,96%	78,00%	77,70%	78,00%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat							
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilkikan akta kelahiran	*Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk*	88,84%	90,00%	90,50%	93,00%	93,71%	95,00%	96,50%
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%		100%		100%		100%
jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	0,00%	5,80%	5,88%	11,76%	11,76%
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	*dokumen yang sudah ada*		0%	0%	25%	0%	50%	50%
	Alokasi anggaran untuk kemiskinan	Alokasi anggaran untuk kemiskinan							

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
	proporsi belanja untuk layanan pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial	proporsi belanja untuk layanan pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial							

Hingga akhir tahun 2018 terdapat beberapa target pada tujuan 1 yang belum tercapai yaitu:

1. Angka kemiskinan, masih pada angka 7,87% sedangkan target tahun 2018 sebesar 6,98% – 7,38%. Tingginya angka kemiskinan di Kota Magelang dapat dijelaskan oleh rendahnya capaian pada beberapa indikator berikut, yaitu:
   a. Masih ada penduduk yang belum memiliki akses air minum, sebesar 6,22%. Sebagian warga masih menggunakan sumber air permukaan, air minum dalam kemasan dan mengambil dari warga yang sudah menjadi pelanggan PDAM.
   b. Masih terdapat 37,16 Ha kawasan kumuh
   c. APM SD/SDLB/MI/Paket A baru mencapai 92,74%
2. Tersedianya sistem air limbah skala kawasan 3.87% sedangkan target 9.00%. Pemenuhan target indikator ini terkendala pada keterbatasan lahan sehingga strategi penyediaan sistem air limbah dilakukan dengan sistem air limbah skala komunil dan setempat.

2.3.2. TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Target dan capaian indikator Tujuan 3TPB dari tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Target dan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan BerkelanjutanTujuan 2 Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	20,7		21,6		22,7		
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	22%		16,32%		17,85%		11,22%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,22	0,31	0,21	0,31	0,26
Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	2,66		2,08		2,69		2,33
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	53,65	35	37,64	38	46,08	41	60,98
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan		83,7	87,7	85	87,9	86,3	88,3

Berdasarkan data hasil evaluasi capaian target indikator pada tabel di atas, semua indikator dalam Tujuan 2 TPB memiliki kinerja yang baik. Di tahun 2018, indikator yang ada pada tujuan ini dapat memenuhi target tahun berkenaan.

2.3.3. TUJUAN 3: MEMASTIKAN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA UNTUK SEMUA USIA

Target dan capaian indikator Tujuan 3TPB dari tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Target dan Capaian Indikator Tujuan 3 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	135	0	126	192,43	120	130,98
		jumlah kasus AKI	3		0		3		2
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	100%	90%	100 %	92 %	100%	92 %	100%
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	16,25	16	12,66	15	14,11	14	15,06
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%
Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	10,66	14,5	12,19	14	13,1
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Cakupan UCI desa	Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100	100	100	100	100	100	100
prevalensi HIV pada populasi dewasa	kasus HIV	Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,03%	0,50%	0,02%	0,50%	0,03%	0,5	0,02
		jumlah Kasus HIV	21		15		18		14
insiden TB/100.000 pddk	CNR TB/SR TB	CNR TB	128,33	106	111,7285	105	153,4862	104	151,5
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Angka Kesakitan Malaria		-	0	-	0	-	0
Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		-	-	-	-	-	45%
Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	0	-	0,83	-	1,5	-	2,31
Jumlah kab/kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	0	0	0	0	0	0	0
Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	38,03	<20%	60,69	<20%	30,53	<20%	1,8
Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	9,73%	<15,4%	1,27	<15,4%	4,28	<15,4%	0,15

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	*Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA*	60,47%	65,00 %	85,24%	70,00 %	94,25%	75,00 %	68,75 %
Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04	3,00 %	3,00 %	3,00%	0,00%	3,00 %	0,00%
Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	*Cakupan peserta KB aktif*	77,30%	77,30 %	75,05%	77,50 %	78,63%	78,00 %	78,00 %
Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	35	36	36	38	38	40	40
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	24	22	22	20	20	19	
Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	5%	5,00 %	5,54 %	5,00%	5,01%	4,00 %	4,09%
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	*Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan*	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
Persentase ketersediaan obat dan vaksin		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	26,3%	NA	24,2 %	NA	25%	NA	NA

Hingga tahun 2018 masih terdapat beberapa indikator pada Tujuan 3 TPB yang belum memenuhi target. Indikator yang masih belum memenuhi target tersebut adalah:

1. Angka kematian ibu yang ditargetkan 120 mencapai 130,98.

Faktor penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah jumlah penduduk dan ibu hamil di Kota Magelang relatif kecil (1.527 kelahiran tahun 2018) sehingga ketika disandingkan dengan rumus perhitungan AKI menjadi tidak sesuai karena pembaginya per 100.000 kelahiran. Ketika terjadi 2 kasus kematian ibu melahirkan di Kota Magelang maka target menjadi tidak terpenuhi.

2. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup ditargetkan 14 pada tahun 2018 namun mencapai 15,06
   Angka kematian balita di Kota Magelang pada tahun 2019 tidak memenuhi target (mencapai 23 jiwa) meskipun layanan kelahiran dengan bantuan tenaga medis di fasilitas kesehatan di Kota Magelang sudah mencapai 100%, akses terhadap fasilitas kesehatan sudah relatif baik, serta program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita juga sudah mencapai target.
3. Insiden TB/100.000 penduduk ditargetkan <104 mencapai 151,5
   Masih belum tercapainya indikator insiden TB disebabkan karena masih belum sepenuhnya masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta kesadaran memeriksakan kesehatan untuk pencegahan dini penyakit.

2.3.4. TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT BAGI SEMUA

Target dan capaian indikator Tujuan 4 TPB dari tahun 2016 hingga 2018 di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Target dan Capaian Indikator TPB Tujuan 4 Hingga Tahun 2018 Kota Magelang

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	81,00%	83,00 %	97,40%	88,00 %	88,31%	90 %	88,31 %
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	95,65%	95,65 %	86,96%	96,00 %	95,65%	97,00 %	95,65 %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	APK SD/SDLB/MI/Paket A	108,15%	110,00%	133,41 %	112,00%	94,45%	114,00 %	107,65%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	APK SD/SDLB/MI/Paket A	74,62%	75,00 %	115,73 %	76,00 %	74,94%	78 %	84,43 %
Rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,32	10,36	10,29	10,41	10,30	10,46	10,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	63,50%	64,00 %	67,12%	65,00 %	91,61%	66 %	89,43 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	-			19,64				
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;*	96,61%	97,61%	120,76%	98,61%	82,48%	99,61%	82,48%
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	74,62%	75,00%	115,73%	76,00%	74,94%	78,00%	84,43%
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	*Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun*	96,02%	96,35%	98%	96,67%	98,57%	96,99%	
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	*Persentase sarana prasarana pendidikan memenuhi universal design*	0%	10%	8%	20,00%	50%	30%	50%
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik	*Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik*	13,11%	13,65%	14,07%	13,87%	45,25%	14,05%	45,25%
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	52,23%	52,65%	60,07%	53,15%	47,54%	53,15%	47,54%
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	66,67%	66,97%	64,95%	67,17%	61,61%	67,67%	61,61%

Sumber: Analisis, 2018

Hingga tahun 2018 terdapat beberapa indikator Tujuan 4 TPB yang belum mencapai target yaitu:

1. APK SD/SDLB/MI/Paket A / 101.54%
2. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat / 92.74
3. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat / 77.70%

Ketiga indikator tersebut di atas tidak mencapai target karena jumlah siswa mengalami penurunan sebagai penyesuaian terhadap regulasi dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dalam penerimaan peserta didik baru

setiap rombongan belajar di sekolah dibatasi, maksimal 28 siswa untuk jenjang dan 32 siswa untuk jenjang SMP, sehingga berpengaruh pada pembilang jumlah siswa secara keseluruhan di Kota Magelang.

4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun / 10.29

   Masih ada murid yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP atau tidak melanjutkan ke SMA

5. APK PAUD / 95.46%

   Masih ada anak usia PAUD yang tidak disekolahkan ke PAUD

6. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik

Dari data guru SD yang berjumlah 870 baru 396 guru yang bersertifikat pendidik. Kapasitas sebagian guru SD belum mampu memenuhi kualifikasi sertifikasi yang semakin ketat oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3.5. TUJUAN 5: MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK

Target dan capaian indikator Tujuan 5 TPB dari tahun 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87
Target dan Capaian Indikator Tujuan 5 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Penerapan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	34	25	12	23	12	20	48
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	34	25	12	23	12	20	48
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%	3%	3,85%	3%	2,03%	2,50%	1,99%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	53,10%	17%	6,37%	20%	14,81%
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	46,90%	20%	14,06%	23%	23%
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi)	Unmet need KB	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	5%	5%	5,54%	5%	5,01%	4%	4,09%
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	50%	55%	55,90%	57%	57,09%	60%	60,24%

Berdasarkan tabel capaian indicator kinerja tujuan 5 TPB tersebut, masih terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target 2018 yaitu:

a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari target maksimal 20 kekerasan yang terjadi, terdapat 48 kasus kekerasan pada tahun 2018. Tingginya kasus kekerasan ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya keberanian dari korban kekerasan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini meningkatkan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak banyak dilaporkan.

b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi secara langsung terkait penerimaan pegawai baru berdasarkan jenis kelamin. Penerimaan yang dilakukan dilakukan berdasarkan uji kompetensi dan kemampuan.

2.3.6. TUJUAN 6: MEMASTIKAN KESEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR BERSIH YANG BERKELANJUTAN DAN SANITASI BAGI SEMUA

Target dan capaian indicator Tujuan 6 TPB hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Capaian Target Tujuan 6 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	*Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)*	58,10%		58,34%		61,06%		62,15%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
		Persentase penduduk berakses air minum	82,30%	87,30 %	81,07%	92,30 %	87,88%	97,30 %	93,78 %
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	*Persentase penduduk berakses air minum*	82,30%	87,30 %	81,07%	92,30 %	87,88%	97,30 %	93,78 %
Persentase rumah angga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Cakupan pelayanan sanitasi	*Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai*	87,00%	87,00 %	87,55%	88,00 %	65,19%	89,00 %	93,34 %
		Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	6,10%	7,00 %	6,41 %	8,00%	19,13%	9,00 %	3,87%
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	*Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	96,00%	96,00 %	97,25%	97,00 %	95,96%	97,00 %	97,99 %
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	*Rasio Rumah Tangga yang masih BABS*	7,00%	6,00 %	7,00 %	3,00%	3,73%	2,00 %	3,01%
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	*Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan*	6,10%	7,00 %	6,41 %	8,00%	19,13%	9,00 %	3,87%
Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	*Jumlah IPLT yang dimiliki*	-	1	1	-	-	-	-
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	-	NA	NA	NA	100%	68%	100 %	100%

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
kualitas air sugai sebagai sumber air baku	indeks kualitas air	-	75,6	75,6	36,25	75,65	46,47	75,7	52
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kesesuaian pengaturan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%

Hingga akhir tahun 2018 masih terdapat beberapa indikator tujuan 6 TPB di Kota Magelang yang belum memenuhi target, yaitu:

1. Persentase penduduk berakses air minum
2. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan
3. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS

   Masih adanya rumah tangga yang BABS sebesar 3,01% disebabkan oleh:

   - PHBS belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat;
   - Konstruksi rumah lama di tepi sungai belum sepenuhnya dilengkapi dengan tangki septik sehingga limbah rumah tangga langsung dialirkan ke sungai;
   - Keterbatasan ekonomi sebagian warga untuk memiliki tangki septik sesua standar baku.
4. Indeks kualitas air

   Belum tercapainya target indikator IKA disebabkan oleh beberapa hal:

   - Perilaku sebagian masyarakat yang masih melakukan BAB di sungai. Data dari BPS (2017) menunjukkan terdapat 1.164 KK yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Hal ini mempengaruhi kualitas air sungai sehingga parameter Fecal Coli dan Total Coliform pada perhitungan IKA tidak dapat memenuhi baku mutu.
   - Masih ditemukan pembuangan limbah domestik black waterdan gray water langsung ke sungai. Hal ini dapat menyebabkan tingginya nilai phospat pada perhitungan IKA.
   - Belum ada kerjasama regional dengan daerah sekitar dalam upaya menjaga kualitas air pada aliran sungai yang melintasi beberapa wilayah, seperti misalnya Kali Manggis dan Kali Bening yang melintasi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
   - Masih adanya resiko pencemaran lingkungan dari industri kecil yang belum dilengkapi IPAL.

2.3.7. TUJUAN 7: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA

Target dan capaian indikator Tujuan 7 TPB Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.89
Target dan Capaian Indikator Tujuan 7 TPB Kota Magelang Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	93,6	NA	91,3	NA	90,08	NA	NA

Indikator Rasio penggunaan gas rumah tangga belum diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Magelang. Hingga tahun 2017,realisasi indikator ini mencapai 90,08. Sedangkan data capaian tahun 2018 belum tersedia.

2.3.8. TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA

Target dan capaian indikator Tujuan 8 TPB hingga tahun 2018 di Kota Magelang

Tabel 2.90
Target dan Capaian Indikator Tujuan 8 TPB di Kota Magelang HIngga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	5,11	5,1-5,5	5,17	5,2-5,6	5,18	5,3-5,7	5,21
PDRB per kapita	PDRB per kapita	*PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)*	53,65	58,23	57,92	63,16	62,88	68,94	NA
Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	48,77%/51,23%	NA	NA	NA	31,89%/68,11%	NA	NA
Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	NA	NA	NA	NA	93,4%	NA	NA

Target pertumbuhan PDRB pada tiga tahun terakhir tidak tercapai. Hal ini menjadi salah satu penyumbang terhadap angka kemiskinan Kota Magelang.

2.3.9. TUJUAN 9: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRIALISASI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DAN MEMBANTU PERKEMBANGAN INOVASI

Target dan capaian indikator Tujuan 9 TPB hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel II.91.

Tabel 2.91
Target dan Capaian Indikator Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Kondisi jalan baik	86,00%	88,50 %	88,50%	86,00 %	90,00%	NA	NA
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	16,11	NA	16,08	NA	15,91	NA	NA
Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	5,33	NA	4,2	NA	4,21	NA	NA
Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	69,8	NA	71,8	NA	77,96	NA	NA
Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	36,5	NA	42,7	NA	45,7	NA	NA

Pencapaian tujuan 9 SDGs di Kota Magelang melalui 4 indikator merupakan indikator yang sifatnya data hasil perhitungan dari BPS sehingga tidak memiliki target dan dievaluasi capaian kinerjanya.

2.3.10. TUJUAN 10: MENGURANGI KETIMPANGAN DI DALAM DAN ANTAR NEGARA

Target dan capaian indikator Tujuan 10 TPB di Kota Magelang hingga tahun 2018 dapai dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Target dan Capaian Indikator Tujuan 10 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Indeks Gini	0,34	0,34	NA	0,34	0,33	0,34	0,34*
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	7,96 %- 8,8%	8,79%	7,41% – 8,09%	8,75%	6,98% – 7,38%	7,87%
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator pada tujuan 10 TPB, masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target pada tahun 2018 yaitu Tingkat Kemiskinan. Target tingkat kemiskinan pada tahun 2018 berada pada kisaran 6,98%-7,38% tetapi realisasinya baru mencapai 7,87%. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa penduduk yang belum memiliki akses air bersih dan masih adanya kawasan kumuh.

2.3.11. TUJUAN 11: MEMBANGUN KOTA DAN PEMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Target dan capaian indikator Tujuan 11 TPB hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Target dan Capaian Indikator Tujuan 11 TPB Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	*R*
Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	*Prosentase RTLH*	4,40%	3,70%	4,20 %	2,90%	2,49%	2,30%	
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Jumlah ketersediaan seat penumpang angkutan umum terhadap jumlah penduduk	4,76%	5%	4,76 %	5%	4,76%	5%	5%
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	*Cakupan penanganan korban bencana*	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	*Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana*	NA	0%	0%	5,80%	6%	11,76 %	11,76 %
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	*Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana*	NA	0%	0%	25 %	0%	50%	50%
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	*Persentase sampah perkotaan yang ditangani*	85,00%	87,00 %	85,70%	87,00 %	86,20%	88,00 %	87,63 %
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	*Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya*	1,30%	2,30%	2%	3,30%	3,20%	4,30%	4,13 %
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	*Prosentase RTH publik*	18%	18,37 %	19,60%	18,37 %	19,60%	18,42 %	19,60 %

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	*R*
Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	*Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana*	NA	0%	0%	25 %	0%	50%	50%

Beberapa target indikator Tujuan 11 TPB pada tahun 2018 belum mencapai target yaitu:

1. Jumlah ketersediaan *seat* penumpang angkutan umum terhadap jumlah penduduk

   Ketersediaan armada angkutan umum tidak bertambah seiring pertumbuhan penduduk karena dinilai tidak efisien bagi operator, mengingat penurunan *load factor* angkutan umum menurun beberapa tahun terakhir
2. Persentase sampah perkotaan yang ditangani

   TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPT (Jurangombo Selatan)
3. Berkurangnya volume sampah dari sumbernya

   Hal ini menandakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya mengurangi volume sampah.

2.3.12. TUJUAN 12: MEMASTIKAN POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN

Target dan capaian indikator Tujuan 12 TPB di Kota Magelang hingga tahun 2018 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.94
Target dan Capaian Indikator Tujuan 12 TPB di Kota Magelang Hingga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	-	ada	-	ada	-	ada	-
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA	-	-	4,00	4,00	6,00	6,00
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	NA	-	-	3%	0,70%	5%	5%

Dari indikator yang ada di tujuan 12 TPB, dua indikator sudah mencapai target tahun 2018. Terdapat 1 indikator yang belum dapat diukur yaitu Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.

2.3.13. TUJUAN 13: MENGAMBIL AKSI SEGERA UNTUK MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Target dan capaian indikator Tujuan 13 TPB di Kota Magelang hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Target dan Capaian Indikator Tujuan 13 TPB di Kota Magelang HIngga Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Ketersediaan masterplan penanggulangan bencana	NA	ada	-	ada	-	100%	100%
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data hasil evaluasi capaian target indikator pada tabel di atas, semua indikator dalam Tujuan 13 TPB memiliki kinerja yang baik di tahun 2018. Semua indikator yang ada pada tujuan ini sudah memenuhi target tahun berkenaan

2.3.14. TUJUAN 16: MENDUKUNG MASYARAKAT YANG DAMAI DAN INKLUSIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA DAN MEMBANGUN INSTITUSI-INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA LEVEL

Target dan capaian indikator Tujuan 16 TPB tahu 2018 di Kota Magelang tertera pada Tabel II.96.

Tabel 2.96
Target dan Capaian Indikator Tujuan 16 TPB Kota Magelang Tahun 2018

INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	INDIKATOR KAB/KOTA	TARGET DAN CAPAIAN						
			Baseline (2015)	2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	1	NA	0	NA	0	NA	0
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	1%	NA	1,10 %	NA	1%	NA	NA
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	*jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*	-	15	12	23	12	20	48
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	*Rasio KDRT*	-	0,065 %	0,06 6%	0.0 55 %	0.035 %	0.05 %	0.0 11 2%

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	*Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*	0	100%	100 %	10 0%	100%	100 %	10 0%
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	8,5E+11	1,02E +12	9E+ 11	1,0 9E +1 2	1E+1 2	1E+ 12	1,0 3E +1 2
Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	*Nilai Opini BPK atas LKPD*	WDP	WDP	WD P	W DP	WTP	WD P	WT P
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	*Hasil implementasi SAKIP*	CC (52,42)	CC (53,00)	CC (57, 00)	CC (54 ,00)	CC (55,7 8)	CC (56, 00)	B (60 ,05)
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	*Persentase PD dengan nilai pelayanan baik*	24,24%	36,36 %	---	48, 48 %	48,28 %	60,6 0%	62, 07 %
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	-	-	20 %	-	20%	-	20 %
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	*Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah*	13,15%	15,00 %	11,0 5%	17 %	6,37 %	20%	14, 81 %
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	-	93,68	95	95, 50	97	97,5 8	98
Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	-	43,7	50	50, 10	52	52,0 6	60
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	87,5	88,84	90	90, 5	93	93,7 1	95

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	*Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan jumlahnya*	100%	100%	100 %	10 0%	100%	100 %	10 0%
Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	*Persentase PD yang menerapkan e-government*	-	100%	100 %	90 %	100%	100 %	10 0%

Satu indikator Tujuan 16 TPB belum mencapai target yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kapasitas sumber daya manusia perempuan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lembaga pemerintah, mengingat penerimaan pegawai murni berdasarkan kompetensi.

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.4.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah ini diidentifikasi dari evaluasi kinerja indikator pembangunan daerah sampai dengan tahun 2018, meliputi:

1. Masih relatif tingginya jumlah penduduk miskin, yang juga disebabkan belum optimalnya upaya penurunan PMKS.
2. Belum optimalnya kualitas SDM aparat terutama terkait dengan kinerja
3. Belum optimalnya layanan pendidikan dilihat dari masih belum terpenuhi target rata-rata lama sekolah (99,34%)
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dilihat dari masih belum tercapainya target AKBa, Prevalensi balita gizi buruk, masih relatif tinggi angka prevalensi kasus TB
5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas air, dan pengurangan volume sampah pada level sumber tidak signifikan.
6. Belum meratanya pembangunan infrastruktur perkotaan, ditandai dari masih adanya kawasan kumuh, masyarakat yang BABS dan belum terpenuhinya target RTLH.
7. Masih bergantungnya penyediaan pangan dari daerah lain karena produksi pangan lokal tidak mencukupi kebutuhan.

2.4.2. PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah didasarkan pada evaluasi kinerja program masing-masing urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang.

2.4.2.1. Pendidikan

a. Masih terjadinya putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dengan angka yaitu SD 0,02%, SMP 0,1%
b. Masih adanya kesenjangan mutu pada satuan pendidikan
c. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal
d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan
e. Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

2.4.2.2. Kesehatan

a. Masih tingginya prevalensi TB dan angka penemuan kasus TB
b. Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan (AKI 130,9)
c. Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa)
d. Masih tingginya kasus kematian bayi (20 kasus)
e. Belum tercapainya target 100% Open Defecation Free (ODF) karena masih ada warga melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
f. Belum terintegrasinya data antar fasilitas kesehatan (data Penyakit menular dan penyakit tidak menular)
g. Belum adanya regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok

2.4.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum semua pusat-pusat kegiatan baru di wilayah perbatasan di sisi barat dan timur terhubung jalan
b. Masih tercampurnya saluran drainase dan saluran air limbah domestik
c. Trotoar yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas
d. Belum dimilikinya dokumen tata ruang sebagai operasional pengendalian ruang (RDTR)

2.4.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih belum terpenuhinya target program 100 0 100

2.4.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
b. Masih adanya ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban umum
c. Semakin tingginya ancaman peredaran gelap narkoba

2.4.2.6. Sosial

a. Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial
b. Belum validnya data kemiskinan
c. Kurangnya sarana sosial untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif, seperti misalnya rumah singgah

2.4.2.7. Ketenagakerjaan

a. Kurangnya daya saing pencari kerja Kota Magelang di pasar kerja baik skill/ketrampilan maupun mental (hard skill dan soft skill) terutama untuk jabatan-jabatan tertentu.
b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi
c. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja negeri dan swasta

2.4.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya TPAK perempuan
b. Masih terjadinya KDRT

2.4.2.9. Ketahanan Pangan

a. Masih rendahnya produksi pangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan pangan
b. Belum optimalnya pengaman mutu dan keamanan pangan
c. Belum optimalnya pengembangan urban farming

2.4.2.10. Pertanahan

a. Masih adanya aset tanah Pemkot yang belum bersertifikat
b. Terbatasnya SDM pengadaan tanah

2.4.2.11. Lingkungan Hidup

a. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, dilihat dari Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Vegetasi
b. Belum terpenuhinya target ruang terbuka hijau publik 20%
c. Belum optimalnya pengurangan sampah.
d. Masih adanya resiko pencemaran lingkungan akibat banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.
e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait pengelolaan sampah dan penyediaan ruang terbuka hijau publik.
f. Ketergantungan pada daerah lain dalam penyediaan lahan lokasi TPA

2.4.2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih adanya penduduk yang belum tertib administrasi kependudukan.
b. Belum optimalnya proses pemutakhiran data kependudukan

2.4.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih rendahnya kapasitas pengurus LPM dalam perencanaan pembangunan
b. Belum semua elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan kota

2.4.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih ditemukannya pernikahan di bawah usia 20 tahun
b. Masih ada pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmeet need)
c. Belum optimalnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB

2.4.2.15. Perhubungan

a. Terbatasnya sarana angkutan barang
b. Menurunnya load factor angkutan umum kota
c. Belum optimalnya integrasi APILL dengan ATCS
d. Belum optimalnya pengelolaan blok parkir tepi jalan umum

2.4.2.16. Komunikasi dan Informatika

a. Keterbatasan SDM dengan kemampuan teknologi informasi di masing-masing OPD
b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi publik secara daring
c. Belum meratanya cakupan WAN kota.
d. Belum ada regulasi terkait integrasi aplikasi dan sistem informasi

2.4.2.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, ditunjukkan dengan tidak bertambahnya jumlah koperasi
b. Rendahnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah dalam kemampuan inovasi dan kreativitas produk

2.4.2.18. Penanaman Modal

a. Kurangnya informasi dan promosi mengenai potensi investasi yang ada di Kota Magelang
b. Keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor
c. Belum optimalnya implementasi pelayanan terpadu satu atap

2.4.2.19. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kurangnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga
b. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang
c. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar
d. Belum optimalnya pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

2.4.2.20. Statistik

a. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola data
b. Masih terdapat data-data penting yang sulit didapatkan/dihitung secara akurat dan tepat waktu.

2.4.2.21. Persandian

a. Keterbatasan SDM pengelola persandian (sandiman), secara kualitas maupun kuantitas

2.4.2.22. Kebudayaan

a. Belum adanya tim pendaftar cagar budaya
b. belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
c. Terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal seiring makin berkurangnya narasumber sejarah

2.4.2.23. Perpustakaan

a. Belum semua perpustakaan melaksanakan pelayanan sesuai standar nasional perpustakaan
b. Belum optimalnya minat baca masyarakat
c. Belum optimalnya implementasi e-library

2.4.2.24. Kearsipan

a. Belum optimalnya implementasi e-arsip
b. Belum optimalnya kompetensi SDM pengelola kearsipan di masing-masing OPD

2.4.2.25. Kelautan dan perikanan

a. Rendahnya produksi perikanan.
b. Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan pelaku budidaya ikan terkait CPIB/ CBIB.

2.4.2.26. Pariwisata

a. Masíh rendahnya kualitas atraksi dan jasa industri pariwisata seperti kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi destinasi pariwisata.
b. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebagai kota jasa.
c. Belum adanya Tourist Information Centre (TIC) yang representatif.
d. Masih singkatnya durasi kunjungan wisata.

2.4.2.27. Pertanian

a. Belum optimalnya impelementasi teknologi pertanian sehingga produktivitas pertanian tidak optimal
b. Belum berkembangnya pertanian perkotaan (urban farming) sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan produk pertanian
c. Masih terdapat produk pangan asal hewan yang tidak Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
d. Keterbatasan kuantitas SDM medis dan paramedis di Puskewan

2.4.2.28. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Belum seluruh rumah tangga terlayani jasa layanan listrik negara
b. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan kebutuhan energi, karena besarnya biaya investasi

2.4.2.29. Perdagangan

a. Kerjasama perdagangan internasional belum berkembang luas karena terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan, khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.
b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor

2.4.2.30. Perindustrian

a. Belum efektifnya pelayanan perijinan bagi industri kecil

b. Lemahnya daya saing produk IKM Kota Magelang dalam menghadapi dampak globalisasi, terutama terkait inovasi dan diversifikasi produk dan promosi dan pemasaran

2.4.2.31. Transmigrasi

a. Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi

2.4.2.32. Fungsi Lain

a. Belum optimalnya Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)
b. Belum optimalnya pembentukan zona integritas

2.4.2.33. Perencanaan

a. Belum optimalnya pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD
b. Belum adanya fungsional perencana di daerah untuk menunjang produk-produk perencanaan daerah, seiring kompleksitas isu dan permasalahan serta pemahaman aturan-aturan terkait

2.4.2.34. Keuangan

a. Laporan Barang Milik Daerah (BMD) belum informatif.
b. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap aturan pengelolaan BMD.
c. keterbatasan SDM dan anggaran untuk menilai besaran objek sewa (tanah/bangunan)
d. masih terdapat ketidaktaatan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

2.4.2.35. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum diterapkannya sistem reward and punishment yang terintegrasi
b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian
c. Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian

2.4.2.36. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
c. Belum terintegrasinya hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

2.4.2.37. Pengawasan

a. Lemahnya manajemen pengawasan disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance.
b. Belum optimalnya kompetensi APIP.
c. Hasil implementasi SAKIP masih mengalami keterbatasan sample dari OPD, renaksi dan monev.

Rumusan permasalahan gabungan berbagai urusan penyelenggaran pemerintah daerah di atas kemudian dirumuskan menjadi beberapa masalah pokok sebagaimana berikut:

Tabel 2.97
Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Magelang

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok
1	Masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 7,8% (aspek kesejahteraan masyarakat fokus ekonomi)	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok
2	Masih rendahnya TPAK perempuan yaitu sebesar 60,96% (aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial)	
3	Masih rendahnya jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan BNSP	
4	Belum adanya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa kejuruan menengah atas untuk persiapan memasuki dunia kerja.	
5	Masih ada kasus pernikahan dan kehamilan dibawah usia 20 tahun,yang sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar pernikahan	
6	Masih tingginya angka putus sekolah pendidikan dasar	Belum optimalnya layanan dasar masyarakat
7	Kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih belum merata	
8	Masih tingginya prevalensi TB dan angka penemuan kasus TB	
9	Masih tingginya AKI (130,9)	
10	belum tercapainya target 100% ODF	
11	Masih terjadinya kasus kematian bayi (20 kasus)	
12	belum terintegrasi data antar fasilitas kesehatan (data Penyakit menular dan penyakit tidak menular)	
13	belum semua pusat-pusat kegiatan baru di wilayah perbatasan di sisi barat dan timur terhubung jalan	
14	belum dimilikinya dokumen tata ruang sebagai operasional pengendalian ruang (RDTR)	
15	Masih belum terpenuhinya target 100 0 100	
16	keterbatasan kapasitas anggaran daerah dalam penanganan masalah sosial	
17	belum tersedianya data kemiskinan yang valid dan mutakhir	
18	Menurunnya load factor angkutan umum kota	
19	terbatasnya sarana angkutan barang	
20	Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.	
21	Rasio elektrifikasi sebesar 98% sedangkan target nasional untuk tahun 2019 sebesar 99,9%	
22	Belum tercapainya target prestasi pelajar pada level Propinsi dan Nasional	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
23	belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemebangunan sektor kesehatan (kelurahan siaga mandiri baru 47% kelurahan)	
24	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.	
25	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, khususnya KTP-el dan KIA.	
26	Perlunya optimalisasi partisipasi laki-laki dalam ber-KB khususnya bagi peserta dari keluarga miskin.	
27	Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.	
28	Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.	
29	Masih minimnya serah simpan karya cetak dan karya rekam masyarakat	
30	belum terintegrasinya penelitian pengembangan dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan	

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok
31	belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk krenova	
32	belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi	
33	Trotoar masih belum memenuhi standar aksesibilitas	Belum maksimalnya perwujudan inklusifitas dalam seluruh aspek pembangunan
34	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
35	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur ramah anak	
36	Belum memadainya SDM dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum	belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi
37	Terbatasnya ASN di bidang perkoperasian yang memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam untuk menilai kesehatan koperasi	
38	Terbatasnya SDM persandian	
39	Belum efektifnya pelayanan perijinan industri kecil	
40	Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	
41	Belum ditetapkannya sistem *reward dan punsishment* disiplin ASN yang terintegrasi	
42	Masih lemahnya manajemen pengawasan yang belum berbasis resiko, pengendalian internal dan *quality assurance*	
43	Belum adanya zona integritas yang terbentuk di OPD	
44	Ketergantungan penyediaan pangan dari daerah lain	Masih tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan daerah terhadap daerah lain
45	Ketergantungan dengan daerah lain dalam penyediaan lahan TPA	
46	Belum optimalnya pembenihan ikan bersertifikasi	
47	Masih rendahnya produksi ikan	
48	Terbatasnya lahan pertanian	
49	Produksi bahan pangan belum sebanding dengan kebutuhan konsumsi masyarakat	
50	Masih tercampurnya sistem pembuangan air limbah domestik dengan sistem drainase kota	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan perkotaan melalui pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
51	Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
52	Masih rendahnya pengurangan sampah pada level sumber	
53	Besarnya potensi pencemaran lingkungan dari industri kecil yang belum dilengkapi IPAL	
54	Belum optimalnya permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.	
55	Belum tersedianya sarana TIC yang representatif	
56	Belum ada data terkait pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan kebutuhan energi sedangkan Provinsi Jawa Tengah menargetkan persentase pemanfaatan EBT sebesar 10,20% dari total konsumsi energi tahun 2018.	
57	Sistem kependudukan yang masih tergantung pemerintah pusat terkadang memperlambat proses revisi data dari komplain yang disampaikan masyarakat.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan TIK dalam pembangunan
58	Belum merata dan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang memiliki keahlian di bidang TI. Persebarannya hanya di 20 dari total 29 OPD.	

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok
59	Belum optimalnya mekanisme monintoring dan evaluasi investasi di lapangan terutama dalam hal pelaporan investasi agar data yang didapatkan valid	
60	Belum optimalnya promosi dan informasi potensi investasi di Kota Magelang	
61	Kurangnya konsistensi dan validitas data statistik	
62	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan sesuai SNP	
63	Belum optimalnya digitalisasi arsip	
64	Belum tersedianya sarana TIC yang representatif	
65	Belum terintegrasinya penelitian pengembangan dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan	
66	Kerjasama perdagangan internasional belum berkembang luas karena terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan, khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.	
67	Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor	
68	Lemahnya daya saing produk IKM Magelang	
69	Belum berjalannya sistem register cagar budaya	Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, pelestarian seni, dan pariwisata
70	Terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah	
71	Kualitas atraksi dan jasa industri wisata masih rendah	
72	Terbatasnya kapasitas anggota Linmas	Masih adanya ancaman keamanan ketertiban umum
73	Masih terjadinya konflik antar elemen masyarakat	
74	Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	

Sumber: Hasil analisis tim penyusun RKPD, 2019

2.5. ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan.

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan

pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptekdan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean governmentdengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani *(civil society),* dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;

3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Kemananan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan PanganKedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama

9. Penerapan prinsip prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
c. Penguatan reformasi birokrasi;
d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

Keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang dihasilkan dari perencanaan daerah. Dalam mengoptimalkan segala potensi sebagai sumber keuangan daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik yang terjadi di tingkat nasional, regional serta lokal. Bab ini memberi gambaran tentang kondisi makro ekonomi sebagai pertimbangan dalam melakukan prediksi kemampuan keuangan daerah. Selain itu juga akan diuraikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kota Magelang Tahun 2020 diarahkan untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5%, dengan inflasi bisa terkendali dibawah 3%. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu strategis dengan target pada kisaran 6-7%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka didorong untuk berada pada kisaran 4-5%. Pemerintah Kota Magelang akan memberikan dorongan bagi sektor unggulan dan sektor andalan yang meliputi industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib agar lebih memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Selain itu, melalui peningkatan investasi juga didorong agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi Kota Magelang Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tema Pembangunan 2020 yaitu: **Promotif-Ekspansif Bersama Mitra**, sebagai acuan dalam melaksanakan program-program pembangunan serta untuk mencapai target makro pembangunan daerah. Permasalahan yang masih dijumpai sampai akhir 2018 terkait capaian indikator kinerja urusan juga akan menjadi prioritas untuk diatasi melalui program dan kegiatan di tahun 2020.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Magelang Tahun 2020 tidak bisa lepas dari kondisi dan capaian perekonomian nasional dan regional. Secara umum kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah berdasarkan capaian Tahun 2018 bisa menjadi andalan untuk menopang pembangunan ekonomi Kota Magelang.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2018 sangat baik dengan progress capaian indikator makro yang terbilang signifikan. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan posisi yang baik. Inflasi terkendali sampai dengan akhir tahun dan masuk dalam target yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Realisasi Ekonomi Makro Nasional 2016 & Asumsi RAPBN 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017*	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,88	5,02	5,07	5,17*	*Data Triwulan III (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	5,61	5,50	5,34	-
IPM (%)	69,55	70,18	70,81	na*	*Data belum dipublikasi
Inflasi (%)	3,35	3,02	3,61	3,13	-
Indeks Gini (Maret)	0,408	0,397	0,393	0,389	-
Persentase Penduduk Miskin (September %)	11,13	10,70	10,64	9,82*	*Data September

Sumber: BPS, 2019

Fokus pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memicu kenaikan investasi skala nasional. Kemiskinan tercatat memiliki tren menurun dan mencapai nilai terendah sepanjang dekade. Pada Maret 2018 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,82% atau 25,95 juta jiwa. Pendapatan juga mengalami distribusi yang lebih merata dengan tren menurun sejak tahun 2014. Capaian indeks gini Indonesia pada Maret 2018 sebesar 0,389, turun 0,004 poin dari Maret 2017.

Berdasarkan uraian umum tentang kondisi ekonomi nasional, maka melahirkan rumusan asumsi dasar makro 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi 2018 dan Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2019

Indikator Makro	Realisasi 2018	Keterangan 2018	Asumsi Dasar Makro 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	Per Triwulan III	5,3
Inflasi (%)	3,13	Per 28 September	3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.119	Per 28 September	15.000
Harga Minyak (US$/barrel)	68	Per 28 September	70
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	774	Per 28 September	775
Lifting gas (ribu barrel/hari)	1.140	Per 28 September	1.250

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan data BPS, kondisi perekonomian Jawa Tengah sampai dengan Triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,25% dengan tingkat inflasi sampai dengan akhir tahun sebesar 2,82%. Prediksi Bank Indonesia kondisi perekonomian Jawa Tengah akan tumbuh lebih tinggi di rentang 5,3%-5,7% di tahun 2019. Pemerataan pendapatan menjadi perhatian karena meskipun kecil namun terjadi peningkatan indeks gini menjadi 0,378 di tahun 2018 setelah sebelumnya mampu berada di angka 0,365.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mencapai 3,9 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.875. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2018 masih lebih tinggi dari persentase pada skala nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mampu turun di tahun 2018. Dengan total angkatan kerja sebanyak 18,06 juta jiwa, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih ditemui 4,51%. TPT tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 8,45% sedangkan wilayah dengan TPT terkecil adalah Kabupaten Boyolali yang hanya mencapai 2,16%.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2018 dan sasaran makro 20120

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan	Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,28	5,27	5,25*	*Data Triwulan III (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,99	4,63	4,57	4,51	-
IPM (%)	69,49	69,98	70,52	na	Data belum dipublikasi
Inflasi (%)	2,73	2,36	3,71	2,82	-
Indeks Gini (Maret)	0,382	0,366	0,365	0,378	-
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,32	13,19	12,23	11,32*	*Data September

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
**Ditetapkan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah No. 050.23/002916, 27 Desember 2018

3.1.2. Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang

Berdasarkan uraian kinerja makro ekonomi dan sosial dari hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kota Magelang di tahun 2018 sebagaimana diuraikan dalam Bab II, maka sub bab ini akan membahas outlook kondisi ekonomi Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2019 dari beberapa indikator makro pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,11	5,17	5,18	5,09-5,21*	5,09-5,21*	*prediksi
TPT (%)	6,43	na	6,68	4,88	4,8-5,54**	**prediksi
IPM (%)*	76,39	77,16	77,84	78,65*	79,49*	*prediksi derivatif
Inflasi (%)*	2,70	2,25	3,90	2,65	3%±1%*	*prediksi
Indeks Gini*	0,340	0,328-0,34*	0,328-0,34*	0,328-0,34*	0,328-0,34*	*prediksi
Persentase Penduduk Miskin (%)*	9,05	8,79	8,75	7,87*	7,79**	2015-2017 data September *Data Maret **Prediksi (deviasi ±0,23%)

Sumber: Sumber: BPS Kota Magelang, 2019
*Prediksi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2019
**Prediksi batas atas oleh Pusdatin Naker dalam Perencanaan Tenaga Kerja Kota Magelang 2017-2021 (hal. 58

3.1.2.1. PDRB

Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diwilayah Kota Magelang dalam tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan di tahun 2019. Sub-Bab ini akan menampilkan PDRB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang.

3.1.2.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2019 diprediksi tumbuh positif 8,29%. Dengan komposisi peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: lapangan usaha Pengadaan Listik dan Gas, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Jasa Perusahaan, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan lapangan usaha Jasa Lainnya. Perekonomian 2019 diprediksi masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Konstruksi (16,11%), Industri Pengolahan (15,62%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,38%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,65%).

Tabel 3.5
Prediksi PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2019

LAPANGAN USAHA	Nilai Tambah Bruto
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.462,94
Industri Pengolahan	1.401.082,17
Pengadaan Listrik dan Gas	26.584,83
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.057,21
Konstruksi	1.444.532,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.289.324,82
Transportasi dan Pergudangan	649.573,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	572.844,01
Informasi dan Komunikasi	461.348,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	488.397,35
Real Estate	285.960,08
Jasa Perusahaan	34.807,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.044.274,96
Jasa Pendidikan	653.692,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257.600,28
Jasa lainnya	190.603,79
PDRB	**8.967.145,92**

Sumber: Prediksi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ±0,71%)

3.1.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,967 triliun Rupiah atas dasar harga berlaku, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 5,09%-5,21%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,417 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Pengadaan Listrik dan Gas (7,26%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,83%), Informasi dan Komunikasi (8,6%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,82%), Jasa Perusahaan (8,09%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,03%) dan lapangan usaha Jasa Lainnya (7,30%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2019 sebesar 122.111 jiwa, besarnya PDRB per kapita Kota Magelang atas dasar harga berlakun diprediksi tumbuh 8,07%.

3.1.2.2. Pemerataan Pendapatan

Data terakhir di tahun 2015 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Magelang masuk dalam klasifikasi ketimpangan sedang dengan indeks sebesar 0,340. Pada tahun-tahun ke depan pemerataan tersebut diprediksi makin baik dengan indeks di tahun 2019 pada interval 0,328-0,340 dan cenderung menurun.

3.1.2.3. Perkembangan harga

Seiring dengan outlook yang cukup optimis pada indikator makro ekonomi, laju perkembangan inflasi di Kota Magelang pada tahun 2019 juga diprediksi stabil pada kisaran angka 3%±1%. Prediksi ini masuk dalam rentang target RPJMD di tahun berkenaan.

3.1.2.4. Ekspor dan Investasi

Neraca perdagangan negatif memang tidak dapat dihindari di Kota Magelang mengingat keterbatasan sumber daya dan luas wilayah. Namun demikian diprediksi ekspor (perdagangan ke luar wilayah) Kota Magelang di tahun 2019 mampu tumbuh mengimbangi bahkan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan impor. Celah yang tercipta dalam pos ekspor netto diprediksi makin mengecil dengan perolehan nilai ekspor diprediksi 4,871 triliun rupiah (deviasi 0,06%) di tahun 2019 dan outlook yang meningkat stabil. Sementara itu Investasi dari pendekatan PMTB di tahun 2019 diprediksi tumbuh 8,27% dengan nominal mencapai 4,455 triliun rupiah (deviasi 0,1%).

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Kota Magelang Tahun 2020

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2020 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
b. Meningkatkan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan kawasan agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang), pengaktifan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta, pembangunan jalur tol dengan exit tol yang melewati Kota Magelang, pengembangan Kawasan Borobudur yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata nasional.
c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.
d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
e. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta mempersempit celah neraca perdagangan yang selama ini bernilai negatif.
f. Meningkatkan produktivitas daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.

i. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

j. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

k. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjaringan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.

3.1.3.2. Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2020

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2017 dan prediksi tahun 2018-2019, maka pada tahun 2020 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh pada rentang 5,15%-5,49% dengan kecenderungan naik.prediksi ini sinergi dengan scenario sasaran provinsi Jawa Tengah tahun 2010.

b. Inflasi diprediksi pada kisaran angka 3%±1% dengan kecenderungan menurun.

c. Laju pertambahan penduduk akhir tahun diproyeksi sebesari 0,24% (berdasarkan proyeksi kependudukan Kota Magelang tahun 2010-2020 oleh BPS).

d. PDRB atas dasar harga berlaku diprediksi mencapai 9,698 triliun rupiah (deviasi 0,71%), tumbuh 8,29%.

e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diprediksi tumbuh 7,92%.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi mencapai 4,8%-5,28% (batas atas didasarkan pada prediksi Pusdatin naker dalam dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota Magelang 2017-2021).

g. Indeks Pembangunan Manusia diprediksi mencapai 79,50.

h. Presentase penduduk miskin diprediksi mencapai 7,64%-7,79%.

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi cateris paribus tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan porsi yang seimbang antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan pembiayaan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan, maupun dari sisi pengeluaran agar pemerintah daerah lebih memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah adalah menjaga agar porsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja tidak langsung. Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2018 porsi belanja langsung sudah mencapai 68,66%, sedangkan porsi belanja tidak langsung adalah 31,34%. Porsi ini akan tetap dijaga agar masyarakat bisa lebih menikmati anggaran daerah, karena pada hakekatnya dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2020 di Kota Magelang diarahkan untuk:

1. Melanjutkan konsolidasi fiskal untuk mewujudkan sustainable fiskal daerah.
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi.
3. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yg tidak terkait dg pelayanan dasar) yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-Undang Undangan.
4. Pendanaan program dan kegiatan yang berorientasi promotif dan perluasan pasar produk serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah inklusif, dan kesejehteraan masyakarat.
5. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan disisi lain melakukan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel 3-6. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**233.557.714.356**	**225.916.332.000**	**222.478.414.000**	**232.223 002.000**
1.1.1	Hasil Pajak daerah	31.206.960.485	30.646.800.000	32.500.000.000	35.300.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.243.021.736	4.909.300.000	5.001.088.000	5.145.511.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.711.404.121	8.693.811.000	9.982.607.000	9.982.607.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	188.396.328.014	181.666.421.000	174.994.719.000	181.794.884.000
1.2	**Dana Perimbangan**	**553.115.007.612**	**583.609.549.000**	**590.290.453.000**	**586.318.945.000**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.685.769.289	30.321.942.000	24.412.946.000	24.733.766.000
1.2.2	DAU	440.041.244.000	440.041.244.000	455.177.029.000	449.177.029.000
1.2.3	DAK	86.387.994.323	113.246.363.000	110.700.478.000	112.408.150.000
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**122.853.140.952**	**93.150.056.000**	**99.197.714.000**	**98.765.114..000**
1.3.1	Hibah	24.050.844.059	18.268.200.000	16.757.600.000	16.325.000.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	41.855.667.000	52.555.256.000	40.043.975.000	40.043.975.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.039.466.000	18.250.000.000	42.396.139.000	42.396.139.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	9.701.162.500	4.076.600.000	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	206.001.393	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	**909.525.862.920**	**902.675.937.000**	**911.966.581.000**	**917.307.061.000**

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah diperkirakan naik, dengan optimalisasi Penggunaan e-tax (pajak *online)*, Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan mengalami kenaikan.
3. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.
4. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.
5. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.
6. Dana penyesuaian dan otonomi khusus diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang Tahun 2020 diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Meskipun demikian porsi terbesar sumber pandapatan daerah masih dari Dana Perimbangan dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk porsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2014-2018 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
01.	2014	164.927.631.230	459.785.205.171	110.403.278.006	735.116.114.407
02.	2015	186.677.410.081	462.804.716.465	131.853.672.963	781.335.799.509
03.	2016	220.315.848.702	567.636.707.545	52.090.070.278	840.042.626.525
04.	2017	233.557.714.356	553.115.007.612	122.853.140.952	909.525.862.920
05.	2018	225.916.332.000	583.609.549.000	93.150.056.000	902.675.937.000

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014 – 2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Berdasarkan pada tren yang terjadi pada pendapatan daerah mama arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *web service.*
b. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalu *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah *(Fiscal Cadaster Policy)*.
c. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah.
d. Penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pejakanya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hokum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah..
e. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah (audit pajak dan pemeriksaan pajak).
f. Perubahan regulasi yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
g. Peningkatan Koordinasi dengan OPD penghasil dan BUMD.
h. Peneran konsep *ear marking* dalam pendapatan daerah.

3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a) Pajak Daerah;
b) Retribusi Daerah;
c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2014-2018 di Kota Magelang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
01.	2014	164.927.631.230	735.116.114.407	22,44
02.	2015	186.677.410.081	781.335.799.509	23,89
03.	2016	220.315.848.702	840.042.626.525	26,22

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
04.	2017	233.557.714.356	909.525.862.920	25,67
05.	2018	225.916.332.000	902.675.937.000	25,02

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014 - 2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Pajak thd PAD (%)
01.	2014	22.107.435.949	164.927.631.230	13,40
02.	2015	26.185.301.675	186.677.410.081	14,02
03.	2016	25.974.837.133	220.315.848.702	11,78
04.	2017	31.206.960.485	233.557.714.356	13,36
05.	2018	30.646.800.000	225.916.332.000	13,56

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.10
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
01.	2014	6.058.580.948	164.927.631.230	3 ,67
02.	2015	6.999.474.592	186.677.410.081	3,74
03.	2016	6.663.308.913	220.315.848.702	3,02
04.	2017	6.243.021.736	233.557.714.356	2,67
05.	2018	4.909.300.000	225.916.332.000	2,17

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.11
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thd PAD (%)
01.	2014	6.242.609.307	164.927.631.230	3,79
02.	2015	6.598.774.537	186.677.410.081	5,53
03.	2016	6.182.279.953	220.315.848.702	2,80
04.	2017	7.711.404.121	233.557.714.356	3,30
05.	2018	8.693.811.000	225.916.332.000	3,84

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.12
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thd PAD (%)
01.	2014	130.519.005.026	164.927.631.230	79,14
02.	2015	146.893.859.277	186.677.410.081	78,68
03.	2016	181.495.422.703	220.315.848.702	82,37
04.	2017	188.396.328.014	233.557.714.356	80,66
05.	2018	181.666.421.000	225.916.332.000	80,41

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang. Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD.

3.2.2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajk/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2016) rata-rata berkisar 60-70 persen dari total Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 3.13
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
01.	2014	459.785.205.171	735.116.114.407	62,55
02.	2015	462.804.716.465	781.335.799.509	59,23
03.	2016	567.636.707.545	840.042.626.525	67,57
04.	2017	553.115.007.612	909.525.862.920	61,01
05.	2018	583.609.549.000	902.675.937.000	64,65

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA.2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
7. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2018

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	20.207.973.171	459.785.205.171	4,40
02.	2015	18.772.034.465	462.804.716.465	4,05
03.	2016	30.333.059.082	567.636.707.545	5,34
04.	2017	26.685.769.289	553.115.007.612	4,82
05.	2018	30.321.942.000	583.609.549.000	5,19

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2018

Tabel 3.15
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Umum Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	417.211.449.000	459.785.205.171	90,74
02.	2015	418.257.922.000	462.804.716.465	90,37
03.	2016	447.909.575.000	567.636.707.545	78,90
04.	2017	440.041.244.000	553.115.007.612	79,55
05.	2018	440.041.244.000	583.609.549.000	75,39

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2018

Tabel 3.16
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2014	22.365.783.000	459.785.205.171	4,86
02.	2015	25.774.760.000	462.804.716.465	5,56
03.	2016	89.394.073.463	567.636.707.545	15,74
04.	2017	86.387.994.323	553.115.007.612	15,61
05.	2018	113.246.363.000	583.609.549.000	19,40

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2018

3.2.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari: 1) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah); 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; 3) Dana Penyesuaian; dan 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 3.17
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2014	110.403.278.006	735.116.114.407	15.02
02.	2015	131.853.672.963	781.335.799.509	16,87
03.	2016	52.090.070.278	840.042.626.525	6,20
04.	2017	122.853.140.952	909.525.862.920	13,50
05.	2018	93.150.056.000	902.675.937.000	10,31

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Kontribusi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pendapatan Hibah (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2014	0	110.403.278.006	0,00
02.	2015	0	131.853.672.963	0,00
03.	2016	0	52.090.070.278	0,00
04.	2017	24.050.844.059	122.853.140.952	19,57
05.	2018	18.268.200.000	93.150.056.000	19,61

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.19
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2014	26.421.159.000	110.403.278.006	23,93
02.	2015	36.869.367.174	131.853.672.963	27,96
03.	2016	37.179.177.579	52.090.070.278	71,37
04.	2017	41.855.667.000	122.853.140.952	34,06
05.	2018	52.555.256.000	93.150.056.000	56,41

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
3. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.20
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2014	74.974.179.000	110.403.278.006	67,91
02.	2015	79.988.204.000	131.853.672.963	60,66
03.	2016	0	52.090.070.278	0,00
04.	2017	47.039.466.000	122.853.140.952	38,28
05.	2018	18.250.000.000	93.150.056.000	19,59

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.21
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
01.	2014	9,007,940,006	110,403,278,006	8,16
02.	2015	14,964,620,257	131,853,672,963	11,34
03.	2016	14,146,495,000	52,090,070,278	27,15
04.	2017	9,701,162,500	122,853,140,952	7,89
05.	2018	4,076,600,000	93,150,056,000	4,37

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Tabel 3.22
Kontribusi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	0.00	95.906.857.889	0,00
02.	2014	0	110.403.278.006	0.00
03.	2015	31.481.532	131.853.672.963	0,02
04.	2016	764.397.699	52.090.070.278	1,46
05.	2017	0	132.893.466.000	0,00

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya agar porsi belanja langsung jauh melebih porsi belanja tidak langsung, hal ini dimaksudkan agar porsi terbesar anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hubah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Penggunaan belanja tidak langsung untuk tahun 2020 diarahkan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja tidak terduga.

3.2.3.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga penganggarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Arah kebijakan belanja langsung diperuntukkan dalam:

a) Membiayai Program dan Kegiatan yang Menjadi Prioritas Kota Magelang;
b) Membiayai Program dan Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Visi dan Misi Walikota Magelang;
c) Memenuhi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Harus Dilaksanakan;
d) Memenuhi Pelaksanaan Program yang Berstandar Pelayanan Minimal dan Operasional;
e) Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Guna menjamin Kelangsungan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat;
f) Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Total Belanja Daerah;
g) Alokasi Belanja Urusan Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja APBD diluar Gaji.
h) Mematuhi Ketentuan Penggunaan Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum.
i) Mematuhi Pelaksanaan Penggunaan Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan seperti DBHCHT, Dana Transfer Khusus dan Dana Otonomi Khusus.
j) Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

k) Mematuhi Penggunaan Pajak Rokok sesuai ketentuan yang berlaku.

l) Mengupayakan Percepatan Pelaksanaaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2014-2018, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2014	340.526.165.129	341.697.705.278	682.223.870.407
02.	2015	357.657.431.281	378.683.006.469	736.340.437.750
03.	2016	350.201.266.658	521.657.863.945	871.859.130.603
04.	2017	284.176.957.991	595.231.223.156	879.408.181.147
05.	2018	334.211.329.000	732.172.598.000	1.066.383.927.000

***Sumber**: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2018 merupakan realisasi anggaran.*
1. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun demikian dari tahun ke tahun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja terus mengalami penurunan, demikian halnya proporsi belanja tidak langsung juga mengalami penurunan, hal ini menunjukan bahwa alokasi belanja yang terkait langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, artinya kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik semakin baik. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel berikut :

Tabel 3.24
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
01.	2014	333.318.007.729	682.223.870.407	48.86
02.	2015	345.555.340.681	736.340.437.750	46,92
03.	2016	344.173.396.158	871.859.130.603	39,47
04.	2017	270.261.944.831	879.408.181.147	30,73
05.	2018	309.053.765.000	1.066.383.927.000	28,98

***Sumber** : 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2014-2017 merupakan realisasi anggaran.*
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2018

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**284.176.957.991**	**334.211.329.000**	**333.295.846.000**	**347.193.012..000**
	Belanja Pegawai	270.261.944.831	309.053.765.000	307.867.090.000	308.190.877.000
	Belanja Bunga	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0
	Belanja Hibah	8.297.155.620	10.886.043.000	16.490.370.000	31.500.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	4.926.411.000	7.747.878.000	5.092.290..000	2.500.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	560.702.000	660.703.000	560.703.000	0
	Belanja Tak Terduga	130.744.540	5.862.940.000	3.285.393.000	5.000.000.000
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**595.231.223.156**	**732.172.598.000**	**698.670.735.000**	**630.614.049.000**
	BELANJA DAERAH	**879.408.181.147**	**1.066.383.927.000**	**1.031.966.581.000**	**977.807.061.000**
	Surplus/Defisit	**30.117.681.773**	**-163.707.990.000**	**-120.000.000.000**	**-60.500.000.000**

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2020 dilihat dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2020 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
c. Optimalisasi Penerimaan Investasi Daerah dari Dana Bergulir.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2019 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga deviden yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2017 -2019 dan prediksi 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**165.042.740.403**	**184.770.764.000**	**120.000.000.000**	**81.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	162.344.899.952	180.992.764.000	120.000.000.000	81.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	47.840.451	50.000.000	0	0
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000	3.728.000.000	0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**14.167.657.000**	**21.062.774.000**	**0**	**20.500.000.000**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.167.657.000	21.062.774.000	0	20.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir				
	Pembiayaan netto	**150.875.083.403**	**163.707.990.000**	**120.000.000.000**	**60.500.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**180.992.765.176**	**0**	**0**	**0**

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 serta dengan memperhatikan sasaran yang harus dicapai dalam RKP 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2020 nantinya akan dituangkan dalam program-program prioritas sebagai pelaksanaan tema dan arah kebijakan tahun 2020, disamping itu juga diarahkan agar dapat memberikan dukungan pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

4.1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

4.1.1. Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Magelang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Ke empat, dimana perencanaannya dilaksanakan di tahun 2019 untuk melandasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD adalah:

"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS

DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS".

Visi Kota Magelang mengandung makna untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju dari daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karateristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan; (c) Visual kota mengundang pesona. Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure* yaitu:pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2. Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

   Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi, (b) Tatalaksana, (c) Peraturan Perundang-undangan, (d) Sumber daya manusia aparatur, (e) Pengawasan, (f) Akuntabilitas, (g) Pelayanan Publik, dan (h) Pola pikir dan Budaya Kerja.

   Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dilingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

   Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (*collective commitments*) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan

kepemimpinan yang kondusif (*condusif leadership*), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, *good corporate governance* juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai "komunitas hijau", dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemeritah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan menjadi hal yang perlu untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam

masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR).

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkembangkan kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat ditempuh dengan: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada

upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum tolerensi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu kharakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Selebihnya, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendikiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

   Tujuan:

   a. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
   b. Mewujudkanpenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
   c. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
   d. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

   Sasaran :

   1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
   2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukumdan HAM tanpa diskriminatif;
   3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
   4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
   5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
   6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
   8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
   9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

2. **Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.**

   Tujuan :

   a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
   b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environtment;*

Sasaran :

1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
6) Meningkatnya ketahanan pangan;
7) Meningkatnya lapangan kerja;
8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.2. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Keempat (RKPD Kota Magelang tahun 2020)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	**Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**											
1	1 Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
				2 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
				3 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
			2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
				3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
				4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
				5 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%
			2 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
				2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
			3 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
				2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				perencanaan pembangunan								
	3 Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
				2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8
				a. Regional	4	4	4	5	5	6	6	6
				b. Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2
				c. International	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	20	20
				a. Regional	8	10	10	10	10	10	11	11
				b. Nasional	4	5	5	5	5	5	6	6
				c. International	2	2	2	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	**Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan**											
2	1 Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indek Pembangunan Manusia	1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,41	10,46	10,50	10,55	10,59	10,59
				2 Persentase sekolah berstandar nasional								
				a. SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
				b. SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
				3 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
				4 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
				5 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
			2 Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)
				2 Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94
				3 AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
				4 AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
				5 AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
				6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
				7 Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
				8 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
				9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%
				10 Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
			4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (*universal design)*	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
				2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (*universal design)*	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	2 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environtment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
				2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
			2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau								
				a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10
				b. Publik	18,37	18,37	18,37	18,42	18,44	18,46	18,50	18,50
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
				2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
			4 Pemanfaatan lahanberkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat											
3	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infreastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
			2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1 Tercapainya 100 - 0 -100								
				a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
				b. Rasio Luas kawasan kumuh	121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
				2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
			3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25
	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi								
				▪ Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
				▪ Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
			2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
				2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			3 Meningkatnya ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037
	3 Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	4 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
	5 Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
				2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
				2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
4	**Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang**											
4	1 Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
				2 Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25
	2 Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1 Jumlah Wisatawan								
				a. Nusantara	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
				b. Mancanegara	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
5	**Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani**											
5	1 Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1 Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			2 Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1 Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	11,14	11,14
				2 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				3 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08	11,5	11,5	12	12	12.5	12.5	12.5
				4 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2 Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3	3	3
				2 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2

Tabel 4.3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Keempat (RKPD Kota Magelang Tahun 2020)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2020	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesiona dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah			v	v	v	v
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2020	2020	2021
	4 Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	1 0 Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasiona dan internasional								
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan								
1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6 Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11 Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7 Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyaraakatan budaya perilaku hidup sehat	12 Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v
		13 Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8 Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14 Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4 Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9 Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan							
5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15 Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan,		v	v	v		
6 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		Tahun					
						2016	2017	2018	2020	2020	2021
7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana				penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan						
8	Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang										
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat											
1	menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11	Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16	Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v
2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat										
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan										
4	Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12	Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah	17	Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v		
5	Meningkatnya ketahanan pangan	13	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18	Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender	v	v	v	v	v	v
6	Meningkatnya kesejahteraan sosial										
7	Meningkatnya lapangan kerja										
8	Menurunnya angka kemiskinan										
9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan										
10	Menurunnya kesenjangan gender										
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang											

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2020	2020	2021
1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	1 9 Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial								
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani								
1 Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15 Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20 Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2 Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat								
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilikan tempat peribadatan sesuai standar								

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

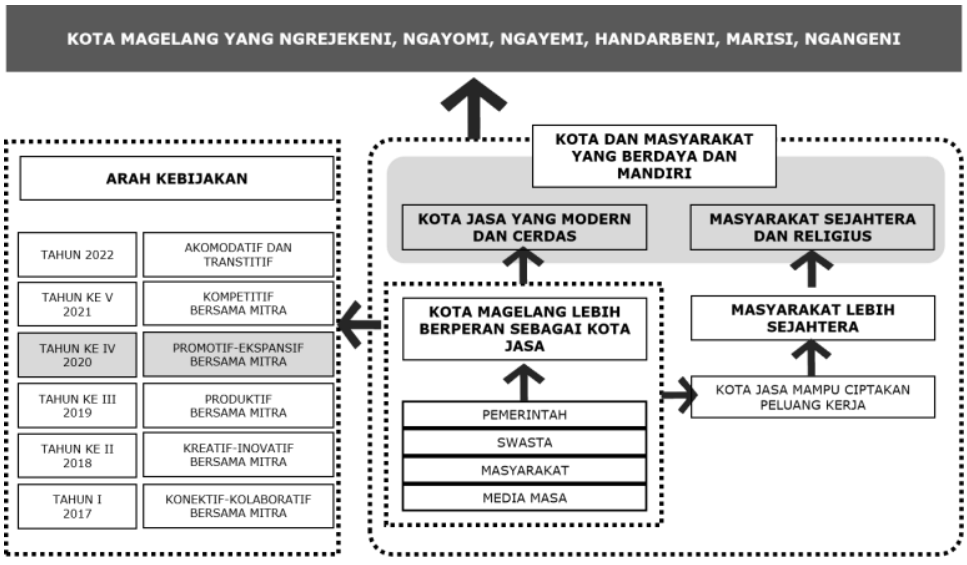
4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2020

Tema pembangunan Kota Magelang tahun 2020 harus selaras dan mendukung tema serta arah kebijakan tingkat nasional dan provinsi. Di tingkat nasional acuan yang digunakan adalah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan acuan kebijakan yang digunakan untuk tingkat provinsi adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019.

Tema yang diusung dalam **RKP 2020** adalah **Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**. Sedangkan arah kebijakan pembangunan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Tema pembangunan pada tahun 2020 untuk **Provinsi Jawa Tengah** yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 adalah **Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.**

Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah **Promotif Dan Ekspansif Bersama Mitra**. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema tahun-tahun sebelumnya dengan penekanan pada upaya membangun kemitraan antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan peran dan fungsi Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.



Gambar 4.1
Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2020

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

Tema RKP Tahun 2020	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2020
Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas	Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia".	Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra
Benang Merah Keterkaitan dari ketiga Tema		
Promotif dan Ekspansif bersama mitra merupakan kelanjutan dari tema tahun-tahun sebelumnya, sedangkan penekanan pada tahun 2020 adalah pada upaya untuk membangun kemitraan antar pelaku pembangunan dalam memantabkan peran dan fungsi Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas. Pembangunan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat akan menjadi prioritas di tahun 2020. Sedangkan dari peran dan fungsi kota jasa yang lebih optimal akan tercipta kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang religius. Skenario tersebut sejalan dengan skenario di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tercermin dari tema pembangunan yang dirumuskan. Kualitas pembangunan di Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan dikelola secara cerdas akan memberi hasil pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.		

4.2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

4.2.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020

RKP 2020 disusun pada waktu yang sangat spesifik karena proses penyusunannya merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan juga berbarengan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Disisi lain RKP 2020 dalam pelaksanaannya diharapkan secara optimal bisa berperan sebagai landasan pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024.

Tema dalam RKP 2020 adalah **Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas** sedangkan strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan 2020 adalah melalui pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Nasional, yaitu:

1. **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**, yang dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa.
2. **Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**, yang dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: (1) Perluasan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.
3. **Nilai Tembah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**, dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

4. **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup**, dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.
5. **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**, dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; (5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

Sedangkan sasaran nasional yang harus dicapai dalam Indikator Pembangunan Tahun 2020, adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8-5,1%;
3. Angka Kemiskinan: 8,5-9,0%;
4. Rasio Gini: 0,375-0,380;
5. Indeks Pembangunan Manusia: 72,51.

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan visi pembangunan ditujukan untuk "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Guna mewujudkan tujuan pembangunan menengah tersebut, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 diarahkan pada "**Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia"**.

Tema tersebut sebagai pendekatan solusi atas 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam;
5. Kedaulatan pangan dan energi;
6. Kesenjangan wilayah;
7. Tata kelola pemerintahan.

Dengan mendasarkan pada pemecahan isu tersebut maka pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diprioritaskan pada:

1. **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, dengan fokus pada:
   a. Pengurangan Kemiskinan
      1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya antara lain melalui: akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan

bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.

2) Penguatan *sustainable livelihood* melalui: fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).

3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Menurunkan angka pengangguran melalui:

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*.

2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.

3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah**, fokus pada :

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat.

b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui : Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemasalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.

c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; peyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan**, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "agriculture estate" (integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaikan tata niaga perikanan.

c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industry (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung.

f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan : Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisat; Peningkatan promosi wisata melalui

pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.

g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; Pengembangan digital investment promotion; Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usah

h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui : peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui : pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air); konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta audit energi); pemulihan kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan pemanfaatan lingkunga, penegakan hukum).

j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui: pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah**, fokus pada :

a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui: kunjungan lapangan (road show) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).

b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).

c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas

fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.

d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: Manejemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/talent scouting, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.

f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Tema dan prioritas Jawa Tengah tahun 2020 dimaksudkan untuk mencapai sasaran makro pembangunan tahun 2020 yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4 – 5,8%.
b. PDRB per kapita sebesar Rp. 28,5 juta.
c. Inflasi pada angka 3,0±1.
d. Kemiskinan turun menjadi 9,81%
e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%.
f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72.
g. Indeks Gini sebesar 0,34.
h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,25.
i. Indeks Williamson sebesar 0,59.

Untuk pembangunan kewilayahan dilakukan dengan memperhatikan:

1) Integrasi dan sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2020.
2) Keterpaduan dan dukungan penanganan program/proyek strategis/prioritas nasional di Jawa Tengah.
3) Arah kebijakan pembangunan kewilayahan khusunya terkait dengan kota Magelang adalah Wilayah Pengembangan Purwomanggung diarahkan untuk **"Pengembangan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"**, dengan upaya antara lain: Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas; Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen) dan fasilitasi pembangunan Bendungan Bener; pengelolaan kelestarian lingkungan (sampah); pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.
4) Sinergitas kabupaten/kota dalam pencapaian skenario sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, khusunya Kota Magelang adalah :

a. Pertumbuhan Ekonomi pada 5,3-5,7%.
b. Angka Kemiskinan berada pada kisaran 7,5-8,5%.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 5,2-5%.
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,00.

4.2.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020

Berdasarkan tema yang diusung dalam perencanaan tahun 2019 yaitu **Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra,** yang merupakan kelanjutan dari tema tahun-tahun sebelumnya, dan ditujukan untuk mengatasi isu-isu strategis Kota Magelang sesuai RPJMD dan masih relevan untuk tahun 2020, yaitu:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
c. Penguatan reformasi birokrasi;
d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Sedangkan prioritas pembangunan Kota Magelang tahun 2020, adalah:

1. **Pengembangan Kota Magelang agar mampu menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya**, dengan arahan:
    a) Sebagai kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kota dan sekitarnya maka penampilan fisik menjadi daya tarik tersendiri agar pengguna layanan merasa nyaman di Kota Magelang, dengan dukungan program-program untuk menjaga dan meningkatkan keindahan, kebersihan dan ketertiban kota;
    b) Pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan diprioritaskan untuk menampakkan ciri modernitas Kota Magelang;
    c) Religius merupakan salah satu komponen visi Kota Magelang, yang diarahkan untuk memberikan hasil pada menurunnya penyakit masyarakat.
2. **Pengembangan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha**, dengan arahan:
    a) Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan akan diteruskan dan ditingkatkan melalaui dialog dengan forum-forum warga;
    b) Dunia usaha akan diajak untuk lebih berperan dalam pembangunan;
    c) Kondisivitas wilayah juga menjadi prioritas untuk dijaga agar pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatannya serta untuk peningkatan investasi.
3. **Peningkatan daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas**, dengan arahan:

a) Pengembangan kawasan strategis Kota Magelang untuk menciptakan peluang kerja dan peluang usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b) Sumber-sumber pendapatan daerah mulai dilelola secara lebih cerdas dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

4. **Pengelolaan lingkungan secara cerdas**, dengan arahan:

a) Pengelolaan lingkungan secara cerdas agar kualitas air dan udara bisa terjaga;

b) Penambahan luasan ruang terbuka hijau publik untuk pembangunan taman-taman kota.

5. **Ketegasan regulasi mengusung konsep pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan**, dengan arahan:

a) Prioritas pada penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat di kawasan permukiman dengan pemberian akses sanitasi dan air bersih;

b) Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan diprioritaskan untuk menjaga koneksitas antar wilayah;

c) Infrastruktur pendukung teknologi informasi diarahkan untuk dijaga kualitas layanannya.

6. **Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi**, dengan arahan:

a) Memanfaatkan keberadaan command center yang menyediakan integrasi sistem dan menyajikan data terkini sebagai landasan untuk melakukan analisis data sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan;

b) Perangkat daerah didorong untuk mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tema dan prioritas Kota Magelang tahun 2020 seperti uraian diatas, diarahkan untuk mencapai sasaran berdasarkan sasaran tahun 2020 yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelag 2016-2021, yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi: 5,5 - 5,9%;
b. Prosentase penduduk miskin: 6,42 6,61%'
c. Indeks Pembangunan Manusia: 78;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka: 5,2 - 5%;
e. Laju inflasi: 4,64 $\pm$ 1.

Keterkaitan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Magelang tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Kota Magelang

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	Masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 7,8% (aspek kesejahteraan masyarakat fokus ekonomi)	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;	Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat; Munculnya indikasi kota jasa modern
2	Masih rendahnya TPAK perempuan yaitu sebesar 60,96% (aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial)			
3	Masih rendahnya jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan BNSP			
4	Belum adanya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa kejuruan menengah atas untuk persiapan memasuki dunia kerja.			
5	Masih ada kasus pernikahan dan kehamilan dibawah usia 20 tahun,yang sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar pernikahan			
6	Belum optimalnya upaya penurunan PMKS			
7	Masih tingginya angka putus sekolah pendidikan dasar	Belum optimalnya layanan dasar masyarakat		
8	Kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih belum merata			
9	Belum optimalnya layanan pendidikan dilihat dari masih belum terpenuhi target rata-rata lama sekolah (99,34%)			
10	Masih tingginya prevalensi TB dan angka penemuan kasus TB			
11	Masih tingginya AKI (130,9)			
12	belum tercapainya target 100% ODF			
13	Masih terjadinya kasus kematian bayi (20 kasus)			
14	Masih belum tercapainya target AKBa (23 kasus)			
15	Prevalensi balita gizi buruk masih belum mencapai target			
16	belum terintegrasi data antar fasilitas kesehatan (data Penyakit menular dan penyakit tidak menular)			

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
17	belum semua pusat-pusat kegiatan baru di wilayah perbatasan di sisi barat dan timur terhubung jalan			
18	belum dimilikinya dokumen tata ruang sebagai operasional pengendalian ruang (RDTR)			
19	Masih belum terpenuhinya target 100 0 100			
20	keterbatasan kapasitas anggaran daerah dalam penanganan masalah sosial			
21	belum tersedianya data kemiskinan yang valid dan mutakhir			
22	Menurunnya load factor angkutan umum kota			
23	terbatasnya sarana angkutan barang			
24	Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.			
25	Rasio elektrifikasi sebesar 98% sedangkan target nasional untuk tahun 2019 sebesar 99,9%			
26	Belum tercapainya target prestasi pelajar pada level Propinsi dan Nasional	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);	Implementasi smart city; Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat
27	belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemebangunan sektor kesehatan (kelurahan siaga mandiri baru 47% kelurahan)			
28	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.			
29	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, khususnya KTP-el dan KIA.			
30	Perlunya optimalisasi partisipasi laki-laki dalam ber-KB khususnya bagi peserta dari keluarga miskin.			
31	Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.			
32	Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.			
33	Masih minimnya serah simpan karya cetak dan karya rekam masyarakat			
34	belum terintegrasinya penelitian pengembangan dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan			
35	belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk krenova			

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
36	belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi			
37	Trotoar masih belum memenuhi standar aksesibilitas	Belum maksimalnya perwujudan inklusifitas dalam seluruh aspek pembangunan		
38	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			
39	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur ramah anak			
40	Belum memadainya SDM dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum	belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi	Penguatan reformasi birokrasi;	Implementasi smart city
41	Terbatasnya ASN di bidang perkoperasian yang memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam untuk menilai kesehatan koperasi			
42	Terbatasnya SDM persandian			
43	Belum efektifnya pelayanan perijinan industri kecil			
44	Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran			
45	Belum ditetapkannya sistem *reward dan punsishment* disiplin ASN yang terintegrasi			
46	Masih lemahnya manajemen pengawasan yang belum berbasis resiko, pengendalian internal dan *quality assurance*			
47	Belum adanya zona integritas yang terbentuk di OPD			
48	Ketergantungan penyediaan pangan dari daerah lain	Masih tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan daerah terhadap daerah lain	Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;	Pertumbuhan investasi swasta
49	Ketergantungan dengan daerah lain dalam penyediaan lahan TPA			
50	Belum optimalnya pembenihan ikan bersertifikasi			
51	Masih rendahnya produksi ikan			
52	Terbatasnya lahan pertanian			
53	Produksi bahan pangan belum sebanding dengan kebutuhan konsumsi masyarakat			
54	Masih tercampurnya sistem pembuangan air limbah domestik dengan sistem drainase kota	Belum optimalnya pengelolaan	Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah	Munculnya indikasi kota jasa modern

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
55	Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	lingkungan perkotaan melalui pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan	untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;	
56	Masih rendahnya pengurangan sampah pada level sumber			
57	Besarnya potensi pencemaran lingkungan dari industri kecil yang belum dilengkapi IPAL			
58	Belum optimalnya permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.			
59	Masih rendahnya indeks kualitas air			
60	Masih belum tercapainya target tutupan vegetasi			
61	Belum optimalnya pengurangan sampah			
62	Belum ada data terkait pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pemenuhan kebutuhan energi sedangkan Provinsi Jawa Tengah menargetkan persentase pemanfaatan EBT sebesar 10,20% dari total konsumsi energi tahun 2018.			
63	Sistem kependudukan yang masih tergantung pemerintah pusat terkadang memperlambat proses revisi data dari komplain yang disampaikan masyarakat.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dan TIK dalam pembangunan	Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;	Implementasi smart city
64	Belum merata dan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang memiliki keahlian di bidang TI. Persebarannya hanya di 20 dari total 29 OPD.			
65	Belum optimalnya mekanisme monintoring dan evaluasi investasi di lapangan terutama dalam hal pelaporan investasi agar data yang didapatkan valid			
66	Belum optimalnya promosi dan informasi potensi investasi di Kota Magelang			
67	Kurangnya konsistensi dan validitas data statistik			
68	Belum optimalnya pelayanan perpustakaan sesuai SNP			
69	Belum optimalnya digitalisasi arsip			
70	Belum optimalnya minat dan budaya baca di masyarakat			
71	Belum tersedianya sarana TIC yang representatif			
72	Belum terintegrasinya penelitian pengembangan dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan			

NO	Evaluasi Capaian	Masalah Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
73	Kerjasama perdagangan internasional belum berkembang luas karena terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan, khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.			
74	Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor			
75	Lemahnya daya saing produk IKM Magelang			
76	Belum berjalannya sistem register cagar budaya	Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, pelestarian seni, dan pariwisata	Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;	Pelestarian seni budaya; Perluasan pasar citra Kota Magelang yang ditandai dengan kunjungan wisatawan atau pebisnis dan hunian hotel
77	Terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah			
78	Kualitas atraksi dan jasa industri wisata masih rendah			
79	Terbatasnya kapasitas anggota Linmas	Masih adanya ancaman keamanan ketertiban umum	Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah	Munculnya indikasi kota jasa modern
80	Masih terjadinya konflik antar elemen masyarakat			
81	Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana			

Jika disandingkan antara isu strategis provinsi dan Kota Magelang pada tahun 2020 akan nampak koneksitas isu strategis sebagai berikut:

Tabel 4.6
Keterkaitan Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Isu Strategis	
	Provinsi Jawa Tengah	**Kota Magelang**
1	Kemiskinan	■ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ■ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri
2	Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia	■ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar
3	Daya saing ekonomi Dan Peningkatan klesempatan Berusaha	■ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri ■ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ■ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
4	Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	■ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Kedaulatan pangan dan energi	■ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6	Kesenjangan wilayah	■ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi); ■ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri
7	Tata Kelola Pemerintahan	■ Penguatan reformasi birokrasi ■ Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Keterkaitan prioritas nasional, provinsi dan Kota Magelang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	■ Percepatan pengurangan kemsikinan dan pengangguran. ■ Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia	■ Peningkatan daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	■ Ketegasan regulasi mengusung konsep pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
			■ Pengembangan Kota Magelang agar mampu menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya
3	Nilai Tembah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	■ Peningkatan daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan	▪ Pengelolaan lingkungan secara cerdas
5	Stabilitas keamanan nasional	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	▪ Pengembangan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha

4.2.2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya;
2) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah;
3) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat;
4) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat;
5) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi;
6) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi;
7) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
8) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengeloal aset;
9) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota;
10) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah;
11) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat;
12) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan;
13) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan;

14) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan;

15) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan;

16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan;

17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender;

18) Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata;

19) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan tahun 2019 dengan sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2020 merupakan lanjutan eksekusi proyek kegiatan yang merupakan implementasai rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2019.

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Keterkaitan antara Fokus Prioritas dengan Arah Kebijakan Tahun 2020

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Kota Magelang agar mampu menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya.	▪ Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi ▪ Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota. ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah. ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha.	▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah ▪ Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata ▪ Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik
Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas *(smart economy)*	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengelolaan lingkungan secara smart berkembang baik (smart environment);	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan. ▪ Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
Ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi	▪ Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya. ▪ Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah. ▪ Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
	▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat. ▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawab Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS TAHUN 2020
Kota Magelang sudah menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya;	▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha;	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas *(smart economy)*	▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri
Pengelolaan lingkungan secara smart berkembang baik (smart environment);	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS TAHUN 2020
Ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi	▪ Penguatan reformasi birokrasi

4.2.2.3.2. Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2020 untuk diimplementasikan tahun 2020 adalah:

a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
b. Urusan pendidikan;
c. Urusan kesehatan
d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Urusan sosial;
g. Urusan Tenaga Kerja;
h. Urusan Lingkungan Hidup;
i. Urusan penanaman modal;
j. Urusan komunikasi dan informatika;
k. Urusan perdagangan;
l. Urusan perindustrian;
m. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
n. Urusan kebudayaan;
o. Urusan pariwisata;

4.2.2.3.3. Program Unggulan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2020 untuk dilaksanakan tahun 2020 adalah:

a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
b. Program peningkatan daya saing daerah;
c. Program kota cerdas;
d. Program pemerintahan responsif dan partisipasif;
e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;

h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

4.3. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang meliputi 17 tujuan, 169 sasaran dan 241 indikator, merupakan kesepakatan global dan Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu prioritas nasional, dalam RKPD 2020 juga menempatkan beberapa program sebagai prioritas untuk mendukung pencapaian TPB. Dari 17 Goals atau tujuan kemudian dipilah kedalam 4 pilar pembangunan, yaitu **Pilar Pembangunan Sosial** yang meliputi Tujuan ke 1, 2, 3, 4 dan 5. **Pilar Pembangunan Ekonomi** mencakup Tujuan ke 7, 8, 9, 10 dan 17. **Pilar Pembangunan Lingkungan** terdiri dari Tujuan ke 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola** yang terkait dengan Tujuan ke 16. Sedangkan dukungan terhadap Tujuan ke 14 Kota Magelang tidak memberikan kontribusi optimal karena tidak ada potensi kelautan.

Dukungan program untuk mencapai tujuan dalam SDGs secara langsung juga merupakan prioritas program untuk mencapai prioritas Kota Magelang Tahun 2020. Pilar Pembangunan Sosial dalam SDGs juga terkait dengan prioritas ke 2 dan k prioritas ke 3 Kota Magelang. Pilar Pembangunan Ekonomi terkait dengan prioritas ke 1 dan 3 Kota Magelang. Pilar Pembangunan Lingkungan terkait dengan prioritas ke 4 dan 5 Kota Magelang. Sedangkan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terkait dengan prioritas ke 5 dan 6.

4.3.2. Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

   Tujuan memberantas kemiskinan didekati antara lain melalui:

   a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha,
   b. Peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal
   c. Pemberian akses permodalan
   d. Perluasan akses pasar/promosi

e. Peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan, dilaksanakan melalui program:
   a. Peningkatan ketahanan pangan
   b. Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming
   c. Peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.
3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatan kehidupan yang layak di segala umur, dilaksanakan melalui program:
   a. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
   b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita
   c. Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan
   d. Pelayanan kesehatan masyarakat
   e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
   f. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
4. Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Program yang dilaksanakan antara lain:
   a. Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
   b. Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan
   c. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
   d. Perbaikan manajemen pendidikan
   e. Peningkatan minat baca masyarakat
5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan
   Pendekatan program yang dilakukan:
   a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan
   b. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Tujuan 6: Memastikan ketersedian dan manajemen berkelanjutan atas atas air dan sanitasi untuk semua.
   Hal ini dapat dilakukan melalui:
   a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
   c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
   d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   f. Program Lingkungan Sehat Perumahan
7. Tujuan 7: Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
   a. Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:

b. Perkuatan sistem inovasi daerah

c. Fasilitasi riset unggulan daerah terkait energi alternatif dan terbarukan.

8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.

a. Program peningkatan kesempatan kerja

b. Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja

c. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi

d. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

e. Pengembangan Destinasi Wisata

f. Pengembangan Pemasaran Wisata

g. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

h. Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri.

9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan pelaksanaan:

a. Program pembangunan jalan dan jembatan

b. Program Pengembanagan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

c. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

d. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan dan ke sembilan akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.

11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya:

a. Program Pengembangan Perumahan

b. Program Lingkungan sehat perumahan

c. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan

12. Tujuan 12: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk perumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

13. Tujuan 13: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk perumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

14. Tujuan 14: Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui:

a. Program Pengembangan budidaya perikanan
b. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

15. Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

    Tujuan ini dapat dilaksanakan melalui:

    a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
    b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
    c. Program konservasi sumber daya alam.

16. Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan. Tujuan ini dilaksanakan melalui pendekatan reformasi birokrasi secara komprehensif, pengembangan *e-governance* yang menjamin transparansi, serta penciptaan keamanan.
17. Tujuan 17: Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

    Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah antar negara, pemanfaatan kerjasama secara *sister city* serta peningkatan menjalin *networking* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan ke empat pilar pembangunan terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi.

4.4. Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Kewilayahan. Berdasar dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang.

Dalam pengembangan wilayah ada beberapa kepentingan yang harus diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang, baik kepentingan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kota Magelang, kepentingan Pemerintah Provinsi, kepentingan daerah kabupaten yang berbatasan yang berdampak pada pengembangan kota, maupun kepentingan daerah yang merupakan perwujudan program kegiatan yang merupakan implementasi dari dokumen-dokumen pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek.

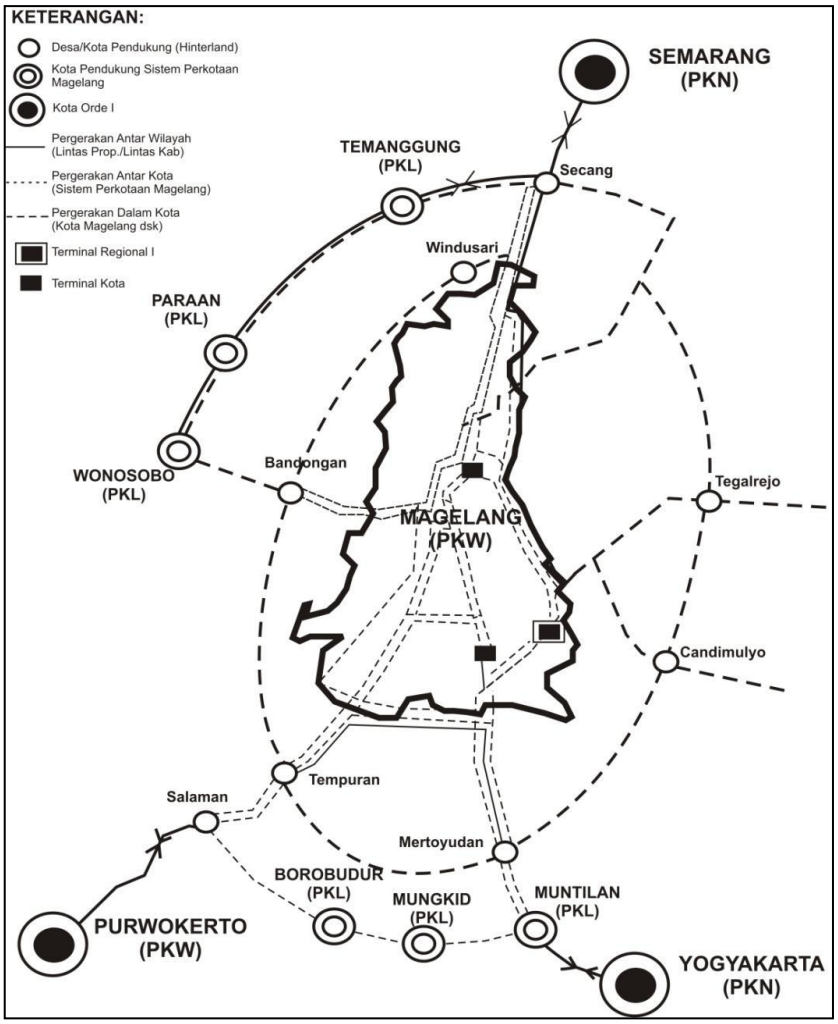
4.4.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Mengacu pada UU Penataan Ruang No. 26/ 2007, secara umum telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun Gambaran mengenai Sistem Perwilayahan Eksternal Kota Magelang dapat dilihat dalam Gambar 4.2. Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

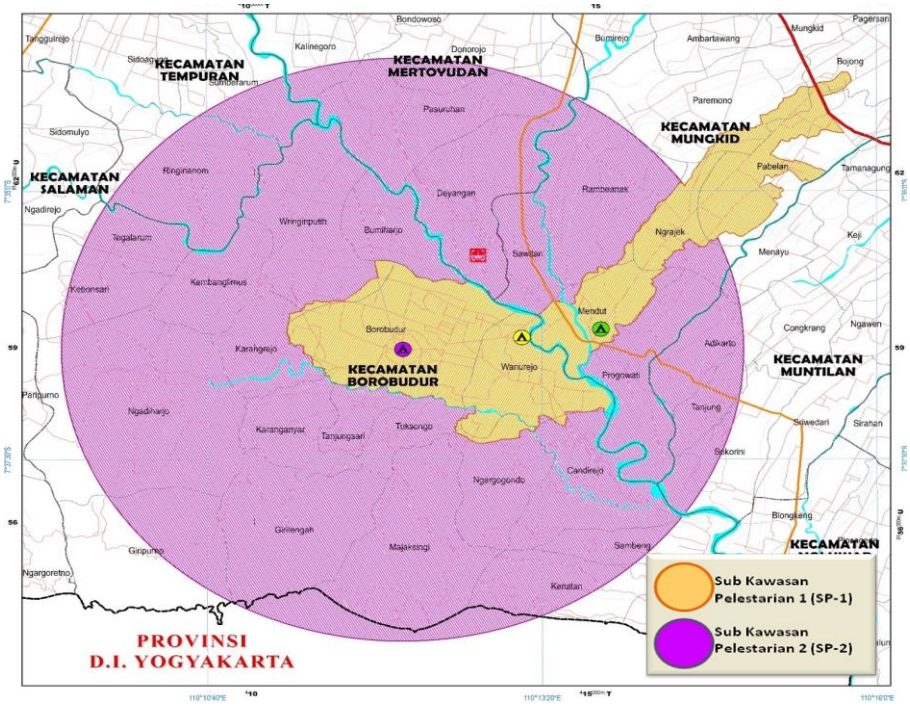
a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
g. Pusat perdagangan dan jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten.



Gambar 4.2
Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014, wilayah KSN Borobudur terbagi menjadi dua, yaitu Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) yang berada pada radius 5 km, dan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang berada pada radius 5-10 km. Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) diarahkan sebagai kawasan pelestarian utama, sedangkan Sub

Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya. Jika dilihat dari gambar di bawah sampai radius 10 km dari Candi Borobudur, Kota Magelang sebenarnya tidak masuk dalam radius tersebut sehingga ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional tidak memberikan dampak langsung untuk Kota Magelang. Akan tetapi ditetapkannya KSN Borobudur memberikan potensi bagi Kota Magelang berupa adanya potensi limpahan wisatawan dari Candi Borobudur untuk berkunjung ke Kota Magelang sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi Kota Magelang.



Gambar 4.3
Wilayah Kawasan Strategis Nasional Borobudur
Sumber: Perpres No. 58 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Kawasan Borobudur

Di sisi lain, jika dicermati lagi mengenai arahan pengembangan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yaitu sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya, maka dapat diketahui bahwa Kawasan SP-2 tidak akan dibuat menjadi kawasan perkotaan. Hal ini menjadi peluang bagi Kota Magelang untuk dapat menarik para wisatawan dari Candi Borobudur ke Kota Magelang. Peluang ini berlatar belakang bahwa saat ini Kota Magelang merupakan kawasan perkotaan dan banyak terdapat perdagangan dan jasa yang diharapkan dapat melayani para wisatawan.

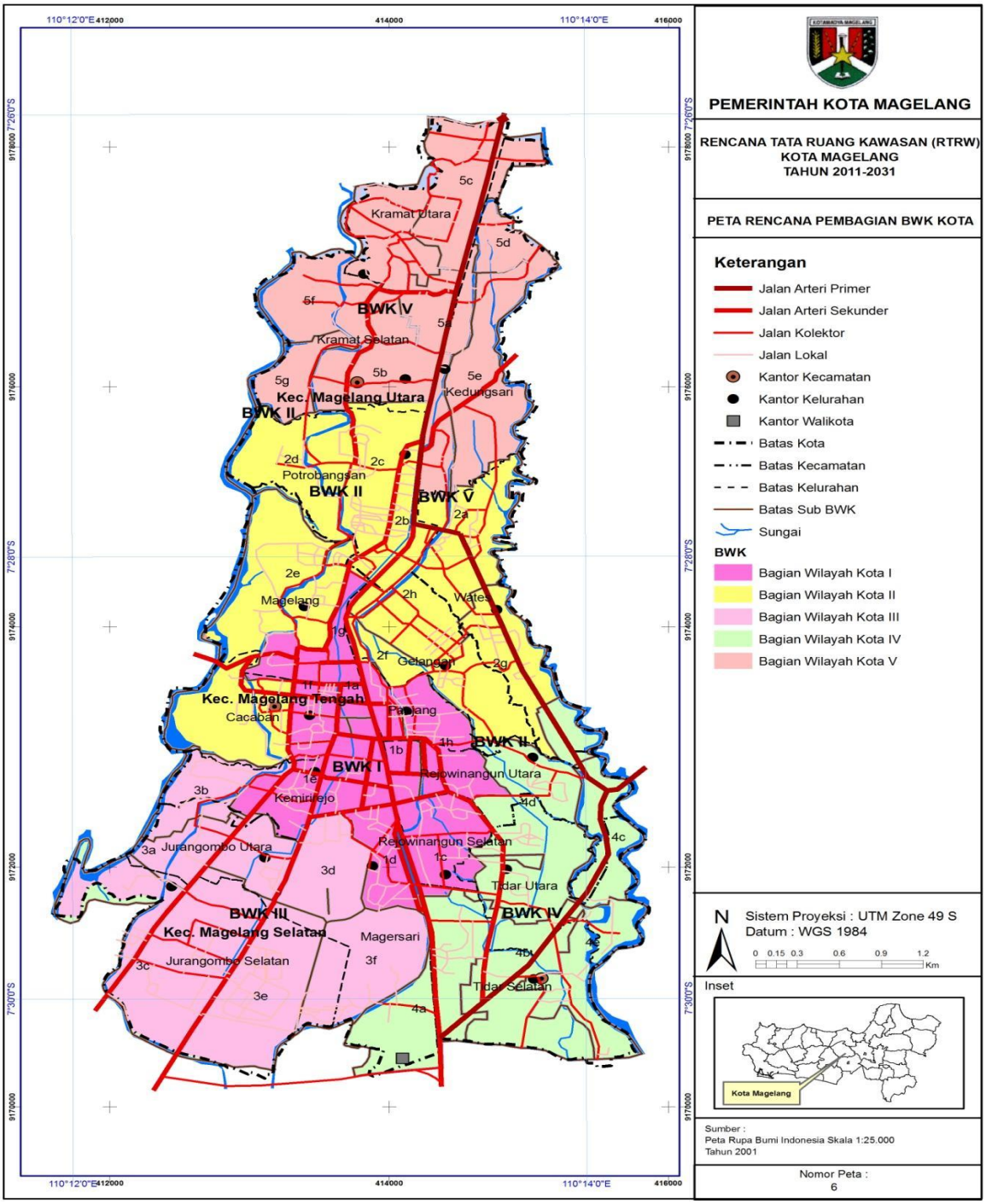
Penetapan Candi Borobudur sebagai kawasan strategis nasional juga berkorelasi dengan pengembangan jalur pergerakan. Pada beberapa tahun ke depan akan dikembangkan jalan tol dan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas di kedua kota tersebut dan konektivitas menuju Candi Borobudur. Pengembangan kedua jalur tersebut harus dapat menjadi potensi untuk membuat Kota Magelang menjadi lebih berkembang. Jangan sampai pengembangan jalur tersebut justru membuat Kota Magelang menjadi kota mati karena berkurangnya jumlah pergerakan yang melalui Kota Magelang.

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan juga untuk mendukung keberadaan KSN Borobudur , diantaranya:

a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomangung), meliputi blok peruntukan ruang di Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.
c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan *mix use* (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

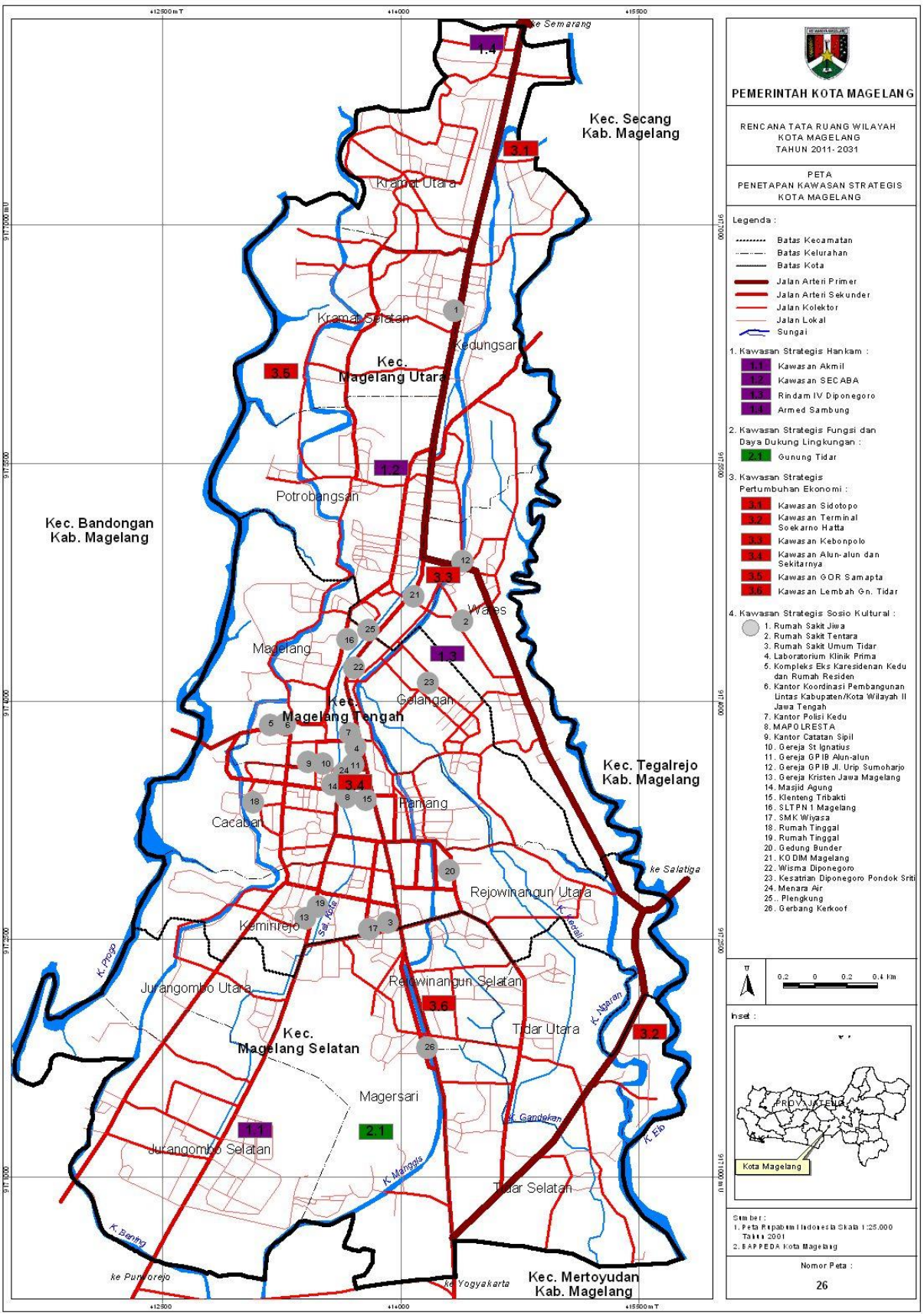
4.4.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pembagian BWK Kota Magelang terdiri dari 5 BWK yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4
Peta Rencana Pembagian BWK

Selain fokus pengembangan dari masing-masing BWK, terdapat kawasan strategis yang menjadi prioritas pengembangan Kota Magelang. Kawasan strategis tersebut terdiri dari kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Gunung Tidar. Sedangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi terdiri dari Kawasan Sidotopo, Kawasan GOR Samapta, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Aloon-Aloon, Kawasan Terminal Soekarno Hatta, dan Kawasan Gunung Tidar. Untuk lokasi lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

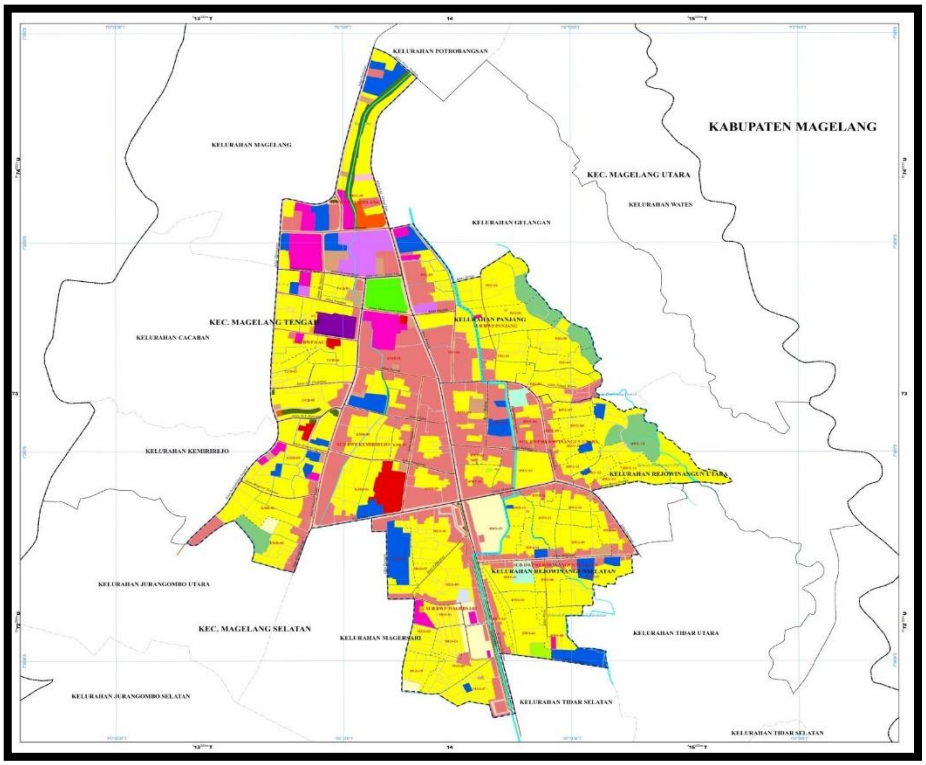


Gambar 4.5
Peta Kawasan Strategis Kota Magelang

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahan skala layanannya. Selain itu, terdapat kawasan strategis yang menjadi salah satu prioritas pengembangan wilayah. Arahan pengembangan kawasan strategis dan kawasan pendukungnya untuk masing-masing BWK adalah sebagai berikut:

4.4.2.1. Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Dengan luas kurang lebih 255 Ha, BWK I memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar 4.6
Peta Pola Ruang BWK I

Sedangkan Arahan Pengembangan BWK I adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan

g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau

Di BWK I ada beberapa Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

1. Kawasan Aloon Aloon dan sekitarnya. Sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat dengan skala pelayanan daerah dan regional. Kondisi saat ini dan rencana pengembangan kawasan:
   a. penataan RTH Taman Kota;
      Hingga Tahun 2018 kawasan Aloon-aloon sudah tertata dengan baik. Selain itu, keberadaan Fountain yang dibangun Tahun 2017 menjadi landmark kawasan baru yang menjadi destinasi kunjungan masyarakat baik masyarakat lokal Magelang, maupun wilayah luar Kota Magelang. Kondisi ini akan terus dipertahankan dengan kegiatan penataan taman aloon-aloon di tahun 2020.
   b. penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
      Saat ini Shelter PKL sudah tertata baik, bersih dan rapi juga kunjungan masyarakat semakin meningkat. Penataan ini diiringi dengan pembinaan organisasi/paguyuban PKL.
   c. penataan jaringan pergerakan di seluruh kawasan dan sekitarnya;
      Yang jadi kendala terkait kebutuhan parkir kendaraan, keberadaan ruang parkir kawasan tidak mencukupi untuk menampung kebutuhan ruang parkir yang terus meningkat sehingga perlu penambahan ruang parkir maupun rekayasa ruang parkir kawasan Aloon-aloon.
   d. penataan lalu lintas;
   e. penataan papan reklame pada zona perdagangan.
2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dengan skala pelayanan daerah dan regional. Sesuai Master Plan yang sudah disusun Tahun 2016 ada beberapa zona yang mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan Perdagangan dan jasa, hingga tahun 2018 sudah terbangun. Kondisi saat ini dan rencana pengembangan kawasan:
   a. Shelter Pedagang Kaki Lima Lembah Tidar;
      Selter PKL kawasan Perekonomian Lembah Tidar sudah dibangun di Tahun 2016 dan ditahun 2017 sudah mulai operasional. Kedepannya, masih perlu ada peningkatan pemeliharaan kebersihan dan keindahan kawasan serta peningkatan informasi keberadaan Selter PKL.
   b. Terminal Tipe C;
      Tahun 2017 telah dibangun Terminal Tipe C dengan anggaran dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah, direncanakan Terminal Tipe C di Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar untuk menampung angkutan Kota jalur 2,3,6,8, 10, dan 12. Saat ini, Terminal Tipe C tersebut belum optimal beroperasi. Masih perlu ada sosialisasi yang intensif kepada pengemudi serta masyarakat agar Terminal Tipe C dapat berfungsi secara optimal.
   c. Pasar Sidomukti;

Pasar Sidomukti merupakan pasar klitikan/barang bekas *spare part* kendaraan roda 2 yang layanannya sudah mencapai wilayah diluar Kota Magelang. Sesuai master plan Kawasan, direncanakan akan dilakukan revitalisasi pasar dengan dibangun menjadi 2 lantai, di mana lantai 1 akan difungsikan untuk parkir kawasan.

d. Penataan RTH kawasan.

Sesuai dengan Peraturan Daearh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Magelang, setiap pengembangan kawasan diwajibkan menyediakan fasilitas umum seluas 40 % dari luas kawasan dengan 10 % diantaranya difungsikan untuk memenuhi KDH (Koefisien Dasar Hijau). Hingga Tahun 2018 telah dibangun beberapa RTH Taman dan Ruang Terbuka Publik, diantaranya lahan parkir dan arena bermain Skate Board. Untuk memenuhi 10 % KDH perlu pengembangan dan pembangunan RTH Taman Kawasan.

Aloon-aloon sebagai kawasan strategis yang berada di BWK I memiliki dampak yang cukup besar kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis dan pembangunan masyarakat, beberapa arahan pengembangannya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur

Penanggulangan masalah kemiskinan tidak hanya dilakukan pada sektor ekonomi saja. Sektor infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam upaya penanggulangan masalah ini. Arah pengembangannya adalah pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan akses masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan RTH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

b. Pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Beberapa penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan yaitu pembinaan kegiatan linmas, lomba poskamling, peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi UMKM Kecamatan Magelang Tengah, dan pelibatan masyarakat dalam sarasehan dan pelaksanaan musrenbang.

c. Pemberdayaan perempuan dan anak

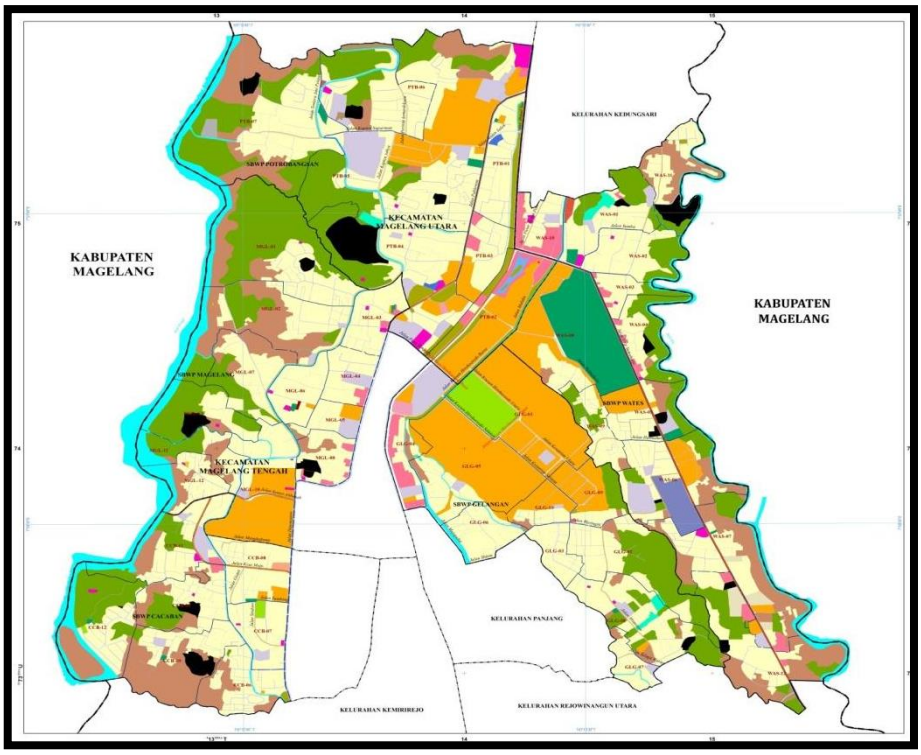
Selain pemberdayaan masyarakat secara umum, arah kegiatan juga difokuskan pada perempuan dan anak. Beberapa arahan pengembangannya adalah lomba semarak anak, forum anak, dan pembinaan organisasi perempuan.

d. Peningkatan dan pelestarian budaya

Untuk mendukung pengembangan pariwisata, arahan pengembangannya yaitu dengan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

4.4.2.2. Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

Dengan luas kurang lebih 370 Ha, BWK II berfungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilias perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK II meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsan; sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 4.7
Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota/regional yaitu Kawasan Mantiyasih. Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Kondisi saat ini dan rencana pengembangan kawasan:

a. Penataan kawasan Mantiyasih;

   Secara bertahap kawasan inti Mantiyasih sudah tertata. Kawasan penyangga berupa kawasan permukiman secara bertahap juga mulai ditata. Pada tahun 2020, direncanakan untuk kegiatan pemeliharaan bangunan kuno dan bersejarah dengan situs budaya Mantyasih sebagai target kegiatan.

b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;

Pembangunan akses jalan masuk dan juga Jalan utama jl. Alibasah Sentot sudah dilaksanakan di tahun 2018. Kedepan perlu ada pemisahan akses keluar dan masuk ke lokasi.

c. Pengembangan destinasi pariwisata.

Untuk mendukung pariwisata, Mantyasih mulai difungsikan untuk aktivitas-aktivitas kebudayaan selain prosesi utama Hari Jadi Kota Magelang. Hal ini akan diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah dengan salah satu lokasi di Mantyasih.

Kawasan Mantyasih sebagai kawasan strategis yang berada di BWK II memiliki dampak bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis dan pembangunan masyarakat, beberapa arahan pengembangannya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur

Arah pengembangannya adalah pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan akses masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan RTH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

b. Pemberdayaan masyarakat

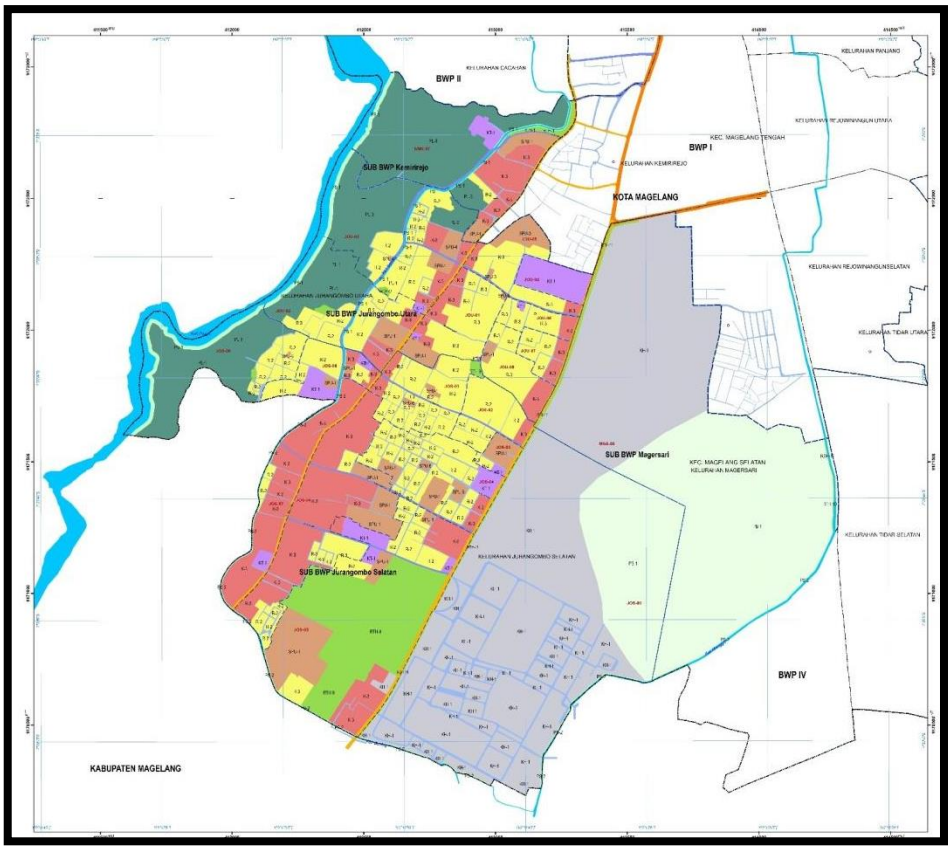
Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Beberapa penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan yaitu pembinaan kegiatan linmas, lomba poskamling, peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi UMKM Kecamatan Magelang Tengah, dan pelibatan masyarakat dalam sarasehan dan pelaksanaan musrenbang.

c. Peningkatan dan pelestarian budaya

Untuk mendukung pengembangan pariwisata, arahan pengembangannya yaitu dengan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

4.4.2.3. Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepaiwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar 4.8
Peta Pola Ruang BWK III

Untuk arahan pengembangan BWK III adalah:

a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkatan darat
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota;
d. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
e. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
f. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
g. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
h. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK III terdapat Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar. Fungsi kawasan ini adalah sebagai kawasan plasma nutfah daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;

c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Selain itu, dalam rangka mendukung pariwisata Kota Magelang, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 adalah:

a. Pentas seni yang salah satu lokasi pelaksanaannya di Gunung Tidar,
b. Pembangunan monument satu tanah air satu bangsa, dan
c. Pembangunan tahap 2 gardu pandang di Gunung Tidar.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis Gunung Tidar dan pengembangan masyarakat kedepannya, beberapa arahan pengembangan untuk tahun 2020 diantaranya:

a. Pemberdayaan masyarakat

   Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Beberapa penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan yaitu pembinaan RT/RW, penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan PEKAT, penyuluhan bencana, promosi produk UMKM masyarakat Kecamatan Magelang Selatan, dan pelibatan masyarakat dalam sarasehan dan pelaksanaan musrenbang.

b. Pemberdayaan perempuan dan anak

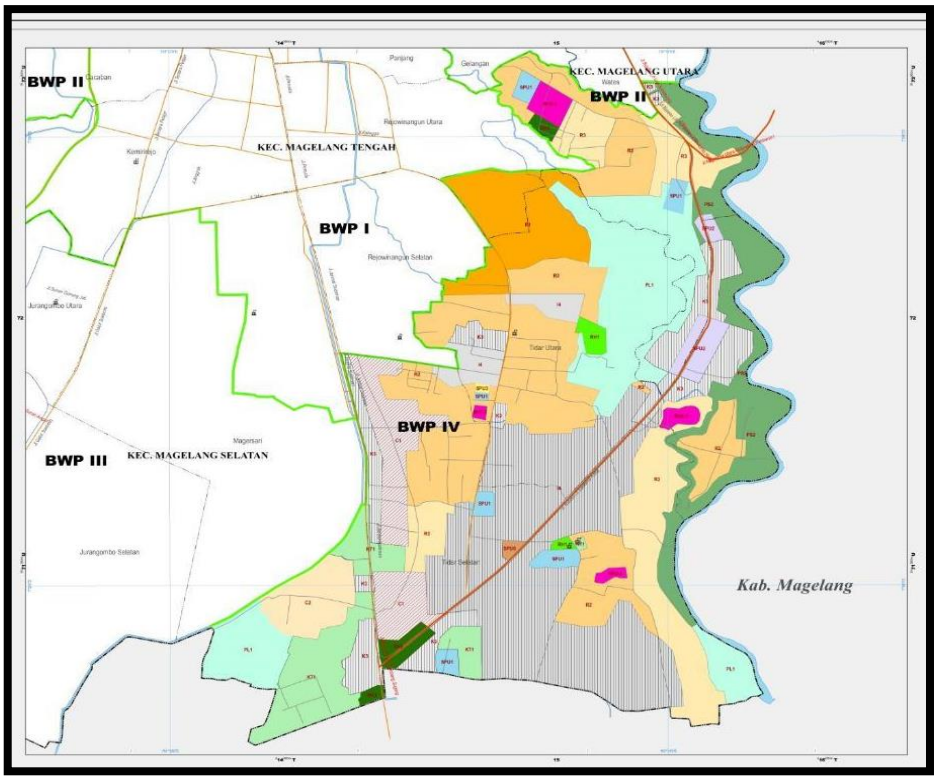
   Selain pemberdayaan masyarakat secara umum, arah kegiatan juga difokuskan pada perempuan dan anak. Beberapa arahan pengembangannya adalah Advokasi KIE kesehatan remaja, Penyuluhan keluarga & pemberdayaan perempuan, dan Penyuluhan kesehatan anak balita.

c. Peningkatan budaya daerah

   Untuk mendukung pengembangan pariwisata, arahan pengembangannya yaitu dengan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

4.4.2.4. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukirnan kepadatan tinggi, dan terdiri dari *sebagian* Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan *sebagian* Kelurahan Wates, dan *seluruh* Kelurahan Tidar Utara dan *seluruh* Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 4.9
Peta Pola Ruang BWK IV

Arahan Pengembangan BWK IV adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;
b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Di BWK IV ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pergudangan dengan skala pelayanan daerah dan regional yaitu: Kawasan Sukarno Hatta. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

a. Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
b. Pembangunan fasilitas pergudangan;
c. Penataan RTH kawasan.

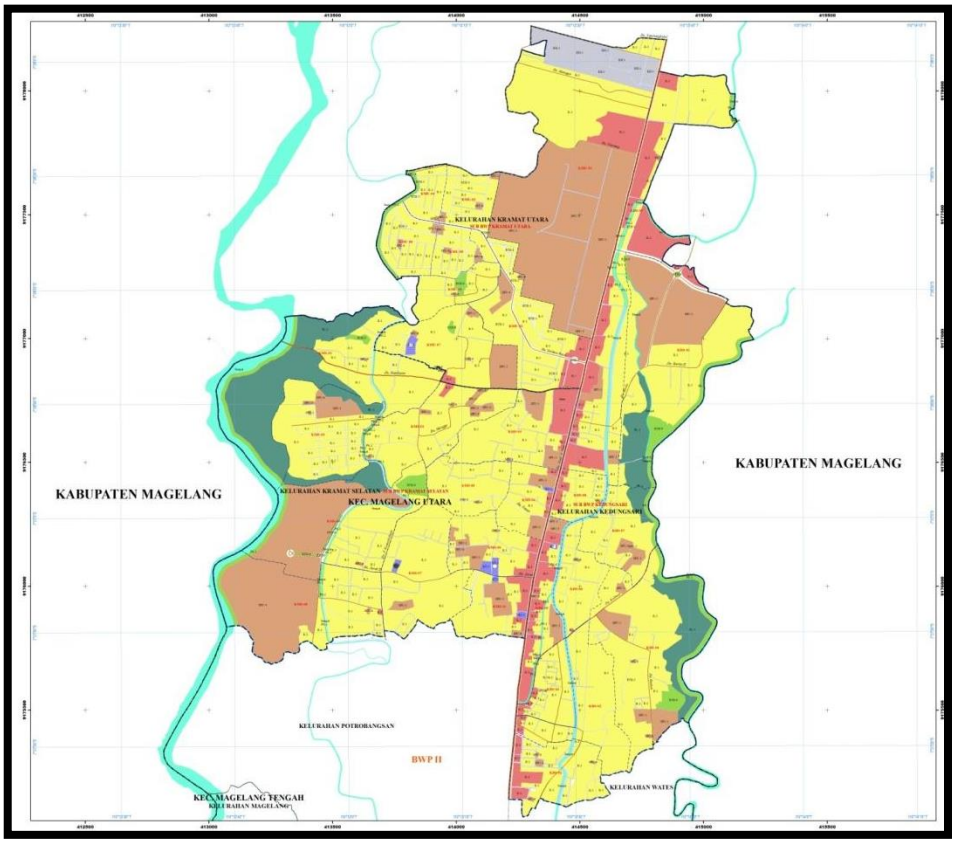
Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan Terminal Soekarno Hatta dan pengembangan masyarakat kedepannya, beberapa arahan pengembangan untuk tahun 2020 diantaranya:

a. Pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Beberapa penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan yaitu pembinaan RT/RW, penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan PEKAT, penyuluhan bencana, promosi produk UMKM masyarakat Kecamatan Magelang Selatan, dan pelibatan masyarakat dalam sarasehan dan pelaksanaan musrenbang.

4.4.2.5. Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreas. BWK V terdiri dari *seluruh* Kelurahan Kramat Utara, *seluruh* Kelurahan Kramat Selatan, dan *seluruh* Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mengampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar 4.10
Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;

b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;

c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan startegis GOR Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencanan pengembangan sebagai berikut:

a. Penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
   Kondisi Stadion Moch. Subroto sudah berfungsi dan bisa dimanfaatan. Dari 4 (empat) Tribun yang direncanakan dibangun, tinggal 1 (satu) tribun di sisi Utara yang masih belum terbangun.
b. Revitalisasi GOR Samapta dan sekitarnya;
   Selain Gor Samapta yang sudah jadi dan sudah dimanfaatkan, ada 2 (dua) venue yang sedang proses pembangunan yaitu Kolam Renang dan Lapangan Tennis Indoor.
c. Penataan RTH Kawasan.

Kawasan strategis di kecamatan ini adalah Kawasan GOR Samapta. Selain pengembangan kawasan strategis tersebut, beberapa arahan pengembangan Kecamatan Magelang Utara diantaranya:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur
   Arah pengembangannya adalah pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan akses masyarakat. Dengan peningkatan ini diharapkan akan memperlancar kegiatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, diperlukan juga operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan.
b. Pemberdayaan masyarakat
   Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Beberapa penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan yaitu koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan toleransi kehidupan beragama, peningkatan nilai-nilai patriotisme, penyuluhan narkoba, KIE pencegahan penyakit, fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi UMKM Kecamatan Magelang Utara, dan pelibatan masyarakat dalam sarasehan dan pelaksanaan musrenbang.
c. Pemberdayaan perempuan dan anak
   Selain pemberdayaan masyarakat secara umum, arah kegiatan juga difokuskan pada perempuan dan anak. Beberapa arahan pengembangannya adalah lomba semarak anak, sosialisasi tentang gender, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, penyuluhan kesehatan balita, pembinaan jaringan pemberdayaan perempuan dan anak.
d. Peningkatan dan pelestarian budaya
   Untuk mendukung pengembangan pariwisata, arahan pengembangannya yaitu dengan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

4.5. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja OPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota Magelang, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 3 daerah pemilihan yang meliputi 3 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Magelang lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2020, KUA PPAS dan APBD tahun 2020.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang tahun 2019 yang diakomodir dalam RKPD adalah saran masukan yang selaras dengan permasalahan yang ada sehingga menjadi prioritas daerah. Adapun pokok pikiran yang diakomodir meliputi:

1. Peningkatan pemahaman pelajar tentang bahaya narkoba (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika);
2. Peningkatan akses layanan pendidikan;
3. Peningkatan standar aksesibiitas trotoar;
4. Pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan;
5. Peningkatan ketrampilan penduduk pencari kerja;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat (keterbukaan informasi publik);
8. Peningkatan minat dan budaya baca di masyarakat;
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian; dan
10. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor perdagangan

4.6. Inovasi Pembangunan

Inovasi merupakan salah satu kata kunci yang bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya agar lebih mampu memberikan solusi cerdas terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat di era keterbukaan ini. Menyimak apa yang pernah dituturkan oleh **Steve Jobs**, yang mengatakan bahwa: ***"Innovation distinguishes between a leader and a follower"***, kalimat itu menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mengembangkan inovasi. Hasil yang didapat adalah pada Bulan September 2018, Walikota Magelang mendapat pengakuan sebagai Walikota Pelopor Inovasi Daerah tingkat Jawa Tengah. Beberapa inovasi di Kota Magelang yang dilakukan adalah:

4.6.1. Inovasi Perencanaan

Dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, inovasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga dioptimalkan untuk efektifitas dan efisiensi proses perencanaan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas proses

perencanaan dari bawah (bottom-up planning) ditempuh dengan melibatkan beberapa segmen kelompok masyarakat, misalnya kelompok lansia dan anak-anak yang sudah dilibatkan dalam konsultasi publik dan musrenbang. Perluasan akses untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan juga mendapat wadah melalui berbagai media komunikasi.

Tabel 4.10
Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Inovasi	Latar Belakang	Nilai Tambah Inovasi
1	Integrasi Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah dan e Budgetting	Inefisiensi input dan ketertelusuran pada fungsi perencanaan dan penganggaran	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya
2	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (track back) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat
3	E Pokir	Inefisiensi input dan kesulitan dalam menelusuri data pemikiran anggota DPRD baik melalui Pokir maupun reses.	Efisien dalam inputing data serta integrasi dalam sistem perencanaan
4	E Reses		
5	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,
6	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD
7	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang
8	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas
9	PASTI PEKA (Perluasan Akses Partisipasi Pemangku Kepentingan) dalam proses perencanaan.	Diperlukan perluasan ruang partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, melalui penggunaan berbagai media	Penyampaian aspirasi tidak terbatas saat masa musrenbang

4.6.2. Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan

Sebagai kota dengan dukungan potensi sumber daya alam yang sangat kurang, serta dengan keterbatasan lahan kota sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan industri besar, maka dalam tataran kebijakan diperlukan berbagai inovasi. Manfaat dari inovasi selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kota juga dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Beberapa inovasi dalam tataran program dan kebijakan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.11
Inovas Program/Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020

No	Inovasi	Latar Belakang	Nilai Tambah Inovasi
1	Magelang MONCER SERIUS 2020 (Modern-Cerdas-Sejahtera-Religius)	Moncer Serius 2020 merupakan ikon tahun 2020 di Kota Magelang dengan maksud untuk menegaskan peran dan fungsi Magelang sebagai kota jasa.	Rangkaian event yang digelar sepanjang tahun 2020 memberi peluang pengembangan usaha, membuat Magelang lebih dikenal dan menambah lama tinggal wisatawan. Melalui Moncer Serius 2020 juga memberi penembangan peluang usaha bagi pelaku usaha.
2	Pengembangan Kampung Teduh (Tematik, Terpadu, Hijau)	Penataan kawasan permukiman tidak hanya didekati dari satu aspek fisik saja, namun aspek sosial-ekonomi menjadi pertimbangan secara terpadu	Terobosan untuk program perbaikan kawasan kumuh sekaligus untuk pengentasan kemiskinan.
3	KISS-ME (Kolom Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Elektronik)	Kebutuhan untuk keterpaduan penanganan kemiskinan antar berbagai sektor dan urusan	Memberi ruang untuk koordinasi dalam pengentasan kemiskinan
4	Magelang Cerdas	Kebutuhan untuk manampilkan potensi kota, jenis pelayanan publik dan sarana wisata	Masyarakat dapat mengakses secara mudah dengan android untuk mendapatkan berbagai jenis informasi.
5	DataGo: http://datago.magelangkota.go.id	Kebutuhan untuk integrasi data sektoral	Dengan portal data terbuka sehingga proses pengumpulan, validasi dan perhitungan indikator kinerja dapat diitegrasikan secara online, sehingga pengelolaan data sektoral di Kota Magelang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
6	E-Retribusi (Bakul Pasar)	Penarikan retribusi dari pasar tradisional secara manual rawan potensi kebocoran	Dengan E-Retribusi Bakul Pasar maka retribusi dari pasar tradisional langsung masuk ke kas daerah
7	Implementasi Blueprint Universal Design	Masih belum maksimalnya kehadiran pemerintah bagi kaum difabel terutama untuk aksesibiltas pada infrastruktur dan fasilitas publik	Peningkatan aksesibilitas terdapat fasilitas Kota termasuk bagi para kaum difabel
8	Cek Kir On-Lina	Kebutuhan untuk memberi kemudahan dalam pelayanan cek kendaraan	Kepastian biaya dan waktu dalam pelayanan cek kendaraan secara on-line
9	Implementasi Masterplan Smartcity	Tingkat kematangan Kota Magelang sebagai kota cerdas, sesuai Garuda Smart City Model sudah masuk integratif, dan perlu ditingkatkan agar lebih cerdas.	Akselerasi pencapaian smart city Kota Magelang, sesuai tingkat kematangan kota cerdas.
10	Penguatan Implementasi Magelang sebagai Kota Layak Anak	Perlunya kesinambungan dalam *positioning* kota sebagai Kota Layak Anak	Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak
11	Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Perlunya akeselerasi pencapaian indikator MKSB	Percepatan pencapaian indikator MKSB
12	i-Magelang	Peningkatan minat baca bagi masyarakat Kota Magelang	Masyarakat bisa meng-unduh aplikasi i-Magelang melalui android, sehingga meudahkan akses menapakan bahan bacaan bagi masyarakat.

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah baik yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah atau fungsi pendukung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh OPD. Program ini akan menghasilkan outcome yang mendukung capaian indikator program pembangunan daerah dan juga mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1. Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Intervensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD).
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.
3	Prioritas III	Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

5.2. Program Prioritas I

5.2.1. Program Prioritas Tema PembangunanTahun 2020

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun keempat adalah **Promotif dan Ekspansif Bersama Mitra.** Program yang sesuai dengan Tema ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2020

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	BPKAD
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	
			Interoperabilitas antar system informasi	
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	DPU-PR

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipasif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Bappeda
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas SOsial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	
			Cakupan penanganan korban becana	
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonser5asi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase peningkatan kualitas pelaku usaha KUM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	DPMPTSP
		program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Prosentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	Dinas Perindutrian dan Perdagangan
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase penduduk berakses air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rasio Luas kawasan kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/ perkebunan	Ketersediaan pangan utama beras	DInas Pertanian dan Pangan
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata unggulan	Disporapar
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan: - Nusantara - mancanegara	Disporapar
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Luas lahan pertanian organik	DInas Pertanian dan Pangan
		Program peningkatan penerapan teknologi petemakan	Jumlah pelaku usaha peternakan organik: a. Peternak ayam buras/ ayam broiler b. Peternak kelinci Peternak kambing/domba	DInas Pertanian dan Pangan
		Program pengembangan budidaya perikanan	Luas lahan perikanan organik	DInas Pertanian dan Pangan
8	Perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa	Program peninkatan kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
	pendidikan			
			Pertumbuhan wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat BNSP	Dinas Tenaga Kerja
9	Program Masayarakat relijius menuju masyarakat madani	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat Kerukunan Antar Umat Beragama	Kesbangpol
		1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program pendidikan Anak Usia Dini	a. adanya Kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spirual dan berkarakter bagi siswa b. melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan c. Prosentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan Bina Suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa d. Penurunan angka kenakalan pelajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (kegiatan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui pendidikan)	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada tingkat/jenjang : a. Propinsi b. Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat	Kesbangpol
		Program Pemeliharaan kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	a. Persentase kriminalitas yang tertangani b. Terbentuknya Kampung Bebas Narkoba c. Rasio jumlah siskamling aktif	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terlatih dalam deteksi dini	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk b. Prosentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (K3) c. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk d. Tingkat penyelesaian	Satpol PP

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
			pelanggaran Perda	
		Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	a. Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat Kota	Setda
			b. Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	Setda

5.2.2. Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pada setiap level Musrenbang.

Tabel 5.3
Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satpol PP
2	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenaga listrikan	Rasio ketercukupan PJU	Dinas lIngkungan Hidup
3	Program Infrastruktur pedesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	DPU PR
4	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Persentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
6	Perlindungan dan konservasi SDA	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
10	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan,	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	
11	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Peningkatan kesejahteraan petani/ peternak	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pengembangan budidaya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	1. Padi 2. Jagung 3. Ubi kayu	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Pengembangan budi daya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Pengelolaan keragaman budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
19	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
20	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	Dinas Perindustrian dan perdagangan
21	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	Dinas Perindustrian dan perdagangan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
22	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	Dinas Perindustrian dan perdagangan
23	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	Dinas Perindustrian dan perdagangan
24	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
25	Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	Dinas Perindustrian dan perdagangan
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja
27	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
28	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
29	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun	DPU-PR
32	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	DPU-PR
33	Program lingkungan sehat perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
34	Program pembangunan turap/talud/bronjong		DPU-PR
35	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
36	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
37	Program upaya kesehatan masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
38	Program perbaikan gizi masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	
39	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
40	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
41	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		Dinas Kesehatan
42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan
43	Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	
44	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	Program Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
48	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
49	Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB Mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	Satpol PP

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	
51	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satpol PP
….	Dst…		

5.2.3. Program Prioritas Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui *Focus Group Discusion* (FGD). FGD dilksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama *stakeholders*, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan. Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 beberapa FGD sebagaiman tabel berikut :

Tabel 5.4
Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penurunan Persentse Penduduk Miskin	Membahasn langkah langkah yang bersifat perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di bawah angka saat ini 7,8 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persamapahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil e5aluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi Smart City	Upaya meningkatan eksekusi atas Smary city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke le5el berikutnya
6	Sustainable Development Goals.	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program indikatif yang diprioritaskan berdasarkan tema FGD yang akan dilaksanakan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

5.2.3.1. Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dengan indikasi program:

Tabel 5.5
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir	1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	Dinas Sosial

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Prevalensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat Persentase kawasan strategis yang terbangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
21	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan	Dinas Tenaga Kerja
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Dinas Perindutrian dan Perdagangan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festi5al seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah review PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	PKK Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			Berencana
37	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
38	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
39	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda
dst	Dst	Dst	Dst

5.2.3.2. Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai **Kota Layak Anak**. Tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik mau pun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatkan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu Indikasi program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten 4. Presentase perpustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
8	Program Peningkatan Mutu Pendidilkan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	Dinas Kesehatan
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	trauma		
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satuan Polisi Pamong praja
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Cakupan penanganan korban becana	Satuan Polisi Pamong praja
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HI5/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Badan Kesbangpolinmas
31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPRO5 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase lapangan olahraga yang dire5italisasi 2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda
dst	dst	Dst	

5.2.3.3. Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuurip yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah

dan seluruh elemen mencari ino5asi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada sejak tahun 2020 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD **Manajemen Persampahan** dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan ino5asi dari berbagai pihak. Selain strategi *3 R (Reduce, reuse dan recycle)* yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana menajemen persamapahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Sejak tahun 2020 hingga ke depan seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Indikasi program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.7
Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola	Dinas Perindag
dst	dst	dst	dst

5.2.3.4. Penguatan Branding Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan "Kota Sejuta Bunga" sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna Kota Sejuta Bunga sebagai identitas atau branding Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2020, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, dengan indikasi program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel 5.8
Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Kota	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana		Dinas Pertanian dan Pangan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	aparatur		
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festi5al seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP 2. Rasio petani terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representati5e 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		7. Cakupan organisasi 34%	
dst	dst	dst	dast

5.2.3.5. Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang , hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.9
Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		BPKAD
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	DInas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi	Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	undangan	3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 8. Nilai sur5ey kepuasan penggunan layanan PD 9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Semua Perangkat Daerah
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: a. Radio b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representati5e 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Implementasi SIPID (Sistim In5ormasi Potensi In5estasi Daerah) 2. Implementasi pemanfaatan SPIPISE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik 2. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata 3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: a. Radio b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku 2. Persentase arsip dan risalah 3. Persentase Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.2.3.6. Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut :

Tabel 5.10
Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza,	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		PMS termasuk HI5/AIDS	
8	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
25	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

Dan program program yang mendukung dan mengarah pada FGD FGD pada tema yang lain, akan tersaji pada Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

5.2.4. Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telahaan baik oleh Bappeda maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan dalam sistem e-Pokir kemudian diverifikasi oleh masing-masing OPD terkait. Usulan yang dinilai sesuai dengan prioritas dan batasan kriteria dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020. Dari lebih dari 700 usulan yang masuk dalam sistem, setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 158 kegiatan (31 program) diakomodasi dalam rencana kerja.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Akomodasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	OPD
		INPUT MANUAL		
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	37.269.000	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	72.079.000	DAU	Dinas Pendidikan dan

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	OPD
		INPUT MANUAL		
				Kebudayaan
3	Program Pendidikan Berkelanjutan	150.000.000	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.536.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	6.350.895.000	DAU	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	24.689.000	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	378.363.000	DAU	Sekretariat Daerah – Bagian Kesra
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	74.727.000	DAU	Dinas Tenaga Kerja
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	514.835.000	DBHCHT	Dinas Tenaga Kerja
10	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	94.175.000	DAU	Dinas Tenaga Kerja
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	88.409.000	DAU	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	49.418.000	DAU	Dinas Lingkungan Hidup
13	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	90.457.000	DAU	Dinas Lingkungan Hidup
14	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	262.162.000	DAU	Dinas Lingkungan Hidup
15	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	331.893.000	DAU	Dinas Perhubungan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	320.680.000	DAU	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	532.655.000	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	157.955.000	DAU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Program pengembangan budidaya perikanan	67.688.000	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	20.159.000	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	107.180.000	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	85.988.000	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	51.257.000	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	86.701.000	DAU	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	436.548.000	DAU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.428.908.000	DAU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Program Pengelolaan Pasar	259.788.000	DAU	Dinas Perindustrian dan

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF INPUT MANUAL	SUMBER DANA	OPD
				Perdagangan
28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.018.000	DAU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	86.940.000	DBHCHT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.216.000	DAU	Kelurahan Magersari
31	Program Penelitian dan Pengkajian	36.087.000	DAU	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Jumlah	19.990.139.000		

5.2.5. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam RKPD Kota Magelang 2020 juga menampilkan dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.12
Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Dokungan Program
1	**Prioritas Nasional 1:** Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	▪ Program-program prioritas hasil FGD Penanggulangan Kemiskinan ▪ Program Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Program Pengembangan Nilai Budaya ▪ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ▪ Program Pendidikan Non Formal ▪ Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya ▪ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ▪ Program Pengelolaan Keragaman Budaya ▪ Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ▪ Program Upaya Kesehatan Masyarakat ▪ Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi ▪ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan ▪ Program Keluarga Berencana ▪ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan ▪ Program Kesehatan Reproduksi Remaja ▪ Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ▪ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan ▪ Program pelayanan kontrasepsi ▪ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat ▪ Program Perbaikan Gizi Masyarakat ▪ Program Pengembangan Lingkungan Sehat ▪ Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ▪ Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya ▪ Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata ▪ Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ▪ Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ▪ Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia ▪ Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan ▪ Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

No	Prioritas Nasional	Dokungan Program
		▪ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD ▪ Program perencanaan pembangunan daerah ▪ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▪ Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
2	**Prioritas Nasional 2:** Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	▪ Program Pengembangan Perumahan ▪ Program Pemberdayaan komunitas Perumahan ▪ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ▪ Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan ▪ Program Perencanaan Tata Ruang ▪ Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ▪ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ▪ Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ▪ Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi ▪ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ▪ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ▪ Program perencanaan pembangunan daerah
3	**Prioritas Nasional 3:** Nilai Tembah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	▪ Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif ▪ Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ▪ Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan ▪ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ▪ Program Peningkatan Kesempatan Kerja ▪ Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ▪ Program perencanaan pembangunan daerah ▪ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ▪ Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ▪ Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ▪ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ▪ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ▪ Program Pengelolaan Pasar ▪ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ▪ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ▪ Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal ▪ Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ▪ Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan
4	**Prioritas Nasional 4:** Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan ▪ Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ▪ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ▪ Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ▪ Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan ▪ Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan ▪ Program pengembangan budidaya perikanan ▪ Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ▪ Program peningkatan produksi hasil peternakan ▪ Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Dokungan Program
		▪ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ▪ Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
5	**Prioritas Nasional 5:** Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	▪ Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ▪ Program pengembangan wawasan kebangsaan ▪ Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan ▪ Program perencanaan pembangunan daerah

5.3. Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.4. Program Prioritas III

Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap OPD.

Tabel 5.13
Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.379.294.000
2	Dinas Kesehatan	77.672.228.000
3	BLUD RSU Tidar	185.000.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.784.428.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.195.493.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.991.100.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.253.602.000
8	Dinas Sosial	2.157.714.000
9	Dinas Tenaga Kerja	2.899.118.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	47.430.147.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.301.556.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.129.205.000
13	Dinas Perhubungan	14.055.529.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.102.281.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.134.183.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.989.075.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.104.779.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	5.690.374.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.341.206.000
20	Sekretariat Daerah	25.553.291.000
21	Sekretariat DPRD	20.173.297.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7.104.680.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	7.204.751.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.247.872.000
25	Inspektorat	2.726.908.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.154.340.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.365.659.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.213.573.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.258.366.000
	TOTAL	**630.614.049.000**

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN Pendidikan, Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.273.600.000		2.325.800.000	3.167.142.000		2.377.500.000				
1	1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	235.000.000	12	245.000.000	255.000.000	12	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	255.000.000
2	1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48	27.500.000	48 unit	28.500.000	42.900.000	48	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	42.900.000
3	1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	137	850.000.000	122 orang	860.000.000	1.263.050.000	137	870.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	1.263.050.000
4	1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100	175.000.000	100	175.000.000	203.832.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	203.832.000
5	1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47	84.000.000	12 bulan	88.000.000	126.462.000	47	92.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	126.462.000
6	1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100	75.000.000	12 bulan	78.000.000	87.798.000	100	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	87.798.000
7	1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18	10.000.000	18	10.500.000	13.512.000	12	11.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	13.512.000
8	1.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4	6.500.000	12 bulan	7.000.000	3.000.000	4	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	3.000.000
9	1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	500	18.000.000	3 koran harian dan 1 majalah mingguan selama 12 bulan	19.000.000	10.000.000	550	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	10.000.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
10	1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1	2.600.000	12 bulan	2.800.000	3.287.000	12	3.000.000	Dinas Pendidikan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	3.287.000
11	1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100	140.000.000	12 bulan	145.000.000	170.000.000	100	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	170.000.000
12	1.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	390.000.000	100	400.000.000	519.200.000	100	410.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	519.200.000
13	1.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	10	240.000.000	24 orang	245.000.000	330.540.000	10	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	330.540.000
14	1.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya sosialisasi manajemen kepegawaian	1	20.000.000	2 kegiatan , 110 orang	22.000.000	138.561.000	1	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	138.561.000
	1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.375.000.000		1.500.000.000	5.795.392.500		1.572.500.000				
					169,264,331,000		181,962,454,000			197,572,660,000				
1	1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor.	100	100.000.000	53 item	110.000.000	120.000.000	100	120.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	120.000.000
2	1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		50.000.000	4 alat, 1 paket software	75.000.000	963.500.000	100	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	450.000.000
3	1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	3	150.000.000	140 set	150.000.000	150.000.000	3	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM, ExBAU	150.000.000
4	1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	100.000.000	1	110.000.000	354.750.000	1	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	554.750.000
5	1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100	600.000.000	48 unit	620.000.000	627.850.000	100	640.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU	627.850.000
6	1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31	70.000.000	31	75.000.000	89.639.000	31	77.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	89.639.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
7	1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	100	55.000.000	100	60.000.000	376.812.500	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	376.812.000
8	1.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/kanopi dan tempat parkir	2	250.000.000	7 paket	300.000.000	1.606.809.000	3	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	632.011.000
9	1.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemenuhan kendaraan dinas/operasional					606.400.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	-
10	1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor					899.632.000	1 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	-
	1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			118.000.000		126.500.000	128.223.000		135.500.000				
1	1.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	100	13.000.000	1 dokumen	14.500.000	12.029.000	100	16.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	12.029.000
2	1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	100	6.000.000	1 dokumen	6.500.000	5.501.000	100	7.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	5.501.000
3	1.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100	19.500.000	1 dokumen	21.000.000	18.193.000	100	22.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	18.193.000
4	1.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	11.000.000	2 dokumen, 2 sosialisasi	12.000.000	20.000.000	100	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	20.000.000
5	1.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	100	52.500.000	2 dokumen, 4 pembinaan	55.000.000	55.000.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	55.000.000
6	1.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan	100	16.000.000	1 dokumen, 1 sosialisasi	17.500.000	17.500.000	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	17.500.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
7	1.1.6.30	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang			1 Renstra Perubahan		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.275.900.000		4.309.900.000	1.906.448.000		4.345.900.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksanannya pelatihan tenaga pendidik KBTK	100	95.000.000	2 pelatihan KB 96, TK 76	100.000.000	150.000.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	150.000.000
2	1.1.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	100	36.000.000	TK 118, KB 103	37.500.000	47.030.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	47.030.000
3	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	100	22.000.000	1 PAUD	23.500.000	79.224.000	100	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak, Akomodasi Musrenbang	79.224.000
4	1.1.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100	12.500.000	100	13.500.000	14.065.000	100	14.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	14.065.000
5	1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelanjaran	100	108.500.000	2 lomba, 150 peserta	110.000.000	28.514.000	100	115.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	28.514.000
6	1.1.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100	17.000.000	100	18.500.000	20.000.000	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	20.000.000
7	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terlaksananya lomba - lomba semarak anak	100	73.500.000	40 peroranga n KB, 25 beregu KB, 30 TK	77.000.000	92.000.000	100	80.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	92.000.000
8	1.1.15.71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	1	6.000.000	40 peserta, 2 lomba	7.000.000	18.432.000	1	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	18.432.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
9	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	100	18.000.000	100	18.500.000	30.000.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	30.000.000
10	1.1.15.83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	1	20.000.000	Anak KB TK, 5 jenis lomba	22.000.000	88.242.000	1	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	88.242.000
11	1.1.15.88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	100	3.767.400.000	1 TK Negeri	3.767.400.000	60.000.000	100	3.767.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Kota Layak Anak	0
12	1.1.15.89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2	25.000.000	6 Bunda PAUD, 9 Gugud Paud	30.000.000	27.000.000	2	32.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	27.000.000
13	1.1.15.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terlaksananya pemeliharaan ruang kelas sekolah					30.000.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	30.000.000
14	1.1.15.81	Lomba sekolah sehat PAUD	Terlaksananya lomba sekolah sehat PAUD					100.000.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	100.000.000
15	1.1.15.36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya pemeliharaan sarana air bersih dan sanitary					125.000.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	125.000.000
16	1.1.15.95	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Terpenuhinya buku koleksi PAUD			100%		0	800	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Kota Layak Anak	0
17	1.1.15.87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksanannya lomba KB TK			10 lomba , 1 sosialisasi		101.941.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	101.941.000
18	1.1.15.91	Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	Terlaksananya pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini			100%		20.000.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	20.000.000
19	1.1.15.86	Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	Pembinaan lembaga PAUD (BKB dan SPS), Pembinaan PAUD Holistik Integratif (KB dan TK)			100 persen		50.000.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	50.000.000
20	1.1.15.80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	3	75.000.000	96 x 3 SPS TPQ, KB - 70 x 3 TK, TPA	85.000.000	95.000.000	1 kegiatan	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	95.000.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
21	1.1.15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Sekolah PAUD			100 persen		280.000.000	100%	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Program prioritas RPJM	280.000.000
22	1.1.15.96	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD			100%		0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Kota Layak Anak	0
23	1.1.15.90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD			100 persen		20.000.000	100%	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	20.000.000
24	1.1.15.94	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya Perpustakaan di TK Negeri Pembina			100%		430.000.000	1 unit	0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Kota Layak Anak	0
25		Rehabilitasi prasarana belajar PAUD										DAK		363.000.000
26		Pembangunan prasarana belajar PAUD/Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang										DAK		70.000.000
27		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD										DAK		60.000.000
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			840.000.000		870.000.000	1.699.025.000		895.000.000				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					
			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	100	280.000.000	17 kelurahan	285.000.000	380.025.000	17 Lokasi	290.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM	380.025.000
2	2.16.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	100	385.000.000	1 kali pementasan	405.000.000	852.530.000	100	420.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	852.530.000
3	2.16.15.8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang			75 orang peserta		74.325.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	74.325.000
4	2.16.15.6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	10	175.000.000	6 kegiatan	180.000.000	392.145.000	100	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	392.145.000
5	2.16.15.9	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Terfasilitasi masyarakat penghayat kepercayaan			100		0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			98.074.000		102.678.000	74.500.000		107.486.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Meningkatkan informasi masyarakat	100	16.000.000	100	16.500.000	0	100	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
2	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Meningkatkan minat baca	100	15.540.000	80 Peserta	16.317.000	0	100	17.133.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	0
3	2.17.15.24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	100	6.300.000	100	6.615.000	7.500.000	100	6.945.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	7.500.000
4	2.17.15.25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100	31.500.000	100	33.075.000	35.000.000	100	34.729.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian	35.000.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
5	2.17.15.26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100	28.734.000	100	30.171.000	32.000.000	100	31.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	32.000.000
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			108.899.000		114.594.000	120.448.000		120.448.000				
1	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Aset sekolah terkelola dengan baik	100	63.899.000	100	67.094.000	70.448.000	100	70.448.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	70.448.000
2	4.4.15.73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	100	45.000.000	100	47.500.000	50.000.000	100	50.000.000	Kota magelang	Dana Alokasi	Memperk	50.000.000
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			23.377.492.000		23.463.992.000	34.987.375.000		23.857.492.000				
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.61%		100.00%			100.00%					
			APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%		116%			118%					
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	78.00%		80.00%			82.00%					
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88.00%		90.00%			96.00%					
			Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,1361111		0,1361111			0,1361111					
			Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,2430556		0,2430556			0,2430556					
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		1:16			1:16					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		1:14			1:14					
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01			0,01					
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13		0,04			0,04					
			Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		0,001			0,001					
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		150%			150%					
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA	157%		160%			163%					
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%			75%					
			Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	42 pelajar		36 pelajar			30 pelajar					
			Adanya kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa											
			Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	85%		90%			95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	87%		90%			93%					
			Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%		40%			50%					
1	1.1.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	100	47.000.000	2 kali pelatihan, 800 tenaga pendidik	48.000.000	85.379.000	100	49.000.000	KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	SDGs, Program prioritas RPJM	85.379.000
2	1.1.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4	70.000.000	3 PKBM	75.000.000	143.273.000	4	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	143.273.000
3	1.1.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	5	210.000.000	80 orang	215.000.000	292.511.000	5	220.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	292.511.000
4	1.1.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosiallisasi informasi pendidikan dasar	100	52.500.000	125 orang	55.000.000	18.195.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	18.195.000
5	1.1.16.89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendalli mutu SMP	100	220.000.000	6600 Siswa Kelas VIII dan IX SMP	235.000.000	168.343.000	100	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs	168.343.000
6	1.1.16.97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.352.000	100	132.352.000	97.008.000	100	132.352.000	SD Negeri Kedungsari 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	97.008.000
7	1.1.16.98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	86.854.000	100	86.854.000	62.436.000	100	86.854.000	SD Negeri Kedungsari 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	62.436.000
8	1.1.16.99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	135.340.000	100	135.340.000	86.688.000	100	135.340.000	SD Negeri Kedungsari 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	86.688.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
9	1.1.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.432.000	100	154.432.000	103.716.000	100	154.432.000	SD Negeri Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	103.716.000
10	1.1.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	279.744.000	100	279.744.000	179.052.000	100	279.744.000	SD Negeri Kedungsari 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	179.052.000
11	1.1.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.176.000	100	107.176.000	93.396.000	100	107.176.000	SD Negeri Kramat 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	93.396.000
12	1.1.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.836.000	100	79.836.000	51.600.000	100	79.836.000	SD Negeri Kramat 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	51.600.000
13	1.1.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	87.392.000	100	87.392.000	49.536.000	100	87.392.000	SD Negeri Kramat 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	49.536.000
14	1.1.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.592.000	100	114.592.000	66.564.000	100	114.592.000	SD Negeri Kramat 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	66.564.000
15	1.1.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.530.000	100	107.530.000	71.724.000	100	107.530.000	SD Negeri Kramat 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	71.724.000
16	1.1.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	70.158.000	100	70.158.000	54.180.000	100	70.158.000	SD Negeri Potrobangsan 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	54.180.000
17	1.1.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.558.000	100	154.558.000	109.392.000	100	154.558.000	SD Negeri Potrobangsan 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	109.392.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
18	1.1.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	152.698.000	100	152.698.000	92.364.000	100	152.698.000	SD Negeri Potrobangsan 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	92.364.000
19	1.1.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	93.934.000	100	93.934.000	64.500.000	100	93.934.000	SD Negeri Potrobangsan 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	64.500.000
20	1.1.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.436.000	100	138.436.000	85.656.000	100	138.436.000	SD Negeri Wates 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	85.656.000
21	1.1.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.262.000	100	148.262.000	79.980.000	100	148.262.000	SD Negeri Wates 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	79.980.000
22	1.1.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	99.170.000	100	99.170.000	39.216.000	100	99.170.000	SD Negeri Wates 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	39.216.000
23	1.1.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	151.380.000	100	151.380.000	75.336.000	100	151.380.000	SD Negeri Wates 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	75.336.000
24	1.1.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.236.000	100	81.236.000	38.184.000	100	81.236.000	SD Negeri Wates 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	38.184.000
25	1.1.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	164.312.000	100	164.312.000	91.332.000	100	164.312.000	SD Negeri Cacaban 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	91.332.000
26	1.1.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	140.500.000	100	140.500.000	88.752.000	100	140.500.000	SD Negeri Cacaban 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	88.752.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
27	1.1.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	139.818.000	100	139.818.000	93.396.000	100	139.818.000	SD Negeri Cacaban 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	93.396.000
28	1.1.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	134.604.000	100	134.604.000	84.624.000	100	134.604.000	SD Negeri Cacaban 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	84.624.000
29	1.1.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.640.000	100	149.640.000	97.008.000	100	149.640.000	SD Negeri Cacaban 6	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	97.008.000
30	1.1.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	104.456.000	100	104.456.000	67.596.000	100	104.456.000	SD Negeri Gelangan 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	67.596.000
31	1.1.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.734.000	100	81.734.000	40.764.000	100	81.734.000	SD Negeri Gelangan 24	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	40.764.000
32	1.1.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	125.338.000	100	125.338.000	65.016.000	100	125.338.000	SD Negeri Gelangan 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	65.016.000
33	1.1.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	174.964.000	100	174.964.000	98.040.000	100	174.964.000	SD Negeri Gelangan 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	98.040.000
34	1.1.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.034.000	100	81.034.000	38.184.000	100	81.034.000	SD Negeri Gelangan 7	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	38.184.000
35	1.1.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.444.000	100	280.444.000	184.212.000	100	280.444.000	SD Negeri Kemirirejo 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	184.212.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
36	1.1.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	303.740.000	100	303.740.000	195.564.000	100	303.740.000	SD Negeri Kemirirejo 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	195.564.000
37	1.1.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	278.402.000	100	278.402.000	185.760.000	100	278.402.000	SD Negeri Magelang 2/7	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	185.760.000
38	1.1.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.596.000	100	143.596.000	90.300.000	100	143.596.000	SD Negeri Magelang 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	90.300.000
39	1.1.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.390.000	100	136.390.000	88.752.000	100	136.390.000	SD Negeri Magelang 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	88.752.000
40	1.1.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	105.132.000	100	105.132.000	72.756.000	100	105.132.000	SD Negeri Magelang 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	72.756.000
41	1.1.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.610.000	100	280.610.000	202.272.000	100	280.610.000	SD Negeri Magelang 6	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	202.272.000
42	1.1.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.808.000	100	114.808.000	79.464.000	100	114.808.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	79.464.000
43	1.1.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	77.050.000	100	77.050.000	46.956.000	100	77.050.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	46.956.000
44	1.1.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	68.242.000	100	68.242.000	40.764.000	100	68.242.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	40.764.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
45	1.1.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	127.254.000	100	127.254.000	65.532.000	100	127.254.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	65.532.000
46	1.1.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.086.000	100	138.086.000	91.332.000	100	138.086.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	91.332.000
47	1.1.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	147.064.000	100	147.064.000	78.432.000	100	147.064.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	78.432.000
48	1.1.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	142.174.000	100	142.174.000	99.588.000	100	142.174.000	SD Negeri Jurangombo 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	99.588.000
49	1.1.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	146.584.000	100	146.584.000	82.044.000	100	146.584.000	SD Negeri Jurangombo 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	82.044.000
50	1.1.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	175.996.000	100	175.996.000	94.944.000	100	175.996.000	SD Negeri Jurangombo 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	94.944.000
51	1.1.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	162.522.000	100	162.522.000	101.652.000	100	162.522.000	SD Negeri Jurangombo 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	101.652.000
52	1.1.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	88.420.000	100	88.420.000	64.500.000	100	88.420.000	SD Negeri Magersari 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	64.500.000
53	1.1.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.062.000	100	143.062.000	91.848.000	100	143.062.000	SD Negeri Magersari 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	91.848.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
54	1.1.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.482.000	100	79.482.000	57.276.000	100	79.482.000	SD Negeri Magersari 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	57.276.000
55	1.1.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.788.000	100	149.788.000	89.784.000	100	149.788.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	89.784.000
56	1.1.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	168.256.000	100	168.256.000	93.396.000	100	168.256.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	93.396.000
57	1.1.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	108.270.000	100	108.270.000	75.336.000	100	108.270.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	75.336.000
58	1.1.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.704.000	100	136.704.000	86.688.000	100	136.704.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	86.688.000
59	1.1.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	156.738.000	100	156.738.000	82.560.000	100	156.738.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	82.560.000
60	1.1.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	131.854.000	100	131.854.000	95.976.000	100	131.854.000	SD Negeri Tidar 1	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	95.976.000
61	1.1.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.240.000	100	148.240.000	94.428.000	100	148.240.000	SD Negeri Tidar 3	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	94.428.000
62	1.1.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.536.000	100	132.536.000	94.944.000	100	132.536.000	SD Negeri Tidar 4	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	94.944.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
63	1.1.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	170.670.000	100	170.670.000	99.072.000	100	170.670.000	SD Negeri Tidar 5	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	99.072.000
64	1.1.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.966.000	100	132.966.000	73.272.000	100	132.966.000	SD Negeri Tidar 6	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	73.272.000
65	1.1.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	116.010.000	100	116.010.000	80.496.000	100	116.010.000	SD Negeri Tidar 7	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	80.496.000
66	1.1.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	776.811.000	100	776.811.000	524.628.000	100	776.811.000	SMP Negeri 1 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	524.628.000
67	1.1.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	833.940.000	100	833.940.000	537.966.000	100	833.940.000	SMP Negeri 2 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	537.966.000
68	1.1.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	783.441.000	100	783.441.000	517.959.000	100	783.441.000	SMP Negeri 3 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	517.959.000
69	1.1.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	559.936.000	100	559.936.000	391.989.000	100	559.936.000	SMP Negeri 4 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	391.989.000
70	1.1.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	739.198.000	100	739.198.000	500.175.000	100	739.198.000	SMP Negeri 5 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	500.175.000
71	1.1.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	571.130.000	100	571.130.000	393.471.000	100	571.130.000	SMP Negeri 6 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	393.471.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
72	1.1.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1	621.563.000	100	621.563.000	400.140.000	1	621.563.000	SMP Negeri 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	400.140.000
73	1.1.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	735.283.000	100	735.283.000	497.211.000	100	735.283.000	SMP Negeri 8 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	497.211.000
74	1.1.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	677.964.000	100	677.964.000	462.384.000	100	677.964.000	SMP Negeri 9 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	462.384.000
75	1.1.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	699.905.000	100	699.905.000	443.859.000	100	699.905.000	SMP Negeri 10 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	443.859.000
76	1.1.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	611.707.000	100	611.707.000	413.478.000	100	611.707.000	SMP Negeri 11 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	413.478.000
77	1.1.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	570.258.000	100	570.258.000	403.104.000	100	570.258.000	SMP Negeri 12 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	403.104.000
78	1.1.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	782.286.000	100	782.286.000	500.175.000	100	782.286.000	SMP Negeri 13 Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	500.175.000
79	1.1.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)			274 siswa pendidikan dasar		37.269.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD	37.269.000
80	1.1.16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan sekolah					182.800.000	2	0	SMP N 2 dan SMP N 11	Dana Alokasi Umum	Rencana	182.800.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
81	1.1.16.203	Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya			100%		521.349.000	100	0	SDN Kramat 1, SDN Magelang 3, SDn Tidar 7, SDN Magelang 4, SDN Rejowinangun Utara 6, SDN Rejowinangun Utara 2, SDN Rejowinangun Utara 3, SDN Kramat 5, SDN Gelangan 3, SMP N 8	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	521.349.000
82	1.1.16.202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya			100%		180.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
83	1.1.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP beserta perabotnya			100%		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	334.500.000
84	1.1.16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya rehab sedang/berat laboratorium sekolah					173.375.000	1 unit	0	SMP N 13	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang	173.375.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
85		Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta sanitasinya										DAK	Rencana	23.400.000
86	1.1.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD	7	630.000.000	6 sekolah dasar	630.000.000	497.000.000	10	900.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	198.800.000
87	1.1.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah	2	92.000.000	3	145.000.000	177.200.000	2 sekolah	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	177.200.000
88	1.1.16.91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	0	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	0
89	1.1.16.92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)/Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	0	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	3.822.000.000
90	1.1.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP	6	300.000.000	6 Sekolah Dasar	300.000.000	621.975.000	768 Unit	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	381.975.000
91	1.1.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	2	180.000.000	1 ruang kelas SD Magelang 5	180.000.000	770.200.000	6 sekolah	180.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Program prioritas RPJM	369.600.000
92	1.1.16.88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar			4800 siswa kelas 5 SD		190.716.000	100%	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs	190.716.000
93	1.1.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikannya bantuan pakaian seragam sekolah			2200 SD, 3000 SMP		2.258.280.000	100%	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	2.258.280.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
94	1.1.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			1 ruang perpustakaan di SD Gelanagan 6		135.060.000	100%	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang	135.060.000
95	1.1.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			10 Sekolah Dasar		134.370.000	4 sekolah	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Program prioritas RPJM	134.370.000
96	1.1.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah dasar			6 sekolah dasar		511.100.000	7 sekolah	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang	200.400.000
97	1.1.16.200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya			100%		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	334.500.000
98	1.1.16.196	Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	Tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)			3 lokasi		64.570.000	4 sekolah	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	64.570.000
99	1.1.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa			700 siswa kelas 6 SD dan kelas IX SMP		58.786.000	100%	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	58.786.000
100	1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			3 gedung SMP : SMP 7, SMP 13, SMP 10		3.728.191.000	12 sekolah	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	0
101	1.1.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		97.784.000	100	0	SDN Gelangan 6	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	97.784.000
102	1.1.16.204	Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD)	Terpenuhinya GTT/PTT dan Tenaga Administrasi					8.112.480.000	150	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	8.112.480.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
103		Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)/Pengadaanalat kesenian tradisional										DAK	Rencana	720.000.000
104		Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya										DAK	Rencana	72.000.000
105		Penyediaan sarana prasarana pendidikan SD (DAK)/Pengadaanalat kesenian tradisional										DAK		1.440.000.000
106		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotanya										DAK		370.000.000
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			667.500.000		698.000.000	1.502.801.000		729.500.000				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100		100			100					
			Jumlah pengunjung museum	5,250		5,350			5,450					
			Jumlah koleksi museum	12		13			14					
1	2.16.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	12	145.000.000	1 museum	150.000.000	138.712.000	12	155.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	138.712.000
2	2.16.16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	100	60.000.000	1 kali pementasan	65.000.000	79.814.000	100	70.000.000	Kota Semarang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	79.814.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
3	2.16.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	50	14.000.000	1 buku	15.000.000	15.000.000	100	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	15.000.000
4	2.16.16.8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	100	100.000.000	1 film	105.000.000	0	100	110.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
5	2.16.16.11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1	22.500.000	1 kegiatan	25.000.000	0	1	27.500.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	0
6	2.16.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terlaksananya pelatihan PERMADANI bagi siswa dikdas	40	36.000.000	40 siswa dikdas	38.000.000	0	1 buku sejarah	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	0
7	2.16.16.16	Pembuatan Replika Benda - Benda Sejarah Jenderal Sudirman	Replika Benda Peninggal Jenderal Sudirman			25		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
8	2.16.16.17	Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya	Terjaganya Bangunan Cagar Budaya di Kota Magelang			2		0	10	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
9	2.16.16.19	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kormonev			1 dokumen		32.655.000	4 lokasi	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana, Pokok Pikiran DPRD	32.655.000
10	2.16.16.18	Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)	Operasional Komite Seni Budaya Nusantara terpenuhi			1 Tahun		50.239.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	50.239.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
11	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	100	140.000.000	1 kegiatan	145.000.000	145.000.000	100	150.000.000	TMII Jakarta	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	145.000.000
12	2.16.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35	150.000.000	10 rekomendasi	155.000.000	91.381.000	10 cagar budaya	160.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	91.381.000
13	2.16.16.14	Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah	Pemeliharaan Situs Budaya Mantyasih			100%		0	1 Lokasi	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
14	2.16.16.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Terlaksananya Pengadaan Gamelan			100%		500.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD	550.000.000
15	2.16.16.20	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Terselenggaranya Operasional Penyelenggaraan Museum			100%		450.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Program prioritas RPJM	0
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			352.000.000		365.000.000	851.627.000		385.000.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1	115.000.000	1 kegiatan	120.000.000	261.780.000	1	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019	261.780.000
2	2.16.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2	45.000.000	2 kegiatan	47.500.000	53.709.000	2	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	53.709.000
3	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	100	70.000.000	9	72.500.000	137.525.000	100	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	412.525.000
4	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1	122.000.000	1 kegiatan	125.000.000	125.000.000	1	135.000.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019	125.000.000
5	2.16.17.9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terselenggaranya Karnaval Pembangunan			1 Kegiatan		273.613.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	273.613.000
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			613.500.000		638.250.000	1.146.031.000		671.000.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%			97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%			25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-			-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2			2					
1	1.1.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	100	54.000.000	325 warga belajar	56.000.000	148.701.000	100	58.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	148.701.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
2	1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	100	95.000.000	90 orang	99.000.000	84.521.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	84.521.000
3	1.1.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	60	75.000.000	90 orang	79.000.000	117.500.000	60	83.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana	117.500.000
4	1.1.18.20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	3	26.000.000	12 bulan	27.000.000	37.500.000	3	28.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana	37.500.000
5	1.1.18.21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170	15.500.000	170 peserta	16.250.000	16.000.000	170	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	16.000.000
6	1.1.18.22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290	32.500.000	170 Peserta Paket C dan 155 Peserata Paket B	35.000.000	81.345.000	290	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	81.345.000
7	1.1.18.29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	100	24.000.000	175 Peserta	25.000.000	23.870.000	100	26.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	23.870.000
8	1.1.18.31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120	14.500.000	120 Peserta	15.500.000	17.500.000	120	16.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	17.500.000
9	1.1.18.32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2	62.000.000	2	63.000.000	90.000.000	2	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	90.000.000
10	1.1.18.33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90	40.000.000	90 Peserta	42.500.000	45.000.000	90	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	45.000.000
11	1.1.18.35	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	Terlaksananya Kursus Kewirausahaan Desa		0	250 peserta	0	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	0

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
12	1.1.18.38	Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi	Terjalin kemitraan DIKMAS		0	100 Peserta	0	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	0
13	1.1.18.39	Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	Terbantunya Taman Bacaan Masyarakat		0	100 persen	0	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	0
14	1.1.18.41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	4	175.000.000	52 Orang	180.000.000	384.094.000	4 kelompok belajar	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	384.094.000
15	1.1.18.43	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana belajar SKB			100%		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	0
16	1.1.18.40	Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Terlaksananya pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaran gender					50.000.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	50.000.000
17	1.1.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Tersosialisasinya pendidikan non formal melalui gebyar dikmas					50.000.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang	50.000.000
18		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Terselenggaranya pembelajaran Pendidikan Kesetaraan di Kota Magelang			100 %		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs, Program prioritas RPJM	0
		Pengadaan peralatan pendidikan TIK										DAK		350.000.000
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			185.000.000		188.000.000	574.140.000		200.000.000				
					4,279,381,000		4,874,624,000			5,465,814,000				
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	225		227			228					
			Misi kesenian 100%	39%		43%			45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	2.16.18.3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1	185.000.000	1	188.000.000	450.000.000	1	200.000.000	Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	450.000.000
2	2.16.18.7	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	Terpromosikannya seni budaya Kota Magelang			5 Kegiatan		124.140.000	100	0	Kab/Kota Seluruh Indonesia	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	124.140.000
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			81.000.000		87.500.000	145.489.000		94.000.000				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1			0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1			2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0			0					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perda kebudayaan	1	35.000.000	1	40.000.000	80.000.000	1	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	80.000.000
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1	46.000.000	1 raperwal	47.500.000	65.489.000	1	49.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	65.489.000
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			2.424.500.000		2.589.000.000	1.913.276.000		2.722.500.000				
			DISDIK		2,335,421,550									
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36%		36%			36%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14%		14%			14%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%			87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53%		54%			55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%		95%			95%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68%		68%			68%					
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.50%		35.75%			36.00%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14.05%		14.23%			14.40%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%			87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53.15%		54.15%			54.65%					
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.10%		95.20%			95.30%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67.67%		67.97%			68.17%					
			Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama	65%		70%			75%					
			Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%			75%					
1	1.1.20.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	100	47.500.000	440 orang , 2 kegiatan	49.500.000	40.000.000	100	51.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	40.000.000
2	1.1.20.4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	100	446.000.000	450 orang	468.000.000	289.000.000	100	489.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	289.000.000
3	1.1.20.14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	100	328.000.000	400 orang	343.000.000	302.600.000	100	359.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	302.600.000
4	1.1.20.17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	100	21.000.000	9 Pengawas	22.000.000	29.000.000	100	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	29.000.000
5	1.1.20.36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75	63.000.000	75 orang	66.000.000	58.000.000	75	69.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	58.000.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
6	1.1.20.52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	100	155.000.000	200 orang terdiri dari unsur PKBM, KB, Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	165.000.000	140.451.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	140.451.000
7	1.1.20.57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10	70.000.000	1 kegiatan, 10 cabang lomba, 100 peserta	73.500.000	62.472.000	10	77.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	62.472.000
8	1.1.20.74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru			150 guru		46.000.000	150	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	46.000.000
9	1.1.20.75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK			73 Kepala Sekolah TK		63.502.000	73	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	63.502.000
10	1.1.20.59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	100	113.000.000	160 pendidik dan tenaga kependidikan formal	118.000.000	80.000.000	100	123.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	80.000.000
11	1.1.20.61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100	46.000.000	100%	49.000.000	37.200.000	100	51.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	37.200.000
12	1.1.20.70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	100	144.000.000	12 bulan, 300 peserta	151.000.000	179.104.000	300	158.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	179.104.000
13	1.1.20.80	Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG)					187.500.000	25	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	187.500.000
14	1.1.20.65	Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidikan PAUD	600	720.000.000	600	800.000.000	0	600	850.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD	0

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
15	1.1.20.76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru			6 cabang lomba (1 tematik, 5 mapel)		53.030.000	140	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	53.030.000
16	1.1.20.19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22	56.000.000	22 Kepala SMP	59.000.000	42.840.000	22	62.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	42.840.000
17	1.1.20.18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	2	215.000.000	77 Kepala SD	225.000.000	78.677.000	77	235.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	78.677.000
18	1.1.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik					40.000.000	200	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	40.000.000
19	1.1.20.79	Pengembangan Karakter SDM Guru	Raiso pemenuhan kebutuhan layanan tenaga edukatif					183.900.000	200 guru	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana	183.900.000
	1.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.777.530.000		1.860.980.000	2.241.533.000		1.940.580.000				
			Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :	46		48			50					
			a. Propinsi	31 pelajar		32 pelajar			33 pelajar					
			b. Nasional	15 pelajar		16 pelajar			17 pelajar					
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90%		92%			94%					
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	97%		98%			99%					
			Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	45%		60%			75%					
			Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	35%		50%			65%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
1	1.1.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100	15.000.000	100	16.500.000	44.192.000	100	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	44.192.000
2	1.1.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan	100	11.550.000	100	12.000.000	10.571.000	100	12.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	10.571.000
3	1.1.22.11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	100	172.000.000	3 PSB : TK, SD, SMP	180.000.000	170.000.000	100	188.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM	170.000.000
4	1.1.22.13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100	206.380.000	100	206.380.000	72.079.000	100	206.380.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD	72.079.000
5	1.1.22.22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100	98.600.000	100	98.600.000	52.510.000	100	98.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	52.510.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
6	1.1.22.23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak pelajar di lingkungan kota Magelang	100	48.000.000	4 kegiatan dan 11 sidak	50.000.000	61.450.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	61.450.000
7	1.1.22.24	Pelaksanakan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	100	85.000.000	1 kegiatan	90.000.000	99.851.000	100	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	99.851.000
8	1.1.22.25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84	32.000.000	84 sekolah	33.500.000	51.846.000	84	35.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	51.846.000
9	1.1.22.26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25	33.000.000	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	35.000.000	21.657.000	25	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	21.657.000
10	1.1.22.29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	12	40.000.000	1 kegiatan	42.500.000	68.941.000	12	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	68.941.000
11	1.1.22.30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersusunnya buku selayang pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	27.000.000	50 buku	29.000.000	25.000.000	100	31.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	25.000.000
12	1.1.22.33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	100	51.500.000	1 Kepsek TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	53.000.000	21.978.000	100	55.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	21.978.000
13	1.1.22.35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	100	94.500.000	1300 guru PNS	99.000.000	76.000.000	100	103.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	76.000.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
14	1.1.22.38	Manajemen pendataan pendidikan	Sistem informasi berbasis masyarakat	100	65.000.000	100	67.500.000	35.000.000	100	70.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	
15	1.1.22.41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	100	17.000.000	225 buah	18.000.000	11.119.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	11.119.000
16	1.1.22.42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	100	35.000.000	4 kegiatan	37.500.000	47.260.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	47.260.000
17	1.1.22.47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	100	60.000.000	3 kegiatan	62.500.000	150.000.000	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	150.000.000
18	1.1.22.49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	20	40.000.000	50 orang	42.500.000	33.110.000	20	44.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	33.110.000
19	1.1.22.52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	100	16.000.000	100	17.500.000	15.271.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	15.271.000
20	1.1.22.77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100	450.000.000	100	475.000.000	450.000.000	100	490.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pemberantasan Korupsi	450.000.000
21	1.1.22.58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%		56.092.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	56.092.000
22	1.1.22.56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan		44.702.000	3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	44.702.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
23	1.1.22.59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan		87.308.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	87.308.000
24	1.1.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	180.000.000	2	195.000.000	268.442.000	2	215.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	268.442.000
25	1.1.22.57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya monev bosda			4 kegiatan		146.317.000	100%	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	146.317.000
26	1.1.22.54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)			2 lomba, 1 sosialisasi		49.010.000	3 kegiatan	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak	49.010.000
27	1.1.22.80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP			1 kegiatan, 100 peserta		50.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	50.000.000
28	1.1.22.78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%		21.827.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	21.827.000
	1.1.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			1.871.500.000		2.003.000.000	2.723.955.000		2.135.000.000				
			Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	45%		50%			55%					
1	1.1.23.1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	6	32.500.000	1 kegiatan	35.000.000	34.426.000	6	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	34.426.000
2	1.1.23.5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	100	90.000.000	4800 peserta	94.500.000	90.443.000	100	97.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	90.443.000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
3	1.1.23.9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	100	43.000.000	150 siswa	46.000.000	27.039.000	100	48.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	27.039.000
4	1.1.23.11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat, lomba taman sekolah	100	45.500.000	2 kegiatan	49.000.000	138.470.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	138.470.000
5	1.1.23.17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100	77.000.000	100	79.000.000	170.425.000	100	81.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	170.425.000
6	1.1.23.18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	100	165.000.000	4800 peserta	178.500.000	224.404.000	100	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	224.404.000
7	1.1.23.19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	100	101.000.000	3300 Peserta	105.000.000	312.560.000	100	107.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	312.560.000
8	1.1.23.20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300	142.500.000	6600 Peserta	152.500.000	466.357.000	3300	162.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	466.357.000
9	1.1.23.21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	100	25.000.000	2 kegiatan	27.500.000	25.000.000	100	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	25.000.000
10	1.1.23.27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	4	420.000.000	5 kegiatan	441.000.000	618.299.000	4	463.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	618.299.000
11	1.1.23.28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	100	250.000.000	120	275.000.000	120.280.000	125	300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	120.280.000
12	1.1.23.31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	100	60.000.000	2 event	65.000.000	37.090.000	100	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM	37.090.000
13	1.1.23.32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB	2	95.000.000	90 siswa	105.000.000	0	2	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	0
14	1.1.23.33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	100	325.000.000	2 kegiatan, 680 peserta	350.000.000	392.191.000	100	375.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	392.191.000
15	1.1.23.34	Lomba Drum Band	meningkatnya mutu pendidikan dasar			500 orang		0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana	0

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
16	1.1.23.25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP			1 kegiatan		66.971.000	1 kegiatan	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity	66.971.000
17	1.1.23.35	Pembinaan mental siswa dan guru (ESQ)	Terlaksananya pembinaan mental siswa dan Guru (ESQ)			2 kegiatan		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	0
	1.1.25	Program Pendidikan Berkelanjutan			0		0	315.000.000		0				
			Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	92.74%		100%			100%					
			Meningkatkan nasionalisme dan pendidikan karakter bagi siswa	100%	150.000.000									
1	1.1.25.3	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa			100%		150.000.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD	150.000.000
2	1.1.25.1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya kemah kebangsaan siswa			1 kegiatan		165.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	165.000.000
	1.1.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			0		0	0		0				
1	1.1.26.41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	151.200.000,00
2	1.1.26.40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	92.000.000,00
3	1.1.26.22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Cacaban 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	132.800.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
4	1.1.26.21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Cacaban 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	160.000.000,00
5	1.1.26.20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terlasksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Cacaban 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	277.600.000,00
6	1.1.26.38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	144.800.000,00
7	1.1.26.68	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	78.400.000,00
8	1.1.26.7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kramat 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	75.200.000,00
9	1.1.26.6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kramat 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	104.000.000,00
10	1.1.26.8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kramat 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	111.200.000,00
11	1.1.26.9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kramat 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	84.000.000,00
12	1.1.26.10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kramat 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	168.000.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
13	1.1.26.11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Potrobangsan 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	143.200.000,00
14	1.1.26.12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Potrobangsan 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	100.000.000,00
15	1.1.26.13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Potrobangsan 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	132.800.000,00
16	1.1.26.14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Potrobangsan 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	124.800.000,00
17	1.1.26.15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Wates 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	59.200.000,00
18	1.1.26.16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Wates 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	116.800.000,00
19	1.1.26.17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Wates 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	60.000.000,00
20	1.1.26.18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Wates 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	140.800.000,00
21	1.1.26.19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Wates 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	128.800.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
22	1.1.26.1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kedungsari 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	144.000.000,00
23	1.1.26.2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kedungsari 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	132.000.000,00
24	1.1.26.39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	150.400.000,00
25	1.1.26.3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kedungsari 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	102.400.000,00
26	1.1.26.4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kedungsari 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	61.600.000,00
27	1.1.26.5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kedungsari 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	100.000.000,00
28	1.1.26.37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magelang 2/7	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	153.600.000,00
29	1.1.26.33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magelang 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	131.200.000,00
30	1.1.26.34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magelang 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	59.200.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
31	1.1.26.35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magelang 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	286.400.000,00
32	1.1.26.36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magelang 6	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	304.000.000,00
33	1.1.26.25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	141.600.000,00
34	1.1.26.26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 24	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	137.600.000,00
35	1.1.26.27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	113.600.000,00
36	1.1.26.28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	314.400.000,00
37	1.1.26.29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 6	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	284.800.000,00
38	1.1.26.30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%		0	1 Tahun	0	SD Negeri Gelangan 7	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	121.600.000,00
39	1.1.26.42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	72.800.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
40	1.1.26.43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	62.400.000,00
41	1.1.26.23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Cacaban 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	100.800.000,00
42	1.1.26.24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Cacaban 6	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	140.800.000,00
43	1.1.26.44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	119.200.000,00
44	1.1.26.45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	155.200.000,00
45	1.1.26.46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	126.400.000,00
46	1.1.26.47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	148.000.000,00
47	1.1.26.31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kemirirejo 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	157.600.000,00
48	1.1.26.32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Kemirirejo 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
49	1.1.26.51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	143.200.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
50	1.1.26.52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	88.000.000,00
51	1.1.26.53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	139.200.000,00
52	1.1.26.54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	144.800.000,00
53	1.1.26.55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	116.800.000,00
54	1.1.26.56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 1	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	134.400.000,00
55	1.1.26.57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 3	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	127.200.000,00
56	1.1.26.58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 4	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	148.800.000,00
57	1.1.26.59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 5	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	144.800.000,00
58	1.1.26.60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 6	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	145.600.000,00
59	1.1.26.62	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	154.400.000,00

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS	RASIONALISASI2
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
60	1.1.26.61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Tidar 7	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	113.600.000,00
61	1.1.26.63	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	124.000.000,00
62	1.1.26.64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	707.000.000,00
63	1.1.26.65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	728.000.000,00
64	1.1.26.66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	697.000.000,00
65	1.1.26.67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	529.000.000,00
66	1.1.26.69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	677.000.000,00
67	1.1.26.70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	531.000.000,00
68	1.1.26.71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	543.000.000,00
69	1.1.26.72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	672.000.000,00
70	1.1.26.73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1 Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	626.000.000,00
71	1.1.26.74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%		0	1Tahun	0	Kota Magelang	DAK	SDGs	599.000.000,00
72	1.1.26.48	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magersari 1	DAK	SDGs, Penanggulangan	558.000.000,00
73	1.1.26.49	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magersari 2	DAK	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	546.000.000,00
74	1.1.26.50	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %		0	1 Tahun	0	SD Negeri Magersari	DAK	SDGs, Penanggul	680.000.000,00
			TOTAL		**40.439.495.000**		**41.243.194.000**	**59.292.405.500**		**42.289.406.000**				**70.379.294.000**

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Kesehatan
URUSAN : Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.121.096.000		2.333.199.000	2.117.456.000		2.566.511.000	1.965.710.000			
1	1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang terkelola	Rp 5	3.498.000	5 item	3.847.000	3.315.000	5 item	4.231.000	3.315.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp 12	274.560.000	12 bulan	302.016.000	265.980.000	12 bulan	332.217.000	265.980.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	Rp 105	64.735.000	52 unit	71.208.000	24.000.000	55 unit	78.328.000	24.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	Rp 38	461.244.000	33 orang	507.368.000	382.896.000	33 orang	558.104.000	340.098.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan dan jasa kebersihan	Rp 25	239.625.000	12 bulan	263.587.000	58.029.000	22 item, 2 orang	289.945.000	58.029.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	Rp 6	27.269.000	10 item	29.995.000	15.000.000	11 item	32.994.000	15.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	Rp 60	44.721.000	44 item	49.193.000	20.000.000	60 item	54.112.000	20.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang	Rp 17	14.954.000	12 item	16.449.000	8.000.000	17 item	18.093.000	8.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
9	1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	Rp 10	11.011.000	9 item	12.112.000	10.000.000	10 item	13.323.000	10.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Rp 12	9.886.000	12 bulan	10.874.000	11.400.000	12 bulan	11.961.000	11.400.000	DKK dan UPTD	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	1.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	Rp 12	11.721.000	12 bulan	12.893.000	11.389.000	12 bulan	14.182.000	11.389.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	Rp 16	119.656.000	16 item	131.621.000	60.000.000	16 item	144.783.000	54.672.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	1.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Rp 210	282.477.000	134 kali	310.724.000	254.770.000	215 kali	341.796.000	151.150.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	1.2.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	Rp 33	531.313.000	45 orang	584.444.000	972.568.000	33 orang	642.888.000	972.568.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	1.2.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	Rp 12	24.426.000	12 bulan	26.868.000	20.109.000	12 bulan	29.554.000	20.109.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			162.989.000		179.287.000	597.162.000		197.214.000	454.681.000			
			Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%		100%			100%					
1	1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Rp 4	47.836.000	4 gedung	52.619.000	177.162.000	4 gedung	57.880.000	164.681.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Rp 30	30.761.000	56 unit	33.837.000	25.000.000	57 unit	37.220.000	15.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
3	1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Rp 80	84.392.000	65 unit	92.831.000	45.000.000	65 unit	102.114.000	25.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.2.2.16	Perencanaan Bangunan Gedung	Adanya dokumen perencanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan					0	1 paket	0	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Master plan Smartcity
5	1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berkala kendaraan dinas			52 unit		350.000.000	55 unit	0	250.000.000	DKK	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			47.575.000		52.332.000	37.229.000		57.564.000	37.229.000			
1	1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	Rp 50	8.250.000	50 orang	9.075.000	8.650.000	50 Orang	9.982.000	8.650.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	Rp 450	30.800.000	300 orang	33.880.000	24.122.000	450 PAK (Penetapan Angka Kredit)	37.268.000	24.122.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Master plan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
3	1.2.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah Rekomendasi izin praktek yang diterbitkan	Rp 150	8.525.000	400 dokumen SIP	9.377.000	4.457.000	450 Rekomendasi Surat Izin Praktek	10.314.000	4.457.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			69.465.000		76.411.000	47.698.000		84.051.000	32.990.000			
1	1.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang dibuat	Rp 4	24.714.000	4 dokumen	27.186.000	9.367.000	4 dokumen	29.904.000	5.367.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	1.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja OPD yang disusun	Rp 2	9.922.000	2 dokumen	10.914.000	5.357.000	2 dokumen	12.005.000	5.357.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	Rp 2	28.282.000	2 dokumen	31.110.000	17.392.000	2 dokumen	34.221.000	10.458.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	1.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP OPD yang disusun	Rp 1	6.547.000	1 dokumen	7.201.000	7.535.000	1 dokumen	7.921.000	5.735.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.2.6.28	Penyusunan database bidang kesehatan	Tersusunnya buku profil kesehatan dan SPM bidang kesehatan			2 dokumen		8.047.000	2 dokumen	0	6.073.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			2.509.133.000		2.760.045.000	3.975.855.000		3.036.048.000	3.242.533.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	1.2.15.1	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli	Rp 5	2.310.000.000	5 paket	2.541.000.000	3.439.711.000	5 paket	2.795.100.000	2.747.052.000	Dinas Kesehatan	DAK, DAU, DBHCHT	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	1.2.15.4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta sosialisasi untuk tenaga farmasi di RS, Apotek dan Klinik	Rp 50	8.800.000	50 orang	9.680.000	8.700.000	50 tenaga farmasi	10.648.000	8.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.2.15.5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina	Rp 100	26.752.000	60 orang	29.427.000	9.515.000	60 pengelola obat	32.369.000	9.515.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
4	1.2.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi	Rp 12	1.760.000	4 laporan	1.936.000	12.197.000	4 laporan	2.129.000	12.197.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.2.15.7	Pengadaan bahan kimia	Tersedianya bahan klimia	Rp 1	135.927.000	1 paket	149.519.000	422.807.000	1 paket	164.471.000	392.144.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.2.15.8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	Rp 340	25.894.000	12 bulan	28.483.000	28.925.000	340 item	31.331.000	27.925.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.2.15.9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Presentase Instalasi Farmasi Kabupaten Kota yang menerapkan aplikasi logistik : Ketersediaan Obat di Puskesmas			12 bulan		54.000.000	95 persen	0	45.000.000	Instalasi farmasi	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			15.187.904.000		14.586.721.000	21.897.793.000		14.882.694.000	17.080.918.000			
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					
1	1.2.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah Peserta Sosialisasi	Rp 52	20.350.000	56 orang	22.385.000	5.824.000	56 orang (51 petugas kebersihan keluaran dan 5 petugas TPA)	24.623.000	5.824.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	Rp 380	60.419.000	400 orang	66.460.000	520.103.000	196 sekolah, 350 siswa, 50 guru	73.106.000	520.103.000	Kota Magelang	DBHCHT	SDGs
3	1.2.16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	Rp 30	12.952.000	30 orang	14.247.000	33.000.000	Rp 80	15.672.000	33.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
4	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan Pra Rumah sakit (P3K)	Rp 180	66.102.000	180 kali	72.712.000	100.000.000	200 pasien/orang	79.983.000	100.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
5	1.2.16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pengambilan sample lingkungan dan reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air kolam renang, alat medis dan udara	Rp 2.000	313.500.000	2000 sampel	344.850.000	343.715.000	Rp 2.500	379.335.000	343.715.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
6	1.2.16.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	Rp 3	26.400.000	3 kegiatan	29.040.000	22.878.000	3 kegiatan	31.944.000	22.878.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	1.2.16.21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Adanya posko kesehatan di Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Rp 1	25.543.000	2 Posko	28.097.000	37.466.000	2 kegiatan	30.907.000	37.466.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	1.2.16.22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah Peserta Sosialisasi	Rp 100	13.061.000	100 orang	14.367.000	18.774.000	121 orang	15.804.000	18.774.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Memperteg as Skenario Kemitraan
10	1.2.16.23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	Rp 285	38.500.000	383 orang	42.350.000	51.124.000	375 orang	46.585.000	23.347.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
11	1.2.16.24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	Rp 7	2.970.000	1 laporan	3.267.000	2.068.000	7 Faskes swasta	3.593.000	2.068.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	1.2.16.25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	Rp 5	2.662.000	1 laporan	2.928.000	2.758.000	12 bulan	3.221.000	2.758.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
13	1.2.16.28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Jumlah Peserta Sosialisasi	Rp 100	16.500.000	1 kegiatan untuk 50 orang	18.150.000	10.113.000	170 (120 Saple, 50 orang)	19.965.000	10.113.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program 100-0-100
14	1.2.16.36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	Rp 85	49.500.000	29 unit	54.450.000	78.715.000	Rp 30	59.895.000	78.715.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
15	1.2.16.38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	Rp 400	76.840.000	2500 sampel	84.524.000	230.108.000	Rp 2.700	92.977.000	230.108.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
16	1.2.16.42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terpeliharanya kesehatan masyarakat Kota Magelang	Rp 24.000	11.138.797.000	Rp 25.000	11.138.797.000	7.938.840.000	Rp 27.500	11.138.767.000	7.079.250.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
17	1.2.16.44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kota Magelang	Rp 12	146.164.000	2 kegiatan	160.780.000	542.413.000	12 bulan	176.858.000	515.433.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Master plan Smartcity
18	1.2.16.45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	terlaksanannya raker pemb kesda	Rp 1	15.163.000	2 kegiatan	16.679.000	12.578.000	1 kegiatan	18.347.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
19	1.2.16.48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	Rp 5	965.000.000	5 Puskesmas	965.000.000	3.250.428.000	5 Puskesmas	965.000.000	3.250.427.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
20	1.2.16.52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatkan Keselamatan Ibu Dan bayi	Rp 12	162.896.000	12 bulan	174.595.000	128.896.000	12 bulan	187.465.000	128.896.000	Rumah Bersalin Paten	Dana Alokasi Umum	SDGs
21	1.2.16.53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Sosialisasi PTM	Rp 190	101.935.000	692 orang, 70 Sekolah	112.128.000	131.776.000	Rp 847	123.341.000	111.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program priorita
22	1.2.16.54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa	Rp 60	12.650.000	150 Orang	13.915.000	39.732.000	Rp 363	15.306.000	30.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
23	1.2.16.56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Pelaksanan kegiatan UKM di Kota Magelang			12 bulan		697.182.000	12 bulan	0	496.498.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs
24	1.2.16.57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya askep Paska Keguguran, review kompetensi perawat, Pelatihan dan pendampingan Perkesmas, PIS PK			88 Orang		41.308.000	138 orang	0	41.308.000	Kota Magelang	DBHCHT	SDGs
25	1.2.16.50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya prasarana dan alkes klinik Kesehatan Kota Magelang			1 paket		1.500.000.000	3 (klinik labkes dan RS Tipe c dan D)	0	0	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
26	1.2.16.20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Pengadaan Ambulance, Genset, Alat Kesehatan			3 paket		4.390.222.000	3 paket	0	3.677.217.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
27	1.2.16.61	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)	Terlaksananya kegiatan BOK di Kota Magelang			12 bulan		250.000.000	12 bulan	0	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Penanggulangan Kemiskinan
28	1.2.16.62	Pelayanan Kesehatan usia Produktif (15 - 59 tahun)	Terlaksana Skrining pada semua usia produktif					201.865.000	100 %	0	71.220.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			105.875.000		116.462.000	186.481.000		128.108.000	134.602.000			
			Cakupan pengawasan obat dan makanan	70%		72%			74%					
1	1.2.17.1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah, makanan dan minuman menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2020 yang diuji	Rp 500	28.600.000	550 sampel	31.460.000	26.800.000	550 sampel	34.606.000	26.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	Rp 100	55.000.000	550 sampel	60.500.000	136.879.000	Rp 100	66.550.000	85.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
3	1.2.17.7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang dibina	Rp 60	22.275.000	PIRT 70	24.502.000	22.802.000	60 PIRT	26.952.000	22.802.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			779.265.000		857.190.000	614.602.000		942.905.000	472.830.000			
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%			98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan promosi kesehatan melalui media	Rp 2.160	182.600.000	1820 orang	200.860.000	195.113.000	1820 orang	220.946.000	160.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.19.10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	Rp 12	60.478.000	12 bulan	66.525.000	66.940.000	12 bulan	73.177.000	56.000.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	1.2.19.11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PHBS	Rp 34.000	131.835.000	35000 Rumah Tangga	145.018.000	114.350.000	35000 RT	159.519.000	114.350.000	Kelurahan	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
4	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya Pembinaan da Pelatihan kader posyandu dan penyehat tradisional (Hatra)	Rp 150	167.681.000	2 kegiatan	184.449.000	89.253.000	250 orang	202.893.000	89.253.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
5	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	Rp 40	167.681.000	17 FKD, 1 Kali Outbond	184.449.000	77.820.000	760 orang	202.893.000	53.227.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.2.19.19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi informasi jaminanan kesehatan masyarakat	Rp 510	68.990.000	595 orang	75.889.000	71.126.000	595 orang	83.477.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			202.175.000		222.391.000	411.565.000		244.628.000	642.942.000			
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Rp 100		Rp 100			Rp 100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Rp 100		Rp 100			Rp 100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			<0.31					
1	1.2.20.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, anemia, antropometri, pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk	Rp 542	160.143.000	850 Balita	176.157.000	203.662.000	542 orang	193.772.000	160.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
2	1.2.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pembinaan Kader Masyarakat Sadar Gizi	Rp 70	18.033.000	70 orang	19.836.000	13.171.000	70 orang	21.819.000	13.171.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
3	1.2.20.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas dan posyandu yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Rp 5	23.999.000	198 Kader Posyandu	26.398.000	27.875.000	198 kader	29.037.000	21.834.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
4	1.2.20.8	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	Banyaknya obat gizi yang dibeli			6 paket		166.857.000	5 jenis obat gizi	0	447.937.000	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	SDGs
	1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			117.127.000		128.838.000	81.214.000		141.721.000	67.680.000			
			Persentase rumah sehat	84,3%		84,8%			85%					
1	1.2.21.5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pengambilan sampel	Rp 166	39.998.000	158 titik	43.997.000	33.534.000	340 (182 orang dan 158 sampel)	48.396.000	20.000.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
2	1.2.21.6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi	Rp 850	77.129.000	170 orang	84.841.000	47.680.000	17 Kelurahan	93.325.000	47.680.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program 100-0-100
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1.114.170.000		1.225.584.000	836.558.000		1.348.137.000	2.238.186.000			
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	Rp 100		Rp 100			Rp 100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	Rp 100		Rp 100			Rp 100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	Rp 90		Rp 90			Rp 90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Rp 100	219.518.000	100 lokus	241.469.000	220.000.000	Rp 100	265.615.000	175.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
2	1.2.22.6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantau jentik di 17 kelurahan dan 5 sosialisasi	Rp 4	132.591.000	2720 rumah	145.850.000	92.025.000	Rp 2.720	160.435.000	92.025.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
3	1.2.22.8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	Rp 1.880	143.545.000	1880 anak	157.899.000	67.489.000	Rp 2.030	173.688.000	64.073.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
4	1.2.22.9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	Rp 200	20.787.000	200 kasus	22.865.000	12.000.000	Rp 200	25.151.000	5.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
5	1.2.22.12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji yang	Rp 2	6.499.000	300 orang	7.148.000	32.215.000	Rp 2	7.862.000	32.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi	SDGs
6	1.2.22.13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	Rp 10.500	76.562.000	10500 anak	84.218.000	72.875.000	Rp 10.500	92.639.000	72.875.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
7	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	Rp 12	423.362.000	12 bulan	465.698.000	262.033.000	Rp 12	512.267.000	262.033.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	1.2.22.18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	Rp 50	91.306.000	110 orang	100.437.000	41.421.000	Rp 50	110.480.000	41.421.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
9	1.2.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersedianya data TB yang valid dan akurat			4 dokumen		36.500.000	data yang valid dan akurat	0	36.500.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Program prioritas RPJM
10	1.2.22.19	Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK)	Alat penyimpanan vaksin yang dibeli			21 unit		0	Rp 21	0	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	SDGs
11	1.2.22.20	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)	Banykanya bahan habis pakai pemeriksaan HIV yang terbeli			1 paket		0	1 paket	0	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	SDGs
	1.2.22.21	Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM							2 paket		315.000.000	Kota Magelang	DAK	
	1.2.22.22	Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM							2 paket		1.142.044.000	Kota Magelang	DAK	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	1.2.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			861.311.000		1.546.451.000	1.462.705.000		1.342.185.000	1.557.614.000			
			Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	82.50%		87,5%			91,25%					
			Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	60%		80%			100%					
			Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	Rp 80		Rp 80			Rp 80					
			Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	Rp 100		Rp 100			Rp 100					
			Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	80%		100%			100%					
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Rp 75		Rp 80			Rp 85					
1	1.2.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya desk sarana pelayanan kesehatan yang di data	Rp 60	8.800.000	1 dokumen	9.680.000	10.777.000	60 Sarkes	10.648.000	10.777.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.23.8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan	Rp 12	39.050.000	4 Laporan	42.955.000	34.973.000	12 Sarkes	47.250.000	34.973.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
3	1.2.23.9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	Rp 15	30.250.000	15 Tenaga Kesehatan Teladan	33.275.000	31.949.000	15 Nakes	36.602.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
4	1.2.23.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Terlaksananya monev dana kapitasi	Rp 5	70.760.000	4 Laporan	77.836.000	31.337.000	104 orang	85.620.000	31.337.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	1.2.23.13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Terakreditasi Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas	Rp -	0	5 Unit	599.009.000	815.000.000	1 labkesda	300.000.000	989.858.000	Kota Magelang	DAU dan DAK	Program prioritas RPJM
6	1.2.23.14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan BLUD	Rp 5	201.940.000	5 Puskesmas	222.134.000	86.394.000	5 puskesmas	244.347.000	86.394.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
7	1.2.23.15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas	Rp 1	23.100.000	5 Puskesmas	25.410.000	23.288.000	5 Puskesmas	27.951.000	23.288.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	1.2.23.16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah pengadaan barang jasa	Rp 12	487.411.000	Kegiatan	536.152.000	428.987.000	12 bulan	589.767.000	380.987.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.2.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			11.385.000		12.523.000	13.000.000		13.775.000	13.000.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%		100%			100%					
			Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%		100%			100%					
			Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%		15%			15%					
1	1.2.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk Kota Magelang	Rp 55	11.385.000	4 laporan	12.523.000	13.000.000	220 orang	13.775.000	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program priorita
	1.2.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			0		0	323.325.000		0	1.617.507.000			
	1.2.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Gelangan					1.315.907.000	1 paket		1.315.907.000	Kota Magelang	DBHCHT	
1	1.2.25.26	Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya	Adanya dokumen perencanaan pembangunan Puskesmas Magelang Utara					221.725.000	1 paket	0	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Master plan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2	1.2.25.27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)	Pengadaan alat kesehatan Pendukung Pelayanan Kegawatdaruratan			1 unit		101.600.000	1 paket	0	101.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Master plan Smartcity
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			72.325.000		79.557.000	25.000.000		87.513.000	25.000.000			
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%		64,71%			70,59%					
1	1.2.28.2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi dan monev penyakit menular	Rp 720	72.325.000	680 orang, dan 30 petugas	79.557.000	25.000.000	Rp 340	87.513.000	25.000.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	Akomodasi
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			101.447.000		111.591.000	106.181.000		122.749.000	34.874.000			
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK dan 1 lomba balita sehat	Rp 160	22.126.000	160 orang, 34 Balita	24.338.000	36.181.000	160 orang 34 balita	26.771.000	34.874.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2	1.2.29.9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	Rp 3	79.321.000	3 paket	87.253.000	70.000.000	3 paket	95.978.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			32.430.000		35.672.000	151.293.000		39.238.000	22.514.000			
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	Rp 5	2.769.000	5 Laporan	3.045.000	3.143.000	5 laporan	3.349.000	2.514.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
2	1.2.30.8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Penyuluhan Lansia	Rp 125	29.661.000	500 lansia, 40 kader	32.627.000	148.150.000	240 orang	35.889.000	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.2.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			51.095.000		56.204.000	55.697.000		61.823.000	52.705.000			
			Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%		88%			89%					
1	1.2.31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	Rp 70	17.270.000	80 orang	18.997.000	21.372.000	80 sampel	20.896.000	20.322.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2	1.2.31.3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya Pengawasan Makanan Di Rumah Makan dan Restoran	Rp 30	7.150.000	30 restauran	7.865.000	7.108.000	58 (30 Restoran , 28 orang)	8.651.000	5.166.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.2.31.5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Pemeriksaan dan Sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan	Rp 70	26.675.000	80 IRTP	29.342.000	27.217.000	80 PIRT	32.276.000	27.217.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			907.381.000		998.119.000	670.259.000		1.097.930.000	549.518.000			
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	Rp 180	108.720.000	380 orang	119.592.000	95.696.000	180 orang	131.552.000	66.240.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.2.32.5	Pembinaan dukun bayi	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	Rp 15	6.661.000	12 orang	7.327.000	7.184.000	15 orang	8.059.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.2.32.6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	Rp 4	79.480.000	4 kali	87.428.000	46.000.000	4 kali	96.170.000	28.778.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas
4	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Terlaksananya penyuluhan kelurahan peserta penyuluhan	Rp 17	250.496.000	3 kali	275.546.000	35.351.000	3 kegiatan	303.100.000	0	Kecamatan di wilayah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
5	1.2.32.8	Jaminan Persalinan	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi penduduk miskin	Rp 300	462.024.000	450 orang	508.226.000	486.028.000	115 ibu hamil	559.049.000	454.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			0		0	0		0	11.429.195.000			
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA		AA			AA					
	1.2.33.5	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan							12 bulan		1.502.000.000			
	1.2.33.6	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jurangombo							12 bulan		1.354.000.000			
	1.2.33.7	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah							12 bulan		1.655.200.000			
	1.2.33.8	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kerkopan	Meningkatnya mutu pelayanan						12 bulan		937.663.000			
	1.2.33.9	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	Meningkatnya mutu pelayanan				1.354.000.000		12 bulan		1.980.332.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF								LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020	RASIONALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	1.2.33.10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D	Rumah Sakit type D dapat beroperasi dengan baik			9 bulan		0	12 bulan	0	4.000.000.000	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			0		0	0		0	36.000.000.000			
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%		30%			40%					
1	1.2.26.1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya pembangunan RS type C					0	1 paket	0	36.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		24.454.148.000		25.378.577.000	33.611.073.000		26.394.794.000	**77.672.228.000**			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

URUSAN : Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			50.000.000.000		55.000.000.000	25.000.000.000		60.000.000.000			
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%		30%			40%				
Rp 1	1.2.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	Rp 2	50.000.000.000	Rumah sakit Sehat dengan Nilai A	55.000.000.000	25.000.000.000	Rp 3	60.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			150.000.000.000		155.000.000.000	160.000.000.000		160.000.000.000			
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA		AA			AA				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
Rp 1	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	Rp 1	150.000.000.000	Rumah sakit Sehat dengan Nilai A	155.000.000.000	160.000.000.000	Rp 1	160.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
			TOTAL		200.000.000.000		210.000.000.000	185.000.000.000		220.000.000.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN : PerPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.246.150.000**		**1.368.336.000**	**1.494.014.000**		**1.494.172.000**			
1	1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya administrasi surat menyurat	12	200.000	12 Bulan	220.000	100.000	12 bulan	242.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	171.800.000	12 Bulan	188.760.000	363.000.000	12 bulan	207.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1	28.677.000	1 Kegiatan	31.544.000	45.050.000	1 Kegiatan	34.699.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	53.250.000	12 Bulan	58.575.000	74.580.000	12 bulan	64.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa pengelola keuangan	12	294.100.000	12 bulan	325.000.000	315.011.000	12 bulan	350.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	142.644.000	12 Bulan	156.908.000	170.000.000	12 bulan	172.599.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	60.000.000	12 Bulan	66.000.000	25.878.000	12 bulan	72.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	41.801.000	12 Bulan	45.981.000	18.397.000	12 bulan	50.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12	14.000.000	12 Bulan	15.400.000	8.398.000	12 bulan	16.940.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12	3.960.000	12 Bulan	4.356.000	3.000.000	12 bulan	4.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
11	1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas	12	2.800.000	12 Bulan	3.080.000	1.860.000	12 bulan	3.388.000	DPU Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12	51.123.000	12 Bulan	56.235.000	33.562.000	12 bulan	61.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	1.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12	299.035.000	12 Bulan	328.938.000	213.360.000	12 bulan	361.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	1.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga honorer daerah	12	45.792.000	12 bulan	50.371.000	210.892.000	12 bulan	55.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	1.3.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian	12	36.968.000	12 Bulan	36.968.000	10.926.000	5 Kegiatan	36.968.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.3.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**993.158.000**		**1.090.611.000**	**23.650.440.000**		**1.199.619.000**			
	1.3.2.03	Pembangunan Gedung Kantor						23.000.000.000					
1	1.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	300.000.000	12 Bulan	330.000.000	185.440.000	12 bulan	363.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	517.147.000	12 Bulan	568.000.000	325.000.000	12 bulan	625.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	12.193.000	12 Bulan	13.412.000	5.000.000	12 bulan	14.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12	15.430.000	12 Bulan	16.973.000	15.000.000	12 bulan	18.670.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.3.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12	138.388.000	12 bulan	152.226.000	110.000.000	12 bulan	167.449.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.3.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	12	10.000.000	1 paket	10.000.000	10.000.000	1 paket	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.3.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**138.194.000**		**139.394.000**	**105.000.000**		**140.494.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	1.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4	44.035.000	4 dokumen	44.035.000	20.000.000	4 Dokumen	44.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1	7.500.000	1 dokumen	8.000.000	12.000.000	1 Dokumen	8.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1	8.500.000	1 dokumen	8.750.000	12.000.000	1 Dokumen	8.921.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2	26.559.000	2 dokumen	26.559.000	22.000.000	2 Dokumen	26.559.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	2	44.321.000	24 dokumen	44.771.000	30.000.000	24 Dokumen	45.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersediany LKj IP	1	7.279.000	8 buku	7.279.000	9.000.000	8 Buku	7.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.3.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**			**474.808.000**		**500.000.000**	**542.000.000**		**500.000.000**			
			Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%		86%			88%				
			Jumlah shipon yang dibangun	7		Rp 7			Rp 9				
1	1.3.16.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3	474.808.000	3 kecamatan	500.000.000	542.000.000	3 Kecamatan	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**		**6.900.000**	**25.000.000**		**6.900.000**			
			PERPUS		18,500,000		22,000,000			25,000,000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terkelola dan tersimpannya arsip	12	6.900.000	12 Bulan	6.900.000	25.000.000	12 bulan	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**			**900.000.000**		**915.000.000**	**3.918.000.000**		**930.000.000**			
1	1.3.18.3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	30428	900.000.000	12 bulan	915.000.000	882.000.000	Rp 32.340	930.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.3.18.73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	Terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik			5 ruas		3.036.000.000	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.18.102	Peningkatan Trotoar Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo	Tersedianya trotoar dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.18.104	Peningkatan Trotoar Jl. Gatot Subroto	Meningkatnya trotoar dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.18.103	Rehabilitasi/Peningkatan Jl. Kalibening I	Meningkatanya jalan dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.18.23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	1.3.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**			**81.507.000**		**100.000.000**	**325.000.000**		**100.000.000**			
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	84%		90%			90%				
1	1.3.24.10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	3	81.507.000	12 bulan	100.000.000	90.000.000	12 bulan	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.3.24.33	Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara	Tersedianya irigasi yang baik					235.000.000	1 paket	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.24.47	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota	Meningkatnya saluran irigasi dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.26	**Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**			**0**		**0**	**0**		**0**			
			Prosentase sungai dan suber daya air dalam keadaan baik	100%		100%			100%				
1	1.3.26.10	Pembangunan Talud Sungai	Terbangunnya talud Sungai Gandekan					0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi
	1.3.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**			**0**		**0**	**11.524.168.000**		**0**			
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	4 kawasan		4 kawasan			4 kawasan				
1	1.3.29.73	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana OLahraga			12 bulan		1.000.000.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	1.3.29.81	Pembangunan Gudang Canguk (Laboratorium)	Terbangunnya laboratorium					0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	1.3.29.69	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	terbangunnya tempat parkir di kawasan gunung tidar					0	100 persen	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	1.3.29.74	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya gerbang dan pagar stadion, lapangan tenis outdoor, dan jalan lingkar stadion (jogging track)			2 paket		0	2 paket	0	Kota Magelang	Banprov & DAU	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	1.3.29.67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Terbangunnya monumen satu tanah air satu bangsa					1.000.000.000	1 paket	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
6	1.3.29.82	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7)	Terbangunnya kolam renang					7.500.000.000	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
7	1.3.29.83	Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2)	Terbangunnya gardu pandang kawasan Gunung Tidar					2.024.168.000	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1.3.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**			**180.000.000**		**189.500.000**	**128.515.000**		**199.000.000**			
			Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%		76%			78%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	1.3.31.4	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	110	80.000.000	80 orang	85.000.000	44.456.000	80 Orang	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.31.5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	30	16.000.000	50 buku	17.000.000	22.012.000	50 Buku	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.31.6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	tersedianya buku profil penyedia jasa konstruksi	100	55.000.000	100 buku	57.500.000	0	100 Buku	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.31.2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12	29.000.000	12 bulan	30.000.000	38.282.000	12 bulan	31.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.31.1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Tersampaikannya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi			80 orang		23.765.000	80 Orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.33	**Program pengawasan jasa konstruksi**			**450.000.000**		**500.000.000**	**639.632.000**		**500.000.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%		25%			25%				
1	1.3.33.6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstuksi	12	450.000.000	12 Bulan	500.000.000	589.060.000	12 bulan	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pemberantasan Korupsi
2	1.3.33.3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi			1		24.572.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.33.7	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Terpenuhinya Nilai Taksiran Barang Milik Daerah			12 bulan		26.000.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.3.51	**Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong**			**0**		**0**	**705.000.000**		**0**			
1	1.3.51.11	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Wates	Meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan					0	1 paket	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.51.79	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama	Meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik					235.000.000	1 paket	0	Kawasan Jl. Rama	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.51.59	Peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Sumbing	Meningkatnya saluran drainase yang baik			200 m'		0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
4	1.3.51.64	Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)	Terpeliharanya saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
5	1.3.51.77	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Jaten	Meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kawasan Jl. Jaten	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.51.78	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rawapening	Meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik					0	1 paket	0	Kawasan Jl. Rawapening	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.51.52	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprapto	Meningkatnya saluran drainase yang baik,					235.000.000	1 paket	0	Kawasan Jl. Suprapto	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.51.58	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar	Meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan					0	1 paket	0	Jl. Teuku Umar	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
9	1.3.51.15	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan	Meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan					235.000.000	1 paket	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.51.55	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara	Meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan					0	1 paket	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.52	**Program Perencanaan Tata Ruang**			**600.734.000**		**440.000.000**	**976.466.000**		**560.000.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%		100%			100%				
			Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%		100%			100%				
			Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%		100%			100%				
			Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%			100%				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	0		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	0		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	0		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh										
			Rasio luas kawasan kumuh	0		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	0		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		Rp -			Rp -				
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		Rp -			Rp -				
1	1.3.52.25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	12	200.734.000	6 laporan	200.000.000	198.314.000	2 Laporan	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.52.18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah Raperda RDTR	5	400.000.000	2 raperda	240.000.000	363.203.000	3 Dokumen	360.000.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.52.7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang			2 dokumen RTBL Kawasan		414.949.000	3 Dokumen	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.3.53	**Program Pemanfaatan Ruang**			**95.000.000**		**72.000.000**	**264.155.000**		**99.200.000**			
			Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	25%		26%			27%				
			Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	6%		8%			10%				
1	1.3.53.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200	50.000.000	200 Rekomendasi Teknis	50.000.000	186.664.000	200 Rekomendasi Teknis	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.53.5	Survey dan pemetaan	Jumlah bangunan yang terpetakan	5	20.000.000	250 bangunan	22.000.000	35.948.000	200 Bangunan	24.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.53.7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	1	25.000.000	Rp 3	0	41.543.000	3 Kegiatan	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia
	1.3.54	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**			**130.000.000**		**130.000.000**	**472.038.000**		**130.000.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI SEKDA	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8		Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	1.3.54.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya laporan pengawasan ruang	24	100.000.000	Rp 12	100.000.000	306.127.000	12 Laporan	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia
2	1.3.54.9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	Tersedianya Kajian Teknis Andal Teknis	12	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	0	12 bulan	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	1.3.54.10	Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan	Terbentuknya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)			1 Tim		165.911.000	15 Dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**			**0**		**0**	**0**		**0**			
			Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	95%		97%			100%				
1	1.3.23.4	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat berat untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaaan fisik					0	1 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.22	**Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**			**0**		**0**	**15.000.000**		**0**			
1	1.3.22.5	Penyusunan data dan profil OPD	tersusunnya data capaian kinerja OPD dalam dokumen			2 dokumen		15.000.000	2 Dokumen	0	DPUPR Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		5.296.451.000		5.451.741.000	44.784.428.000		5.859.385.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

URUSAN : perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.217.273.000**		**1.336.792.000**			**1.459.273.000**			
1	1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12	200.000	12 bulan	220.000	12 bulan	220.000	242.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12	171.600.000	12 bulan	188.760.000	12 bulan	46.800.000	207.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12	53.250.000	48 unit	58.575.000	12 unit	8.455.000	64.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12	294.100.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	219.661.000	350.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	142.644.000	12 bulan	156.908.000	12 bulan	108.774.000	172.599.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12	60.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	16.335.000	72.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12	41.801.000	12 bulan	45.981.000	12 bulan	11.314.000	50.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	14.000.000	12 bulan	15.400.000	12 bulan	4.940.000	16.940.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	12	3.960.000	12 bulan	4.356.000	12 bulan	3.360.000	4.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	1.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	refill tabung gas	12	2.800.000	12 bulan	3.080.000	12 bulan	2.467.000	3.388.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum pegawai dan tamu	12	51.123.000	12 bulan	56.235.000	12 bulan	30.599.000	61.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	1.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	299.035.000	12 bulan	328.938.000	12 bulan	175.125.000	361.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	1.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	2	45.792.000	12 bulan	50.371.000	12 bulan	127.256.000	55.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	1.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, sekolah)	12	36.968.000	12 bulan	36.968.000	12 bulan	13.676.000	36.968.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	1.4.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**844.770.000**		**928.385.000**			**1.022.170.000**			
1	1.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	300.000.000	12 bulan	330.000.000	Rp 12	100.000.000	363.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	517.147.000	12 bulan	568.000.000	Rp 12	153.685.000	625.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	12.193.000	12 bulan	13.412.000	Rp 12	5.975.000	14.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	15.430.000	12 bulan	16.973.000	Rp 12	13.120.000	18.670.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur			5 jenis		12 bulan	4.995.000	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1.4.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**111.635.000**		**112.785.000**			**113.935.000**			
1	1.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4	44.035.000	4 laporan	44.035.000	4 Laporan	19.342.000	44.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.4.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1	7.500.000	1 laporan	8.000.000	1 Laporan	8.509.000	8.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.4.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1	8.500.000	1 laporan	8.700.000	1 Laporan	11.345.000	8.921.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020			2 dokumen		2 Dokumen	33.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2	44.321.000	2 dokumen	44.771.000	2 Dokumen	35.276.000	45.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1	7.279.000	1 laporan	7.279.000	1 Laporan	4.813.000	7.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.4.15	**Program Pengembangan Perumahan**			**1.450.000.000**		**1.450.000.000**			**1.450.000.000**			
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	98		Rp 100		Rp 100					
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	3		Rp 4		Rp 5					
1	1.4.15.29	Sosialisasi perumahan	Tersosialisasinya kegiatan perumahan di kota magelang			197 peserta		1 Kegiatan	45.000.000	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.4.15.14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	2	1.300.000.000	3 Rusunawa	1.300.000.000	12 bulan	1.320.658.000	1.400.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.4.15.17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitas bantuan Hukum			12 bulan		12 bulan	460.440.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	1.4.15.30	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	terlaksananya publikasi perumahan dan kawasan permukiman			6 kali		100%	14.944.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi stakeholder perumahan untuk updating data perumahan	1	50.000.000	17 Kelurahan	50.000.000	4 Dokumen	58.000.000	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.4.15.11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis, monev dan fasilitasi kegiatan Rehab Rumah Swadaya	200	100.000.000	250 RTLH	100.000.000	3 Kecamatan	231.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
7	1.4.15.27	Pengelolaan Rumah Khusus	Terkelolanya bangunan rumah khusus			12 bulan		12 bulan	125.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	1.4.15.12	Penyusunan Database Perumahan	Terciptanya sistem database perumahan yang up to date			1 Kecamatan		1 Kegiatan	100.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
9	1.4.15.5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terlaksananya Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Komersil dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah			17 Kelurahan		5 Dokumen	63.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.4.15.21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Tertanganinya RTLH			7 Kelurahan		3 Kecamatan	0	0	Kota magelang	Dana Alokasi Khusus	Penanggulangan Kemiskinan
11	1.4.15.39	Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Kota Magelang			160 RTLH		3 Kecamatan	83.500.000	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
12	1.4.15.43	Sayembara Desain Rumah Tumbuh	Terwujudnya desain rumah yang layak huni yang aman, sehat dan nyaman dan efisien					1 Dokumen	200.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.4.16	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**			**39.000.000**		**39.000.000**			**39.000.000**			
					4,068,071,000		10,924,160,000			7,537,771,000			
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat										
1	1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitasi	4	39.000.000	24 KPP 200 orang	39.000.000	10 KPP	39.896.000	39.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	1.3.27.20	Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang	Terwujudnya forum komunikasi masyarakat sanitasi dan air bersih					1 Kegiatan	100.000.000		Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	
2	1.4.16.24	Lomba Sanitasi	Terlaksananya lomba sanitasi			24 KPP		28 KPP	42.976.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
3	1.4.16.53	Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP)	terwujudnya KPP yang handal					1 kegiatan	55.870.000	0	28 KPP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
4	1.4.16.52	Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum	terlaksana nya sosialisasi pemantauan hasil uji air limbah dan air minum					1 kegiatan	50.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
5	1.4.16.23	Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Terpeliharanya MCK yang memadai dan baik					2 MCK	75.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.4.16.49	Optimalisasi SPALDT (penambahan Sambungan Rumah(SR))	terbangunnya jaringan sambungan rumah SPALDT					90 SR	-	0	3 Kecamatan	Silpa Dana Alokasi Khusus	Program 100-0-100
7	1.4.16.50	Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT	Terwujudnya Air Limbah sesuai dengan standar baku mutu					34 Lokasi	52.410.000	0	34 Lokasi SPALDT	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Terwujudnya layanan air minum yang memadai										
		Pembangunan SPALD-S (DAK)	terbangunya IPAL Setempat yang memadai										
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	2.4.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**			**3.153.850.000**		**20.000.000.000**			**20.000.000.000**			
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	45%		60%		80%					
1	2.4.16.5	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan lahan pengembangan Rusun Tidar dan lahan baru Rusun Jurangombo Selatan	4000	3.153.850.000	2 lokasi	20.000.000.000	1 Lahan	719.721.000	20.000.000.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.4.16.8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Terwujudnya legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah milik Pemda			2 sertifikat		2 Dokumen	58.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.4.16.14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk lokasi pembangunan Rusun Sewa dan Rumah Khusus			2 Lahan		1 Lahan	1.250.000.000	0	Kel. Gelangan dan Kel. Kedungsari	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	1.4.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**			**40.625.000**		**40.625.000**			**40.625.000**			
1	1.4.17.8	Sosialisasi Keciptakaryaan	Terlaksananya sosialisasi permukiman	200	40.625.000	300 peserta dan 1 karnaval	40.625.000	Rp 200	50.000.000	40.625.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**260.980.000**		**260.980.000**			**260.980.000**			
1	1.3.30.5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	Terpeliharanya jalan lingkungan, talud jalan dan leuneng	1	260.980.000	12 bulan	260.980.000	840 meter2	260.980.000	260.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya saluran air lingkungan dan talud saluran			5 kelurahan (Gelangan, Magelang, JumboSel, Tidar Selatan, Rejo Utara)		200 meter	250.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.3.30.28	Penyusunan Masterplan Deliniasi Kumuh	terwujudnya masterplan deliniasi kumuh					1 kegiatan	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.3.30.27	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh	terwujudnya peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh					1 kegiatan	30.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
5	1.3.30.22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	Terlaksanaya fasilitasi Satker PIP dan LKM Kota Magelang			12 bulan		12 bulan	77.000.000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	1.3.30.30	Penyusunan DED Kampung Tematik	Tersusunnya DED kampung tematik					3 lokasi -> 5 lokasi	274.752.000	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.3.30.25	Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP)	Terwujudnya P2KPKP					1 kegiatan	44.150.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
8	1.3.30.26	Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang	terwujudnya peta kawasan sempadan kota magelang					1 kegiatan	93.320.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
9	1.3.30.29	Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Terwujudnya data baseline KOTAKU					100%	115.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100
	1.3.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.35.75	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					250 meter	177.720.000	0	RW.09	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.35.78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya Rehab Saluran Drainase			1 paket		276 meter	180.000.000	0	RW. 12	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.35.77	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase			1 paket			0	0	RW. 11	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.35.73	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran Drainase			1 paket		358 meter	150.000.000	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.35.70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terlaksananya Rehab Saluran drainase			1 paket				0	RW. 4	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.35.56	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Lingkungan			1 paket		437,5 m2	111.330.000	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
7	1.3.35.69	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terehabnya Saluran drainase			1 paket			0	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.35.65	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan					400 meter2		0	RW.12	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.35.61	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan					100%		0	RT. 05 Tidar Baru	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.35.55	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terlaksananya rehab jalan lingkungan					309 meter2		0	RT.01,02	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.36.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terehabnya jalan lingkungan			1 paket		226 m	234.160.000	0	RT.03 RW. V Perum Villa Gading Mas Blok A	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.36.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					173,6 meter	162.430.000	0	RT.07	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.36.44	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					85 meter	60.660.000	0	RT.03	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.36.36	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	terlaksananya jalan lingkungan					324 m2		0	RT.01	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**			**390.645.000**		**670.058.000**			**578.874.000**			
1	1.3.37.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	RW 3,9	390.645.000	1 paket	670.058.000	RW 4,5	0	578.874.000	RW. 8, 9	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.37.40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksanananya Rehab Jalan Lingkungan					100%		0	RW III	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.37.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan					244,8 m	30.000.000	0	RW 01	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.37.50	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket			0	0	RW. IV	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.37.52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya Rehab Saluran drainase			1 paket		90 meter	84.210.000	0	RW VI	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.37.47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					354,8 meter		0	RT.05,06 RW 01	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.37.10	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan					200 meter	99.470.000	0	RW.01	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.37.39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terlaksananya rehab jalan lingkungan					273 m2	142.560.000	0	RW.02	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.38.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	kampung tematik					1 kampung tematik		0	kelurahan tidar utara	Dana Alokasi Umum	SDGs
2	1.3.38.65	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	terlaksananya rehab jalan lingkungan					170 meter		0	RW. 12	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					70 meter		0	RT.02	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.38.4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan					259.4 meter2		0	RT.01	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
5	1.3.38.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket			0	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.38.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan			1 paket			0	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan			0 Paket		219 meter2		0	RW. II	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.38.68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket		164 m	85.900.000	0	RT. 04 RW. II	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.38.78	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket		100 %	139.320.000	0	RW. XII	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.38.70	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					68 meter		0	RT.01	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
11	1.3.38.15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					283 meter	88.390.000	0	RT,01,02,04, 05	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
12	1.3.38.3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan					200 meter	86.000.000	0	RW III	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.39.54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Telaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkungan					90 m		0	RT. 01 RW V	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.39.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Kampung Tematiki dan Terlaksananya Rehab Saluran Drainase Lingkungan					1 Kampung Tematik dan 300 m	237.000.000	0	Kelurahan Tidar Selatan dan Saluran drainase Lingkungan RW 7-8	Dana Alokasi Umum	SDGs, Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.39.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan					100 m2		0	RT, 03 RW X	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.39.14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					102 m	234.160.000	0	RT.01,02	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.39.53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terlaksananya rehab jalan lingkungan					146 m2		0	RT.02 jl. Kemuning V	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.39.65	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					125 m	205.350.000	0	RT.01 jl. Kemuning III	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.39.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					215 m	150.000.000	0	RT.02	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.39.61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan					188 m2		0	RT.02	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.39.17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					60 m		0	RT.03 Tidar Warung	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			0		0			0			
1	1.3.40.56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket			0	0	RW. 07	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.40.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terehabnya Jalan Lingkungan			0 paket			0	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.40.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab Saluran drainase dan Gorong-gorong			1 paket			0	0	RW I	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.40.4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya sosialisasi permukiman Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV dan Talud makam					159 m dan 6 m	142.298.000	0	RT 1,4,6 dan Talud MakamRW 06	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.40.13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					162 m	84.840.000	0	RT.01	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.40.64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					394,5 m	233.080.000	0	RT.01,02, 04, 04	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.40.6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan					45.5 m2	56.350.000	0	RT.03	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**230.165.000**		**408.671.000**			**0**			
1	1.3.41.8	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					250 m	131.000.000	0	RT 11	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.41.11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananyaRehab Talud Saluran					80 m	210.000.000	0	RT 01	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	1.3.41.44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 4,6	230.165.000	1 paket	408.671.000	150 m		0	RW 04-05	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.41.33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terehabnya Jalan Lingkungan Leuneng dan Talud			1 paket		322,5 m2		0	RT. 01, 05, 06	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.41.40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran drainase			1 paket			0	0	RW. 4	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.41.14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terlaksananya Rehab Talud Saluran					200 meter		0	RT 07 - 09	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.41.39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / Gorong-gorong RW III					110 m	70.830.000	0	RT 6,7,8 Kp Kriyan	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.41.30	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I					368 m2		0	RT.11	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.41.37	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong RW I					232 m	121.762.000	0	RT 9-11	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
10	1.3.41.43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW VII					264 m		0	RT 1,6,9	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
11	1.3.41.42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					315 m	150.000.000	0	RT.04,08	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**0**		**0**			**0**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	1.3.42.14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					322 m	150.000.000	0	RT.01,03	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					100 m	71.080.000	0	RT.03	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	terlaksananya rehab jalan lingkungan					500 m2		0	RT.03	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan					550 m2	147.178.000	0	RW 06 - 07	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**220.847.000**		**155.394.000**			**230.000.000**			
1	1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 8	220.847.000	1 paket	155.394.000		0	230.000.000	RW. 3, 5	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase			1 paket			0	0	RW. 8	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket		500 m2	140.490.000	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.43.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran drainase			0 paket		245 m	150.000.000	0	RW. 07	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.43.10	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					775 m		0	RT.03,05,07	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**186.090.000**		**0**			**0**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehab jalan lingkungan	RW 1,5	186.090.000	1 paket	0		0	0	RW. 3 dan 5	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase			1 paket			0	0	RW. 5	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.47	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Aspal dan Paving			1 paket			0	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase			1 paket			0	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran drainase			1 paket			0	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.44.54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX					236 m		0	RT 2	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.44.62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					160 meter	113.800.000	0	RT.03 Jl. Jeruk Timur 3	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.44.12	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan					775 m	200.000.000	0	RT.03,05,07	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.45.51	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW V					145 m		0	RW V	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.45.42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V					570 m2	135.840.000	0	RW 5	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.45.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Kampung Tematik					1 kampung tematik		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	SDGs
4	1.3.45.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket			0	0	RW. VII	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.45.45	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	terehabnya Jalan Lingkungan			1 Paket			0	0	Rw. VIII	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.45.43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terehabnya Jalan Lingkungan					54.5 m	32.645.000	0	RW 6	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**			**480.220.000**		**825.599.000**			**271.046.000**			
1	1.3.46.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 10	480.220.000	1 paket	825.599.000	RW 2,4	0	271.046.000	RW. 5, 10	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.46.64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW III					256 m'	181.999.000	0	RT 3	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.46.9	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan jembatan Kelurahan RW IX					1250 m2		0	RT 8	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.46.51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II					135 m2		0	RT 5	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
5	1.3.46.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW II					70 m	45.074.000	0	RT 5	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.46.57	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII					402 m2		0	RT 2,6	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.46.18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya pembangunan saluran drainase					12 m	45.660.000	0	RW.06	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.47.116	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					90 m		0	RW.10	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.47.104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	terlaksananya rehab jalan lingkungan dan leuneng					60 meter		0	RT.05	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.47.128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	kampung tematik					1 kampung tematik	300.000.000	0	kelurahan rejowinangun utara	Dana Alokasi Umum	SDGs
4	1.3.47.37	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					121 m	77.500.000	0	RT 01 RW XVI	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.47.110	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					35 m		0	RT 01 Nanggulan	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.47.105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	jalan lingkungan			1 paket		200 m2		0	RW. 20	Dana Alokasi Umum	Program 100-0-100

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
7	1.3.47.126	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					90 meter		0	RT.05	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
8	1.3.47.41	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	terlaksananya pembangunan talud saluran					40 m	120.000.000	0	RW.20	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
9	1.3.47.115	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terlaksananya Rehab/ Peningkatan saluran drainase gorong-gorong			1 paket		58 M	182.720.000	0	RW IX	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.47.95	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	terlaksananya rehab jalan lingkungan					180 m		0	RW.10	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
11	1.3.47.107	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I					146 m	135.290.000	0	RW 1	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
12	1.3.47.103	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII	Terlaksananya sosialisasi permukiman					104 m2		0	RW 18	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
13	1.3.47.108	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II					136 M	123.700.000	0	RW 2	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
14	1.3.47.113	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / Saluran Gorong-gorong RW VII					150 m	185.000.000	0	RT 1,2,3	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
15	1.3.47.92	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII					150 m		0	RT 1,2,3	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
16	1.3.47.36	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					500 m		0	RT 01- RT 04 RW XV	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
17	1.3.47.35	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					85 m	120.000.000	0	RW 14	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
18	1.3.47.114	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					85 m		0	RT. 04	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.48.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI					195 m2		0	RW 6	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.48.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II					60 m	69.700.000	0	RT 3	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.48.73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII					270 m	166.252.000	0	RW 7	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.49.35	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II					25 m	50.000.000	0	RW II	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Kampung Tematik					1 Kampung Tematik		0	Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	1.3.49.37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV					RT 2		0	RT 2	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.49.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V					1169.54 m2	150.000.000	0	RT 1,2,3,4	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	1.3.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.50.60	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX					329.3 m'		0	RT 1	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.50.46	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V					200 m2	50.000.000	0	RW V,VI	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.50.49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan KElurahan RW VIII					342,9 m		0	RT 7	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.50.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong Kelurahan RW VIII					65 m	44.500.000	0	RT 7	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.50.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya sosialisasi permukiman Rehab/Peningkatan saluran Drainase / Gorong-gorong RW II					197 m	52.300.000	0	RT 2	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	1.3.50.20	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong RW X					172.5 m	90.340.000	0	RT 2	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.50.51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X					209.3 m2		0	RT 2	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.50.48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Telaksananya Rehab Jalan Lingkungan					155 m		0	RT 05	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**		**6.900.000**			**6.900.000**			
			PERPUS		18,500,000		22,000,000			25,000,000			
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		Rp 1		Rp 1					
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	100	6.900.000	12 bulan	6.900.000	12 bulan	6.900.000	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan											
	2.4.18	**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**			**0**		**0**		**0**	**0**			
			Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	45%		60%		80%					
1	2.4.18.1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Sistem Informasi Pertanahan		0		0		0	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**31.150.000**		**31.150.000**		**0**	**31.150.000**			
			Meningkatkan Disiplin Aparatur	3 jenis									
1	1.4.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam lapangan	22	31.150.000	10 THL	31.150.000	Rp 22	0	31.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1.4.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**0**		**0**			**0**			
1	1.4.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber daya Aparatur OPD			1 kegiatan		1 kegiatan	52.216.000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1.3.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**			**75.000.000**		**75.000.000**		**0**	**75.000.000**			
			Persentase penduduk berakses air minum	97		Rp 100		Rp 100					
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	89		Rp 90		Rp 90					
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	9		Rp 10		Rp 10					
1	1.3.27.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev pengelolaan SPAM	1	75.000.000	41 SPAM	75.000.000	Rp 1	0	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Rasionalisasi DAU 3	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 10		Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.3.27.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Terwujudnya layanan air minum yang memadai			60 unit			0	0	Kelurahan Magersari dan Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Program 100-0-100
	1.3.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**0**		**0**			**0**			
1	1.3.34.66	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terlaksananya rehab jalan lingkungan					68 meter		0	RT.04	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.34.84	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					75 meter	40.970.000	0	RT.01,02	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.34.89	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan					140 meter	57.360.000	0	RT.05	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.34.75	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	terlaksananya rehab jalan lingkungan					546 m2		0	RT.01-04	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
			TOTAL		8.739.150.000		26.341.339.000		14.846.993.000	25.578.953.000			
									20.195.493.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

: SATUAN POLISI

OPD PAMOMG PRAJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Tahun 2020									
		Gambaran Kegiatan	Pagu Indikatif								
			Input manual	E-budgeting	Desk Renja Bappeda	Rasionalisasi OPD			Ke 4 (lwt telp)	Ke 5 (lwt telp)	+ / (-)
						Ke 1	Ke 2	Ke 3			
Rp1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	12 = 11 - 10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	Program Pelayanan administrasi Perkatoran		**807.937.000**	**807.937.000**	**752.604.000**	**718.397.000**	**693.591.000**	**643.591.000**	**643.591.000**	**628.473.000**	**- 15.118.000**
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rek listrik , air, telp dan internet kantor satpol dan damkar (4 Jenis 12 bulan)	65.400.000	65.400.000	65.400.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	46.015.000	- 3.985.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK dan KIR kend dinas / ops (34 unit)	34.714.000	34.714.000	34.000.000	27.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	- 2.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan , Laporan barang dan SPJ (3 dok)	130.443.000	130.443.000	120.464.000	125.443.000	125.443.000	125.443.000	125.443.000	125.443.000	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebesihan kantor (2 org) dan peralatan / bhn pembersih (20 jenis)	50.733.000	50.733.000	50.733.000	50.733.000	50.733.000	50.733.000	50.733.000	46.689.000	- 4.044.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (34 jenis)	25.183.000	25.183.000	25.183.000	20.183.000	17.183.000	17.183.000	17.183.000	15.813.000	- 1.370.000
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan (4 jenis) dan penggandaan dokumen (200.000 lbr)	5.731.000	5.731.000	5.731.000	5.731.000	5.731.000	5.731.000	5.731.000	5.731.000	-
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyan alat listrik (20 jenis)	5.088.000	5.088.000	5.088.000	5.088.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-

	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Langganan media cetak (2 jenis 12 bulan)	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.300.000	- 280.000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	isi ulang tabung gas elpiji 3 kg (36 kali) dan 12 kg (12 kali)	4.277.000	4.277.000	4.277.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000	3.400.000	- 301.000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bhn minuman (6 jenis) snak rapat (480 dus) dan petugas pembuat minuma (1 org 12 bulan)	39.288.000	39.288.000	39.288.000	39.288.000	39.288.000	39.288.000	39.288.000	36.150.000	- 3.138.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas untuk koordinasi / konsultasi (50 org / keg)	254.640.000	254.640.000	210.000.000	210.000.000	175.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/ Tidak Tetap	Pembayaran upah tenaga honorer (6 org 12 bulan)	184.907.000	184.907.000	184.907.000	163.697.000	189.479.000	189.479.000	189.479.000	189.479.000	-
	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Penilaian angka kredit jabatan fungsional satpol (2 keg)	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		**968.213.000**	**968.213.000**	**398.052.000**	**364.356.000**	**351.304.000**	**316.304.000**	**316.304.000**	**287.584.000**	**- 28.720.000**
	Kegiatan Pembangunan gedung kantor		546.026.000	546.026.000	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengadaan bahan bangunan dan upah tukang pemeliharaan kantor satpol dan damkar'	33.052.000	33.052.000	33.052.000	33.052.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	- 5.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kend dinas / ops (25 unit) ,Servis /reparasi , Suku cadang dan BBM	361.930.000	361.930.000	350.000.000	316.304.000	316.304.000	281.304.000	281.304.000	258.884.000	- 22.420.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Servise /reparasi / suku cadang) LCD,Kamera , AC, Wireless dan HT (23 unit))	14.761.000	14.761.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.300.000	- 700.000

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Pemeliharan peralatan gedung kantor (Reparasi /servise,suku cadang PC,Laptop, printer 18 unit)	12.444.000	12.444.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.400.000	- 600.000
	Program Peningkatan disiplin aparatur		**117.569.000**	**117.569.000**	**117.569.000**	**76.153.000**	**76.153.000**	**76.153.000**	**-**	**-**	**-**
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan PDL Satpol 60 stel (bagi PNS dan tenaga kontrak Satpol)	76.153.000	76.153.000	76.153.000	76.153.000	76.153.000	76.153.000	-	-	-
	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		41.416.000	41.416.000	41.416.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan		**32.712.000**	**32.712.000**	**24.444.000**	**24.444.000**	**24.444.000**	**24.444.000**	**24.444.000**	**22.485.000**	**- 1.959.000**
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyusunan RFK (12 bendel) Capaian Indikatir Kinerja OPD (4 bendel)	7.863.000	7.863.000	5.766.000	5.766.000	5.766.000	5.766.000	5.766.000	5.306.000	- 460.000
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan laporan keu semesteran (1 dok) dan Laporan prognosis (1 dokumen)	3.798.000	3.798.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.445.000	- 126.000
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan keu akhir tahun dan laporan barang (2 dok)	4.923.000	4.923.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000	2.528.000	- 220.000
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD	Penyusunan Renja OPD dan Renja Perubahan OPD (2 dok)	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.442.000	5.008.000	- 434.000
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD	Penyusunan RKA ,DPA dan RKPA ,DPPA (4 dok)	8.178.000	8.178.000	6.409.000	6.409.000	6.409.000	6.409.000	6.409.000	5.898.000	- 511.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Tersusunnya LKjIP, LPPD dan LKPJ (3 dok)	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.300.000	- 208.000
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		**5.397.829.000**	**5.397.829.000**	**4.986.270.000**	**4.645.320.000**	**4.040.725.000**	**3.674.475.000**	**3.550.923.000**	**3.415.600.000**	**- 135.323.000**

	Kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembayan honor banpol Trantibum (40 org) , banpol pam obvit (34 org) dan Satgas Linmas dan / PB (30 orang)	2.652.568.000	2.652.568.000	2.602.408.000	2.587.408.000	2.375.317.000	2.370.656.000	2.247.104.000	2.230.261.000	- 16.843.000
	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	pelatihan peningkatan kapasitas anggota satlinmas kelurahan oleh Satpol Kota (40 org) dan pengiriman satlinmas utk mengikuti pelatihan oleh Satpol Propinsi (5 org x 4 keg)	124.138.000	124.138.000	70.138.000	70.138.000	54.442.000	-	-	-	-
	Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya PAM Gabungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota (Hari jadi , HUT RI , Hari raya , natal / tahun baru)	687.525.000	687.525.000	687.525.000	588.525.000	400.246.000	350.325.000	350.325.000	425.325.000	75.000.000
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Jasa patwal kepala daerah,patroli satpol / banpol diluar jam dinas , pembinaan bagi KST , rakor dengan kasi trantibum dan asistensi ops penertiban oleh KST (5 keg)	1.005.978.000	1.005.978.000	1.005.978.000	779.028.000	637.064.000	462.764.000	462.764.000	369.238.000	- 93.526.000
	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Kegiatan kesamaptaan rutin dan pelatihan defile dan pengiriman satpol / banpol pada gelar pasukan HUT Satpol dan jambore trantibum tk.propinsi	303.836.000	303.836.000	262.000.000	262.000.000	218.700.000	179.334.000	179.334.000	165.041.000	- 14.293.000

	Pemberkasan pelanggaran peraturan daerah	Penyelenggaraan sidanf tipiring bekerjasama dengan Kejaksaan , kepolisian dan pengadilan (4 keg)	191.179.000	191.179.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	-
	Kegiatan Pengumpulan informasi cukai palsu / ilegal	Terlaksananya sidak / penertiban pedagang rokok (12 keg)	129.282.000	129.282.000	105.697.000	105.697.000	105.697.000	105.697.000	105.697.000	105.697.000	-
	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Pengiriman data pelanggaran perda secara online berbasis SIG ke satpol Propinsi (12 keg)	37.654.000	37.654.000	20.732.000	20.732.000	20.732.000	14.282.000	14.282.000	13.143.000	- 1.139.000
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terlaksananya rekruitmen anggota Linmas baru (50 org)	109.154.000	109.154.000	102.792.000	102.792.000	99.527.000	77.602.000	77.602.000	-	- 77.602.000
	Penyelenggaraan gladi lapangan Satlinmas	Pelatihan defile bagi anggota linmas dan pengiriman satlinmas pada gelar pasukan HUT Satlinmas dan jambore satlinmas tk propinsi (2 Keg)	156.515.000	156.515.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	86.815.000	86.815.000	79.895.000	- 6.920.000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal		**690.607.000**	**690.607.000**	**80.823.000**	**80.823.000**	**70.823.000**	**38.701.000**	**38.701.000**	**35.616.000**	**- 3.085.000**
	Pengawasan , pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Penyelanggaraan rakor evaluasi kegiatan anggota PPNS kota Magelang dengan Korwas (6 keg)	121.560.000	121.560.000	46.134.000	46.134.000	46.134.000	38.701.000	38.701.000	35.616.000	- 3.085.000
	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan		460.516.000	460.516.000	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Rakor kantrantibmas se eks wilayah Kedu (2 Keg)	34.689.000	34.689.000	24.689.000	24.689.000	24.689.000	-	-	-	-

	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Penindakan pelanggaran disiplin aparatur (3 keg)	73.842.000	73.842.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran		**2.100.204.000**	**2.061.355.000**	**1.928.422.000**	**1.672.235.000**	**1.606.019.000**	**1.530.138.000**	**1.383.260.000**	**1.319.603.000**	**- 63.657.000**
	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran		38.849.000	-	38.849.000	-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penyuluhan penanggulangan kebakaran di rumah tangga (36 keg @ 10 org).Lokasi penyuluhan di RT / RW se Kota Magelang	57.561.000	57.561.000	-	27.393.000	27.393.000	27.393.000	27.393.000	25.209.000	- 2.184.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengd pengd.fireade (10 lt) , firehidrant (1 unit),Pakaian tahan api (3) , pakaian tahan panas (10), Masker khusus (40)	661.702.000	661.702.000	661.702.000	416.971.000	358.255.000	282.374.000	192.374.000	177.041.000	- 15.333.000
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran	Pemeliharaan kend operasional damkar service,BBM , suku cadang (8 unit))	195.663.000	195.663.000	91.986.000	91.986.000	91.986.000	91.986.000	91.986.000	84.654.000	- 7.332.000
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	pembarayaran honor satgas damkar, pengd PDL PMK, makan / minum pelatihan ,Pakaian OR untuk kesamaptaan satgas damkar (46 orang 12 bulan)	1.110.782.000	1.110.782.000	1.110.782.000	1.110.782.000	1.103.282.000	1.103.282.000	1.064.507.000	1.026.257.000	- 38.250.000
	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev sarpras penaggulangan kebakaran (4 keg)	17.544.000	17.544.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.442.000	- 558.000

	Rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Terlaksananya pembentukan Satlakar di masyarakat (50 orang)	18.103.000	18.103.000	18.103.000	18.103.000	18.103.000	18.103.000	-	-	-
	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		**301.311.000**	**301.311.000**	**272.218.000**	**272.218.000**	**267.218.000**	**245.783.000**	**245.783.000**	**226.193.000**	**- 19.590.000**
	Kegiatan Penyuluhan pencegahan dan penegakan peraturan daerah /peraturan walikota	Uang ops ops penertiban bangunan, reklame,dan perda lainnya (36 keg) dan penyelenggaraan sosialisasi trantibum dan pencegahan prostitusi (200 org)	154.219.000	154.219.000	137.218.000	137.218.000	137.218.000	126.430.000	126.430.000	116.353.000	- 10.077.000
	Operasi pemberantasan penyakit masyarakat	Uang ops penertiban peredaran miras, tempat kost, tempat hiburan, PGOT,pelajar dan deteksi dini trantibum (30 keg)	147.092.000	147.092.000	135.000.000	135.000.000	130.000.000	119.353.000	119.353.000	109.840.000	- 9.513.000
	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		**347.842.000**	**347.842.000**	**238.512.000**	**263.293.000**	**233.254.000**	**145.073.000**	**13.000.000**	**-**	**- 13.000.000**
	Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya sosialisasi kontijensi mitigasi bencana (100 org)	18.305.000	18.305.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	- 13.000.000
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam	Pengadaan peralatan untuk penanggulangan bencana (bagi satgas Linmas dan PB)	125.249.000	125.249.000	93.439.000	93.439.000	63.400.000	-	-	-	-
	Kegiatan Pelatihan tenaga pengendali bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi warga masyarakat (100 org)	24.781.000	24.781.000	-	24.781.000	24.781.000	-	-	-	-

	Kegiatan Simulasi Penanggulangan korban bencana alam	simulasi bencana bagi pelajar, pengd kaos dan topi bagi peserta , honor narasumber, uang transport peserta (100 org pelajar dan 50 org warga masyarakat)	31.931.000	31.931.000	-	-	-	-	-	-	-
	Pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana (Rejo selatan)'	85.503.000	85.503.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	-
	Pembentukan relawan siaga bencana	Pembentukan relawan siaga bencana tk kelurahan (Rejo selatan)	62.073.000	62.073.000	62.073.000	62.073.000	62.073.000	62.073.000	-	-	-
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan pemilihan umum		**121.479.000**	**121.479.000**	**121.479.000**	**121.479.000**	**91.965.000**	**60.357.000**	**60.357.000**	**55.546.000**	**- 4.811.000**
	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan umum	Pembekalan kepada satlinmas yang akan bertugas di TPS pada Pilkada 2019 (300 org)	31.608.000	31.608.000	31.608.000	31.608.000	31.608.000	-	-	-	-
	Gelar pasukan PAM pemilihan umum	Terlaksananya apel kesiapan Linmas untuk Pam Pilkada (420 org)	55.971.000	55.971.000	55.971.000	55.971.000	26.457.000	26.457.000	26.457.000	24.348.000	- 2.109.000
	Pengamanan pemilihan umum bagi anggota linmas	Terlaksananya monitoring wilayah oleh Satlinmas pra dan pasca pilkada (TPS , PPS dan PPK)	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	31.198.000	- 2.702.000
	JUMLAH TOTAL		10.885.703.000	10.846.854.000	**8.920.393.000**	**8.238.718.000**	**7.455.496.000**	**6.755.019.000**	**6.276.363.000**	**5.991.100.000**	**- 285.263.000**

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN : Trantibum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**542.339.000**		**596.573.000**	**515.303.000**		**656.231.000**			
1	1.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	Rp 200	968.000	200 lembar	1.064.000	0	150 lembar	1.171.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12	52.998.000	4 jenis/ 12 bulan	58.298.000	44.400.000	4 jenis/ 12 bulan	64.127.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	Rp 16	11.132.000	14 unit	12.245.000	6.982.000	14 unit	13.470.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12	92.157.000	10 orang / bulan serta 12 laporan	101.373.000	91.559.000	10 orang / bulan serta 12 laporan	111.510.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37	50.304.000	2 orang / bulan serta 37 item	55.335.000	54.641.000	2 orang / bulan serta 23 item	60.868.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Rp 46	28.706.000	49 item	31.576.000	12.834.000	47 item	34.734.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	8 jenis dan 40000	28.731.000	6 jenis dan 40000 lembar	31.604.000	11.899.000	6 jenis dan 40000 lembar	34.765.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
8	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	Rp 13	6.340.000	11 item	6.974.000	1.976.000	11 item	7.672.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	Rp 3	4.428.000	3 jenis/ 12 bulan	4.871.000	4.920.000	3 jenis / 12 bulan	5.359.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	Rp 6	1.089.000	6 tabung	1.198.000	4.824.000	6 tabung dan 1 unit/12 bulan	1.317.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	57 kegiatan dan 12	56.515.000	44 kegiatan dan 12 bulan	62.167.000	34.134.000	36 kegiatan dan 12 bulan	68.383.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Rp 87	189.500.000	45 kegiatan	208.450.000	141.086.000	45 kegiatan	229.295.000	Diluar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam kantor, driver dan front office	1 orang/ 12	19.471.000	5 orang/ 12 bulan	21.418.000	106.048.000	5 orang / 12 bulan	23.560.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.5.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**320.230.000**		**500.825.000**	**176.159.000**		**437.107.000**			
					7,245,909,000		7,888,817,000			8,543,812,000			
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1481 m2 dan 1	10.793.000	1 paket	11.872.000	15.830.000	1 paket	13.059.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 16	207.298.000	14 unit	228.028.000	139.883.000	14 unit	250.831.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Rp 9	5.899.000	6 jenis	6.488.000	9.518.000	3 jenis	7.137.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Rp 6	19.965.000	6 jenis	21.962.000	10.928.000	2 jenis	24.158.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	Rp 1	2.250.000	1 paket	2.475.000	0	1 set	2.722.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4	Rp 1	20.600.000	1 unit	180.000.000	0	1 unit	74.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
7	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 3	53.425.000	2 item	0	0	5 jenis	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor		0	3 item	50.000.000	0	Rp -	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	1.5.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**50.925.000**		**56.017.000**	**33.667.000**		**61.620.000**			
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	Rp 34	14.159.000	34 laporan	15.575.000	9.689.000	34 laporan	17.133.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Rp 3	5.247.000	3 buku	5.772.000	4.404.000	3 buku	6.349.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	Rp 2	7.623.000	2 dokumen	8.385.000	5.310.000	2 dokumen	9.224.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	Rp 30	18.570.000	30 buku	20.426.000	10.281.000	30 buku	22.469.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	Rp 1	5.326.000	1 dokumen	5.859.000	3.983.000	1 dokumen	6.445.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	1.5.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Perubahan Renstra OPD			1 dokumen		0	Rp -	0	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			695.883.000		743.406.000	**2.119.231.000**		795.394.000			
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000			
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000			
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%				
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	Rp -		Rp -			Rp -				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Perda pelarangan peredaran narkoba	Rp 1		Rp -			Rp -				
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	Rp 3		Rp 4			Rp 5				
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%				
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%				
			Rasio jumlah siskamling aktif	Rp 1		Rp 1			Rp 1				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA				
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA				
1	1.5.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Rp 12	130.920.000	12 buku	144.012.000	130.068.000	12 laporan	158.414.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang	Rp 17	14.511.000	17 kelurahan	15.962.000	13.892.000	lomba siskamling untuk 17 kelurahan	17.558.000	Kelurahan se-Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	Rp 30	128.519.000	30 buku	132.374.000	117.228.000	30 buku	136.346.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.5.16.7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	Rp 6	8.527.000	6 buku	8.783.000	7.766.000	6 buku	9.046.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
5	1.5.16.8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Laporan pengawasan orang asing dan sosialisasi pemantauan orang asing kepada masyarakat	12 kali dan 24	49.721.000	12 kali dan 200 orang	49.721.000	64.927.000	12 laporan	49.721.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	Rp 365	57.750.000	365 laporan	63.525.000	105.411.000	365 hari	69.877.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	1.5.16.10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	Rp 12	99.678.000	12 kali	109.646.000	63.233.000	12 kali	120.611.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	1.5.16.11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN	450 orang dan 100	73.804.000	1700 orang	81.185.000	153.437.000	850 orang	89.303.000	Kelurahan se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	1.5.16.12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan test urine	Rp 150	57.453.000	500 orang dan 100 orang	63.198.000	42.321.000	400 orang siswa	69.518.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
10	1.5.16.13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta test urine untuk deteksi narkoba	Rp 500	75.000.000	500 orang	75.000.000	0	500 orang	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
11	1.5.16.15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			1 raperda		0	Rp -	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
12	1.5.16.14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Jumlah peserta sosialisasi tentang kampung bebas narkoba serta operasi P4GN			4 kampung		49.563.000	1 kampung	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
13		Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	Rp 12	834.052.000	12 laporan	917.457.200	1.371.385.000	12 laporan	1.009.202.920	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**28.587.000**		**31.446.000**	**0**		**34.590.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
					839,992,000		849,477,000			917,944,000			
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000			
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000			
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000			
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000			
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542			
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000			
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000			
			Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	28.587.000	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	31.446.000	0	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	34.590.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**176.100.000**		**193.700.000**	**115.619.000**		**213.100.000**			
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000			
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000			
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%				
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%				
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%				
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	Rp 200	30.400.000	200 orang	33.500.000	13.915.000	75 orang	36.800.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	Rp 200	30.100.000	200 orang	33.100.000	13.853.000	75 orang	36.300.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	Rp 180	29.980.000	200 orang	31.479.000	14.046.000	75 orang	33.053.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
4	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	Rp 100	21.400.000	100 orang dan 1 kegiatan	23.500.000	34.817.000	75 orang dan 1 kegiatan	25.900.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	1.5.17.8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 60	64.220.000	12 bulan dan 40 buku	72.121.000	20.000.000	12 bulan dan 40 buku	81.047.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upacara Hari Bela Negara			1 kegiatan		18.988.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.5.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**			**158.100.000**		**173.800.000**	**169.609.000**		**191.200.000**			
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	Rp 10		Rp 10			Rp 10				
			Terpublikasikannya dialog antar agama	Rp 6		Rp 8			Rp 9				
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	Rp 2		Rp 4			Rp 4				
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%			100%				
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	Rp 3		Rp 3			Rp 3				
1	1.5.18.1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	Rp 200	30.100.000	200 orang	33.100.000	19.569.000	100 orang	36.300.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	1.5.18.2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	Rp 100	27.900.000	150 orang	30.600.000	20.200.000	50 orang	33.700.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	1.5.18.7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Fasilitasi FKUB dan Rakor ttg kerukunan antar umat beragama	Rp 4	49.400.000	4 kegiatan	54.300.000	72.604.000	12 bulan dan 4 kegiatan	59.800.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.5.18.8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Fasilitasi FPBI Kota dan Rakor ttg pembauran kebangsaan	Rp 4	50.700.000	4 kegiatan	55.800.000	57.236.000	12 bulan dan 2 kegiatan	61.400.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	1.5.18.10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Peserta dialog tentang antisipasi paham radikalisme			240 orang		0	100 orang	0	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**141.946.000**		**147.346.000**	**33.246.000**		**153.346.000**			
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%			75.00%				
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%			9.45%				
1	1.5.19.2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	Rp 90	53.700.000	240 orang	59.100.000	18.000.000	50 orang	65.100.000	Kab/Kota se-Jateng	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota Magelang	4 kali dan 12	88.246.000	12 kali	88.246.000	15.246.000	12 bulan	88.246.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	1.5.21	**Program pendidikan politik masyarakat**			**87.000.000**		**95.800.000**	**90.768.000**		**105.700.000**			
			Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	Rp 1		Rp 1			Rp 1				
			Tingkat partisipasi politik	Rp 67		Rp 79			Rp 76				
1	1.5.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	Rp 180	32.200.000	180 orang	35.400.000	29.558.000	150 orang	39.100.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	1.5.21.3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	Rp 36	15.800.000	36 orang	17.400.000	18.671.000	36 orang	19.200.000	Hotel Safira	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	1.5.21.6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Diseminasi, Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol dan penyerahan bantuan keuangan parpol	Rp 9	9.100.000	3 kegiatan	10.100.000	21.906.000	3 kegiatan	11.200.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	1.5.21.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan perkembangan politik daerah			10 laporan		0	Rp -	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	1.5.21.7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu	Rp 200	29.900.000	200 orang	32.900.000	20.633.000	100 orang	36.200.000	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
			TOTAL		2.201.110.000		2.538.913.000	3.253.602.000		2.648.288.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Sosial
URUSAN : Sosial

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial							
	1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		490.579.000				462.213.000	
1	1.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat tercatat	2.000.000	40 surat	Dana Alokasi Umum	ExBAU	1.000.000	20 surat
2	1.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	45.000.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	39.000.000	12 bulan
3	1.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	6.098.000	11 kendaraan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	6.098.000	11 kendaraan
4	1.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	101.118.000	9 orang	Dana Alokasi Umum	ExBAU	101.118.000	9 orang
5	1.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	27.600.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	27.600.000	12 bulan
6	1.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	11.380.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	11.380.000	12 bulan
7	1.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8.831.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	8.831.000	12 bulan
8	1.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	2.080.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	2.080.000	12 bulan
9	1.6.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan dapur, bendera dan umbul-umbul	2.000.000	21 jenis	Dana Alokasi Umum	ExBAU	2.000.000	21 jenis
10	1.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	4.800.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	4.800.000	12 bulan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
11	1.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya tabung gas	1.914.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	1.914.000	12 bulan
12	1.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	30.000.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	30.000.000	12 bulan
13	1.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	85.395.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	85.395.000	12 bulan
14	1.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	149.515.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	128.149.000	12 bulan
15	1.6.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12.848.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	12.848.000	12 bulan
	1.6.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		161.937.000				161.937.000	
1	1.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000	1 jenis	Dana Alokasi Umum	ExBAU	7.000.000	1 jenis
2	1.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	15.000.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	15.000.000	12 bulan
3	1.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	129.992.000	12 kendaraan	Dana Alokasi Umum	ExBAU	129.992.000	12 kendaraan
4	1.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	4.965.000	9 jenis	Dana Alokasi Umum	ExBAU	4.965.000	9 jenis
5	1.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	4.980.000	4 jenis	Dana Alokasi Umum	ExBAU	4.980.000	4 jenis
	1.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		54.080.000				54.080.000	
1	1.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan capaian kinerja	10.550.000	4 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	10.550.000	4 dokumen

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
2	1.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	6.680.000	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	6.680.000	1 dokumen
3	1.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	7.022.000	2 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	7.022.000	2 dokumen
4	1.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	14.654.000	2 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	14.654.000	2 dokumen
5	1.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	penyusunan Dokumen LKjIP	8.494.000	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	8.494.000	1 dokumen
6	1.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.680.000	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	ExBAU	6.680.000	1 dokumen
	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		89.013.000				78.113.000	
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian		100%				
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya		14.00%				
1	1.6.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	73.777.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM	62.877.000	12 bulan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
2	1.6.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	8.873.000	51 orang	DBHCHT	Program prioritas RPJM	8.873.000	51 orang
3	1.6.15.8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi KJS	6.363.000	2 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	6.363.000	2 kegiatan
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		798.604.000				559.902.000	
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos		100%				
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		40.00%				
1	1.6.16.36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi	25.000.000	17 orang	DBHCHT	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang	25.000.000	17 orang
2	1.6.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	peserta sosialisasi adopsi	10.664.000	60 orang	Dana Alokasi Umum	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM	0	Rp -
3	1.6.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	35.384.000	50 orang	Dana Alokasi Umum	Rencana	0	Rp -
4	1.6.16.12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	15.299.000	120 orang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	15.299.000	120 orang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
5	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	32.953.000	136 orang	DBHCHT	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM	32.953.000	136 orang
6	1.6.16.15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	16.702.000	25 orang	DBHCHT	Rencana	16.702.000	25 orang
7	1.6.16.16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	51.435.000	2 dokumen	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	45.255.000	2 dokumen
8	1.6.16.17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	53.934.000	51 orang	Dana Alokasi Umum	Rencana	50.984.000	51 orang
9	1.6.16.4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	peserta pelatihan	15.956.000	40 orang	DBHCHT	Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan	15.956.000	40 orang
10	1.6.16.44	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	220.418.000	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	142.364.000	1 kegiatan
11	1.6.16.18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	9.747.000	20 orang	DBHCHT	Penanggulangan Kemiskinan	9.747.000	20 orang
12	1.6.16.30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	134.679.000	12 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	57.639.000	12 kegiatan
13	1.6.16.45	Operasional Tim Reaksi Cepat	tertanganinya permasalahan PMKS	66.751.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	66.751.000	12 bulan
14	1.6.16.47	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	17.706.000	60 orang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	17.706.000	60 orang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
15	1.6.16.46	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan KUBE e Warong	16.285.000	5 e-Warong	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	16.285.000	5 e-Warong
16	1.6.16.50	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Penyaluran hibah/bansos yang tepat sasaran	48.031.000	6 bulan	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	47.261.000	6 bulan
17	1.6.16.3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	peserta sosialisasi	27.660.000	240 orang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	0	Rp -
	1.6.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		114.795.000				94.195.000	
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial		40%				
1	1.6.18.3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta pelatihan	32.417.000	40 orang	DBHCHT	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan	32.417.000	40 orang
2	1.6.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial dan peserta kegiatan HDI	82.378.000	26 orang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	61.778.000	18 orang (HDI=16, bansos=2)
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		13.076.000				13.076.000	
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia		75%				
1	1.6.19.8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	13.076.000	12 yayasan	Dana Alokasi Umum	Rencana	13.076.000	12 yayasan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
	1.6.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		231.012.000				189.612.000	
			Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA		85%				
1	1.6.20.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial peserta pelatihan	12.377.000	30 orang	DBHCHT	Rencana, Program prioritas RPJM	12.377.000	30 orang
2	1.6.20.6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	218.635.000	6 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	177.235.000	6 kegiatan
	1.6.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		571.219.000				516.418.000	
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		100%				
			Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial		Rp 6				
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		50%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
1	1.6.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	119.954.000	75 pengusaha	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM	72.522.000	75 pengusaha
2	1.6.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	193.464.000	85 orang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan	191.964.000	85 orang
3	1.6.21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi sosial	16.643.000	2 organisasi	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	16.643.000	2 organisasi
4	1.6.21.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	149.158.000	Rp 5.500	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	143.289.000	5500 m2
5	1.6.21.8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	70.000.000	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM	70.000.000	1 kegiatan
6	1.6.21.9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	22.000.000	5 WKSBM	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM	22.000.000	5 WKSBM
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		28.168.000				28.168.000	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	STATUS	Setelah Rasionalisasi 2	
			TOLOK UKUR	INPUT MANUAL	TAR5			Pagu	Target
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14		
			DISNAKERTRANSOS						
			KESBANGPOL						
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan		77,4%				
			Database ormas yang akurat		75.00%				
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT		49,90%				
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	28.168.000	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum	Rencana	28.168.000	1 kegiatan
			TOTAL	2.552.483.000				**2.157.714.000**	

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Tenaga Kerja

URUSAN : Tenaga Kerja; Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja												
	2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			564.935.250		585.434.250	**582.769.000**		**582.769.000**				
1	2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	480	1.800.000	490 surat	2.000.000	1.500.000	500 surat	1.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	12	80.400.000	48 langganan	85.000.000	99.000.000	12 bulan	99.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	17	6.850.000	18 unit	7.500.000	7.150.000	18 unit	7.150.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	92.084.000	12 orang	93.000.000	82.159.000	12 bulan	82.159.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
5	2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12	100.719.000	2 jenis	110.000.000	119.655.000	12 bulan	119.655.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	50.308.000	30 item	51.500.000	10.174.000	12 bulan	10.174.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	20.040.000	2 jenis	20.540.000	10.890.000	12 bulan	10.890.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU

8	2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.657.000	12 item	13.157.000	10.488.000	12 bulan	10.488.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2	1.344.000	8 kegiatan	1.844.000	900.000	2 kegiatan	900.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	3.960.000	12 bulan	4.000.000	3.960.000	12 bulan	3.960.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	2.700.000	12 bulan	3.020.000	2.952.000	12 bulan	2.952.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.387.250	12 bulan	12.887.250	12.770.000	12	12.770.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72	101.642.000	72 kegiatan	102.142.000	100.530.000	80	100.530.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	69.744.000	5 orang	70.244.000	112.920.000	12	112.920.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	2.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	8.300.000	26 Pegawai	8.600.000	7.721.000	12	7.721.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			181.584.000		201.700.000	**152.503.000**		**152.503.000**				
1	2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	800	39.250.000	800 m2	40.000.000	18.950.000	400	18.950.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	17	122.404.000	18 unit	135.000.000	110.303.000	18	110.303.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2	6.875.000	10 unit	7.500.000	12.250.000	2	12.250.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6	13.055.000	20 unit	19.200.000	11.000.000	18	11.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota	Dana Alokasi	34	ExBAU

	2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			31.258.000		33.250.000	31.624.000		31.624.000				
1	2.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12	6.444.000	12 Bulan	7.500.000	5.012.000	12	5.012.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1	4.898.000	1 laporan	5.000.000	2.805.000	1	2.805.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2	6.838.000	2 Dokumen	7.000.000	6.030.000	2	6.030.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2	8.137.000	2 Dokumen	8.500.000	12.392.000	2	12.392.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1	4.941.000	1 Dokumen	5.250.000	5.385.000	1	5.385.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	2.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan OPD			1 dokumen		0	1	0	Dinas Tenaga Kerja	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			683.024.000		908.900.000	**743.524.000**		**743.524.000**				
			Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	5%		5%			7,5%					
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssi	65%		65%			65%					
			Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	5%		5%			7,5%					

1	2.1.15.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	terpeliharanya sarana dan prasarana BLK	500	20.000.000	600 m2	24.000.000	0	150	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.1.15.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan peserta pelatihan tahun 2019	122	4.910.000	230 peserta	5.100.000	7.719.000	125	7.719.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.1.15.11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	20	62.371.000	40 Orang	92.000.000	128.782.000	32	128.782.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
4	2.1.15.13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	13	11.750.000	11 LPK	11.800.000	8.596.000	13	8.596.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.1.15.16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	20	155.444.000	20 orang	205.000.000	109.188.000	32	109.188.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
6	2.1.15.17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20	67.196.000	20 orang	99.000.000	105.209.000	40	105.209.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD

7	2.1.15.18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20	80.636.000	20 orang	123.000.000	52.321.000	32	52.321.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
8	2.1.15.19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11	55.199.000	11 Orang	85.000.000	30.871.000	32	30.871.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
9	2.1.15.20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknisi HP	11	51.246.000	11 orang	84.000.000	0	0	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang
10	2.1.15.24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	50	174.272.000	45 Orang	180.000.000	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	SDGs
11	2.1.15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base dan rencana tenaga kerja daerah			1 Dokumen		121.874.000	1500	121.874.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.1.15.30	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	jumlah pencari kerja yang mendapatkan akses informasi			1000 orang		88.464.000	800	88.464.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Pokok Pikiran DPRD
13	2.1.15.8	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Terehabnya sarana dan prasarana ruang tata boga BLK			64 m2		0	0	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	2.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Tersediaya peralatan pelatihan			1 Unit		0	0	0	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

15	2.1.15.31	Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Terlaksananya penyelenggaraan tenaga kerja					90.500.000	12 bulan	90.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi												
	3.8.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			188.734.000		259.000.000	**16.880.000**		**16.880.000**				
			Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan	100%		100%			100%					
1	3.8.15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2	72.277.000	2 Lokasi	77.000.000	16.880.000	2	16.880.000	Penempatan transmigrasii 2020	Dana Alokasi Umum	85	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.8.15.5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5	66.703.000	5 KK 1 lokasi	130.000.000	0	10	0	Daerah penempatan	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.8.15.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2	49.754.000	2 lokasi	52.000.000	0	2	0	Lokasi Transmigrasi penempatan Tahun 2018 dan tahun 2017	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja												
	2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			583.020.000		630.500.000	**1.105.497.000**		**1.105.497.000**				
			Persentase wirausaha baru	6%		7%			8%					
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%		75%			80%					
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan											

1	2.1.16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12	143.650.000	12 Laporan	155.000.000	94.175.000	12	94.175.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Pokok Pikiran DPRD
2	2.1.16.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2	35.220.000	2 Kegiatan	38.000.000	56.260.000	2	56.260.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.1.16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	10	118.905.000	50 Orang	150.000.000	44.425.000	150	44.425.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
4	2.1.16.14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	750	285.245.000	50 Perusahaan	287.500.000	38.520.000	800	38.520.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	96	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.1.16.15	Padat Karya Non Bahan						732.814.000		732.814.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
5	2.1.16.19	Konsultasi Pencari Kerja	Terlaksananya kesempatan kerja					56.843.000	500 Pencari Kerja	56.843.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.1.16.20	Pendampingan Pencari Kerja	Terlaksananya kesempatan kerja					82.460.000	680 Pencari kerja	82.460.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			205.965.000		219.350.000	**266.321.000**		**266.321.000**				
			Coverage asuransi tenaga kerja	70%		70%			75%					

			Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama	50%		50%			100%					
1	2.1.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10	15.000.000	10 kasus	15.500.000	19.708.000	10	19.708.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
2	2.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan	240	25.000.000	100 orang	29.000.000	14.695.000	260	14.695.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	2.1.17.9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	10	32.600.000	4 kali	36.000.000	63.600.000	10	63.600.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.1.17.10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4	26.050.000	4 kali	26.500.000	35.309.000	4	35.309.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraa
5	2.1.17.14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	2	8.200.000	150 perusahaan	8.250.000	13.099.000	200	13.099.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	egas Skenario Kemitraan
6	2.1.17.15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	2	22.500.000	120 perusahaan	25.000.000	18.401.000	150	18.401.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.1.17.27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasiltasinya peringatan Hari Buruh Internasional			1 kegiatan		27.590.000	400	27.590.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

8	2.1.17.25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	30	21.480.000	120 orang	21.600.000	18.589.000	120	18.589.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.1.17.26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	30	15.035.000	80 Perusahaan	17.000.000	15.132.000	150	15.132.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.1.17.21	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	Perusahaan yang terdaftar,terbina dan termonitor	200	40.100.000	120 orang	40.500.000	17.396.000	120 perusahaan	17.396.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.1.17.28	Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial	terwujudnya sarana Hubungan Industrial di perusahaan					12.098.000	100 perusahaan	12.098.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
12	2.1.17.29	Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang					10.704.000	75 Perusahaan	10.704.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi												
	3.8.17	Program Transmigrasi Regional			40.171.000		41.000.000	0		0				
					277,926,000		294,374,000			0				
			Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%		100%			0					
1	3.8.17.1	Penyuluhan transmigrasi regional	masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	300	40.171.000	300 Orang	41.000.000	0	60	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan

			TOTAL		2.478.691.250		2.879.134.250	2.899.118.000		2.899.118.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN : Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR4	INPUT MANUAL	Rasionalisasi	Selisih	
Rp1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 9			Rp 13
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup						
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			456.777.000	277.031.000	179.746.000	
			Indeks Kualitas Air,	76%				
			Indeks Kualitas Udara	78%				
			Indeks Tutupan Hutan	49%				
			Jumlah SDA yang terkonservasi	67,7				
			Jenis flora	12 Jenis				
			Jenis fauna	3 Jenis				
###	2.5.17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim	1 kampung iklim	21.306.000	21.306.000	0	Dana Alokasi Umum
###	2.5.17.42	Pengadaan Sumur Resapan	Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi	8 unit sumur resapan	49.418.000	0	49.418.000	Dana Alokasi
###	2.5.17.43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di	Terwujudnya Sekolah Adiwiyata	6 Sekolah	92.036.000	92.036.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.17.39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Anggota Saka Kalpataru	80 orang	28.898.000	28.898.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.17.44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan	8 kegiatan	101.277.000	51.277.000	50.000.000	Dana Alokasi
###	2.5.17.45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	Terlaksananya Lomba K3	68 peserta	163.842.000	83.514.000	80.328.000	Dana Alokasi
	2.5.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			23.237.000	23.237.000	0	
			Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara	100%			0	
###	2.5.20.19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan	Tersedianya data penghasil Bahan Perusak Ozon	8 usaha/kegiatan	7.963.000	7.963.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.20.18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	terpantaunya gas rumah kaca	1 dokumen	15.274.000	15.274.000	0	Dana Alokasi
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang					0	
	1.4.20	Program pengelolaan areal pemakaman			697.851.000	697.851.000	0	
			DISNAKERTRANSOS				0	
			DKPT				0	
			Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per	Rp -			0	
###	1.4.20.5	Pemberian perijinan pemakaman	Terwujudnya ijn pemakaman baru, pemesanan	1300 ijin	50.919.000	50.919.000	0	Dana Alokasi
###	1.4.20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan	6 unit	589.779.000	589.779.000	0	Dana Alokasi
###	1.4.20.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengendalian pengelolaan	12 laporan	32.930.000	32.930.000	0	Dana Alokasi
###	1.4.20.14	Verifikasi Data Pemakaman	Terlaksanya trtib administrasi TPU Giriloyo	180 lembar	13.998.000	13.998.000	0	Dana Alokasi
###	1.4.20.16	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Terbinanya tanaga lapangan	75 orang	10.225.000	10.225.000	0	Dana Alokasi
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya					0	
	3.5.17	Program pembinaan dan pengembangan			7.727.121.000	7.227.121.000	500.000.000	
###	3.5.17.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan	Tangga 2 bh, Tang	47.657.000	47.657.000	0	Dana Alokasi

###	3.5.17.2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota	44 titik	392.548.000	392.548.000	0	Dana Alokasi
###	3.5.17.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur	12 buku	21.964.000	21.964.000	0	Dana Alokasi
###	3.5.17.3	Pemeliharaan lampu PJU	Terlaksananya perbaikan dan penggatian suku	5150 titik	664.952.000	664.952.000	0	Dana Alokasi
###	3.5.17.8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Terbayarnya rekening listrik pju	12 bulan	6.600.000.000	6.100.000.000	500.000.000	Dana Alokasi
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang					0	
	2.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.700.614.000	1.548.528.000	152.086.000	
###	2.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan tertib administrasi	106 pns	226.020.000	226.020.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya alat listrik penerangan kantor	20 jenis	5.053.000	5.053.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan	75 unit	91.121.000	91.121.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik	12 bulan	121.800.000	121.800.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat	60 lembar	450.000	450.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan keberihan dan bahan	35 jenis	74.584.000	74.584.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 kali	2.671.000	2.671.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12	12 bulan	5.760.000	5.760.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5 jenis	401.198.000	249.112.000	152.086.000	Dana Alokasi
###	2.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	Perjalanan dinas ke luar daerah	350 kegiatan	250.000.000	250.000.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 bendel	14.129.000	14.129.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	29.527.000	29.527.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	15.685.000	15.685.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan	13 orang	458.616.000	458.616.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.1.25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah	PBB tanah TPA	1 tahun	4.000.000	4.000.000	0	Dana Alokasi
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan			11.822.301.000	11.857.419.000	-35.118.000	
							0	
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	Rp 5			0	
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	90%			0	
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	5,3%			0	
###	2.5.15.25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	73000 m3	1.844.386.000	1.841.986.000	2.400.000	Dana Alokasi
###	2.5.15.7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan	terlaksananya pembinaan tenaga kebersihan dan	2 keg	65.831.000	65.831.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.1	Penyusunan kebijakan manajemen	Terwujudnya sistem manajemen dan pelaporan	1 software sistem	13.031.000	13.031.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan	12 bulan	176.375.000	176.375.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan	Jumlah peserta pelatihan daur ulang	60 orang	37.000.000	37.000.000	0	DBHCHT
###	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	Jumlah kampung organik yang terpantau dan	17 Kelurahan	22.115.000	22.115.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan	Operasional TPST	5 TPST	523.549.000	523.549.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator	Terlaksananya pelatihan fasilitator lingkungan	50 orang	27.951.000	27.951.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume	Buku volume sampah harian	1 dokumen	32.856.000	32.856.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan	gerobak sampah, armroll, motor roda 3	68 buah, 30 buah, 60	1.347.734.000	1.347.734.000	0	DAK dengan
###	2.5.15.24	Penanganan sampah kota	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan	45.000m3	4.300.224.000	4.550.224.000	-250.000.000	Dana Alokasi
###	2.5.15.52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan	pengelolaan TPS 3R Magersari - SPA Magersari	12 Bulan	32.269.000	32.269.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengelolaan persampahan transfer depo	12 buku	28.669.000	28.669.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan	6 transfer depo, 80	185.188.000	30.466.000	154.722.000	Dana Alokasi
###	2.5.15.54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya fasilitasi penilaian Adipura	2 ekspose, 3	274.023.000	274.023.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.15.6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan TPST	10 kali, 3 kali	69.209.000	51.449.000	17.760.000	Dana Alokasi
###	2.5.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	Lomba pengelolaan sampah (kampung organik	3 lomba	191.891.000	151.891.000	40.000.000	Dana Alokasi
###	2.5.15.66	Pematangan Lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong		2.650.000.000	2.650.000.000	0	Dana Alokasi
	2.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana			11.380.570.000	11.380.570.000	0	
###	2.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor		0	0	0	Dana Alokasi

###	2.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Perbaikan dan operasional kendaraan	54 unit	1.241.361.000	1.241.361.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 unit	94.766.000	94.766.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 unit	3.500.000	3.500.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Kantor DLH		10.000.000.000	10.000.000.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6 unit	10.032.000	10.032.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Pemeliharaan alat kantor	50 unit	30.911.000	30.911.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	2 unit	0	0	0	Dana Alokasi
###	2.5.2.40	Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas	Tersusunnya DED Gedung Kantor Dinas		0	0	0	Dana Alokasi
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan			812.015.000	812.015.000	0	
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil	40%			0	
###	2.5.16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1 unit	18.684.000	18.684.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan	Terverifikasinya izin PPLH	8 dokumen	32.098.000	32.098.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan Dokumen	8 dokumen	65.451.000	65.451.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan	Tercapainya pelayanan dalam penerbitan SPPL	120 dokumen	24.159.000	24.159.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Terpeliharanya kualitas mata air di Kota	20 lokasi / 40 sampel	42.936.000	42.936.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah	Terpantaunya Kualitas Air Limbah yang dibuang	54 sampel	42.509.000	42.509.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan	Tertanganinya Pengaduan Kasus Lingkungan	4 pengaduan kasus	13.893.000	13.893.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan pmonev engelolaan sampah TPSA	12 bulan	13.509.000	13.509.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	70 lubang	76.761.000	76.761.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 bulan	31.440.000	31.440.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang	Terlaksananya Kirab Adipura dan Tasyakuran	2 keg, kirab dan	275.753.000	275.753.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Terfasilitasinya kerja bakti	2.400 orang, 6	48.296.000	48.296.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air	34 sampel	43.560.000	43.560.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang	Terlaksananya pengawasan kegiatan yang	15 usaha/dokumen	18.327.000	18.327.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.24	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara, NO,	20 sampel	58.940.000	58.940.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.16.50	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya ssosialisasi kebijakan bidang	25 usaha/kegiatan	5.699.000	5.699.000	0	Dana Alokasi
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau			4.581.219.000	12.081.219.000	-7.500.000.000	
			Luas RTH Kota	18%			0	
###	2.5.24.29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen	Terpeliharanya pagar, tiang bendera, dan pipa	212 buah	53.000.000	53.000.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	11 buah	67.679.000	67.679.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	53 taman	3.340.443.000	3.340.443.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.85	Penanganan Pohon Tumbang	Terlindunginya masyarakat kota magelang dari	10 kegiatan	50.136.000	50.136.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.26	Perawatan Pohon Peneduh	Terpeliharanya pohon peneduh kota	200 Pohon Peneduh	38.154.000	38.154.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang	Tersedinya Sarana dan Prasarana pengelolaan	623 buah umbul	132.769.000	132.769.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam	Terlaksananya lomba taman	1 lomba taman	124.142.000	124.142.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka	12 buku	75.484.000	75.484.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Tercapainya penghijauan tepi jalan	100 tabebuya, 100	78.111.000	78.111.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.18	Penataan Taman Aloon-aloon	Terwujudnya Keindahan Taman dan memperkuta	1 area olahraga	0	0	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Terwujunya lahan pembibitan yang mendukung	8 jenis tanaman 10	152.236.000	152.236.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.95	Penataan Taman Jalan Soekarno Hatta	Terwujudnya Keindahan Taman dan memperkuta		0	0	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya pengecatan pohon turus jalan	1300 pohon	77.480.000	77.480.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.92	Penataan Taman Depan RSJ	Tertatanya Taman Depan RSJ		0	0	0	Dana Alokasi
###	2.5.24.61	Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara	tertatanya taman tanggul kali kota utara		391.585.000	391.585.000	0	Dana Alokasi
		Pematangan lahan taman jl.urip sumoharjo	tertatanya lahan taman jl urip sumoharjo	1 lokasi		5.000.000.000	-5.000.000.000	

###		Pembangunan Taman Ex Gudang DPU Canguk	Terbangunnya Taman Ex Gudang DPU Canguk		0	2.500.000.000	-2.500.000.000	Dana Alokasi Umum
	2.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem			143.547.000	143.547.000	0	
			Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar				0	
###	2.5.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan	Tersinkronnya laporan aset dan keuanganDLH	2 Dokumen	18.720.000	18.720.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi	1 dokumen	7.662.000	7.662.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi	Tersusunnya LKJIP DLH Tahun 2018	1 dokumen	9.343.000	9.343.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/DPA 2020 dan RKA/DPA	4 dokumen	23.925.000	23.925.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 dokumen	9.779.000	9.779.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya laporan capaian kineja fisik dan	12 laporan	20.831.000	20.831.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun anggaran 2019	1 laporan	8.959.000	8.959.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja	Monitoring dan evaluasi kegiatan di DLH	165 kegiatan	26.200.000	26.200.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja 2020 dan Renja Perubahan	2 dokumen	18.128.000	18.128.000	0	Dana Alokasi
	2.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			356.373.000	303.279.000	53.094.000	
###	2.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan kinerja aparatur	477 orang	356.373.000	303.279.000	53.094.000	Dana Alokasi
	2.5.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses			1.111.990.000	1.078.330.000	33.660.000	
			Jumlah akses informasi dan data sumberdaya	6 buah			0	
###	2.5.19.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Terpantaunya kualitas air	1 dokumen	33.901.000	33.901.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di	2 pameran, 1 lomba	177.567.000	177.567.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya	1 dokumen	13.250.000	13.250.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi	Terpublikasinya Pelayanan kepada masyarakat	143 tayang	134.120.000	100.460.000	33.660.000	Dana Alokasi
###	2.5.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya akses informasi dan data	1 dokumen	65.227.000	65.227.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan	Terlaksananya pendampingan hukum untuk	12 laporan	594.526.000	594.526.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas	terinfomasinya indeks kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	7.254.000	7.254.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.28	Penyusunan Data dan Profil DLH	Tersedia data dan Profil DLH	1 Dokumen	27.200.000	27.200.000	0	Dana Alokasi
###	2.5.19.29	Penetapan Wilayah Ekoregion	terinformasinya wilayah ekoregion		58.945.000	58.945.000	0	Dana Alokasi
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang					0	
	4.2.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem			19.365.000	0	19.365.000	
###	4.2.18.3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern		19.365.000	0	19.365.000	Dana Alokasi
			TOTAL		40.832.980.000	47.430.147.000	-6.597.167.000	

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil											
	2.6.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**684.244.000**		**698.408.000**	**619.720.000**		**747.877.000**			
1	2.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran kegiatan OPD	388	1.750.000	396 surat	1.750.000	1.505.000	396 surat	1.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran kegiatan OPD	12	218.600.000	5 jenis	219.980.000	124.275.000	5 jenis	230.067.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13	5.260.000	13 Kendaraan	5.260.000	5.415.000	13 kendaraan	5.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran kegiatan OPD	12	82.416.000	12 laporan	95.000.000	88.829.000	12 Laporan	95.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelancaran kegiatan OPD	966,32	40.000.000	967 m2	40.000.000	50.131.000	1540 m2	40.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran kegiatan OPD	66	26.000.000	66 jenis	26.000.000	15.168.000	63 jenis	26.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	9	13.000.000	2 Jenis	13.000.000	10.145.000	2 jenis	13.500.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11	5.500.000	11Jenis	5.500.000	4.736.000	11 jenis	5.500.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
9	2.6.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	1	750.000	3 Jenis	750.000	498.000	1 jenis	750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2	3.600.000	2 Jenis	3.800.000	2.400.000	2 jenis	3.800.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	1	3.000.000	4 Jenis	3.000.000	8.318.000	3 jenis	3.300.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	310	20.000.000	511 Orang	20.000.000	20.780.000	300 orang	22.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	2.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	87	200.000.000	40 kegiatan	200.000.000	181.380.000	36 kegiatan	220.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	ExBAU
14	2.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	3	64.368.000	3 Orang	64.368.000	106.140.000	5 orang	80.460.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.6.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.125.350.000**		**774.264.000**	**226.457.000**		**834.915.000**			
					1,193,488,000		1,671,016,000			1,893,922,000			
1	2.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2464	120.750.000	3 gedung	70.750.000	28.969.000	3 gedung	105.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13	106.000.000	13 unit	106.000.000	96.251.000	13 unit	110.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	30	15.000.000	24 Jenis	15.000.000	8.295.000	16 unit	15.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	76	133.600.000	45 unit	143.514.000	21.819.000	37 unit	154.915.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.6.2.10	Pengadaan mebeleur	Kelancaran kegiatan OPD					0	1 jenis	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	13	750.000.000	15 jenis	439.000.000	20.449.000	2 jenis	450.000.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
7	2.6.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan operasional OPD					50.674.000	4 unit kendaraan dinas roda 2	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.6.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**62.175.000**		**62.675.000**	**43.436.000**		**63.175.000**			
1	2.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	4	11.700.000	4 laporan	11.700.000	10.998.000	4 laporan	11.700.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	6.549.000	1 dokumen	6.549.000	2.475.000	1 dokumen	6.549.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	9.926.000	1 dokumen	9.926.000	5.976.000	1 dokumen	9.926.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2	11.000.000	2 dokumen	11.000.000	8.487.000	2 dokumen	11.000.000	Jl. Veteran no. 7 magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2	17.000.000	2 dokumen	17.500.000	11.000.000	2 dokumen	18.000.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	4.500.000	1 dokumen	6.000.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**360.261.000**		**367.616.000**	**1.399.172.000**		**431.386.000**			
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%				
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%				
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		Rp 940			Rp 945				
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%				
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%				
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%				
1	2.6.15.70	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Tertib Administrasi Kependudukan						2 jenis (buku data penduduk per semester dan buku profil kependudukan)	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan			30 buku		50.091.000	30 buku	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Program prioritas RPJM
3	2.6.15.71	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak	Tertib Administrasi Kependudukan						2 jenis (pencetakan KTP -el dan KIA)	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.15.62	Perekaman Keliling KTP-el	Penyelesaian Perekaman Wajib KTP-el					137.995.000	3000 orang	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.6.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	150	140.580.000	1 kelancaran operasionalitas SIAK di atas 95 %	161.667.000	138.664.000	1 kelancaran operasionalitas SIAK di atas 95 %	185.917.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6	63.977.000	1200 surat	75.573.000	33.127.000	1200 surat	84.609.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
7	2.6.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan		21.960.000	120 orang peserta sosialisasi	6.000.000	25.000.000	1240 peserta	24.156.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Tema RKPD 2019
8	2.6.15.65	Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	46.471.000	4 laporan	53.442.000	16.868.000	4 laporan	61.458.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	2.6.15.17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40	32.500.000	40 orang	34.000.000	19.891.000	40 orang	35.700.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019
10	2.6.15.43	Penyusunan Buku Data Penduduk	Tertib administrasi kependudukan			30 buku		17.495.000	30 buku	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Program prioritas RPJM
11	2.6.15.28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21	13.294.000	21 tempat	14.624.000	10.980.000	21 tempat pelayanan (17 kelurahan & 4 rumah bersalin)	16.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.6.15.30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan	1150	20.397.000	6 kali (3 kecamatan)	0	18.277.000	6 kali (3 kecamatan)	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
13	2.6.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4	16.800.000	Rp 4	17.600.000	27.239.000	6 laporan	18.500.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
14	2.6.15.7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	1	4.282.000	3 jenis	4.710.000	144.206.000	4 jenis (12 kali penyiaran radio spot, cetak leaflet, pameran pembangunan, car free day)	4.946.000	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	2.6.15.67	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	Tertib pemanfaatan data sesuai peraturan yang berlaku			1 instansi lintas sektor		110.162.000	3 OPD	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
16	2.6.15.72	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan						2 jenis (dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
17	2.6.15.73	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan						2 jenis (penyiaran radio spot, cetak leaflet)	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	2.6.15.59	Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga					231.547.000	8000 orang	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	2.6.15.61	Penyelenggaraan KIA Goes to School	Cakupan Penerbitan KIA					189.116.000	7000 orang	0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Kota Layak Anak
20	2.6.15.64	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tindak lanjut penanganan pengaduan					15.720.000	120 pengaduan	0	KOta MAgelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
21	2.6.15.68	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan					212.794.000	3914 (akta:lahir 2200, kawin 115, cerai 25, kematian 1200, kutipan II 350, pengakuan anak 5,pengesahan anak 5,catatan pinggir pengangkatan anak 2, catatan pinggir perubahan nama 12)	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	2.6.15.69	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tertib administrasi kependudukan						13 kegiatan	0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**119.919.000**		**137.906.000**	**12.771.000**		**158.592.000**			
					839,992,000		849,477,000			917,944,000			
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000			
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000			
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000			
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000			
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542			
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000			
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	Rp 1	119.919.000	1 tahun	137.906.000	12.771.000	1 tahun	158.592.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		2.351.949.000		2.040.869.000	2.301.556.000		2.235.945.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	2.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			605.250.000	751.125.000				
Rp 1	2.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	1.600.000	2.200.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 2	2.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor	12 bulan	95.165.000	99.000.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 3	2.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	43 unit	16.756.000	31.570.000	40 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 4	2.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	108.069.000	98.110.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 5	2.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	31.571.000	59.884.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 6	2.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	21.296.000	17.502.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 7	2.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	17.690.000	16.467.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 8	2.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14 jenis	13.310.000	16.305.000	14 jenis	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 9	2.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 bulan	4.791.000	3.000.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp10	2.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 tabung	4.525.000	2.788.000	20 tabung	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp11	2.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 bulan	35.757.000	37.906.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp12	2.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	181.149.000	223.698.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp13	2.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak penjaga malam, pengemudi dan petugas keamanan	12 bulan	64.254.000	128.856.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp14	2.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	9.317.000	13.839.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			438.369.000	332.124.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 1	2.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	144.000.000	80.000.000	2 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 2	2.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	43 unit	232.800.000	196.989.000	40 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 3	2.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 unit	54.848.000	38.235.000	60 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 4	2.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	79 unit	6.721.000	1.900.000	29 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 5	2.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik	10 unit		15.000.000	10 unit	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			6.110.000	5.600.000				
Rp 1	2.7.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 orang	6.110.000	5.600.000	15 orang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			44.319.000	65.381.000				
Rp 1	2.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan DP4KB	4 laporan		13.732.000	4 laporan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 2	2.7.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	5.882.000	4.255.000	1 laporan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 3	2.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	11.236.000	7.467.000	1 laporan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 4	2.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 dokumen	9.253.000	9.153.000	2 dokumen	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 5	2.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	11.334.000	9.347.000	2 dokumen	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 6	2.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 laporan	6.614.000	4.427.000	1 lapaoran	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 7	2.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah bansos	4 kegiatan		10.000.000	4 kegiatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
Rp 8	2.7.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Terlaksananya sinkronisasi aset dan keuangan DP4KB			7.000.000	1 keg	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			181.548.000	205.033.000				
Rp 1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan pembinaan LPMK se Kota Magelang	2 kegiatan	95.033.000	95.033.000	2 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 2	2.7.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil kelurahan tingkat kota	21 buku	86.515.000	0	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 3	2.7.15.9	Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan, Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Penutupan BBGRM			60.000.000	17 Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Tema RKPD 2019
Rp 4	2.7.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	1 keg		20.000.000	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
Rp 5	2.7.15.8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba UP2K PKK Tingkat Kota dan evaluasi tingkat provinsi	3 Kegiatan		30.000.000	3 Kegiatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			56.033.000	1.358.896.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rp 2			Rp 2			
Rp 1	2.8.15.2	Pelayanan KIE	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi program KB	3 Kegatan	21.150.000	15.000.000	4 Kegiatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 2	2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemeriksaan pupsmear	100 orang	23.170.000	15.000.000	100 orang	Dana Alokasi Umum		SDGs
Rp 3	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB	87 orang	11.713.000	11.713.000	87 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 4	2.8.15.17	Pembinaan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pembinaan pengendalian kependudukan di Kota Magelang	226 orang		15.000.000	216 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 5	2.8.15.16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB	12 bulan		673.183.000	12 bulan	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 6	2.8.15.19	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di sekolh	150 pelajar		8.000.000	37 (Guru BP & Pelajar)	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 7	2.8.15.7	Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)	Tersedianya kendaraan roda dua bagi Penyuluh KB			425.000.000	17 kendaraan	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Rencana
Rp 8	2.8.15.9	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK)	Tersedianya lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di klinik Pelayanan KB			196.000.000	14 unit	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			631.606.000	546.327.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	50.00%			52.63%			
Rp 1	2.2.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A, perlindungan anak dan perempuan, dan diversi anak	12 bulan	272.788.000	205.719.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
Rp 2	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak, Pembuatan plang puspaga dan sosialisasi pembentukan Puspaga RW ramah anak	17 Kelurahan	158.000.000	100.000.000	17 Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
Rp 3	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum anak se kota magelang	400 anak	134.000.000	75.000.000	400 anak	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
Rp 4	2.2.16.7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan,kecamatan,kota dan nasional	250 orang, 8 buka laporan	66.818.000	86.818.000	250 orang, 8 buku laporan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 5	2.2.16.21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersusunnya buku profil anak dan perempuan, Profil ramah anak, dan sosialisasi RT RW Ramah anak	2 buku, 150 orang		13.790.000	2 buku, 150 orang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 6	2.2.16.11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak	300 orang		15.000.000	300 orang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2.2.16.23	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	500 orang	53.000.000	25.000.000	500 orang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2.2.16.24	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	150 orang	42.350.000	15.000.000	150 orang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2.2.16.25	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	150 orang	18.200.000	10.000.000	60 orang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			0	17.000.000				
Rp 1	2.7.16.9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan TTG Kota Magelang	4 unit		0	4 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 2	2.7.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan penjarinbgan administrasi LKK/LED dan lomba			17.000.000	4 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			14.665.000	11.782.000				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%			1%			
Rp 1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	Rp 80	14.665.000	11.782.000	80 pelajar	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	2.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			66.550.000	32.851.000				
			Rasio KDRT	0.04%			0.04%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rp 18			Rp 17			
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%			100%			
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%			100%			
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%			100%			
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%			100%			
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%			100%			
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%			100%			
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%			100%			
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	5%			6%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 1	2.2.17.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tersedianya data perempuan yang bekerja di pemerintah dan swasta	150 orang, 2 buku	39.930.000	17.851.000	2 buku, 150 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 2	2.2.17.10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan ABH di Kota Magelang	250 orang	26.620.000	15.000.000	250 orang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Akomodasi Musrenbang
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	2.7.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			69.357.000	429.507.000				
Rp 1	2.7.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan temu kader DP4KB	2 kegiatan	0	25.000.000	2 Kegiatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
Rp 2	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional	5 kegiatan	43.857.000	84.507.000	3 Kegiatan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 3	2.7.17.6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB	60 orang	25.500.000	20.000.000	60 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 4	2.7.17.13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan	6 Kegiatan	0	300.000.000	6 kegiatan	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
Rp 5	2.7.17.14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya kegiatran TMMD	3 Kelurahan			3 kelurahan	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Rencana, Akomodasi Musrenbang
Rp 6	2.7.17.15	Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarajkat Kelurahan (LPMK)	Terlaksananya peningkatan Peran LPMK di Kelurahan	17 Kelurahan		0	17 Kelurahan	Dana Alokasi Umum		
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.8.17	Program pelayanan kontrasepsi			108.160.000	65.519.000				
			Cakupan peserta KB aktif	79.00%			80.00%			
Rp 1	2.8.17.1	Pelayanan konseling KB	Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB kepada masyarakat	213 konselor tingkat kelurahan	24.558.000	21.852.000	213 konselor tingkat kelurahan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 2	2.8.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	125 orang	47.000.000	10.390.000	100 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 3	2.8.17.4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MOP	20 orang	36.602.000	33.277.000	25 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			453.650.000	137.000.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	23%			26%			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	26%			30%			
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	79,00%			79,50%			
Rp 1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	3 kegiatan	84.000.000	82.000.000	3 Kegiatan	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan
Rp 2	2.2.18.7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	Rp 50	41.500.000	20.000.000	50 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 3	2.2.18.8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan Hari anak Nasional	500 anak	328.150.000	35.000.000	500 orang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			161.150.000	162.125.000				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	68%			70%			
Rp 1	2.8.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas lain	Rp 215	99.658.000	112.321.000	215 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 2	2.8.18.2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	446 orang	34.606.000	29.334.000	446 orang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Program prioritas RPJM
Rp 3	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya pendataan keluarga	Rp 639	26.886.000	20.470.000	639 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			511.575.000	537.000.000				
					1,824,389,000					
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	41,12%			45%			
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Rp 4			Rp 4			
Rp 1	2.7.19.1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 orang	20.000.000	77.000.000	150 orang	DBHCHT		Penanggulangan Kemiskinan
Rp 2	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 kegiatan, GOW, Darma Wanita	150.000.000	150.000.000	2 Organissi Wanita	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
Rp 3	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	341.575.000	310.000.000	1 organisasi	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.8.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			18.368.000	15.434.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%			3%			
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	9%			12%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
Rp 1	2.8.20.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa	60 orang	9.184.000	9.184.000	60 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
Rp 2	2.8.20.2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	terlaksananya kegiatan PIK Remaja	40 orang	9.184.000	6.250.000	40 orang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.8.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			11.696.000	10.818.000				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	4%			4%			
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	79%			80%			
			Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%			88%			
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%			100%			
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%			100%			
			Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%			30%			
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%			100%			
			Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	12%			13%			
			Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	62%			65%			
			Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	10%			9%			
			Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%			2%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
			Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	90%			90%			
			Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	97%			97%			
			Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%			100%			
			Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%			100%			
			Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%			2%			
			Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%			1%			
			Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%			100%			
			Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%			100%			
			Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%			100%			
			Persentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	90%			91%			
			Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	50%			65%			
Rp 1	2.8.23.2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	75 orang	11.696.000	10.818.000	17 Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL 2020	TAR5			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 13	Rp 14	Rp 14
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0	433.079.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada			Ada			
Rp 1	2.2.15.5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang	12 bulan		111.787.000	12 bulan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	2.2.15.7	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	meningkatnya gizi anak sekolah	900 anak	316.000.000	321.292.000	900 anak	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan								
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0	12.604.000				
Rp 1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terlaksananya penataan arsip DP4KB			12.604.000	1 Keg	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		3.807.956.000	**5.129.205.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Perhubungan
URUSAN : Perhubungan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan										
	2.9.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**898.000.000**		**1.006.500.000**			**1.100.000.000**			
1	2.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Perangko Dan Jasa Pos	2.000.000	2 jenis	2.000.000	**400.000**	12 bulan	2.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan Listrik, Air, Internet	96.000.000	1	105.000.000	**155.760.000**	12 bulan	115.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.9.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Dinas	13.000.000	27 unit	14.500.000	**11.940.000**	27 unit	14.500.000	Dihub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan Penatausahaan Keuangan	175.000.000	Rp 1	175.000.000	**255.146.000**	12 bulan	190.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Alat-alat Kebersihan	125.000.000	Rp 1	140.000.000	**98.577.000**	12 bulan	155.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.9.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK administrasi perkantoran	27.000.000	Rp 1	31.000.000	**16.868.000**	12 bulan	35.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.9.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko dan Barang Cetakan	17.500.000	Rp 1	17.500.000	**11.919.000**	12 bulan	2.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.9.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	17.500.000	Rp 1	20.000.000	**15.008.000**	12 bulan	25.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
9	2.9.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul	10.000.000	Rp 1	14.000.000	**8.554.000**	12 bulan	16.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.9.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Surat Kabar Regional dan Nasional	7.500.000	Rp 1	10.000.000	**9.180.000**	12 bulan	12.500.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.9.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan isi ulang tabung gas	2.500.000	Rp 1	2.500.000	**1.312.000**	12 bulan	3.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.9.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai	55.000.000	Rp 1	62.500.000	**34.886.000**	12 bulan	65.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	2.9.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	215.000.000	Rp 1	250.000.000	**184.802.000**	12 bulan	275.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	2.9.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Petugas Jaga Malam	125.000.000	Rp 1	150.000.000	**106.320.000**	12 bulan	175.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	2.9.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	Rp 1	12.500.000	**97.447.000**	12 bulan	15.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.9.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**3.725.000.000**		**1.565.000.000**			**2.010.000.000**			
1	2.9.2.3	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	1 unit	0	**0**	1 kegiatan	0	Jl. Jend Sudirman no 84	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.9.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.000.000.000	Rp 4	120.000.000	**0**	1 unit	400.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	2.9.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80.000.000	Rp 6	80.000.000	**0**	Rp 6	80.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.9.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	250.000.000	Rp 8	250.000.000	**0**	Rp 8	300.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.9.2.10	Pengadaan mebeleur	Penyediaan Kebutuhan Mebeleur Kantor	25.000.000	Rp 2	30.000.000	**50.000.000**	20 unit	60.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	2.9.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Penyediaan Alat Komunikasi Lapangan	0	Rp 9	50.000.000	**38.049.000**	13 unit	60.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.9.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	375.000.000	Rp 1	90.000.000	**81.167.000**	12 bulan	120.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.9.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan BBM, Sukucadang dan Jasa Service Kendaraan Dinas	300.000.000	Rp 26	350.000.000	**200.751.000**	12 bulan	340.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	2.9.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan PABX, Proyektor, Mesin Ketik, dan Tenda Posko	15.000.000	Rp 1	20.000.000	**8.850.000**	12 bulan	25.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.9.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Radio, dan Aset Software	290.000.000	Rp 9	315.000.000	**44.120.000**	12 bulan	325.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.9.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90.000.000	Rp 8	110.000.000	**0**	Rp 8	125.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.9.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Taman Lalu Lintas	300.000.000	1 paket	150.000.000	**184.850.000**	1 taman lalu lintas	175.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
	2.9.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**		**62.000.000**		**73.000.000**			**88.000.000**			
1	2.9.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya	62.000.000	Rp 60	73.000.000	**29.763.000**	33 setel	88.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.9.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**77.093.000**		**91.312.000**			**107.975.000**			
1	2.9.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja dan RFK	29.978.000	Rp 12	35.974.000	**28.901.000**	12 Laporan	43.169.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.9.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja 2021 dan Renja Perubahan 2020	16.000.000	Rp 2	18.000.000	**13.276.000**	2 Laporan	20.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	2.9.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA 2021 dan RKPA 2020	21.695.000	Rp 2	26.034.000	**17.640.000**	2 Laporan	31.241.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.9.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan LAKIP OPD 2019	9.420.000	Rp 1	11.304.000	**7.325.000**	1 Laporan	13.565.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	2.9.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan				**5.405.000**	1 laporan	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.9.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya dokumen perubahan renstra OPD		1 dokumen		**0**	Rp 100	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator
7	2.9.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Penatausahaan Keuangan		2 dokumen		**8.155.000**	12 bulan	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.9.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**		**454.090.000**		**328.910.000**			**579.694.000**			
			DISHUB	65,000,000		75,000,000	**0**		85,000,000			
			Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik		75%		**0**	90%				
			Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata		2?		**0**	Rp 2				
			Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik		78%		**0**	88%				
			Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum		Rp 93		**0**	Rp 96				
			Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)		Rp 19		**0**	20?				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	2.9.15.2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Trayek Angkutan	83.022.000	2 dokumen	99.627.000	**48.311.000**	12 Trayek	119.553.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.9.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Pengelolaan Oprasional Terminal Magersari	71.146.000	1 terminal	85.376.000	**192.253.000**	12 bulan	102.452.000	Terminal Type C	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	2.9.15.11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Pelaksanaan koordinasi eksternal bidang perhubungan se ex Karesidenan Kedu	30.000.000	5 kali koordinasi	0	**35.740.000**	12 bulan	35.000.000	eks karesidenan kedu	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.9.15.12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Pelaksanaan penilaian kota tertib LLAJ	59.220.000	1 penilaian	71.064.000	**29.862.000**	1 kegiatan	85.277.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.9.15.13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya forum lalu lintas	35.982.000	4 kali koordinasi	43.179.000	**28.551.000**	4 kali koordinasi	51.815.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	2.9.15.14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Pelaksanaan survei lalu lintas di persimpangan jalan	24.720.000	5 simpang bersinyal dan tidak bersinyal	29.664.000	**11.709.000**	5 Simpang	35.597.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.9.15.15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Koordinasi penyelenggaraan Andalalin	150.000.000	15 rekomendasi	0	**79.093.000**	12 bulan	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
8	2.9.15.16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Karnaval HUT Kota, HUT RI, dan Event ayo ke Magelang #2	0	2 kegiatan	0	**117.050.000**	3 kegiatan	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.9.15.18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan		4 kegiatan		**15.632.000**	4 kegiatan	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	2.9.15.17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Pengelolaan Media sosial dan Pelayanan Berbasis IT di Bidang Perhubungan		4 media		**49.746.000**	12 bulan	0	Dishub	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	2.9.15.19	Pembangunan Taman Lalu lintas	terbangunnya taman lalu lintas anak					1 lokasi	0	kantor dishub	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Kota Layak Anak
	2.9.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**		**315.300.000**		**360.300.000**			**417.360.000**			
			Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara		Rp 7		**0**	Rp 7				
1	2.9.16.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	160.300.000	10 jenis	160.300.000	**135.700.000**	10 jenis	192.360.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	2.9.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Terminal	50.000.000	1 unit	75.000.000	**5.062.000**	12 bulan	90.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
3	2.9.16.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Penggantian Suku cadang, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji	105.000.000	9 jenis	125.000.000	**137.068.000**	12 bulan	135.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan		697.138.000		859.168.000			1.031.005.000			
			Jumlah arus penumpang angkutan umum		2,900,000		**0**	2,900,000				
			Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk		5%		**0**	5%				
1	2.9.17.3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Umum Bermotor dan Tidak Bermotor	2.000.000	270 peserta	25.000.000	**43.221.000**	2 kegiatan	30.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
2	2.9.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Pengelolaan Oprasional Terminal Magersari	161.940.000	15 lokasi	194.328.000	**35.104.000**	12 bulan	233.194.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	2.9.17.6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Posko Keamanan dan Ketertiban Lalu lintas di Terminal pada Saat Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	92.973.000	3 kegiatan	111.568.000	**120.987.000**	3 kegiatan	133.882.000	Terminal	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.9.17.9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Terkelolanya kebersihan dilingkungan terminal		1 tahun		**0**	12 bulan	0	Terminal	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	2.9.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya survey load faktor	50.451.000	2 lokasi (terminal tidar dan kebonpolo)	60.542.000	**11.175.000**	2 kegiatan	72.651.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	2.9.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskribra pada HUT RI	148.440.000	2 layanan angkutan	178.128.000	**138.045.000**	1 kegiatan	213.754.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.9.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah ijin trayek yang dilayani	113.535.000	65 surat ijin	136.242.000	**19.513.000**	65 surat ijin	163.491.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
8	2.9.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi	25.496.000	60 orang	30.596.000	**25.178.000**	60 orang	36.716.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.9.17.18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Pembinaan remaja pelopor keselamatan lalu lintas	102.303.000	360 orang	122.764.000	**40.658.000**	360 orang	147.317.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
	2.9.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**		**789.143.000**		**4.444.507.000**			**971.516.000**			
			DISHUB	3,954,113,000		465,937,000	**0**		4,445,126,000			
			Jumlah pelayanan umum		Rp 1		**0**	Rp 1				
1	2.9.18.8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	dokumen DED terminal tipe c		1 dokumen DED		**425.000.000**	DED, ANDALALIN UKL/UPL	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	2.9.18.1	Pembangunan gedung terminal	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	0	Rp 1	3.500.000.000	**225.000.000**	1 unit	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	2.9.18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	45.000.000	Rp 1	95.000.000	**0**	TALUD DAN PEMATANGAN LAHAN	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.9.18.4	Pengadaan Papan Nama Jalan	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	37.302.000	1 paket	44.763.000	**0**	1 paket	53.716.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
5	2.9.18.6	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	195.956.000	1 kegiatan	235.148.000	**0**	1 laporan	282.178.000	Perencanaan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	2.9.18.7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perparkiran	75.855.000	400 peserta	91.026.000	**56.179.000**	400 peserta, 4 kegiatan	109.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	2.9.18.9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pendampingan	435.030.000	12 kegiatan	478.570.000	**377.837.000**	12 kegiatan	526.390.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	2.9.18.12	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	Jumlah gedung yang terbangun		1 unit		**0**	1 ruang tunggu KIR	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.9.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**		**5.166.952.000**		**4.364.345.000**			**7.724.217.000**			
			DISHUB	6,026,762,000		5,360,119,000	**0**		8,954,148,000			
			Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum		8,5?		**0**	9?				
			Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi		75%?		**0**	?90%				
1	2.9.19.16	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	terlaksananya pengamanan jalur lalu lintas		10 lokasi		**587.325.000**	12 bulan	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	2.9.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalin	49.290.000	50 rambu	59.148.000	**0**	50 rambu	70.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	2.9.19.2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	218.098.000	5000 m'	261.718.000	**134.007.000**	5000 m'	314.062.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
4	2.9.19.4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Tersedianya lampu flashing	218.318.000	2 unit	261.982.000	**0**	2 unit	314.379.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
5	2.9.19.5	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya trafific light ATCS	235.000.000	5 lokasi	460.000.000		Rp 2	460.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.9.19.9	**Pengadaan VMS KOTA MAGELANG**	**Tersedianya Traffic Light ATCS**	**Rp -**	**Rp 1**	**Rp -**	**582.456.000**	**1 atcs**	**0**	#########	**D A K**	Percepatan Pencapaia

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	2.9.19.7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Tersedianya pita kejut, cermin cembung	233.322.000	21 water barrier, 460M pita kejut, 20 CT	279.987.000	**197.886.000**	300 m, dan 30 unit	335.985.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
7	2.9.19.8	Pembangunan ATCS	Tersedianya Traffic Light ATCS	4.120.000.000	Rp 1	2.930.000.000	**460.165.000**	2 Lokasi (safari, sumbing)	6.095.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
8	2.9.19.10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Terwujudnya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin, terlaksananya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	73.626.000	5 lokasi	88.352.000	**58.397.000**	5 lokasi, 12 bulan	106.023.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
9	2.9.19.11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Terlaksananya survey ruas jalan	19.298.000	5 jalan	23.158.000	**7.821.000**	5 ruas jalan	27.790.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.9.19.14	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD		600 siswa PAUD		**35.762.000**	600 siswa PAUD	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.9.19.13	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	AUdit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota		2 dokumen		**39.322.000**	1 kegiatan	0	Kota Magaelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.9.19.15	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Jumlah kegiatan car free day dan car free night, Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Car Free Night		20 kegiatan		**138.181.000**	20 kegiatan, 12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	2.9.19.17	Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat	Jumlah pembinaan kepada masyarakat				**77.587.000**	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB
	2.9.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**		**392.000.000**		**960.000.000**			**1.402.000.000**			
				6,933,635,000		8,259,511,000	**0**		15,855,865,422			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	RASIONALISASI	TAR5	Tahun2020			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 6	Rp 7	Rp 8	INPUT MANUAL	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			DISHUB	392,000,000		960,000,000	**0**		1,402,000,000			
			Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan		8,036		**0**	8,086				
			Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian		Rp 4		**0**	Rp 4				
1	2.9.20.4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Pembinaan pengujian kendaraan bermotor	380.000.000	4300 KBWU	945.000.000	**252.556.000**	120 kendaraan	1.385.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.9.20.5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Pembinaan pengujian kendaraan bermotor	12.000.000	5 kegiatan	15.000.000	**9.009.000**	120 kendaraan	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	2.9.20.1	**Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor**	**KBWU lulus uji**				**7.331.715.000**	**1 set**	**Rp -**	**Kota Magelang**	**D A K**	**Percepatan Pencapai**
3	2.9.20.3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan laik jalan				**13.295.000**	400 kendaraan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.9.20.2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	KBWU lulus uji					1 unit	0	Dishub	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
			TOTAL	12.576.716.000		14.053.042.000	**14.055.529.000**		15.431.767.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
URUSAN : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.060.400.000		2.156.900.000	3.645.288.000		2.293.900.000			
1	2.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominsta	Rp 100	2.000.000	2 jenis	2.000.000	3.060.000	2 jenis	2.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Aktifitas Kerja	Rp 12	1.030.000.000	4 langganan	1.060.000.000	3.203.736.000	12 bulan; 4 langganan	1.090.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	Rp 27	13.000.000	15 unit	14.500.000	6.480.000	19 kendaraan	14.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Rp 12	175.000.000	12 laporan keuangan	175.000.000	115.011.000	12 laporan keuangan	190.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.10.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	Rp 15	325.000.000	12 bulan	325.000.000	32.396.000	12 bulan	350.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.10.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	Rp 1	35.000.000	42 jenis	35.000.000	18.049.000	42 jenis	37.500.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	Rp 1	26.400.000	17 jenis	26.400.000	10.511.000	17 jenis	26.400.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.10.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3	14.000.000	3 jenis	14.000.000	9.500.000	2 jenis	16.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	2.10.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	Rp 9	10.000.000	5 jenis	10.000.000	8.472.000	5 jenis	15.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.10.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	Rp 1	2.500.000	36 tabung	2.500.000	3.600.000	24 tabung	3.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.10.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	Rp 1	60.000.000	32 orang	62.500.000	31.700.000	32 orang	65.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.10.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 1	215.000.000	70 kegiatan	250.000.000	126.700.000	60 kegiatan	275.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	2.10.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	Rp 6	125.000.000	3 orang	150.000.000	42.420.000	2 orang	175.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	2.10.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi Kepegawaian	Rp 100	10.000.000	2 dokumen	12.500.000	19.883.000	2 dokumen	15.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	2.10.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 1	17.500.000	2 jenis	17.500.000	13.770.000	2 jenis	20.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.10.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			307.000.000		440.000.000	396.626.000		460.000.000			
1	2.10.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	Rp 26	300.000.000	15 unit	350.000.000	141.518.000	19 unit	340.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.10.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 3	7.000.000	3 jenis	90.000.000	6.700.000	3 jenis	120.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.10.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	Rp 1	0	14 jenis	0	248.408.000	14 jenis	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.10.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61.093.000		73.312.000	46.713.000		88.066.000			
1	2.10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	Rp 12	29.978.000	12 laporan	35.974.000	11.638.000	12 laporan	43.169.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.10.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun		0	2 dokumen	0	8.562.000	2 dokumen	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.10.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	Rp 2	21.695.000	2 dokumen	26.034.000	10.614.000	2 dokumen	31.241.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.10.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	Rp 1	9.420.000	1 dokumen	11.304.000	8.184.000	1 dokumen	13.656.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.10.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya laporan akhir tahun			2 Dokumen		7.715.000	2 dokumen	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			983.000.000		1.053.000.000	1.478.227.000		1.125.000.000			
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000			
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000			
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000			
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%				
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan				
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan				
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	Rp 3		Rp 3			Rp 3				
			Jumlah KIM	Rp 17		Rp 17			Rp 17				
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	Rp 7		Rp 7			Rp 7				
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	Rp 1		-			-				
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang	Rp 17	160.000.000	17 kelompok, 6 kegiatan sosialisasi	185.000.000	66.154.000	17 kelompok; 6 sosialisasi	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana, Program prioritas RPJM, Pokok Pikiran DPRD
2	2.10.15.6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembinaan untuk pengelola PPID	Rp 12	58.000.000	6 kegiatan	58.000.000	94.420.000	7 kegiatan	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.10.15.8	Siaran Radio	Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui media Radio bagi Masyarakat	Rp 12	390.000.000	12 Bulan	390.000.000	554.382.000	12 bulan	425.000.000	Jl. Pahlawan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	2.10.15.10	Penerbitan majalah	Penerbitan Majalah Dinamika	Rp 4	115.000.000	4 edisi	125.000.000	125.840.000	4 edisi	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website secara berkala	Rp 12	42.500.000	30 web	45.000.000	143.507.000	29 opd	45.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
6	2.10.15.22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasikannya Informasi Pembangunan Daerah	Rp 1	40.000.000	12 bulan	40.000.000	38.646.000	1 kegiatan	42.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	2.10.15.23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terlaksananya pemantauan Isi siaran sesuai P3SPS	Rp 10	82.500.000	7 Lembaga Penyiaran	85.000.000	24.187.000	9 lembaga penyiaran	87.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	2.10.15.24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif oleh Pimpinan Daerah	Rp 12	95.000.000	12 Kegiatan	125.000.000	76.293.000	12 kegiatan	145.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019
9	2.10.15.37	Peningkatan Layanan Informasi	Terselenggaranya Gelar Informasi					50.000.000	1 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
10	2.10.15.40	Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional					163.396.000	6 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan
11	2.10.15.26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya pameran Gelar Informasi			8 orang pemenang		115.752.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya koordinasi bidang komunikasi dan kehumasan					25.650.000	6 kegiatan	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik											
	2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			110.000.000		120.000.000	378.721.000		0			
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,9%				
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%			95%				
1	2.14.15.13	Manajemen Data Daerah	Persentase peningkatan publikasi data set statistik sektoral dalam portal open data	Rp 25	110.000.000	2 modul	120.000.000	378.721.000	5,2%	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian											
	2.15.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			0		0	166.886.000		0			
					125,000,000		130,000,000			140,000,000			
			Ketersediaan SOP persandian	100%		100%			100%				
			Tingkat kapasitas SDM persandian	100%		100%			100%				
			Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	90%		100%			100%				
1	2.15.15.3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi berjalan dengan lancar			12 bulan		166.886.000	12 bulan	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Rencana, ExBAU
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			86.000.000		86.000.000	32.030.000		92.000.000			
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Rp 1		Rp 1			Rp 1				
			Interoperabilitas antar system informasi	Rp 2		Rp 4			Rp 4				
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%		75%			100%				
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%		80%			100%				
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%			100%				
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselanggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang	Rp 12	86.000.000	6 kegiatan	86.000.000	32.030.000	12 kegiatan	92.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
	2.10.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			2.850.000.000		0	881.344.000		0			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.10.19.2	Pembangunan WAN Kota	Tersedianya jaringan WAN Kota tahap 6	Rp 1	2.850.000.000	30 titik terminasi	0	0	1 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
2	2.10.19.3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala		0	12 bulan	0	156.584.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Akomodasi Musrenbang
3	2.10.19.7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi			12 bulan		330.512.000	12 bulan	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	2.10.19.4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terupdatenya data MCity Magelang Cerdas			12 bulan		191.874.000	12 bulan	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			225.000.000		235.000.000	88.307.000		240.000.000			
1	2.10.20.9	Pelayanan operasional LPSE	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	Rp 1	225.000.000	12 bulan	235.000.000	88.307.000	12 bulan	240.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.10.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0	104.953.000		0			
1	2.10.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya kapasitas SDM					104.953.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang dan Luar Daerah	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	85.560.000		0			
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%				
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%				
1	4.1.17.15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya pengaduan masyarakat					85.560.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			TOTAL		6.682.493.000		4.164.212.000	**7.102.281.000**		4.298.966.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			729.237.000		753.984.000	667.053.000		785.036.000			
1	2.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	Rp 55	560.000	90 surat	560.000	1.225.000	70 surat	620.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	Rp 12	74.000.000	5 jenis	74.500.000	109.200.000	5 jenis	75.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.12.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 23	9.480.000	23 unit	7.200.000	9.300.000	24 unit	7.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Pengelola Keuangan Daerah	Rp 14	115.997.000	12 laporan	115.997.000	128.944.000	12 laporan	115.997.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Rp 12	49.500.000	484 m2	49.750.000	51.705.000	484 m2	50.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	2.12.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedinya ATK	Rp 12	26.800.000	60 jenis	27.000.000	11.490.000	60 jenis	27.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 12	35.000.000	7 jenis	35.200.000	11.570.000	7 jenis	35.500.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Rp 12	7.000.000	5 jenis	7.200.000	1.650.000	5 jenis	7.250.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	2.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Rp 12	8.000.000	3 jenis	8.200.000	3.000.000	3 jenis	8.450.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.12.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Rp 12	7.650.000	4 jenis	7.750.000	2.300.000	4 jenis	7.950.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.12.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	Rp 12	38.000.000	3 keg/bln	38.000.000	16.587.000	48 jamuan	38.750.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.12.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	Rp 140	257.750.000	18 kegiatan	280.527.000	143.840.000	18 kegiatan	302.879.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	2.12.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga honorer dan tenaga kontrak	Rp 12	99.500.000	5 org/bln	102.100.000	176.242.000	96 orang bulan	108.240.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			284.900.000		291.500.000	260.271.800		288.200.000			
1	2.12.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Rp 1	25.000.000	2 keg	28.000.000	5.000.000	1 paket	21.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp 23	210.000.000	22 unit	212.500.000	203.740.000	23 unit	215.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.12.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Rp 30	13.250.000	6 jenis	14.000.000	8.850.000	6 jenis	15.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
4	2.12.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Rp 1	35.000.000	5 jenis	35.250.000	13.900.000	5 jenis	35.350.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.12.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	Rp 1	1.650.000	4 buah	1.750.000	800.000	4 buah	1.850.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.12.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Ruang Pelayanan			25 m2		27.981.800	125 m2	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur			11.405.000		12.700.000	12.240.000		13.700.000			
1	2.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	Rp 33	11.405.000	28 pegawai	12.700.000	12.240.000	34 pegawai	13.700.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.12.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			49.945.000		53.590.000	41.268.000		57.519.000			
1	2.12.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD	Rp 12	12.537.000	12 laporan	13.790.000	7.601.000	12 laporan	15.169.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.12.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran OPD	Rp 1	3.908.000	1 dokumen	4.200.000	2.077.000	1 laporan	4.300.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.12.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis OPD	Rp 1	2.300.000	1 dokumen	2.500.000	1.758.000	1 laporan	2.750.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.12.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	Rp 1	4.200.000	1 dokumen	4.500.000	1.988.000	1 laporan	4.700.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.12.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Perubahan OPD	Rp 2	8.300.000	2 dokumen	8.700.000	11.596.000	2 dokumen	9.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	2.12.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA DPPA OPD	Rp 2	13.400.000	4 dokumen	14.000.000	11.746.000	4 dokumen	15.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.12.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	Rp 1	5.300.000	1 dokumen	5.900.000	4.502.000	1 dokumen	6.400.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			43.132.100		47.445.310	515.487.000		52.189.841			
					687,414,000		720,385,000			758,016,000			
			Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	Rp 3		Rp 4			Rp 4				
1	2.12.15.1	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Kepeminatan Kerjasama Antara Pelaku Usaha Besar dan Kecil Menengah	Rp 1	25.839.000	15 LOI	28.422.900	24.582.000	15 LOI	31.265.190	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.12.15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama PM	Rp 1	17.293.100	1 kegiatan	19.022.410	19.668.000	1 kegiatan	20.924.651	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperteg as Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	2.12.15.15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya dokumen kajian potensi sumber daya investasi, Buku Potensi dan Peluang Investasi			1 dokumen		64.725.000	1 dokumen	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	2.12.15.19	Fasilitasi Pameran Investasi	Terfasilitasinya pameran investasi			6 kali		350.851.000	3 kegiatan	0	Luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperteg as Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.12.15.18	Penyelenggaraan Forum Investasi	terselenggaranya bisnis meeting dan pameran investasi			5 LOI		47.079.000	2 LOI	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperteg as Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.12.15.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor	Terealisasinya LOI					8.582.000	2 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			13.800.000		14.000.000	7.720.000		15.144.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
					839,992,000		849,477,000			917,944,000			
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000			
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000			
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000			
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000			
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542			
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000			
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000			
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	Rp 12	13.800.000	12 bulan	14.000.000	7.720.000	12 bulan	15.144.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			452.362.000		497.598.500	554.608.000		547.359.050			
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%				
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%				
1	4.1.17.6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, Karnaval, CFD	Rp 4	58.768.000	4 kegiatan	64.645.000	37.054.000	3 kegiatan	71.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	4.1.17.7	Survey Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	Rp 144	354.205.000	90 survey	389.625.500	214.140.000	72 survey	428.588.050	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.1.17.8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	Rp 100	39.389.000	10 pengaduan	43.328.000	16.217.000	10 pengaduan	47.661.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.1.17.21	Fasilitasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Fasilitasi Investor Skala Nasional			6 Investor		73.346.000	52 perusahaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.1.17.19	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Terlaksananya audit internal dan eksternal ISO			5 kegiatan		31.560.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	4.1.17.25	Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan Non Perizinan	Terlayaninya pelayanan dan informasi perizinan non perizinan					108.019.000	2000 pemohon	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	4.1.17.9	Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pemutihan IMB					52.315.000	100 IMB	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	4.1.17.23	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP elektronik					14.436.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
9	4.1.17.22	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya dokumen SOP dan SP					7.521.000	2 dokumen	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal											
	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			0		0	75.535.000		0			
			Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%		10%			10%				
			Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15.00%		15.00%			15.00%				
			Jumlah investor baru	Rp 168		Rp 172			Rp 190				
1	2.12.16.14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan penanaman modal			60 perusahaan		14.508.000	60 perusahaan	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.12.16.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal			9 Laporan		6.842.000	4 laporan	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	2.12.16.17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan			50 perusahaan		35.368.000	50 perusahaan	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.12.16.15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Sosialisasi Penanaman Modal dan Bintek LKPM kepada pengusaha			120 orang		18.817.000	100 pengusaha	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		1.584.781.100		1.670.817.810	2.134.183.000		1.759.147.891			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

URUSAN : Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**828.387.000**		**940.357.000**	**967.390.000**		**1.070.509.000**			
1	2.13.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12	1.200.000	12 bulan	1.208.000	0	12 bulan	1.389.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.13.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telephone, air, listrik, dan internet	12	59.591.000	12 bulan	67.379.000	132.000.000	12 bulan	77.486.000	Disporapar dan GOR Samapta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.13.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	21	12.000.000	18 unit	11.638.000	10.350.000	20 unit	13.384.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.13.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan Aset	12	140.937.000	12 bulan	162.077.000	147.834.000	12 bulan	186.389.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.13.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12	85.000.000	12 bulan	90.000.000	167.558.000	12 bulan	91.000.000	Disporapar Kota Magelang dan GOR Samapta	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.13.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	36.750.000	12 bulan	42.262.000	23.882.000	12 bulan	48.602.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2.13.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12	14.018.000	12 bulan	16.121.000	17.612.000	12 bulan	18.539.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.13.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12	9.000.000	12 bulan	9.660.000	22.150.000	12 bulan	11.100.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	2.13.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	4.500.000	12 bulan	5.100.000	5.000.000	12 bulan	6.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.13.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai dan BBM mesin potong rumput	12	2.400.000	12 bulan	2.657.000	3.052.000	12 bulan	3.055.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	2.13.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	35.091.000	12 bulan	40.355.000	38.796.000	12 bulan	46.408.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	2.13.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	262.500.000	12 bulan	301.900.000	142.500.000	12 bulan	347.157.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	2.13.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12	165.400.000	12 bulan	190.000.000	256.656.000	12 bulan	220.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.13.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**814.900.000**		**627.220.000**	**533.164.000**		**462.554.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan GOR Samapta	12	100.000.000	12 bulan	112.298.000	269.939.000	12 bulan	129.143.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.13.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	201.000.000	12 bulan	251.281.000	235.225.000	12 bulan	288.973.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.13.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	6.000.000	12 bulan	4.227.000	8.000.000	12 bulan	4.861.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	2.13.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	1.900.000	12 bulan	24.150.000	15.000.000	12 bulan	27.773.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.13.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur Disporapar	12	6.000.000	12 bulan	10.264.000	5.000.000	12 bulan	11.804.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.13.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			1 Paket CCTV, 1 Unit AC, 50 Unit kursi Chitos, 1 Set Kitchen set, 4 Unit Almari kayu, 1 Unit Almari kaca, 4 unit Filling kabinet, 4 Buah Lampu taman, Sound System luar ruangan, 5 Meja kerja		0	5 unit	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.13.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2	500.000.000	1 unit Mobil dinas	225.000.000	0	1 unit	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	2.13.2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor			1 Paket Pembangunan gedung kantor		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
9	2.13.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			3 Unit laptop, 4 unit PC, 4 unit printer multifungsi		0	0	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	2.13.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya bangunan Gedung baru kantor Disporapar			1 paket		0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.13.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**80.419.000**		**9.758.904.000**	**90.000.000**		**127.062.000**			
1	2.13.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	12	13.845.000	12 bulan	15.921.000	14.922.000	12 bulan	18.400.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	2.13.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	1	3.364.000	1 laporan	3.868.000	6.998.000	1 laporan	4.448.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	2.13.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD	10	4.909.000	10 eksemplar	5.646.000	6.802.000	10 eksemplar	6.492.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.13.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Penetapan 2020 dan Perubahan Renja 2019 dengan baik dan benar	1	14.284.000	2 dokumen	19.834.000	15.493.000	2 dokumen	22.808.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	2.13.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020	2	23.850.000	2 dokumen	32.545.000	25.701.000	2 dokumen	37.428.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	2.13.6.9	Penyusunan LAKIP OPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	5.518.000	1 dokumen	9.657.586.000	12.358.000	6 dokumen	11.107.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	2.13.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersusunnya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4	4.649.000	1 kegiatan	12.504.000	7.726.000	4 kegiatan	14.379.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	2.13.6.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan OPD	4	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	0	4 dokumen	12.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	2.13.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Terlaksananya Program dan Kegiatan (perencanaan) dengan baik			1 Dokumen		0	1 dokumen	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.13.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**			**40.586.000**		**56.426.000**	**0**		**64.890.000**			
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	**82%**		**85%**			**88%**				
			Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.???? Propinsi	**7 pemuda**		**7 pemuda**			**7 pemuda**				
			b.???? Nasional	**0 pemuda**		**1 pemuda**			**1 pemuda**				
1	2.13.15.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Tersusunnya buku database kepemudaan	1	14.742.000	50 buku	26.552.000	0	50 buku	30.535.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.13.15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Pembinaan mental dan spiritual generasi muda		25.844.000	200 orang	29.874.000	0	1 kegiatan	34.355.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
	3,2	**Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**											
	3.2.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**			**1.409.054.000**		**3.000.871.000**	**4.124.097.000**		**3.057.410.000**			
			Lama Kunjungan Wisatawan	**4-Feb**		**4-Feb**			**4-Feb**				
			Persentase TIC yang representatif	**100%**		**100%**			**100%**				
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	**1,138,140**		**1,139,961**			**1,141,899**				
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	**5,193**		**5,201**			**5,210**				
1	3.2.15.11	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Terbangunnya Gedung TIC			1 unit		0	Tersedia TIC yang representatif	0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Sejuta Bunga, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3.2.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan kerjasama kegiatan promosi pariwisata di dalam/keluar daerah dan luar negeri	1	85.140.000	2 kegiatan	91.650.000	63.650.000	3 kegiatan	105.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	3.2.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Promosi pariwisata kota Magelang	4	271.014.000	4 kegiatan	362.250.000	1.000.000.000	4 kegiatan	416.588.000	Se indonesia	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	3.2.15.7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersusunnya buku database Pariwisata	500	60.000.000	150 buku	362.250.000	29.615.000	150 buku	42.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	3.2.15.9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14	252.250.000	14 orang	310.400.000	305.873.000	14 orang	357.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	3.2.15.12	Pekan Seni Pariwisata	Kegiatan Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3	498.147.000	2 kegiatan	1.259.978.000	993.481.000	3 kegiatan	1.448.975.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	3.2.15.15	Gelar Wisata Magelang	Terselenggaranya Gelar Wisata Kota Magelang	1	222.503.000	1 kegiatan	70.136.000	365.000.000	2 Kegiatan	80.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	3.2.15.14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1	20.000.000	1 kegiatan	544.207.000	566.478.000	1 kegiatan	606.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	3.2.15.19	Peningkatan Promosi Pariwisata (DAK)	Terlaksananya promosi pariwisata Kota Magelang			4 jenis		0	0	0	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Rencana
10	3.2.15.18	Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pemasaran Pariwisata (DAK)	Tersedianya SDM pemasaran pariwisata yang profesional			1 kegiatan		0	0	0	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	3.2.15.21	Festival Band Nasional	Penyelenggaraan Festival Band Nasional					400.000.000	1 kegiatan		kota Magelang	Dana Alokasi Umum	
12	3.2.15.22	Konser Artis Nasional	Penyelenggaraan Konser Artis Nasional					400.000.000	1 kegiatan		kota Magelang	Dana Alokasi Umum	
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**1.162.033.000**		**1.063.686.175**	**1.325.268.000**		**1.191.734.000**			
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	**95.00%**		**96.00%**			**97.00%**				
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	**1**		**1**			**1**				
			Persentase pengangguran pemuda	**6,40%**		**6,15%**			**5,90%**				
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Lokakarya OKP dan pengiriman peserta pelatihan pemuda ke Propinsi	28	248.397.000	28 kelompok organisasi	285.124.000	69.577.000	2 kegiatan	327.892.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.13.16.3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan bakti sosial pemuda	300	23.390.000	300 orang	24.140.000	23.750.000	1 kegiatan	27.761.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.13.16.4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda tingkat propinsi	1	66.527.000	2 kegiatan	71.954.000	89.463.000	2 kegiatan	82.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
4	2.13.16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200	36.095.000	200 orang	25.600.000	0	1 kegiatan	29.421.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	2.13.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1	11.268.000	50 orang	15.806.175	10.063.000	1 kegiatan	18.178.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	2.13.16.10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	400	15.500.000	180 orang	17.148.000	12.729.000	1 kegiatan	19.800.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	2.13.16.11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50	15.400.000	50 orang	17.400.000	0	1 kegiatan	19.980.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	2.13.16.14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggaranya pelatihan pramuka penegak	300	18.257.000	80 orang	18.400.000	20.140.000	1 kegiatan	21.200.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
9	2.13.16.21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	40	391.794.000	3 kegiatan paskibra Tk.kota/Prop/ Nasional	259.553.000	656.487.000	3 kegiatan	298.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	2.13.16.25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	50	45.562.000	75 Orang	52.584.000	47.637.000	1 kegiatan	60.471.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
11	2.13.16.26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1	222.744.000	1 kegiatan	198.727.000	76.036.000	1 kegiatan	200.168.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.13.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	40	22.480.000	100 pemuda	28.750.000	0	1 kegiatan	33.063.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
13	2.13.16.6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2	44.619.000	2 kegiatan	48.500.000	33.172.000	2 kegiatan	52.500.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
14	2.13.16.27	Lomba Pramuka	Terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs			2 kegiatan		46.535.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
15	2.13.16.28	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Terselenggaranya Lomba TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA			2 kegiatan		205.776.000	2 kegiatan	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
16	2.13.16.29	Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Terpeliharanya Ide Organisasi Kepemudaan			1 kegiatan		0	1 kegiatan	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
17	2.13.16.30	Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Pembinaan mental dan spiritual generasi muda					21.422.000	1 kegiatan	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
18	2.13.16.31	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Tersusunya buku database kepemudaan					12.481.000	50 buku	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	3,2	**Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**											
	3.2.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**			**224.868.000**		**236.000.000**	**2.562.179.000**		**272.600.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Destinasi Wisata Unggulan	**4**		**5**			**6**				
			Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	**55,56%**		**66,67%**			**77,78%**				
1	3.2.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	2	100.000.000	1 lokasi	110.000.000	0	1	121.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	3.2.16.3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Penyelenggaraan one day tour dan Road show	1	53.665.000	2 kegiatan	70.000.000	85.463.000	2 kegiatan	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	3.2.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terselenggaranya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Desa Wisata	1	51.203.000	3 kegiatan	56.000.000	52.929.000	3 kegiatan	61.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	3.2.16.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Tersusunnya dokumen perencanaan desa wisata	1	20.000.000	1 Dokumen	0	0	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	3.2.16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Bertambah dan berkurangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata			1 lokasi		0	1 lokasi	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Rencana, Program prioritas RPJM
6	3.2.16.9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Penyelenggaraan penyuluhan ,perencanaan dan studi banding			3 kegiatan		58.368.000	3 kegiatan	0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	3.2.16.14	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan konstruksi bangunan			1 kegiatan		76.484.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	3.2.16.17	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) (DAK)	Bertambahnya fasilitas destinasi wisata			1 lokasi		2.288.935.000	1 lokasi	0			
	3.2.17	**Program Pengembangan Kemitraan**			**81.418.000**		**99.842.000**	**53.058.000**		**114.818.000**			
			Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	**10**		**11**			**12**				
1	3.2.17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terselenggaranya pembinaan usaha jasa pariwisata	2	18.819.000	2 kegiatan	21.034.000	32.669.000	2 kegiatan	24.189.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	3.2.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Penyuluhan bagi Pokdarwis dan penyelenggaraan lomba Pokdarwis tingkat Propinsi Jateng	2	42.599.000	2 kegiatan	48.989.000	0	2 kegiatan	56.337.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
3	3.2.17.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepariwisataan	1	20.000.000	4 kegiatan	29.819.000	20.389.000	4 kegiatan	34.292.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	3.2.17.11	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	Terselenggaranya pelatihan kepada pelaku usaha jasa pariwisata, pemandu wisata dan pokdarwis			6 kegiatan		0	7 kegiatan	0	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**187.401.000**		**0**	**0**		**0**			
			Jumlah review PERDA/PERWAL	**1**		**1**			**0**				
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	**0**		**1**			**2**				
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	**1**		**0**			**0**				
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya dokumen Raperda Kepemudaan		187.401.000	1 Raperda Kepemudaan (Magelang sebagai kota layak pemuda)	0	0	0	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**3.595.000.000**		**3.880.011.000**	**5.333.919.000**		**4.308.034.000**			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	**6**		**6**			**7**				
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			Jumlah klub olah raga	**183**		**183**			**183**				
			Jumlah organisasi olah raga	**35**		**35**			**36**				
1	2.13.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terlaksananya seleksi cabor unggulan (sepakbola,tarung derajat, judo,renang,panahan taekwondo dan tenis lapangan)	100	420.000.000	110 orang	453.950.000	683.092.000	1 kegiatan	522.050.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	2.13.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya Porkel (Pekan Olahraga Kelurahan)	225	140.000.000	235 Peserta	122.500.000	0	1 kegiatan	140.800.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	2.13.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenis lapangan, beladiri, sepakbola asia U18	33	275.000.000	32 team	303.000.000	1.341.096.000	2 kegiatan	333.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.13.20.7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	3000	65.000.000	3000 orang	62.600.000	271.563.000	3 kegiatan	71.879.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2.13.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2 dan sepeda motor	1335	260.000.000	1345 orang	276.961.000	330.448.000	5 kegiatan	318.505.000	Disporabudpar kota magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pendataan olahraga, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	3	250.000.000	4 klub	275.000.000	123.500.000	3 kegiatan	300.000.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	2.13.20.18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	560	270.000.000	570 siswa	280.000.000	347.869.000	1 kegiatan	310.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	2.13.20.21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	220	45.000.000	230 orang	50.000.000	0	1 kegiatan	55.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	2.13.20.22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	24	160.000.000	25 sekolah	176.000.000	0	1 kegiatan	193.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	2.13.20.25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	610	325.000.000	620 orang	358.000.000	382.354.000	1 kegiatan	393.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
11	2.13.20.26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	610	325.000.000	620 siswa	357.000.000	378.744.000	1 kegiatan	393.000.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2.13.20.28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	410	160.000.000	420 siswa	176.000.000	0	1 kegiatan	193.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	2.13.20.29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	370	45.000.000	380 siswa	50.000.000	0	1 kegiatan	55.000.000	Disporapar kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
14	2.13.20.35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25	370.000.000	25 orang	407.000.000	800.000.000	1 kegiatan	447.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
15	2.13.20.36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750	270.000.000	750 siswa	297.000.000	357.541.000	1 kegiatan	327.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
16	2.13.20.40	Penyelenggaraan Walikota Cup	Pelaksanaan turnamen Golf Piala Walikota Jawa - Bali			1 kegiatan		0	0 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
17	2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan jalan sehat dan sepeda onthel hari jadi dan HUT RI			18 kegiatan		164.765.000	2 kegiatan	0	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	2.13.20.13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Terlaksananya kegiatan Peningkatan jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga tenaga keolahragaan	50	60.000.000	50 orang	67.000.000	0	1 kegiatan	71.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
19	2.13.20.1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	1	30.000.000	1	33.000.000	0	0 kegiatan	36.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
20	2.13.20.32	Pospeda	Terlaksananya kegiatan seleksi olahraga antar pondok pesantren	1	50.000.000	1 kegiatan	55.000.000	0	0 kegiatan	60.500.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
21	2.13.20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	50	75.000.000	55 atlet	80.000.000	77.947.000	1 kegiatan	88.000.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
22		Night Run						75.000.000	1 kegiatan				
	2.13.17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**			**49.773.000**		**54.000.000**	**0**		**59.500.000**			
			Persentase kelompok wirausaha pemuda	**75**		**75**			**75**				
1	2.13.17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda	1	49.773.000	0	54.000.000	0	1 kegiatan	59.500.000	Disporapar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		**8.473.839.000**		**19.717.317.175**	**14.989.075.000**		**10.729.111.000**			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**										
	2.17.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			662.568.000		728.685.000	**1.023.217.000**		800.259.000		
1	2.17.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran		2.650.000	2 jenis	2.750.000	1.755.000	1 jenis	2.850.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
2	2.17.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik ,air dan internet	1	214.000.000	12 bulan	235.400.000	333.000.000	4 jenis 12 bulan	258.940.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.17.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK dan KIR kendaraan dinas	1	7.656.000	12 kendaraan	8.328.000	10.110.000	17 kendaraan	9.160.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
4	2.17.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	laporan pengelolaan administrasi keuangan	1	77.987.000	12 bulan	85.786.000	139.977.000	12 laporan	94.365.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
5	2.17.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan	1	97.909.000	31 jenis	107.699.000	166.718.000	21 jenis 6 orang	118.469.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
6	2.17.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1	15.000.000	41 jenis	16.500.000	11.668.000	44 jenis	17.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
7	2.17.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	1	8.500.000	14 jenis	9.500.000	12.453.000	12 jenis	10.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum

8	2.17.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainya	1	45.210.000	12 jenis	49.731.000	27.865.000	4 jenis	54.704.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
9	2.17.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	1	1.200.000	2 jenis	1.300.000	5.504.000	2 jenis	1.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
10	2.17.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan jasa pembuat minum	1	41.211.000	6 jenis	45.322.000	38.319.000	4 jenis 1 orang	49.865.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
11	2.17.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	biaya perjalanan dinas	1	115.843.000	12 bulan	127.427.000	106.174.000	12 bulan	140.170.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
12	2.17.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	1	35.402.000	8 orang	38.942.000	169.674.000	8 orang	42.836.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.17.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			393.359.000		430.094.000	**255.819.000**		472.103.000		
1	2.17.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	1	89.000.000	2634 m2	95.000.000	53.900.000	2634 m2 (2 unit gedung dan pagar gedung stainles stell)	105.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
2	2.17.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional	1	164.219.000	12 kendaraan	180.640.000	149.348.000	17 kendaraan	198.704.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.17.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1	63.140.000	9 jenis	69.454.000	24.996.000	3 jenis	76.399.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
4	2.17.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1	77.000.000	10 jenis	85.000.000	27.575.000	4 jenis	92.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.17.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			43.631.000		47.992.000	**43.517.000**		52.793.000		
1	2.17.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunya laporan capaian kinerja	1	10.060.000	4 laporan	11.066.000	13.394.000	4 laporan	12.173.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum

2	2.17.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya dokumen RENJA OPD	1	11.600.000	2 dokumen	12.760.000	9.854.000	2 dokumen	14.036.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.17.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA Penetapan dan Perubahan OPD	1	11.911.000	2 dokumen	13.100.000	15.471.000	2 dokumen	14.412.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
4	2.17.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya dokumen LKjIP OPD	1	10.060.000	1 dokumen	11.066.000	4.798.000	1 dokumen	12.172.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			1.032.191.000		1.136.630.000	**1.153.978.000**		1.234.242.000		
1	2.17.15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta workshop	300	72.744.000	300 orang	86.018.000	60.000.000	250 peserta	88.019.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
2	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	300	134.450.000	1500 eksemplar*	147.895.000	90.560.000	778 eksemplar	162.684.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.17.15.17	Pameran dan bursa buku	jumlah pengunjung pameran	10000	250.000.000	10000 orang	270.000.000	136.213.000	15.000 pengunjung pameran	290.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
4	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3500	37.973.000	3000 eksmplar	41.770.000	42.754.000	3.000 eksemplar	45.947.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
5	2.17.15.30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se-Kota Magelang	120	56.500.000	120 orang	62.000.000	40.100.000	70 orang	67.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum
6	2.17.15.31	Lomba perpustakaan	jumlah perpustakaan yang mengikuti lomba	143	53.000.000	4 kegiatan	58.000.000	51.450.000	40 perpustakaan	63.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum
7	2.17.15.32	Layanan perpustakaan keliling	masyarakat terlayani dan statistik perkembangan layanan	25000	45.526.000	4 laporan; 30000 pengunjung	50.078.000	85.455.000	4 laporan dan 30.000 pengunjung	55.086.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum

8	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	masyarakat terlayani dan penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	60000	226.010.000	4 laporan	248.611.000	300.000.000	65.000 orang dan 4 laporan	273.472.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
9	2.17.15.37	Promosi minat baca	kunjungan yang terlayani dan jumlah event promosi	5000	70.689.000	4 kegiatan	77.758.000	106.320.000	2.000 orang dan 4 kegiatan	85.534.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
10	2.17.15.39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita dalam bahasa Indonesia dan Inggris	80	44.000.000	80 siswa SD	48.500.000	69.350.000	2 kegiatan	53.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
11	2.17.15.42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	150	31.649.000	14 kegiatan	34.000.000	0	14 kegiatan	37.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
12	2.17.15.47	Penyusunan Buletin	Penyaluran ide dan kreatifitas pustakawan, pengelola perpustakaan dan penulis	2	7.650.000	2 buletin	10.000.000	21.753.000	2 buletin	11.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
13	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	1	2.000.000	20 jenis	2.000.000	10.000.000	*1 penghancur kertas, 1 locker	2.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
14	2.17.15.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pengembangan perpustakaan, Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan, Bimbingan Teknis Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolahan					112.685.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum
15	2.17.15.57	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan			50 orang		27.338.000	50 orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan										
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			451.510.000		673.765.000	**477.415.000**		713.596.000		
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150	202.109.000	150 dos	222.320.000	151.002.000	150 dos	244.552.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum

2	2.18.16.5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150	213.331.000	150 dos	234.665.000	162.265.000	150 dos	258.136.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.18.16.8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	78	20.500.000	29 OPD	21.500.000	27.233.000	17 kelurahan	22.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
4	2.18.16.3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya data arsip dalam bentuk digital	750	15.570.000	1000 CD	171.280.000	54.441.000	1.000 keping CD/DVD	188.408.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
5	2.18.16.7	Pemusnahan Arsip	musnahnya arsip yang tidak bernilai guna		0	20 dos	24.000.000	7.689.000	20 Dos	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
6	2.18.16.11	Preservasi Arsip	terselamatkanya arsip dan informasi arsip statis			500 muka		56.071.000	700 lembar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
7	2.18.16.12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan			3 Jadwal Retensi Arsip		0	1 pedoman JRA	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
8	2.18.16.17	Pengelolaan Arsip Statis	terkelolanya arsip statis			150 dos		18.714.000	2 dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.18.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**			141.500.000		155.650.000	**98.813.000**		171.215.000		
1	2.18.18.8	Pendokumentasian Kota Magelang	tersedianya dokumentasi Kota Magelang dalam bentuk buku dan film	100	141.500.000	1 judul film dan 100 buku	155.650.000	0	1 dokumen	171.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum
2	2.18.18.12	Orientasi Kearsipan	*Meningkatnya kompetensi SDM pengelola kearsipan					33.470.000	29 OPD	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum
3	2.18.18.2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	terpenuhinya akses informasi layanan kearsipan			9 set diorama		65.343.000	1 dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.18.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**			50.000.000		0	**27.019.000**		0		

1	2.18.15.8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	database jaringan informasi kearsipan yang terkoneksi (SIKN dan JIKN)	1	50.000.000	1 kegiatan	0	27.019.000	600 data	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			114.154.000		127.333.000	**25.001.000**		141.188.000		
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan	16	6.400.000	10 unit	8.800.000	3.280.000	10 unit	10.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
2	2.18.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya dokumen /arsip kearsipan	750	26.230.000	750 dos	28.853.000	21.721.000	600 dos	31.740.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
3	2.18.17.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di unit kerja	78	81.524.000	74 unit pengelola arsip	89.680.000	0	65 pengelola arsip	98.648.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum
			TOTAL		**2.888.913.000**		**3.300.149.000**	**3.104.779.000**		**3.585.396.000**		

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

URUSAN : Pertanian , Pangan, Kelautan dan perikanan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUJD 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			922.121.000		1.042.863.000			1.117.204.000			
1	3.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865	3.146.000	865	3.461.000	500.000	870	3.808.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	3.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12	171.000.000	12	199.650.000	171.000.000	12	219.615.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	3.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47	13.520.000	47	17.996.000	15.876.000	49	19.796.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	3.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	120.000.000	12	143.816.000	131.000.000	12	158.198.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	3.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24	54.182.000	24	61.816.000	56.816.000	25	67.998.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	3.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39	35.000.000	39	38.500.000	28.098.000	39	42.350.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	3.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	20.000.000	13	23.830.000	17.877.000	15	26.213.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	3.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	12.500.000	8	12.500.000	12.499.000	8	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JILID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
9	3.3.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	3.585.000	4	3.850.000	2.097.000	4	4.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	3.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12	4.620.000	12	5.990.000	4.620.000	12	6.589.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	3.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460	21.728.000	1460	40.616.000	17.000.000	1460	44.678.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	3.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12	37.460.000	12	44.508.000	43.657.000	12	48.959.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	3.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84	294.050.000	84	315.000.000	110.000.000	84	325.000.000	Peternkan dan Perikanan Kota Magel	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	3.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12	131.330.000	12	131.330.000	148.946.000	12	135.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			564.953.000		904.099.000			662.469.000			
1	3.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2	43.108.000	2	50.000.000	25.000.000	2	55.000.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	3.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47	314.182.000	47	330.000.000	228.446.000	49	350.000.000	Dinas pertanian peternakan dan perikanan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	3.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33	15.000.000	33	16.500.000	15.000.000	33	18.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	3.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	4.800.000	12	5.000.000	5.600.000	12	5.200.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	3.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1	10.500.000	1	10.500.000	0	1	10.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	3.3.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	1	300.000.000	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
7	3.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	0	11.400.000	6	11.400.000	0	6	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	3.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	16	92.600.000	16	100.000.000	0	16	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	3.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianyaalat pendukung keamanan	1	73.363.000	1	80.699.000	0	1	88.769.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	3.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					7.900.000	6	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			12.506.000		12.506.000			12.506.000			
1	3.3.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8	12.506.000	8	12.506.000	4.738.000	8	12.506.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90.905.000		97.815.000			105.416.000			
1	3.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12	9.820.000	12	9.820.000	11.035.000	12	9.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	3.3.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	6.381.000	2	6.381.000	4.000.000	2	6.381.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	3.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4	5.627.000	4	5.627.000	3.900.000	4	5.627.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	3.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2	9.438.000	2	10.382.000	3.850.000	2	11.421.000	Dinas pertanian dan pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	3.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2	8.426.000	2	9.269.000	7.456.000	2	10.196.000	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	3.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	30	46.101.000	30	50.712.000	14.818.000	30	55.784.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
7	3.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10	5.112.000	10	5.624.000	3.389.000	10	6.187.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	3.3.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	terfasilitasinya kegiatan monitoring hibah/bansos					6.519.000	100%	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan
	2,3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan											
	2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			277.598.000		302.000.000			324.000.000			
			Jumlah regulasi ketahanan pangan	2		2			2				
			Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%		95%			95%				
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,3		87,6			88,9				
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%		80%			80%				
1	2.3.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan, pemetaan,kerawanan pangan	1	24.126.000	20 balita	26.000.000	20.531.000	20 balita	28.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak, SDGs
2	2.3.15.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340	26.749.000	340 petugas	29.000.000	27.174.000	680 data	31.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	2.3.15.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1	8.228.000	1 Unit	10.000.000	17.475.000	1 data	11.000.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
4	2.3.15.9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	20	17.402.000	50 orang	19.000.000	74.059.000	50 0rang	21.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	2.3.15.16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	1	32.382.000	gabungan kelompok tani	35.000.000	17.834.000	gabungan kelompok tani	38.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JILID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
6	2.3.15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 keluraha n 9	16.661.000	kelurahan 9 agen/distri	18.000.000	70.777.000	tradisional, 17 Kelurahan	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
7	2.3.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2	38.453.000	sekolah dan 7 jenis sayur 3	42.000.000	48.954.000	sekolah, 7 jenis sayur, 3 jenis	46.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	2.3.15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal, lomba cipta menu	4	102.883.000	festival pangan, 3 lomba	111.000.000	20.572.000	30 orang	115.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Musrenbang, Program prioritas RPJM
9	2.3.15.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Tersedianya laporan DKP tingkat pusat dan kota			2 laporan		43.450.000	2 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	2.3.15.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring toko tani indonesia (TTI)	1	10.714.000	8 TTI	12.000.000	0	1	14.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
11	2.3.15.36	Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan	Jumlah Promosi Pangan Lokal					89.741.000	4	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
12	2.3.15.37	Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok tani					15.026.000	3 kelompok tani	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			204.099.000		354.250.000			379.416.000			
			Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	5		6			7				
1	3.3.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pelatihan tanaman hias dan anggrek	90	204.099.000	90 peserta	224.509.000	82.457.000	90 orang	246.969.000	Kota Magelang	DBHCHT	Implementasi MKSB, Akomodasi
2	3.3.15.6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pendampingan kelompok budidaya tanaman hortikultura	0	0	6 kelompok	129.741.000	0	6 kelompok	132.447.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Musrenbang, Program prioritas RPJM
3	3.3.15.7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Luas RTH (kebon bibit) yang dipelihara			8000 bibit		290.000.000	1200 tanaman	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUJD 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			34.611.000		41.866.000			46.053.000			
					839,992,000		849,477,000			917,944,000			
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000			
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000			
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000			
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000			
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542			
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000			
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000			
			Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2	34.611.000	2	41.866.000		2	46.053.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			601.330.000		746.730.000			856.290.000			
			Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	3%		6%			9%				
			Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	11		13				583.379.000			
1	3.3.16.2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan pameran agriflori expo	6	105.330.000	1 pameran	116.330.000	380.000.000	1 pameran	131.330.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum-AKM	Memperkuat Implementasi MKSB
2	3.3.16.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan pameran tingkat regional dan nasional	3	496.000.000	3	630.400.000	109.192.000	3	724.960.000	Disperpa	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	3.3.16.14	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya pelatihan pemasaran produksi			90 petani		0	90 orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB
	3.3.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			161.585.000		171.032.000			180.942.000			
			DISPETERIKAN	1	188,500,000	1	207,500,000		1	228,250,000			
			Luas lahan pertanian organik	0,98		1,03			1,08				
			Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	51.70%		58.50%			65.30%				
1	3.3.17.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan penerapan teknologi tepat guna	7	62.815.000	12 kali	64.315.000	15.103.000	7	65.815.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
2	3.3.17.6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1,5	45.117.000	1 hektar	47.617.000	16.590.000	2,5	50.117.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
3	3.3.17.8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)			10000 anggrek		87.843.000	10000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB
4	3.3.17.9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelaku yang dilatih pasca panen lidah buaya dan jamur			120 masyarakat		20.159.000	140 orang	0	Kota Magelang	DBHCHT	Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	3.3.17.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah masyarakat terlatih kultur jaringan	40	53.653.000	40 masyarakat	59.100.000	14.953.000	40	65.010.000	Kota Magelang	DBHCHT	Musrenbang, Program prioritas RPJM
	3.3.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			462.101.000		366.401.000			345.901.000			
			Padi	3180		3160			3140				
			Jagung	11		11			11				
			Ubi kayu	13,5		13,5			13,5				
1	3.3.18.26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	data verifikasi pupuk subsidi			12 data verifikasi		7.531.000	distributor, 1 kios pupuk	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	3.3.18.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	48.214.000	25	52.214.000	47.044.000	25	26.214.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
3	3.3.18.23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Jumlah bibit tanaman hortikultura	7000	297.279.000	8000	197.279.000	0	9000	202.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Sejuta Bunga
4	3.3.18.25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	dokumen inventarisasi jaringan irigasi tersier usaha tani	1	116.608.000	100 m2	116.908.000	0	1 dokumen	117.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
5	3.3.18.27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	luas lahan yang diintensifkan			4 Ha		24.799.000	61 kw/Ha	0	Kota Magelang	DBHCHT	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
6	3.3.18.29	Pengembangan Urban Farming	Peserta terlatih yang mengembangkan urban farming			50 peserta terlatih		107.180.000	350 org	0	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
7	3.3.18.28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kelompok tani dan kios pupuk			18 kelompok dan 4 kios		18.472.000	pupuk, 18 kelompok tani	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019
8	3.3.18.30	Peningkatan kemampuan lembaga petani	meningkatnya kemampuan lembaga petani			17 kelompok tani		11.504.000	a RDKK dan lomba kelompok	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	3.3.18.32	Pengelolaan Data Pertanian	Tersedianya data pertanian secara rinci					0	12 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	3.3.18.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alat Mesin Pertanian	data verifikasi alat mesin pertanian					0	16 kelompok tani	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	3.3.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			16.500.000		103.150.000			144.965.000			
			Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	11,76%		23,53%			35,29%				
			Rasio petani terlatih	85%		90%			90%				
1	3.3.19.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30	16.500.000	40 petani swadaya	18.150.000	15.071.000	30	19.965.000	Kota Magelang	DBHCHT	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.3.19.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	0	0	5	85.000.000	64.003.000	7	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	3.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan			181.559.000		204.440.000			230.318.000			
			Produksi hasil perikanan:										
			Produksi Ikan	162,41		164,2			166,01				
			Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%		50%			100%				
			Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	40%		50%			60%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JILID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
1	3.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya petani ikan	162,41	17.558.000	25 orang	19.770.000	11.176.000	166,01	22.261.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	3.1.20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	40	18.458.000	25 orang	20.785.000	42.470.000	60	23.415.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
3	3.1.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya lomba kelompok pelaku utama perikanan	40	23.838.000	125 pelaku utama perikanan	26.843.000	173.244.000	60	30.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum-AKM	Program prioritas RPJM
4	3.1.20.25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	50	94.576.000	2 BBI	106.494.000	261.740.000	100	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	3.1.20.26	Pelatihan Ikan Hias	Terlatihnya petani pembudidaya ikan hias pemula	30	27.129.000	15 peserta	30.548.000	37.360.000	50	34.410.000	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM, Pokok Pikiran DPRD
6	3.1.20.29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Luas lahan perikanan organik			50 peserta		30.328.000	0,3 Ha	0	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM, Pokok Pikiran DPRD
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			316.704.800		353.943.800			440.232.800			
			Persentase hewan sehat	83		85			85				
1	3.3.20.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	tercapainya peningkatan keamanan Puskeswan					0	1 paket	0	Pusat Kesehaan Hewan	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	3.3.20.1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1	16.139.000	1 dokumen	20.664.000	34.638.000	1	25.639.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	3.3.20.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1400	56.710.000	1450 ternak	61.240.000	65.050.000	1475	66.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
4	3.3.20.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah pengawasan	360	44.979.000	63 kegiatan	49.670.000	5.770.000	400	54.645.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Pokok Pikiran DPRD
5	3.3.20.6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4350	34.132.000	4355 ternak	38.508.800	38.508.000	4360	43.483.800	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
6	3.3.20.7	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	Jenis bahan/ perlengkapan labkeswan	2	23.994.800	6 jenis	28.586.000	0	2	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	3.3.20.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	jumlah bahan/perlengkapan Puskeswan	2	20.000.000	2 jenis bahan	30.000.000	0	2	30.000.000	Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
8	3.3.20.10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	300	120.750.000	600 hewan	125.275.000	269.379.000	325	130.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	3.3.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			11.800.000		12.000.000			15.000.000			
			Daging Ruminansia	1.233.486		1.289.554			1.345.622				
			Daging Unggas	5.366.516		5.610.449			5.635.382				
			Telur	440,000		460,000			480,000				
			Susu	197,600		201,400			205,200				
1	3.3.21.20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	60	11.800.000	65 ternak	12.000.000	9.240.000	70	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3.3.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			155.616.000		163.080.000			171.599.000			
			Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	2,42		3,03			3,63				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
1	3.3.22.7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	3	50.000.000	4 event	51.492.000	200.000.000	4 event	53.195.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum-AKM	Program prioritas RPJM
2	3.3.22.8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	4	23.000.000	200 orang	24.496.000	14.425.000	4	26.199.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.3.22.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16	33.325.000	16 dokumen	34.817.000	35.253.000	16	36.524.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.3.22.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pembinaan hyigiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan	3	24.291.000	3	25.783.000	0	3	27.486.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	3.3.22.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3	10.000.000	3 pelaku usaha peternakan	11.000.000	0	3	13.000.000	kota magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
6	3.3.22.14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	jumlah pelaku usaha bersertifikat NKV	2,42	15.000.000	2 pelaku usaha	15.492.000	14.950.000	3,63	15.195.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
	3,1	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	3.1.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			1.114.797.000		1.255.428.000			1.382.125.000			
					1,798,411,000		2,040,473,000			2,252,443,000			
			Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0		0			100%				
			Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3		4			5				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUJD 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
1	3.1.23.12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	481.848.000	40 orang	550.643.000	16.543.000	5	608.502.000	Kota Magelang	DBHCHT	Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.1.23.13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1	76.000.000	1 Unit	80.000.000	88.734.000	1	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.1.23.14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	433.851.000	100 pedagang	495.782.000	38.068.000	6	547.881.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.1.23.15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kota Magelang	19,46	123.098.000	4 event	129.003.000	153.390.000	23	135.742.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	3,3	Urusan Pilihan Bidang Pertanian											
	3.3.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			112.601.000		118.326.000			126.826.000			
			DISPETERIKAN		64,350,000		70,785,000			77,863,000			
			DISPETERIKAN		112,259,000		118,326,000			126,826,000			
			Jumlah pelaku usaha peternakan organik:										
			Peternak ayam buras/ ayam broiler	2		3			4				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JILID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
			Peternak kelinci	2		3			4				
			Peternak kambing/domba	2		3			4				
			Rasio peternak terlatih	85%		85%			85%				
1	3.3.23.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana RP	1	45.375.000	1	49.550.000	0	1	53.426.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	3.3.23.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya pelaku usaha paska panen peternakan	3	46.776.000	40 pelaku usaha	47.158.000	26.309.000	3	50.294.000	Kota Magelang	DBHCHT	Program prioritas RPJM
3	3.3.23.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3	20.450.000	3	21.618.000	36.196.000	3	23.106.000	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
4	3.3.23.9	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlatihnya pelaku agribisnis peternakan			15 pelaku usaha		15.061.000	2 pelatihan	0	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
	3.3.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			6.382.478.000		818.787.000			562.735.000			
					7,596,450,000		6,281,004,000			6,983,000,000			
			Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	2,42%		3,03%			3,63%				
1	3.3.24.1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12	32.319.000	12 bulan	35.550.000	41.783.000	12	39.105.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.3.24.2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	1	29.302.000	50 orang	29.302.000	13.855.000	1	33.302.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	3.3.24.3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4	45.945.000	4 kali	50.539.000	42.555.000	4	55.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM, Pokok Pikiran DPRD
4	3.3.24.5	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4350	239.451.000	4355 ternak	263.396.000	299.343.000	4360	289.735.000	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	3.3.24.7	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4	35.461.000	40 orang	40.000.000	36.635.000	4	45.000.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	HASIL RASIONALISASI JUID 3	TAR5	Tahun2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	16	17	19
6	3.3.24.4	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	Tersusunnya DED RPH	1	3.000.000.000	1 dokumen	200.000.000	0	0	0	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	3.3.24.6	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	Terpenuhinya sarpras RPH	1	3.000.000.000	4 jenis	200.000.000	0	1	100.000.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			820.000.000		918.000.000			1.000.000.000			
			Indeks Kualitas Air,	76%		76%			77%				
			Indeks Kualitas Udara	78%		78%			78%				
			Indeks Tutupan Hutan	49%		49%			50%				
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7		67,7			77,84				
			Jenis flora	10 Jenis		12 Jenis			15 jenis				
			Jenis fauna	3 Jenis		3 Jenis			3 Jenis				
1	2.5.17.4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	13	440.000.000	15 jenis flora dan fauna, 3 sarpras pendukung	490.000.000	527.552.000	18	530.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	2.5.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Operasional UPTD Gunung Tidar	90000	130.000.000	12 bulan	143.000.000	251.688.000	110000	155.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	2.5.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250	30.000.000	250 orang	35.000.000	0	300	40.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	2.5.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Tertatanya drainase dan resapan air di kawasan gunung tidar	200	220.000.000	400 m	250.000.000	0	227504000	275.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
			TOTAL		12.443.864.800		7.986.716.800	5.690.374.000		8.103.997.800			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URUSAN : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.751.270.000		1.894.398.000	1.925.280.000		2.051.396.000			
1	3.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	5.282.000	12	5.810.000	4.050.000	12	6.391.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	3.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4	453.500.000	4	494.450.000	578.880.000	4	534.540.000	Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	3.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	70	46.890.000	73	51.029.000	37.091.000	67	55.832.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	3.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12	239.536.000	12	260.490.000	302.940.000	288 orang bulan	281.539.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	3.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	68.313.000	12	74.735.000	102.194.000	12	82.209.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	3.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37	46.625.000	37	50.838.000	30.452.000	37 jenis	55.722.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	3.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11	73.889.000	11	78.988.000	27.935.000	15 jenis	86.187.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
8	3.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	24.795.000	11	26.625.000	29.018.000	11 jenis	29.288.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU, Pokok Pikiran DPRD
9	3.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12	14.624.000	12	15.607.000	13.800.000	12 bulan, 2 jenis	17.118.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	3.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran, BBM dan oli mesin pompa air dan pencacah sampah	12	15.932.000	12	17.516.000	20.723.000	12 bulan	19.228.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	3.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12	99.130.000	12	107.973.000	72.425.000	12	117.870.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	3.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	300.466.000	12	330.513.000	200.000.000	12	363.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
13	3.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12	126.658.000	12	137.824.000	286.641.000	12	151.607.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
14	3.7.1.20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2	210.630.000	2	215.000.000	200.600.000	2 obyek, 1 tahun	220.000.000	Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	ExBAU
15	3.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12	25.000.000	12 bulan	27.000.000	18.531.000	12 bulan	30.500.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.058.886.000		1.031.942.000	626.181.000		1.144.137.000			
1	3.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung yang dipelihara	12	151.626.000	12	166.789.000	200.000.000	3910 m2	183.068.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
2	3.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	621.065.000	12	704.172.000	372.214.000	12 bulan, 67 unit	744.590.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	3.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	12	18.793.000	12	20.473.000	28.225.000	11 jenis	22.470.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	3.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terawat	12	27.702.000	12	30.273.000	21.742.000	27 unit	33.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	3.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair yang terpelihara	12	4.700.000	12	5.235.000	4.000.000	16 unit	5.759.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	3.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair	5	100.000.000	3	50.000.000	0	3	50.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	3.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3	80.000.000	3	25.000.000	0	3	50.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	3.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3	55.000.000	3	30.000.000	0	3	55.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	3.7.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pembangunan pelengkap bangunan gedung					0	3 paket	0	Lingkungan kantor Disperindag	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	3.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			151.363.000		170.981.000	107.430.000		187.611.000			
1	3.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18	22.000.000	18	24.000.000	19.200.000	18	26.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	SDGs
2	3.7.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2	17.000.000	2	18.500.000	15.258.000	2	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	3.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2	11.500.000	2	18.500.000	18.310.000	2	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	SDGs
4	3.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2	18.502.000	2	20.253.000	5.395.000	2	22.279.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	SDGs
5	3.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	43.269.000	2	47.426.000	24.100.000	2	52.169.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	SDGs
6	3.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4	30.592.000	1500	33.102.000	15.795.000	4	36.263.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
7	3.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1	8.500.000	1	9.200.000	9.372.000	1	10.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	SDGs
8	3.7.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Jumlah laporan					0	1 lporan	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	3.7.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Laporan evaluasi					0	4 laporan	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			408.128.000		424.629.000	105.804.000		440.311.000			
			DISKOPERINDAG		301,739,600		331,913,260			365,105,186			
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	4%		5%			6%				
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%		10%			10%				
1	2.11.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertfikat halal	2	80.000.000	30 sertifikat	85.000.000	47.804.000	2	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	2.11.15.18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah KUM yang dibina	155	278.128.000	150 KUM	284.629.000	58.000.000	155	283.311.000	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang
3	2.11.15.23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah KUM yang dibina	300	50.000.000	300	55.000.000	0	300	67.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			284.334.000		290.663.000	609.073.000		305.033.000			
				-	5,170,500,000	-	5,301,251,000		-	5,528,680,000			
			Jumlah alat UTTP yang ditera	2,800		2,900			3,000				
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA		NA			NA				
1	3.6.15.4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya tera ulang, pengawasan	1	284.334.000	2800 alat UTTP	290.663.000	127.122.000	1	305.033.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	3.6.15.14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan			6 laporan		25.625.000	6 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	3.6.15.15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Pendampingan			1 pendampingan		315.171.000	12 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	3.6.15.17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat			17 komoditas kebutuhan pokok masyaraka t		13.522.000	12 laporan	0	Pasar-pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperk uat Implement asi Masterpla n Smartcity
5	3.6.15.26	Pengawasan Kemetrologian	Jumlah UTTP terawasi					12.879.000	4 kegiatan ; 100 UTTP	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah
6	3.6.15.20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah UTTP terlayani			2700 buah		101.459.000	2700 UTTP	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	3.6.15.21	Pendataan alat UTTP	update data UTTP			4 kali pendataan		13.295.000	3 kegiatan ; 500 UTTP	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			37.917.000		39.735.000	42.868.000		41.811.000			
			Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,15%		4,20%			4,25%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	3.7.15.4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	50	8.610.000	75	9.040.000	13.394.000	75	9.492.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
2	3.7.15.5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu	20	29.307.000	20 industri kecil	30.695.000	29.474.000	20	32.319.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			494.428.000		498.957.000	87.898.000		504.127.000			
			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM		100 UMKM			100 UMKM				
1	2.11.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3	14.510.000	3 lap	15.229.000	17.904.000	3	16.057.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.11.16.18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50	10.704.000	50 koperasi	11.514.000	30.290.000	50	12.065.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	2.11.16.22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80	69.214.000	80 peserta	72.214.000	39.704.000	80	76.005.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	2.11.16.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	terjalinnya kerjasama dengan toko modern (MoU)	2	400.000.000	30 peserta	400.000.000	0	0	400.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	3.7.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			329.222.000		345.013.000	886.636.000		363.035.000			
				-	799,126,000		867,694,000			973,054,000			
			Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%?		3.20%			3.25%				
1	3.7.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Cetak Leaflet, Buletin semester I, buletin semester II	1	42.522.000	1	44.500.000	62.377.000	3 kegiatan	46.725.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	3.7.16.8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	85	94.400.000	70	99.120.000	86.940.000	120 orang	104.800.000	Kota Magelang	DBHCHT	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
3	3.7.16.12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi, sarasehan, showroom magelang craft center	7	175.000.000	3 pameran	183.200.000	534.070.000	7	192.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.7.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah industri yang dibina	20	17.300.000	20	18.193.000	29.538.000	30	19.150.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
5	3.7.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM Formal			20		11.154.000	20 orang	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	3.7.16.6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Meningkatnya kerjasama/kemitraan pelaku usaha			60		0	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
7	3.7.16.14	Pendataan industri kecil dan menengah	buku direktori IKM			25 buku		102.613.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	3.7.16.15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri			4 laporan monev		34.884.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
9	3.7.16.19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah peserta pelatihan SDM industri rokok			30 orang		25.060.000	30 orang	0	Kota Magelang	DBHCHT	Memperte gas Skenario Kemitraan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			234.210.000		245.444.000	620.237.000		256.266.000			
			Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%		4%			5%				
1	2.11.17.12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300	184.210.000	300	190.444.000	556.870.000	300	196.266.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodas i Musrenba ng
2	2.11.17.13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	63.367.000	1	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	3.6.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			5.249.000		5.501.000	6.149.000		5.788.000			
			Jumlah ekspor produk ke LN	US$ 1.100.000		US$ 1.150.000			US$ 1200000				
1	3.6.17.8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20	5.249.000	20 pelaku usaha	5.501.000	6.149.000	20	5.788.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			11.969.000		12.544.000	10.947.000		13.199.000			
			Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna	5,09%		5,14%			5,19%				
1	3.7.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20	11.969.000	20 IKM	12.544.000	10.947.000	20	13.199.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Akomodas i Musrenba ng
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			125.382.000		131.395.000	128.101.000		138.259.000			
					705,727,000		776,301,000			853,933,000			
			Prosentase koperasi aktif	93,40%		93,6%			93,90%				
			Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	27%		30%			35%				
			Jumlah koperasi	228		230			233				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Jumlah koperasi syariah	18		20			22				
1	2.11.18.10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120	40.123.000	120	41.336.000	36.249.000	120	43.816.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.11.18.11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	4	28.012.000	5 koperasi	29.012.000	42.402.000	5 pra koperasi	30.112.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang
3	2.11.18.14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10	6.504.000	10 buku	7.504.000	7.026.000	10	8.004.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	2.11.18.15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15	5.987.000	15 koperasi	6.987.000	15.539.000	15	7.567.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	2.11.18.16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150	38.215.000	150 koperasi	39.015.000	26.885.000	150	40.215.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	2.11.18.19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50	6.541.000	50 orang	7.541.000	0	50	8.545.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	2.11.18.20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah KSP/USP			60 koperasi		0	40	0	Disperindag Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			767.852.000		846.137.000	959.244.000		929.751.000			
			Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	4%		5%			6%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
1	3.6.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran 6	4	767.852.000	7 pameran (3 nasional, 2 lokal, CFD, musrenbangwil, paragon, PRPP,	846.137.000	959.244.000	4	929.751.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
	3.6.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			393.000.000		414.500.000	709.581.000		455.500.000			
			Cakupan PKL yang dibina	10%		12%			14%				
			Jumlah shelter PKL yang dikelola	14		15			16				
1	3.6.19.33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	buku laporan monev PKL dan Asongan			4 laporan		14.472.000	4 buku	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	3.6.19.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina	400	58.000.000	20 paguyuban PKL dan 8 oran9 pembina	63.000.000	33.697.000	425	69.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.6.19.9	Pendataan pedagang kaki lima	Buku Data PKL dan TDU	1	15.000.000	400 TDU dan 30 buku data PKL	16.500.000	0	1 Buku Data PKL dan 100 TDU	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	3.6.19.19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	12	84.000.000	90 hari	90.000.000	106.522.000	12	99.000.000	Jalan jalan protokol di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	3.6.19.20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	17	70.000.000	18 shelter	75.000.000	35.532.000	18	82.500.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
6	3.6.19.26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	tersedianya jasa keamanan shelter PKL	20	166.000.000	20 orang	170.000.000	502.652.000	20	187.000.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
7	3.6.19.32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah Security shelter yang dilatih			20 orang		16.706.000	20	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian											
	3.7.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			7.846.000		21.693.000	0		9.330.000			
			Jumlah sentra industri	12		13			14				
1	3.7.19.7	Diagnosis dan Pengembangan Sentra-sentra Industri	Jumlah pembinaan					0	120 orang/hari	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	SDGs, Memperte gas Skenario Kemitraan, Penanggul angan Kemiskina n
2	3.7.19.5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	4	7.846.000	2 sentra	21.693.000	0	2	9.330.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah, Akomodas i Musrenba ng
	Rp 4	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan											
	3.6.20	Program Pengelolaan Pasar			3.077.100.000		3.354.700.000	3.494.376.000		3.634.500.000			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	23%		23%			30%				
			Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%		10%			10%				
			Cakupan pedagang pasar yang dibina	10%		12%			16%				
			Persentase pasar tradisional yang dikelola	80%		80%			80%				
1	3.6.20.2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban	12	12.000.000	12 bulan	13.500.000	11.245.000	12	14.800.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	3.6.20.3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun	12	40.000.000	12 bulan	44.000.000	43.998.000	12	48.400.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
3	3.6.20.5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8	35.000.000	8 keg	38.000.000	50.000.000	12	41.000.000	Pasar pasar di Kota magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Pokok Pikiran DPRD
4	3.6.20.6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12	23.500.000	12	25.000.000	30.655.000	12	27.500.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	3.6.20.7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12	26.500.000	12	28.500.000	29.211.000	12	31.000.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	3.6.20.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar, pakaian kerja lapangan	53	849.600.000	58 petugas kebersihan	855.000.000	1.297.576.000	61	900.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	3.6.20.13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	15.000.000	12 bulan	16.500.000	20.000.000	12	18.000.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
8	3.6.20.14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	10.000.000	12	11.000.000	9.668.000	12	12.100.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	3.6.20.15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	12.500.000	12bulan	13.700.000	10.639.000	12	15.000.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	3.6.20.16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	8.500.000	12 bulan	9.300.000	6.548.000	12	10.100.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum	Rencana
11	3.6.20.17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	48	800.000.000	40 petugas	880.000.000	1.026.430.000	53	960.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	3.6.20.18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	12.000.000	12 bulan	13.200.000	13.200.000	12	15.000.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	3.6.20.19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12	17.000.000	12 bulan	18.500.000	18.500.000	12	20.000.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
14	3.6.20.20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang dilombakan	1	65.000.000	4 pasar	71.000.000	0	1	78.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
15	3.6.20.36	Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan			280 peserta		36.221.000	5	0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
16	3.6.20.23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	24.000.000	6	26.500.000	87.329.000	6	28.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
17	3.6.20.24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	47.000.000	5	51.000.000	40.516.000	6	55.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	3.6.20.25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12	95.000.000	12	100.000.000	51.292.000	12	110.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
19	3.6.20.27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10	42.500.000	10	45.000.000	16.678.000	10	49.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	3.6.20.28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	0	0	4 paket	0	0	0	0	pasar sidomukti, kebonpolo dan rejowinangun dan BSF di gotongroyong	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Pokok Pikiran DPRD
21	3.6.20.29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	12	192.000.000	5 pasar	210.000.000	125.000.000	12	228.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
22	3.6.20.30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	10	400.000.000	7 kali	500.000.000	71.024.000	10	550.000.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
23	3.6.20.39	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	Jumlah dokumen					400.000.000	1 dokumen	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Memperk uat Implement asi MKSB, Program 100-0-100, Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah
24	3.6.20.32	Verifikasi Permohonan SITU	Surat Izin Tempat Usaha			350 lembar		23.920.000	350 SITU	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Memperk uat Implement asi Masterpla n Smartcity
25	3.6.20.42	Pematangan Lahan Pasar Induk	terwujudnya pematangan lahan pasar induk					0	16 %	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implement asi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
26	3.6.20.8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah organisasi pedagang pasar yang efektif	4	150.000.000	4	165.000.000	0	4	181.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario Kemitraan
27	3.6.20.21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar	40	200.000.000	16 unit (15 tong sampah beroda, 1 unit mesin pencacah)	220.000.000	0	50	242.000.000	Pasar-pasar di kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah
28	3.6.20.37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	laporan monev			4		0	4	0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah
29	3.6.20.34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	peserta pelatihan			280		24.278.000	280	0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah
30	3.6.20.35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	laporan monev			4		21.617.000	4	0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepata n Pencapaia n Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
31	3.6.20.43	Penyusunan ANDALALIN Pembangunan Pasar Induk	tersusunnya andalalin pembangunan pasar induk					0	100 persen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
32	3.6.20.33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan					28.831.000	55 Unit	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		0	21.401.000		0			
					839,992,000		849,477,000			917,944,000			
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000			
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000			
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000			
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000			
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542			
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000			
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000			
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%				
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%				
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	7	Rp 8	Rp 9	10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
			Kemudahan pencarian dokumen yang diarsip	100	23.384.000								
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Jumlah pengelolaan arsip			12 bulan		21.401.000	12 bulan	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0	0		0			
1	4.5.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta					0	100 orang	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		9.138.156.000		9.728.232.000	10.341.206.000		10.480.054.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			214.958.700		236.454.570	118.001.000		260.100.027			
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14	12.387.100	14 item	13.625.810	7.592.000	14 item	14.988.391	setda kota magelang bagian tapem	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8	12.113.200	8 item	13.324.520	6.745.000	5 item	14.656.972	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3	2.926.000	3 jenis	3.218.600	2.400.000	2 jenis	3.540.460	SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12	32.773.400	12 bulan	36.050.740	10.954.000	12 bulan	39.655.814	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47	154.759.000	47 kegiatan	170.234.900	90.310.000	12 bulan	187.258.390	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.896.000		6.485.600	6.962.000		7.134.160			
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai			2 Jenis		2.640.000	2 jenis	0	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4	5.896.000	4 jenis	6.485.600	4.322.000	3 jenis	7.134.160	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			46.244.000		50.868.400	0		55.955.240			
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil pembinaan Pemerintahan Kecamatan	2	46.244.000	2 dokumen	50.868.400	0	Rp 2	55.955.240	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			342.151.700		376.367.870	294.740.000		414.004.557			
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%			45%				
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%			85%				
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%			40%				
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB			B				
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%			65%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%			95%				
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%			30%				
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%			100%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%			100%				
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%			80%				

			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%			80%				
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75	200.546.500	75 buku	220.602.150	207.930.000	75 buku	242.662.265	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.2.15.15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55	127.524.100	55 buku	140.276.510	86.810.000	10 buku	154.304.161	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.2.15.16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10	14.081.100	10 buku	15.489.210	0	5 buku	17.038.131	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.2.15.45	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)	Tersedianya pertanggungjawaban Walikota selama menjabat kepada pemerintah					0	10 buku	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	4.2.15.22	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah					0	75 buku	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			915.175.900		1.006.693.490	1.526.786.000		1.107.362.839			
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%			100%				
1	4.1.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24	81.123.900	24 kunker	89.236.290	65.561.000	14 kunjungan kerja	98.159.919	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana

2	4.1.16.7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12	834.052.000	12 laporan	917.457.200	0	12 laporan	1.009.202.920	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terfasilitasinya koordinasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan Walikota dan Wakil Walikota Magelang			12kali		89.840.000	12 bulan	0	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			154.887.700		170.376.470	115.282.000		187.414.117			
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000			
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000			
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%				
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%				
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%				
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1	154.887.700	1 rangkaian kegiatan hari jadi	170.376.470	115.282.000	1 rangkaian kegiatan hari jadi	187.414.117	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			330.050.600		363.055.660	356.755.000		399.361.226			
			Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%		100%			100%				

1	4.1.18.6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	3	51.905.700	4 MOU	57.096.270	51.295.000	4 MOU	62.805.897	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.18.8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI	2	242.799.700	3 kegiatan	267.079.670	305.460.000	4 Kegiatan	293.787.637	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.18.9	Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1	35.345.200	1 kegiatan	38.879.720	0	1 kegiatan	42.767.692	Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0	22.977.000		0			
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		Rp 1			Rp -				
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		Rp 1			Rp 2				
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		Rp -			Rp -				
1	4.1.19.67	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga					22.977.000	1 Konsep Raperwal	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			33.689.700		37.058.670	112.578.000		40.764.537			
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%		60%			80%				
1	4.1.20.18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2	33.689.700	2 laporan	37.058.670	11.329.000	2 laporan	40.764.537	Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.20.8	Penegasan dan Penetapan Batas Daerah	Dokumen penetapan dan penegasan batas daerah			20 pilar batas		0	12 bulan	0	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.20.12	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	Tersedianya dokumen pembakuan nama rupabumi unsur buatan			1 dokumen		101.249.000	1 dokumen	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana

	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			0		0	224.930.000		0			
1	1.5.23.2	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	Laporan desk pemilihan umum Tahun 2020			9 laporan		224.930.000	9 laporan	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0		0	31.009.000		0			
1	4.1.21.10	Evaluasi kinerja kecamatan	Laporan monitoring kinerja kecamatan					31.009.000	1 laporan monev	0	Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		2.043.054.300		2.247.360.730	1.438.635.000		2.472.096.703			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			45.149.000		49.664.000	98.484.000		54.630.000			
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	13.851.000	12 bulan	15.236.000	12.596.000	100%	16.760.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	13.692.000	12 bulan	15.061.000	9.120.000	100%	16.567.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	2.376.000	12 bulan	2.614.000	1.200.000	100%	2.875.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minumuman pegawai, rapat dan tamu	12	15.230.000	12 bulan	16.753.000	10.828.000	100%	18.428.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah		0	12 bulan	0	64.740.000	100%	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			30.135.000		33.149.000	5.886.000		36.464.000			
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	12	29.398.000	12 bulan	32.338.000	0	100%	35.572.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	737.000	12 bulan	811.000	660.000	100%	892.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		0	12 bulan	0	5.226.000	100%	0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			198.000.000		200.000.000	290.091.000		202.000.000			
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%			45%				
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%			85%				
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%			40%				
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB			B				
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%			65%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%			95%				
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%			30%				
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%			100%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%			100%				
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%			80%				
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%			80%				
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2	75.000.000	2 kegiatan	75.000.000	77.286.000	3 kegiatan	75.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
2	4.2.15.28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020	4	61.000.000	4 dokumen	62.000.000	43.670.000	4 dokumen	63.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM

3	4.2.15.30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019	1	62.000.000	1 dokumen	63.000.000	96.233.000	1 dokumen	64.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	4.2.15.9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Dokumen Monitoring Implementasi SAKIP			1 dokumen		72.902.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
5	4.2.15.41	Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	Tersedianya aplikasi e-sakip			1 aplikasi		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian											
	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0		0	74.294.000		0			
					6,926,097,000		6,975,953,000			6,651,321,400			
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	47%		48%			49%				
			Pendidikan S2	9%		9,5%			10%				
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100		Rp 100			Rp 100				
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46		Rp 0			Rp 0				
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%		100%			100%				
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%		5%			5%				
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.08%		0.08%			0.08%				
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%		41%			46%				
1	4.5.15.73	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan	Pedoman standar kompetensi jabatan					74.294.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.5.15.19	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan struktural	Pedoman standar kompetensi jabatan						1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

3	4.5.15.17	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisis Jabatan			#########				0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.5.15.36	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Laporan Aanalisis Beban Kerja			#########				0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			26.000.000		26.000.000	147.285.000		27.000.000			
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%		70%			75%				
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?		70%?			75%?				
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%		85%			90%				
1	4.2.17.3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen Bagan Jabatan Kota Magelang	2	26.000.000	2 jenis buku	26.000.000	20.605.000	2 dokumen	27.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.2.17.15	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Terlaksananya kegiatan FORSEDASI					80.590.000	1 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.2.17.13	Internalisasi Reformasi Birokrasi	Dokumen Internalisasi Reformasi Birokrasi			1 dokumen		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	4.2.17.9	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Dokumen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani					46.090.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Pemberantasan Korupsi
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			51.000.000		26.000.000	153.815.000		27.000.000			
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%		60%			80%				
1	4.1.20.13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah yang Dibina	12	26.000.000	10 OPD	26.000.000	42.743.000	2 laporan	27.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	4.1.20.15	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	dokumen evaluasi tupoksi dan uraian tugas	1	25.000.000	1 laporan	0	0	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.20.9	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen hasil monev tingkat kematangan perangkat daerah					111.072.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			91.742.000		175.242.000	210.963.000		177.000.000			
1	4.1.21.8	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Dokumen hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik			1 dokumen		16.272.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.21.3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat ke Unit Pelayanan Publik (UPP)		0	40 Unit Pelayanan Publik	83.000.000	101.544.000	1 dokumen	84.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
3	4.1.21.4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	82.742.000	1 Laporan	82.742.000	0	Rp 1	83.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
4	4.1.21.2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	9.000.000	1 Inovasi	9.500.000	93.147.000	1 dokumen	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			8.500.000		9.000.000	14.404.000		9.500.000			
1	4.3.21.40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1	8.500.000	1 dokumen	9.000.000	14.404.000	1 dokumen	9.500.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			0		0	134.752.000		0			
			cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%		100%			100%				
1	4.3.20.8	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi					134.752.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		450.526.000		519.055.000	1.129.974.000		533.594.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			141.174.000		156.681.000	99.680.000		172.746.000			
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai dan pengiriman paket	1250	4.860.000	2 jenis	5.400.000	1.205.000	2 Jenis	5.900.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18	15.800.000	17 jenis	18.000.000	13.745.000	17 jenis	20.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	8	8.183.000	7 jenis	9.002.000	7.920.000	7 jenis	10.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	24	9.790.000	2 jenis	10.769.000	3.000.000	2 jenis	11.846.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	18	12.275.000	3 jenis kegiatan	13.510.000	9.070.000	3 jenis kegiatan	15.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18	90.266.000	18 kegiatan	100.000.000	64.740.000	18 kegiatan	110.000.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			65.345.000		71.904.000	12.792.000		78.800.000			
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan kantor	3	50.000.000	4 jenis	55.000.000	0	3 jenis	60.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1	2.640.000	4 jenis	2.904.000	2.948.000	6 jenis	3.200.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU

3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	8	12.705.000	6 jenis	14.000.000	9.844.000	8 jenis	15.600.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.550.306.000		1.710.515.000	1.651.309.000		1.882.950.000			
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		Rp 1			Rp -				
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		Rp 1			Rp 2				
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		Rp -			Rp -				
1	4.1.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	3	54.931.000	5 kegiatan	65.000.000	71.273.000	4 kegiatan	67.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.19.9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	6	238.600.000	600 peserta	262.500.000	214.549.000	600 peserta	288.650.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.19.10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53	67.883.000	53 petugas	74.680.000	64.319.000	53 petugas	83.000.000	Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.1.19.14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12	96.000.000	12 kegiatan	106.000.000	87.262.000	12 laporan	116.800.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	4.1.19.18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	8	68.442.000	10 kegiatan	75.287.000	51.700.000	8 kegiatan	82.820.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
6	4.1.19.28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	3	40.042.000	2 kegiatan	44.046.000	59.127.000	2 kegiatan	48.450.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	4.1.19.42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1	13.233.000	1 Dokumen	14.557.000	34.334.000	3 kegiatan	16.020.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	4.1.19.43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	8	245.559.000	10 raperda	270.115.000	236.579.000	8 raperda	298.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
9	4.1.19.44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	500	110.123.000	625 produk hukum	121.140.000	332.645.000	650 produk hukum	133.250.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
10	4.1.19.46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12	162.610.000	12 laporan	179.000.000	108.000.000	12 laporan	196.760.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

11	4.1.19.47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1	30.466.000	1 kegiatan	33.520.000	36.648.000	3 kegiatan	36.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
12	4.1.19.48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4	168.360.000	4 kegiatan	185.200.000	43.094.000	4 kegiatan	203.720.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
13	4.1.19.56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4	43.448.000	6 Rekomendasi	47.800.000	47.484.000	6 rekomendasi	52.580.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
14	4.1.19.57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12	210.609.000	12 keg	231.670.000	230.858.000	12 kegiatan	259.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
15	4.1.19.62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan			625 produk hukum		33.437.000	650 produk hukum	0	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	Rencana
16	4.1.19.66	Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum	meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat					0	3 kegiatan	0	Bagian Hukum	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		1.756.825.000		1.939.100.000	1.763.781.000		2.134.496.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			126.046.000		128.626.000	104.486.000		131.426.000			
Rp 1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Rp 35	16.520.000	12 bulan	18.200.000	12.295.000	12 bulan	20.000.000	Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Rp 23.375	9.800.000	12 bulan	10.700.000	9.570.000	28000 lembar dan 2 jenis cetakan	11.700.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	Rp 2	2.160.000	12 bulan	2.160.000	3.000.000	2 jenis	2.160.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian pegawai rapat dan tamu, terpenuhinya konsumsi pegawai, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	Rp 12	28.166.000	12 bulan	28.166.000	30.421.000	12 bulan	28.166.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 11	69.400.000	12 bulan*	69.400.000	49.200.000	12 bulan	69.400.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			83.000.000		83.000.000	10.945.000		83.000.000			
Rp 1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara			1 jenis		4.422.000	6 unit	0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Paralatan Gedung Kantor	Rp 2	33.000.000	3 jenis	33.000.000	0	2 jenis	33.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	Rp 9	50.000.000	4 jenis, 1 paket	50.000.000	6.523.000	4 jenis	50.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan											
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			25.200.000		25.200.000	26.678.000		25.200.000			
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%			45%				
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%			85%				
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%			40%				
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB			B				
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%			65%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%			95%				
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%			30%				
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%			100%				
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%			100%				
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%			80%				

			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%			80%				
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
Rp 1	4.2.15.29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja Kota Magelang Tahun 2019	Rp 1	25.200.000	1 laporan	25.200.000	26.678.000	1 laporan	25.200.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			590.000.000		590.000.000	249.808.000		590.000.000			
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Rp 3		Rp 4			Rp 4				
Rp 1	4.3.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	Rp 12	590.000.000	8 paket	590.000.000	249.808.000	3 paket	590.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Mempertegas Skenario Kemitraan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			645.236.000		649.760.000	581.488.000		655.000.000			
Rp 1	2.10.20.10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	Rp 12	600.000.000	12 bulan	600.000.000	537.742.000	12 bulan	600.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pemberantasan Korupsi
Rp 2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	Rp 2	45.236.000	2 dokumen	49.760.000	43.746.000	2 laporan	55.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	Pemberantasan Korupsi
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			653.343.000		659.630.000	765.667.000		666.543.000			

Rp 1	4.3.21.68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA	Laporan TEPRA			12 laporan bulanan		62.599.000	12 bulan	0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Program prioritas RPJM
Rp 2	4.3.21.20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019	Rp 2	310.000.000	1 kegiatan, 1 pameran	310.000.000	386.627.000	3 kegiatan	310.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 3	4.3.21.22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	Rp 3	23.000.000	3 laporan (kondisi 0%, 50%, 100%)	23.000.000	19.419.000	3 laporan	23.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 4	4.3.21.32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari dana pemerintah pusat	Rp 12	72.000.000	12 laporan bulanan	72.000.000	60.052.000	12 laporan	72.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 5	4.3.21.33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	laporan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi	Rp 12	58.000.000	12 laporan bulanan	58.000.000	53.945.000	12 laporan	58.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 6	4.3.21.53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	Rp 4	61.000.000	4 laporan triwulanan	61.000.000	60.522.000	4 laporan	61.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Rp 7	4.3.21.65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD	Rp 12	66.500.000	12 laporan bulanan	66.500.000	63.339.000	12 laporan	66.500.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Rp 8	4.3.21.67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	Rp 12	62.843.000	12 laporan bulanan, 8 kunjungan	69.130.000	59.164.000	4 laporan kunjungan lapangan	76.043.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			0		0	0		0			
			Jumlah review PERDA/PERWAL	Rp 1		Rp 1			Rp -				
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	Rp -		Rp 1			Rp 2				
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Rp 1		Rp -			Rp -				
Rp 1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	raperwal pengadaan langsung		0	1 raperwal	0	0	1 raperwal	0	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	Pemberantasan Korupsi
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan											
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			0		0	72.679.000		0			

Rp 1	4.6.16.9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	jumlah organisasi pengadaan dari OPD dan penyedia barang jasa yang dibina			29 OPD dan 50 Penyedia Barang/Jasa		72.679.000	2 kegiatan	0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			0		0	74.433.000		0			
Rp 1	4.1.5.9	Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa	Fasilitasi pelaku pengadaan barang dan jasa					74.433.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		2.122.825.000		2.136.216.000	1.886.184.000		2.151.169.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**196.500.000**		**216.150.000**	**108.090.000**		**237.720.000**			
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko dan paket pengiriman	4	600.000	12 bulan	660.000	150.000	2 jenis	720.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	14.700.000	12 bulan	16.200.000	10.840.000	12 bulan	17.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	8.600.000	12 bulan	9.460.000	6.000.000	12 bulan	10.400.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	2	2.300.000	12 bulan	2.530.000	2.400.000	2 surat kabar / 12 bulan	2.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	18	20.300.000	12 bulan	22.300.000	6.700.000	12 bulan	24.500.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	150.000.000	50 kegiatan	165.000.000	82.000.000	12 bulan	181.500.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**50.800.000**		**52.000.000**	**7.211.000**		**53.700.000**			
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas			1 jenis		2.211.000	3 unit	0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor	3	35.000.000	3 jenis	35.000.000	0	Rp 3	35.000.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Rencana

3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	5	15.800.000	4 jenis	17.000.000	5.000.000	5 jenis	18.700.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	2.11.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**			**198.325.000**		**218.180.000**	**130.368.000**		**240.020.000**			
1	2.11.15.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan lembaga Keuangan Mikro	6	51.975.000	4 kegiatan	57.200.000	40.899.000	4 kegiatan	62.920.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskina
2	2.11.15.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUR	12	146.350.000	6 laporan	160.980.000	89.469.000	6 laporan	177.100.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskina
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**106.000.000**		**115.500.000**	**76.078.000**		**127.000.000**			
1	2.14.15.11	Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Pengendalian Laju Inflasi di Kota Magelang	6	106.000.000	6 kegiatan	115.500.000	76.078.000	6 laporan	127.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario
	3.6.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**			**0**		**0**	**149.900.000**		**0**			
1	3.6.15.28	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan DBHCHT			12 bulan		149.900.000	12 laporan	0	Bagian Perekonomian	DBHCHT	Percepata n Pencapaia
	1.6.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**118.400.000**		**130.240.000**	**128.713.000**		**143.300.000**			
1	1.6.16.27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai	12	118.400.000	Bantuan Sosial Pangan	130.240.000	62.396.000	6 laporan	143.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskina
2	1.6.16.33	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi upaya percepatan akses keuangan di Kota Magelang			4 kegiatan		66.317.000	4 laporan	0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Penanggulangan Kemiskina
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**79.550.000**		**87.505.000**	**127.322.000**		**96.256.000**			
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%				
1	2.5.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan	6	79.550.000	4 laporan	87.505.000	72.813.000	4 laporan	96.256.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs

2	2.5.16.49	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah			Pelaksanaan Pengelolaa		54.509.000	4 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implement
	4.1.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**59.620.000**		**65.000.000**	**0**		**72.000.000**			
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%			100%				
1	4.1.16.15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya	2	59.620.000	2 kegiatan	65.000.000	0	Rp 2	72.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.5.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**185.900.000**		**204.490.000**	**150.294.000**		**224.940.000**			
1	2.5.17.9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Data dan laporan hemat energi, LPG dan BBM	36	150.900.000	(SDG, LPG, dan BBM @ 12	165.990.000	123.311.000	36 laporan	182.590.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	SDGs
2	2.5.17.47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan	Sosialisasi penghematan energi dan air serta pemanfaatan energi terbarukan pada OPD	2	35.000.000	2 kegiatan sosialisasi	38.500.000	26.983.000	1 kegiatan	42.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	SDGs
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**0**		**0**	**0**		**0**			
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan peraturan daerah		0	2 Raperda	0	0	Rp 2	0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Rancangan Peraturan Walikota			1 Raperwal		0	1 raperwal	0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Rencana
	3.7.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**			**317.595.000**		**348.300.000**	**305.816.000**		**383.100.000**			
1	3.7.20.1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	12	134.960.000	12 laporan bulanan	148.000.000	111.059.000	12 laporan	162.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia
2	3.7.20.2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	RKAP dan Perubahan RKAP Perusahaan Daerah	10	47.775.000	10 laporan (5 bumd @ 2 laporan)	52.000.000	49.484.000	10 dokumen	57.200.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia
3	3.7.20.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Laporan Evaluasi RKAP Perusahaan Daerah	12	94.860.000	12 laporan bulanan	104.300.000	104.366.000	12 laporan	114.700.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia

4	3.7.20.8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah	5	40.000.000	5 dokumen	44.000.000	40.907.000	5 laporan	48.400.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaia
	4.1.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**0**		**0**	**55.962.000**		**0**			
1	4.1.21.9	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya			2 kegiatan		55.962.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Memperte gas Skenario
			TOTAL		**1.312.690.000**		**1.437.365.000**	**1.239.754.000**		**1.578.036.000**			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
Rp 1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			170.868.000		187.966.000	103.085.000		206.891.000			
Rp 1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 23	20.697.000	22 jenis	22.770.000	8.200.000	22 jenis	25.050.000	Magelang	Alokasi Umum	ExBAU
Rp 2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan dan cetak	Rp 30.000	6.600.000	36300 lembar	7.260.000	7.467.000	30000 lembar, 100 lembar, 5 buku	7.986.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan karyawan sebagai referensi	Rp 2	2.442.000	2 media cetak	2.687.000	2.400.000	2 media massa	2.955.000	Bagian Kesra Setda Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya jamuan makan dan minum	Rp 12	12.330.000	10 pegawai	13.570.000	11.278.000	100 %	15.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 25	128.799.000	25 kali	141.679.000	73.740.000	25 kegiatan	155.900.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 6	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat					0	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			65.318.000		76.850.000	5.000.000		88.540.000			

Rp 1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Rp 4	50.000.000	5 jenis	60.000.000	0	3 jenis	70.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
Rp 2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan secara memadai	Rp 18	15.318.000	6 jenis	16.850.000	5.000.000	6 jenis	18.540.000	Bagian Kesra Setda Kota	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			93.912.000		103.310.000	91.849.000		113.640.000			
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari				
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%				
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rp 6		Rp 6			Rp 8				
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	Rp 12		Rp 13			Rp 15				
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban	95%		96%			97%				
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	Rp 74		Rp 77			Rp 77				
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas	14.26%		17.12%			20.55%				
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Rp 12		Rp 15			Rp 18				
Rp 1	1.5.15.9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Dialog/audiensi dalam kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	Rp 4	93.912.000	4 kegiatan (19 kali pelaksanaan tarling)	103.310.000	91.849.000	4 (3 kecamatan dan 1 pembukaan tarawih keliling)	113.640.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											

	1.6.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			70.408.000		78.000.000	119.704.000		85.200.000			
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		100%			100%				
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	11.00%		13.00%			14.00%				
Rp 1	1.6.15.6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Terlaksananya pemberian bantuan santunan kematian sesuai ketentuan yang berlaku	Rp 12	70.408.000	12 bulan	78.000.000	119.704.000	100%	85.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			25.120.000		30.396.000	23.974.000		33.440.000			
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%				
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%				
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%				
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%				
Rp 1	1.2.16.51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya koordinasi pemantapan kelembagaan tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	Rp 150	25.120.000	1 Kegiatan	30.396.000	23.974.000	100%	33.440.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			267.970.000		294.800.000	158.712.000		325.000.000			
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%			100%				

			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		35%			40.00%				
Rp 1	1.6.16.22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	Rp 12	267.970.000	12 bulan	294.800.000	158.712.000	100%	325.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 2	1.6.16.52	Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersosialisasinya ketentuan pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku					0	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Pokok Pikiran DPRD
Rp 3	1.6.16.51	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	Terpantaunya pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sosial sesuai ketentuan yang berlaku					0	1 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			65.135.000		71.650.000	30.458.000		78.900.000			
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%				
Rp 1	2.2.16.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender	Rp 4	65.135.000	4 laporan	71.650.000	30.458.000	2 laporan	78.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			321.311.000		353.500.000	297.083.000		389.720.000			
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000			

			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000			
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%				
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%				
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%				
Rp 1	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Malam Tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang	Rp 1	59.273.000	1 kegiatan	65.200.000	78.279.000	1 kegiatan	71.720.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan HUT RI, Hari Ibu, dan Hari AIDS Tingkat Kota Magelang	Rp 3	262.038.000	3 kegiatan	288.300.000	218.804.000	3 kegiatan	318.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan											
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			471.684.000		518.990.000	497.675.000		570.910.000			
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%			97.63%				
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%			100%				
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%			100%				
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%			100%				
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%			25.00%				
			Jumlah Juara FASI	Rp 4		-			-				

			Jumlah Juara MTQ	Rp 1		Rp 2			Rp 2				
Rp 1	1.1.18.14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Magelang	Rp 2	215.386.000	2 kegiatan	237.000.000	202.030.000	2 kegiatan	260.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 2	1.1.18.16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Magelang	Rp 2	197.028.000	2 kegiatan	216.800.000	217.525.000	2 kegiatan	238.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 3	1.1.18.17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Terkirimnya peserta MTQ Pelajar dan MTQ Umum ke Tingkat Provinsi Jateng	Rp 2	59.270.000	2 kegiatan	65.190.000	78.120.000	2 kegiatan	71.710.000	Kesra Setda Kota	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial											
	1.6.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			38.924.000		42.900.000	37.886.000		47.100.000			
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	58%		67%			75%				
Rp 1	1.6.19.7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya pengajian dan buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	Rp 1	38.924.000	1 kegiatan	42.900.000	37.886.000	1 kegiatan	47.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			173.415.000		190.757.000	123.150.000		210.000.000			
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	Rp 6		Rp 6			Rp 7				
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			Jumlah klub olah raga	Rp 183		Rp 183			Rp 183				

			Jumlah organisasi olah raga	Rp 35		Rp 35			Rp 36				
Rp 1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga (senam, volley ball, tenis, sepak bola)	Rp 40	173.415.000	4 kegiatan	190.757.000	123.150.000	4 kegiatan	210.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			72.532.000		79.785.000	63.230.000		87.800.000			
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Rp -		42.50%			Rp -				
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82			11,76				
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%			100%				
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%			100%				
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%			100%				
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%			23,53%				
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada			ada				
Rp 1	1.5.22.9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	Rp 4	72.532.000	4 laporan	79.785.000	63.230.000	4 laporan	87.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		0	0		0			

			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada				
Rp 1	2.2.15.6	Perumusan kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Anak Putus Sekolah			100 orang		0	Rp 1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			0		0	1.070.605.000		0			
			Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	35%		50%			65%				
			Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%		5%			5%				
			Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	Rp 60		66,67			66,67				
			Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	Rp 6		Rp 5			Rp 5				
			Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	7%		10%			15%				
			Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-		-			-				
			Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	15%									
			Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-		Rp 1			-				

			Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%		100%			100%				
Rp 1	1.5.24.3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan 3 Peringatan Hari Besar Islam, Natal, dan Nyepi			5 kegiatan		337.467.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana, Pokok
Rp 2	1.5.24.2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya kegiatan pengiriman TPHD dan P3H			3 kegiatan		255.837.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 3	1.5.24.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Pengajian Akbar Peringatan Tahun Baru Islam dan Khaul Syaikh Subachir			1 kegiatan		450.935.000	2 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 4	1.5.24.6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kehidupan beragama dan Toleransi Umat beragama	Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi			2 laporan		0	Rp 1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
Rp 5	1.5.24.4	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Tingkat Kota Magelang			1 kegiatan		0	Rp 1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana, Akomodasi Musren
Rp 6	1.5.24.7	Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola	Terbinanya Pengurus Takmir Masjid / Mushola se-Kota Magelang sesuai ketentuan Kemenag					26.366.000	140 Takmir Masjid	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		1.836.597.000		2.028.904.000	2.622.411.000		2.237.141.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

SKPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			314.270.000		345.729.000	248.620.000		384.540.000			
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46	20.273.000	12 bulan	22.301.000	17.000.000	12 bulan / 39 jenis	24.540.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6	29.722.000	12 bulan	32.700.000	25.500.000	12 bulan / 3 jenis	36.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan harian surat kabar dan majalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan wawasan	10	68.880.000	12 bulan	75.800.000	69.240.000	12 bulan / 11 jenis	84.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan logistik bagi pegawai, serta konsumsi bagi tamu dan peserta rapat	12	32.380.000	12 bulan	35.608.000	20.040.000	12 bulan	40.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	163.015.000	12 bulan	179.320.000	116.840.000	12 bulan	200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			53.174.000		58.493.000	37.555.000		64.403.000			

1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin	3	25.630.000	3 jenis	28.193.000	24.180.000	4 jenis	31.013.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan yang mendukung kinerja kehumasan dan keprotokolan	11	27.544.000	9 jenis	30.300.000	13.375.000	6 jenis	33.390.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.314.406.000		1.420.848.000	2.392.315.000		1.537.999.000			
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000			
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000			
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000			
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%				
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaa		5 agama dan kepercayaa			5 agama dan kepercayaa				
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaa n		agama dan kepercayaa n			agama dan kepercayaa n				

			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3				
			Jumlah KIM	17		17			17				
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7				
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-				
1	2.10.15.9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	84	17.094.000	12 bulan	18.804.000	11.700.000	12 bulan	20.690.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	2.10.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Publikasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang melalui media cetak dan elektronik, serta terdokumentasinya	35	380.000.000	12 bulan	393.000.000	1.271.785.000	3 kegiatan	407.300.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	egas Skenario Kemitraan, Rencana
3	2.10.15.20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Kerjasama dengan wartawan media cetak dan elektronik	1	518.958.000	5 kegiatan	570.854.000	421.730.000	5 kegiatan	628.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Mempert egas Skenario Kemitraan
4	2.10.15.25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumentasi kegiatan acara resmi Pemerintah Kota Magelang, serta naskah sambutan Walikota, Wakil	12	398.354.000	12 bulan	438.190.000	610.520.000	12 bulan	482.009.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	2.10.15.38	Pengelolaan Sosial Media	Pegelolaan akun media sosial					76.580.000	12 bulan	0	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Rencana

	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			0		0	280.250.000		0			
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%			100%				
1	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pelaksanaan acara resmi Pemerintah Kota Magelang dengan lancar			12 bulan		280.250.000	12 bulan	0	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			160.000.000		176.000.000	137.530.000		200.000.000			
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000			
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000			
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang	72,2%		74,8%			77,4%				
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%				
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%				

1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Pelaksanaan upacara hari jadi Kota Magelang, upacara HUT RI, dan upacara besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan nilai-nilai patriotisme	10	160.000.000	4 kegiatan	176.000.000	137.530.000	3 kegiatan	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			0		0	179.480.000		0			
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan hasil data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil analisa isu publik					179.480.000	12 bulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			221.470.000		243.700.000	184.250.000		268.000.000			
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1		1			1				
			Interoperabilitas antar system informasi	2		4			4				
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%		75%			100%				
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%		80%			100%				

			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%			100%				
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12	221.470.000	12 bulan	243.700.000	184.250.000	12 bulan	268.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	uat Impleme ntasi
			TOTAL		2.063.320.000		2.244.770.000	3.460.000.000		2.454.942.000			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021			
1	Rp 2	Rp 3	Rp 4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8	Rp 9	Rp 10	Rp 11	Rp 12	Rp 13	Rp 14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan											
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.016.384.000		2.215.610.000	1.911.051.000		2.430.840.000			
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1250	5.000.000	1375 buah	5.500.000	3.500.000	1375 buah	6.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR, Pengurusan Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK	99	80.000.000	99 unit kendaraan dinas	85.000.000	56.536.000	KIR 2 unit, pajak kendaraan 106 unit, STNK 45 dokumen	90.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi barang	14	847.000.000	12 Bulan	932.000.000	912.222.000	12 laporan keuangan dan 2 laporan barang	1.024.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31	668.000.000	31 orang, 7 item alat kebersihan	736.000.000	630.298.000	8 jenis alat kebersihan, 26 tenaga kebersihan, 26 stel seragam	809.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	14	43.500.000	15 jenis	47.850.000	30.000.000	15 jenis	52.600.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6	18.650.000	5 jenis barang cetak	20.500.000	12.500.000	5 jenis barang cetakan, 50000 lembar pengganda an	22.600.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	10	50.650.000	10 jenis	55.800.000	65.375.000	34 jenis	61.900.000	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan Bahan bacaan	5	3.476.000	2 jenis	3.830.000	1.000.000	2 jenis	4.200.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan Tabung gas	2	86.427.000	2 jenis	95.070.000	16.700.000	1500 liter BBM, 20 kali pengisian	104.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai dan konsumsi rapat	12	21.329.000	2 jenis	23.470.000	19.980.000	4 jenis mamin harian, 12 kegiatan	25.810.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	132.352.000	12 bulan	145.590.000	58.480.000	15 kegiatan	160.150.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kebutuhan operasional pimpinan dan perlengkapan kegiatan Setda	12	60.000.000	12 bulan	65.000.000	104.460.000	12 bulan	70.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.460.955.000		2.707.088.000	2.327.586.000		2.977.630.000			
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	MPV			2 Jenis		1.204.240.000	3 unit	0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah	5	220.000.000	2 jenis	242.000.000	0	4 unit panel listrik	266.200.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	4	233.950.000	2 jenis	257.340.000	0	Rp -	283.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman lingkungan	4	541.640.000	4 lokasi	595.804.000	270.200.000	3 gedung, 2 lokasi taman	655.380.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
5	4.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan KDH & WKDH	2	198.110.000	2 unit	217.921.000	160.855.000	2 unit	239.710.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU

6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 dan Bus	92	1.219.053.000	99 unit	1.341.000.000	657.355.000	pemeliharaan 5 jenis kendaraan, BBM 7 jenis kendaraan	1.475.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7	13.563.000	7 jenis	14.920.000	18.431.000	5 jenis	16.420.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja dan kantor	10	23.353.000	8 jenis	25.688.000	11.505.000	4 jenis	28.260.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
9	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5	11.286.000	5 jenis	12.415.000	5.000.000	5 jenis	13.660.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	ExBAU
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Instalasi Listrik dan Air Gedung A, B, C dan Saluran Drainase Gedung Pemkot Magelang			2 paket		0	3 paket	0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
11	4.1.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi	Handy Talky			6 unit		0	Rp -	0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			227.954.000		250.822.300	181.723.000		275.898.500			
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan/anggaran	16	67.030.000	12 laporan	73.735.000	41.800.000	12 kegiatan	81.190.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1	11.286.000	1 laporan	12.415.000	7.769.000	1 laporan	13.650.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1	12.876.000	1 laporan	14.160.000	8.269.000	1 laporan	15.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan Setda	2	13.702.000	2 jenis	15.070.000	12.225.000	2 dokumen	16.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Setda	2	46.300.000	2 kegiatan	51.000.000	31.290.000	2 dokumen	56.020.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana

6	4.1.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12	66.693.000	12 laporan	73.362.300	68.820.000	12 laporan	80.698.500	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1	10.067.000	1 laporan	11.080.000	11.550.000	1 laporan	12.180.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	Rencana
8	4.1.6.29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Dokumen Perubahan RENSTRA			1 dokumen		0	Rp -	0	Sekretariat Daerah	Dana Alokasi Umum	Rencana
			TOTAL		4.705.293.000		5.173.520.300	4.420.360.000		5.684.368.500			

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Umum

URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.392.329.800		5.931.562.780	5.249.136.000		6.524.719.058				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, paket pengiriman dan jasa kotak pos	12	7.480.000	3 jenis	8.228.000	6.500.000	1.340 buah perangko, 10 kali pengiriman paket dan 1 kali belanja jasa kotak pos	9.050.800	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12	2.097.480.000	5 jenis	2.307.228.000	1.878.000.000	Kantor Sekretariat Daerah, 2 Rumah Jabatan dan 1 Rumah Dinas	2.537.950.800	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan dan seragam tenaga kebersihan	12	182.767.200	12 bulan	201.043.920	285.508.000	16 jenis peralatan, 10 orang tenaga kebersihan dan 20 stel seragam kerja	221.148.312	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	44.000.000	10 jenis	48.400.000	50.000.000	27 jenis alat tulis kantor	53.240.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12	129.118.000	3 keg	142.029.800	129.104.000	15 jenis barang cetakan, 40.200 lembar pengganda an dan 72 jilid	156.232.780	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	10	20.252.100	11 jenis	22.277.310	26.124.000	5 jenis peralatan listrik	24.505.041	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan karangan bunga, tempat cinderamata dan cinderamata	12	289.300.000	3 jenis	318.230.000	283.500.000	150 buah karangan bunga dan 43 buah cinderamat a	350.053.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12	33.825.000	20 jenis	37.207.500	38.340.000	8 jenis peralatan rumah tangga	40.928.250	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	12	3.476.000	2 jenis	3.823.600	2.400.000	2 jenis surat kabar	4.205.960	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	12	73.701.100	2 jenis	81.071.210	23.000.000	475 liter solar dan 120 buah tabung gas kapasitas 12 Kg	89.178.331	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan konsumsi harian pegawai,konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	12	1.175.350.000	3 kegiatan	1.292.885.000	1.192.061.000	6 jenis makanan dan minuman harian, 75 kali jamuan rapat, 700 kali jamuan tamu	1.422.173.500	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU

12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	986.865.000	12 bulan	1.085.551.500	1.006.210.000	28 kali perjalanan dinas dalam prov jateng dan 28 kali perjalanan dinas luar prov jateng	1.194.106.650	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	12	92.596.900	3 orang	101.856.590	84.179.000	3 orang tenaga kontrak/ honorer daerah	112.042.249	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	8	22.000.000	5 orang	24.200.000	12.500.000	5 orang	26.620.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9	27.896.000	dokumen kepegawaian dari 9 bagian	30.685.600	52.770.000	9 bagian	33.754.160	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
16	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12	206.222.500	12 bulan	226.844.750	178.940.000	12 kali jamuan rapat serta 1 stel PSL, 2 stel PDH dan 1 stel Korpri Sekda	249.529.225	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			475.953.500		523.548.850	313.890.000		575.903.735				
1	4.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH & WKDH	2	147.400.000	2 rumah jabatan	162.140.000	159.200.000	2 rumah jabatan	178.354.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1	56.969.000	1 rumah	62.665.900	50.000.000	1 rumah dinas	68.932.490	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	12	17.952.000	9 jenis	19.747.200	18.500.000	2 jenis peralatan dan mesin	21.721.920	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana

4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12	40.700.000	8 jenis	44.770.000	7.250.000	6 item perlengkapan gedung kantor	49.247.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12	27.967.500	4 jenis	30.764.250	13.940.000	2 jenis pera	33.840.675	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
6	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala			17 jenis		65.000.000	2 rumah dan 1 gedung kantor	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor	9	184.965.000	9 jenis	203.461.500	0	9	223.807.650	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			31.200.400		34.320.440	97.350.000		37.752.484				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	12	31.200.400	168 arsip	34.320.440	34.200.000	9 Bagian	37.752.484	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.16.13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Pendokumentasian naskah dinas daerah di 9 bagian lingkup setda			arsip yang dikelola di 9 bagian Setda		63.150.000	9 bagian	0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi												

	4.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			2.105.562.800		2.316.119.080	1.931.816.000		2.547.730.988				
			Rasio pemenuhan pelayanan	100%		100%			100%					
1	4.1.16.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12	199.914.000	24 dialog/audiensi	219.905.400	179.960.000	33 kali audiensi	241.895.940	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	12	512.243.600	1 kali kunjungan kerja, 12 inspeksi ke SKPD dan institusi lainnya	563.467.960	319.795.000	1 kali kunjungan kerja, 12 kali inspeksi ke SKPD/institusi lainnya	619.814.756	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12	526.218.000	36 kali koordinasi	578.839.800	695.250.000	65 kali koordinasi	636.723.780	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota magelang	12	867.187.200	12 bulan	953.905.920	736.811.000	4 orang tenaga kerumahtanggaan, 1 orang tenaga pengamanan walikota, 2 stel PDH, 2 stel PDU, 1 stel korpri	1.049.296.512	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		8.005.046.500		8.805.551.150	7.592.192.000		9.686.106.265				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Sekretariat DPRD
URUSAN : Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.204.365.750		8.274.495.350	5.870.450.000		9.065.961.385				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	12	357.000	2000 surat dan 12 pengiriman paket	400.000	500.000	10 paket	400.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12	212.700.000	12 bulan	212.700.000	244.800.000	4 telepon, 2 rekening air dan 2 rekening listrik, 2 langganan internet	233.970.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk tertibnya administrasi dan kenyamanan pengguna kendaraan	49	37.600.000	32 kendaraan dinas	37.600.000	23.400.000	32 Kendaraan	37.600.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	248.329.000	12 bulan	259.543.000	258.400.000	9 pengelola keuangan , 3 pengelola barang	259.543.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	12	161.599.000	Rp 12	161.599.000	326.650.000	41 Peralatan dan bahan pembersih	177.758.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	12	26.076.000	45 item	26.076.000	34.772.000	45 Item	28.700.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12	55.427.000	12 bulan	55.427.000	34.870.000	11 Item	60.969.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	12	14.308.000	Rp 12	14.308.000	20.006.000	14 Item	15.738.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5	59.350.000	5 item	59.350.000	97.814.000	5 Item	65.285.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12	12.800.000	1 koran lokal, 5 koran regional, 1 majalah nasional, 13 buku peraturan	12.800.000	15.000.000	1koran lokal, 5 koran regional dalam 12 bulan, 1 majalah nasional , 13 buku peraturan perundang - undangan	14.900.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	12	9.076.000	Rp 12	10.972.600	19.201.000	3 Item	12.069.860	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12	74.460.750	12 bulan	74.460.750	327.549.000	3 Item makan minum	81.906.825	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12	6.947.200.000	12 bulan	6.947.200.000	3.948.700.000	Luar daerah dan dalam daerah	7.641.920.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tenaga mekanikal,Administrasi,Tersedianya penjaga malam, driver	jaga malam 10,driver 2	214.632.000	Mekanikal 1 orang, administrasi 4 orang, penjaga malam 9 orang, pengemudi 2 orang	229.032.000	343.641.000	jaga malam 10,driver 2	244.872.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	4.1.1.24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD sedini mungkin	25 anggota DPRD dan keluarga	101.299.000	25 anggota DPRD	143.875.000	62.500.000	25 anggota DPRD dan keluarga	158.262.500	Setwan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
16	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12	29.152.000	12 bulan	29.152.000	112.647.000	2 Tenaga administrasi	32.067.200	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			903.696.000		908.846.000	707.460.000		942.389.700				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12	102.241.000	12 bulan	104.091.000	132.125.000	1unit rumah dinas	114.500.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	190.368.000	1 unit gedung kantor	193.668.000	161.625.000	1	213.034.800	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	32	548.658.000	31 (18 kendaraan roda 2, 13 kendaraan roda 4)	548.658.000	285.920.000	32	548.658.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	13	41.750.000	12 item	41.750.000	44.836.000	13	43.450.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kinerja	5	20.679.000	4 item	20.679.000	16.900.000	5	22.746.900	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terfasilitasunya gudang dengan mebeleur			#########		66.054.000	1 Item	0	Setwan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			178.171.000		188.171.000	187.699.000		185.988.100				
1	4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	125	178.171.000	175 pakaian dinas	188.171.000	187.699.000	125	185.988.100	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			872.000.000		872.000.000	684.000.000		950.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6	872.000.000	6 kegiatan	872.000.000	684.000.000	7	950.000.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.287.000		45.273.000	56.389.000		48.527.900				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4	8.872.000	4 triwulan	8.872.000	12.922.000	4	9.615.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1	2.780.000	1 laporan	2.780.000	2.743.000	1	3.763.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	0	1 kegiatan	0	2.979.000	0	0	setwan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	8.971.000	Rp 2	8.971.000	11.648.000	2	9.100.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2	14.235.000	Rp 2	17.221.000	18.000.000	2	18.193.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjiP	1	7.429.000	1 kegiatan	7.429.000	8.097.000	10000000	7.856.900	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			4.413.568.000		4.414.168.000	12.306.641.000		4.806.414.600				
			SETWAN		3,559,383,000		3,917,896,000			3,624,366,000				
			Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%		100%			100%					
1	4.1.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda yang ditetapkan	20	531.802.000	20 raperda	531.802.000	1.647.201.000	20	536.651.600	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12	280.097.000	7 alat kelengkapan dewan	280.097.000	6.175.025.000	7 alat kelengkapan dewan	281.184.500	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	1	204.754.000	35 rapat paripurna	204.754.000	240.841.000	35 rapat paripurna	254.575.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4.1.15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3	987.735.000	3 kali reses	987.735.000	1.353.446.000	3 kegiatan reses	1.086.508.500	Dapil 1, 2 , dan 3	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.15.9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	12	35.730.000	120 risalah	36.330.000	27.248.000	120 risalah	36.700.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.15.11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	8	2.373.450.000	6 kegiatan	2.373.450.000	1.884.600.000	6 bintek/ workshop	2.610.795.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD			8 Raperwal		240.680.000	8 Perwal	0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya study banding dan koordinasi					737.600.000	4 kegiatan	0	Setwan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			40.436.000		40.436.000	43.440.000		41.236.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200	40.436.000	200 buku	40.436.000	43.440.000	200 buku	41.236.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			57.298.000		57.298.000	26.238.000		59.750.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	12	57.298.000	Arsip 3 bagian	57.298.000	26.238.000	arsip di 3 bagian	59.750.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			158.500.000		159.600.000	184.085.000		159.600.000				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarluasnya informasi	12	158.500.000	4 item media publikasi	159.600.000	184.085.000	5 item	159.600.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	106.895.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		Rp 3			3					
			Jumlah KIM	17		Rp 17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		Rp 7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Tersedianya publikasi kegiatan wakil rakyat			600 buletin		106.895.000	4 kali	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		14.870.321.750		14.960.287.350	20.173.297.000		16.259.867.685				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Magelang Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**												
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**758.204.000**		**834.028.000**	**794.791.000**		**917.436.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	36.960.000	12 bulan	40.656.000	49.800.000	12	44.722.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
2	4.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	15	3.168.000	12 buah	3.485.000	2.210.000	15	3.834.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	11	3.135.000	1 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	3.449.000	3.342.000	11	3.794.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54	390.230.000	54 orang	429.254.000	414.048.000	54	472.179.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12	84.832.000	12 bulan	93.316.000	87.374.000	12	102.648.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	31.481.000	12 bulan	34.630.000	18.221.000	12	38.094.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12.290.000	12 bulan	13.519.000	4.325.000	12	14.871.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	7.823.000	12 bulan	8.605.000	3.723.000	12	9.466.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	2.838.000	12 bulan	3.122.000	2.000.000	12	3.434.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU

10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12	4.362.000	12 bulan	4.798.000	3.520.000	12	5.278.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12	20.714.000	12 bulan	22.785.000	26.838.000	12	25.064.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7	74.459.000	8 kegiatan	81.905.000	31.400.000	7	90.096.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 35	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	1	17.702.000	2 orang	19.473.000	42.419.000	2	21.421.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12	68.210.000	12 bulan	75.031.000	105.571.000	12	82.535.000	Kantor Kecamatan	Dana Alokasi Umum	Rp 70	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**149.172.000**		**164.091.000**	**77.346.000**		**180.501.000**				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	100	5.709.000	150 M2	6.280.000	4.546.000	100	6.908.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	625	54.917.000	700 M2	60.409.000	12.000.000	2609	66.450.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11	74.415.000	11 unit	81.857.000	48.900.000	11	90.043.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26	7.014.000	25 unit (ubah per jenis)	7.716.000	6.000.000	26	8.488.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14	7.117.000	5 jenis	7.829.000	5.900.000	14	8.612.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**119.660.000**		**131.628.000**	**41.463.000**		**144.794.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	26.176.000	12 laporan	28.794.000	7.644.000	12	31.674.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tesedianya rencana kerja OPD	2	22.437.000	2 dokumen	24.681.000	10.980.000	2	27.149.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 55	ExBAU
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2	32.885.000	2 dokumen	36.173.000	18.434.000	2	39.790.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 59	ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1	13.836.000	1 dokumen	15.220.000	4.405.000	1	16.742.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 39	ExBAU

5	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1	11.723.000	1 dokumen	12.896.000	0	-	14.185.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 39	ExBAU
6	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	12.603.000	1 dokumen	13.864.000	0	-	15.254.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 39	ExBAU
	Rp 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**												
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.384.000**		**9.221.000**	**7.000.000**		**10.144.000**				
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120	8.384.000	120 peserta	9.221.000	7.000.000	100 peserta	10.144.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 76	Kota Layak Anak
	Rp 3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**												
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**15.563.000**		**17.120.000**	**10.865.000**		**18.832.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76	15.563.000	76 orang	17.120.000	10.865.000	76	18.832.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 50	Rencana
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**												
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**0**	**0**		**0**				
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kecamatan			1 kegiatan		0	-	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 64	Akomodasi Musrenbang
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik**												
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**6.446.000**		**7.091.000**	**3.305.000**		**7.801.000**				
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1	6.446.000	1 jenis dokumen	7.091.000	3.305.000	1	7.801.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	Rencana
	Rp 2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**93.170.000**		**102.487.000**	**98.129.000**		**112.736.000**				

1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	93.170.000	12 bulan	102.487.000	98.129.000	12	112.736.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 49	Rencana
	Rp 3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**												
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**50.361.000**		**55.398.000**	**44.519.000**		**60.938.000**				
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2	50.361.000	2 kegiatan	55.398.000	44.519.000	2	60.938.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 71	Memperkuat Implementasi
	Rp 3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
	2.8.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**			**9.984.000**		**10.983.000**	**0**		**12.082.000**				
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60	9.984.000	70 orang	10.983.000	0	60 orang	12.082.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 40	SDGs
	Rp 2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**10.860.000**		**11.946.000**	**27.531.000**		**13.141.000**				
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1	10.860.000	1 kegiatan	11.946.000	12.531.000	1 kegiatan	13.141.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 50	Rencana
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terwujudnya jiwa dan semangat nilai patriotisme di masyarakat			1 Kegiatan		15.000.000	1 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 64	Rencana
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**												
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**24.101.000**		**26.512.000**	**22.500.000**		**29.164.000**				
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	24.101.000	1 kegiatan	26.512.000	22.500.000	1 kegiatan	29.164.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	Rencana
	Rp 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**												
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**30.536.000**		**33.590.000**	**35.427.000**		**36.949.000**				
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275	30.536.000	275 orang	33.590.000	35.427.000	275	36.949.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 66	Kota Layak Anak

	Rp 3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**												
	2.7.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**5.906.000**		**6.497.000**	**0**		**7.147.000**				
1	2.7.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90	5.906.000	90 orang	6.497.000	0	-	7.147.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 44	Tema RKPD 2019
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**28.490.000**		**31.340.000**	**18.030.000**		**34.475.000**				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
1	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30	13.164.000	60 orang	14.481.000	0	-	15.930.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 81	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12	15.326.000	12 Bulan	16.859.000	18.030.000	12 bulan	18.545.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 76	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**10.569.000**		**11.626.000**	**8.972.000**		**12.789.000**				
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	60	10.569.000	90 orang	11.626.000	8.972.000	60 orang	12.789.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	Kota Layak Anak
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**												
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**4.765.000**		**5.242.000**	**3.200.000**		**5.767.000**				
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	4	4.765.000	4 kegiatan	5.242.000	3.200.000	2 kegiatan	5.767.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 49	Rencana
	Rp 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**												

	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**33.288.000**		**36.618.000**	**32.986.000**		**40.281.000**				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya kegiatan sarasehan musrenbang	125	14.187.000	125 orang	15.606.000	12.505.000	125 orang	17.167.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 50	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	1	19.101.000	1 jenis dokumen	21.012.000	20.481.000	3 kegiatan	23.114.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 65	Program prioritas RPJM
	Rp 2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**10.582.000**		**11.641.000**	**0**		**12.806.000**				
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan	60	10.582.000	90 orang	11.641.000	0	-	12.806.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 49	SDGs
	Rp 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**												
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.790.000**		**15.169.000**	**10.074.000**		**16.686.000**				
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	90	13.790.000	90 orang	15.169.000	10.074.000	60 orang	16.686.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	Kota Layak Anak, SDGs
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**9.072.000**		**9.979.000**	**0**		**10.977.000**				
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta penyuluhan	75	9.072.000	75 orang	9.979.000	0	-	10.977.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	Kota Layak Anak, SDGs
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**												
	2.11.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**			**0**		**0**	**34.293.000**		**0**				

1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produksi UMK wilayah Kec. Magelang Selatan			1 Kegiatan		34.293.000	1 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 69	Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**												
	2.7.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**			**0**		**0**	**0**		**0**				
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan			2 dokumen laporan		0	-	0	Kecamata Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	Rencana
	Rp 2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**0**	**13.068.000**		**0**				
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kecamatan			4 kegiatan		13.068.000	4 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 74	Mempertegas Skenario Kemitraan
	Rp 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**												
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**0**	**7.912.000**		**0**				
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Pekat			1 kegiatan		7.912.000	1 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 40	SDGs
	Rp 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**												
	2.16.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**			**0**		**0**	**24.784.000**		**0**				
1	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan budaya					24.784.000	1 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 50	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												

	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			0		0	0		0				
1	2.13.16.6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terfasilitasinya kreativitas kalangan generasi muda					0		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 40	Kota Layak Anak
			TOTAL		1.392.903.000		1.532.207.000	1.316.195.000		1.685.446.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Rejowinangun Selatan
URUSAN : Kelurahan Rejowinangun Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			125.476.000		112.800.000	138.511.000		114.800.000				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam			12 bulan		21.619.000	12 bulan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12	20.160.000	12	22.000.000	22.800.000	12 bulan	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendaraan dinas	9 motor	2.500.000	9 motor	3.000.000	3.000.000	9 motor kendaraan dinas	3.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12	19.000.000	12 bulan	0	25.683.000	12 bulan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12	16.816.000	12	18.000.000	10.142.000	12 bulan	18.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12	8.542.000	12	9.000.000	4.041.000	12 bulan	9.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12	1.500.000	12	2.000.000	3.490.000	12 bulan	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12	4.500.000	12	5.000.000	3.600.000	12 bulan	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan isi ulang tabung gas	12	713.000	12	800.000	1.364.000	12 bulan	800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12	21.745.000	12	23.000.000	14.272.000	12 bulan	25.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	30.000.000	1	30.000.000	28.500.000	12 bulan	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			113.706.000		84.000.000	36.835.000		71.000.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1	10.165.000	1	12.000.000	9.699.000	12 bulan	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12	13.785.000	12	15.000.000	17.915.000	12 bulan	15.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12	10.090.000	12	12.000.000	9.221.000	12 bulan	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		0		0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		
5	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	5	39.860.000	1	30.000.000	0	1	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	39.806.000	1	15.000.000	0	1	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor					0	12 bulan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												

	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			18.337.000		19.000.000	13.138.000		19.500.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1	18.337.000	1	19.000.000	13.138.000	1 kegiatan	19.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			6.907.000		7.000.000	15.315.000		7.200.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,3					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45	6.907.000	45	7.000.000	15.315.000	45 orang	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.980.000		7.000.000	8.245.000		7.200.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50	6.980.000	50	7.000.000	8.245.000	50 orang	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			41.501.000		43.021.000	53.543.000		43.021.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12	31.021.000	12	31.021.000	46.923.000	12 bulan	31.021.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1	10.480.000	1	12.000.000	6.620.000	1 kegiatan	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			31.471.000		33.000.000	79.911.000		33.000.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Laporan kependudukan	12	4.390.000	12	5.000.000	0	12 bulan	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12	27.081.000	12	28.000.000	79.911.000	12 bulan	28.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.834.000		12.000.000	11.775.000		12.000.000				

1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82	10.834.000	82	12.000.000	11.775.000	82 orang	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya RTRW			82 orang		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			30.884.000		31.000.000	39.458.000		31.000.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,3					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,6					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,1					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83 %					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12	30.884.000	12	31.000.000	39.458.000	12 bulan	31.000.000	Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			9.340.000		9.500.000	6.207.000		9.500.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					

			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1	9.340.000	1	9.500.000	6.207.000	1 kegiatan	9.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			125.310.000		130.000.000	192.863.000		130.000.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					

			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12	125.310.000	12	130.000.000	192.863.000	12 bulan	130.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			5.667.000		6.000.000	12.832.000		6.000.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1	5.667.000	1	6.000.000	12.832.000	1 kegiatan	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.560.000		6.000.000	8.875.000		6.000.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00 %					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	1	5.560.000	1	6.000.000	8.875.000	2 kegiatan	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			23.165.000		24.000.000	9.176.000		24.500.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				

			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12	23.165.000	12	24.000.000	9.176.000	12 bulan	24.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			13.210.000		14.000.000	13.751.000		14.000.000				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4			4					
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4	13.210.000	4	14.000.000	13.751.000	4 kegiatan	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			15.646.000		16.000.000	51.147.000		16.000.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90 %					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1	15.646.000	1	16.000.000	25.206.000	1 kegiatan	16.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi			2 kegiatan		8.196.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi			1 kegiatan		9.545.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
4	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya penyuluhan					8.200.000	100 orang	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.329.000		12.000.000	15.000.000		12.000.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1	11.329.000	1	12.000.000	15.000.000	1 kegiatan	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			7.254.000		7.500.000	10.069.000		7.500.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	15	7.254.000	15	7.500.000	10.069.000	1 kegiatan	7.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			6.243.000		6.500.000	7.034.000		6.500.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%			98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1	6.243.000	1	6.500.000	7.034.000	1 kegiatan	6.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.049.000		7.200.000	6.421.000		7.200.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1	7.049.000	1	7.200.000	6.421.000	1 kegiatan	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			20.273.000		22.000.000	28.000.000		22.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					

			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam PORKEL antar Kelurahan	1	20.273.000	1	22.000.000	28.000.000	1 kegiatan	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			15.376.000		16.200.000	23.783.000		18.200.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120	11.368.000	120	12.000.000	15.995.000	120 orang	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1	4.008.000	1	4.200.000	7.788.000	1 kegiatan	4.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			9.630.000		9.700.000	10.645.000		9.800.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					

			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	45	9.630.000	45	9.700.000	10.645.000	1 kegiatan	9.800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.2.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertemuan WPA dan pemeriksaan VCT			4 ok		0	4 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.061.000		5.300.000	0		5.300.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor	1	5.061.000	1	5.300.000	0	1 kegiatan	5.300.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			6.875.000		6.900.000	13.678.000		7.000.000				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%		64,71%			70,59 %					
1	1.2.28.12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1	6.875.000	1	6.900.000	13.678.000	1 kegiatan	7.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			22.003.000		22.300.000	17.905.000		22.500.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	15	22.003.000	15	22.300.000	17.905.000	4 kegiatan	22.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			14.215.000		14.500.000	12.632.000		14.500.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	10	14.215.000	10	14.500.000	12.632.000	4 kegiatan	14.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.270.000		5.500.000	7.015.000		5.500.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			100%					
1	1.2.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	35	5.270.000	35	5.500.000	7.015.000	50 orang	5.500.000	Masyarakat sehat	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			0		0	54.000.000		0				
1	1.3.34.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Pemeliharaan jalan RW. 1		0	1 kegiatan	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.3.34.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan RW. 4		0	1 kegiatan	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

3	1.3.34.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Pemeliharaan jalan RW. 5		0	1 kegiatan	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
4	1.3.34.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan RW. 9		0		0	29.000.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.34.49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Pemeliharaan saluran RW. 4		0		0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		
6	1.3.34.53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase RW. 8		0	1 kegiatan	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
7	1.3.34.55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase rw. 10		0	1 kegiatan	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrstruktur			1 kegiatan		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
9	1.3.34.44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terpeliharanya jalan RW. 14		0	1 kegiatan	0	0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
10	1.3.34.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terpeliharanya saluran air			1 kegiatan		0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
11	1.3.34.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya infrstruktur					0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
12	1.3.34.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD. 30		0		0	RT. 4 RW. VI	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

13	1.3.34.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya infrstruktur jalan			P 70M2		0		0	RT. 2, 4, 5, 6	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
14	1.3.34.52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD. 30		0		0	RT.04	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
15	1.3.34.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya infrstruktur					0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
16	1.3.34.45	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV	Terpeliharanya infrstruktur					25.000.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
17	1.3.34.61	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrstruktur					0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			0		0	15.000.000		0				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya tambahan makanan untuk balita dan lansia			8280 PMT		15.000.000	4 kegiatan	0	Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												

	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	9.965.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					

1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			12 bulan		9.965.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	10.717.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63 %					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum anak			1 kegiatan		10.717.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0		0	0		0				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%			75.00 %					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%			9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pertemuan FKDM			1 kegiatan		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	31.274.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											

			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)			12 bulan		31.274.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			0		0	0		0				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		42.50%			0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82			11,76					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%			100%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%			100%					
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%			100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%			23,53%					
			#NAME?	2		3			4					
			#NAME?	0		0			0					
			#NAME?	0		0			0					

			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada			ada					
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pelatihan					0	1 kegiatan	0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
			TOTAL		714.572.000		689.921.000	964.720.000		682.721.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : Kelurahan Magersari
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			149.239.000		149.239.000	179.597.000		149.239.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya ketersediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air	12	27.240.000	12 bulan	27.240.000	27.240.000	12 bulan	27.240.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya ketersediaan perizinan kendaraan dinas / operasional	1	3.150.000	1 mobil sampah, 7 kendaraan operasional roda 2	3.150.000	3.150.000	8 unit	3.150.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12	39.678.000	12 bulan	39.678.000	43.576.000	12 bulan	39.678.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	88	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12	12.000.000	12 bulan	12.000.000	9.641.000	12 bulan	12.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.756.000	12	5.756.000	4.041.000	12 bulan	5.756.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor		1.159.000	12 bulan	1.159.000	1.160.000	12 bulan	1.159.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	12	3.780.000	12	3.780.000	3.600.000	12 bulan	3.780.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terfasilitasi ketersediaan barang logistik kanton (BBM Potong Rumput ,Tabung Pemadam Kebakaran & Isi Ulang Gas Elpiji)	12	2.336.000	12	2.336.000	2.792.000	12 bulan	2.336.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai rapat dan tamu	12	24.140.000	12	24.140.000	12.962.000	12 bulan	24.140.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	79	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	30.000.000	5	30.000.000	27.216.000	5 kegiatan	30.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	84	ExBAU , Pokok Pikiran DPRD
11	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak					1.800.000	10 buah	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak / Honorer / Tidak Tetap			12 Bulan		42.419.000	12 bulan	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			80.705.000		26.505.000			26.505.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya 1 unit mushola Kelurahan Magersari					0	56 M2	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	50	Memperteg as Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Magersari	1060	60.000.000	1060	5.800.000	65.431.000	1060 M2	5.800.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	SDGs
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 7 unit (roda dua)	12	19.755.000	12	19.755.000	22.438.000	7 unit	19.755.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Telepon , Sound System , TV , LCD)	5	950.000	12 Bulan (4 Unit)	950.000	812.000	4 unit	950.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Pemeliharaan komputer,printer dan laptop)			12 Bulan (3 unit)		1.900.000	7 unit	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.728.000		4.728.000	5.564.000		4.728.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pendidikan anak usia dini	1	4.728.000	1	4.728.000	5.564.000	45 anak (1 kelompok)	4.728.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	79	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			36.232.000		21.796.000	5.765.000		21.796.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya pengetahuan linmas	12	36.232.000	12	21.796.000	5.765.000	40 orang , 1 keg	21.796.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			108.246.000		83.646.000	107.922.000		83.646.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselanggaranya pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12	96.016.000	12	71.416.000	94.739.000	12 bulan	71.416.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Tersedianya Pengelolaan Persampahan & Berkembangnya Kampung Organik di RW-RW	1	12.230.000	13 RW	12.230.000	13.183.000	13 RW	12.230.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			17.905.000		17.905.000	74.093.000		17.905.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik administrasi	12	17.905.000	12 Bulan (3 orang) / 2 orang pelayan publik dan 1 orang petugas IT	17.905.000	74.093.000	12 bulan	17.905.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			7.671.000		7.671.000	19.127.000		7.671.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung tertib adminstrasi kependudukan bagi masyarakat	88	7.671.000	12 Bulan (13 RW dan 75 RT di Kelurahan Magersari)	7.671.000	9.340.000	88 Orang : 75 Ketua RT & 13 Ketua RW	7.671.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan Rt / Rw			75 ketua rt , 13 ketua rw		9.787.000	13 ketua RW , 75 ketua RT	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	44	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			18.000.000		18.000.000	22.571.000		18.000.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan Masyarakat	12	18.000.000	12 Bulan (2 orang)	18.000.000	22.571.000	12 bulan , 2 orang	18.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	1.799.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya Data / Informasi Profile Kelurahan Magersari		0	1 buku	0	1.799.000	1 dokumen	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	94	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4.358.000		4.358.000	6.657.000		4.358.000				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					
1	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan tentang WPA	40	4.358.000	50	4.358.000	6.657.000	50 orang	4.358.000	kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			159.136.000		159.136.000	231.062.000		159.136.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIOR ITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya koordinasi Stabilitas Kantrantibmas	12	159.136.000	12	159.136.000	231.062.000	12 bulan	159.136.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.479.000		7.479.000	6.300.000		7.479.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba k3	1	7.479.000	1	7.479.000	6.300.000	1 kegiatan	7.479.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			10.444.000		10.444.000	5.138.000		10.444.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	30	10.444.000	30	10.444.000	5.138.000	30 orang	10.444.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			13.271.000		13.271.000	2.362.000		13.271.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dan penataan arsip daerah di Kelurahan Magersari	12	13.271.000	12	13.271.000	2.362.000	12 bulan	13.271.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	44	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.378.000		18.378.000	27.434.000		18.378.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya malam tirakatan dan HUT Kota Magelang	2	18.378.000	2	18.378.000	20.780.000	2 keg	18.378.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memp ertega s Skenar io Kemitr aan
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatan toleransi dan kerukunan beragama			1 Kegiatan		6.654.000	120 orang	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memp ertega s Skenar io Kemitr aan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.270.000		11.270.000			11.270.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terbinanya grup kesenian			4 kesenian		17.946.000	4 kelompok	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak, Memperteguh Skenario Kemitraan
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya	1	11.270.000	1	11.270.000	14.340.000	1 kegiatan	11.270.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	80	Memperteguh Skenario Kemitraan
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			15.010.000		15.010.000	23.693.000		15.010.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung palaksanaan BBGRM	2	15.010.000	2	15.010.000	23.693.000	2 kegiatan	15.010.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Memperteguh Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			18.950.000		18.950.000	10.757.000		18.950.000				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%			98%					
1	1.2.19.6	Kader piket bersama dawis	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	13	18.950.000	12 bulan	18.950.000	10.757.000	13 RW	18.950.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak, Memperteg as Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			14.935.000		14.935.000	21.310.000		14.935.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan terlakasananya pengiriman Atlet Porkel Kelurahan Magersari sehingga terwujudnya kesehatan jasmani masyarakat	4	14.935.000	4	14.935.000	21.310.000	7 cabor	14.935.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	44	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.972.000		16.972.000	21.079.000		16.972.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Magersari	130	11.422.000	130	11.422.000	15.978.000	145 orang	11.422.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	95	Rencana, Akomodasi Musrenbang
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan (Jumlah Lokasi Survey di 13 RW Kelurahan Magersari)	13	5.550.000	13 RW	5.550.000	5.101.000	13 RW	5.550.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	95	Rencana, Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			15.400.000		15.400.000	14.440.000		15.400.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau & Taman Lingkungan	3	15.400.000	5	15.400.000	14.440.000	5 lokasi	15.400.000	Taman RW dan Halaman Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	50	Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.060.000		5.060.000	5.766.000		5.060.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	40	5.060.000	40	5.060.000	5.766.000	40 kader	5.060.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	50	Kota Layak Anak, Memperteguh Skenario Kemitraan
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			4.710.000		4.710.000	5.666.000		4.710.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tefasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	40	4.710.000	40	4.710.000	5.666.000	1 posyandu lansia	4.710.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Memperteg as Skenario Kemitraan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			0		0	35.000.000		0				
1	1.3.35.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Kelurahan Magersari					35.000.000	13 RW	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	89	Memperteg as Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	5.897.000		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIOR ITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaa n		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaa n					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaa n		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaa n					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi			2 Kegiatan		5.897.000	25 orang	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	11.089.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbentuknya Forum Anak Kelurahan Magersari			25 anak		3.240.000	25 anak	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak
2	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya KIM di Kelurahan Magersari			25 orang , 2 kegiatan		7.849.000	2 keg	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	4.935.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	30 kader			1 Kegiatan		4.935.000	40 orang , 1 keg	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	23.074.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,52941177			59%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasi Pelayanan Masyarakat melalui kegiatan untk mendukung peningkatan peran perempuan di kelurahan			12 Kegiatan		23.074.000	45 orang	0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
			TOTAL		738.099.000		644.863.000	1.000.964.000		644.863.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Jurangombo Selatan

URUSAN : Kelurahan Jurangombo Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			173.191.000		190.512.000	164.106.000		209.567.000				
Rp 1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	40.920.000	12 bulan	45.012.000	29.520.000	12 bulan	49.514.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan operasional dinas	10	2.636.000	9 unit	2.900.000	2.678.000	9 unit	3.190.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	39.815.000	12 bulan	43.797.000	46.570.000	12 bulan	48.177.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	17.626.000	12 bulan	19.389.000	10.142.000	12 bulan	21.328.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.000.000	12 bulan	5.500.000	5.000.000	12 bulan	6.050.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	1.339.000	12 bulan	1.473.000	1.982.000	12 bulan	1.621.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.686.000	12 bulan	5.155.000	4.140.000	12 bulan	5.671.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam dan bbm genset	12	719.000	12 bulan	791.000	2.180.000	12 bulan	871.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rp 9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12	27.450.000	12 bulan	30.195.000	12.955.000	12 bulan	33.215.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 54	ExBAU
Rp 10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	3 kegiatan	36.300.000	24.829.000	1 tahun	39.930.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 54	ExBAU
Rp 11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Penjaga Malam			12 bulan		21.210.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Selatam	Dana Alokasi Umum	Rp 39	ExBAU
Rp 12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					2.900.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 39	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			238.900.000		61.125.000	59.088.000		161.838.000				
Rp 1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	200	53.345.000	1.000 m2	22.014.000	25.941.000	1112 m2	24.216.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 59	ExBAU
Rp 2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7	20.580.000	7 unit	22.638.000	23.716.000	7 unit	24.902.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 59	ExBAU
Rp 3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	15	9.975.000	6 unit	10.973.000	4.757.000	6 unit	12.070.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 64	ExBAU
Rp 4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	200	150.000.000	100 m2	0	0	146 m2	94.600.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 34	ExBAU
Rp 5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100	5.000.000	4 unit	5.500.000	4.674.000	5 unit	6.050.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 59	ExBAU
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.406.000		5.950.000	6.796.000		6.545.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rp 1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	5.406.000	3 PAUD	5.950.000	6.796.000	2 PAUD	6.545.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			9.174.000		10.092.000	11.760.000		11.102.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		Rp 6			Rp 8					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		Rp 13			Rp 15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		Rp 77			Rp 77					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		Rp 15			Rp 18					
Rp 1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	45	9.174.000	45 orang	10.092.000	11.760.000	45 orang	11.102.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 49	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			72.600.000		79.860.000	92.986.000		87.846.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		Rp 5			Rp 6					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
Rp 1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12	72.600.000	1 tahun	79.860.000	87.911.000	12 bulan	87.846.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
Rp 2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja kampung organik			2 Kampung Organik		5.075.000	2 kampung organik	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 84	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			30.906.000		33.997.000	81.728.000		37.397.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		Rp 940			Rp 945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
Rp 1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	30.906.000	12 bulan	33.997.000	81.728.000	12 bulan	37.397.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 90	Program prioritas RPJM
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			42.477.000		46.475.000	16.176.000		51.398.000				
Rp 1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	57	42.477.000	57 orang	46.475.000	16.176.000	57 orang	51.398.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 88	Rencana, Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			23.320.000		25.652.000	26.098.000		28.218.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		Rp 9			Rp 12					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		Rp 6			Rp 8					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		Rp 57			Rp 62					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		Rp 24			Rp 26					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
Rp 1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12	23.320.000	12 bulan	25.652.000	26.098.000	12 bulan	28.218.000	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 99	Kota Layak Anak
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.150.000		3.465.000	3.778.000		3.812.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rp 1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	3.150.000	1 dokumen	3.465.000	3.778.000	1 dokumen	3.812.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			94.352.000		103.788.000	139.628.000		114.667.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		Rp -			Rp -					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		Rp -			Rp -					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		Rp 4			Rp 5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		Rp 1			Rp 1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
Rp 1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	94.352.000	12 bulan	103.788.000	139.628.000	12 bulan	114.667.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 96	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.083.000		6.692.000	6.467.000		7.362.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		Rp 1			Rp 1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
Rp 1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	90	6.083.000	45 orang	6.692.000	6.467.000	50 orang	7.362.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 100	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			24.293.000		26.723.000	5.293.000		29.396.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
Rp 1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12	24.293.000	12 bulan	26.723.000	5.293.000	12 bulan	29.396.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 59	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			17.908.000		19.700.000	31.420.000		21.670.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
Rp 1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	3	17.908.000	3 kegiatan	19.700.000	22.580.000	3 kegiatan	21.670.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 96	Rencana
Rp 2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			1 kegiatan		8.840.000	150 orang	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 45	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			10.000.000		11.000.000	13.010.000		12.100.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		Rp 13			Rp 14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
Rp 1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	10.000.000	1 kegiatan	11.000.000	13.010.000	1 kegiatan	12.100.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 96	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			18.662.000		20.529.000	22.367.000		22.582.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		Rp 100			Rp 100					
Rp 1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9	18.662.000	3 kegiatan	20.529.000	22.367.000	2 kegiatan	22.582.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 89	SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			12.657.000		13.923.000	34.767.000		15.316.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		Rp 6			Rp 7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		Rp 5			Rp 4					
			#NAME?	15		Rp 13			Rp 11					
			#NAME?	20		Rp 19			Rp 17					
			#NAME?	NA		Rp 2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		Rp 183			Rp 183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		Rp 35			Rp 36					
Rp 1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	12.657.000	5 cabang olahraga dan senam	13.923.000	34.767.000	6 cabang olahraga (1 senam dan 5 porkel)	15.316.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 90	Akomodasi Musrenbang
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.979.000		18.677.000	21.537.000		20.545.000				
Rp 1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	165	12.491.000	1 jenis dokumen	13.740.000	16.336.000	1 dokumen	15.114.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 95	Program prioritas RPJM
Rp 2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	9	4.488.000	9 lokasi	4.937.000	5.201.000	9 lokasi	5.431.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 95	Program prioritas RPJM
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			5.500.000		6.050.000	5.951.000		6.655.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		Rp 100			Rp 100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		Rp 100			Rp 100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		Rp 90			Rp 90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
Rp 1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	2	5.500.000	1 kegiatan	6.050.000	5.951.000	1 kegiatan	6.655.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 94	Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			25.000.000		27.500.000	13.680.000		30.250.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
Rp 1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	25.000.000	12 bulan	27.500.000	13.680.000	12 bulan	30.250.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 91	Memperkuat Implementasi MKSB
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			36.750.000		40.425.000	90.913.000		44.468.000				
Rp 1	1.3.37.29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Panjang saluran drainase yang dipelihara					65.967.000	275 m	0	RW II Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 105	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Rp 2	1.3.37.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur perubahan	9	36.750.000	1 kegiatan	40.425.000	24.946.000	1 kegiatan	44.468.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 95	Akomodasi Musrenbang
Rp 3	1.3.37.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Panjang jalan yang dipelihara					0	224,5 m2	0	RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 105	Akomodasi Musrenbang
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	6.162.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
Rp 1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan			20 Anak		6.162.000	20 anak	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 91	Kota Layak Anak, SDGs
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	9.573.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		Rp 3			Rp 3					
			Jumlah KIM	17		Rp 17			Rp 17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		Rp 7			Rp 7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
Rp 1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya Pertemuan Kelompom KIM Tingkat Kelurahan			2 kegiatan		9.573.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 101	Akomodasi Musrenbang
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	18.012.000		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		Rp 4			Rp 4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		Rp 13			Rp 15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		Rp 1			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		Rp 143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
Rp 1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kesejahteraan masyarakat			12 bulan		18.012.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 74	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			0		0	6.146.000		0				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					
Rp 1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pembinaan organisasi SKD			12 bulan		6.146.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 50	SDGs
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0	6.337.000		0				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
Rp 1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba K3 Tingkat Kelurahan			1 kegiatan		6.337.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Akomodasi Musrenbang
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			0		0	15.960.000		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		Rp 100			Rp 100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		Rp 100			Rp 100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			<0.31					
Rp 1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yaang menerima makanan tambahan			390 balita dan 200 lansia		15.960.000	390 balita dan 200 lansia	0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	Rp 75	Kota Layak Anak, SDGs
			TOTAL		867.308.000		752.135.000	909.739.000		922.734.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Tidar Utara
URUSAN : Kelurahan Tidar Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			138.748.000		145.653.000	181.796.000		152.961.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	16.695.000	12 bulan	17.500.000	23.400.000	12 bulan	18.400.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/ operasional	10	3.108.000	10 unit	3.263.000	2.717.000	10 unit	3.426.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	38.354.000	12 bulan	40.272.000	46.632.000	12 bulan	42.285.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	13.650.000	12 bulan	14.330.000	10.138.000	12 bulan	15.050.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	6.432.000	12 bulan	6.753.000	5.410.000	12 bulan	7.091.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12	3.360.000	12 bulan	3.528.000	3.154.000	12 bulan	3.704.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	3.780.000	12 bulan	3.970.000	4.140.000	12 bulan	4.167.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, BBM genset dan tabung pemadam kebakaran	12	1.575.000	12 bulan	1.653.000	1.908.000	12 bulan	1.736.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12	20.294.000	12 bulan	21.309.000	12.948.000	12 bulan	22.374.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	1	31.500.000	12 bulan	33.075.000	27.130.000	1 tahun	34.728.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor			12 bulan		42.419.000	12 bulan	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak			6 buah		1.800.000	6 buah	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			66.939.000		70.286.000	56.639.000		73.800.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana televisi untuk ruang pelayanan masyarakat					0	Rp -	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer dan printer untuk kelancaran administrasi kantor					0	Rp -	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620	29.136.000	620 m2	30.593.000	15.659.000	620 m2	32.122.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
4	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	27.529.000	9 unit	28.906.000	30.973.000	9 unit	30.351.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	18	10.274.000	8 unit	10.787.000	4.037.000	8 unit	11.327.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			4 unit		5.970.000	4 unit	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya halaman depan kantor Kelurahan					0	Rp -	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	49	Akomodasi Musrenbang
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.717.000		8.103.000	7.888.000		8.508.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	7.717.000	3 PAUD	8.103.000	7.888.000	3 Pos PAUD	8.508.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	7.935.000		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		Rp 6			Rp 8					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		Rp 13			Rp 15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		Rp 77			Rp 77					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		Rp 15			Rp 18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan			65 orang		7.935.000	65 orang	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			20.477.000		21.500.000	47.506.000		22.576.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		Rp 5			Rp 6					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik			2 kampung organik		16.081.000	2 kampung organik	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	84	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah	12	20.477.000	1 tahun	21.500.000	31.425.000	12 bulan	22.576.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			14.910.000		15.655.000	74.969.000		16.438.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		Rp 940			Rp 945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	14.910.000	12 bulan	15.655.000	74.969.000	12 bulan	16.438.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.077.000		10.581.000	16.710.000		11.110.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200	10.077.000	198 orang	10.581.000	8.730.000	150 orang	11.110.000	Kel Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya pertemuan lembaga organisasi masyarakat tk. Kelurahan					7.980.000	30 orang	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			9.660.000		10.143.000	1.831.000		10.650.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		Rp 9			Rp 12					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		Rp 6			Rp 8					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		Rp 57			Rp 62					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		Rp 24			Rp 26					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12	9.660.000	12 bulan	10.143.000	1.831.000	12 bulan	10.650.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			19.456.000		20.429.000	20.253.000		21.450.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1	19.456.000	1 dokumen	20.429.000	20.253.000	1 dokumen	21.450.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			106.392.000		111.711.000	163.380.000		117.297.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		Rp -			Rp -					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		Rp -			Rp -					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		Rp 4			Rp 5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		Rp 1			Rp 1					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	106.392.000	12 bulan	111.711.000	163.380.000	12 bulan	117.297.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.924.000		5.170.000	7.640.000		5.429.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		Rp 1			Rp 1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47	4.924.000	47 orang	5.170.000	7.640.000	47 orang	5.429.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.060.000		18.962.000	37.795.000		19.910.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	125	9.975.000	1 kegiatan	10.473.000	10.435.000	185 orang	10.997.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	120	8.085.000	2 kegiatan	8.489.000	27.360.000	2 kegiatan	8.913.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.923.000		16.719.000	17.850.000		17.555.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		Rp 13			Rp 14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	2	15.923.000	1 kegiatan	16.719.000	17.850.000	1 kegiatan	17.555.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			12.327.000		12.943.000	14.283.000		13.590.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		Rp 100			Rp 100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13	12.327.000	13 RW	12.943.000	14.283.000	13 RW	13.590.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	SDGs, Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			44.194.000		46.404.000	44.070.000		48.724.000				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		Rp 100			Rp 100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		Rp 100			Rp 100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			<0.31					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yang menerima makanan tambahan	1210	44.194.000	720 balita dan 550 lansia	46.404.000	44.070.000	720 balita dan 550 lansia	48.724.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak, SDGs
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			14.893.000		15.637.000	32.526.000		16.419.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		Rp 6			Rp 7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		Rp 5			Rp 4					
			#NAME?	15		Rp 13			Rp 11					
			#NAME?	20		Rp 19			Rp 17					
			#NAME?	NA		Rp 2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		Rp 183			Rp 183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		Rp 35			Rp 36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEL dan senam lansia	1	14.893.000	5 cabang olahraga dan lansia	15.637.000	32.526.000	5 cabang olahraga dan 50 orang lansia	16.419.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			17.976.000		18.874.000	25.268.000		19.817.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	140	11.235.000	1 jenis dokumen	11.796.000	20.200.000	150 orang	12.386.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13	6.741.000	13 lokasi	7.078.000	5.068.000	13 RW	7.431.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.443.000		4.665.000	6.389.000		4.899.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		Rp 100			Rp 100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		Rp 100			Rp 100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		Rp 90			Rp 90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	45	4.443.000	1 kegiatan	4.665.000	6.389.000	50 orang	4.899.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			3.675.000		3.858.000	4.240.000		4.051.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	3.675.000	1 kegiatan	3.858.000	4.240.000	1 kegiatan	4.051.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			220.000.000		95.000.000	331.436.000		0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.3.38.52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	Terpeliharanya saluran drainase RW XIII					0	Rp -	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Panjang jalan yang terpelihara			92 meter		62.590.000	143 meter	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Panjang drainase yang terpelihara		0	24 meter	0	20.080.000	39 meter	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	panjang saluran yang terpelihara	200	80.000.000	148 meter	75.000.000	38.900.000	77 meter	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.38.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	250	90.000.000	200 meter	0	105.106.000	213 meter	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.38.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	panjang saluran yang terpelihara	75	50.000.000	40 meter	20.000.000	74.760.000	270 meter	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur di Kelurahan Tidar Utara			13 RW		30.000.000	13 RW	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	86	Akomodasi Musrenbang
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			22.320.000		23.436.000	4.980.000		24.608.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12	22.320.000	12 bulan	23.436.000	4.980.000	12 bulan	24.608.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	7.708.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan			2 kegiatan		7.708.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak, SDGs
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	10.213.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		Rp 3			Rp 3					
			Jumlah KIM	17		Rp 17			Rp 17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		Rp 7			Rp 7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan		10.213.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	23.519.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		Rp 4			Rp 4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		Rp 13			Rp 15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		Rp 1			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		Rp 143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan masyarakat			12 bulan		23.519.000	12 bulan	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0	8.464.000		0				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3 tk. Kelurahan			1 kegiatan		8.464.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0		0	0		0				
					2,558,688,000		4,359,618,000			6,135,402,000				
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		Rp 5			Rp 5					
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%		77%			83%					
1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi lapangan sepak bola di lingkungan Kelurahan Tidar Utara					0	Rp -	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			0		0	6.559.000		0				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat					6.559.000	35 orang	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	55	Penanggulangan Kemiskinan
			TOTAL		773.111.000		675.729.000	1.161.847.000		609.792.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Jurangombo Utara
URUSAN : Kelurahan Jurangombo Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			120.874.600		132.961.860	136.245.000		146.257.546				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianyan jasa keamanan kantor kelurahan			1 orang		21.210.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	12	23.232.000	12 bulan	25.555.000	18.000.000	12 bulan	28.110.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	9	1.925.000	9 Kendaraan	2.117.500	2.663.000	9 unit	2.329.250	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	20.279.600	12 bulan	22.307.560	24.094.000	12 bulan	24.538.316	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	8.800.000	12 bulan	9.680.000	8.500.000	12 bulan	10.648.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12	6.600.000	12 bulan	7.260.000	5.400.000	12 bulan	7.986.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan kantor	12	1.650.000	12 bulan	1.815.000	1.844.000	12 bulan	1.996.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12	4.422.000	12 bulan	4.864.200	4.140.000	12 bulan	5.350.620	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12	20.966.000	12 bulan	23.062.600	23.394.000	12 bulan	25.368.860	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	3 kegiatan	36.300.000	25.200.000	1 tahun	39.930.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan BBM Genset			12 bulan		0	12 bulan	0	kelurahan jurangombo utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanaya penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor					1.800.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	30	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			192.736.500		212.010.500	34.322.000		233.211.350				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan Jurangombo Utara			12 bulan		0	188 m2	0	Kantor Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
2	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor	8	37.345.000	Rp 8	41.079.500	0	Rp 8	45.187.450	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	44	
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7	21.301.500	7 unit	23.432.000	23.100.000	7 unit	25.775.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12	3.520.000	3 Jenis	3.872.000	5.742.000	3 jenis	4.259.200	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan informasi	11	6.270.000	Rp 11	6.897.000	0	Rp 11	7.586.700	Pos Paud Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	40	
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			2 Jenis		5.480.000	3 jenis	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	38.500.000	Rp 1	42.350.000	0	Rp 1	46.585.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	74	
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tresedianya peralatan gedung kantor	1	8.800.000	Rp 1	9.680.000	0	3 unit	10.648.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kebutuhan kantor	1	22.000.000	Rp 1	24.200.000	0	1 unit	26.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	1	55.000.000	Rp 1	60.500.000	0	Rp 1	66.550.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.248.200		4.673.020	5.700.000		5.140.322				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	4.248.200	3 Pos PAUD	4.673.020	5.700.000	3 pos PAUD	5.140.322	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			24.622.400		27.084.640	10.220.000		29.793.104				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		Rp 6			Rp 8					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,7		Rp 13			Rp 15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,3		Rp 77			Rp 77					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		Rp 15			Rp 18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	2	24.622.400	20 orang	27.084.640	10.220.000	4 kegiatan	29.793.104	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			62.612.000		68.873.200	104.346.000		75.760.520				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		Rp 5			Rp 6					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan, kinerja bank sampah dan kampung organik					16.670.000	3 Kampung organik	0	Kelurahan Jurangombo UTara	Dana Alokasi Umum	74	Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12	62.612.000	1 tahun	68.873.200	87.676.000	12 bulan	75.760.520	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			25.042.600		27.546.860	72.400.000		30.301.546				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100 %		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100 %		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 %		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		Rp 940			Rp 945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100 %		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	25.042.600	12 bulan	27.546.860	72.400.000	12 bulan	30.301.546	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			7.595.500		8.355.050	10.350.000		9.190.555				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	1	7.595.500	45 orang	8.355.050	10.350.000	1 kegiatan	9.190.555	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW se Kelurahan Jurangombo Utara			1 Kegiatan		0		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	40	SDGs, Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			10.450.000		11.495.000	21.100.000		12.644.500				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		Rp 9			Rp 12					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		Rp 6			Rp 8					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,1		Rp 57			Rp 62					
			Presentase perpustakaan aktif	21,3		Rp 24			Rp 26					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12	10.450.000	12 bulan	11.495.000	21.100.000	12 bulan	12.644.500	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	99	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			2.750.000		3.025.000	3.764.000		3.327.500				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	2.750.000	1 dokumen	3.025.000	3.764.000	1 dokumen	3.327.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			76.934.000		84.628.000	118.700.000		93.091.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		Rp -			Rp -					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		Rp -			Rp -					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		Rp 4			Rp 5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47 %		1.81%			2.15%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		Rp 1			Rp 1					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2	76.934.000	2 kegiatan	84.628.000	118.700.000	12 bulan	93.091.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.171.000		6.788.000	9.530.000		7.470.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	1	6.171.000	1 kegiatan	6.788.000	9.530.000	1 kegiatan	7.470.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.059.000		4.465.000	4.860.000		4.911.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		Rp 1			Rp 1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40 %		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	30	4.059.000	35 Orang	4.465.000	4.860.000	35 orang	4.911.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			25.300.000		27.830.000	3.512.000		30.615.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12	25.300.000	12 bulan	27.830.000	3.512.000	12 bulan	30.615.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	59	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			10.428.000		11.470.000	20.715.000		12.620.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2 %		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.0 0%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,1 9%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	2	10.428.000	2 Kegiatan	11.470.000	13.715.000	2 kegiatan	12.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			1 Kegiatan		7.000.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			11.434.500		12.578.000	15.150.000		13.835.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,3 2		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		Rp 13			Rp 14					
			Cakupan gelar seni 75%	100 %		100%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	11.434.500	1 Kegiatan	12.578.000	15.150.000	1 kegiatan	13.835.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			9.504.000		10.455.000	10.200.000		11.500.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		Rp 100			Rp 100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	9.504.000	1 kegiatan	10.455.000	10.200.000	1 kegiatan	11.500.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	89	SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			12.716.000		13.987.000	0		15.386.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK	2	12.716.000	2 kegiatan	13.987.000	0	Rp 2	15.386.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			13.277.000		14.605.000	20.040.000		16.065.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		Rp 6			Rp 7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		Rp 5			Rp 4					
			#NAME?	15		Rp 13			Rp 11					
			#NAME?	20		Rp 19			Rp 17					
			#NAME?	NA		Rp 2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		Rp 183			Rp 183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		Rp 35			Rp 36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	13.277.000	1 kegiatan	14.605.000	20.040.000	1 kegiatan	16.065.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			21.208.000		23.329.000	33.441.000		25.662.000				
					2,558,688,000		4,359,618,000			6,135,402,000				
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		Rp 5			Rp 5					
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%		77%			83%					
1	2.13.21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12	21.208.000	12 bulan	23.329.000	33.441.000	12 bulan	25.662.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			13.037.000		14.340.000	17.170.000		15.775.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan tahunan	1	9.526.000	1 jenis dokumen	10.478.000	12.200.000	1 Kegiatan	11.526.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	4	3.511.000	8 lokasi	3.862.000	4.970.000	8 RW	4.249.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			4.026.000		4.428.000	8.210.000		4.872.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu balita	6	4.026.000	6 posyandu balita	4.428.000	8.210.000	6 posyandu Balita	4.872.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	88	Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.148.000		5.663.000	11.000.000		6.230.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia	4	5.148.000	4 posyandu Lansia	5.663.000	11.000.000	4 posyandu Lansia	6.230.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			158.321.900		174.154.000	77.200.000		191.570.500				
1	1.3.36.29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tersedianya saluran yang memadai			51,5 m2		0	28.5 m2	0	RT. 06 RW. 05 Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.36.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Tersedianya penutup saluran yang memadai	1	24.891.900	Rp 1	27.381.000	12.500.000	37.5 m2	30.120.000	RT 06 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.36.27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Tersedianya saluran MD dan tutup saluran	1	39.050.000	Rp 1	42.955.000	0	Rp 1	47.250.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.36.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya infrastruktur kelurahan	12	38.500.000	1 tahun	42.350.000	33.200.000	12 bulan	46.585.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	74	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	1.3.36.36	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksananya pemeliharaan jalan	1	22.000.000	Rp 1	24.200.000	0	Rp 1	26.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
6	1.3.36.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pavingisasi dan jalan beton	1	17.380.000	Rp 1	19.118.000	0	Rp 1	21.030.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
7	1.3.36.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya tutup saluran	1	16.500.000	Rp 1	18.150.000	0	Rp 1	19.965.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
8	1.3.36.21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai			58,2 m2		17.000.000	80 m2	0	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.3.36.20	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya saluran yang memadai			50 m2		0		0	RW. I Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.3.36.22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Tersedianya jalan yang memadai			44,2 m2		0		0	RW. VI Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
11	1.3.36.18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Perbaikan Jalan Rabat Beton					14.500.000	205.5 m2	0	RT 06 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.3.36.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Peningkatan Jalan Rabat dan paving RW 08					0	117.5 m2 dan 125 m 2	0	RT 04 dan 05 RW 08 Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	9.500.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		Rp 3			Rp 3					
			Jumlah KIM	17		Rp 17			Rp 17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		Rp 7			Rp 7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan		9.500.000	2 Kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	101	Akomodasi Musrenbang
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		0	3.908.000		0				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Revitalisasi lapangan depan SMPN 7 Kota Magelang			Rp 1		0		0	Lapangan depan SMPN 7 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH			12 bulan		3.908.000	12 bulan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	6.900.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		Rp 100			Rp 100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		Rp 100			Rp 100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		Rp 90			Rp 90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5 %		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100 %		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA			1 Kegiatan		6.900.000	40 orang	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	9.720.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan			30 anak		9.720.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak, SDGs
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	33.515.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		Rp 4			Rp 4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		Rp 13			Rp 15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		Rp 1			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		Rp 143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100 %			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK			2 kegiatan		33.515.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	84	SDGs
			TOTAL		822.496.200		904.745.130	811.718.000		995.229.443				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Tidar Selatan
URUSAN : Kelurahan Tidar Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			169.358.000		176.822.000	145.313.000		183.322.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.000.000	12	25.500.000	23.480.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	8	2.500.000	7 kendaraan roda dua, 1 mobil sampah	3.500.000	2.321.000	10	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12	24.036.000	12 bulan	25.000.000	22.284.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12	15.000.000	12 bulan	16.000.000	6.747.000	12	17.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	5.000.000	12	5.500.000	6.750.000	12	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	2.000.000	12 bulan	2.250.000	2.500.000	12	2.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	4.200.000	12	4.400.000	4.140.000	12	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12	750.000	12	800.000	2.426.000	12	850.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	21.000.000	12 bulan	22.000.000	28.255.000	12	23.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	35.000.000	2	37.000.000	25.200.000	12	39.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	2	34.872.000	12 bulan	34.872.000	21.210.000	2	34.872.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			131.200.000		25.000.000	33.642.000		25.600.000				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	8	17.500.000	7 kenda raan roda dua, 1 mobil samp ah	18.000.000	13.867.000	10	18.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	1.200.000	4	1.500.000	5.000.000	4	1.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.000.000	4	5.500.000	5.525.000	4	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			6 unit		0	6 unit	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1	100.000.000	2	0	9.250.000	12 bulan	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na

6	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	13	7.500.000	1	0	0	4 kegiatan	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.500.000		7.000.000	4.128.000		7.500.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2	6.500.000	2	7.000.000	4.128.000	2	7.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			7.000.000		7.300.000	5.500.000		7.600.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,7		13,3			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,3		77,3			77,3					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12 %			20.55 %					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					

1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	75	7.000.000	70	7.300.000	5.500.000	75	7.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			37.312.000		38.100.000	59.710.000		39.000.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12	29.000.000	12 bulan	29.500.000	45.971.000	12	30.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1	8.312.000	1	8.600.000	13.739.000	1	9.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.000.000		15.500.000	102.028.000		16.000.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					

1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12	15.000.000	12	15.500.000	102.028.000	12	16.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			11.900.000		12.400.000	12.615.000		12.900.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,3					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,1		56,9			61,6					
			Presentase perpustakaan aktif	21,3		23,7			26,1					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67 %			20.83 %					
1	2.17.15.3 3	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12	11.900.000	12	12.400.000	12.615.000	12	12.900.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			4.000.000		4.300.000	2.762.000		4.600.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1	4.000.000	1	4.300.000	2.762.000	1	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			90.000.000		90.000.000	139.824.000		90.000.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				

			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	90.000.000	12	90.000.000	139.824.000	12	90.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.700.000		6.900.000	11.585.000		7.200.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00 %			97.00 %					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					

1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40	6.700.000	40	6.900.000	11.585.000	40	7.200.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			21.258.000		21.258.000	7.360.000		21.258.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12	21.258.000	12	21.258.000	7.360.000	12	21.258.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			24.400.000		25.100.000	34.478.000		25.800.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00 %		73.00 %			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19 %		42,59 %			49,90 %					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1	8.840.000	1	9.200.000	9.770.000	1	9.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na

2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2	15.560.000	2	15.900.000	24.708.000	2	16.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			13.500.000		14.000.000	18.005.000		14.500.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2	13.500.000	2	14.000.000	18.005.000	2	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.000.000		10.500.000	10.570.000		11.000.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12	10.000.000	12	10.500.000	10.570.000	12	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			25.000.000		25.500.000	0		26.000.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00 %			79,50 %					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya peran serta perempuan dalam pembangunan	12	25.000.000	12	25.500.000	0	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

	1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			12.840.000		13.000.000	33.000.000		13.300.000				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100			100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100			100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31			<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24	12.840.000	24	13.000.000	33.000.000	24	13.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			13.500.000		14.000.000	25.004.000		14.500.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemasyarakatan olahraga	1	13.500.000	1	14.000.000	25.004.000	1	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			12.880.000		13.500.000	16.310.000		14.500.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	10.500.000	100	10.500.000	13.180.000	100	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12	2.380.000	12 RW	3.000.000	3.130.000	12	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na

	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.933.000		6.500.000	0		6.700.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terciptanya ruang terbuka hijau	1	5.933.000	1	6.500.000	0	1	6.700.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			176.090.000		40.000.000	161.310.000		40.000.000				
1	1.3.39.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya infrastruktur perdesaan	12	35.000.000	12 bulan	40.000.000	35.000.000	12	40.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
2	1.3.39.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpenuhinya pemeliharaan saluran RW. V			96 m		46.310.000	96	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
3	1.3.39.45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpenuhinya pemeliharaan saluran RW. IX	187	141.090.000	26 m	0	0	26	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
4	1.3.39.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpenuhinya pemeliharaan jalan paving RW. VI			66 m		35.000.000	66	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
5	1.3.39.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran			70 m		45.000.000	70	0	RW. II Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.000.000		7.500.000	10.409.000		8.000.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					

			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1	7.000.000	1	7.500.000	10.409.000	1	8.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			164.995.000		0	54.000.000		0				
1	1.3.30.19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. I dan RW. III	42 dan 60	164.995.000	131,4 m	0	54.000.000	131,4	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			0		0	6.515.000		0				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW			62		6.515.000	62	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Renca na
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	7.663.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					

			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya KIM di Kelurahan Tidar Selatan			2 kegiatan		7.663.000	2	0	Kelurahan Tidar selatan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	29.213.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12 %			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,53			59%					
			Tingkat provinsi	perin gkat 1		perin gkat 1			perin gkat 1					
			Tingkat nasional	perin gkat 1		perin gkat 1			perin gkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.0 0%		100.0 0%			100.0 0%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin			60 orang		29.213.000	12	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	8.553.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00 %			52.63 %					

1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan			30 anak		8.553.000	2	0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
			TOTAL		966.366.000		574.180.000	939.497.000		589.280.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Magelang Utara
URUSAN : Kecamatan Magelang Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			820.738.000		874.030.000	888.934.000		961.490.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	45.000.000	4 item	49.500.000	48.000.000	4 item	54.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	10	6.500.000	9 unit	7.150.000	11.000.000	11 unit	7.870.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12	350.671.000	12 bulan	385.740.000	413.387.000	12 bulan	424.320.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	60.500.000	453 m2	66.550.000	72.100.000	453 m2	73.210.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65	28.861.000	64 item	31.750.000	16.228.000	64 item	34.930.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	9.000.000	5 jenis	9.900.000	8.468.000	5 jenis	10.890.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	5.288.000	14 jenis	5.820.000	4.388.000	8 jenis	6.410.000	Kecamatan Magelang utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28	26.200.000	4 item	0	4.160.000	4 item	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2.220.000	2 jenis	2.450.000	4.200.000	2 jenis	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2	2.004.000	2 jenis	2.210.000	2.709.000	2 jenis	2.440.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3	27.870.000	35 orang	30.660.000	23.620.000	27 orang	33.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1	82.346.000	8 kegiatan	90.590.000	70.056.000	12 kegiatan	99.650.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.436.000	1 orang	19.180.000	21.540.000	1 orang	21.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12	156.842.000	12 bulan	172.530.000	189.078.000	12 bulan	189.790.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			350.309.000		154.380.000	226.198.000		166.340.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90	12.000.000	90 m2	13.200.000	20.000.000	90 m2	14.520.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453	30.707.000	453 m2	33.780.000	55.000.000	453 m2	37.160.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	10	50.402.000	10 unit	55.450.000	54.098.000	10 unit	61.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5	3.570.000	8 jenis	3.930.000	3.580.000	6 jenis	4.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8	11.830.000	8 jenis	13.020.000	8.798.000	8 jenis	14.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	1	181.000.000	2 paket	35.000.000	35.000.000	1 paket	35.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	3	60.800.000	3 unit	0	0	2 unit	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	5 item	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					49.722.000	2 item	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur					0	1 item	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			85.625.000		94.210.000	135.247.000		103.650.000				

1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1	26.691.000	1 dokumen	29.370.000	62.941.000	1 dokumen	32.310.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2	18.739.000	2 dokumen	20.620.000	18.756.000	2 dokumen	22.690.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2	29.526.000	2 dokumen	32.480.000	45.406.000	2 dokumen	35.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1	10.669.000	1 dokumen	11.740.000	8.144.000	1 dokumen	12.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			22.733.000		25.020.000	28.575.000		27.530.000				
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20	5.919.000	20 orang	6.520.000	9.329.000	20 orang, 15 orang	7.180.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
2	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9	16.814.000	9 orang	18.500.000	19.246.000	9 orang	20.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												

	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.687.000		7.360.000	8.424.000		8.100.000				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50	6.687.000	50 orang	7.360.000	8.424.000	50 orang	8.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.035.000		3.340.000	176.262.000		3.680.000				
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8	3.035.000	8 jenis	3.340.000	176.262.000	8 jenis	3.680.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			24.927.000		27.420.000	5.649.000		30.170.000				
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	24.927.000	35 orang	27.420.000	5.649.000	25 orang	30.170.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2.219.000		2.450.000	2.355.000		2.700.000				
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	12	2.219.000	1 lokasi	2.450.000	2.355.000	1 lokasi	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			103.474.000		113.830.000	121.932.000		125.220.000				

1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12	103.474.000	12 laporan	113.830.000	121.932.000	12 laporan	125.220.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			37.547.000		41.310.000	52.121.000		45.450.000				
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2	37.547.000	2 perlombaan	41.310.000	52.121.000	2 lomba	45.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.462.000		10.410.000	6.212.000		11.460.000				
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12	9.462.000	12 bulan	10.410.000	6.212.000	12 bulan	11.460.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			15.079.000		16.590.000	30.501.000		18.250.000				
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	1	15.079.000	175 orang	16.590.000	20.341.000	175 orang	18.250.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Meningkatnya cinta air dan bela negara tehadap NKRI			1 kegiatan		10.160.000	120 orang	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			12.505.000		13.760.000	17.139.000		15.140.000				

1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.505.000	1 macam	13.760.000	17.139.000	1 macam	15.140.000	Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			28.922.000		31.820.000	44.419.000		35.010.000				
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24	28.922.000	24 orang	31.820.000	44.419.000	32 orang	35.010.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan			2.454.000		2.700.000	3.942.000		2.970.000				
1	2.7.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1	2.454.000	4 laporan	2.700.000	3.942.000	1 dokumen	2.970.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			12.389.000		13.630.000	34.681.000		15.000.000				
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40	12.389.000	40 orang	13.630.000	34.681.000	40 orang	15.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.187.000		7.910.000	0		8.710.000				
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30	7.187.000	50 orang	7.910.000	0	75 orang	8.710.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			13.090.000		14.400.000	26.272.000		15.840.000				

1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40	13.090.000	40 orang	14.400.000	26.272.000	40 orang	15.840.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			24.251.000		26.680.000	41.692.000		29.350.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya partisiapsi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik					15.000.000	1 dokumen	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2	24.251.000	2 dokumen	26.680.000	26.692.000	2 dokumen	29.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.636.000		7.300.000	0		8.030.000				
1	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampaikannya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50	6.636.000	50 orang	7.300.000	0	50 orang	8.030.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana

	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			11.122.000		12.250.000	8.012.000		13.490.000				
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50	6.094.000	50 orang	6.710.000	8.012.000	50 orang	7.390.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4	5.028.000	4 laporan	5.540.000	0	4 laporan	6.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			59.433.000		65.380.000	9.993.000		71.920.000				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1	59.433.000	1 paket	65.380.000	9.993.000	1 paket	71.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			16.570.000		18.230.000	20.941.000		20.060.000				
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	16.570.000	4 laporan	18.230.000	20.941.000	4 laporan	20.060.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	4.712.000		0				
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan			1 dokumen		4.712.000	1 dokumen	0	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												

	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		0	5.000.000		0				
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan			1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit mesin pencacah sampah		5.000.000	2 unit	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	8.775.000		0				
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak			25 anak		8.775.000	30 orang	0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			0		0	0		0				
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produk UMK wilayah Kecamatan Magelang Utara			1 kegiatan		0	1 kegiatan	0	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		1.676.394.000		1.584.410.000	1.907.988.000		1.739.560.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Potrobangsan
URUSAN : Kelurahan Potrobangsan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	11.558.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					

			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang		11.558.000	30 orang	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			142.070.000		156.240.000	151.959.000		171.830.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	15.840.000	4 item	17.420.000	17.880.000	12 bulan	19.160.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	9	3.200.000	6 unit	3.520.000	3.220.000	8 unit	3.870.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	21.110.000	650 m2	23.220.000	24.794.000	12 bulan	25.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 item	15.730.000	10.115.000	67 jenis	17.300.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.400.000	2 item	4.840.000	5.400.000	2 jenis	5.320.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	1.760.000	5 item	1.930.000	2.470.000	10 jenis	2.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	4.020.000	1 jenis	4.420.000	4.320.000	2 jenis	4.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3	3.080.000	2 macam	3.380.000	3.984.000	3 jenis	3.710.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	22.190.000	60 orang	24.400.000	29.436.000	3 jenis	26.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	1 jenis kegiatan	36.300.000	25.200.000	1 tahun	39.930.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.170.000	1 orang	21.080.000	21.540.000	1 orang	23.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor			1 paket		0		0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			4 jenis		3.600.000	3 jenis	0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya tenaga untuk mendukung pelayanan kedinasan			1 orang		0		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			123.880.000		112.250.000	41.895.000		115.960.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	600	6.410.000	650 m2	7.050.000	14.820.000	600 m2	7.750.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	6	20.870.000	5 unit	22.950.000	20.815.000	5 unit	25.240.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	2	1.320.000	6 macam	1.450.000	2.210.000	3 unit	1.590.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	5	5.280.000	6 macam	5.800.000	4.050.000	5 unit	6.380.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	40.000.000	8 unit	20.000.000	0	2 unit	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2	15.000.000	1 unit	20.000.000	0	2 unit	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	1	35.000.000	1 unit	35.000.000	0	1 unit gedung	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.070.000		5.570.000	5.268.000		6.120.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30	5.070.000	30 orang	5.570.000	5.268.000	30 orang	6.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			13.750.000		15.120.000	15.929.000		16.620.000				

			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55 %					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	100	7.850.000	280 orang	8.630.000	9.412.000	110 orang	9.490.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	30	5.900.000	50 orang	6.490.000	6.517.000	50 orang	7.130.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			82.270.000		90.480.000	119.640.000		99.510.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					

1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7	70.180.000	7 RW	77.190.000	111.447.000	7 RW	84.900.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	12.090.000	40 orang	13.290.000	8.193.000	40 orang	14.610.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			7.820.000		8.600.000	29.610.000		9.460.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	7.820.000	3 macam	8.600.000	29.610.000	3 macam	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			28.030.000		30.830.000	22.518.000		33.910.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	14.200.000	25 orang	15.620.000	11.826.000	25 orang	17.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana

2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71	13.830.000	71 RT RW	15.210.000	10.692.000	71 RT/RW	16.730.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.700.000		8.470.000	11.652.000		9.310.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	7.700.000	1 lokasi	8.470.000	11.652.000	1 lokasi	9.310.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			8.000.000		8.800.000	8.328.000		9.680.000				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30	8.000.000	30 orang	8.800.000	8.328.000	30 orang	9.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana

	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			121.850.000		134.030.000	173.638.000		147.430.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	121.850.000	12 laporan	134.030.000	173.638.000	12 laporan	147.430.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.160.000		7.870.000	7.488.000		8.650.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					

1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	7.160.000	20 orang	7.870.000	7.488.000	20 orang	8.650.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			10.500.000		11.550.000	10.725.000		12.700.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	2	10.500.000	1 perlombaan	11.550.000	10.725.000	1 perlombaan	12.700.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7.820.000		8.600.000	8.760.000		9.460.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00 %					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30	7.820.000	50 orang	8.600.000	8.760.000	50 orang	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			8.600.000		9.460.000	8.329.000		10.400.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					

			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.600.000	12 bulan	9.460.000	8.329.000	12 bulan	10.400.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			21.400.000		23.540.000	35.890.000		25.890.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90 %					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3	21.400.000	2 jenis acara	23.540.000	26.820.000	2 jenis acara	25.890.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 orang		9.070.000	100 orang	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			12.010.000		13.210.000	14.460.000		14.530.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					

1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.010.000	1 jenis acara	13.210.000	14.460.000	1 jenis acara	14.530.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			17.810.000		19.590.000	14.900.000		21.540.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	17.810.000	1 kelurahan	19.590.000	14.900.000	1 kelurahan	21.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			0		0	38.247.000		0				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya talud penahan jalan di tingkat RW					38.247.000	1 paket	0	RW VII Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			13.610.000		14.970.000	15.683.000		16.460.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					

			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	13.610.000	70 orang	14.970.000	15.683.000	70 orang	16.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			31.150.000		34.260.000	37.960.000		37.680.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	75	31.150.000	100 orang	34.260.000	37.960.000	100 orang	37.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			20.420.000		22.460.000	25.812.000		24.700.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.420.000	2 dokumen	18.060.000	19.850.000	2 dokumen	19.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana

2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	4.000.000	1 dokumen	4.400.000	5.962.000	1 dokumen	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.640.000		7.300.000	6.123.000		8.030.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	20	6.640.000	30 orang	7.300.000	6.123.000	30 orang	8.030.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			4.900.000		5.390.000	10.294.000		5.920.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	4.900.000	1 lokasi	5.390.000	10.294.000	1 lokasi	5.920.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.460.000		6.000.000	5.268.000		6.600.000				

			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	7	5.460.000	35 orang	6.000.000	5.268.000	7 posyandu	6.600.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.950.000		6.540.000	6.068.000		7.190.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	7	5.950.000	30 orang	6.540.000	6.068.000	7 posyandu	7.190.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan			76.200.000		35.000.000	240.972.000		135.000.000				
1	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	50 m'	0	60.867.000	1 paket	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.16	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	67	41.200.000	170 m'	0	42.405.000	1 paket	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.41.17	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	0	0	178 m'	0	0	1 paket	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

4	1.3.41.23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase di tingkat RW					57.015.000	1 paket	0	RW II Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7	35.000.000	1 paket	35.000.000	50.000.000	7 RW	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase di tingkat RW					30.685.000	1 paket	0	RW III Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.41.18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan RW IV			100 m'		0	1 paket	0	RW IV Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	1.3.41.19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan RW V			150 m'		0	1 paket	0	RW V Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	1.3.41.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase di tingkat RW					0	1 paket	0	RW V Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.100.000		5.610.000	12.493.000		6.170.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	25	5.100.000	30 orang	5.610.000	12.493.000	30 orang	6.170.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana

	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.8.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			4.000.000		4.400.000	6.942.000		4.840.000				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		68%			70%					
1	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	20	4.000.000	25 orang	4.400.000	6.942.000	20 orang	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	8.780.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan			1 dokumen		8.780.000	1 dokumen	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		0	5.328.000		0				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera			1 kelompok		5.328.000	1 kelompok	0	Ke	Dana Alokasi Umum		Rencana

	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			0		0	4.494.000		0				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfkoordinirnya lembaga ekonomi dimasyarakat			4 laporan		4.494.000	4 laporan	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		0	5.243.000		0				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosilaisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			30 orang		5.243.000	30 orang	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		799.170.000		806.140.000	1.122.254.000		975.590.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Kedungsari
URUSAN : Kelurahan Kedungsari

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			162.760.000		177.310.000	165.652.000		191.860.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	14.540.000	12 bulan	15.040.000	16.560.000	12	15.540.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6	1.680.000	7 unit	1.730.000	2.500.000	6	1.780.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	19.617.000	12 bulan	20.117.000	24.417.000	12	20.617.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.500.000	64 jenis	14.000.000	9.377.000	67	14.500.000	Kantor Kelurahan Kantor	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	5.000.000	2 jenis	5.500.000	5.411.000	2	6.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	2.500.000	5 jenis	3.000.000	2.596.000	1	3.500.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.147.000	4 unit	4.647.000	3.966.000	3	5.147.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	4.000.000	1 jenis	4.500.000	4.320.000	6	5.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.000.000	1 jenis	2.500.000	2.658.000	1	3.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	20.904.000	60 orang	21.404.000	23.599.000	3	21.904.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	27.000.000	1	45.000.000	pemerintah daerah / instansi lain	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	39.872.000	2 orang	44.872.000	43.248.000	2	49.872.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga			3 jenis		0	3	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			59.295.000		66.010.000	45.512.000		73.796.500				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285	32.145.000	285 m2	37.145.000	8.500.000	285	42.145.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7	13.000.000	7 unit	13.500.000	22.812.000	8	15.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4	7.000.000	10 unit	7.500.000	7.300.000	4	8.000.000	Kantor Kelurahan Kedungasari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	4	7.150.000	7 unit	7.865.000	2.900.000	4	8.651.500	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
5	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur					0	1	0	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perelngkapan gedung kantor					4.000.000	1 unit	0	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya peralatan kantor					0	1	0	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.000.000		5.500.000	5.315.000		6.000.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	35	5.000.000	30 orang	5.500.000	5.315.000	35	6.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10.000.000		10.500.000	16.169.000		11.000.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,5		Rp 6			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	12		Rp 13			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74		Rp 77			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		Rp 15			18					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	56	10.000.000	25 orang	10.500.000	16.169.000	56	11.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			27.000.000		28.000.000	39.129.000		29.000.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		Rp 5			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3 %		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	10	14.000.000	10 RW	14.500.000	25.982.000	10	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	13.000.000	30 orang	13.500.000	13.147.000	1	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana, Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
3	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terkelola nya persampahan			Terkelola nya persampahan		0	2	0	Kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.500.000		4.000.000	27.894.000		4.500.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100 %		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100 %		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 %		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		Rp 940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100 %		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	3.500.000	7 jenis	4.000.000	27.894.000	1	4.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			27.000.000		28.000.000	29.601.000		29.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	30	14.000.000	25 orang	14.500.000	16.072.000	30	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	13.000.000	68 orang	13.500.000	13.529.000	68	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			6.500.000		7.000.000	9.640.000		7.500.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		Rp 9			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,3		Rp 6			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52		Rp 57			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21		Rp 24			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	6.500.000	12 bulan	7.000.000	9.640.000	12	7.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			35.000.000		40.000.000	8.478.000		45.000.000				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	2	35.000.000	30 orang	40.000.000	8.478.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			115.000.000		120.000.000	190.638.000		125.000.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		Rp -			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		Rp -			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		Rp 4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47 %		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,8		Rp 1			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	115.000.000	12 bulan	120.000.000	190.638.000	12	125.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.500.000		8.000.000	7.821.000		8.500.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35	7.500.000	20 orang	8.000.000	7.821.000	35	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.500.000		8.000.000	8.149.000		8.500.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.500.000	1 kegiatan	8.000.000	8.149.000	1	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.000.000		4.500.000	5.882.000		5.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		Rp 1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	35	4.000.000	30 orang	4.500.000	5.882.000	35	5.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			8.000.000		8.500.000	3.417.000		9.000.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.000.000	12 bulan	8.500.000	3.417.000	12	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			11.500.000		12.000.000	32.013.000		12.500.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2 %		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90 %					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	11.500.000	2 kegiatan	12.000.000	22.928.000	2	12.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	76	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			100 orang		9.085.000	120	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			35.000.000		40.000.000	20.515.000		45.000.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		Rp 13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100 %		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	2	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	20.515.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			20.000.000		20.500.000	19.200.000		21.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		Rp 100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	20.000.000	1 kegiatan	20.500.000	19.200.000	1	21.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			8.000.000		8.500.000	10.026.000		9.000.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2	8.000.000	2 kelompok	8.500.000	10.026.000	2	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			14.000.000		14.500.000	12.789.000		15.000.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		Rp 4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		Rp 13			15					
			LPM berprestasi											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat kota	47%		Rp 1			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100 %			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25	14.000.000	25 orang	14.500.000	12.789.000	25	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.000.000		25.500.000	35.351.000		26.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		Rp 6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		Rp 5			4					
			#NAME?	15		Rp 13			11					
			#NAME?	20		Rp 19			17					
			#NAME?	NA		Rp 2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah klub olah raga	183		Rp 183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		Rp 35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.000.000	70 orang	25.500.000	35.351.000	60	26.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			24.000.000		25.000.000	28.337.000		26.000.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	18.000.000	2 kegiatan	18.500.000	21.496.000	2	19.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	6.000.000	1 kegiatan	6.500.000	6.841.000	1	7.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			12.500.000		13.500.000	11.420.000		14.500.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	1	8.000.000	4 lokasi	8.500.000	7.000.000	1	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	4.500.000	1 lokasi	5.000.000	4.420.000	2	5.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			9.500.000		10.000.000	12.152.000		10.500.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	10	9.500.000	50 orang	10.000.000	12.152.000	10	10.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			17.000.000		17.500.000	16.160.000		18.000.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	10	17.000.000	40 orang	17.500.000	16.160.000	10	18.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			7.000.000		7.500.000	8.007.000		8.000.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100 %		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100 %		100%			100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya kegiatan senam hamil untuk ibu hamil	30	7.000.000	20 orang	7.500.000	8.007.000	30 org	8.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak, Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			35.000.000		35.000.000	249.810.000		35.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	9,1 m/sisi	0	35.250.000	200 m	0	RT 1, 4 RW III Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di wilayah RW					39.410.000	200 m	0	RT 1 RW X	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase di wilayah RW					31.850.000	45 m	0	RT 3 RW IV Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10	35.000.000	10 RW	35.000.000	50.000.000	10 RW	35.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	12,5 m/sisi	0	0	100 m2	0	RT 2 RW IX kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.42.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase di wilayah RW					0	45 m, 80 m, 60 m	0	RT 3, 6 RW I Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.42.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase RT 3, 4 RW VIII					93.300.000	50 m, 50 m	0	RT 3, 4 RW VIII	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	13.076.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		Rp 3			3					
			Jumlah KIM	17		Rp 17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		Rp 7			7					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang		13.076.000	4 keg	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		0	7.720.000		0				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak			30 orang		7.720.000	1 keg	0	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	9.866.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	terselenggaranya penyusunan profile kecamatan / kelurahan			1 laporan		9.866.000	1 dokumen	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	7.857.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		Rp 100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		Rp 100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		Rp 90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5 %		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100 %		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	terfasilitasinya sosialisasi penanganan penyakit AIDS			30 orang		7.857.000	1 keg	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	Rp 3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			0		0	14.121.000		0				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		Rp 2			2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	terfasilitasinya pengelolaan program keluarga berencana			25 orang		14.121.000	12 bulan	0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
			TOTAL		696.555.000		744.820.000	1.071.717.000		794.156.500				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Kramat Utara
URUSAN : Kelurahan Kramat Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			131.860.000		145.040.000	125.228.000		159.530.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	12.940.000	4 item	14.230.000	14.220.000	12 Bulan	15.660.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8	2.500.000	8 unit kendaraan	2.750.000	2.365.000	8 Unit	3.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	23.410.000	605 m2	25.750.000	24.500.000	12 Bulan	28.320.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 Item	15.730.000	10.500.000	64 Item	17.310.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.950.000	2 jenis	5.450.000	4.170.000	2 Jenis	5.990.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	2.200.000	13 Item	2.420.000	2.299.000	13 Item	2.670.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.020.000	4 Item	4.420.000	1.460.000	2 Item	4.860.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.430.000	1 Jenis	4.870.000	3.600.000	1 Jenis	5.360.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.210.000	2 Macam	2.430.000	2.232.000	2 Maccam	2.670.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	8.720.000	60 Orang Pegawai	9.590.000	16.392.000	60 Orang	10.550.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	5 Kegiatan	36.300.000	21.950.000	4 Kegiatan	39.930.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.180.000	1 Orang	21.100.000	21.540.000	1 Orang	23.210.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			96.850.000		107.850.000	48.573.000		119.927.000				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor					0	3 Unit	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	15.380.000	7 unit kendaraan	16.720.000	21.234.000	7 Unit kendaraan	18.190.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	6	7.150.000	4 Jenis	9.370.000	4.369.000	4 Jenis	11.807.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605	52.320.000	605 m2	57.560.000	21.250.000	605 M2	63.310.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor					0	1 Unit	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananaya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	22.000.000	1 Unit kendaraan	24.200.000	0	1 Unit	26.620.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala			4 Item		1.720.000	4 Item	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			3.840.000		4.220.000	5.500.000		4.650.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	20	3.840.000	30 orang	4.220.000	5.500.000	30 Orang	4.650.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.100.000		5.610.000	12.396.000		6.170.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,5		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	12		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					

			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74		77,27			77,3					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30	5.100.000	32 Orang	5.610.000	6.500.000	40 Orang	6.170.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kesiapan tenaga kerja pengendali keaamanan/ linmas kelurahan			50 Orang		5.896.000	50 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			48.910.000		53.800.000	123.513.000		59.180.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8	48.910.000	8 RW	53.800.000	113.513.000	8 RW	59.180.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung Organik Kelurahan Kramat Utara			40 KK		10.000.000	40 KK	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			3.650.000		4.010.000	23.947.000		4.410.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100 %		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100 %		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 %		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100 %		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	2	3.650.000	3 Jenis	4.010.000	23.947.000	3 Jenis	4.410.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			13.800.000		15.180.000	9.377.000		16.700.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	4.180.000	25 Orang	4.600.000	4.770.000	25 Orang	5.060.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	47	9.620.000	100 Orang	10.580.000	4.607.000	100 Orang	11.640.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			4.180.000		4.600.000	4.775.000		5.060.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2			2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25	4.180.000	25 Kader KB	4.600.000	4.775.000	25 Kader KB	5.060.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			8.800.000		9.680.000	7.902.000		10.650.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,3					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,3		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52		56,87			61,6					
			Presentase perpustakaan aktif	21		23,7			26,1					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.800.000	12 Bulan	9.680.000	7.902.000	12 Bulan	10.650.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana

	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4.200.000		4.620.000	5.000.000		5.090.000				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100 %		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20 %		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45 %		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%			<15,4 %					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	25	4.200.000	30 Orang	4.620.000	5.000.000	40 Orang	5.090.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperte gas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			88.140.000		96.950.000	129.900.000		106.640.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47 %		1.81%			2.15%					

			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,8		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	88.140.000	12 Laporan	96.950.000	129.900.000	12 Laporan	106.640.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.160.000		7.880.000	4.747.000		8.660.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.160.000	3 juara	7.880.000	4.747.000	3 Juara	8.660.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			0		0	5.000.000		0				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya Lembaga Ekonomi Kelurahan Kramat Utara					5.000.000	4 Laporan	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			3.280.000		3.610.000	4.500.000		3.970.000				

			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	20	3.280.000	30 Orang	3.610.000	4.500.000	30 Orang	3.970.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			20.540.000		22.590.000	3.000.000		24.850.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.540.000	12 Bulan	9.390.000	3.000.000	12 Bulan	10.330.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.18.16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya rak penyimpan arsip kantor	2	12.000.000	3 Unit	13.200.000	0	2 Unit	14.520.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.110.000		7.820.000	28.948.000		8.600.000				

			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2 %		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90 %					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 Orang		8.948.000	100 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1	7.110.000	1 Kegiatan	7.820.000	20.000.000	1 Kegiatan	8.600.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.540.000		17.090.000	31.000.000		18.800.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100 %		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	1	15.540.000	2 Kegiatan	17.090.000	31.000.000	2 Kegiatan	18.800.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.650.000		21.620.000	19.815.000		23.780.000				

			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4	19.650.000	4 Kegiatan	21.620.000	19.815.000	4 Kegiatan	23.780.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			14.720.000		16.190.000	8.995.000		17.810.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100 %			100%		100%					

1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	14.720.000	30 Orang	16.190.000	8.995.000	30 Orang	17.810.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	SDGs
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.280.000		27.810.000	25.602.000		30.590.000			
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7				
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5			4				
			#NAME?	15		13			11				
			#NAME?	20		19			17				
			#NAME?	NA		2			NA				
			#NAME?	20		NA			NA				
			Jumlah klub olah raga	183		183			183				
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36				
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.280.000	60 Orang	27.810.000	25.602.000	60 Orang	30.590.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	Tema RKPD 2019
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan											
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			20.290.000		22.310.000	23.500.000		24.540.000			
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.440.000	2 Dokumen	18.080.000	19.000.000	2 Dokumen	19.890.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Implementasi RAD MEA

2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	3.850.000	1 Dokumen	4.230.000	4.500.000	1 Dokumen	4.650.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Program prioritas RPJM
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	5.255.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5 %		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100 %		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS					5.255.000	30 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			11.650.000		12.810.000	9.972.000		14.090.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					

1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	11.650.000	12 Bulan	12.810.000	9.972.000	12 Bulan	14.090.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			8.050.000		8.850.000	6.000.000		9.730.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	8	8.050.000	40 Orang	8.850.000	6.000.000	40 Orang	9.730.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			4.900.000		5.390.000	6.889.000		5.930.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8	4.900.000	150 Orang	5.390.000	6.888.900	150 Orang	5.930.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Tema RKPD 2019
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			38.500.000		42.350.000	100.000.000		46.590.000				

1	1.3.43.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	50 m	0	47.000.000	2 Paket (30 M2 dan 75 M2)	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8	38.500.000	1 paket	42.350.000	27.000.000	1 Paket	46.590.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Pemeliharaan saluran drainase di lingkungan RW.I Kramat Utara					26.000.000	100 m2	0	RW. I Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			80.000.000		50.000.000	20.131.000		50.000.000				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	80	80.000.000	30 m3	50.000.000	20.131.000	20 M3	50.000.000	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			0		0	3.801.000		0				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100 %		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100 %		100%			100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselengaranya pemantapan GSI			100 Orang		3.801.000	100 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		0	4.314.000		0				

			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselengaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR			25 Orang		4.314.000	25 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	5.130.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselengaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			20 Orang		5.130.000	20 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	4.934.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan/kecamatan			1 dokumen		4.934.000	1 Dokumen	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		0	6.000.000		0				

			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat			40 Orang		6.000.000	40 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	6.680.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					

			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikaasi dan informasi			35 Orang		6.680.000	35 Orang	0	Kelurahan Kramat Utara	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Tema RKPD 2019
			TOTAL		686.000.000		717.880.000	830.324.000		785.947.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Kramat Selatan
URUSAN : Kelurahan Kramat Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			167.108.000		183.818.000	183.910.000		202.210.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	9.300.000	12 tagihan	10.230.000	12.900.000	12 bulan	11.250.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	7	3.400.000	8 unit	3.740.000	2.520.000	8 unit	4.110.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	12	19.653.000	1 orang	21.618.000	25.000.000	12 bulan	23.780.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.000.000	19 jenis	14.300.000	11.000.000	25 jenis	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.500.000	2 jenis	4.950.000	6.300.000	2 jenis	5.450.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	9.500.000	9 jenis	10.450.000	3.500.000	7 jenis	11.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	3.647.000	2 jenis	4.010.000	3.400.000	3 jenis	4.420.000	Kelurahan kramat selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.200.000	2 jenis	4.620.000	5.280.000	4 jenis	5.080.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.100.000	14 tabung	2.310.000	2.776.000	2 jenis	2.540.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	15.500.000	3 jenis	17.050.000	23.300.000	3 jenis	18.760.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	30.000.000	3 orang	33.000.000	18.562.000	2 jenis	36.300.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	52.308.000	3 orang	57.540.000	64.872.000	3 orang	63.290.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			8 jenis		4.500.000	6 jenis	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			32.940.000		36.230.000	305.410.000		39.860.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	100	5.000.000	1500 m2	5.500.000	21.893.000	2000 m2	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	21.440.000	8 unit	23.580.000	24.717.000	7 unit	25.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3	6.500.000	17 unit	7.150.000	6.300.000	11 unit	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala					2.500.000	4 unit	0	Kantor Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pengadaan mobil sampah					250.000.000	-	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	-	0	Kantor Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

7	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur					0	-	0	Kantor Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					0	2 jenis	0	Kantor Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.000.000		5.500.000	5.750.000		6.050.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik PAUD	30	5.000.000	30 orang	5.500.000	5.750.000	30 orang	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			91.908.000		101.100.000	126.050.000		111.210.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pembinaan masyarakat tentang kampung organik			40 orang		10.050.000	40 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	11	91.908.000	11 RW	101.100.000	116.000.000	11 RW	111.210.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.000.000		4.400.000	29.000.000		4.840.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100 %					

			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100 %					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100 %					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100 %					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	4.000.000	3 jenis	4.400.000	29.000.000	11 RW	4.840.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			31.600.000		34.760.000	29.000.000		38.240.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	45	16.600.000	25 orang	18.260.000	16.000.000	50 orang	20.090.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	15.000.000	68 RT/RW	16.500.000	13.000.000	72 RT/RW	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			6.500.000		7.150.000	11.000.000		7.870.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2			2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terselenggaranya upaya untuk membina KB	25	6.500.000	25 kader	7.150.000	11.000.000	25 orang	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			8.750.000		9.630.000	14.000.000		10.590.000				

					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,3					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,6					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,1					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.750.000	1 orang	9.630.000	14.000.000	12 bulan	10.590.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	2.500.000		0				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100 %					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan			1 Dokumen		2.500.000	1 dokumen	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			2.200.000		2.420.000	10.000.000		2.660.000				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%			100 %					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%			<20 %					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%			<45 %					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4 %		<15,4%			<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	25	2.200.000	30 kader	2.420.000	10.000.000	30 orang	2.660.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana

	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		114.000.000		125.400.000	186.805.000		137.940.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15 %					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	114.000.000	12 Laporan	125.400.000	186.805.000	12 bula n	137.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.500.000		7.150.000	7.500.000		7.870.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	6.500.000	1 lomba	7.150.000	7.500.000	11 RW	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												

	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.600.000		5.060.000	5.300.000		5.570.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90 %					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda	30	4.600.000	30 pemuda	5.060.000	5.300.000	30 orang	5.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.000.000		9.900.000	9.000.000		10.890.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	9.000.000	12 dokumen	9.900.000	9.000.000	12 bulan	10.890.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			17.000.000		18.700.000	32.000.000		20.570.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00 %		73.00%			75.00%					

			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19 %		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kota Magelang	2	17.000.000	2 acara	18.700.000	23.500.000	2 kegiatan	20.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama			100 orang		8.500.000	100 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.000.000		16.500.000	25.700.000		18.150.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100 %					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	15.000.000	1 kontingen	16.500.000	14.600.000	1 kontingen	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Meningkatnya kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah					11.100.000	2 kelompok	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.000.000		20.900.000	24.000.000		22.990.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2	19.000.000	2 kegiatan	20.900.000	24.000.000	2 kegiatan	22.990.000	kelurahan kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			18.000.000		19.800.000	27.250.000		21.780.000				

1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	40	18.000.000	20 m	19.800.000	27.250.000	20 m3	21.780.000	RW X Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			16.500.000		18.150.000	17.700.000		19.970.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	16.500.000	30 orang	18.150.000	17.700.000	30 orang	19.970.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			19.000.000		20.900.000	31.000.000		22.990.000				

			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	70	19.000.000	5 cabang OR	20.900.000	31.000.000	70 orang	22.990.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			20.000.000		22.000.000	31.900.000		24.200.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya pra musrenbang dan musrenbang tingkat kelurahan	2	15.000.000	2 kegiatan	16.500.000	25.500.000	2 kegiatan	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey hasil musrenbang tingkat kelurahan	1	5.000.000	11 RW	5.500.000	6.400.000	1 kegiatan	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.000.000		7.700.000	7.300.000		8.470.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					

			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	50	7.000.000	30 orang	7.700.000	7.300.000	50 orang	8.470.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			10.000.000		11.000.000	15.000.000		12.100.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12	10.000.000	1 Lokasi	11.000.000	15.000.000	12 bulan	12.100.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			13.000.000		14.300.000	16.000.000		15.730.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	11	13.000.000	22 kader	14.300.000	16.000.000	80 ok	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.000.000		5.500.000	12.000.000		6.050.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	11	5.000.000	30 kader	5.500.000	12.000.000	120 ok	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			6.500.000		7.150.000	10.000.000		7.870.000				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%			100 %					

			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%			100 %					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI	10	6.500.000	20 bumil	7.150.000	10.000.000	240 ok	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			146.000.000		160.600.000	228.025.000		175.910.000				
1	1.3.44.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW					21.700.000	15 m	0	RW VI Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80	18.000.000	50 m2	19.800.000	26.850.000	40 m	21.780.000	RW II Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75	18.000.000	30 m2	19.800.000	25.750.000	40 m	21.780.000	RW III Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50	15.000.000	29,4 m2	16.500.000	22.750.000	35 m	17.600.000	RW VIII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300	20.000.000	30 m2	22.000.000	21.700.000	30 m	24.000.000	RW IX Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.44.45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11	35.000.000	1 paket	38.500.000	35.000.000	1 kelurahan	42.350.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60	16.000.000	68 m2	17.600.000	11.425.000	15 m	19.360.000	RW V Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170	24.000.000	50 m2	26.400.000	25.750.000	25 m	29.040.000	RW VII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

9	1.3.44.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW			26 m		24.050.000	40 m	0	RW I Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
10	1.3.44.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW					13.050.000	20 m	0	RW IV Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.000.000		5.500.000	9.300.000		6.050.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	5.000.000	20 m	5.500.000	9.300.000	30 orang	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	9.000.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa			35		9.000.000	35 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	32.500.000		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/ hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					

			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,3					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12%			20.5 5%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan / linmas kelurahan			280		22.000.000	40 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			50		10.500.000	40 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	7.500.000		0				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba					7.500.000	50 orang	0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0		0	0		0				
					2,558,688,000		4,359,618,000			6,135,402,000				
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		5			5					
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%		77%			83%					

1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terevitalisasinya Lapangan Olahraga					0	-	0	RW IV Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		801.106.000		881.218.000	1.461.400.000		968.630.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Wates
URUSAN : Kelurahan Wates

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR 3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			116.570.000		128.150.000	143.153.000		140.980.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	12.300.000	4 item	13.530.000	22.200.000	12	14.890.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8	2.100.000	8 kendaraan	2.310.000	2.306.000	8	2.550.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	18.840.000	296 m2	20.720.000	22.800.000	12	22.800.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.000.000	64 item	14.300.000	15.730.000	67	15.730.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	2.890.000	2 macam	3.180.000	4.041.000	2	3.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	2.000.000	5 macam	2.200.000	2.420.000	4	2.420.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	3.650.000	4 item	4.020.000	4.420.000	3	4.420.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	3.800.000	1macam	4.100.000	4.800.000	1	4.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	780.000	2 macam	860.000	1.750.000	1	950.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	9.770.000	60 orang	10.750.000	21.146.000	3	11.820.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		ExBAU

11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	30.000.000	5 kegiatan	33.000.000	20.000.000	1	36.300.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.440.000	1orang	19.180.000	21.540.000	1	21.100.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			44.140.000		48.560.000	40.615.000		53.420.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	296	22.900.000	296m2	25.190.000	10.000.000	296	27.710.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana, ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7	15.740.000	7 kendaraan	17.320.000	19.050.000	7	19.050.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3	5.500.000	3 macam	6.050.000	6.450.000	3	6.660.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			8macam		5.115.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan cctv gedung kantor					0	100%	0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			0		0	5.000.000		0				
			APK PAUD	66 %		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53 %		54%			55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD			24 orang		5.000.000	100%	0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.150.000		5.670.000	18.410.000		6.240.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali /hari		3 kali/hari			3 kali/hari					

			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92 %		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,5		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	12		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95 %		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12 %			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30	5.150.000	280 orang	5.670.000	13.410.000	30	6.240.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan			50 orang		5.000.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			34.700.000		38.170.000	36.990.000		41.990.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89 %		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3 %		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	12	24.000.000	13 rw	26.400.000	29.040.000	12	29.040.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	10.700.000	40org	11.770.000	7.950.000	1	12.950.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana

	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.750.000		5.230.000	25.540.000		5.750.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100 %		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100 %		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 %		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100 %		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50 %		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40 %		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	2	4.750.000	3 macam	5.230.000	25.540.000	2	5.750.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			27.040.000		29.750.000	41.448.000		32.720.000				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya ketua RT/RW			97 rt/rw		0	100%	0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	6.240.000	25 orang	6.870.000	23.984.000	25	7.550.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	25	20.800.000	97 rt/rw	22.880.000	17.464.000	25	25.170.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.8.15	Program Keluarga Berencana			4.120.000		4.540.000	5.140.000		4.990.000				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2			2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	30	4.120.000	25 kader KB	4.540.000	5.140.000	30	4.990.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3.000.000		3.300.000	7.656.000		3.630.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,3		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67 %			20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	12	3.000.000	1 lokasi	3.300.000	7.656.000	12	3.630.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			5.520.000		6.080.000	4.996.000		6.680.000				

			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100 %		100%			100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20 %		<20%			<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45 %		<45%			<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15 ,4%		<15,4 %			<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30	5.520.000	150 orang	6.080.000	4.996.000	30	6.680.000	Kel. Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			139.990.000		153.990.000	220.666.000		169.390.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80 %		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,8		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	139.990.000	13 rw	153.990.000	220.666.000	12	169.390.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana

	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			3.840.000		4.230.000	6.078.000		4.650.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30 %		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	3.840.000	1 pertemuan	4.230.000	6.078.000	1	4.650.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.680.000		7.350.000	5.610.000		8.090.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00 %			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	25	6.680.000	50 anggota karang taruna	7.350.000	5.610.000	25	8.090.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			2.690.000		2.960.000	0		3.260.000				

					839,992,000		849,477,000			917,944,000					
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000					
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000					
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000					
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000					
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542					
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000					
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000					
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52 %		69%			86%						
			Persentase arsip dan risalah	82 %		82%			82%						
			Persentase Penyelamatan Arsip	53 %		60%			67%						
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	2.690.000	12 bulan	2.960.000	0	12	3.260.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			34.030.000		37.430.000	33.000.000		41.170.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000					
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000					
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72, 2%		74,8%			77,4%						
			Database ormas yang akurat	71. 00 %		73.00 %			75.00%						
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35, 19 %		42,59 %			49,90%						
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	4	34.030.000	2 kegiatan	37.430.000	25.000.000	4	41.170.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama			100 orang		8.000.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			30.160.000		33.180.000	84.455.000		36.500.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828					

			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15, 32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100 %		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	3	30.160.000	3 kegiatan	33.180.000	84.455.000	3	36.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			20.890.000		22.980.000	35.000.000		25.270.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2	20.890.000	1 kegiatan	22.980.000	35.000.000	2	25.270.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			15.180.000		16.700.000	18.370.000		18.370.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35 %		41,12 %			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					

			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47 %		0,529			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35 %		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %		100.00 %			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61 %		68%			75%					
			PKK Aktif	100 %			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	15.180.000	70 kader	16.700.000	18.370.000	30	18.370.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			15.400.000		16.940.000	25.000.000		18.640.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					

			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	50	15.400.000	100 peserta	16.940.000	25.000.000	50	18.640.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			14.820.000		16.300.000	18.010.000		17.930.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	10.390.000	2 kegiatan	11.430.000	12.650.000	2	12.570.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	4.430.000	1 kegiatan	4.870.000	5.360.000	1	5.360.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			8.500.000		9.350.000	6.000.000		10.290.000				
			Luas RTH Kota	18 %		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	8.500.000	1 lokasi	9.350.000	6.000.000	1	10.290.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana, Kota Sejuta Bunga

	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			35.000.000		81.000.000	38.000.000		109.000.000				
1	1.3.40.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	0	0	143m, 86m	46.000.000	0	104	74.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.40.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13	35.000.000	1 paket	35.000.000	10.000.000	13	35.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
3	1.3.40.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terpeliharanya saluran rw 5 kel.wates					8.500.000	100%	0	RW V	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.40.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 11 kel.wates					5.500.000	100%	0	RW XI	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.40.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 12 kel.wates					0	100%	0	RW XII	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.40.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 9 kel.wates					5.000.000	100%	0	rw IX	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.40.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	terpeliharanya saluran rw 11 kel.wates					0	100%	0	RW XI	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
8	1.3.40.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW II			30 m		0		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
9	1.3.40.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VII			30 m		0		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

10	1.3.40.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan Kelurahan			75m2, 80 m2		9.000.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
11	1.3.40.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 2 kel.wates					0	100%	0	RW II	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			0		0	7.462.000		0				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada			Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender			50 orang		7.462.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	6.500.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00 %			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			20 orang		6.500.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		0	0		0				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20 %		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23 %		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00 %			79,50%					

1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera			1 kelompok		0	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	7.200.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit AIDS			30 orang		7.200.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			0		0	0		0				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita			30 kader		0	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			0		0	0		0				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					

			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18 %		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terpeliharanya kesehatan lansia			30 orang		0	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			0		0	0		0				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95 %		95%			95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100 %		100%			100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92 %		92%			95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100 %		100%			100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terlaksananya program GSI			30 orang		0	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	6.250.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80 %		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

			a.???????? Radio	60 kali siar / 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali / 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok KIM			4 pertemuan		6.250.000	100%	0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			0		0	7.640.000		0				

			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90 %		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80 %		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kecamatan/kelurahan			1 dokumen		7.640.000	100%	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		572.170.000		671.860.000	854.189.000		758.960.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Magelang Tengah
URUSAN : Kecamatan Magelang Tengah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			575.436.150		594.929.400	736.287.000		619.169.640				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12	23.058.000	12 bulan	25.363.000	72.000.000	12 bulan	28.393.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10	2.425.500	10 kendaraan dinas	2.668.000	3.800.000	10 Unit	2.934.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	358.461.000	12	358.461.000	427.849.000	12 bulan	358.461.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	2	38.320.800	12 bulan	42.152.000	131.838.000	12 bulan	46.468.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61	35.830.200	10 jenis	37.213.000	15.633.000	61 jenis	40.934.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2	8.326.500	2	9.159.000	6.703.000	2 jenis	10.075.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU

7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9	2.901.150	9	3.191.000	4.617.000	9 jenis	3.510.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2	3.465.000	2 jenis	3.811.000	4.200.000	3 jenis	4.192.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1	2.709.000	1	2.979.000	3.286.000	12 bulan	3.277.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	6	37.485.000	30 pegawai	41.233.000	36.361.000	12 bulan	45.356.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1	62.454.000	1	68.699.400	30.000.000	6 kegiatan	75.569.640	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			148.277.850		157.250.000	102.683.000		168.300.000				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	250	8.946.000	pemeliharaan rumah dinas	10.000.000	0	250 m2	11.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	800	43.319.850	gedung kantor	45.000.000	5.000.000	800 m2	48.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10	80.577.000	10 kendaraan dinas	85.000.000	85.244.000	10 Unit	90.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	100	210.000	2 jenis	250.000	4.235.000	2 jenis	300.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	9	15.225.000	6 jenis	17.000.000	8.204.000	3 jenis	19.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Mesin Pencacah yang dibeli					0	1 jenis	0	1	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			9.979.200		10.977.000	0		12.074.000				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1	9.979.200	1 kegiatan, 6 kelurahan	10.977.000	0	6 kelurahan	12.074.000	Keluraha n se-Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			83.500.000		91.850.000	88.877.000		101.035.000				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4	25.000.000	4	27.500.000	26.083.000	4 dokumen	30.250.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2	20.000.000	2 dokumen	22.000.000	20.462.000	2 dokumen	24.200.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2	28.500.000	2	31.350.000	33.140.000	2 dokumen	34.485.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	5	10.000.000	1 laporan	11.000.000	9.192.000	1 dokumen	12.100.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												

	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			17.726.100		19.498.000	0		21.448.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	4	17.726.100	3 macam lomba	19.498.000	0	4	21.448.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			40.000.000		44.000.000	45.824.000		48.400.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,7		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,3		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembinaan dan pemantauan kegiatan linmas	4	40.000.000	triwulanan, 85 linmas	44.000.000	45.824.000	85 orang	48.400.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			111.398.700		122.538.000	144.142.000		134.792.000				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					

			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					
			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	111.398.700	1 pagelaran wayang	122.538.000	144.142.000	1 kegiatan	134.792.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			111.462.750		122.668.000	162.506.000		134.869.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47 %		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					

1	1.5.16.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4	20.792.100	4	22.871.000	0	4 lapora n	25.158.000	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperk uat Implemen tasi MKSB
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Keamanan	12	90.670.650	12 kali kegiatan	99.797.000	124.105.000	12 kegiata n	109.711.000	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terlaksananya lomba Poskamling			1 lomba		38.401.000	2 kegiata n	0	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperk uat Implemen tasi MKSB
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.250.000		5.775.000	0		6.352.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.3 7%		50.00%			52.63 %					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	forum anak yang terfasilitasi	6	5.250.000	6 kegiatan	5.775.000	0	6 kegiata n	6.352.000	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			46.509.750		51.160.000	48.042.000		56.276.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2	46.509.750	2 kegiatan	51.160.000	48.042.000	2 kegiata n	56.276.000	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperk uat Implemen tasi Manajem en Persampa han, Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												

	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			14.209.650		15.630.000	36.240.000		17.193.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2 %		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.0 0%		73.00%			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,1 9%		42,59%			49,90 %					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1	14.209.650	1 kali kegiatan	15.630.000	18.735.000	1 kegiata n	17.193.000	Kantor Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan			2 Kegiatan		17.505.000	2 kegiata n	0	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		SDGs
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			10.610.250		11.671.000	15.000.000		12.838.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,3 2		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100 %		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Kegiatan Karnaval pembangunan	1	10.610.250	1 kali karnaval pembangu nan	11.671.000	15.000.000	1 kegiata n	12.838.000	Kecamat an Magelan g Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempert egas Skenario Kemitraan
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.18	Program Pendidikan Non Formal			30.159.150		33.259.000	52.817.000		36.584.000				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.9 9%		97.31%			97.63 %					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100 %		100%			100%					

			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100 %		100%			100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100 %		100%			100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%			25.00 %					
			Jumlah Juara FASI	4		-			-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2			2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170	30.159.150	170 peserta lomba	33.259.000	52.817.000	170 orang	36.584.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			0		0	17.619.000		0				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50 %					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			4 pokja		17.619.000	5 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			31.425.450		34.567.000	19.588.000		38.024.000				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											

			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	7	31.425.450	7 TP PKK	34.567.000	19.588.000	33 orang	38.024.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			12.178.950		13.396.000	0		14.736.000				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					

1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60	12.178.950	60 peserta	13.396.000	0	60 Orang	14.736.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.000.000		27.500.000	24.037.000		30.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	2	25.000.000	3 lomba	27.500.000	24.037.000	12 kegiatan	30.000.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			27.686.400		30.454.000	34.675.000		33.500.000				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	5	11.945.850	laporan pra musrenbang	13.140.000	14.910.000	1 kegiatan	14.454.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	160	15.740.550	160 peserta	17.314.000	19.765.000	2 kegiatan	19.046.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			139.965.000		153.960.000	0		169.357.000				

1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan		139.965.000	kelurahan dan kecamatan	153.960.000	0	6 kelurahan	169.357.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	149.603.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100 %		100%			100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan			12		149.603.000	12 bulan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		0	0		0				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan Kearsipan			4 jenis dokumen		0	12 bulan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
	2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			0		0	0		0				

			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM		100 UMKM			100 UMKM					
1	2.11.16.5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan					0	1 kegiatan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		0	0		0				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan			4 monev		0	4 laporan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	0		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5 %		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100 %		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											

1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			60 peserta		0	60 orang	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			57.000.000		62.700.000	64.164.000		68.970.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	100	57.000.000	3 orang tenaga non pegawai	62.700.000	64.164.000	15 RTH	68.970.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			0		0	14.628.000		0				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100 %		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100 %		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100 %		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100 %		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan informasi kependudukan			12 laporan		14.628.000	12 laporan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												

	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0		0	24.881.000		0				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%			75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%			9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	terlaksananya kegiatan FKDM			4 kegiatan		24.881.000	4kegiatan	0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
			TOTAL		1.497.775.350		1.603.782.400	1.781.613.000		1.723.917.640				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Kemirirejo
URUSAN : Kelurahan Kemirirejo

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			101.113.950		111.225.345	132.328.000		122.347.880				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	13.356.000	12 bulan	14.691.600	14.758.000	12 bulan	16.160.760	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pembayaran STNK	10	1.680.000	10 Kendaraan	1.848.000	2.100.000	10 unit	2.032.800	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	100	18.900.000	12 bulan	20.790.000	44.412.000	12 bulan	22.869.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pembelian ATK	100	8.482.950	100	9.331.245	9.443.000	32 jenis	10.264.370	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	100	3.675.000	12 bulan	4.042.500	9.685.000	2 jenis	4.446.750	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	100	1.260.000	12 bulan	1.386.000	1.123.000	9 jenis	1.524.600	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	1.260.000	12 bulan	1.386.000	4.260.000	2 jenis	1.524.600	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya logistik kantor/pembelian gas elpiji	100	2.100.000	12 bulan	2.310.000	1.815.000	12 bulan	2.541.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU

9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	100	18.900.000	100	20.790.000	19.532.000	12 bulan	22.869.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi keluar daerah	100	31.500.000	4 kegiatan	34.650.000	25.200.000	4 kegiatan	38.115.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			46.515.000		51.166.500	43.951.000		56.283.150				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	100	17.115.000	1 kegiatan	18.826.500	17.162.000	458 m2	20.709.150	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharan kendaraan dinas	100	22.050.000	10 Kendaraan	24.255.000	20.329.000	8 unit	26.680.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	100	7.350.000	10 Unit	8.085.000	5.010.000	4 jenis	8.893.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			4 jenis		1.450.000	2 jenis	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.617.500		6.179.250	6.428.000		6.797.175				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pendidikan anak usia dini	100	5.617.500	100	6.179.250	6.428.000	9 Pos PAUD	6.797.175	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			8.937.600		9.831.360	15.519.000		10.814.496				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					

			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,3					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan lingkungan	100	8.937.600	100	9.831.360	15.519.000	30 orang	10.814.496	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			91.355.250		100.490.775	130.967.000		110.539.853				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tercapainya kebersihan lingkungan kelurahan	100	76.077.750	100	83.685.525	119.401.000	9 RW	92.054.078	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya pengembangan kampung organi	100	15.277.500	100	16.805.250	9.566.000	4 kampung organik	18.485.775	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Tercapainya monitoring dan evaluasi pelaporan			12		2.000.000	4 laporan	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8.085.000		8.893.500	14.003.000		9.782.850				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100 %					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100 %					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100 %					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100 %					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya peningkatan pelayanan	100	8.085.000	100	8.893.500	7.460.000	66 orang	9.782.850	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya pembuatan laporan kependudukan			12 Laporan		6.543.000	12 laporan	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			26.424.300		29.066.730	13.100.000		31.973.403				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Tercapainya pemilihan dan pelantika Ketua LPM Kelurahan Kemirirejo	100	16.800.000	1	18.480.000	0	35 orang	20.328.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Tercapainya pembinaan RT/RW	100	9.624.300	12	10.586.730	13.100.000	9 RW	11.645.403	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			2.656.500		2.922.150	3.940.000		3.214.365				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tercapainya pengembangan sumber daya komuniasi dan informasi	100	2.656.500	100	2.922.150	3.940.000	2 kegiatan	3.214.365	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			6.930.000		7.623.000	13.153.000		8.385.300				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,3					

			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,6					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,1					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Tercapainya pengelolaan buku perpustakaan	100	6.930.000	12	7.623.000	13.153.000	1 perpustakaan	8.385.300	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			4.237.800		4.661.580	4.324.000		5.127.738				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100 %					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tercapainya prmbuatan profil kelurahan	100	4.237.800	100	4.661.580	4.324.000	1 dokumen	5.127.738	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			123.669.000		136.035.900	179.657.000		149.639.490				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					

			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15 %					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	100	123.669.000	100	136.035.900	158.447.000	12 kegiatan	149.639.490	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya kegiatan lomba siskamling			1		21.210.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			10.500.000		11.550.000	3.790.000		12.705.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya peningkatan lembagaan perempuan dan anak	100	10.500.000	100	11.550.000	3.790.000	3 kegiatan	12.705.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			5.512.500		6.063.750	0		6.670.125				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya K3	100	5.512.500	100	6.063.750	0	1 kegiatan	6.670.125	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.652.800		7.318.080	6.325.000		8.049.888				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90 %					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya pembinaan karangtaruna	100	6.652.800	100	7.318.080	6.325.000	2 kegiatan	8.049.888	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			26.613.300		29.274.630	4.073.000		32.202.093				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					

			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tercapainya penataan arsip/dokumen	100	26.613.300	100	29.274.630	4.073.000	12 bulan	32.202.093	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		0	8.700.000		0				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya kerukunan dalam beragama			1 kegiatan		8.700.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			22.878.450		25.166.295	41.638.000		27.682.925				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100	5.250.000	100	5.775.000	22.615.000	2 kegiatan	6.352.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya	100	17.628.450	2	19.391.295	19.023.000	1 kegiatan	21.330.425	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			13.765.500		15.142.050	22.167.000		16.656.255				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselengaranya BBGRM	100	13.765.500	100	15.142.050	22.167.000	4 jenis lomba	16.656.255	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			15.750.000		17.325.000	11.803.000		19.057.500				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tercapainya pembinaan PKK	100	15.750.000	100	17.325.000	11.803.000	2 kegiatan	19.057.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			14.553.000		16.008.300	21.384.000		17.609.130				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					

			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tercapainya kegiatan porseni kelurahan dan senam PKK	100	14.553.000	100	16.008.300	21.384.000	1 kegiatan	17.609.130	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			14.875.350		16.362.885	17.762.000		17.999.174				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang	100	11.519.550	1 kegiatan	12.671.505	14.054.000	2 kegiatan	13.938.656	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang	100	3.355.800	2 kegiatan	3.691.380	3.708.000	9 RW	4.060.518	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Rencana
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			10.500.000		11.550.000	4.300.000		12.705.000				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5 %					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100 %					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											

1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terpeliharaan kesehatan masyarakat	100	10.500.000	1 kegiatan	11.550.000	4.300.000	30 orang	12.705.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			12.285.000		13.513.500	10.280.000		14.864.850				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Tercapainya pemeliharaan RTH	100	12.285.000	100	13.513.500	10.280.000	6 RTH	14.864.850	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			24.595.200		27.054.720	35.946.000		29.760.192				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan kesehatan anak balita	100	24.595.200	12	27.054.720	35.946.000	9 posyandu balita	29.760.192	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			14.629.650		16.092.615	46.490.000		17.701.877				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tercapainya pemeliharaan kesehatan	100	14.629.650	2 jenis	16.092.615	46.490.000	4 posyandu lansia	17.701.877	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

	1.3.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			36.750.000		40.425.000	15.000.000		44.467.500				
1	1.3.45.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Tercapainya pemeliharaan infrastruktur	100	36.750.000	100	40.425.000	15.000.000	9 RW	44.467.500	Keluraha n Kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Akomoda si Musrenba ng
2	1.3.45.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Tercapainya pemeliharaan inrastruktur RW VIII					0	60 m	0	RW VIII Kel Kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Akomoda si Musrenba ng
3	1.3.45.29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW II					0	40 m	0	RW II Kel kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Akomoda si Musrenba ng
4	1.3.45.30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW III					0	35 m	0	RW III Kel Kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Akomoda si Musrenba ng
5	1.3.45.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW IV					0	36 m	0	RW IV Kel Kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Akomoda si Musrenba ng
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	63.628.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100 %					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tercapainya pelayanan kedinasan OPD			12		63.628.000	12 bula n	0	Keluraha n Kemirirej o	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	0		0				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					

			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tercapainya penyuluhan pencegahan narkoba dan miras			1 kegiatan		0	30 orang	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	10.485.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,52941			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					

			PKK Aktif	100%			100%		100 %					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Tercapainya kegiatan rakor PKK			12 bulan		10.485.000	20 orang	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	7.897.000		0				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					
			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			1 kegiatan		7.897.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
			TOTAL		655.402.650		720.942.915	889.038.000		793.037.209				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Cacaban
URUSAN : Kelurahan Cacaban

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	63.628.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di Kelurahan					63.628.000	12 Bulan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			125.510.000		138.061.000	139.866.000		151.867.100				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, internet	12	22.000.000	4 Jenis	24.200.000	20.400.000	12 Bulan	26.620.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	9	1.100.000	10 Unit	1.210.000	3.192.000	11 Unit	1.331.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan bahan pembersih dan upah petugas kebersihan kantor	12	19.800.000	9 Jenis	21.780.000	24.462.000	12 Bulan	23.958.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12	11.550.000	12 Jenis	12.705.000	12.663.000	20 Jenis	13.975.500	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak buku register administrasi, banner/spanduk dan fotokopi	12	6.600.000	2 jenis	7.260.000	9.988.000	2 Jenis	7.986.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja koponen listrik	5	2.200.000	5 Jenis	2.420.000	2.660.000	7 Jenis	2.662.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pengadaan koran/uahbahan bacaan	14	1.650.000	48 eksemplar	1.815.000	3.600.000	2 Jenis	1.996.500	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	pengadaan LPG/BBM	12	1.210.000	3 Jenis	1.331.000	2.024.000	12 Bulan	1.464.100	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyedian makanan dan minuman parat dan karyawan	12	20.900.000	8 Jenis	22.990.000	25.877.000	12 Bulan	25.289.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	4	38.500.000	4 Kegiatan	42.350.000	35.000.000	4 Kegiatan	46.585.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			239.800.000		263.780.000	62.957.000		290.158.000				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1	209.000.000	1 Gedung	229.900.000	30.000.000	1200 m2	252.890.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	9	19.800.000	9 Unit	21.780.000	23.436.000	9 Unit	23.958.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	15	2.200.000	7 Unit	2.420.000	5.000.000	3 Jenis	2.662.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU

4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	8	8.800.000	7 Unit	9.680.000	4.521.000	4 Jenis	10.648.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan			1		0	20 m2	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Printer All in One Uk A3					0	1 Jenis	0	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.700.000		8.470.000	8.540.000		9.317.000				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kegiatan PAUD	6	7.700.000	7 Pos PAUD	8.470.000	8.540.000	7 Pos PAUD	9.317.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			45.100.000		49.610.000	85.575.000		54.571.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					

1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Upah petugas dan biaya operasional	12	33.000.000	14 Orang	36.300.000	63.537.000	12 RW	39.930.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembanan kampung organik	1	12.100.000	1 Lokasi	13.310.000	14.008.000	1 Kampung Organik	14.641.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Evaluasi pelaksanaan Kampung organik			1 Lokasi		8.030.000	4 Laporan	0	Kelurahan cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			7.700.000		8.470.000	27.135.000		9.317.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pembinaan administrasi kependudukan	12	7.700.000	120 Orang	8.470.000	9.718.000	86 Orang	9.317.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Penyusunan laporan kependudukan			12 Laporan		17.417.000	12 Laporan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			9.350.000		10.285.000	8.813.000		11.313.500				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Pembinaan administrasi RT/RW	86	9.350.000	120 Orang	10.285.000	8.813.000	12 RW	11.313.500	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			0		0	23.034.000		0				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,9			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67 %			20.83 %					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Pengelola Pepustakaan dan Biaya Operasioanal					23.034.000	1 Perpustakaan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.300.000		3.630.000	3.084.000		3.993.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					

			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Penyusunan buku profil kelurahan	5	3.300.000	5 Buku	3.630.000	3.084.000	1 Dokumen	3.993.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			132.000.000		145.200.000	222.167.000		159.720.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81 %			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					

1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	koordinasi keamanan dan ketertiban	86	132.000.000	120 Orang	145.200.000	196.147.000	12 Kegiatan	159.720.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dlm Kamtibmas (Lomba Poskamling)			12 Peserta		26.020.000	2 Kegiatan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.500.000		6.050.000	7.168.000		6.655.000				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00 %			52.63 %					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	12	5.500.000	50 Anak	6.050.000	7.168.000	2 Kegiatan	6.655.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.500.000		6.050.000	14.380.000		6.655.000				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00 %			97.00 %					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15 %			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	pembinaan kepemudaan (karang taruna)	12	5.500.000	50 Pemuda	6.050.000	14.380.000	2 Kegiatan	6.655.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			17.600.000		19.360.000	6.814.000		21.296.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				

			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	penataan dan pengamanan arsip	12	17.600.000	12 Bulan	19.360.000	6.814.000	12 Bulan	21.296.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		0	7.950.000		0				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8 %			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00 %		73.00 %			75.00 %					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19 %		42,59 %			49,90 %					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan toleransi masyarakat			125 Orang		7.950.000	1 Kegiatan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			30.800.000		33.880.000	46.930.000		37.268.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				

			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Grebeg Gethuk dan Grebeg Besar	2	19.800.000	2 Kegiatan	21.780.000	34.830.000	2 Kegiatan	23.958.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval 17 agustus	1	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000	12.100.000	1 Kegiatan	13.310.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.800.000		21.780.000	19.292.000		23.958.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	peren serta masyarakat dalam pembangunan	12	19.800.000	4 Lomba	21.780.000	19.292.000	3 Jenis Lomba	23.958.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			14.300.000		15.730.000	21.805.000		17.303.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00 %			79,50 %					

1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Penyelenggaraan keg PKK	12	14.300.000	40 Orang	15.730.000	21.805.000	4 Kegiatan	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			16.500.000		18.150.000	29.172.000		19.965.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	kegiatan Pekan Olahraga antar Kelurahan	5	16.500.000	5 CabOr	18.150.000	29.172.000	1 Kegiatan	19.965.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			17.600.000		19.360.000	21.089.000		21.296.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan musyawarah rencanapembangunan tahunan	12	14.300.000	150 Orang	15.730.000	16.879.000	2 Kegiatan	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	kegiatan survey hasil musrenbang	12	3.300.000	28 Orang	3.630.000	4.210.000	12 RW	3.993.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.600.000		7.260.000	7.243.000		7.986.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	pemeliharaan taman-taman lingkungan	4	6.600.000	5 RTH	7.260.000	7.243.000	5 RTH	7.986.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			14.300.000		15.730.000	15.885.000		17.303.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	penyelenggaraan Posyandu balita	13	14.300.000	13 Posyandu Balita	15.730.000	15.885.000	13 Posyandu Balita	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			16.500.000		18.150.000	23.675.000		19.965.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Penyelenggaran Posyandu Lansia	12	16.500.000	12 Posyandu Lansia	18.150.000	23.675.000	12 Posyandu Lansia	19.965.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Program 100-0-100
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

	1.3.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			38.500.000		42.350.000	42.146.000		46.585.000				
1	1.3.46.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Pemeliharaan saluran air			95x0,4m		0	38 m2	0	RW. I	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.46.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Pemeliharaan infrastur kelurahan	12	38.500.000	12 Lokasi	42.350.000	42.146.000	12 RW	46.585.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.46.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Grill Tutup Saluran Air					0	4,2 m2	0	1 Lokasi	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.46.45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Pemeliharaan Talud			50 m2		0	15,5 m2	0	RW. IX	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.46.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Pemeliharaan saluran air			10 m2		0	126 m2	0	RW. IV	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0	7.896.000		0				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningatan K3			12 Peserta		7.896.000	1 Kegiatan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	5.787.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					

			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5 %			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Upaya Pencegahan HIV AIDS			50 Orang		5.787.000	50 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	10.365.000		0				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penanggulangan bahaya narkoba			50 Orang		10.365.000	50 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	22.511.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				

			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12 %			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,53			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Rapat Rutin PKK			30 Orang		22.511.000	40 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	36.480.000		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					

			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,3			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,3			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12 %			20.55 %					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesiapan tenaga Kantrantibmas			40 Anggota		36.480.000	40 Orang	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	5.404.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											

			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pembinaan KIM					5.404.000	2 Kegiatan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	7.395.000		0				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					

			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Tasyakuran Hari Jadi			150 Orang		7.395.000	1 Kegiatan	0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		773.960.000		851.356.000	1.004.186.000		936.491.600				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Rejowinangun Utara
URUSAN : Kelurahan Rejowinangun Utara

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan										
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			158.397.400		166.317.270	167.163.000		174.633.134		
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	12	15.600.000	4 item	16.380.000	28.800.000	12 bulan	17.199.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10	4.000.000	8motor, 1 pick up	4.200.000	2.500.000	11 unit	4.410.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan yang mendukung produktivitas kerja	12	54.893.000	11 item	57.637.650	44.939.000	12 bulan	60.519.533	Kel Rejo Utara	DAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	10.488.400	38 item	11.012.820	11.943.000	38 jenis	11.563.461	Kel Rejo Utara	DAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	9.510.000	2 item	9.985.500	13.467.000	2 jenis	10.484.775	Kel Rejo Utara	DAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan	12	1.768.000	4 item	1.856.400	2.960.000	7 jenis	1.949.220	Kel Rejo Utara	DAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12	5.340.000	2 item	5.607.000	7.380.000	4 jenis	5.887.350	Kel Rejo Utara	DAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	1.730.000	12 bulan	1.816.500	2.200.000	12 bulan	1.907.325	Kel Rejo Utara	DAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	25.068.000	12 bulan	26.321.400	27.574.000	12 bulan	27.637.470	Kel Rejo Utara	DAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	30.000.000	5 kali kegiatan	31.500.000	25.400.000	4 kegiatan	33.075.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			225.790.000		198.492.000	78.615.000		208.416.601		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1	130.280.000	0	136.794.000	0	1	143.633.700	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10	32.145.000	10 kendaraan	33.752.250	32.850.000	10 kendaraan	35.439.863	Kel Rejo Utara	DAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	9.925.000	15 item	10.421.250	7.270.000	14 jenis	10.942.313	Kel Rejo Utara	DAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	2.470.000	3 unit	2.593.500	16.495.000	4 jenis	2.723.175	Kel Rejo Utara	DAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	14.220.000	1 gedung kantor	14.931.000	22.000.000	745 m2	15.677.550	Kel Rejo Utara	DAU
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2	36.750.000	0	0	0		0	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			41.858.000		43.950.900	49.579.000		46.148.445		
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari			
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%			
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95			
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15			
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%			
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,27			
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18			
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	12	41.858.000	12 laporan	43.950.900	49.579.000	30 orang	46.148.445	Kel Rejo Utara	DAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup										
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			37.000.000		38.850.000	40.315.000		40.792.500		
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000		
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3			
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%			
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%			
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1	25.000.000	7 orang	26.250.000	27.660.000	21 RW	27.562.500	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terselenggaranya pengembangan kampung organik	1	12.000.000	1 kegiatan	12.600.000	12.655.000	3 kampung organik	13.230.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monitoring pengembangan Kampung Organik					0	4 laporan	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil										
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			19.156.000		20.113.800	40.919.000		21.119.490		
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%			
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%			
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%			
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945			
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%			
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%			
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya data kependudukan yang akurat	12	19.156.000	12 laporan	20.113.800	27.287.000	12 laporan	21.119.490	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya cetak surat pengantar			2 item		13.632.000	130 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			15.660.000		16.443.000	29.714.000		17.265.151		
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	1	4.255.000	1 kegiatan	4.467.750	12.030.000	110 orang	4.691.138	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terbinanya administrasi RT/RW	1	11.405.000	1 kegiatan	11.975.250	17.684.000	21 RW	12.574.013	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terwujudnya Pelantikan Ketua RT dan RW			1 kegiatan		0		0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan										
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			18.000.000		18.900.000	23.649.000		19.845.000		
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000		
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31			
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08			
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61			
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07			
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%			
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%			
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya Buku Perpustakaan	1	18.000.000	1 orang	18.900.000	23.649.000	1 perpustakaan	19.845.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			5.890.000		6.184.500	8.600.000		6.493.725		
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%			
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%			
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kelurahan	1	5.890.000	3 buku	6.184.500	8.600.000	1 dokumen	6.493.725	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			151.855.000		159.447.750	249.444.000		167.420.138		
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000		
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000		
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%			
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0			
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0			
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5			
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%			
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%			
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97			
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA			
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan	1	151.855.000	12 bulan	159.447.750	249.444.000	12 kegiatan	167.420.138	Kel Rejo Utara	DAU
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan Kelurahan			1 kegiatan		0	1 kegiatan	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan										
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			24.367.000		25.585.350	5.117.000		26.864.618		
					839,992,000		849,477,000			917,944,000		
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000		
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000		
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000		
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000		
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542		
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000		
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000		
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%			
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%			
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%			
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip daerah	12	24.367.000	3 jenis	25.585.350	5.117.000	12 bulan	26.864.618	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			21.465.000		22.538.250	16.185.000		23.665.163		
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000		
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000		
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%			
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%			
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%			
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1	9.635.000	1 kegiatan	10.116.750	0	1	10.622.588	Kel Rejo Utara	DAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	1	11.830.000	1 kegiatan	12.421.500	16.185.000	1 kegiatan	13.042.575	Kel Rejo Utara	DAU
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan										
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			37.020.000		38.871.000	53.114.000		40.814.550		
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828		
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22			
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14			
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%			
1	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasinya budaya daerah		0	1 kegiatan	0	0	1 kegiatan	0	Kel Rejo Utara	DAU
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	1	16.670.000	1 kegiatan	17.503.500	18.529.000	1 kegiatan	18.378.675	Kel Rejo Utara	DAU
3	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan kualitas budaya daerah	1	20.350.000	1 kegiatan	21.367.500	34.585.000	1 kegiatan	22.435.875	Kel Rejo Utara	DAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan										
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			26.360.000		27.678.000	43.725.000		29.061.900		
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100			
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat	1	26.360.000	3 kgt ; lomba mewarnai, lomba senam , lomba menu sehat	27.678.000	43.725.000	3 jenis lomba	29.061.900	Kel Rejo Utara	DAU
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			37.360.000		39.228.000	37.541.000		41.189.400		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%			
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%			
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pemberdayaan PKK	1	37.360.000	12 bulan	39.228.000	37.541.000	6 kegiatan	41.189.400	Kel Rejo Utara	DAU
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			40.000.000		42.000.000	52.904.000		44.100.000		
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7			
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional									
			#NAME?	6		5			4			
			#NAME?	15		13			11			
			#NAME?	20		19			17			
			#NAME?	NA		2			NA			
			#NAME?	20		NA			NA			
			Jumlah klub olah raga	183		183			183			
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36			
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	40.000.000	4 cabang olahraga	42.000.000	52.904.000	1 kegiatan	44.100.000	Kel Rejo Utara	DAU
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan										
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			25.000.000		26.250.000	28.154.000		27.562.500		
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan	1	20.000.000	1 kegiatan	21.000.000	22.341.000	2 kegiatan	22.050.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Tersusunnya data dan informasi pembangunan yang akurat	1	5.000.000	1 kegiatan	5.250.000	5.813.000	21 RW	5.512.500	Kel Rejo Utara	DAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup										
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.000.000		6.300.000	7.936.000		6.615.000		
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%			

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	6.000.000	1 kegiatan	6.300.000	7.936.000	3 RTH	6.615.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			36.000.000		37.800.000	39.400.000		39.690.000		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%			
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%			
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%			
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%			
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan kesehatan balita	1	36.000.000	18 posyandu	37.800.000	39.400.000	18 posyandu	39.690.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			14.000.000		14.700.000	11.667.000		15.435.000		
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%			
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%			
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kesehatan lansia	1	14.000.000	8 posyandu	14.700.000	11.667.000	8 posyandu	15.435.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	1.3.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			80.062.000		30.000.000	81.564.000		30.000.000		
1	1.3.47.78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	Terpeliharanya Gorong - gorong	248	61.512.000	1	10.000.000	0	1	10.000.000	Kel Rejo Utara	DAU
2	1.3.47.79	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	Terpeliharanya gorong-gorong RW XVI		0	1	10.000.000	0	1	10.000.000	Kel Rejo Utara	DAU
3	1.3.47.71	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VIII	15	18.550.000	1	10.000.000	40.000.000	73 m	10.000.000	Kel Rejo Utara	DAU
4	1.3.47.85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Pedesaan		0	100	0	12.564.000	21 RW	0	Kel Rejo Utara	DAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1.3.47.65	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya pemeliharaan gorong-gorong			100		0	78 m	0	Kel Rejo Utara	DAU
6	1.3.47.49	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW III			100		29.000.000	18 m	0	Kel Rejo Utara	DAU
7	1.3.47.43	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW I			100		0	58 m	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.765.000		6.053.250	7.900.000		6.355.913		
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%			
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1			
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%			
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda	1	5.765.000	1 kegiatan	6.053.250	7.900.000	1 kegiatan	6.355.913	Kel Rejo Utara	DAU
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			8.000.000		8.400.000	12.200.000		8.820.000		
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%			
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	1	8.000.000	1 kegiatan	8.400.000	12.200.000	1 kegiatan	8.820.000	Kel Rejo Utara	DAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan										
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.000.000		8.400.000	12.100.000		8.820.000		
			APK PAUD	66%		67%			68%			
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%			
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	1	8.000.000	3 kegiatan	8.400.000	12.100.000	5 Pos PAUD	8.820.000	Kel Rejo Utara	DAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika										
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	9.643.000		0		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000		
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000		
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000		
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%			
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :									
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3			
			Jumlah KIM	17		17			17			
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7			
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-			
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbentuknya KIM			1 kegiatan		9.643.000	1 kegiatan	0	Kel Rejo Utara	DAU
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0		0	0		0		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%			75.00%			
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%			9.45%			
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kel Rejo Utara			1 kegiatan		0		0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	14.100.000		0		
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000		
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%			
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4			
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan									
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15			
			LPM berprestasi									
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%			
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1			
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1			
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%			
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143			
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%			
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%			
			PKK Aktif	100%			100%		100%			
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terwujudnya Rapat Pleno Tim PKK			1 kegiatan		14.100.000	40 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	6.882.000		0		
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%			
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0			
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0			
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA			
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA			
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan MIras			1 kegiatan		6.882.000	50 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	0		0		
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100			
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100			
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50			
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102			
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90			
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%			
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%			
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS									
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya Pembinaan HIV AIDS			1 kegiatan		0	70 orang	0	Kel Rejo Utara	DAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup										
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0	15.765.000		0		
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%			
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksanya Lomba K3			1 kegiatan		15.765.000	1 kegiatan	0	Kel Rejo Utara	DAU
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan										
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	11.400.000		0		
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2			
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14			
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78			
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41			
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80			
			Cakupan tempat 100%	100		100			100			
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100			
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500		
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang			1 kegiatan		11.400.000	1 kegiatan	0	Kel Rejo Utara	DAU
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan										
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	84.840.000		0		
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%			
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%			
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya jasa petugas administrasi kependudukan					84.840.000	12 bulan	0	Kel Rejo Utara	DAU
			TOTAL		1.043.005.400		1.002.503.070	1.240.135.000		1.051.128.228		

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Magelang
URUSAN : Kelurahan Magelang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			0		0	13.195.000		0				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT/RW yang terlayani			80 Orang		7.895.000	65	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Monografi yang tersusun			12 Laporan		5.300.000	12	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	2.250.000		0				

			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12 %			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dikirim			75 orang		2.250.000	75	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	63.684.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya petugas jaga malam, pwtugas administrasi umum dan petugas administrasi kependudukan					63.684.000	12 bulan	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	0		0				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					

			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					
			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terdukungnya pelaksanaan pentas seni budaya daerah			1 Kegiatan		0	1	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			134.645.700		142.782.986	113.896.000		150.609.637				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Air, Telephon dan Internet	12	17.640.000	12 Bulan	18.522.000	20.700.000	12 bulan	19.448.100	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang dibayar pajaknya	6	2.310.000	7 Unit	2.425.500	2.308.000	7 unit	2.546.775	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kantor yang Terpelihara Kebersihannya	34	20.009.850	29 jenis ; 1 orang	21.010.343	22.695.000	12 bulan	22.060.860	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia	44	11.500.000	35 jenis	13.000.000	9.599.000	35 jenis	14.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	14.633.850	4 jenis	15.365.543	5.079.000	9 jenis	16.133.820	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik yang tersedia	4	1.575.000	5 jenis	1.653.750	1.803.000	6	1.736.438	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	12	5.000.000	2 jenis	5.500.000	5.940.000	3	6.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik yang disediakan	10	2.400.000	3 jenis	2.750.000	3.335.000	3	3.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis makanan dan minuman yang tersedia	12	18.215.400	15 Orang	19.126.170	17.237.000	3	20.082.479	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jenis perjalanan dinas yang dibiayai	5	24.465.000	4 kegiatan	25.688.250	25.200.000	1	26.972.663	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya petugas jaga malam, petugas administrasi umum dan petugas administrasi kependudukan	12	16.896.600	3 Orang	17.741.430	0	3	18.628.502	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			102.488.000		78.962.400	25.986.000		80.485.520				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	1	75.000.000	1 Unit	50.000.000	0	1	50.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	19.488.000	6 Unit	20.462.400	20.955.000	6	21.485.520	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	13	8.000.000	3 jenis	8.500.000	2.793.000	4	9.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			4 Jenis		2.238.000	5	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.930.650		8.327.183	10.663.000		8.743.542				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pos PAUD yang dibina	4	7.930.650	48 Kegiatan	8.327.183	10.663.000	1	8.743.542	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			64.174.750		67.383.488	131.764.000		71.227.662				

					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas kebersihan sampah dan kebersihan sungai di Kelurahan Magelang	57	54.174.750	5 Orang	56.883.488	131.764.000	5	59.727.662	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung Organik yang terpelihara	6	10.000.000	5 kampung	10.500.000	0	4 kampung organik	11.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terbinanya kampung organik			5 kampung		0	4	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			9.500.000		10.000.000	3.000.000		10.500.000				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah pertemuan yang terselenggara			150 orang		3.000.000	4	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksanya pembinaan administrasi RT/RW	65	9.500.000	160 orang	10.000.000	0	13 RW	10.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			0		0	23.342.000		0				

					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67 %			20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikelola			12 Bulan		23.342.000	1 perpustakaan	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			2.394.000		2.513.700	0		2.639.385				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah buku profil yang tersedia	1	2.394.000	5 buku	2.513.700	0	1 dokumen	2.639.385	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			103.572.000		108.750.600	171.927.000		114.188.130				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					

			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	103.572.000	12 Laporan	108.750.600	150.699.000	12 kegiatan	114.188.130	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya lomba poskamling			25 Orang		21.228.000	1 lomba 1 jaga malam	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			8.000.000		8.500.000	12.300.000		9.000.000				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terpilihnya juara tingkat kelurahan	12	8.000.000	2 Kegiatan	8.500.000	12.300.000	1	9.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.000.000		14.000.000	0		16.000.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				

			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jenis arsip yang dikelola	12	12.000.000	12 Bulan	14.000.000	0	12 bulan	16.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.000.000		7.500.000	10.439.000		8.000.000				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00 %		73.00 %			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19 %		42,59 %			49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya pembinaan rohani	50	7.000.000	200 Orang	7.500.000	10.439.000	1 kegiatan	8.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			18.500.000		20.500.000	24.113.000		22.000.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Festival Grebeg Gethuk	1	12.500.000	1 Kegiatan	14.000.000	13.140.000	1 kegiatan	15.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Karnaval Budaya	1	6.000.000	1 Kegiatan	6.500.000	10.973.000	1 kegiatan	7.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			12.000.000		15.000.000	8.081.000		17.500.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah lomba yang dilaksanakan	13	12.000.000	200 Orang	15.000.000	8.081.000	(jenis lomba)	17.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			13.000.000		13.650.000	0		14.332.500				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00 %			79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta pembinaan	12	13.000.000	1 Kegiatan	13.650.000	0	(kegiatan)	14.332.500	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			15.023.400		15.774.570	25.923.000		16.563.299				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					

1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	5	15.023.400	5 Cabang	15.774.570	25.923.000	1 kegiatan	16.563.299	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			13.500.000		15.000.000	11.905.000		16.025.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang dan pra Musrenbang	140	9.500.000	150 Orang	10.500.000	9.245.000	2 kegiatan	11.025.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Lokasi yang tersurvey	12	4.000.000	12 RW	4.500.000	2.660.000	13 RW	5.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			9.072.000		9.525.600	12.750.000		10.001.880				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang Terbina	360	9.072.000	450 Balita	9.525.600	12.750.000	13 posyandu balita	10.001.880	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			7.927.500		8.500.000	13.860.000		9.500.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					

1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Poslansia yang Terbina	385	7.927.500	485 Orang	8.500.000	13.860.000	11 posyandu lansia	9.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			75.000.000		105.000.000	73.600.000		30.000.000				
1	1.3.48.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Infrastruktur yang terpelihara					0	1	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.48.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase yang terpelihara	80	50.000.000	60 m	65.000.000	29.000.000	52	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.48.27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Panjang Jalan yang Terpelihara					26.000.000	132	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.48.37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Panjang Jalan yang Terpelihara	70	25.000.000	60 m	40.000.000	18.600.000	70	30.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	1.3.48.38	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	Panjang Jalan Yang Terpelihara			60 m		0	70	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	9.854.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12 %			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,529			59%					

			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Kelompok TP. PKK yang dibina			35 Orang		9.854.000	12	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	0		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Peserta Sosialisasi			80 Orang		0	80	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs

	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	0		0			
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%				
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0				
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0				
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA				
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA				
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan			80 orang		0	70 orang	0	Keluraha n Magelan g	Dana Alokasi Umum	Akomoda si Musrenba ng
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	0		0			
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000			
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000			
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000			
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%				
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya pembinaan sumber daya komunikasi dan informasi			40 Orang		0	1	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			0		0	0		0				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00 %		96.00 %			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Organisasi Pemuda Yang Terbina			52 Orang		0	2 kegiatan	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	0		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00 %			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum Anak Yang Terbina			60 Orang		0	1	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.492.550		5.767.178	0		6.055.536				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Magelang	1	5.492.550	100 m2	5.767.178	0	1 RTH	6.055.536	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
			TOTAL		621.220.550		657.437.705	762.532.000		613.372.091				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Panjang
URUSAN : Kelurahan Panjang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR 5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	3.300.000		0				
					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,5294118			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%			100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					

			PKK Aktif	100%			100%		100 %					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya pertemuan rutin PKK kelurahan			12 kali		3.300.000	68 orang	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	22.110.000		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			8					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26 %		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penjaga keamanan kantor dan deputasi yang dikirim			30 anggota linmas		22.110.000	1 orang	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	6.135.000		0				
			Jumlah gedung kesenian	1		1			2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41					

			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80					
			Cakupan tempat 100%	100		100			100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100					
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan tirakatan yang dilaksanakan			70 orang		6.135.000	1 kegiatan	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			107.568.000		110.892.000	124.731.000		113.592.000				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, telepon dan internet	12	15.000.000	12 bulan	15.500.000	17.160.000	12 bulan	16.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan yang diurus	6	1.800.000	7 kendaraan dinas	1.800.000	2.388.000	7 unit	1.800.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	35.000.000	2 tenaga kebersihan dan alat kebersihan	37.000.000	44.113.000	12 bulan	39.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	37	5.376.000	40 jenis	6.000.000	9.958.000	42 jenis	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan	10	7.646.000	12000 lembar	7.646.000	9.232.000	2 jenis	7.646.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	5	1.474.000	6 item	1.474.000	1.641.000	6 jenis	1.474.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	12	1.600.000	2 media cetak	1.600.000	5.040.000	2 jenis	1.700.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah isi ulang bahan bakar/pelumas yang dibeli	8	1.400.000	3 jenis	1.600.000	2.162.000	12 bulan	1.700.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah persediaan makan dan minum	12	8.272.000	16 pegawai	8.272.000	11.617.000	12 bulan	8.272.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6	30.000.000	4 perjalanan dinas	30.000.000	21.420.000	5 kegiatan	30.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			14.500.000		16.500.000	36.364.000		16.500.000				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/motor yang dipelihara	5	11.500.000	6 kendaraan dinas	12.500.000	19.074.000	6 unit	12.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10	3.000.000	4 jenis	4.000.000	4.450.000	4 jenis	4.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung terpelihara					12.840.000	1 gedung	0	Kantor Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			91.634.000		91.634.000	127.544.000		94.634.000				
					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3 %					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas pengambilan sampah	12	76.634.000	11 orang	76.634.000	117.667.000	8 RW	76.634.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik dipelihara	3	15.000.000	3 kampung organik	15.000.000	9.877.000	3 kampung organik	18.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			5.000.000		6.000.000	4.414.000		6.000.000				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100 %					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100 %					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100 %					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					

			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100 %					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT dan RW yang diberi pengarahan	70	5.000.000	68 orang	6.000.000	0	68 orang	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan kependudukan tersusun					4.414.000	12 bulan	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			6.000.000		7.000.000	6.219.000		7.000.000				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	68	6.000.000	68 orang	7.000.000	6.219.000	8 RW	7.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			4.000.000		7.000.000	10.326.000		7.500.000				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,1					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			62					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50 %		16.67%			20.83%					

1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan	12	4.000.000	1 orang	7.000.000	10.326.000	1 perpustakaan	7.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			2.870.000		3.500.000	2.238.000		3.500.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100 %					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen data Kelurahan yang tersusun	1	2.870.000	2 dokumen	3.500.000	2.238.000	1 dokumen	3.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			22.972.000		22.972.000	2.300.000		22.972.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dikelola	12	22.972.000	3 jenis	22.972.000	2.300.000	12 bulan	22.972.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		0	7.685.000		0				

			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan syawalan terselenggara			1 kegiatan		7.685.000	1 kegiatan	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			12.000.000		12.000.000	26.490.000		12.000.000				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah gunungan Grebek Gethuk dan pengiring yang dikirim	1	12.000.000	1 kelompok	12.000.000	12.650.000	1 kegiatan	12.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah mobil hias yang dikirim					13.840.000	1 buah	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			8.000.000		10.000.000	6.196.000		11.000.000				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					

1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah jenis lomba BBGRM yang dilaksanakan	2	8.000.000	2 jenis lomba	10.000.000	6.196.000	3 jenis lomba	11.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			11.600.000		13.000.000	4.193.000		13.000.000				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50 %		79,00%			79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pelatihan untuk ibu2 dan TP PKK	12	11.600.000	1 kegiatan	13.000.000	4.193.000	3 kegiatan	13.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			8.785.000		9.000.000	19.645.000		10.000.000				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis/cabang olahraga yang dilombakan di Porkel	60	8.785.000	4 cabang olahraga	9.000.000	19.645.000	1 kegiatan	10.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												

	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			10.226.000		10.226.000	13.863.000		10.226.000				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkel	1	7.226.000	90 orang	7.226.000	10.662.000	2 kegiatan	7.226.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	1	3.000.000	8 RW	3.000.000	3.201.000	8 RW	3.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.514.000		6.000.000	2.434.000		6.000.000				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	1	5.514.000	12 bulan	6.000.000	2.434.000	1 RTH	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			7.500.000		7.500.000	22.680.000		10.300.000				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang diberi PMT	9	7.500.000	9 Posyandu	7.500.000	22.680.000	9 posyandu balita	10.300.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			6.480.000		6.480.000	16.800.000		8.640.000				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					

1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia yang dibina dan diberi PMT	6	6.480.000	6 Posyandu Lansia	6.480.000	16.800.000	6 posyandu lansia	8.640.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			10.000.000		10.000.000	0		10.000.000				
1	1.3.49.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Panjang jalan kampung terpelihara					0	8 RW	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
2	1.3.49.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Panjang jalan terpelihara/paving	700	10.000.000	80 m2	10.000.000	0	175 m2	10.000.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			100.662.000		100.662.000	152.111.000		100.662.000				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15 %					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			1					

			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah laporan stabilitas keamanan yang disusun	12	100.662.000	12 laporan	100.662.000	152.111.000	12 kegiatan	100.662.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	3.657.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37 %		50.00%			52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah forum anak yang dibina			1 kelompok		3.657.000	1 kegiatan	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	63.628.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100 %					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah tenaga Front Office dan TU yang tersedia					63.628.000	2 orang	0	Kantor Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		435.311.000		450.366.000	685.063.000		463.526.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Kelurahan Gelangan
URUSAN : Kelurahan Gelangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan												
	4.1.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			0		0	84.840.000		0				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%			100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%			72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya jasa petugas administrasi			1 Orang		84.840.000	12 bulan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			115.267.020		126.793.722	108.198.000		139.473.095				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12	14.781.360	12 bulan	16.259.496	16.200.000	12 bulan	17.885.446	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	100	2.087.250	8 kendaraan dinas	2.295.975	2.500.000	8 unit	2.525.573	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	100	20.923.320	23 alat / bahan pembersih	23.015.652	24.210.000	12 bulan	25.317.217	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100	13.310.000	23 jenis	14.641.000	10.142.000	25 jenis	16.105.100	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100	13.248.290	2 jenis	14.573.119	5.400.000	2 jenis	16.030.431	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	100	2.420.000	3 komponen listrik	2.662.000	1.824.000	3 jenis	2.928.200	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	100	1.306.800	2 jenis	1.437.480	5.400.000	2 jenis	1.581.228	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		0	2 jenis	0	3.060.000	12 bulan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan harian kantor	100	10.890.000	10 pegawai	11.979.000	12.962.000	12 bulan	13.176.900	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	36.300.000	4 kegiatan	39.930.000	26.500.000	4 kegiatan	43.923.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			46.107.050		50.717.755	43.400.000		55.789.531				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	13.987.600	482 m2	15.386.360	15.000.000	482 m2	16.924.996	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas operasional	100	22.288.200	7 kendaraan dinas	24.517.020	22.750.000	7 unit	26.968.722	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	9.831.250	20 unit	10.814.375	5.200.000	8 jenis	11.895.813	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Genset dan Mesin potong rumput			3 Unit		450.000	2 jenis	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan alat bantu keamanan					0	1 paket	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			82.180.780		90.398.858	68.945.000		99.438.744				

					37,792,592,000		30,984,117,020			35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3			6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%			92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%			6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sampah dan pemeliharaan mobil sampah		66.729.080	3 orang dan 1 unit mobil sampah	73.401.988	54.756.000	10 RW	80.742.187	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pengembangan kampung organik		15.451.700	1 RW	16.996.870	10.000.000	6 kampung organik	18.696.557	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev evaluasi pengelolaan kampung organik			5 kampung organik		4.189.000	4 laporan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil												
	2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			13.833.380		15.456.718	6.731.000		17.252.390				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%			100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%			100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%			100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940			945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%			100%					

			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%			70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%			80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan		6.600.000	10 RW dan 65 RT	7.500.000	0	90 orang	8.500.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan yang akurat	100	7.233.380	12 Bulan	7.956.718	6.731.000	12 laporan	8.752.390	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			11.746.680		12.921.348	13.779.000		14.213.483				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan RT/RW	1	6.725.180	10 RW dan 65 RT	7.397.698	8.650.000	10 RW	8.137.468	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelantikan dan Pertemuan Rutin Pengurus LPM/Tokoh Masyarakat	30	5.021.500	35 orang	5.523.650	5.129.000	35 orang	6.076.015	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan												
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			6.171.000		6.788.100	11.569.000		7.466.910				
					3,138,426,000		3,179,000,000			3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28			12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26			8,08					

			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87			61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7			26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%			4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%			20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terlaksananya jasa petugas pengelolaan buku perpustakan	264	6.171.000	2 orang	6.788.100	11.569.000	1 perpustakaan	7.466.910	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			3.025.000		3.327.500	3.000.000		3.660.250				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	100	3.025.000	4 buku	3.327.500	3.000.000	1 dokumen	3.660.250	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			123.988.700		136.387.570	183.995.000		150.026.327				
			SATPOL PP		2,884,343,000		3,172,777,000			3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000		292,348,000			312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%			80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0			0					

			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0			0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4			5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%			2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%			12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91			0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA			NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA			NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat		123.988.700	12 bulan	136.387.570	153.085.000	12 kegiatan	150.026.327	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya keamanan lingkungan					30.910.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.106.200		5.616.820	5.125.000		6.178.502				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%			97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1			1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%			5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan/karang taruna		5.106.200	40 orang	5.616.820	5.125.000	1 kegiatan	6.178.502	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			29.060.570		31.966.627	3.865.000		35.163.290				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	16	29.060.570	12 bulan	31.966.627	3.865.000	12 bulan	35.163.290	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0		0	9.568.000		0				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000		60,500,000			66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000		137,000,000			150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%			77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%			75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%			49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			90 orang		9.568.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												

	2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			13.733.500		15.106.850	29.995.000		16.617.535				
			DISPORA		2,200,359,320		2,513,330,493			2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77			16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13			14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%			100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya partisipai karnaval hari kemerdekaan RI	70	13.733.500	1 kegiatan	15.106.850	15.655.000	1 kegiatan	16.617.535	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya grebek gethuk dalam rangka hari jadi Kota Magelang			1 kegiatan		14.340.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.890.000		11.979.000	14.180.000		13.176.900				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100			100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong	100	10.890.000	3 kegiatan	11.979.000	14.180.000	2 jenis lomba	13.176.900	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			20.055.750		22.061.325	10.565.000		24.267.458				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%			26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%			30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%			79,50%					

1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		20.055.750	70 orang	22.061.325	10.565.000	1 kegiatan	24.267.458	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			22.022.000		24.224.200	23.240.000		26.646.620				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6			7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional											
			#NAME?	6		5			4					
			#NAME?	15		13			11					
			#NAME?	20		19			17					
			#NAME?	NA		2			NA					
			#NAME?	20		NA			NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183			183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35			36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Porkel	1	22.022.000	5 Cabor	24.224.200	23.240.000	1 kegiatan	26.646.620	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			13.896.850		15.286.535	18.810.000		16.815.189				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersusunnya daftar rencana kegiatan pembangunan	100	10.151.900	1 kegiatan	11.167.090	14.200.000	2 kegiatan	12.283.799	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	100	3.744.950	1 kegiatan	4.119.445	4.610.000	10 RW	4.531.390	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.046.370		6.651.007	5.728.000		7.316.108				
			Luas RTH Kota	18%		18%			18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau	100	6.046.370	3 taman	6.651.007	5.728.000	3 RTH	7.316.108	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Sejuta Bunga
	1,3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1.3.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			0		0	116.950.000		0				
1	1.3.50.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksanannya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			140 m		63.000.000	140 m	0	RW. IV Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan			95 m		53.950.000	95 m	0	RW. V Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.50.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			45 m		0	45 m	0	RW. VI Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
4	1.3.50.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan			10 RW		0	10 RW	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	7.090.000		0				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%			52.63%					

1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembentukan forum anak		0	40 Orang	0	7.090.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0	10.900.000		0				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari			3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%			98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41			7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33			15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%			97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27			77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%			20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15			18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pengganti transport dan rapat koordinasi bagi anggota linmas		0	60 orang	0	10.900.000	60 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			0		0	5.920.000		0				
				-	5,139,479,000	-	3,209,799,000		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln	37,000,000		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000		260,000,000			320,000,000				

			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%			90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan			60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan			12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3			3					
			Jumlah KIM	17		17			17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7			7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-			-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi			2 Kegiatan		5.920.000	2 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			0		0	11.070.000		0				

					1,730,060,000		1,824,389,000			1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%			45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4			4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan											
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13			15					
			LPM berprestasi											
			Tingkat kota	47%		0,52941			59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1			peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%			59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143		143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00 %		100.00%			100.00 %					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%			75%					
			PKK Aktif	100%			100%		100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin tim penggerak PKK Kelurahan			35 orang		11.070.000	35 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	1.5.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			0		0	0		0				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%			94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0			0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0			0					

			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA			NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA			NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran miras dan narkoba			40 Orang		0	40 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1,2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan												
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			0		0	8.550.000		0				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%			85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%			96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%			90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%			29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya pemberian makanan dan gizi kepada Kelompok Posyandu Balita dan PAUD			14 posyandu balita dan 8 PAUD		8.550.000	14 posyandu balita	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			0		0	7.900.000		0				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%			80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%			29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbinannya posyandu Lansia			10 posyandu lansia		7.900.000	11 posyandu lansia	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			0		0	4.730.000		0				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100			100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100			100					

			Angka Kesakitan DBD	<50		<50			<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103			<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90			90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%			<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%			100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS											
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksannya sosialisasi mengenai HIV/AIDS			30 orang		4.730.000	40 orang	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup												
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			0		0	10.721.000		0				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%			80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat dan Rapi			1 kegiatan		10.721.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan												
	1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			0		0	5.700.000		0				
			APK PAUD	66%		67%			68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%			55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya kegiatan pendidikan anak usia dini			80 orang		5.700.000	8 Posyandu	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan												
	2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		0	7.120.000		0				

			Jumlah gedung kesenian	1		1			2						
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13			14						
			Cakupan kajian seni 50%	76		77			78						
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39			41						
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79			80						
			Cakupan tempat 100%	100		100			100						
			Cakupan organisasi 34%	100		100			100						
			DISPORA		92,000,000		105,800,000			30,417,500					
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksanakannya Kegiatan Tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang			1 Kegiatan		7.120.000	1 kegiatan	0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum			Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		523.130.850		575.683.935	842.184.000		633.502.332					

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Inspektorat
URUSAN : Inspektorat

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan												
	4.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			331.400.000		0	328.056.000		0				
1	4.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000	3.250.000	1000 surat	0	3.000.000	1000 surat	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	4.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12	13.000.000	12 kali	0	52.000.000	12	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21	10.000.000	22 unit	0	10.524.000	22 unit	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12	60.000.000	12 kali	0	65.099.000	12 kali	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyedaiaan Sarana dan Prasarana Kantor	15	2.750.000	15jenis	0	3.856.000	15 jenis dan HonorPetugas Keamanan dan Petugas Kebersihan Jumlah 4 Orang	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	4.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyedaian Alat Tulis kantor	14	11.000.000	14 jenis	0	11.513.000	14 jenis	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	6.500.000	3 jenis	0	6.550.000	3 jenis	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	50	20.000.000	4 Jenis	0	5.400.000	4 jenis	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6	900.000	6 Kali	0	984.000	6 kali	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22	44.000.000	22 Kegiatan	0	41.650.000	22 kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
11	4.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15	160.000.000	15 Keg	0	127.480.000	15 kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			210.000.000		0	232.556.000		0				
1	4.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5	15.000.000	5 Jenis	0	3.362.000	5 jenis	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21	165.000.000	22 unit	0	210.000.000	22 unit	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63	30.000.000	63 buah	0	12.694.000	63 buah	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			88 buah		3.500.000	88 buah	0	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	4.2.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya perawatan mebeler			50 buah		3.000.000	50 buah	0	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Rencana
	4.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			40.700.000		0	35.924.000		0				
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB		BB			B					
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%		70%			75%					
			Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	70%?		80%?			90%?					
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	50%		60%			70%					
			Penurunan kasus temuan LKPD	1		Rp 1			0					
			Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	90%		95%			100%					
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%		70%			80%					
			Nilai survey kepuasan penggunan layanan PD	95		Rp 95			95					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	75%		70%			65%					
			Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	50%		40%			30%					
			Persentase implementasi SPIP	78%		84%			90%					
1	4.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4	12.500.000	4 laporan	0	10.653.000	4 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2	2.200.000	2 laporan	0	3.387.000	2 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3.300.000	1 laporan	0	3.466.000	1 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	4.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2	4.400.000	2 dokumen	0	4.551.000	2 dokumen	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	4.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2	15.000.000	2 dokumen	0	10.475.000	2 dokumen	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1	3.300.000	1 dokumen	0	3.392.000	1 dokumen	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.2.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1.055.489.000		0	1.579.910.000		0				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%			45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%			85%					
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%			40%					
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB			B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%			65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%			95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%			30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%			100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%			100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%			80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%			80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP											
1	4.2.15.46	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Meningkatkan Integritas bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel					115.790.000	1 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Pemberantasan Korupsi
2	4.2.15.37	Evaluasi LKJiP	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD			2 Kegiatan		45.794.000	2 kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.15.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80	400.166.000	80 obyek pemeriksaan	0	387.370.000	50 Paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.2.15.2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Audit kasus, Audit Kinerja, Audit Tematik, Probity Audit, pengawasan SPIP	12	101.000.000	8 obyek pemeriksaan	0	144.795.000	14 paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
5	4.2.15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000	240.162.000	1000 Rekomendasi	0	215.998.000	500 Rekomendasi	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1	42.833.000	1 keg	0	0	0 Kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.2.15.10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD OPD dan Reviu BUD	2	53.456.000	2 kegiatan	0	63.885.000	2 Kegiatan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
8	4.2.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan dan verifikasi aksi PPK	2	117.578.000	4 Laporan	0	57.000.000	4 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
9	4.2.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2	46.531.000	...jumlah ASN	0	22.059.000	2 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
10	4.2.15.33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya REVIU RKPD, RENJA, RKA	2	53.763.000	4 laporan	0	90.953.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
11	4.2.15.34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Terevaluasinya pelaksanaan PBJ dan Penyerapan Anggaran			3 kegiatan		46.000.000	4 Paket	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
12	4.2.15.35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aparatur negara			12 laporan		182.772.000	2 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Pemberantasan Korupsi
13	4.2.15.40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Penyajian data hasil pengwasan sebagai bahan pertimbangan keputusan kepada pimpinan			2 laporan		30.000.000	2 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
14	4.2.15.42	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH	Teselenggaranya sosialisasi			1 kali sosialisasi		0	1 kali sosialisasi	0	Inspektorat	Dana Alokasi Umum	90	Pemberantasan Korupsi
15	4.2.15.43	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	Terselesaikannya aduan dan permasalahan			4 laporan		177.494.000	6 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
	4.2.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			198.443.000		0	239.911.000		0				
			Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2		Level 3			Level 3					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	65%		70%			75%					
			Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	70%		75%			80%					
1	4.2.16.3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan audiwan	18	36.426.000	34 laporan hasil penilaian angka kredit jabfung	0	31.662.000	38 Laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.2.16.6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tercapainya Kapabilitas APIP yang lebih baik	25	162.017.000	Leveling Kapabilitas APIP mendekati level 4	0	149.537.000	Level 3	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.16.8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Terlayaninya OPD dalam penyelesaian masalah			12 laporan		58.712.000	12 Laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	4.2.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			21.000.000		0	100.376.000		0				
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%		70%			75%					
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?		70%?			75%?					
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%		85%			90%					
1	4.2.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3	21.000.000	3 dokumen	0	19.880.000	1 perwal	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.2.17.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi			2 laporan		41.009.000	2 laporan	0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	4.2.17.11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi			4 laporan		39.487.000	4 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Pemberantasan Korupsi
	4.2.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal			0		0	210.175.000		0				
			prosentase implementasi SPIP											
1	4.2.18.1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD			6 kegiatan		51.805.000	5 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.2.18.2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	evaluasi dan hasil pembinaan pengawasan			4 kegiatan		111.158.000	4 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
3	4.2.18.3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	sosialisasi diagnostic assesment SPIP			2 laporan		47.212.000	2 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
			TOTAL		1.857.032.000		0	2.726.908.000		0				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

URUSAN : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			793.161.000		826.691.000	799.351.000		861.227.000				
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12	719.000	91 materai, 10 paket pengiriman	755.000	677.000	99 materai, 10 paket/pengiriman	793.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	101.430.000	2 nomor rekening telepon dan 1 rekening listrik	106.501.000	91.200.000	2 nomor rekening telepon, 1 nomor rekening listrik	111.826.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27	9.019.000	28 kendaraan dinas	9.470.000	9.350.000	26 kendaraan dinas/operasional	9.944.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 12	129.500.000	11 orang, 24 bendel	130.000.000	164.245.000	11 orang, 24 bendel	130.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	26	62.208.000	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	65.318.000	75.000.000	23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	68.584.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	17.081.000	30 item	17.935.000	18.000.000	28 item	18.832.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	36.586.000	3 item	38.415.000	16.232.000	3 item	40.336.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.250.000	14 komponen	5.512.000	5.500.000	10 komponen listrik	5.788.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	12	7.056.000	5 jenis	7.408.000	7.080.000	5 jenis	7.779.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12	1.523.000	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	1.598.000	14.002.000	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	1.679.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	30.734.000	47 pegawai, 20 rapat, 150 orang tamu	32.271.000	33.000.000	50 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	33.885.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	328.582.000	45 perjalanan dinas luar daerah	345.012.000	251.960.000	111 perjalanan dinas luar daerah	362.263.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	12	63.473.000	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga malam	66.496.000	113.105.000	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga keamanan	69.518.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			335.937.000		351.934.000	298.009.000		367.931.000				
1	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	12	31.500.000	3 jenis pemeliharaan gedung	33.000.000	35.619.000	3 jenis pemeliharaan gedung	34.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27	206.325.000	5 unit mobil dan 20 unit kendaraan	216.150.000	176.840.000	26 kendaraan dinas/operasional	225.975.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11	18.034.000	11 item	18.893.000	19.400.000	8 item	19.752.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14	74.828.000	14 item	78.391.000	60.750.000	5 item	81.954.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	12	5.250.000	4 item	5.500.000	5.400.000	4 item	5.750.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			66.200.000		67.200.000	66.917.000		67.200.000				
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12	14.500.000	12 laporan	14.500.000	15.580.000	12 laporan	14.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	8.500.000	6 buku	9.000.000	7.580.000	2 dokumen	9.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	9.000.000	5 buku	9.500.000	7.650.000	1 dokumen	9.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2	10.200.000	2 dokumen	10.200.000	12.928.000	2 dokumen	10.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2	18.000.000	2 dokumen	18.000.000	17.390.000	2 dokumen	18.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	5.789.000	1 dokumen	6.000.000	Bappeda kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi			88.000.000		97.000.000	0		106.000.000				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%			95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%			100%					
1	4.3.15.38	Penyusunan Dokumen Analisis Data Daerah	Tersusunnya dokumen analisis data daerah					0	1 Dokumen (6 keg)	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
2	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40	88.000.000	40 buku	97.000.000	0	2 dokumen (4 keg)	106.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana

3	4.3.15.39	Penyusunan Dokumen Spasial Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Spasial terkait Perencanaan Pembangunan Daerah					0	1 Dokumen, 1 Aplikasi	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			14.868.000		15.576.000	6.918.000		16.284.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1	14.868.000	1 kegiatan	15.576.000	6.918.000	1 kegiatan	16.284.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	Rp 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan												
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan			150.000.000		160.000.000	0		170.000.000				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		Rp 4			Rp 4					
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1	150.000.000	4 rakor dan 2 fasilitasi penguatan kelembagaan, 2 workshop	160.000.000	0	1 keg	170.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			1.486.000.000		1.544.000.000	1.928.952.000		1.594.000.000				

1	4.3.21.78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	Tersusunnya dokumen rancangan teknokratis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026					69.003.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	150	296.000.000	2 dokumen	297.000.000	290.758.000	1 dokumen	298.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
3	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BA Musrenbang tingkat Kelurahan, kecamatan dan Kota	200	125.000.000	2 kegiatan	130.000.000	148.640.000	1 dokumen	130.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	4.3.21.10	Penetapan RKPD	Dokumen RKPD Kota Magelang 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	150	36.000.000	1 perwal	37.000.000	33.729.000	1 dokumen	38.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
5	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	100	17.000.000	4 laporan	18.000.000	17.000.000	4 kegiatan	19.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
6	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Berita acara hasil Forum OPD dan FGD	1	118.000.000	1 forum 10 FGD	120.000.000	112.904.000	1 Berita Acara Hasil Forum OPD, 10 Berita acara hasil FGD	122.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
7	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	20	34.000.000	4 media publikasi	34.000.000	54.703.000	3 media publikasi	35.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
8	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Rancangan Renja OPD terverifikasi	46	73.000.000	29 OPD	74.000.000	110.130.000	29 OPD	75.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	150	124.000.000	1 dokumen	126.000.000	132.665.000	1 dokumen	128.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
10	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	100	32.000.000	1 dokumen perwal	34.000.000	29.805.000	1 dokumen	36.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM

11	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Terverifikasinya Rancangan Renja OPD Tahun 2021	48	296.000.000	29 OPD	297.000.000	109.630.000	29 OPD	298.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
12	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4	46.000.000	4 laporan	51.000.000	57.000.000	4 laporan	56.000.000	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
13	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	300	170.000.000	200 buku Standar Harga, 200 buku Standar Biaya	195.000.000	118.000.000	2 dokumen	215.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
14	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50	119.000.000	4 Laporan	131.000.000	95.000.000	4 kegiatan	144.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
15	4.3.21.49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis					124.668.000	Rp 100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	4.3.21.70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan			1 dokumen		0	100 %	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
17	4.3.21.79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan					425.317.000	6 kegiatan	0	Kota Magelang	Banprov & DAU	80	SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan, Pemberantasan Korupsi

	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			130.000.000		140.000.000	171.446.000		150.000.000				
1	4.3.22.67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	tersedianya dokumen monev MKSB			1 dokumen		52.446.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	12	130.000.000	1 dokumen	140.000.000	119.000.000	1 dokumen	150.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.22.70	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Review Perda Branding Kota Magelang	Terwujudnya dasar hukum pelaksanaan branding Kota Magelang dalam implementasi program dan kegiatan					0	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Kota Sejuta Bunga
4	4.3.22.71	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Kreatif	Terwujudnya arahan pengembangan sektor industri kreatif di Kota Magelang					0	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya			165.000.000		176.000.000	416.721.000		186.000.000				
					5,025,879,000		5,289,509,000			5,767,456,000				
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%		100%			100%					
1	4.3.23.950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Tersusunnya Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah					113.965.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

2	4.3.23.949	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Kependudukan					0	1 Dokumen Perencanaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	36	130.000.000	1 dokumen	135.000.000	0	Rp 36	140.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
4	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	20	35.000.000	4 laporan	41.000.000	150.362.000	Rp 20	46.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.3.23.954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan					152.394.000	1 Dokumen Perencanaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana, Program prioritas RPJM
6	4.3.23.49	Monitoring dan Evaluasi SDG's	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang			1 dokumen laporan		0	4 Triwulan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	SDGs
7	4.3.23.46	Penyusunan Dokumen RAD Kota Inklusif	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kota Inklusif					0	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	SDGs
8	4.3.23.948	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Magelang Kota Sehat	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Magelang Kota Sehat					0	1 Dokumen Perencanaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	SDGs, Rencana
9	4.3.23.951	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Masalah Gizi (PMG)	Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan Penanganan Masalah Gizi (PMG)					0	2 dokumen laporan	0	Kota Magelang	Banprov & DAU	95	Kota Layak Anak, SDGs
10	4.3.23.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Bela Negara					0	1 Dokumen Perencanaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
11	4.3.23.952	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Bela Negara	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Bela Negara					0	1 Dokumen Perencanaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana

	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			0		0	420.300.000		0				
			cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%		100%			100%					
1	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis di Kota Magelang					80.750.000	1 Dokumen	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	4.3.26.45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di Kota Magelang					115.750.000	6 Kali	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.26.47	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Sidotopo Kota Magelang					223.800.000	1 Dokumen	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			0		0	45.726.000		0				
			cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%		100%			100%					
1	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah			29 OPD		35.475.000	29 OPD	0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

2	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda			37 Pegawai		10.251.000	37 pegawai	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
			TOTAL		3.229.166.000		3.378.401.000	4.154.340.000		3.518.642.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			308.009.680		349.441.616	887.324.000		398.169.939				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	134.350.000	12 laporan	141.050.000	108.736.000	12 laporan	148.100.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	173.659.680	1 perwal	208.391.616	0	1 perwal	250.069.939	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.4.15.137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD					281.145.000	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan			12 laporan		48.542.000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD			4 laporan		30.022.000	4 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi			29 OPD		204.763.000	29 OPD	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK			7 Laporan		73.224.000	7 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.138	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah					140.892.000	1 Perda	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			9.646.349.840		3.161.770.096	2.082.496.000		3.594.617.516				
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	450.000.000	1 raperda	495.000.000	350.107.000	1 Raperda	544.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	351.216.000	3 dokumen	421.459.000	274.771.000	1 dokumen	465.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	3.898.700.000	1 raperda	428.438.000	297.489.000	1 Raperda	475.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentangpenjabaran perubahan APBD	4	3.853.200.000	2 raperwal	423.850.000	348.146.000	2 Raperwal	466.239.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	248.200.000	2 dokumen	273.100.000	182.517.000	2 dokumen	300.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	137.659.000	2 dokumen	165.191.000	92.086.000	2 dokumen	198.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	280.785.600	2 dokumen	336.942.720	155.605.000	2 dokumen	404.331.264	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	130.014.720	2 dokumen	156.017.664	94.697.000	2 dokumen	187.221.197	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48	41.554.000	29 OPD	82.439.424	45.763.000	29 OPD	98.927.309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	48	48.158.000	29 OPD	80.326.080	46.302.000	29 OPD	96.391.296	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	100	79.719.000	29 OPD	78.312.960	73.464.000	29 OPD	93.975.552	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	30.827.520	2 laporan	36.993.024	33.364.000	2 laporan	44.391.629	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
13	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	48	44.667.000	29 OPD	85.377.024	43.151.000	29 OPD	102.452.429	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	48	51.649.000	29 OPD	98.323.200	45.034.000	29 OPD	117.987.840	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			492.620.000		487.118.000	398.436.000		521.217.000				
1	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	3	405.753.000	74 sekolah	434.156.000	223.737.000	74 sekolah	464.547.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	6	49.497.000	73 pegawai	52.962.000	91.850.000	60 pegawai	56.670.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	100	37.370.000	12 laporan	0	82.849.000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.059.964.000		1.129.800.000	1.012.303.000		1.236.800.000				
1	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	370	175.829.000	6 laporan	221.500.000	155.965.000	6 laporan	238.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	100	172.601.000	3000 SP2D	247.000.000	168.256.000	3000 SP2D	271.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	100	82.303.000	10 jenis	109.000.000	71.550.000	29 OPD	119.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	100	24.386.000	700 SPM	0	32.848.000	700 SPM	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	100	18.553.000	10 kegiatan	24.600.000	12.875.000	29 OPD	27.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	100	203.814.000	800 berkas	235.000.000	168.516.000	800 berkas	258.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75.706.000	1100 SP2D	110.000.000	117.468.000	1100 SP2D	121.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	134.973.000	1500 berkas	147.000.000	122.393.000	1500 berkas	161.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	100	26.925.000	4 jenis dokumen	35.700.000	25.125.000	4 jenis dokumen	39.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
10	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	144.874.000	470 daftar gaji	0	137.307.000	470 daftar gaji	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.596.430.500		1.270.276.500	1.468.086.000		1.391.132.000				
1	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	295.064.000	1 aplikasi	356.163.500	213.226.000	1 aplikasi	391.779.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	612	214.755.000	12 dokumen	226.510.000	205.832.000	12 dokumen	249.161.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	552	129.766.500	348 laporan OPD	90.100.000	100.658.000	348 laporan OPD	96.300.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	84	92.260.000	12 laporan	127.896.000	98.652.000	12 laporan	140.685.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	100	58.023.000	12 laporan	67.170.000	76.673.000	12 laporan	70.525.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	257.634.000	120 orang	328.570.000	232.681.000	120 orang	361.427.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	88	59.170.000	1 dokumen	73.867.000	43.354.000	1 dokumen	81.255.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452.253.000	12 laporan	0	441.280.000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
9	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37.505.000	2 kegiatan	0	55.730.000	2 kegiatan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			239.892.100		354.195.677	210.280.000		389.614.368				
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	60.355.000	12 dokumen	123.483.525	43.110.000	12 laporan	135.831.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	3	14.116.000	2 jenis laporan	15.571.369	13.687.000	2 laporan	17.128.506	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2	23.541.100	2 jenis dokumen	25.895.210	8.100.000	2 dokumen	28.484.731	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	81.292.000	1500 berkas	107.870.895	107.412.000	1500 berkas	118.657.985	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12.851.000	1 dokumen	19.340.761	6.172.000	1 dokumen	21.274.837	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	47.737.000	2 dokumen	62.033.917	31.799.000	2 dokumen	68.237.309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			108.927.000		114.373.350	366.124.000		120.092.017				
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1.102.500	12 bulan	1.157.625	1.000.000	12 bulan	1.215.506	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	107.824.500	12 bulan	113.215.725	365.124.000	12 bulan	118.876.511	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.130.572.000		2.094.874.697	1.594.049.000		2.226.638.484				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	887.406.000	12 bulan	854.528.000	856.656.000	12 bulan	897.256.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	30.530.000	65 kendaraan	21.670.740	20.440.000	39 kendaraan	22.754.277	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	97.576.000	22 jenis/item	60.249.751	63.423.000	22 jenis/item	63.262.238	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.000.000	48 jenis	47.462.625	34.401.000	48 jenis	49.835.756	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32.751.000	15 jenis	36.928.238	25.946.000	15 jenis	38.774.649	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	44.422.800	17 jenis	31.718.925	7.599.000	22 jenis	33.304.871	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20.000.000	3 jenis	44.452.800	15.400.000	3 jenis	46.675.440	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12.672.000	3 jenis	4.167.450	7.880.000	3 jenis	4.375.823	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107.004.000	12 bulan	112.604.499	115.762.000	12 bulan	118.234.724	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	285.545.000	12 bulan	250.427.859	185.354.000	12 bulan	262.949.252	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446.665.200	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	540.369.060	174.211.000	3 orang jaga malam, 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	594.405.966	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125.000.000	82 file	90.294.750	86.977.000	82 file	94.809.488	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			56.356.000		75.900.000	47.005.000		83.400.000				
1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	56.356.000	1 dokumen	75.900.000	47.005.000	1 dokumen	83.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			407.954.000		567.629.000	372.431.000		624.391.000				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	206.558.000	1 perda	284.350.000	199.979.000	1 perda	312.785.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	201.396.000	1 perwal	283.279.000	172.452.000	1 perwal	311.606.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.467.008.000		2.963.642.619	3.321.697.000		3.236.630.093				
1	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT			36200 SPPT		130.700.000	36200 SPPT	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan			1 peta obyek pajak PBB		219.701.000	1 peta obyek pajak PBB	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak			100 laporan		93.595.000	100 laporan	0	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239.782.000	4 laporan, 1 pameran	333.801.169	312.639.000	4 laporan 1 pameran	350.491.227	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2	38.463.000	4 laporan	44.315.645	50.739.000	4 laporan	48.747.210	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayaninya wajib pajak BPHTB			12 laporan, 1200 wajib pajak		121.456.000	12 laporan, 1200 WP	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126.500.000	12 laporan	200.714.800	146.757.000	12 laporan	220.786.280	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	188.053.000	120 data wajib pajak	156.443.078	162.878.000	120 wajib pajak	172.087.386	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281.448.000	3 kegiatan, 36200 SPPT	396.369.138	314.563.000	3 kegiatan, 36200 SPPT	436.006.052	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	406.219.000	12 bulan	515.854.339	375.922.000	12 laporan	567.439.773	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	195.613.000	12 bulan	375.891.703	166.329.000	12 laporan	413.480.873	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	135.250.000	12 bulan	133.734.628	116.936.000	12 laporan	140.421.360	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51.357.000	6 LHP atas wajib pajak	64.096.967	63.228.000	6 LHP atas wajib pajak	70.506.664	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
14	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281.946.000	17 kelurahan	355.438.226	275.888.000	17 kelurahan	390.982.049	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119.916.000	50 SK	84.539.796	103.580.000	50 SK	92.993.776	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207.360.000	28 laporan	302.443.130	199.351.000	28 laporan	332.687.443	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140.049.000	16 laporan	0	123.350.000	16 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta		55.052.000	540 wajib pajak	0	54.670.000	540 wajib pajak	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha			1 Raperda		61.481.000	1 raperda	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB			1 perwal		35.885.000	1 perwal	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
21	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah			12 laporan		53.058.000	12 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT			800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT		138.991.000	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.135.339.563		926.736.694	529.340.000		973.073.528				
1	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80.415.000	1 unit	84.101.456	10.922.000	1 unit	88.306.529	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	784.767.000	52 unit	528.455.813	308.068.000	50 unit	554.878.603	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	24.282.563	39 unit	25.496.691	27.400.000	39 unit	26.771.525	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	238.675.000	6 jenis	280.347.834	173.700.000	9 jenis	294.365.226	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7.200.000	37 buah	8.334.900	9.250.000	27 buah	8.751.645	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
6	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, printer, scanner,ups		0	10 buah	0	0	4 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, camera, mesin penghancur kertas			12 buah		0	2 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	meja rapat, kursi rapat, karpet					0	3 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			139.610.000		157.600.000	149.099.000		165.500.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139.610.000	40000 dokumen	157.600.000	149.099.000	4000 dokumen	165.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0		0	3.926.989.000		0				
1	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda			223 bidang		66.900.000	223 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara			18 unit		429.998.000	18 unit	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang			4 laporan		51.910.000	4 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor			20 SPPT		30.000.000	20 SPPT	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.19.34	Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD			13 orang		660.288.000	13 orang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot			1 laporan		87.200.000	1 laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD			4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)		100.399.000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga			3 kegiatan penelitian		45.332.000	4 kegiatan penelitian	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah			8 jenis laporan		257.903.000	13 jenis laporan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD			185 pejabat pengelolaan barang		88.960.000	185 pejabat pengelola barang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah			10 dokumen		128.105.000	10 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.19.16	Penyelamatan asset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah			12 laporan bulanan		260.719.000	12 bulan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			2 lapangan		68.954.000	2 lapangan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak			4 paket		63.162.000	4 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
15	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir			12 kegiatan		89.303.000	4 kegiatan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun			7 rumah dinas/mess		387.532.000	6 rumah dinas/mess	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah			4 kegiatan		93.524.000	5 kegiatan	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan			4 kegiatan		33.205.000	4 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.19.15	Penjualan asset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual			3 paket		87.989.000	3 paket	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah			12 bidang		294.401.000	12 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
21	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus			18 unit		35.000.000	18 unit	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD			3 kegiatan		53.998.000	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
23	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD			11 kegiatan		105.726.000	4 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
24	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			3 gedung kantor		322.656.000	4 gedung kantor	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	RENJA 2020	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
25	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur			2 bidang		16.570.000	3 bidang	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot			3 Kecamatan		57.291.000	4 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
27	4.4.19.44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola					9.964.000	4 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		19.789.032.683		13.653.358.249	**16.365.659.000**		14.961.275.945				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4,5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian												
	4.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			350.408.000		350.408.000	399.087.000		350.408.000				
1	4.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	300	780.000	300 buah	780.000	600.000	150 buah	780.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy dan faksimili	12	29.400.000	12 bulan	29.400.000	30.300.000	12 bulan	29.400.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	6.000.000	16 unit	6.000.000	6.780.000	12 bulan	6.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang mendapat honorarium	96	100.310.000	108 ob	100.310.000	142.469.000	108 ob	100.310.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	4.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	12	7.300.000	20 jenis	7.300.000	7.300.000	20 jenis	7.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53	25.518.000	53 jenis	25.518.000	14.001.000	53 jenis	25.518.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13	21.195.000	13 jenis	21.195.000	12.985.000	13 jenis	21.195.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6	2.000.000	6 jenis	2.000.000	1.062.000	6 jenis	2.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12	4.990.000	12 bulan	4.990.000	3.000.000	12 bulan	4.990.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	4.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman dan Jumlah Peserta Rapat	12	25.208.000	390 orang dan 12 bulan	25.208.000	25.256.000	12 bulan dan 390 orang	25.208.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
11	4.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12	117.450.000	12 bulan	117.450.000	105.680.000	12 bulan	117.450.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
12	4.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	41	10.257.000	41 dokumen	10.257.000	7.235.000	41 dok	10.257.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
13	4.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga Front Office			2 orang		42.419.000	24 ob	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			175.000.000		207.960.000	178.605.000		228.389.000				
			Persentase SKPD yang menerapkan finger print	79%		95%			100%					
1	4.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15	124.035.000	16 unit	157.424.000	140.080.000	16 unit	172.424.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9	5.965.000	11 unit	5.536.000	7.315.000	11 unit	5.965.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	9	40.000.000	41 unit	40.000.000	27.810.000	55 unit	45.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	35	5.000.000	20 buah	5.000.000	3.400.000	17 buah	5.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur			188.500.000		197.900.000	107.510.000		105.000.000				
			Persentase kehadiran ASN	97%		97.50%			97.90%					
			Persentase pelanggaran disiplin ASN	0.21%		0.20%			0.18%					
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	95%		96%			97%					
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%		100%			100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%		100%			100%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	85%		90%			90%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%		97%			97%					
1	4.5.3.8	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin ASN	1050	188.500.000	1800 laporan	197.900.000	107.510.000	1800 laporan	105.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
	4.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			64.831.494		64.831.494	62.669.000		64.831.494				
1	4.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12	13.602.750	12 buku	13.602.750	12.034.000	12 bulan	13.602.750	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
2	4.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1	6.390.321	1 laporan	6.390.321	6.058.000	1 laporan	6.390.321	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
3	4.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1	10.442.523	1 laporan	10.442.523	9.927.000	1 laporan	10.442.523	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
4	4.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2	7.717.500	2 dokumen	7.717.500	9.289.000	2 dokumen	7.717.500	BKPP	Dana Alokasi Umum	63	Program prioritas RPJM
5	4.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2	19.792.500	2 dokumen	19.792.500	21.224.000	2 dokumen	19.792.500	BKPP	Dana Alokasi Umum	63	Program prioritas RPJM
6	4.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1	6.885.900	1 dokumen	6.885.900	4.137.000	1 dokumen	6.885.900	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
	4.5.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.774.283.000		3.941.551.000	3.156.843.000		3.944.361.000				
					6,926,097,000		6,975,953,000			6,651,321,400				
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:											
			Pendidikan S1	47%		48%			49%					
			Pendidikan S2	9%		9,5%			10%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100		Rp 100			Rp 100					
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46		Rp 0			Rp 0					
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%		100%			100%					
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%		5%			5%					
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.08%		0.08%			0.08%					
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%		41%			46%					
1	4.5.15.70	Manajemen Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kinerja aparatur			1 dokumen		86.595.000	348 laporan	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
2	4.5.15.71	Pengukuran IKM Layanan Kepegawaian	Laporan IKM layanan kepegawaian						1 laporan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
3	4.5.15.81	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12	125.116.000	12 bulan	125.116.000	208.429.000	12 bulan	145.116.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
4	4.5.15.79	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi Calon ASN	5000	542.567.000	3000 orang	624.589.000	499.850.000	3.000 orang	624.589.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
5	4.5.15.74	Penempatan ASN	Jumlah calon ASN yang diangkat menjadi ASN dan ASN yang mengikuti sumpah/janji	150	39.888.000	150 orang	39.888.000	46.748.000	154 Orang	39.888.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	4.5.15.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS dan PPPK, kartu ID card, DUK,buku profil, buku jabatan, layanan informasi kepegawaian	4000	187.365.000	3100 orang	195.000.000	103.514.000	3.100 orang	150.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
7	4.5.15.83	Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Jumlah Tanda Jasa Satya Lancana yang diusulkan	100	35.000.000	150 orang	40.500.000	23.317.000	150 Orang	44.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
8	4.5.15.9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	12	156.650.000	5 kasus & 6 laporan konsultasi	167.600.000	77.818.000	5 kasus dan 6 laporan	179.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
9	4.5.15.84	Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat dan Bintek	320	700.000.000	300 orang	750.000.000	280.932.000	300 ASN	800.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
10	4.5.15.82	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen pengembangan dan kompetensi	2	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	42.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
11	4.5.15.22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	180	14.000.000	150 SK	14.000.000	16.143.000	150 SK	15.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
12	4.5.15.75	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan UKPPI	30	25.477.000	25 orang	25.477.000	31.578.000	25 orang	25.477.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
13	4.5.15.24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	300	17.150.000	400 SK	17.150.000	17.125.000	400 SK	17.150.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
14	4.5.15.85	Administrasi Pemberkasan Calon ASN	Jumlah Nota persetujuan NIP dan SK CPNS	150	102.670.000	150 buah	102.670.000	45.752.000	150 Dokumen	102.670.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
15	4.5.15.28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perjanjian kontrak	64	20.000.000	66 buah	19.000.000	19.750.000	66 SK	18.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	4.5.15.30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah layanan dan update data pegawai (riwayat kepegawaian, mutasi, gelar, KP, dan pensiun)	800	63.000.000	1200 PNS	68.750.000	60.812.000	1.200 ASN	76.250.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
17	4.5.15.31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional	150	56.852.000	150 buah	56.852.000	49.558.000	150 SK	60.800.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
18	4.5.15.33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	189	330.750.000	176 orang	308.000.000	236.592.000	100 PNS	362.250.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
19	4.5.15.34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	5	101.788.000	3 kali	116.618.000	106.176.000	4 kegiatan	122.618.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
20	4.5.15.77	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen elektronik dan jumlah buku formasi	1	73.686.000	1 dokumen dan 3 buku	73.686.000	51.958.000	1 Dokumen dan 3 Buku	77.560.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
21	4.5.15.40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	450	88.875.000	450 buah	88.875.000	87.670.000	400 SK	88.875.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
22	4.5.15.41	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja ASN	6000	40.500.000	6106 dokumen	45.000.000	37.069.000	6.106 Dokumen	48.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	4.5.15.42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian dalam bentuk digital	25000	56.000.000	20000 dokumen	59.000.000	43.856.000	20.000 dok	62.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
24	4.5.15.44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK Pensiun, piagam penghargaan dan klaim otomatis	182	72.649.000	370 buah	74.980.000	109.000.000	176 SK, 176 Piagam, dan 160 Dokumen	70.318.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
25	4.5.15.55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah penyelenggaran Mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama			3 kegiatan		329.953.000	3 Kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
26	4.5.15.60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	250	622.400.000	206 orang	626.900.000	106.405.000	206 Orang	550.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
27	4.5.15.61	Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK JKM	6	45.000.000	6 orang	45.000.000	47.626.000	6 orang	45.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
28	4.5.15.63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar	10	20.000.000	18 orang	20.000.000	25.000.000	20 Orang	20.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
29	4.5.15.38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji kompetensi	410	186.900.000	100 orang	186.900.000	200.576.000	100 orang	148.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
30	4.5.15.76	Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN	Jumlah KARIS/KARSU/KPE/KARPEG/TASPEN yang diterbitkan			300 buah		44.615.000	400 buah	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
31	4.5.15.68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN			1 dokumen		47.734.000	1 Dokumen	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4.5.15.80	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Mutasi dan lolos butuh yang diterbitkan			150 SK		42.836.000	100 SK	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
33	4.5.15.54	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah monitoring dan evaluasi OPD					29.856.000	20 OPD	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan												
	4.6.15	Program Pendidikan Kedinasan			350.000.000		350.000.000	210.000.000		400.000.000				
1	4.6.15.8	Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	175	350.000.000	92 orang	350.000.000	210.000.000	82 ASN	400.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			15.000.000		15.000.000	6.571.000		15.000.000				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan arsip	1	15.000.000	12 bulan	15.000.000	6.571.000	12 bulan	15.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan												
	4.6.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			800.000.000		850.000.000	1.092.288.000		850.000.000				
1	4.6.16.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi			450 orang		30.688.000	300 orang	0	BKPP	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun 2019	TAR4	Tahun 2020	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4.6.16.13	Pelatihan Dasar bagi Calon ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	150	500.000.000	150 orang	600.000.000	911.600.000	85 orang	600.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
3	4.6.16.11	Pelatihan Fungsional bagi ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	35	300.000.000	27 orang	250.000.000	150.000.000	27 ASN	250.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
			TOTAL		5.718.022.494		5.977.650.494	5.213.573.000		5.957.989.494				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan

URUSAN : Penunjang Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4,7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan												
	4.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			512.300.000		543.800.000	424.627.000		591.600.000				
1	4.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4	37.000.000	12 bulan	38.000.000	19.200.000	4 rekening	39.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	4.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjang STNK dan PKB Kendaraan Dinas	13	6.300.000	9 Kendaraan Dinas operasional	6.500.000	6.500.000	10 kendaraan	7.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	4.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12	85.000.000	12 bulan	95.000.000	84.538.000	12 bulan	102.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	4.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	20	52.000.000	31 jenis ; 2 THL	53.000.000	55.280.000	4 komponen (Bahan, honor, retribusi, pakaian)	54.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	40	19.000.000	52 jenis	22.000.000	15.000.000	44 jenis	23.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
6	4.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor	15	20.000.000	9 jenis	22.000.000	17.000.000	9 jenis	24.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	10	11.000.000	9 jenis	14.000.000	5.000.000	10 jenis	15.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	4.7.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	10	10.000.000	8 jenis	13.000.000	0	5 jenis	15.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	4.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	5	10.000.000	12 bulan : 3 jenis surat kabar	12.500.000	3.024.000	3 jenis surat kabar	13.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
10	4.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	8	4.000.000	11 tabung	5.000.000	1.200.000	8 tabung	5.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	4.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, snack dan Minum	500	20.000.000	25 pegawai; 360 rapat ; 70 tamu	22.000.000	22.500.000	30 pegawai ; 360 peserta rapat ; 60 tamu	25.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
12	4.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	35	175.000.000	73 kegiatan	175.000.000	99.054.000	35 kegiatan	200.000.000	Jakarta, Tangerang Selatan, Cibinong, Semarang, Puwokerto, Surabaya	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
13	4.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	3	54.000.000	4 orang tenaga tidak tetap ;	55.800.000	92.636.000	4 Tenaga Honorer	57.600.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
14	4.7.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	8	9.000.000	2 jenis	10.000.000	2.695.000	2 jenis	11.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
15	4.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen dinas			75 perangko ; 28 surat/dokumen		1.000.000	74 dokumen	0	Kota Magelang dan luar Kota	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.7.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			399.000.000		383.000.000	162.460.000		601.000.000				
1	4.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor (CCTV)	0	0	4 jenis	0	0	1 unit	75.000.000	Balitbang Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
2	4.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	1000	66.000.000	400 m2 gedung A,B,C,D ; gedung selatan 88,73m2 ; halaman 1500 m2	70.000.000	62.896.000	500 m2 gedung ; 1500 m2 halaman	85.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	4.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12	210.000.000	9 kendaraan dinas operasional	230.000.000	87.564.000	10 kendaraan	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	10	25.000.000	12 jenis	30.000.000	4.000.000	7 jenis	33.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	5	40.000.000	2 jenis	45.000.000	5.000.000	6 jenis	48.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	4.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	22	8.000.000	5 unit	8.000.000	3.000.000	4 unit	10.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
7	4.7.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Roda 2	0	0	2 unit	0	0	3 buah motor	50.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	4.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur Kantor (Meja 1/2 biro dan kantor)	0	0	6 unit meja kursi pejabat	0	0	5 set meja kursi	50.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	4.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor : Laptop	2	50.000.000	2 Jenis	0	0	4 buah	0	badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	4.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			71.500.000		82.000.000	61.548.000		90.500.000				
1	4.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	14	12.000.000	4 jenis	13.000.000	26.860.000	4 jenis	14.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD dan Renja perubahan OPD	10	12.000.000	2 dokumen	13.000.000	9.994.000	2 dokumen	14.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKAP		25.000.000	4 dokumen	30.000.000	10.831.000	2 dokumen	33.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD		10.000.000	5 buku	11.000.000	6.804.000	5 buku	12.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.7.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi indikator	4	12.500.000	4 laporan	15.000.000	7.059.000	2 laporan	17.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	54	Memperteg as Skenario Kemitraan, ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	4.7.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi			338.376.000		412.970.000	459.029.000		516.307.000				
1	4.7.15.6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk teknologi dan inovasi			3 kegiatan		97.257.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang, Jawa Tengah, dan luar Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	4.7.15.1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova masyarakat yang berkualitas	17	120.000.000	3 kegiatan	140.000.000	89.690.000	3 kegiatan	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Tema RKPD 2019, Program prioritas RPJM
3	4.7.15.4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDa sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDa)	2	42.500.000	2 kegiatan	53.125.000	31.321.000	2 kegiatan	66.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	4.7.15.2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya	4	175.876.000	3 Kegiatan	219.845.000	172.094.000	3 kegiatan	274.807.000	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	4.7.15.5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya Inovasi OPD-BUMD berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan OPD-BUMD			3 kegiatan		68.667.000	3 kegiatan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	Rp 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			0		0	12.000.000		0				
					839,992,000		849,477,000			917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	26,818,000		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		150,100,000			157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		31,446,000			34,590,000				
			BKD		15,000,000		15,000,000			15,000,000				
			DPP		25,830,200		28,413,220			31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		60,000,000			70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		258,700,000			270,500,000				
			Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%			86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%			82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%			67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	0	0	12 bulan	0	12.000.000	12 bulan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	Rp 5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan												
	4.7.16	Program Penelitian dan Pengkajian			215.000.000		245.000.000	348.911.000		260.000.000				
1	4.7.16.2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1	120.000.000	1 dokumen	140.000.000	90.523.000	1 dokumen	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
2	4.7.16.3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	45	95.000.000	1 dokumen	105.000.000	73.815.000	45 buku	110.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	4.7.16.9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang			2 Dokumen		69.940.000	1 dokumen	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	68	Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
4	4.7.16.8	Pengelolaan Open Journal System	Terpublisnya jurnal ilmiah			2 volume jurnal		56.383.000	1 volume 2 nomor @ 5 judul jurnal	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Memperku at Implement asi Masterplan Smartcity
5	4.7.16.30	kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang	Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi kreatif					58.250.000	1 dokumen	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	SDGs, Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
6	4.7.16.45	Penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan PDAM Kota Magelang	Tersusunnya dokumen penelitian persepsi masyarakat tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan PDAM Kota Magelang					0	1 dokumen	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	SDGs, Program 100-0-100, Program prioritas RPJM
7	4.7.16.46	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Adanya payung hukum dengan telah tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan					0	1 dokumen	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	#########
	4.7.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan			22.000.000		23.000.000	21.280.000		27.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	12%		15%			17%					
			Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	60%		70%			75%					
			Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	5%		7%			10%					
			Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	10%		12%			14%					
			Cakupan Penguatan SIDa	45%		55%			65%					
			Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	45%		55%			65%					
1	4.7.17.2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terkelolanya pelaksanaan riset dan kebijakan dengan baik	2	22.000.000	3 kegiatan	23.000.000	21.280.000	3 kegiatan	27.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Memperteg as Skenario Kemitraan
	4.7.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi			80.380.000		100.475.000	47.100.000		125.593.000				
1	4.7.18.1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar selain Merk	10	80.380.000	10 produk yang didaftar kan	100.475.000	47.100.000	10 produk	125.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
	4.7.19	Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan			270.020.000		337.544.000	721.411.000		421.993.000				
					5,240,000,000		5,599,000,000			5,814,000,000				
			Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	14%		17%			20%					
			Presentase krenova OPD yang berkualitas	6%		8%			10%					
			Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	35%		40%			45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	12%		15%			17%					
1	4.7.19.5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi berbasis Peningkatan Kapasitas SDM			4 Produk		105.245.000	2 produk	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
2	4.7.19.14	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	Terfasilitasinya inkubator bisnis teknologi dan inovasi			2 tenant		55.566.000	2 produk	0	Kota Magelang, Puspiptek Serpong	Dana Alokasi Umum	89	Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
3	4.7.19.2	Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang	Tersusunnya policy paper bidang ekonomi/sosial/pemerint ahan di Kota Magelang					0	1 dokumen	0	Pemerintah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	SDGs, Memperteg as Skenario Kemitraan, Memperku at Implement asi Masterplan Smartcity
4	4.7.19.1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan, dan jejaring penelitian dan pengembangan	3	139.195.000	1 seminar & 1 worksho p	173.994.000	431.734.000	2 kegiatan	217.493.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF							LOKASI	SUMBER DANA	PRIO RITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	INPUT MANUAL	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
5	4.7.19.3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	4	130.825.000	4 dokumen	163.550.000	101.166.000	2 rekomendasi	204.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	83	Memperteg as Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
6	4.7.19.16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	Terfasilitasinya Jejaring Penelitian dan Pengembangan			4 seminar		27.700.000	2 kegiatan	0	Indonesia	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
7	4.7.19.9	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Anugerah IPTEK			3 Penghargaan		0	3 kepesertaan	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
			TOTAL		1.908.576.000		2.127.789.000	2.258.366.000		2.633.993.000				

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ditambahkan satu bab tersendiri tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda dari regulasi sebelumnya. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Kota Magelang dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang sebagaimana tertuang pada Tabel 6-1 dan 6-2 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk RKPD Kota Magelang Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1	PertumbuhanEkonomi	5,07%	5,18% ± 0,25%	5,04% ± 0,25%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahundasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	58.309.122,98	63.394.588,17	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	LajuInflasi	2,7%	3,57% - 5,15%	3,36% - 4,94%	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	IndeksGini	0,3438 - 0,3762	0,3435-0,3637	0,343-0,3569	0,3421-0,3523	0,341-0,3489	0,3397-0,3461	0,338-0,3438	0,338-0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0892	0,0804	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**								
1	Tingkat Kemiskinan/ AngkaKemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	7,41% – 8,09%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,61	76,9	77,26	77,61	78	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08Tahun	13,27Tahun	13,45Tahun	13,63Tahun	13,82Tahun	14Tahun	14,19Tahun	14,19Tahun
	c. AngkaHarapanHidup	76,58 Tahun	76,67 Tahun	76,71 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	10.886.000	11.083.570	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,79	95,9	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	IndeksPemberdayaan Gender	78,83	78,96	79,2	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,43% - 6%	6% -5%	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	AngkaPertumbuhanPenduduk	0,337%	0,353%	0,244%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	FokusUrusanPemerintahanWajibPelayananDasar								
a	**Pendidikan**								
	1 Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	2 Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	3 APM SD	96,51%	96,91%	97,31%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	4 APK SD	108,15%	110%	112%	114%	116%	118%	120%	120%
	5 APM SMP	74,62%	75%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
	6 APK SMP	81,92%	82%	85%	88%	90%	96%	100%	100%
	7 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
	8 Persentase sarana prasarana penyedia layananpendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)*	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
b	**Kesehatan**								
	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	3 buah(23%)	5 buah(15%)	7 buah(54%)	10 buah (77%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)
	2 Angka KematianIbu/ 100.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
	3 Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
	4 Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
	5 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	7 Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	8 Angka Prevalensi TB	128.33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
	9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
	10 Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
	11 Persentase sarana prasarana penyedia layanankesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)*	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
c	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau								
	- Privat	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasi obangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
d	**Perumahan Rakyat danKawasanPermukiman**								

NO		INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
	2	Persentasejumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
	3	Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
	5	Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4	Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	13,14%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	11,50%	12%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	**Sosial**									
	1	Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	2	Rasiotempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan *(religious centre)*	NA	0	0	1	0	0	1	2
2	**Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**									
a	**Tenaga Kerja**									
	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
c	**Pangan**								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.780 Ton	12.831 Ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	**LingkunganHidup**								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	58	62	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuangke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	**PemberdayaanMasyarakatdanDesa**								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
f	**Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana**								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	**Perhubungan**								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25
h	**Komunikasi dan Informatika**								
	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2 Persentase pelayanan berbasis teknolog iinformasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
i	**Penanaman Modal**								
	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
	2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
j	**Kepemudaan dan Olahraga**								
	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5buah	6buah	6buah	7buah	7buah	8buah	8buah	8buah
	- Regional	4buah	4buah	4buah	5buah	5buah	6buah	6buah	6buah
	- Nasional	1buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah
	- international	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14buah	17buah	17buah	17buah	17buah	17buah	20buah	20buah
	- Regional	8buah	10buah	10buah	10buah	10buah	10buah	11buah	11buah
	- Nasional	4buah	5buah	5buah	5buah	5buah	5buah	6buah	6buah
	- international	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	3buah	3buah
k	**Statistik**								
	1 PersentasePublikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
l	**Kebudayaan**								
	1 Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	2 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	3 Perlindungan situs a tau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
m	**Perpustakaan**								
	1 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
	2 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
n	**Kearsipan**								
	1 Persentasepengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
3	**Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan**								
a	**Pariwisata**								
	1 Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,40%	3,60%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
	2 Jumlah Wisatawan								
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
b	**Perdagangan**								
	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	2 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar Inklusivitas (*universal design)*	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	3 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
4	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**								
a	**Perencanaan**								
	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
	2 Persentaseusulanmasyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	**Keuangan**								
	1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	19,73%	26,34%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
	2 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
	3 Rasioke tergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 NilaiOpini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	**Kepegawaian, PendidikandanPelatihan**								
	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	**PenelitiandanPengembangan**								
	1 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
e	**Fungsi Lain**								
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentasepelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerja sama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	**APEK DAYA SAING DAERAH**								
	1 Indeks Reformasi Birorasi	50,26	56,21	57,00	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	74,80 (B)	75 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
	3 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	79%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
	4 Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (48,90 – 51,5)	Scattered (51,6 – 54,5)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
	5 Tingkat Kerukunanhidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan menuju cerdas dan berdaya saing.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Banyaknya murid (SD/MI) **dibagi** banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SD/MI) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Banyaknya murid usia (7-12 th) **dibagi** banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (7-12 th) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	Banyaknya murid (SMP/MTs) **dibagi** banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SMP/MTs) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Banyaknya murid usia (12-15 th) **dibagi** banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (12-15) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
	6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	- Dinas Kesehatan	- Data IPM
	2. AKI/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	3. AKB/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	4. AKABA	Angka	Jumlah kematian balita dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	5. Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita penderita gizi buruk berdasarkan pengukuran Berat Badan Menurut Umur serta	- Dinas Kesehatan	- Data F3 Gizi

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Berat Badan Menurut Tingi Badan berada di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Balita pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Balita yang ditimbang x 100%		
	6. Angka Kesakitan DBD	Angka	Jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibagi Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama x 10.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Kewaspadaan Dini RS
	7. Angka Prevalensi Kasus TB	Angka	Jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati selama setahun dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistim Informasi TB Terpadu
	8. Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	%	Jumlah penderita HIV usia 15-49 tahun yang ditemukan selama setahun dibagi Jumlah estimasi populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi HIV-AIDS
Meningkatnya kontribusi sektor, perdagangan bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	PDRB sektor perdagangan/Total PDRB	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Data PDRB
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dengan 3 Indeks yaitu: Indek pencemaran air, Indeks pencemaran udara dan Indeks tutupan vegetasi; Indeks Pencemaran Air sbb: Pi = √ (Ci/Li)max2 +(Ci/Li)rataan Indeks Pencemaran Udara sbb: IP NO2+IP SO2 Indeks Tutuan Vegetasi sbb: LHP + LHS	- Dinas Lingkungan Hidup	- Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas insfrastruktur Kota Magelang	1. Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	%	Panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1. Luas Kawasan Kumuh	ha	Rasio Luas kawasan kumuh (Luas Kawasan Kumuh dalam Ha)	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Kawasan Kumuh per Kelurahan
	2. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah RTLH dibagi Jumlah total rumah x 100%	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Perumahan per Kelurahan
Meningkatnya keamanan,	1. Tingkat keselamatan lalu lintas	Angka	Tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per	- Dinas Perhubungan	- Data Keselamatan Lalu Lintas

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
dan keselamatan transportasi di Kota Magelang	dan angkutan jalan		100.000 penduduk per 100.000		
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Jumlah Investor	Investor	Jumlah investor	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investor
	2. Pertumbuhan nilai investasi PMA	%	{(nilai investasi PMA th n - nilai investasi PMA th n- 1) dibagi nilai investasi th n -1 } X 100 %	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
	3. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	{(nilai investasi PMDN th n - nilai investasi PMDN th n- 1) dibagi nilai investasi th n -1 } X 100 %	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	Jumlah Stok Beras (Ton)	- Dinas Pertanian dan Pangan	- Data Ketersediaan Pangan
Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	(Jumlah pengangguran terbuka / Jumlah angkatan kerja) x 100%	- Dinas Tenaga Kerja	- Data Ketenagakerjaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Penurunan PMKS	%	(Jumlah PMKS tahun n-1 - jmlh PMKS tahun n / jumlah PMKS tahun n-1) x 100%	- Dinas Sosial	- Data Kesejahteraan Sosial
	2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	Pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala penduduk. Pendapatan perkapita tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	- OPD Lintas Sektor	- Data PDRB
	3. Angka Kemiskinan	%		- OPD Lintas Sektor	- Data Kemiskinan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	Angka	Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	- DP4KB	- Data pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	- DP4KB	- Data IPG
	2. Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	- DP4KB	- Data KDRT
Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1. Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina	%	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Sarana Prasarana Kebudayaan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	dan dikembangkan		kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%		- Data Pelaku Budaya - Data Jenis Adat Budaya
	2. Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	situs/bcb	Dihitung berdasarkan jumlah situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Situs dan Bangunan Cagar Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	1. Jumlah Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	a. Nusantara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	b. Mancanegara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	2. Lama Tinggal Wisatawan	hari	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Magelang	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Lama Tinggal Wisatawan
Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat	%	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)-(Jumlah penyakit masyarakat tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)) dikalikan100%	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP - Dinas Sosial	- Data Penyakit Masyarakat
	2. Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	%	Komponen dari indikator adalah kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama. Masing - masing komponen bernilai 25%. Rumus 100% - (% komponen konflik)	- Badan Kesbangpolinmas	- Data Konflik Masyarakat
Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1. Angka kriminalitas	Angka	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk) dikalikan 10.000	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP	- Data Kriminalitas
	2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	(Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan) dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Perda
	3. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	Jumlah penyelesaianan pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran K3

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota Magelang merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan *(stakeholders)* melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita–cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2020, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Kota Magelang Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2020, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra–OPD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2020.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO